BUKU HITAM *CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES* (CSIS) DAN KAKAK-BERADIK WANANDI DI INDONESIA

BISAKAH KITA MEMAAFKAN MEREKA?

Penyusun:

Lady Stoneheart

KATA PENGANTAR PENYUSUN

Saya pernah menempuh pendidikan di sekolah milik Cosmas Batubara, tokoh eksponen’66 yang bersama Sofjan Wanandi menghadiri rapat di rumah Fahmi Idris pada paruh pertama 1991. Rapat mana untuk pertama kalinya Benny Moerdani mengungkap rencana menggulingkan Presiden Soeharto melalui kerusuhan rasial anti Tionghoa dan Kristen (Salim Said, Dari Gestapu Ke Reformasi, Penerbit Mizan, hal. 316). Sekolah tersebut terletak di salah satu perumahan di Jakarta Barat yang berseberangan dengan komplek perumahan milik perusahaan Probosutedjo yang ketika kerusuhan 13-14 Mei 1998 adalah salah satu sasaran pembakaran. Ada kegiatan wajib di sekolah milik Cosmas Batubara yaitu melakukan retreat menurut ajaran Katolik, dan pada tahun ajaran 1992-1993 seluruh siswa kelas 5 SD retreat selama lima hari di sebuah wisma sekitar Klender yang menurut saya lebih mirip asrama biarawan/biarawati ketimbang disebut tempat retreat karena wismanya sudah sangat tua dan berdesain khas gedung tahun 1950 s.d. 1960an. Sejak awal menginjakan kaki di sana sudah terasa aura pekat yang tidak enak dan tidak nyaman tapi saya tidak bisa menjelaskan alasannya.

Adapun kegiatan selama retreat lebih menekankan kepada kedisiplinan dan melatih mental sehingga setiap kamar tidak ada kipas angin atau AC, dan selama retreat kami dipaksa bangun jam 4 pagi padahal kegiatan sehari sebelumnya rata-rata baru selesai jam 11 malam. Kami juga melaksanakan puasa sepanjang hari, berdoa semalam suntuk dan ada beberapa kegiatan yang tidak lazim seperti diminta mencium dan mengingat bau palawija atau bunga yang disimpan dalam beberapa botol kecil. Selanjutnya mata para peserta retreat akan ditutup dan setiap anak secara bergiliran diminta

menebak bau/wangi dari botol yang disodorkan.

Puluhan tahun kemudian saya membaca bahwa pada tahun 1967 tempat pendidikan Kaderisasi Sebulan (Kasebul) milik Pater Beek dipindahkan ke Klender, Jakarta Timur yang memiliki tiga blok, 72 ruangan dan 114 kamar tidur. Apakah lokasi Kasebul dengan tempat retreat adalah tempat yang sama atau berdekatan? Saya tidak tahu tapi yang jelas sampai hari ini saya masih ingat pengalaman selama lima hari yang luar biasa melelahkan tersebut padahal saya tidak ingat pengalaman retreat di tempat lain, Maria Bunda Karmel misalnya. Karena itu saya menjadi paham maksud Richard Tanter ketika dia mengatakan metode Kasebul yang melelahkan jiwa dan raga tersebut pada akhirnya akan menciptakan kader yang sepenuhnya setia, patuh kepada Pater Beek secara personal, menjadi orangnya Beek seumur hidup dan bersedia melakukan apapun bagi Pater Beek sekalipun kader tersebut sudah pulang ke habitat asalnya.

Entah apakah Kasebul masih dilakukan hari ini mengingat kekuasaan Katolik dan Paus di Roma sudah tidak sekuat puluhan tahun silam, namun saya yakin Kasebul masih ada setidaknya tahun 1992-1993 sebab Suryasmoro Ispandrihari mengaku kepada Mujiburrahman bahwa tahun 1988 dia pernah ikut Kasebul dan diajarkan untuk anti Islam. Pernyataan Suyasmoro ini dibenarkan oleh Damai Pakpahan, peserta Kasebul tahun 1984. Jadi saya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan murid-murid pertama Pater Beek seperti Jusuf Wanandi, dan Sofjan Wanandi yang mendirikan Centre for Strategic and International Studies/CSIS bila mereka sampai hari ini tidak bisa melepas karakter Ultra Kanan untuk melawan Islam. Bagaimanapun begitulah didikan Pater Beek. Tapi tetap saja mereka tidak bisa dimaafkan karena mendalangi Kerusuhan 13-14 Mei 1998 dan harus diproses secara hukum. Untuk itulah penyusunan buku ini

dilakukan, guna membongkar kejahatan CSIS.

Hasil penelitian saya sejak 1998 menemukan bahwa upaya menggerakan massa untuk menjatuhkan Presiden Soeharto sudah terjadi setidaknya sejak tanggal 8 Juni 1996. Ketika itu seseorang bernama Yopie Lasut selaku Ketua Yayasan Hidup Baru mengadakan pertemuan tertutup dengan 80 orang di Hotel Patra Jasa dengan tema “MENDORONG TERCIPTANYA PERLAWANAN RAKYAT TERHADAP REZIM ORDE BARU DI DAERAH-DAERAH” yang dihadiri antara lain oleh aktivis mahasiswa radikal, tokoh LSM, mantan tapol, Sofjan Wanandi-Megawati Soekarnoputri-Benny Moerdani dan lain-lain.

Tidak lama kemudian operasi Benny Moerdani untuk meradikalisasi rakyat dengan tujuan “mendorong” mereka bangkit melawan Presiden Soeharto akhirnya dimulai. Tepatnya pada tanggal 22 Juni 1996, Soerjadi, Presiden Direktur PT Aica Aibon Indonesia, sebuah perusahaan milik Sofjan Wanandi, dan orang yang pada tahun 1986 pernah diculik Benny Moerdani ke Denpasar dan menjadi Ketua PDI periode 1986-1992 dengan diperbantukan Nico Daryanto dari CSIS, terpilih menjadi Ketua Umum PDI menggeser Megawati Soekarnoputri dalam kongres di Medan yang juga dibiayai oleh Sofjan Wanandi.

Adapun menurut kesaksian Alex Widya Siregar, terpilihnya Megawati Soekarnoputri pada munas tahun 1993 adalah karena Agum Gumelar, mantan ajudan Ali Moertopo dan saat itu menjabat sebagai Direktur A Badan Intelijen ABRI menodong pistol ke arah peserta munas di Hotel Presiden dan mengatakan “*Siapa tidak memilih Megawati akan berhadapan dengan saya*.” Belakangan diketahui dari kesaksian Jusuf Wanandi bahwa Agum Gumelar adalah salah satu purnawirawan yang

setia kepada Benny Moerdani dan bersama AM Hendropriyono menerima perintah untuk seumur hidup menjaga Megawati Soekarnoputri.

Lalu pada tanggal 27 Juli 1996 massa terafiliasi Dr. Soerjadi menghantam massa PDI Pro Mega yang sedang berorasi di depan kantor PDI. Belakangan diketahui bahwa rencana penyerbuan ini sudah diberitahukan kepada Megawati oleh Benny Moerdani namun Megawati mendiamkan sehingga berakibat kematian ratusan pendukungnya dan menelan korban harta dan jiwa dari rakyat sekitar. Alasan Megawati tidak menarik massa Pro Megawati dari markas PDIP adalah karena penyerbuan tersebut memang sengaja dirancang sedemikian rupa supaya terlihat Megawati dizolimi rezim Presiden Soeharto dengan tujuan membangkitkan radikalisme dari rakyat untuk menjatuhkan Presiden Soeharto. Pada saat bersamaan menciptakan persepsi bahwa Megawati adalah tokoh oposisi yang paling tepat untuk menggantikan Presiden Soeharto.

Yang menarik, dalam sebuah acara televisi swasta tahun 2008, Soerjadi ternyata mengakui bahwa penyerbuan kantor PDI pada 27 Juli 1996 tersebut sebenarnya rekayasa dari Megawati Soekarnoputri sendiri. Menurut Soerjadi, bukti bahwa angkatan bersenjata tidak melakukan tindakan perlindungan adalah bukti telah terjadi semacam "*tau-sama-tau*." Dia mengatakan: "*Buktinya orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu diangkat sebagai pejabat dalam masa pemerintahan Megawati*." Sutiyoso (saat itu Pangdam Jaya) diberi jabatan sebagai Gubernur DKI. Sementara Budiman Sujatmiko bertugas memprovokasi massa Pro-Megawati untuk mati-matian membela harga diri (kantor PDI) walaupun dengan taruhan nyawa. Maka terjadilah bentrok berdarah itu (Dian Andika Winda, Perang Sejarah Para Jenderal, halaman 96).

Untuk menyegarkan ingatan kita bersama: hasil karya CSIS-Benny Moerdani-Megawati dalam Kudatuli antara lain berbagai gedung sepanjang ruas jalan Salemba Raya seperti Gedung Pertanian, Showroom Auto 2000, Showroom Honda, Bank Mayapada, Dept. Pertanian, Mess KOWAD, Bus Patas 20 jurusan Lebak Bulus – Pulo Gadung, bus AJA dibakar massa. Sepanjang Jl. Cikini Raya beberapa gedung perkantoran seperti Bank Harapan Sentosa dan tiga mobil sedan tidak luput dari amukan massa dll.

Perlu digaris bawahi bahwa rencana Benny Moerdani untuk membalas dendam dengan menurunkan Presiden Soeharto menggunakan nama Soekarno yang disandang Megawati ini pernah diungkap oleh adik Megawati sendiri yaitu Rachmawati Soekarnoputri dalam dua tajuk di harian Rakyat Merdeka edisi 31 Juli 2002 dan 1 Agustus 2002. Menurut keterangan Rachmawati Soekarnoputri, Benny Moerdani marah kepada Soeharto karena merasa jasa-jasanya tidak dihargai. Kemarahan Benny Moerdani kepada Soeharto dilatar-belakangi oleh keputusan Soeharto mencopot Benny dari posisi Panglima ABRI dan menolak keinginan Benny Moerdani untuk mendampingi Soeharto sebagai wakil presiden.

Sejalan dengan ini, Drs. H.M. Cholil Badawi dalam buku Mereka Tentang Sjafrie terbitan Red & White Publishing menulis:

"*Dalam suasana seperti itu, saya diberi informasi yang sangat penting bahwa kekuatan di tubuh Golkar yang menguasai politik di Indonesia secara mutlak itu, hakikatnya menjadi kuda tunggangan tokoh-tokoh Katholik, di antaranya Jenderal LB. Moerdani, yang menungganginya sebagai kendaraan menuju RI-II alias wakil presiden. Ambisi Benny Moerdani itu bahkan sudah mendapat dukungan dari DJ. Naro, Ketua*

Umum PPP. Diketahui pula untuk meraih ambisinya ini, Benny Moerdani bahkan siap berpindah agama. Tapi belakangan dengan melakukan re-check ke sekitar orang dekat Naro, rupanya informasi ini mengandung kebenaran."

Dalam periode waktu yang hampir bersamaan, Persatuan Rakyat Demokratik yang didirikan oleh Daniel Indrakusuma alias Daniel Tikuwalu, Sugeng Bahagio, Wibby Warouw dan Yamin mendeklarasikan perubahan nama menjadi Partai Rakyat Demokratik yang mengambil tempat di YLBHI. Selanjutnya pasca Budiman Soejatmiko dkk ditangkap, pada Agustus 1997 PRD deklarasikan perlawanan bersenjata. Deklarasi ini berlanjut dengan ledakan bom tanah tinggi pada hari 18 Januari 1998 sebagaimana diakui oleh Andi Arief dalam salah satu debat terbukanya dengan Budiman Sudjatmiko yang terjadi pada tanggal 3 Juli 2015.

http://www.merdeka.com/politik/budiman-sudjatmiko-andi-arief-perang-di-twitter.html

Bom dimaksud terjadi ledakan di kamar 510, Blok V, Rumah Susun Johar di Tanah Tinggi, Tanah Abang sesaat setelah jam berbuka puasa yang membuat ruangan seluas 4 x 4 meter tersebut hancur berantakan. Langit-langit yang bercat putih porak-poranda, atap ambrol, dinding retak, salah satu sudut jebol dan di sana sini ada bercak darah. Menurut keterangan Mukhlis, Ketua RT 10 Tanah Tinggi bahwa Agus Priyono salah satu pelaku yang tertangkap saat melarikan diri, ditangkap dalam kondisi belepotan darah dan luka di bagian kepala dan tangannya, sementara dua lainnya berhasil kabur. Setelah melakukan pemeriksaan, polisi menemukan 10 bom yang siap diledakan, obeng, stang, kabel, botol berisi belerang, dokumen notulen rapat, paspor dan KTP atas nama Daniel

Indrakusuma, disket, buku tabungan, detonator, amunisi, laptop berisi email dan lain sebagainya. Dari dokumen tersebut ditemukan fakta bahwa Hendardi, Sofjan Wanandi, Jusuf Wanandi, Surya Paloh, Benny Moerdani, Megawati terlibat dalam sebuah konspirasi jahat untuk melancarkan kerusuhan di Indonesia demi gulingkan Presiden Soeharto.

Temuan tersebut ditanggapi Baskortanasda Jaya dengan memanggil Benny Moerdani (belakangan dibatalkan), Surya Paloh dan kakak beradik Wanandi dengan hasil:

1. Surya Paloh membantah terlibat dengan PRD namun tidak bisa mengelak ketika ditanya perihal pemecatan wartawati Media Indonesia yang menulis berita kasus bom rakitan di Tanah Tinggi tersebut.

2. Jusuf dan Sofjan Wanandi membantah terlibat pendanaan PRD ketika menghadap Bakorstanas tanggal 26 Januari 1998, namun keesokan harinya mereka mengadakan pertemuan mendadak di Simprug yang diduga rumah Jacob Soetoyo bersama Benny Moerdani, A. Pranowo, Zen Maulani dan seorang staf senior kementerian BJ Habibie dan kemudian tanggal 28 Januari 1998, Sofjan Wanandi bersama keluarga kabur ke Australia yang sempat membuat aparat berang dan murka. Sofjan Wanandi baru kembali pada bulan Februari 1998.

Bersamaan dengan temuan dokumen penghianatan CSIS dan Benny Moerdani tersebut, dan fakta bahwa Sofjan Wanandi menolak gerakan “Aku Cinta Rupiah” padahal negara sedang krisis membuat banyak rakyat Indonesia marah dan segera melakukan demo besar guna menuntut pembubaran CSIS namun Wiranto melakukan intervensi dengan melarang demonstrasi. Mengapa Wiranto membantu CSIS? Karena dia adalah

orangnya Benny Moerdani dan bersama Try Soetrisno sempat digadang-gadang oleh CSIS untuk menjadi cawapres Presiden Soeharto karena CSIS tidak menyukai BJ Habibie dengan ICMI dan CIDESnya. Try Soetrisno tentu saja adalah "orangnya" Benny Moerdani, sebagaimana diungkap oleh Retnowati Abdulgani-Knapp berikut ini:

"*During the vice presidency elections, there was a split in Golkar as a few wanted Try Sutrisno as the vice-president. Golkar's civilians preferred Sudharmono, while the military faction opted for Try Sutrisno. General LB Moerdani was often named as the prime mover for support of Try Sutrisno. Politics is often filled with self-interest and those against Sudharmono alleged that he had been involved in PKI. However, the allegation could not be proven. In fact, similar accusations were levelled against Adam Malik, whose Murba party was considered to have had a close link with PKI. Sudharmono's death on 25 January 2006, proved to be a great loss for Pak Harto—aside from his position in the Yayasan, he had been very close to Pak Harto.*"

(Soeharto, The Life and Legacies of Indonesia's Second President, Marshall Cavendish Publishing halaman 162).

Kepanikan CSIS atas semua kejadian ini terlihat jelas dalam betapa tegangnya rapat konsolidasi pada hari Senin, 16 Februari 1998 di Wisma Samedi, Klender, Jakarta Timur (dekat lokasi Kasebul) dan dihadiri oleh Harry Tjan, Cosmas Batubara, Jusuf Wanandi, Sofjan Wanandi, J. Kristiadi, Hadi Susastro, Clara Juwono, Danial Dhakidae dan Fikri Jufri. Ketegangan terutama terjadi antara J. Kristiadi dengan Sofjan Wanandi sebab Kristiadi menerima dana Rp. 5miliar untuk untuk menggalang massa anti Soeharto tapi CSIS malah menjadi sasaran tembak

karena ketahuan mendanai gerakan makar. Atas hal ini Sofjan dkk menuduh Kristiadi tidak becus dan menggelapkan dana. Tuduhan ini dijawab dengan beberkan penggunaan dana terutama kepada aktivis “kiri” di sekitar Jabotabek, misalnya Daniel Indrakusuma menerima Rp. 1,5miliar dll. Kristiadi juga menunjukan berkali-kali sukses menggalang massa anti Soeharto ke DPR, dan setelah CSIS didemo, Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta (FKMIJ) yang setahun terakhir digarap segera mengecam demo anti CSIS tersebut. Di akhir rapat disepakati bahwa Kristiadi akan menerima dana tambahan Rp. 5miliar.

Karena kondisi sudah mendesak bagi Benny Moerdani, kakak beradik Wanandi dan CSIS maka mereka memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan kejatuhan Presiden Soeharto memakai rencana yang pernah didiskusikan di rumah Fahmi Idris namun dibatalkan karena diputuskan menjatuhkan Soeharto menggunakan jalur MPR pada akhir tahun 1980an yaitu kerusuhan rasial anti Kristen dan anti Tionghoa. Adapun metode kerusuhan akan meniru Malari yang pernah dilakukan oleh guru Benny Moerdani yakni Ali Moertopo dan didanai oleh Soedjono Hoemardani dan Sofjan Wanandi menggunakan GUPPI, yaitu massa yang menunggangi demo mahasiswa UI demi menggulingkan Jenderal Soemitro.

Malari yang terjadi pada tanggal 15 – 16 Januari 1976 adalah kerusuhan dengan menunggangi aksi anti investasi asing oleh mahasiswa UI atas hasutan Hariman Siregar, orangnya Ali Moertopo. Kerusuhan mana kemudian membakar Glodok, Sudirman, Matraman, Cempaka Putih, Roxy, Jakarta-By-Pass, 11 mati, 17 luka parah, 200 luka ringan, 807 mobil hancur atau terbakar, 187 motor hancur atau terbakar, 144 toko hancur dan 700 kios di Pasar Senen dibakar habis. Ini semua buah tangan Wanandi bersaudara, Ali Moertopo dan CSISnya.

Masalah yang harus dipecahkan untuk membuktikan bahwa CSIS adalah dalang Kerusuhan 13-14 Mei 1998 adalah:

1. Siapa yang membuat rencana dan mendanai (think);

2. Identitas massa perusuh (tank); dan

3. Siapa yang bisa menahan semua pasukan keamanan dan menghalangi perusuh?

Ad. 1. Pembuat rencana sudah dapat dipastikan muridnya Ali Moertopo, dalang Malari, yaitu Benny Moerdani dan Jusuf Wanandi. Sedangkan dana juga sudah dapat dipastikan berasal Sofjan Wanandi yang meneruskan peran almarhum Soedjono Hoemardani sebagai donatur semua operasi intelijen CSIS dan Ali Moertopo. Ini karena CSIS sejatinya adalah bagian dari opsus bentukan Ali Moertopo. Hal ini bisa dibuktikan dari kesaksian Bill Tarrant, mantan kontributor asing pada harian The Jakarta Post, harian berbahasa Inggris milik CSIS, bahwa gerakan-gerakan sepanjang tahun 1998 didanai oleh The Jakarta post.

Bahwa pendirian CSIS tidak lepas dari unit operasi khusus (opsus) yang dibangun oleh Jenderal Ali Moertopo dapat disimak dari kesaksian Fahmi Idris dalam buku Sofjan Wanandi, Aktivis Sejati, terbitan Gramedia halaman 28:

"*Lahirnya operasi khusus (opsus) yang merupakan unit khusus Soeharto pimpinan Jenderal Ali Moertopo juga memicu perbedaan. Saya dan teman-teman lain tidak setuju dengan bentuk-bentuk demokrasi misterius*

seperti opsus…Selain sebagai unit politik, opsus *juga menjadi unit ekonomi Soeharto. Unit ekonomi dipimpin Jenderal Soedjono Hoemardani. Sofjan menjadi sekretarisnya.*

Dalam opsus ada juga Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang merupakan think tank politik Soeharto waktu itu. Saya dan teman-teman lain tidak sependapat dengan unit itu karena bisa menciptakan kilas balik bai proses demokratisasi yang mau kita bangun."

Benny Moerdani mengendalikan Kerusuhan 13-14 Mei 1998 dari Hotel Ria Diani, Cibogo, Puncak, Bogor. Adapun SiaR milik Goenawan Mohamad yang tidak lain adalah sekutu Benny Moerdani bertugas membuat alibi bagi CSIS, antara lain dengan menyalahkan umat muslim sebagai dalang Kerusuhan 13-14 Mei 1998 dengan menulis bahwa terdapat pertemuan tujuh tokoh sipil dan militer pada awal Mei 1998 antara lain Anton Medan, Adi Sasono, Zainuddin MZ, di mana konon Adi Sasono menegaskan perlu kerusuhan anti-Cina untuk menghabiskan penguasaan jalur distribusi yang selama ini dikuasai penguasa keturunan Tionghoa.

http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1998/07/14/0014.html

Ad. 2. Sampai sekarang massa perusuh tidak diketahui identitasnya namun dalam sejarah kerusuhan CSIS, penggunaan preman bukan hal baru. Dalam kasus Malari, CSIS membina dan mengerahkan GUPPI, tukang becak, dan tukang ojek untuk tujuan menunggangi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa. Dalam kasus penyerbuan ke Timor Leste, CSIS dan Ali Moertopo mengirim orang untuk bekerja sama dengan orang lokal melawan Fretilin sehingga Timor Leste menjadi kisruh yang kemudian menjadi dalih bagi Benny Moerdani menyerbu Timor-Timur. Begitu juga

dalam kasus Kudatuli, CSIS menggunakan preman dan buruh bongkar muat dari daerah Pasar Induk Kramat Jati, 200 orang yang terlatih bela diri dari Tangerang, dan lain sebagainya.

Bahkan setelah reformasi, terbukti Sofjan Wanandi mendalangi demonstrasi yang menamakan diri Front Pembela Amar Maruf Nahi Mungkar yang menuntut Kwik Kian Gie mundur karena memiliki saham di PT Dusit Thani yang bergerak dalam usaha panti pijat ketika pemerintah dan DPR berniat menuntaskan kredit macet milik kelompok usaha Sofjan Wanandi sebagaimana diungkap Aberson Marle Sihaloho dan Didik Supriyanto, keduanya anggota fraksi PDIP. Adapun kredit macet dimaksud adalah hutang PT Gemala Container milik Sofjan Wanandi kepada BNI sebesar Rp. 92miliar yang dibayar melalui mekanisme cicilan sebesar Rp. 500juta/bulan atau baru lunas 184 tahun kemudian, dan tanpa bunga.

Ad. 3. Adalah fakta tidak terbantahkan bahwa tidak ada tentara selama kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei 1998, dan bilapun ada, mereka hanya menyaksikan para perusuh menjarah dan membakar padahal bila saja dari awal para tentara tersebut bertindak tegas maka dapat dipastikan akan meminimalisir korban materi dan jiwa. Pertanyaan yang sama pernah diungkap oleh Brigjend (Purn) Slamet Singgih saat hendak menjemput anak dari temannya di Green Garden yang terjebak massa perusuh, di mana sepanjang jalan dia menemukan tidak ada satu orang aparat pun yang berada di lokasi kejadian. Pertanyaan awam tentu saja apakah hilangnya negara pada kerusuhan Mei disengaja atau tidak?

Selain itu, dalam memoirnya berjudul Bersaksi Di Tengah Badai, terbitan Ide Indonesia, Wiranto secara tidak langsung mengakui bahwa kerusuhan rasial berkaitan dengan usaha menjatuhkan Presiden Soeharto dan

mendatangkan reformasi, antara lain dalam halaman 51:

"*Mengapa dalam judul ini saya menyatakan bahwa peristiwa kelabu pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998 adalah garis sejarah. Peristiwa tersebut tidak terjadi begitu saja, peristiwa itu juga tidak terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa itu sebenarnya merupakan puncak dari rangkaian peristiwa yang mengawalinya. Bisa dikatakan pula sebagai titik kulminasi dari suatu proses panjang dinamika kehidupan suatu bangsa yang disebut Indonesia yang sedang menginginkan suatu perubahan, baik menyangkut perubahan format perpolitikan nasional maupun perubahan yang mengara kepada perbaikan ekonomi nasional. Dan yang paling signifikan adalah adanya kehendak melakukan sirkulasi kekuasaan yang selama lebih dari tiga dasawarsa dikuasai Orde Baru yang mengedepankan dominasi kekuaan politik dari Golongan Karya.*"

Pada halaman 58 memoirnya, Wiranto semakin menegaskan bahwa Kerusuhan 13-14 Mei 1998 membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang ingin "menjebol Orde Baru," yakni sebagai berikut ini:

"*Sedangkan pihak yang menginginkan Orde Baru tumbang katakanlah Orde Reformasi-yang sebenarnya merupakan pihak yang diuntungkan atas peristiwa itu-tentu akan memandang peristiwa Mei 1998 sebagai 'kepedihan yang membawa berkah' Ini logis juga bukan? Sebab mereka atau katakanlah sebagian dari mereka, termasuk yang menggagas, memulai dan melakukan demonstrasi sebagai cara menentang Orde Baru, langsung atau tidak langsung, telah mendorong terjadinya peristiwa Mei 1998…Namun di sisi lain, tak dapat dipungkiri adanya nuansa kebahagiaan dengan keberhasilannya menjebol tembok pertahanan rezim Orde Baru yang selama ini dikenal sangat kokoh.*"

Fakta lain yang sukar dibantah adalah bahwa Kepala Badan Intelijen ABRI/BIA yaitu Zacky Anwar Makarim memberi pengakuan kepada TGPF mengenai ABRI telah memperoleh informasi akan terjadi kerusuhan Mei. Namun ketika ditanya bila sudah tahu mengapa kerusuhan masih terjadi, Zacky menjawab tugas selanjutnya bukan tanggung jawab BIA. Jadi siapa "user" BIA? Tentu saja Panglima ABRI Jenderal Wiranto yang ketika itu berperilaku aneh sebab Jakarta rusuh pada tanggal13 Mei 1998 tapi pada tanggal 14 Mei 1998 dia malah membawa KSAD, Danjen Kopassus, Pangkostrad, KSAU, KSAL ke Malang untuk mengikuti upacara serah terima jabatan sampai jam 1.30 di mana sekembalinya ke Jakarta, kota ini sudah kembali terbakar hebat.

Keanehan Wiranto juga tampak ketika malam tanggal 12 Mei 1998 dia menolak usul jam malam dari Syamsul Djalal dan dalam rapat garnisun tanggal 13 Mei 1998 malam dengan agenda situasi terakhir ketika dia membenarkan keputusan Kasum Letjend Fahrul Razi menolak penambahan pasukan untuk Kodam Jaya dengan alasan sudah cukup. Selain itu Wiranto menolak permintaan Prabowo untuk mendatangkan pasukan dari Karawang, Cilodong, Makasar dan Malang dengan cara tidak mau memberi bantuan pesawat hercules sehingga Prabowo harus mencarter sendiri pesawat Garuda dan Mandala. Bukan itu saja, tapi KSAL Arief Kusharyadi sampai harus berinisiatif mendatangkan marinir dari Surabaya karena tidak ada marinir di markas mereka di Cilandak KKO dan atas jasanya ini, Wiranto mencopot Arief Kusharyadi tidak lama setelah kerusuhan mereda.

Mengapa Wiranto membiarkan kerusuhan terjadi? Tentu saja tidak lain daripada karena dia adalah orangnya Benny Moerdani, dan setelah Soeharto lengser, Wiranto bekerja sama dengan Benny Moerdani antara

lain dengan melakukan reposisi terhadap 100 perwira ABRI yang dipandang sebagai “ABRI Hijau” dan diganti dengan perwira-perwira yang dipandang sebagai “ABRI Merah Putih.”

Tudingan bahwa Wiranto sengaja tidak memadamkan Kerusuhan 13-14 Mei 1998 juga datang dari koleganya: Letnan Jenderal (Purnawirawan) Sintong Panjaitan, yang dalam memoir berjudul Perjalanan Prajurit Para Komando halaman 3 – 4 menuduh bahwa Wiranto membiarkan kerusuhan rasial itu karena ingin dipilih lagi menjadi Menteri Pertahanan/Panglima TNI untuk rezim pasca Soeharto.

Pembiaran Wiranto atas Kerusuhan 13-14 Mei 1998 secara gamblang terlihat dari deskripsi peran Mayjend Sjafrie Sjamsudin selaku Pangdam Jaya dan Jenderal Wiranto selaku Panglima ABRI saat terjadinya Kerusuhan 13-14 Mei 1998, Atmadji Sumarkidjo, wartawan senior Suara Pembaruan, dalam buku Mereka Tentang Sjafrie, terbitan White & Red Publishing, halaman 37 – 39:

“*Sebenarnya pada waktu itu, tidak banyak yang tahu bahwa kewenangan seorang Pangdam Jaya sebagian “terbelenggu”. Berdasarkan Telegram Rahasia (TR) Panglima ABRI/Ketua Bakorstanas (Badan Koordinasi Stabilitas Nasional) No. TR/14/STANS/1998, ditegaskan bahwa komando pengendalian (kodal) operasi penanggulangan huru-hara di setiap provinsi adalah tanggung jawab Kepala Kepolisian Daerah. Butir selanjutnya TR tersebut menyebutkan bahwa Pangdam bisa mengambil alih Kodal “bila terjadi perkembangan situasi” atau bila ada perintah khusus dari Panglima ABRI.*

Jelas sekali bahwa Kepolisian, dalam hal itu Polda Metro Jaya, yang bertanggung jawab atas masalah keamanan di seluruh wilayah DKI Jakarta, sementara Pangdam Jaya hanya memberi dukungan…Harus dicatat, rapat malam itu Polda tidak memutuskan pelimpahan Kodal dari Kapolda kepada Pangdam Jaya; di samping itu Pangab juga belum menginstruksikan hal demikian…

Kata Bambang Soeharto dalam bukunya, "...situasi politik waktu itu sangat kompleks di mana kekuatan-kekuatan politik maupun pimpinan militer saling bertabrakan…" Ketika pada tanggal 14 Mei 1998 situasi semakin tidak dapat dikendalikan, polisi banyak yang tidak bertugas atau meninggalkan posnyaa; bahkan Polsek Matraman habis dibakar, sementara jumlah pos polisi lainnya dirusak massa, Pangdam Sjafrie akhirnya mengambil alih Kodal Operasi dari Kapolda Metro Jaya. Itu terjadi baru sekitar pukul 11.00 pagi itu...Seandainya Kapolri dan Kapolda [dan Panglima ABRI] sudah menyerahkan Kodal sejak hari pertama, mungkin situasi akan berbeda…"*

*Kata dalam kurung penambahan dari penyusun.

Setelah Kerusuhan 13-14 Mei 1998, Wiranto bergerak menekan informasi mengenai terjadinya pemerkosaan massal terhadap wanita etnis Tionghoa termasuk marah karena pengumuman dari TGPF bahwa terjadi pemerkosaan selama kerusuhan. Tidak berapa lama, Ita Marthadinata, relawan yang membantu TGPF dan berumur 17 tahun mati dibunuh di kamarnya sendiri dengan luka mematikan di leher sedangkan sampai hari ini latar belakang pembunuhnya yaitu Otong tidak diketahui dan dicurigai dia adalah binaan intelijen. Kecurigaan semakin menguat sebab beberapa hari sebelum kejadian, Ita dan keluarganya membuat rencana akan

memberikan kesaksian di Kongres Amerika mengenai temuan mereka terkait korban Kerusuhan 13-14 Mei 1998.

16 tahun setelah memporak-porandakan negara ini, CSIS dan para purnawirawan jenderal binaan almarhum Leonardus Benjamin Moerdani kembali berkumpul untuk menguasai Indonesia menggunakan sosok boneka bernama Joko Widodo yang akrab dipanggil Jokowi. Terlalu banyak fakta yang sulit diabaikan begitu saja bahwa CSIS adalah dalang dari pasangan Jokowi-Jusuf Kalla antara lain karena mak comblang keduanya adalah Sofjan Wanandi dari CSIS dan menjelang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi, Sofjan Wanandi dan Jusuf Kalla terfoto berada di Amerika Serikat yang patut diduga sedang membahas agenda penjualan sumber daya alam Indonesia kepada Negara asing, terutama Amerika Serikat, toh CSIS memang pada faktanya didirikan oleh seorang agen CIA bernama Pater Beek, sehingga agenda politik di Amerika yang dihadiri oleh Megawati Soekarnoputri tersebut tidak perlu diherankan.

Sekelumit kejahatan CSIS di atas telah mendorong penulis membuat buku ini yang terdiri dari kompilasi tulisan-tulisan atau hasil penelitian yang pernah dibuat orang lain tentang CSIS yang saya kumpulkan selama lebih dari 18 tahun. Saya menyusun buku ini dengan harapan dapat membuka kedok organisasi pengacau NKRI bernama CSIS dan menghentikan kegiatan mereka.

Tentu tidak mungkin membongkar seluruh kejahatan CSIS dan keluarga Wanandi seorang diri, namun penulis dapat mempermudah proses atau usaha pembongkaran tersebut dengan cara mengumpulkan bahan tentang CSIS dari yang sudah ditemukan sejauh ini dalam satu bundel sehingga orang yang bermaksud menyelidiki CSIS tidak perlu melakukannya dari

nol. Karena itu saya mengizinkan siapapun untuk menerbitkan, mengutip, memperluas dan mengedarkan buku ini baik sebagian atau seluruhnya, serta saya melepaskan semua hak cipta dan/atau hak lain terkait hak cipta yang ada atau akan ada sehubungan dengan penyusunan buku ini.

Lady Stoneheart

DAFTAR ISI

BAB I
CSIS DAN LSM INDONESIA

Dukungan resmi harian The Jakarta Post yang dikendalikan CSIS kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla serta beredarnya foto pertemuan rahasia antara Jusuf Kalla dan Sofjan Wanandi di Amerika Serikat, serta penunjukan Sofjan Wanandi menjadi Ketua Tim Ahli Wapres, membuktikan kebenaran analisa saya bahwa sosok misterius di belakang berbagai peristiwa yang melontarkan karir Jokowi dari Walikota Solo hingga menjadi capres dalam dua tahun, termasuk kedatangan agen CSIS bernama Agus Widjojo atas perintah Luhut Binsar Panjaitan (saat ini menjadi Kepala Staf Kepresidenan) adalah CSIS, lembaga tanki pemikir (*think tank*) yang didirikan agen CIA bernama Pater Beek. Tentu saja dukungan purnawirawan jenderal klik Bennny Moerdani yang dekat dengan CSIS, antara lain Sutiyoso; Fachrul Razi; Ryamizard Ryacudu; Agum Gumelar; AM Hendropriyono; anak Theo Syafei (Andi Widjojanto); Agus Widjojo, Fahmi Idris; Luhut Binsar Panjaitan; Tyasno Sudarto; Soebagyo HS; Wiranto; TB Silalahi; TB Hasanuddin dll kepada Jokowi-Jusuf Kalla semakin memperlihatkan kuatnya kendali CSIS mencengkram Jokowi.

Pemimpin CSIS adalah para anggota Operasi Khusus/Opsus yang berhasil memenangkan Perpera di Papua sehingga pulau tersebut masuk menjadi propinsi di Indonesia. Opsus juga sukses memenangkan Golkar pada pemilu 1971 padahal kala itu masih banyak partai politik besar dan politisi yang memiliki kesetiaan yang mengakar kuat kepada Orde Lama. Jadi bisa dibilang mengolah strategi jitu guna memenangkan *plebisit* atau pemilihan umum memang keahlian CSIS selama puluhan tahun silam.

Bahwa pendirian CSIS tidak lepas dari unit operasi khusus (opsus) yang dibangun oleh Jenderal Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani dapat disimak dari kesaksian Fahmi Idris dalam buku Sofjan Wanandi, Aktivis Sejati, terbitan Gramedia halaman 28:

"*Lahirnya operasi khusus (opsus) yang merupakan unit khusus Soeharto pimpinan Jenderal Ali Moertopo juga memicu perbedaan. Saya dan teman-teman lain tidak setuju dengan bentuk-bentuk demokrasi misterius seperti opsus…Selain sebagai unit politik, opsus juga menjadi unit ekonomi Soeharto. Unit ekonomi dipimpin Jenderal Soedjono Hoemardani. Sofjan menjadi sekretarisnya.*

Dalam opsus ada juga Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang merupakan think tank politik Soeharto waktu itu. Saya dan teman-teman lain tidak sependapat dengan unit itu karena bisa menciptakan kilas balik bai proses demokratisasi yang mau kita bangun."

Tapi mengapa CSIS memilih Jokowi sebagai capres Indonesia? Apakah karena Jokowi pemimpin terbaik yang dimiliki negara ini? Dilihat dari Laporan Audit BPK terhadap Pengelolaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013, Jokowi jelas adalah pemimpin yang sangat buruk sebab BPK menemukan dalam satu tahun pemerintahan Jokowi, aset Jakarta merosot dari Rp. 342trilyun menjadi Rp. 331trilyun; BPK juga menemukan ada 86 transaksi tidak wajar yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 1,54trilyun; kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp. 95,01miliar dan 3E (tidak efektif, tidak efisien dan tidak ekonomis) menyebabkan kerugian sebesar Rp. 23,13miliar. Selain itu banyak dari realisasi belanja APBD DKI Jakarta itu yang tidak didukung dengan bukti pertanggung jawaban.

Selanjutnya ICW menemukan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) belum tepat sasaran karena dari total 405ribu siswa penerima KJP tahun 2013, sedikitnya 19,4% bukan pihak yang berhak menerima bantuan atau salah sasaran. Permasalahan yang sama terjadi saat Jokowi menjabat Walikota Solo yang berdasarkan kesaksian Wahyu Nugroho, konsultan yang mengerjakan sistem Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS) bahwa terdapat kecurangan pada BPMKS karena siswa tidak mampu hanya berjumlah 65ribu orang, namun data yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Solo kepada dirinya ada 110ribu siswa, itupun banyak nama siswa ganda dan nama siswa fiktif, sehingga merugikan daerah sekitar Rp. 12,4miliar.

Temuan BPK di atas belum termasuk fakta bahwa salah satu buah kebijakan Jokowi selaku Gubernur DKI adalah dalam setahun utang luar negeri Pemprov DKI menumpuk untuk sekedar membiayai mega proyek pencitraan Jokowi yang hari ini semuanya mangkrak sebesar Rp. 75trilyun yang mana Rp. 35trilyun disisihkan untuk impor 656 unit Bus TransJakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) dari China yang belakangan karatan dan rusak; dan proyek Mass Rapit Transit yang berutang kepada pemerintah Jepang, pembangunan monorel dan pengerukan 13 kali/sungai. Yang lebih parah Jokowi telah menetapkan Rencana Induk Metropolitan Priority Area (MPA) hingga 2020 dengan biaya 1,4trilyun yen atau Rp. 394trilyun dengan sumber utangan Japan International Cooperation Agency (JICA). Selain itu, penyerapan APBD DKI Jakarta selama tiga tahun berturut-turut tergolong rendah, misalnya tahun 2014, Pemprov DKI hanya menyerap 36,07% dari total APBD yang dialokasikan.

Bukan itu saja, selama debat capres berlangsung juga terlihat dari jawaban-jawaban Jokowi bahwa dia tidak menguasai masalah, asal bunyi, dan atas

hal ini Hatta Taliwang, Direktur Institute Ekonomi Politik Soekarno Hatta menyimpulkan bahwa rakyat Indonesia telah disuguhkan calon pemimpin yang tidak kapabel memimpin Indonesia dan tertipu karena Jokowi tidak mempunyai kemampuan menjadi presiden. Contoh jawaban asal bunyi tersebut adalah berupa program andalan Jokowi untuk mengadakan drone yang hanya bisa dioperasikan dengan satelit sedangkan satu-satunya satelit Indonesia adalah milik Indosat yang dijual murah pada zaman Presiden Megawati sebesar Rp. 5trilyun padahal sekarang bernilai Rp. 100trilyun.

Majalah Time sendiri mengatakan bahwa Jokowi bukan pemimpin yang bagus http://time.com/105650/indonesias-obama-is-actually-nothing-of-the-sort/. Jadi sudah cukup jelas bahwa Jokowi sebenarnya bukan seorang pemimpin yang baik, bukan pemimpin yang bijaksana dan tidak memiliki kecakapan atau kompetensi mengurus negara ini. Kalau demikian mengapa CSIS dan pemimpinnya Jusuf Wanandi memajukan Jokowi sebagai capres untuk memimpin negeri ini? Mungkin tulisan George Junus Aditjondro, saudara seperguruan Wanandi bersaudara (Markus, Jusuf, Sofjan) di Kasebul dalam artikel berjudul: CSIS, Pater Beek SJ, Ali Moertopo dan LB Moerdani, dapat menjawab karena artikel itu memberi petunjuk kriteria orang yang biasa digunakan oleh CSIS:

"[CSIS] memilih bukan orang terbagus yang ada untuk jadi kader, tapi orang-orang yang punya cacat atau kekurangan, (orang yang ketahuan korup, punya skandal, bekas pemberontak, mereka yang ingin kuasa, ingin jabatan, ingin kaya cepat, dan sebagainya). Orang-orang demikian mudah diatur..."

Benar, CSIS, Jusuf dan Sofjan Wanandi serta kendaraan politiknya, The Jakarta Post mendukung Jokowi bukan karena dia memenuhi kriteria

sebagai pemimpin terbaik negara ini, melainkan justru karena Jokowi adalah manusia rakus jabatan dan rakus harta tapi tidak memiliki kemampuan yang memadai sehingga mudah dikendalikan oleh CSIS. Bagaimanapun filosofi CSIS yang terkenal adalah "*Kuda boleh berganti, tapi jokinya harus tetap*," yang berarti presiden boleh berganti namun pengendali mereka harus tetap yaitu CSIS. Singkatnya Jokowi adalah pemimpin boneka yaitu capres boneka CSIS, atau meminjam istilah CSIS sendiri, Jokowi adalah kuda tunggangan CSIS untuk menguasai Indonesia.

Keberadaan CSIS sedikit banyak dapat menjelaskan alasan dana kampanye Jokowi yang seperti tidak ada habisnya sebab dia memperoleh dukungan ratusan cukong-cukong terkaya di negeri ini. Darimana datangnya keajaiban para cukong berbondong mendukung Jokowi yang tidak memiliki prestasi apapun dan tidak punya kemampuan itu? Hal tersebut adalah berkat jasa Sofjan Wanandi yang adalah pemimpin para cukong Indonesia sejak masa Orde Baru sebab dia adalah juru bicara Yayasan Prasetya Mulya dan pada masa reformasi dia adalah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Memenangkan pemilu dengan melibatkan dana pengusaha dengan jaminan stabilitas berusaha dan jor-joran melibatkan ratusan artis untuk menarik pemilih yang diterapkan koalisi Jokowi-JK dalam pemilu 2014 ini sangat identik dengan strategi Opsus memenangkan Golkar pada pemilu 1974 sehingga semakin memperkuat bukti bahwa pengolah strategi pemenangan Jokowi-JK adalah tangan-tangan dingin para anak didik Ali Moertopo.

Contoh kampanye jor-jor-an ala Jokowi yang menunjukan dia memiliki dana luar biasa melimpah: pembuatan dan menyiarkan iklan ilegal Bintang Toejoeh di seluruh televisi Indonesia; memakai pesawat pribadi untuk pergi ke luar Jakarta; pemasangan iklan di Facebook dan Kaskus sebesar

Rp. 18miliar/hari sejak Maret 2014 sampai akhir masa kampanye; pemasangan iklan dan banyak website buatan Jasmev di semua jaringan milik google (google plus, adsense google, youtube dll) sebesar Rp. 40miliar/hari; memodifikasi mesin pencarian demi menimbun berita negatif tentang Jokowi; menyewa 200 artis untuk konser akbar di Gelora Bung Karno Senayan; menyewa Kartika Djoemadi dari PT Spindoctors Indonesia untuk membentuk dan memelihara pasukan dunia maya bernama Jasmev dari 2012 sampai sekarang; menyewa konsultan politik yang menyamar sebagai lembaga survei seperti Saiful Mujani (SMRC), Eep Saefulloh Fatah (Pollmark), Denny JA dan Kuskridho Ambardi (LSI), Burhanuddin Muhtadi (Indikator Politik Indonesia), Hasan Nasbi Batupahat (Cyrus Network) dan lain sebagainya.

Keberadaan CSIS, dalang kerusuhan Malari, penjajahan Timor Leste hingga Kerusuhan 13-14 Mei 1998 juga menjelaskan alasan *psywar* dan operasi intelijen digunakan secara masif demi memastikan kemenangan Jokowi-JK, dengan contoh teranyar adalah psywar terhadap Prabowo-Hatta melalui lembagai survei pendukung Jokowi-JK (SMRC, LSI, Cyrus Network), Metro TV, dan Jasmev untuk menggiring legitimasi hasil "*quick count*" yang mereka lemparkan ke publik sebagai kebenaran sementara hasil *real count* dari Prabowo-Hatta adalah salah, termasuk mengolok-ngolok TVOne yang menyiarkan hasil *quick count* versi kubu Prabowo-Hatta. Terakhir melalui pemimpin survei bayaran/konsultan politik bernama Burhanuddin Muhtadi dengan pongah berani mengatakan bahwa bila KPU mengalahkan Jokowi-JK maka hasil tersebut pasti salah.

Hebat dan jumawa sekali pasukan Jokowi-JK, padahal pencetus metode *quick count* pada Pemilu 1997, yaitu mantan peneliti LP3ES, Agung

Prihatna menemukan kejanggalan *quick count* versi Jokowi-JK yang telah menjadikan Jokowi sebagai Presiden, antara lain:

Pertama: pada awal Juli 2014 sudah mulai keluar pernyataan dari pihak Jokowi-JK bahwa ada indikasi kecurangan.

Kedua: pada masa tenang ada tiga lembaga survei, yaitu: Charta Politica, SMRC, LSI yang pimpinannya secara terbuka berafiliasi ke capres nomor urut 2, mengumumkan Jokowi-JK unggul 3 persen dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Bahkan ketua umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia, Drs. Adrinof Chaniago terbukti tidak netral dan diam-diam berada di pihak Jokowi-JK ketika mengancam akan mengeluarkan lembaga *survey* yang tidak mendukung kemenangan Jokowi-JK, padahal orang ini sekarang dipilih menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kabinet Jokowi-JK dan sekarang Komisaris Utama PT Adhi Karya Tbk (Persero).

Ketiga: pada hari pemilihan, kelompok lembaga survei seperti CSIS-Cyrus Network bersama-sama mengeluarkan hasil exit poll yang menyatakan capres nomor urut 2 unggul 3 persen dari capres nomor urut 1. Bahwa pemilu yang lalu adalah pertama kalinya ada pihak mengklaim kemenangan berdasarkan hasil *quick count* dengan data masuk baru mencapai 70%.

Menurut Agung, untuk menyampaikan informasi sampel dari daerah pelosok Papua, Medan, Sumatra, dan pulau lainnya butuh waktu sekitar satu s.d. tiga jam untuk melaporkan melalui pesan singkat (SMS) di area on spot. Hal itu mengingat tidak semua daerah zona *sampling* terdapat sinyal operator telepon selular.

Pertanyaan terakhir, mengapa Jusuf Wanandi dan CSIS jor-joran guna memastikan kemenangan Jokowi-JK? Jawabannya ada pada kalimat penutup otobiografi Jusuf Wanandi berjudul Shades of Grey pada halaman 287, yang dikutip berikut:

"*Like Sofjan, I still carry my mission in life, even in retirement. I still want to understand the issues, to meet new people, to learn new things and to somehow make things better. I have a few years left in me; I have not finished yet..*"

Jusuf Wanandi memang cukup pintar untuk tidak menyebut secara gamblang misi hidup yang dia maksud, tapi sekarang sudah cukup jelas bahwa misi hidup terakhir bagi Jusuf Wanandi adalah menghalangi kenaikan Prabowo Subianto yang pada akhir 80an sampai 90an pernah menghancurkan impian kelompok CSIS dan Benny Moerdani untuk mendeislamisasi Indonesia dan menguasai NKRI. Pernyataan ini bukan omong kosong, sebab George Junus Aditjondro pernah mengeluarkan sebuah kesimpulan bahwa Wanandi bersaudara adalah ekstrem kanan:

"*So, in a nutshell, Jusuf Wanandi and the two brothers about whom I have enough knowledge, Sofjan Wanandi and Markus Wanandi, are certainly not democrats, but rather three of the most effective destroyers of democracy in Indonesia (apart from the military and many other civilian anti-democrats). They are very right wing, they have certainly approved if not supported the anti-leftist purge in Indonesia in 1965-1966, and unlike some others of that generation, are still very proud of that 'achievement, then they also showed their very anti-Muslim attitude, by destroying the original Muslim parties and thereby had to destroy also the Christian political parties, and then they played a very important role in crushing*

nationalist feelings among the West Papuan and the Maubere peoples."

http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/02/11/0071.html

Akhirnya Wanandi bersaudara dan CSIS memang kembali berhasil memenangkan *plebisit* namun saya cukup puas sebab kemenangan tersebut sama sekali tidak mudah diperoleh sebab CSIS harus mengeluarkan semua kemampuan, daya dan upaya sampai titik penghabisan dengan mempertaruhkan semua modal mereka untuk melakukan kecurangan massif dan terstruktur demi membayar lembaga-lembaga penyelenggara pemilu untuk memenangkan Jokowi-JK. Ini bukan pernyataan sembarangan. Bila kita lihat dari penghargaan yang diberikan oleh Jokowi kepada 46 orang-orang yang membantunya meraih posisi presiden pada medio Agustus 2015 ternyata secara mengejutkan terdapat nama-nama seperti Jenderal TNI Moeldoko, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, Pimpinan KPK Busro Muqqodas, Ketua KPU Husni Kamil Manik, Ketua Bawaslu Muhammad, dan lain sebagainya.

http://news.okezone.com/read/2015/08/13/337/1195526/surya-paloh-risma-masuk-daftar-penerima-penghargaan-dari-jokowi

Menariknya, pasca pilpres 2014 ternyata kebusukan lembaga survei pendukung Jokowi-JK peliharaan CSIS terbuka lebar, sebagai contoh:

- Dewan etik organisasi lembaga survei (Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia/Persepi) yang mengeluarkan JSI dan Puskaptis karena mengeluarkan hasil *survey* Prabowo-Hatta memenangkan pilpres 2014 ternyata dipimpin oleh Nico Harjanto. Nico adalah Ketua Populi Center 2013-2016 yang terbukti dikendalikan Sunny Tanuwidjaja mantan

peneliti CSIS sekaligus Direktur Ahok Center (CDT31), *buzzer* resmi yang didirikan oleh Ahok untuk menaikan karir politiknya dan saat pilpres berkepentingan agar Jokowi menjadi presiden sehingga Ahok bisa naik menjadi gubernur DKI.

Demikian pula Sekjend Persepi Yunarto Wijaya dari Charta Politika yang terkenal rasis. Dia adalah barisan sakit hati Partai Demokrat dan SBY karena proposal *survey* manipulatif dan keinginan menjadi juru bicara ditolak SBY sehingga terus menerus mencari celah mendiskriditkan SBY dan Partai Demokrat, sangat bersemangat memfitnah JSI dan Puskaptis karena dibayar kubu Jokowi-JK. Begitu juga dengan Adrianof Chaniago, Direktur Eksekutif CIRUS Surveyor Group yang saat itu sangat semangat menyerang JSI dan Puskaptis adalah salah satu timses Jokowi-JK yang bisa dibuktikan dari fakta dia dipilih Jokowi-JK menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sampai akhirnya dipecat karena kerjanya amburadul. Namun begitu, Jokowi-JK tetap memberikan posisi Komisaris Utama PT Angkasa Pura I (Persero) kepada Adrianof Chaniago.

- KPK mengungkap Hasan Nasbi Batupahat CEO Cyrus Network dan Sunny Tanuwidjaja yang biasa bekerja sama dengan CSIS Tanuwidjaja menerima dana dari pengembang reklamasi pantai utara Jakarta sebesar Rp. 30miliar sebagai dana membentuk TemanAhok, sebuah proyek untuk meningkatkan daya tawar Ahok di mata partai politik menjelang pilkada tahun 2017. Hasan Nasbi Batupahat sendiri sebelumnya bekerja untuk Adrianof Chaniago di Cirus Surveyor Group dan sengaja menamakan perusahaannya sebagai Cyrus Network dengan tujuan mengelabui klien-klien Adrianof Chaniago dengan kemiripan nama

Cyrus-Cirus. Pada pilkada DKI 2012 Hasan bekerja sama dengan Handi Muluk, anggota Dewan Etik Persepi yang memecat JSI dan Puskaptis, berusaha untuk masuk gerbong Jokowi namun terhalang karena sudah ada Adrianof Chaniago. Akhirnya Hasan Nasbi Batupahat merapat ke Gerindra yang mengusung Ahok tapi kerjanya tidak benar dan pertanggungjawaban duit selama kampanye tidak jelas.

- Kabid. Hub. Antar Lembaga Persepsi Fadjroel Rahman dari Pedoman Research adalah timses Jokowi-JK dan mendapat hadiah berupa posisi Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Selain itu, pada musim kampanye pilpres 2014, Saiful Mujani dari SMRC tertangkap basah membagi uang kepada masyarakat agar mereka memilih Jokowi-JK.

LSM Pendukung Jokowi Adalah Penghianat Bangsa

"*LSM sudah terbiasa bekerja berdasarkan pesanan proyek dengan menerima dari dana funding agency (lembaga-lembaga keuangan) internasional. Funding agency sengaja dibentuk oleh korporasi (perusahaan-perusahaan) asing yang menyediakan dana tak terbatas untuk bisa mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya. Caranya dengan mengibarkan panji-panji demokrasi, HAM, antikorupsi, lingkungan hidup, dan lain-lain*."

*"Kritik Terhadap Kaum Post Marxist", 1997, James Petras, sosiolog dari Universtias Binghampton, Amerika Serikat.

Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa LSM Indonesia khususnya LBH Jakarta sudah menerima dana asing sejak tahun 1970an melalui USAid, dan hal ini sesuai dengan fakta yang diungkap buku Ideal Illusions – How

the US Government Co-opted Human Rights bahwa sejak tahun 1970 Amerika telah menggunakan HAM sebagai senjata ideologis Amerika. Hari ini 90% dari LSM Indonesia adalah penerima rutin dana-dana pihak asing, terutama dana yang berasal dari Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Counterpunch pernah membeberkan bahwa tujuan NGO/LSM di sebuah negara asing dibiayai Amerika adalah supaya mereka dapat menjadi alat menyebarkan kebijakan Amerika Serikat di negara setempat. Sejalan dengan itu, Jacob Levich pernah menulis bahwa LSM memainkan peranan penting dalam perubahan rezim sebuah negara yang direkayasa Amerika sebagaimana digariskan dalam National Security Strategy. Seperti halnya kejatuhan Presiden Soeharto pada tahun 1998 adalah tidak bisa dilepaskan dari "donasi" sebesar USD 26 juta dari Presiden Clinton kepada LSM-LSM Indonesia dengan tujuan menjatuhkan Pak Harto menggunakan segala cara apapun yang tersedia, termasuk kekerasan, teror, agitasi dan provokasi. Selain itu kejatuhan Pak Harto tidak bisa dilepaskan dari uang jutaan dolar yang diterima Goenawan Mohamad untuk membangun Institut Studi Arus Informasi/ISAI, Kelompok Utan Kayu, website SiaR yang bertugas melakukan provokasi dan agitasi dengan tujuan akhir menghancurkan kredibilitas Orde Baru.

Fakta di atas diperkuat oleh Majalah Gatra edisi 31 Januari 1998 yang melaporkan bahwa pada tanggal 18 Januari 1998 ada bom rakitan meledak prematur karena tidak dirakit dengan benar berlokasi di Rumah Susun Johar di Tanah Tinggi, Tanah Abang. Saat aparat keamanan menyelidiki lokasi ledakan, mereka menemukan sebuah laptop yang terdapat arsip *e-mail* yang berisi keterlibatan Hendardi, pendiri PBHI yang selama pilpres begitu gigih menyerang Prabowo-Hatta, dalam hal mencari pendanaan untuk melakukan kerusuhan.

Isi dari *email* dimaksud adalah:

"*Kawan-kawan yang baik! Dana yang diurus oleh Hendardi belum diterima, sehingga kita belum bisa bergerak. Kemarin saya dapat berita dari Alex [Widya Siregar] bahwa Sofjan Wanandi dari Prasetya Mulya akan membantu kita dalam dana, di samping itu bantuan moril dari luar negeri akan diurus oleh Jusuf Wanandi dari CSIS. Jadi kita tidak perlu tergantung kepada dana yang diurus oleh Hendardi untuk gerakan kita selanjutnya*."

Patut dicatat bahwa dalam salah satu debat terbukanya dengan Budiman Sudjatmiko yang terjadi pada tanggal 3 Juli 2015, Andi Arief sudah mengakui bahwa ledakan bom tanah tinggi adalah pekerjaan PRD dan bukan rekayasa intelijen Orde Baru sebagaimana pembelaan anggota-anggota PRD dan aktivis-aktivis 1998 saat itu.

http://www.merdeka.com/politik/budiman-sudjatmiko-andi-arief-perang-di-twitter.html

Nurjaman Center for Indonesian Democray (NCID) pernah menyampaikan penyesalan mereka atas maraknya LSM di Indonesia yang dibiayai asing dan karena itu tidak jelas kredibilitasnya dalam memberikan berbagai keterangan terkait proses demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia dan dalam hal ini LSM-LSM Indonesia tersebut lebih sering menjadi kendaraan negara asing untuk ikut campur dalam pemerintahan Indonesia. NCID memberi contoh beberapa LSM Indonesia yang hidup tergantung dana asing, antara lain: donatur terbesar Kontras adalah Kairos, sebuah lembaga berbasis di Kanada yang menulis di situsnya bahwa Kontras tidak akan bisa mempertahankan perannya di Indonesia tanpa sokongan dana

Kairos; dan Imparsial yang memiliki afiliasi dengan HIVOS yang memberi donasi melalui Yayasan Indonesia Untuk Kemanusiaan.

Menurut NCID, ketika para LSM Indonesia mulai tergantung kepada bantuan asing, maka independensi mereka hilang. Haris Azhar dari Kontras misalnya sering berkunjung ke Uni Eropa dan negara barat lain dengan tujuan memberikan informasi mengenai Indonesia khususnya perihal pelanggaran HAM dengan maksud menjaga aliran donasi dari luar negeri kepada Kontras. Demi menjaga aliran donasi, maka Kontras harus terus membuat kesan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih suram.

Sejalan dengan kritikan NCID, pada tahun 1992, Sudomo pernah memberi peringatan kepada LBH Jakarta dan Walhi supaya tidak menerima donasi asing atau bantuan asing hanya sekedar untuk mencemarkan nama Republik Indonesia sebagaimana terjadi akhir Agustus 1991 di mana pihak yang menamakan diri mereka sebagai Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial menyampaikan sebuah makalah tentang Indonesia kepada negara-negara barat dengan membawa beberapa isu antara lain Waduk Kedung Ombo, larangan becak untuk fasilitasi mobil mewah, dan penangkapan ikan di Papua merusak lingkungan. Peringatan serupa kembali diberikan pemerintah tahun 1996 melalui Mendagri Yogie SM yang mensinyalir ada beberapa LSM menghembuskan citra buruk Indonesia ke dunia internasional.

Jadi LSM-LSM Indonesia bukan pihak yang pasif dalam masalah donasi, sebaliknya sebab mereka sangat luar biasa aktif mengunjungi negara-negara donatur sekedar untuk menceritakan “keburukan” dan “horor” di Indonesia dengan harapan menerima donasi besar, padahal mereka hanya menjadi tempat pencucian uang lembaga donatur asing seperti pernah

disampaikan oleh Staff Ahli Kementerian Dalam Negeri, Roydonnyzar Moenek. Tidak heran pemerintah pernah menyampaikan maksud mereka untuk melakukan audit terhadap donasi-donasi yang diterima oleh LSM-LSM di Indonesia, namun ditolak oleh para LSM itu.

Framing NGO Indonesia untuk menjelekan nama Republik Indonesia di luar negeri tersebut masih berlangsung sampai sekarang seperti yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) baru-baru ini ketika menyampaikan makalah kepada Uni Eropa berisi isu-isu yang dibungkus sedemikian rupa seolah menggambarkan telah terjadi berbagai kasus kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan di Papua selama lima tahun terakhir yang menurut mereka tahun 2013 saja terjadi 22 kasus. Mengapa AJI tidak melapor kepada otoritas Indonesia seperti polisi, presiden, DPR, DPRD Papua, Komnas HAM, Provost, Ombudsman, Dewan Pers, dll?

Apa yang dilakukan oleh AJI di sini sama dengan motivasi Kontras menjelek-jelekan Indonesia di luar negeri yaitu tidak lepas dari pertarungan perebutan donasi yang terjadi di antara LSM Indonesia beberapa tahun terakhir, di mana karena penegakan HAM Indonesia sudah sering mendapat pujian dari beberapa forum internasional maka persentase donasi untuk masalah HAM di Indonesia sudah jauh berkurang dan NGO yang bergelimang donasi sekarang adalah NGO yang bergerak di bidang anti korupsi sebab fokus para donatur asing di Indonesia sudah berubah menjadi isu korupsi. Oleh karena itu untuk menjamin kelancaran donasi dari negara asing maka AJI, Kontras dll perlu menciptakan framing sedemikian rupa bahwa Indonesia masih negara anti HAM, dan bahwa Indonesia adalah negara biadab yang tidak menghormati HAM.

Standar Ganda LSM Indonesia

Ketergantungan LSM Indonesia terhadap donasi asing menjawab alasan mereka diam tidak bersuara ketika Papua Nugini yang merupakan negara protektorat Australia membakar perahu nelayan Indonesia dan membuat para nelayan kembali ke Indonesia dengan berenang di lautan sehingga lima di antaranya tenggelam. Begitu juga menjawab alasan mereka berdiam diri terhadap fakta terjadi pelanggaran hak asasi manusia oleh Australia kepada para pengungsi dengan menolak suaka yang merupakan hak asasi pengungsi dan para pengungsi bahkan menerima perbuatan rasisme dari prajurit Australia yang membakar tangan pengungsi dalam perjalanan ke Indonesia. Apakah LSM seperti Kontras, Imparsial, LBH Jakarta, PBHI dan lain-lain akan diam saja bila pemerintah Indonesia yang melakukan hal yang sama?

Demikian pula donasi sudah menjawab alasan mereka diam tidak bersuara dan tidak berani mengatakan apa-apa pada saat terjadi pelanggaran HAM berat Amerika Serikat kepada para tahanan di Guantanamo Bay, pelanggaran HAM di Irak dan Afganistan yang buktinya ada di situs Wikileaks melalui Catatan Harian Perang Irak dan Catatan Perang Afganistan atau pembunuhan oleh tentara Amerika kepada wartawan Irak yang diberi judul *Collateral Murder*. Kenapa tidak ada rilis pers atau berita yang menyatakan NGO Indonesia mengecam pelanggaran hukum perang (humaniter) dan pelanggaran HAM yang dilakukan Amerika? Mereka juga tidak bersuara ketika Israel membantai rakyat sipil Palestina. Hal ini tentu berbeda dengan semangat mereka Prabowo ke pengadilan HAM untuk apa yang terjadi tahun 1998 walaupun sudah terbukti Prabowo tidak bersalah.

Indra J. Piliang dalam kultwitnya mengatakan terdapat bahaya dengan *framing-framing* ala LSM seperti ICW dan Kontras karena *framing* mereka sering menerapkan standar ganda tergantung standar para donatur sebab LSM tersebut harus pintar-pintar memainkan isu yang disenangi oleh para donatur asing dan *funding agency*. Tidak berlebihan bila dikatakan untuk cepat kaya di Indonesia sangat mudah yaitu membuat LSM di bidang demokrasi, lingkungan, HAM, anti korupsi dll, kemudian menciptakan framing di media massa dengan tujuan akhir membuat proposal dana kepada donatur asing, malah ada orang yang pekerjaan utamanya adalah "beternak LSM". Selain itu Indra J. Piliang juga mencatat salah satu bahaya dari LSM binaan asing tersebut adalah mereka sangat sering mendorong undang-undang pesanan asing dan tentu saja korupsi di kalangan LSM sangat besar, misalnya dana Pemilu 1999 dan dana bencana Aceh dan daerah lain.

Fakta standar ganda LSM/NGO/Ornop di Indonesia yang berkorelasi dengan siapa donatur mereka membuktikan kebenaran pernyataan Fahri Hamzah bahwa aktivis HAM yang menyerang kubu Prabowo-Hatta dengan isu HAM sudah tidak netral karena mereka menerima uang dari capres Jokowi-JK melalui Pemda DKI Jakarta sebesar Rp. 2,1miliar pada tahun 2013 dengan komposisi Rp. 1,8miliar kepada YLBHI dan Rp. 300juta kepada LBH Jakarta. Adapun YLBHI dan LBH Jakarta sudah mengakui menerima dana tersebut tapi menolak tudingan bekerja tidak profesional. Terlepas bantahan tersebut namun bukti kedua lembaga ini tidak netral selama pilpres sangat nyata, yaitu selama pilpres baik YLBHI maupun LBH Jakarta mendiamkan kasus pelanggaran HAM seperti kasus Talangsari, pembunuhan Munir, Timor Leste yang melibatkan anggota inti timses Jokowi-JK antara lain Wiranto, Sutiyoso, Agum Gumelar, Luhut Panjaitan, Abdullah Mahmud Hendropriyono, Muchdi Pr dll.

BAB II
CATATAN SEPUTAR CSIS

A. BERDIRINYA CSIS

Bab ini akan membahas sejarah pendirian CSIS yang disarikan dari memoir Jusuf Wanandi berjudul “Menyibak Tabir Orde Baru, Memoar Politik Indonesia 1965-1998” terbitan Kompas Gramedia, edisi 2014.

CSIS lahir pada 1 September 1971 dengan tim kecil dipimpin Hadi Soesastro dan Clara Joewono, yang pernah menjadi aktivis mahasiswa pada tahun 1965 dan hingga kini tetap aktif di CSIS. Dari awal, kami menerapkan dua pendekatan. Pertama, memberikan saran, pemikiran dan dukungan kepada pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti DPR, partai politik (terutama Golkar), bisnis dan LSM, baik diminta atau tidak. Kedua kami ingin menjangkau komunitas regional dan internasional untuk memberikan informasi dan penjelasan tentang Indonesia mengenai kebijakan pembangunan dan kondisi Negara-negara tetangga dan wilayah yang lebih luas lagi (halaman 136).

Dukungan Ali Moertopo juga memastikan bahwa pendanaan untuk CSIS tidak menjadi masalah. Ketika kami minta bantuan kepada Pak Ali dan Pak Djono, mereka menelpon beberapa pengusaha dan cukup mengatakan, “*Tolong bantu.”* Kami mendapatkan dana abadi, sumbangan, dan gedung untuk kantor. Pak Ali menghadiahkan kantor pertama kami di Jalan Kesehatan III/13, Jakarta Pusat. Agar kami dapat mandiri secara keuangan, kami membentuk Yayasan Proklamasi yang kemudian menjadi Yayasan CSIS. Adik Saya, Sofjan Wanandi, menjadi bendahara yang mengurus

penggalangan dana (halaman 136). Diungkap dalam biografi Presiden Soeharto bahwa dana CSIS berasal dari uang Pertamina:

"On the other side of the technocrats was a different think tank. A few Chinese intellectuals had aligned themselves with Ali Moertopo since 1966. One of the best known was Liem Bian Kie, who became his assistant in 1967. Another ally was Harry Tjan. At that time, some referred to Ali Moertopo and Soedjono Hoemardhani as the "financial generals". They were alleged to have used the influx of foreign investments, combined with oil revenues, to form a sizeable pool of funds as their patronage machinery. A think tank, the Center for Strategic and International Studies (CSIS) was established in early 1970. Ali Moertopo and Soedjono Hoemardhani were among its creators. Liem Bian Kie and Harry Tjan had been active members from the start. CSIS was the academic incubator for the New Order's major policies. A coalition soon took place between Ali Moertopo, Soedjono Hoemardhani and Ibnu Sutowo. They were then the Head of Intelligence, Inspector General of Development and Head of Pertamina, respectively."

(Retnowati Abdulgani-Knapp, halaman 126)

Bahwa pendirian CSIS tidak lepas dari unit operasi khusus (opsus) yang dibangun oleh Jenderal Ali Moertopo dapat disimak dari kesaksian Fahmi Idris salah satu aktivis angkatan'66 dalam buku Sofjan Wanandi, Aktivis Sejati, terbitan Gramedia halaman 28:

"*Lahirnya operasi khusus (opsus) yang merupakan unit khusus Soeharto pimpinan Jenderal Ali Moertopo juga memicu perbedaan. Saya dan teman-teman lain tidak setuju dengan bentuk-bentuk demokrasi misterius*

seperti opsus…Selain sebagai unit politik, opsus juga menjadi unit ekonomi Soeharto. Unit ekonomi dipimpin Jenderal Soedjono Hoemardani. Sofjan menjadi sekretarisnya.

Dalam opsus ada juga Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang merupakan think tank politik Soeharto waktu itu. Saya dan teman-teman lain tidak sependapat dengan unit itu karena bisa menciptakan kilas balik bai proses demokratisasi yang mau kita bangun."

Peran saya dan kawan-kawan senior di CSIS antara lain adalah menulis memo kepada Presiden Soeharto, pekerjaan yang saya dan kolega saya telah lakukan sejak 1971. Memo itu diketik dan biasanya tidak lebih dari dua halaman dan dikirim kepada ajudan Soeharto melalui kurir. Kami menulis mungkin satu atau dua memo setiap bulan. Sekali atau dua kali setahun, kami bertemu dengan Presiden Soeharto untuk membahas pemikiran kami lebih rinci. Kalaupun kami tidak berhadapan dengan langsung, kami tahu bahwa memo-memo kami dibaca Presiden Soeharto. Soeharto membaca semua dokumen dan surat yang disampaikan kepadanya. Biasanya sekretaris Negara mengantarkan tumpukan dokumen pada malam hari dan keesokan pagi semua surat dan dokumen itu sudah selesai dibaca, dengan instruksi dan komentar yang tertulis di bawah atau di sisi halaman. Dalam sehari Sekretaris Negara memastikan agar instruksi disampaikan kepada menteri atau pejabat terkait. Luar biasa, dia memang orang yang sangat disiplin dan kuat (halaman 313).

Meski demikian, sampai akhir tahun 1980-an, kami di CSIS cukup nyaman dalam hubungan kami dengan Soeharto. Kami adalah sebuah think tank yang memberikan masukan kepada Presiden. Kami bukan bagian dari pemerintah, tetapi kami mempunyai hubungan khusus yang memberikan

kami akses dan perlindungan. Ketika Benny Moerdani menjadi Panglima ABRI, ia menjadi orang terkuat nomor dua di negeri ini. Ia menjadi pelindung kami setelah Ali Moertopo meninggal (halaman 313).

Pada bulan Maret 1988, saya mendengar berita mengenai nasib CSIS, persis pada hari yang sama ketika kabinet baru mengadakan pertemuan perdana. Benny Moerdani diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan, jabatan yang terdengar hebat, tetapi tidak memiliki kekuasaan yang nyata. Ia masih menjabat Panglima Pangkopkamtib untuk beberapa bulan lagi setelah pengangkatannya sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. (halaman 295).

"*Saya tidak mau ada hubungan apa pun lagi dengan CSIS, dan saya perintahkan kalian juga demikian*," begitulah Presiden Soeharto memerintahkan kabinetnya (halaman 295).

Agar tidak ada kesalahpahaman, Presiden Soeharto menyampaikan pesan yang sama kepada Gubernur Jakarta Letjen TNI Wiyogo Atmodarminto. Ia tahu Wiyogo dekat dengan kami dan memperingatkannya untuk tidak berhubungan dengan "*orang-orang itu*". Sekretaris Negara Moerdiono dan Benny Moerdani menyampaikan berita itu kepada kami. Kami tidak pernah mendengar apapun sejak memo terakhir yang saya kirim pada September 1987. Setelah dua dekade menjadi penasihat Presiden Soeharto, kami menjadi *persona non grata*. Rasanya aneh, seolah ini adalah akhir dari sebuah era bagi kami semua (halaman 295).

Berdasarkan catatan Todung Mulya Lubis dalam buku Sofjan Wanandi, Aktivis Sejati, halaman 393-394, diketahui bahwa setelah terpental dari Orde Baru dan keputusan Presiden Soeharto mendekat kepada Islam dan

membentuk ICMI, CSIS justru menjadi tempat berkumpulnya kelompok yang bermaksud memberontak terhadap pemerintahan Presiden Soeharto:

"*Bersamaan pada waktu itu muncul pula gejala sektarianisme yang antara lain terlihat ketika Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) terbentuk. Pada waktu itulah Gus Dur, Marsilam Simanjuntak, Rachman Tolleng, Bondan Gunawan, Daniel Dakidae dan banyak lagi berkumpul merumuskan penolakan terhadap otoriterisme dan sektarianisme. Forum Demokrasi adalah awal dari perlawanan politik.*

Di sini kami juga mulai bersinggungan dengan CSIS dan kelompok Katolik yang juga ikut dalam pendirian Forum Demokrasi. Perlu diketahui bahwa salah satu wakil ketua Forum Demokrasi yang mendampingi Gus Dur adalah Alfons Taryadi dari harian Kompas, yang saya percaya bukanlah representasi dari CSIS. Tetapi pada waktu-waktu itu kontak dengan CSIS mulai terbuka.

Perlu dicatat bahwa di awal tahun 1990-an pamor CSIS mulai redup antara lain karena terjadinya perubahan peta kekuasaan Orde Baru. Meninggalnya Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani, serta tersingkirnya Benny Moerdani, membuat CSIS sedikit agak gamang menghadapi perubahan. Kekhawatiran CSIS akan bahaya sektarianisme membuat orang-orang Katolik melihat Gus Dur sebagai sosok yang menjadi alternatif.

Di sinilah titik temu itu terjadi, "a marriage of convenience". Dari situ pertemuan tercipta dan pada satu kali saya ikut menghadiri acara di gedung CSIS untuk pertama kali, dan ini membuat media agak heboh karena tiba-tiba saya mampir di gedung CSIS. Saya masih ingat berita

yang dimuat di Majalah Tempo yang mencatat dengan jeli peristiwa kedatangan saya dan beberapa aktivis lainnya ke gedung CSIS. Dari situlah saya mulai berdialog, terlibat dan mengenal kelompok CSIS sampai pada satu ketika saya diajak untuk bergabung menjadi anggota Dewan Pembina di CSIS."

B. KASBUL, KADERISASI ALA CSIS

Kasbul merupakan ajang bagi Pater Beek untuk mendidik kader-kader Katolik yang militan. Awalnya, tempat kaderisasi terletak di Asrama Realiono, Yogyakarta. Letak asrama ini tak jauh dari kampus Universitas Sanata Dharma di Jalan Gejayan [sekarang Jalan Afandi], Yogyakarta. Di tempat inilah para kader Katolik muda dididik untuk menghadapi kaum Komunis dan Islam.

Pater Beek memang dikenal sebagai rohoniawan yang anti Komunis. Sebelum peristiwa 1965 pecah, Pater Beek mendidik mahasiswa-mahasiswa Katolik dalam Kasbul untuk melawan kekuatan Komunis. Richard Tanter [1991] menyatakan:

"*Bagi [Pater] Beek, ada dua musuh besar bagi Indonesia maupun bagi Gereja, yaitu Komunisme dan Islam, di mana ia melihat keduanya memiliki banyak keserupaan: sama-sama memiliki kualitas ancaman."*

Oleh sebab itu, Pater Beek mengkonsolidasi kekuatan untuk melawan Komunisme yang saat itu kuat di Indonesia. Ia kumpulkan mereka untuk diberi pendidikan. Terutama yang dihimpun adalah mahasiswa-mahasiswa Katolik dari berbagai daerah. Dalam buku berjudul Bayang-Bayang PKI [1996] disebutkan:

"*Selama bertahun-tahun Pater Beek memang telah menghimpun dan membina anak-anak muda, terutama mahasiswa, untuk ditempa sebagi kekuatan anti-komunis. Basis utamanya adalah PMKRI [Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia], yang saat itu merupakan organisasi underbouw Partai Katolik. Tokoh-tokoh PMKRI pula yang kemudian banyak terlibat dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia [KAMI]. Dengan pengaruh dan jaringan anti-komunis yang kuat itu, tak heran banyak dugaan bahwa Pater Beek memainkan peranan penting dalam gerakan anti-komunis. Antara lain, ia sering disebut-sebut sebagai penghubung antara AD dan CIA.*"

Keterlibatan Pater Beek adalam gerakan anti Komunis juga ditulis oleh Oei Tjoe Tat [1995] dalam memoarnya. Ia memberikan kesaksian berikut:

"*Pater Beek itu, saya lihat pertama kali setelah saya dibebaskan. Saya di dalam tahanan mendengar dari orang-orang PNI, BAPERKI, PKI, dan sebagainya bahwa Pater Beek ini adalah agen CIA. Dia membina pemuda-pemuda keturunan Katolik, terutama pemuda-pemuda keturunan Tionghoa-Katolik, untuk antara lain membakar gedung Kedubesan RRT, membakar gedung Universitas Res Publika dan menghancurkan semua gedung-gedung PKI atau rumah-rumah orang PKI. Ini dianggap ultra-kanan. Selama saya mendengarkan itu, saya di RTM. Bagaimanapun saya Katolik. Jadi, ada seorang pastur Katolik begitu, saya diam. Tapi pada waktu saya diperkenalkan dengan Pater Beek dan datang ke sini [RTM-red] kemudian, dia mengaku. Dia bilang begini pada saya, "Kalau pak Oei perlu sesuatu dari…, saya bisa. Ali Moertopo, semua jenderal." Saya dengar dia ini membantu Liem Bian Koen dan Liem Bian Khie, Sumarlin. Semua ini di bawah dia. Dia juga kuat di PMKRI.*"

Ketika PKI ditumpas pasca Peristiwa 1965, Pater Beek, lewat Ali Moertopo, menyerahkan 5.000 nama orang-orang PKI pada CIA. Hal ini terungkap ketika wartawati AS, Kathy Kadane, yang mewawancarai mantan pejabat Kedubes AS di Jakarta, pejabat CIA dan Deplu AS. Ia mendapatkan pengakuan dari nara sumbernya itu. Salah satu yang diwawancarai adalah Lydman—mantan wakil kepala misi Kedubes AS di Jakarta. Dalam wawancara tersebut Lydman mengatakan pengumpulan nama-nama orang PKI selain dilakukan oleh stafnya juga dibantu oleh Ali Moertopo.

Lantas bagaimana nasib 5.000 nama orang-orang komunis tersebut? Robert J Martens—yang saat Peristiwa 1965 pecah menjabat sebagai Sekretaris I Kedubes AS—melakukan pengecekan terhadap 5.000 orang dalam daftar itu. Dari hasil pengecekannya didapatkan semua orang yang terdapat dalam daftar itu ditangkap dan kemudian dibunuh. Menanggapi pembunuhan tersebut, Pater Beek dalam wawancaranya dengan Aaad van Heuvel [1993] dengan ringan mengatakan: "*Masalahnya mereka atau kita [yang dibunuh]*."

Setelah orang-orang Komunis ditumpas, entah apa alasannya, pada tahun 1967 tempat pendidikan Kasbul di pindahkan ke Klender, Jakarta Timur. Menurut Mujiburrahman [2006], tempat di Klender dikelola oleh seorang suster bernama Mathilda Maria Van Thienen. Dari wawancara dengan sang suster, Mujiburrahman mendapatkan keterangan bahwa asrama di Klender terdiri dari tiga blok dengan 72 ruangan dan 114 tempat tidur. Biasanya Pater Beek akan datang empat kali dalam setahun memimpin acara Kasbul.

Sistem Kaderisasi dalam Kasbul

Dalam setiap pelatihan Kasbul, biasanya diikuti oleh 100 orang—sepuluh di antaranya adalah perempuan. Mereka merupakan kader-kader Katolik terpilih dari berbagai daerah dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Supaya bisa mengikuti kaderisasi yang sifatnya rahasia ini, seseorang harus mendapatkan rekomendasi dari romo di tempatnya berasal. Pendanaan dari acara ini sebagian besar didapatkan dari luar negeri, terutama Belanda dan Jerman.

Aturan Kasbul memang cukup berat. Seseorang yang telah mengikuti Kasbul dilarang keras menceritakan keikut sertaannya pada orang lain, baik pada keluarga maupun teman. Sebelum pelatihan, mereka akan menjalani serangkaian test psikologi. Test ini digunakan untuk mengatahui sifat dan keahlian seseorang yang kelak diperlukan sewaktu melakukan penugasan. Sedangkan untuk menyembunyikan identitas seseorang, maka selama pelatihan nama diubah sehingga antara satu peserta dengan peserta yang lain tidak saling mengenal identitas sebenarnya.

Metode pelatihan yang diterapkan Pater Beek dalam Kasbul merupakan kombinasi antara kaderisasi Katolik ala Jesuit dan Komunis. Oleh karena itu, tak mengherankan kalau selama kaderisasi dididik dengan disiplin yang keras. Menurut Mujiburrahman, selama pelatihan tak jarang mereka harus terlibat dalam adu fisik, direndahkan dan dilecehkan guna menggembleng mental. Apa yang diungkapkan Mujiburrahman juga dibenarkan oleh Dr. George J. Aditjondro:

"*Dalam kegiatan Kasbul itu bukan cuma indoktrinasi yang dilakukan, bahkan latihan fisik yang mendekati latihan militer juga diberikan. Di*

sana para kader dilatih menghadapi situasi jika diintrograsi oleh lawan. Bagaimana meloloskan diri dari tahanan, bagaimana survive dan sebagainya."

Sementara itu, Richard Tanter juga memberikan pendapat yang serupa:

"*Dalam pratiknya, kursus-kursus tersebut mengambil metode campuran, perpaduan teknik-teknik pendidikan Jesuit dan Komunis, berbasiskan disiplin diri yang kuat. Kursus atau pelatihan-pelatihan ini diselenggarakan dengan pendekataan yang amat brutal atas para pesertanya: para calon kader bahkan kerap kali diharuskan saling menghajar atau memukul rekan-rekan sepelatihannya sendiri, dihina dengan keharusan merangkak di lantai yang penuh dengan kotoran, sesi-sesi harian yang panjang penuh dengan umpatan mengejutkan di tengah malam buta.*"

Selain cara-cara yang telah diuraikan di atas, mereka juga diharuskan puasa sepanjang hari dan berdoa semalam suntuk. Hal seperti itu juga dilakukan oleh Pater Beek. Sementara itu, bagi peserta pelatihan yang melanggar disiplin yang telah ditetapkan akan dihukum, dan apabila sudah berulang-ulang melakukan kesalahan, maka akan dipulangkan.

Dalam Kasbul seseorang juga diuji kejujurannya. Sebagaimana dituturkan Mujiburrahman, cara pengujian ini dilakukan Pater Beek dengan cara meletakkan uang pada sebuah buku yang sering dibaca oleh peserta. Bila uang itu hilang, maka Pater Beek akan melakukan investigasi. Ia akan mencoba mengidentifikasikan siapa yang mengambil uang tersebut. Pertama ia akan menanyai penjual di kompleks pelatihan itu. Apabila uang tidak ditransaksikan, maka ia menanyai orang-orang yang dicurigai. Dan

setelah uang ditemukan, ia akan menghukum orang tersebut.

Pindah Sasaran: Dari Komunis Ke Islam

Setelah Komunis berhasil dihancurkan oleh Orde Baru, sasaran Pater Beek pindah ke Islam. Teori Pater Beek tentang Islam sebagai ancaman dikenal sebagai teori Lasser Evil Theory [Teori Setan Kecil]. Dalam teori itu dibabarkan bahwa setelah komunis berhasil dihancurkan oleh tentara, maka akan muncul dua ancaman. Tentang dua ancaman ini Dr. George J. Aditjondro memberikan uraian sebagai berikut:

"*Setelah komunis dihancurkan oleh tentara, [Pater] Beek melihat ada dua ancaman [setan] yang dihadapi kaum Katolik di Indonesia. Kedua ancaman sama-sama berwarna hijau, Islam dan tentara. Tapi Beek yakin, tentara adalah ancaman yang lebih kecil [lasser evil] dibandingkan Islam yang dilihatnya sebagai setan besar. Berdasarkan pikiran itulah maka perintah Beek kepada kader-kadernya adalah rangkul tentara dan gunakan mereka untuk menindas Islam.*"

Tentang pilihan Pater Beek memilih Orde Baru dan tentaram ditekankan Richard Tanter sebagai berikut:

"*Pemilihan semacam ini dibenarkan [Pater] Beek, dengan dalih sungguh pun banyak kesalahan yang dilakukan yang dibuat oleh Soeharto, watak Komunis maupun Islam yang tidak dapat diterimanya, membuatnya tidak bisa memilih lain, selaian memberikan dukungan atas the lesser evil [tentara].*"

Suryasmoro Ispandrihari—salah satu narasumber Mujiburrahman dalam desertasinya—yang pernah ikut Kasbul pada tahun 1988, mengungkapkan bahwa para peserta diajarkan untuk menjadikan Islam sebagai musuh yang menakutkan. "*Islam adalah musuh Katolik…Dan jika diperlukan lulusan Kasbul harus mengambil senjata untuk berjuang melawan Islam*," begitu penuturan B. Suryasmoro Ispandrihari menirukan ucapan salah seorang pengajarnya di Kasbul. Pernyataan Suryasmoro Ispandrihari juga dibenarkan oleh Damai Pakpahan—seorang peserta Kasbul tahun 1984 dan sekarang menjadi aktivis LSM di Yogyakarta. Karena doktrin dalam Kasbul yang Islam phobia, membuat Damai Pakpahan memilih keluar dari jaringan Kasbul. Apa yang dilakukan oleh Damai Pakpahan juga dilakukan Dr. George J. Aditjondro. Ia menuturkan sebagai berikut:

"*Saya sendiri juga pernah menjadi kader Pater Beek dan dilatih melawan komunis. Tapi seperti juga Wangge, ketika CSIS sudah menjadikan Islam sasarannya, dan karena CSIS menjadi tanki pemikir Rezim Suharto, juga karena ikut berdarahnya tangan CSIS di Timor Timur, saya tidak bisa lagi tetap berada dalam jaringan pengikut Pater Beek."*

Epilog: Setelah Katolik Dipinggirkan Soeharto

Setelah selesai kaderisasi para lulusan Kasbul diharuskan setia pada pater Beek. Bentuk kesetiaan ini selain taat menjalankan perintah juga diharuskan membuat laporan setiap bulan. Tentang hal di diungkapkan oleh Richard Tanter:

"*Setelah hari-hari yang melelahkan, dalam jam tidur yang mat pendek, dan lain sebagainya, hasil akhirnya adalah: menjadi seorang kader yang sepenuhnya setia, patuh kepada Beek secara personal; menjadi orangnya*

Beek seumur hidup, yang bersedia melakukan apa saja baginya. Ketika para kader itu dipulangkan ke habitat asalnya, orang-orang muda ini kemudian diminta untuk menghasilkan laporan bulanan atas segala hal yang mereka dengar dan lihat di dalam organisasi masing-masing, yang dilakukan untuk Beek dan demi Beek seorang. Secara bertahap Beek membangun kepentingan dirinya, sebuah jaringan—kerja intelejen personal. Bagi pimpinan-pimpinan Gereja yang mendukung program Beek, maka hasilnya tentu akan memuaskan.”

Apa yang diungkapkan Richard Tanter memang benar. Para lulusan Kasbul kemudian dibuatkan jaringan yang dikembangkan dengan sistem sel. Masing-masing sel dipimpin oleh seorang koordinator yang berhubungan dengan koordinator sel-sel lainnya. Dengan sistem ini, selain organisasinya rapi, juga memungkinkan gerakan yang efektif. Sementara itu, para lulusan terbaik akan dikirim ke luar negeri.

Posisi politik Kasbul memang tidak ajeg. Setelah melawan Komunis, Islam, mereka kemudian bergeser melawan Soeharto. Ini terjadi ketika pada tahun 1990-an Soeharto mulai merangkul Islam dengan merestui berdirinya ICMI [Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia], dan posisi CSIS mulai disingkirkan. Sejak kejadian itu, bandul politik Kasbul menjadi anti Soeharto. Tidak mengherankan kalau kemudian kader-kader Kasbul disebar masuk ke dalam gerakan prodemokrasi. Tentu saja sebagian dari kader-kader Kasbul masuk dalam PRD [Partai Rakyat Demokratik]—yang pada waktu itu paling keras melawan Orde Baru.

Sekarang, setelah Soeharto jatuh, dalam demokrasi terbuka, kader-kader Kasbul menyebar lagi. Mereka tentu akan terus terlibat dalam politik. Menjelang Pemilu 2014, mereka tentu mempunyai kepentingan untuk

mendukung calon presiden tertentu. Ajianto Dwi Nugroho, misalnya, kader Kasbul lulusan Fisipol UGM, saat ini sedang menggalang kekuatan untuk memajukan Jokowi sebagai presiden mendatang. Lewat lembaga yang dimilikinya—yang sebagian stafnya alumni Kasbul—ikut momoles pencitraan Jokowi dalam berbagai media.

Kerja Ajianto Dwi Nugroho bisa dijadikan contoh bagaimana kader-kader Kasbul bekerja. Sewaktu mahasiswa, ia masuk dalam lingkaran pers mahasiswa UGM, Balairung. Sembari di Balairung ia mendekat pada gerakan mahasiswa semacam SMID [Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi] Yogyakarta, dan Dewan Mahasiswa UGM. Walaupun agak terlambat, ia kemudian masuk menjadi anggota PRD pada tahun 1999.

Untuk *survive* ia sempat berpacaran dengan mahasiswi beragama Islam dan berkerudung, guna membiayai hidupnya. Dengan pelatihan yang diperoleh ketika mengikuti Kasbul, ia bisa mengambil peran dalam setiap perubahan politik yang ada. Itulah kelebihan kader-kader Kasbul.

C. KESAKSIAN COSMAS BATUBARA TENTANG SEPAK TERJANG PATER BEEK

Bab ini adalah kesaksian Cosmas Batubara, salah satu murid Pater Beek, eksponen mahasiswa’66, mantan ketua organisasi Katolik (PMKRI) dan sekarang Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Tbk, dalam buku tulisannya berjudul Cosmas Batubara, Sebuah Otobiografi Politik, terbitan Kompas Gramedia, halaman 39 – 41 dan 71.

Pada saat saya memegang jabatan Ketua Umum PMKRI itu, bahkan jauh sebelumnya, Pater Beek dikenal sangat aktif di Yogyakarta. Pastor yang

sangat besar perhatiannya terhadap masalah-masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat dan sangat antikomunis itu, mengelola asrama Orde Jesuit bernama Realino di kota pelajar tersebut.

Asrama yang dikenal tertib, rapi dan tidak terlalu mahal itu umumnya menampung mahasiswa tahun pertama dan kedua dari Universitas Gajah Mada dan IKIP Sanata Dharma. Karena itu asrama tersebut menjadi rebutan mahasiswa untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang kemasyarakatan dan politik.

Spesialisasi Pater Beek memang bidang politik. Dan ia sangat anti komunis. Karena aktivitasnya itu, sekitar tahun 1960-1970-an Pater Beek sering menjadi buah bibir masyarakat.

Menjelang tahun 1965, Pater Beek pindah ke Jakarta. Kegiatannya yang menonjol di Jakarta adalah membuat kliping yang umumnya merupakan dokumentasi masalah politik. Kliping dari berbagai koran dihimpunnya, diketiknya kembali dan diterbitkannya dalam bentuk newsletter. Untuk kegiatannya ini ia dibantu beberapa staf yang dengan setia membantunya.

Kegiatannya berlanjut dengan pengaderan anak-anak muda dalam pelatihan yang berlangsung satu bulan. Sebagian besar anggota PMKRI. Pater Beek mengajar para pemuda itu bagaimana berorganisasi dengan baik, membuat dokumentasi dengan benar, bagaimana berbicara di depan umum (*public speaking*) dan bagaimana berjuang dengan berani.

Saya mengenal Pater Beek, karena saya juga terlibat dalam pengaderan itu, di samping karena kedudukan saya sebagai Ketua Umum mahasiswa Katolik. Saya sering juga berdialog dengan Pater Beek tentang materi

pengaderan dan ancaman komunis di samping memanfaatkan hasil-hasil yang dikerjakannya.

Jasa Pater Beek SJ sangat besar dalam mengembangkan sistem dokumentasi mengenai kegiatan komunis dan kegiatan kelompok nonkomunis dalam rangka melawan komunis itu. Dengan sistem dokumentasi yang dikembangkan Pater Beek, kita mengetahui dengan jelas tema apa yang digunakan kelompok komunis untuk menggalang kekuatan.

D. DIASPORA MURID PATER BEEK DAN KAUM SOSIALIS

Murid-murid Pater Beek yang dulu mendorong kelahiran Golkar, Kini banyak masuk ke PDIP perjuangan.

Apa sasaran mereka? Kristenisasi? Kecemasan akan terjadinya marjinalisasi umat kristen/katolik pernah ditulis dengan baik oleh mantan anggota dewan direktur CSIS J Soedjati Jiwandono. Ia menangkap, sejak sebelum pemilu 1992, ada kecemasan diantara kalangan katolik, tentang prospek peranannya di masa depan.

Gejala marginalisasi itu katanya, dilihat umat katolik dari berubahnya Golkar dan suasana anggota DPR/MPR setelah Pemilu 1992. ”*Disitulah [Golkar dan DPR/MPR-Red] banyak orang Katolik sejak awal orde baru berpartisipasi dalam kehidupan politik*,” tulis Soedjati dalam bukunya ‘Gereja dan Politik’.

Tokoh katolik lainnya Romo Dick Hartoko, pernah menuturkan tentang keterlibatan seorang pastur dari ordo Jesuit Pater Beek, dalam

pembentukan Golkar. ”*Awal mula dari Golkar adalah ide seorang romo Jesuit Beek,*” ujar Dick seperti ditulis tempo. Menurutnya, Beek punya kedekatan dengan salah seorang pendiri CSIS Ali Moertopo, yang ketika itu aktif di Opsus dan BAKIN.

Sumber tekad yang dekat dengan kalangan militer menuturkan, di seputar 1950-an, Pater Beek telah banyak mendidik Sarjana Katolik yang militan. Pendidkan dilakukan di asrama mahasiswa Realino, yang terletak di Yogyakarta. Pusat pendidikan kemudian dipindah ke Klender Jakarta Timur, melalui wadah Yayasn Samadi.

Dalam buku ‘Soemitro dan Peristiwa Malari’, mantan Pangkopkamtib ini pun menyebut-nyebut nama Pater Beek. Soemitro mengungkapkan, ia menerima banyak laporan tentang siapa di belakang studi bentukan Ali Moertopo. Laporan yang di terimanya menyebut, lembaga itu dibentuk Ali bersama Soedjono Humardani, sebagian golongan katolik, dan sekelompok orang Tionghoa yang umumnya berafiliasi ke Pater Beek.Tak bisa dipungkiri, lembaga yang di maksud Soemitro adalah CSIS.

Masih menurut Soemitro, hubungan Pater Beek dengan orang Katolik lainnya tak selamanya serasi. Bahkan, mantan pejabat beragam Katolik juga tak menyukai kelompok Beek ini. Dick Hartoko pun mengakuinya. Dick sendiri cuma mau mengamati gerakan Beek ini tanpa terlibat.

“*Jendral Sutopo Yuwono menurut pengakuannya pernah meminta Vatikan supaya Pater Beek dipindah dari Indonesia*”. tutur Soemitro. Beek pun sempat ditarik, tapi tak lama kemudian balik lagi pada 1974, tahun ketika peristiwa Malari meletus.

Sumber Tekad mengungkapkan, menjelang peristiwa Malari, BAKIN menemukan suatu dokumen yang terkenal dengan nama dokumen Pater Beek, yang berkaitan dengan tragedi itu. Dokumen ini menyebutkan beberapa nama yang terlibat dalam organisasi itu. Nama–nama itu antara lain Liem Bian Kun, Cosmas Batubara, Thomas Suyatno, Leo Tomasoa, Batubara, Fredi Latumahina, Harry Tjan Silalahi dan Jacob Tobing.

Beberapa nama tersebut, kini masih banyak yang aktif di Golkar.Tapi ada juga yang di PDI Perjuangan, seperti Jacob Tobing.Tapi ketua PPI ini menolak bila dikatakan punya kaitan dengan Beek. ”*Itulah yang membedakan saya dengan kader lainnya*” tuturnya.

Sumber tekad di tubuh PDI Perjuangan, Jacob memang tak begitu menonjolkan gerakan katoliknya. ”*Ia lebih mirip sebagai seorang Kapitalis Demokrat, yang mirip kebanyakan orang PSI*,”tuturnya.

Maka itu, kata sumber ini, Jacob pun mudah membangun jaringan dengan sosialis lainnya. ia menyebut di tubuh PAN ia banyak berhubungan dengan Christianto Wibisono dan Goenawan Mohammad di Golkar dengan Fredi Latumahina dan Marzuki Darusman. Di lingkaran Habibie dengan Adnan Buyung Nasution, serta pengusaha James Riadi dan Glenn Yusuf. Hubungan sejenis juga terjalin dengan pengusaha Jacob Oetomo.

Sementara di PDI Perjuangan, Kelompok Jacob ini berkolaborasi dengan sayap Protestan dan Purnawirawan militer seperti Sabam Sirait dan Theo Syafei. ”Mereka bekerjasama pula dengan orang sosialis seperti Arifin Panigoro, tuturnya sementara Meilono, ia diidentifikasi sebagai orang bergaris PNI yang khas gaya Moh Hatta yang juga cenderung sosialis.

Kelompok–kelompok inilah, kata sumber yang pengurus DPP PDI-P ini, mampu menyudutkan kader-kader. Mereka, katanya, berhasil memberi masukan langsung ke Mega, ataupun lewat Taufik Kiemas. “*Adanya kelompok-kelompok semacam inilah yang melahirkan banyaknya caleg non-muslim. Meski sebenarnya itu hanya akses*,” tutur sumber ini.

Sumber ini telah mengingatkan Mega bahayanya bagi PDI bila memakai orang-orang ini. “*tapi Mega tak berdaya*,” ujarnya. Menurutnya, gerakan kelompok kapitalis demokrat dan sosialis ini, memang tak beda jauh dengan kelompok Beek di masa Orde Baru. Hanya saja, tujuannya bukanlah Kristenisasi, melainkan eksistensi kelompok dan kepentingan ekonomi. Perbedaan lainnya, yang kini lebih dominan pun bukan lagi katolik, tapi protestan.

Selain itu, kata dia, pengaruh purnawiran milliter di tubuh partai ini tak bisa dianggap enteng. Ia mensinyalir, mereka masih menjalin hubungan dengan KBA (keluarga besar ABRI), yang kini berada di hampir seluruh partai peserta pemilu. ”*Belum lama ini purnawirawan militer di berbagai partai itu kumpul*,” ujarnya.

Terhadap berbagai sinyalemen ini Jacob tegas menolak. “*Tidak bisa kita menganalisa separti itu. Itu keliru. Saya tidak mempunyai basis PSI sama sekali*,” paparnya kepada tekad.

Pengamat politik dari UGM Affan Gaffar pun melihat kemiripan antara PDI Pejuangan sekarang, dengan Golkar diawal Orde Baru. Parameter yang dipakainya, kesamaan dominasi Kristen/Katolik, yang tercemin dalam susunan DCT.

Pengamat politik dari LIPI Indira Samego, menilai dominasi tersebut punya tujuan *leverage politic*, untuk mempengaruhi kebijakan negeri ini dimasa mendatang. "*Jangka pendeknya ya mengurus Habibie*," ujarnya.

Apakah dominasi itu ingin memainkan Islam politik gaya ICMI? Meliono Suwondo berani menjamin hal itu tak akan terjadi. "*Saya tak bisa jamin mereka akan mengembangkan agama mereka. Tapi saya berani jamin mereka tak akan melakukan Kristen politik lewat PDI Perjuangan*," ujarnya. Bahkan, janjinya, sebagai seorang muslim ia akan berusaha keras membentengi Mega bila hal itu terjadi.

Tentang banyaknya caleg-non muslim itu sendiri Meliono punya alasan lain. Ia melihat, dalam kenyataannya banyak kader Muslim yang bagus tak masuk PDI. Hal itu, menurutnya, karena berkembangnya pandangan PDI itu tidak Islami. Sehingga kader Muslim yang baik lebih suka lari ke partai lainnya. "*kalau ada kader Muslim yang bagus disini ya pasti dijadikan caleg*," tuturnya. Anehnya adik Gus Dur yang ketua PDI Perjuangan justru tak masuk caleg.

E. KESAKSIAN GEORGE J. ADITJONDRO TENTANG CSIS, PATER BEEK, ALI MOERTOPO DAN LB MOERDANI

Pada salah satu seminar membicarakan pemilu di kantor CSIS di Tanah Abang, Jakarta, tanggal 3 September 1996, Panda Nababan, seorang wartawan senior Jakarta, tiba-tiba angkat bicara. Dengan tenang Panda Nababan menuduh CSIS sebagai pusat tempat dirumuskannya banyak keputusan Politik Indonesia masa lalu yang merepotkan kita semua sekarang ini. Dr. Sudjati Djiwandono, seorang pembicara dalam acara itu juga sulit menyembunyikan amarahnya kepada Panda Nababan.

Tapi Harry Chan Silalahi yang menjadi moderator pada saat itu, meski bisa menahan diri untuk menangkis tuduhan Panda Nababan, tapi ia tetap tenang, dan seperti biasanya penuh senyum, meski kabarnya terlihat gugup. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan harian Kompas (tgl. 7 September 1996), Harry Chan Silalahi memberikan wawancara khusus yang membantah semua tuduhan Panda Nababan. Di sana dengan gaya orang rendah hati Harry Chan membeberkan betapa salahnya orang yang menganggap CSIS itu memainkan peranan penting pada belasan tahun pertama Orde Baru. Yang ada sebenarnya hanya kedekatan antar individu, bukan CSIS dengan pemerintah, kata Harry Chan.

Para pendiri CSIS itu dekat dengan pemerintah, katanya. Ia menyebutkan dirinya sebagai tokoh KUP Gestapu (Front Pancasila), Liem Bian Kie (Yusuf Wanandi) sebagai tokoh Golkar, demikian juga dengan Sudjati Djiwandono. Dan tentu saja Sudjono Humardani dan Ali Murtopo yang memang Aspri Suharto. Dr. Sudjati Djiwandono, seorang pembicara dalam acara itu juga sulit menyembunyikan amarahnya kepada Panda Nababan.

Kepada harian Kompas, Harry Chan menjelaskan: "*Pada prinsipnya CSIS membatasi diri untuk tidak terlibat dalam soal taktis politik. Meskipun demikian CSIS kerapkali diisukan telah melakukan hal itu. Padahal pembahasan masalah dalam negeri yang dilakukan CSIS bersifat strategis konsepsional*".

CSIS terbentuk, menurut Harry, pada tahun 1971 ketika Hadi Susastro dan beberapa kawan-kawannya pulang belajar dari Eropa. Merekalah yang mengusulkan dibentuknya sebuah lembaga think tank. Tidak dijelaskan oleh Harry bahwa sebelumnya bergiat dalam CSIS, para kader Beek itu sudah berkiprah dalam operasi khusus (Opsus) pimpinan Ali Murtopo.

Masih belum yakin dengan bantahannya lewat harian Kompas, sebulan kemudian, lewat harian Nusa Tenggara (terbit di Denpasar) edisi 13 Oktoer 1996, Harry Chan muncul lagi dalam sebuah wawancara yang menggunakan hampir satu halaman surat kabar. Di sini sekali lagi Harry Chan melakukan cuci tangan terhadap semua tingkah laku politik CSIS di masa jaya Ali Murtopo hingga masa akhir berkuasanya L.B. Murdani. Penjelasan panjang lebar Harry Chan dalam koran terbitan pulau Bali itu sepintas lalu sangat persuasif serta menyakinkan, terutama bagi generasi muda yang tidak mengalami pergolakan politik awal Orde Baru. Tapi bagi orang seperti saya, semua cerita Harry Chan itu sebenarnya adalah isapan jempol belaka.

Perhatikan bahwa dalam semua penjelasan Harry Chan sama sekali tidak pernah menyebut Opsus dan keterlibatan kaum katolik ekstrem kanan di sana. Mereka yang tergolong generasi 66 di Jakarta masih ingat kantor mereka (Opsus) di Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat. Juga penjelasan Harry Chan sama sekali tidak terdengar nama Pater Beek SJ, pastor kelahiran Belanda yang memainkan peranan besar di balik lahirnya CSIS tersebut.

Beek adalah pastor ordo Jesuit yang sudah aktif lama di Indonesia melakukan kaderisasi para pemuda dan mahasiswa katolik. Ia melakukan kegiatan kaderisasinya di asrama Realino Yogyakarta, di samping melakukan kaderisasi di Klender, Jakarta. Di Klender kegiatan itu disebut Kasebul (Kaderisasi sebulan). Dalam kegiatan Kasebul itu bukan cuma indoktrisasi yang dilakukan, bahkan latihan pisik yang mendekati latihan militer juga diberikan. Di sana para kader dilatih menghadapi situasi jika diinterograsi oleh lawan. Bagaimana meloloskan diri dari tahanan, bagaimana *survive* dan sebagainya.

Latihan seperti ini ditujukan untuk mempersiapkan showdown dengan komunis waktu itu. Kegiatan ini kemudian diketahui oleh Subandrio yang memimpin BPI (Badan Pusat Intelejen). Akibat kejaran BPI Pater Beek terpaksa melarikan diri ke luar negeri dekat sebelum Gestapu 1965. Beek kembali ke Indonesia setelah Subandrio ditangkap dan BPI dibubarkan.

Sebagian dari lulusan terbaik Kasebul ini dikirim untuk latihan lebih jauh lagi di luar negeri. Salah seorang yang berhasil dikirim keluar negeri sebelum Gestapu adalah yang kemudian menjadi wakil komandan Laskar Ampera, Louis Wangge almarhum. Wangge dikirim oleh Beek ke Universitas Santo Thomas, Filipina. Begitu yang diketahui orang. Tapi kemudian Wangge sendiri mengaku bahwa sebenarnya ia dikirim ke sebuah pusat latihan intelejen di sebuah pangkalan Amerika di Filipina.

Cerita tentang ini semua dikisahkan Wangge setelah ia dikucilkan oleh CSIS karena sikap Wangge yang menolak kebijakan CSIS yang anti Islam. Dalam keadaan tegang antara Wangge dan CSIS di pertengahan tahun tujuh puluhan, misalnya, Wangge pernah menyundut rokok menyala ke baju yang melekat di tubuh Sofjan Wanandi di kamar kecil bioskop Menteng (bioskop itu sudah digusur sekarang).

Saya sendiri juga pernah menjadi kader Pater Beek dan dilatih melawan komunis. Tapi seperti juga Wangge, ketika CSIS sudah menjadikan Islam sasarannya, dan karena CSIS menjadi tanki pemikir Rezim Suharto, juga karena ikut berdarahnya tangan CSIS di Timor Timur, saya tidak bisa lagi tetap berada dalam jajaran pengikut Pater Beek. Terutama setelah demi ambisi kekuasaan dan kontrol orang-orang CSIS (Liem Bian Kie dan Sudradjat Djiwandono) Partai Katolik pun mereka gilas. Begitu yakinnya mereka akan pentingnya mengontrol Indonesia lewat Golkar, mereka tega

menindas Uskup Atambua (mempertahankan Partai Katolik), orang yang sebenarnya berjasa dalam proses integrasi Timor-Timur.

Sebagai wartawan Tempo yang sudah mengunjungi Timor Timur sebelum invasi operasi intel pimpinan Murdani, dan mengikuti perkembangan wilayah itu hingga kini, saya tahu bagaimana permainan Murdani bersama orang-orang CSIS dalam mengeruk uang dari Timor-Timur, setelah sebelumnya membantai secara kejam banyak penduduk bekas jajahan Portugis tersebut. Dengan uang yang terus mengalir (monopoli kopi yang dikelola oleh Robby Ketek dari Solo) itulah mereka, antara lain, bisa membiayai operasi-operasi politik Murdani bersama CSIS.

Tapi siapa sebenarnya Beek? Menurut cerita dari sejumlah pastor yang mengenalnya lebih lama, Beek adalah pastor radikal anti komunis yang bekerja sama dengan seorang pastor dan pengamat Cina bernama pater Ladania di Hongkong (sudah meninggal beberapa tahun silam di Hongkong). Pos china watcher (pengamat Cina) pada umumnya dibiayai CIA. Maka tidak sulit untuk dimengerti jika Beek mempunyai kontak yang amat bagus dengan CIA. Sebagian pastor mencurigai Beek sebagai agen Black Pope di Indonesia. Black Pope adalah seorang kardinal yang mengepalai operasi politik katolik di seluruh dunia.

Tentang Black Pope ini tidak banyak diketahui orang, juga pastor katolik yang tidak tahu mengenai kedudukan, peran, dan operasi Black Pope yang sangat penuh rahasia itu. Tapi ketika almarhum Dr. Sudjatmoko menjadi Rektor Universitas PBB di Tokyo, ia pernah berkunjung ke Tahta suci di Vatikan. Selain berjumpa Paus, Sudjatmoko juga jumpa seorang Kardinal yang mengajaknya berbicara banyak mengenai keadaan di Indonesia. Sudjatmoko merasa surprise bahwa Kardinal itu tahu banyak tentang

politik di Indonesia. Tidak lama setelah pulang ke Indonesia sebagai pensiunan rektor Universitas PBB, pimpinan harian Kompas mengirimkan orang kepada Sudjatmoko untuk meyakinkannya agar tidak usah cemas masalah finansial. Kalalu ada apa-apa Kompas bersedia membantu. Dari tawaran simpatik Kompas itulah Sudjatmoko yakin adanya kontrol Black Pope terhadap kegiatan katolik di Indonesia.

Kembali kepada Beek, yang makin memperkukuh posisi kader Beek di mata tentara adalah sikap mereka yang didasarkan oleh kebijakan yang digariskan oleh Beek. Kebijakan itu dikenal sebagai *lesser evil theory* (teori setan kecil).

Setelah komunis dihancurkan oleh tentara, Beek melihat ada dua ancaman (setan) yang dihadapi kaum Katolik di Indonesia. Kedua ancaman sama-sama berwarna hijau. Islam dan tentara. Tapi Beek yakin, tentara adalah ancaman yang lebih kecil (*Lesser evil*) dibanding Islam yang dilihatnya sebagai setan besar. Berdasarkan pikiran itulah maka perintah Beek kepada kader-kadernya adalah rangkul tentara dan gunakan mereka untuk menindas Islam.

Kebetulan sekali setelah Gestapu, pihak Islam (terutama mantan Masyumi) dianggap meminta terlalu banyak imbalan jasa dari partisipasinya dalam penumpasan Gestapu. Padahal Suharto dan pimpinan ABRI lainnya sudah berkeputusan untuk mengelola sendiri negara dan tidak akan berbagi kekuasaan dengan siapa pun, apalagi dengan kekuatan Islam. Ketegangan Islam lawan tentara inilah yang melicinkan dipraktekkannya doktrin *lesser evil* Pater Beek tersebut.

Kebetulan lain adalah adanya Ali Murtopo dan Sudjono Humardani. Kedua orang ini mempunyai sejumlah persamaan meski ada perbedaan mendasarnya. Sudjono dan Ali sama-sama ingin mengabdi kepada Suharto. Tapi Ali Murtopo punya rencana jangka panjang untuk berkuasa (*I will be the next president*, kata Murtopo kepada wartawan Tempo, Tuty Kakiailatu, pada masa kampanye Pemilu 1971) sedang Humardani adalah orang Solo yang sudah bahagia jika bisa menjadi abdi dalem yang baik. Ambisi Ali Murtopo inilah yang dimanfaatkan oleh kader-kader Pater Beek tersebut.

Banyak orang yang tidak percaya kalau Ali Murtopo (keluarga santri dari pesisir Jawa dan bekas hisbullah di jaman revolusi) bisa menjadi orang yang sangat anti Islam dan berjasa besar dalam menindas orang Islam di awal Orde Baru. Yang orang cenderung lupa adalah bahwa Ali Murtopo punya rencana berkuasa, oleh karena itu semua yang merintanginya untuk mencapai tujuannya haruslah ditebas habis. Musuhnya bukan cuma Islam, tapi juga Perwira-perwira ABRI yang dianggapnya sebagai perintang, seperti H.R. Dharsono, Kemal Idris, Sarwo Edhi Wibowo dan Soemitro (Pangkopkamtib). Almarhum Dharsono (Pak Ton) difitnahnya berkonspirasi dengan orang-orang PSI untuk menciptakan sistem politik baru untuk menyingkirkan Suharto. Kemal Idris dituduhnya berambisi jadi Presiden. Sedang Sarwo Edhi difitnahnya merencanakan usaha menajibkan (menendang ke atas) Suharto.

Kader-kader Beek yang kemudian mendirikan CSIS dan waktu itu masih berkumpul dalam Opsus tahu betul mengenai ini, dan mereka ikut membantu Ali Murtopo mencapai ambisi berkuasanya.

Pada tahun 1974 terjadi Malari di Jakarta. Orang-orang Opsus yang berada dibalik kerusuhan dan pembakaran-pembakaran merasa dengan itu bisa menghabisi lawan mereka yang dipimpin Soemitro. Kemudian terbukti memang Soemitro yang kurang canggih berpolitik itu berakhir karir militernya dengan cara yang sangat mengenaskan. Namun yang menang juga bukan Ali Murtopo. Suharto ternyata jauh lebih pintar dari Ali dan Soemitro. Kedua Jenderal yang berambisi itu dalam waktu singkat habis peranan politiknya.

Selama Ali masih menjadi orang penting di sekitar Suharto, salah seorang kadernya disimpannya di Korea Selatan sebagai Konjen. Itulah LB. Murdani. Sudah sejak di Kostrad pada jaman konfrontasi dengan Malaysia, para senior di Kostrad kabarnya sudah melihat tanda-tanda adanya rivalitas diam-diam antara Ali dan Murdani. Banyak yang menduga perbedaan mereka pada gaya. Ali suka pamer kekuasaan, sedang Murdani penuh kerahasiaan dan misteri. Persamaan mereka adalah semua haus kekuasaan. Tapi dalam ingin berkuasa ini juga ada perbedaan. Ali ingin menjadi orang yang berkuasa, sementara Murdani hanya ingin menjadi orang yang mengendalikan orang yang berkuasa.

Tapi setelah terjadi Malari. Ali Murtopo tidak bisa lagi menghalangi Murdani untuk tampil ke depan. Sejak itulah bintang Murdani mulai menanjak. Murdani boleh berbeda *style* dengan Ali, tapi karena sama-sama ingin berkuasa, keduanya perlu tanki pemikir. Maka CSIS yang mulai cemas karena merosotnya posisi dan peran Ali Murtopo pada masa paska Malari, berjaya lagi oleh naiknya Murdani.

Berlainan dengan Ali Murtopo yang ditakutkan bisa merupakan ancaman bagi CSIS kelak ketika berkuasa (ingat Suharto yang kini berbalik kepada

Islam setelah menindasnya dahulu?) Murdani adalah orang katolik yang kebetulan secara pribadi sangat benci kepada Islam. Karena itu lancar saja kerjasama Murdani dengan CSIS. Sebagai orang katolik ekstrem kanan Murdani di CSIS merasa di rumah sendiri. Itulah sebabnya mengapa Moerdani sekarang dengan tenang bisa berkantor di CSIS (menggunakan bekas kantor Ali Murtopo).

Dipanggil pulang dan diberi bintang dan kuasa oleh Suharto setelah hampir terlupakan di Korea Selatan dan (sebelumnya) Kuala Lumpur, Murdani sangat berterima kasih kepada Suharto. Merasa telah mengutangi budi kepada Murdani, Suharto merasa dengan aman bisa menyuruh Murdani berbuat apa saja tanpa harus takut dikhianati. Memang Murdani menjadi “herder” Suharto yang menggigit siapa saja yang dianggap Murdani membahayakan Suharto. Maka Suharto makin percayalah kepada Murdani.

Kepercayaan yang besar itulah kemudian yang menjadi modal bagi ambisi lama Murdani untuk menjadi King Maker. Kepada seorang perwira Kopassus di akhir tahun 1980-an Murdani katanya pernah berseloroh: “*Buat apa jadi orang berkuasa jika bisa dengan tanpa resiko kita mengontrol orang yang berkuasa*”. Memang itulah yang digeluti Murdani di belakang Suharto. Keberhasilan Murdani dan Sudomo membesar-besarkan bahaya Petisi 50 (AH. Nasution hampir ditangkap Murdani, tapi dicegah oleh TB. Simatupang) berhasil mengecoh Suharto untuk mengeluarkan sebuah surat pamungkas yang memberi kuasa lebih besar lagi kepada Murdani. Dengan kekuasaan amat besar dari Suharto itulah ia dengan gampang dan cepat bisa membangun kerajaan intelnya (BAIS).

Menurut Wismoyo Arismunandar (mantan Kasad), orang yang mula-mula dan dari awal punya firasat buruk terhadap Murdani adalah Ibu Tien Suharto. Tapi karena Suharto sangat *koppeg* dan merasa paling tahu sendiri, baru pada tahun 1988 Murdani berhasil disingkirkan. Tapi sebelum meninggalkan tahta kekuasaannya, Murdani sudah berhasil menciptakan beberapa calon raja yang menurut rencana akan dikontrolnya kelak. Salah seorang di antaranya adalah Try Sutrisno. Begitu patuh Try Sutrisno kepada Murdani sehingga sebagai kepala BAIS, Try Sutrisno di Mabes ABRI adalah staf yang dulu diangkat, dipercaya, dan pernah dipakai oleh Murdani sebagai Pangab.

Dalam soal memilih kader, Ali Murtopo dan Murdani sama. Keduanya amat berbeda dengan Pater Beek. Beek memilih pemuda dan mahasiswa Katolik terbaik. Tujuannya adalah agar kader-kader tersebut dengan kecerdasan dan kelihaiannya sanggup mengendalikan orang lain untuk mencapai tujuan yang diamanatkan Beek. Pater Beek SJ tahu betul bahwa Indonesia ini penduduknya adalah mayoritas Islam, oleh karena itu orang Katolik jangan bermimpi untuk tampil berkuasa. (Murdani sadar akan hal ini, karena itu ia hanya ingin jadi King Maker). Tapi mereka harus mengusahakan agar yang berkuasa adalah orang Islam yang mereka bisa atur. Inilah penjelasan mengapa Try Sutrisno dijagokan oleh Murdani dan untuk itu dipakai orang Islam yang bisa diatur, yaitu Harsudiono Hartas.

Ali Murtopo dan Murdani memilih bukan orang terbagus yang ada untuk jadi kader, tapi orang-orang yang punya cacat atau kekurangan, (orang yang ketahuan korup, punya skandal, bekas pemberontak, mereka yang ingin kuasa, ingin jabatan, ingin kaya cepat, dan sebagainya). Orang-orang demikian mudah diatur. Perbedaan inilah justru yang menyebabkan Ali Murtopo dan Murdani mudah bekerjasama dengan kader-kader Pater Beek

SJ. Lewat tangan Ali Murtopo dan Murdani cita-cita dan rencana Beek SJ pernah berhasil dijalankan dengan saksama. Meski tragis, tapi inilah yang penjelasannya mengapa yang melaksanakan kebijakan anti Islam (lewat tangan Ali Murtopo dan Murdani) kebanyakan adalah orang-orang Islam yang tidak sadar diperalat oleh Ali Murtopo dan Murdani untuk ambisi mereka masing-masing.

F. CATATAN MENGERIKAN SEPUTAR CSIS

Wiiliam Liddle mengatakan:

"*Saya selalu berpendapat bahwa sejak awal orang CSIS memang terlalu berprasangka terhadap politik ISLAM di Indonesia. Banyak kebijakan mereka termasuk GOLKAR diciptakan untuk melawan politik ISLAM, yang sebetulnya menurut pendapat saya, tidak perlu dilawan*"

Di awal ORBA, Ali Murtopo (AM) sudah didukung oleh 200 sarjana dari kalangan Khatolik. Dan, dengan CSIS nya lahirlah kebijakan-kebijakan ORBA yang cenderung merugikan kaum muslimin. Lalu apa hubungannya dengan Khatolik Jesuit?

Sebagai penasehat presiden, rupanya Frans Seda belum arif dan bijak. Nasehatnya kepada kaum kristiani untuk mengadakan perkabungan nasional (Frans Seda menyebutnya pertobatan) di Kupang malahan berbuah bencana.

Acara perkabungan yang dimotori Gemakristi dan gereja-gereja di Kupang itu berbuntut dibakarnya sejumlah (lebih kurang) 30 mesjid, sekolah sekolah Islam dan asrama haji. Sejumlah tokoh termasuk Gus Dur,

menyebut kerusuhan itu digerakan dari Jakarta. Beberapa kelompok elit tertentu yang bertarung keras di panggung politik disebut sebut berada di belakang kerusuhan tersebut. Dan sebagaimana kasus Banyuwangi dan daerah lain, tudingan tak luput juga diarahkan ke ES alias Eyang Suharto.

Tentu boleh-boleh saja menuding Soeharto ada di balik segala aksi kekerasan yang semakin marak belakangan ini. Seperti kata Amien Rais, sebagai orang yang sudah 32 tahun berkuasa bak seorang raja, wajar kalau Soeharto masih bermain. Apalagi banyak petinggi pemerintahan dan militer saat ini adalah murid dan kacungnya dahulu. Di sisi lain, tekanan kekerasan rakyat kepada Habibie untuk menyeret nya kepengadilan, boleh jadi membuat Eyang Suharto rada gundah. Jadi, mumpung masih punya kekuatan, logis kalau Soeharto mencoba *come back*. Banyak pengamat menilai, salah satu indikasi kembalinya Soeharto adalah langkah beberapa mantan pejabat tinggi era Soeharto yang kalah merebut kepemimpinan di MUNASLUB GOLKAR Juni lalu dan menyatakan diri keluar dari Beringin dan membuat partai baru. Padahal seperti tersebut para dissertir GOLKAR itu telah menggenggam restu Soeharto selaku Dewan Pembina.

Namun, terlalu naif menuding Soeharto sebagai kekuatan tunggal yang bermain. Menurut KH Yusuf Hasyim, semua kejadian belakangan ini adalah hasil kerja banyak pihak yang sama-sama gerah dengan Habibie dan sama-sama berambisi keras merebut kekuasaan. Mereka bisa jadi berkoalisi, namun bukan mustahil juga jalan sendiri sendiri atau bahkan saling bertarung. Selain Soeharto, sesungguhnya ada kekuatan lain yang sama sama pernah berkuasa, punya organisasi rapih dengan jaringan luas dan memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa dan punya akses kuat ke teknologi militer. Bahkan, pada 25 tahun pertama kekuasaan Soeharto, kelompok ini menjadi *inner circle* elite politik dan membangun simbiosis

mutualistis dengan raja Jawa itu. Kekuatan itu adalah persekutuan kelompok intelektual Khatolik dan Jenderal anti Islam yang berhimpun di CSIS,- sebuah lembaga studi dengan jaringan internasional yang bermarkas di Tanah Abang.

Dalam buku “Soemitro dan peristiwa 15 Januari 1974″, disebutkan bahwa Ali Mutopo (AM) dan Sujono Humardani (SH), dua orang kepercayaan bersama kelompok cendikiawan khatolik dan etnis serta berafiliasi pada Pater Beek (PB), membentuk lembaga studi ini. PB, seperti disebut Soemitro, adalah pastur ordo JESUIT yang ditempatkan di Indonesia.

Di awal ORBA, tutur Soemitro, AM dan SH sudah didukung oleh 200 sarjana Khatolik yang kebayakan ber ordo JESUIT. Di antara mereka adalah, Soedrajat Jiwandono, Sofjan dan Yusuf Wanandi, Harry Tjan Silalahi, Pang Kay Lim dan Cosmas Batubara. Maka jangan heran kalau kebijakan kebijakan yang dikeluarkan ORBA sangat menguntungkan kelompok (agama) minoritas dan ethnis Cina. Dan sebaliknya banyak merugikan dan mengharubirukan perjuangan kaum muslimin.

Pilihan kaum Khatolik binaan PB untuk berkolaborasi dengan AM di CSIS, demi menggapai kekuasan memang tepat. Dengan posisinya sebagai aspri presiden, AM dan SH boleh dibilang bisa kekuasaan ekonomi, politik dan militer termasuk seperti kata Prof. William Liddle menjadikan GOLKAR sebagai “Partai Tunggal” yang mendominasi kekuasaan politik melalui penguasaan jaringan intelejen, GOLKAR dan sumber ekonomi, proses peminggiran Islampun berlangusung mulus. Selanjutnya, AlM dan SH berperan besar membesarkan CSIS.

Maka lahirlah berbagai kebijakan ekonomi dan politik diskriminatif hasil godokan lembaga ini yang bermuara pada peminggiran kekuatan Islam dari panggung ekonomi dan politik nasional. Harus diakui, seperti kata Soemitro, CSIS adalah lembaga yang mumpuni berkat dukungan dapur yang hebat, personalia yang tangguh dan organisasi yang relatif rapi dengan dana yang berlimpah ruah. “Dana mereka komplit, jaringan komunikasi mereka luas dan disiplin mereka tinggi” ujar mantan Pangkopkamtib ini.

Karena merasa organisasinya amat berpengaruh, maka mereka penuh rasa percaya diri. “Saking percaya diri, ada cerita seorang non pri Cina dari kelompok studi ini berani duduk di atas meja saat bicara dengan kepala Bulog. Mangkel betul hati saya mendengar berita semacam ini” ujar Soemitro. Dan yang lebih menyebalkan lagi tatkala kelompok nonpri di lembaga studi ini menyebut Jenderal Nasution sebagai pengkhianat dengan alasan mantan ketua MPRS ini dinilai menentang Soeharto.

“*Tambah jengkel saya, bayangkan anak kemaren sore berani menghina Nasution yang jasanya kepada bangsa tidak sedikit.*

Tak heran mendengar ucapan ini Jenderal Suluh Dumadi (Deputi I Kabakin) marah besar seraya menghardik anak buah AM: You bilang sekali lagi, saya tempeleng nanti”. cerita Soemitro sambil menirukan ucapan Suluh.

Peran CSIS yang kian membesar, menurut William Liddle terjadi pada tahun 1970 dan berdampak pada politk dalam negeri. AM saat itupun mendapat tugas untuk melakukan konsolidasi GOLKAR sehingga dengan sendirinya pun CSIS punya peranan besar dan menentukan personalia

kepengurusan GOLKAR. Menurut William Liddle yang menentukan selain AM adalah Jusuf Wanandi dan Harry Tjan Silalahi.

Dampak berikutnya, seperti dituturkan Soemitro adalah merenggangnya hubungan antara pemerintah dengan kalangan Islam. Umat Islam selalu dipojokan oleh kebijakan kebijakan yang ditelurkan oleh CSISI ini. Di era 1970 dan 1980an, visi atau gagasan yang berabu Islam langsung dicurigai kalau perlu di cap Subsversif. Makanya tak aneh kalau yang namanya pengajian, pesantren, dakwah dakwah Islam dan diskusi keislamanan sering dicurigai. Sederet tuduhanpun mengalir, mau bikin negara Islamlah, mau kembali ke Piagam Jakarta lah dll.

Bagi Liddle ini masalah yang sangat sensitif. "*Saya selalu berpendapat bahwa sejak awal orang CSIS memang terlalu berprasangka terhadap politik ISLAM di Indonesia. Banyak kebijakan mereka termasuk GOLKAR diciptakan untuk melawan politik ISLAM, yang sebetulnya menurut pendapat saya, tidak perlu di lawan*" katanya.

Setelah AM dan SH wafat, maka tampilah Benny Murdani (BM). Bila AM dan SH adalah kejawen yang anti Islam, maka BM jelas jelas Jenderal Khatolik yang anti Islam. Saking bencinya, ia sampai melarang penggunaan Assalamualaikum di kalangan Militer. Bahkan ia menelurkan kebijakan apel di pagi hari sebelum Subuh. Tujuannya agar prajurit muslim tidak sholat. Hebatnya, setelah pensiun BM berkantor di CSIS.Namun diliat tahun terakhir, kekuasan CSIS meredup, apalagi setelah lahirnya ICMI. Sekarang menurut Romo Mangunwijaya, CSIS itu sudah habis.

Namun Benarkah ..??. Belum tentu ..!! Setelah hampir 32 tahun turut menikmati dan mangatur negeri ini, tentunya kelompok ini tidak rela

begitu saja melepaskannya. Indikasi ini semakin terang bila mencermati berbagai aksi demo anti SI MPR yang lalu. Kalangan Kristen dengan FORKOT dan forum forum lainnya berbasis UKI dan Atmajaya adalah golongan yang paling vokal menentang keberadaan Habibie. Bahkan pada aksi demo tersebut, pimpinan Universitas tersebut beserta kalangan gereja paling terang terang mendukung demo anti SI. Wajar saja jika ada yang menghubungkan sejumlah aksi tersebut dengan kelompok ini.

Beberapa nara sumber yang berhasil dihubungi percaya akan analisa tersebut. “Ini sangat mungkin, kata Husein Umar, di antara ordo Khatolik, ordo Jesuit memang terkesan militan. Ordo ini sering menunjukan sikap tidak bersahabat. Bahkan dalam hal-hal tertentu cenderung agresif, seperti Pastur Sandyawan. Pastur Sandiayawan adalah ber-ordo Jesuit. Kalau kita lihat gerakan dan isu-isu yang dia lontarkan sangat dapat mempengaruhi publik, seperti di-*blow-up*-nya pemberitaan perkosaan massal.

Manuver-manuver Pastur Sandyawan tentang isu perkosaan massal, pertemuan 14 Mei 1998 di Kostrad serta kematian Itha Marthadinata, misalnya, dengan jelas gambarkan visi dan misi politis sang Pastur. Hal ini juga dikeluhkan sekretaris TGPF, Rosita S Noor, saat terjadi polemik soal pengumuman hasil TGPF.

Sesungguhnya kelompok Jesuit dapat berbuat apa saja, karena mereka memiliki banyak uang, setelah cukup lama di lingkaran ORBA. Mereka mengeluarkan uang berapa saja demi kepentingan ideologi mereka.

Benar bahwa konflik yang terjadi akhir akhir ini lebih bernuansakan ideologis. Cirinya adalah apriori. Kalau konflik itu sifatnya hanya karena perbedaan kebijakan, maka kebijakan itu dapat diakomodir dan mestinya

konflik itu selesai. Tetapi konflik yang bersifat ideologis sulit mendapatkan titik temu karena di dalam terdapat perbedaan.

Politisi Golkar, David Napitupulu (almarhum), pernah berceritera kepada sahabatnya. Temanya, seputar aksi dan agenda politik di era Orde Baru yang tidak terlihat oleh mata telanjang publik.

Kendati begitu agenda itu menimbulkan persoalan politik tersendiri yang berdampak pada kehidupan publik dan elit yang berkuasa. Ceritera itu mengungkap segala kemunafikan intelektual dan politik yang menghancurkan semangat berdemokrasi.

Secara subyektif David Napitupulu merujuk pada pengalaman dirinya. David merupakan salah seorang Eksponen 66 yang membantu menurunkan Soekarno dari kedudukan Presiden RI di 1966. David Napitupulu dan kawan-kawan, pada saat yang bersamaan sekaligus mendorong naiknya Soeharto ke kursi RI-1.

Walaupun begitu, di era Soeharto, David tidak pernah diberi peran politik yang berarti. Hal inilah yang membuatnya tidak bisa diam tanpa bicara. Yang menjadi kekecewaannya, keputusan Soeharto tentang dirinya antara lain katanya berdasarkan pertimbangan lembaga pemikir CSIS. Ia tercatat sebagai Eksponen atau Angkatan 66 bersama Cosmas Batubara, Mar’ie Muhamad, Abdul Gafur dan Soerjadi.

“*Coba anda analisa, mengapa Orde Baru, Pak Harto tidak pernah memberi kepercayaan kepada saya. Apa kurang peran politik saya? Saya yang menyelamatkan Pemuda Pancasila dan membawanya dekat dengan kekuasaan. Saya yang mendirikan AMPI sayap pemuda Golkar. Saya ikut*

membidani KNPI. Tapi saya akhirnya hanya menjadi Dubes RI di Meksiko, jauh dari Tanah Air. Itupun di saat semangat berjuang saya, tidak lagi seperti di usia 40-an tahun. Jadi sepadankah itu dengan peran saya?" ujar penganut protestan itu sambil bertanya saat bermain golf di Padang Golf Pondok Indah, Jakarta, beberapa tahun silam.

Saat itu David Napitupulu baru menyelesaikan tugasnya sebagai Dubes RI Meksiko dan peran CSIS seperti sedang tiarap. Setiba di Jakarta, ia merasa tidak nyaman. Tiga tahun berada di luar negeri, membuat dirinya seperti terputus dengan politik dan kekuasaan. Padahal politik dan kekuasaan ibarat darah dan jantung, yang telah membesarkan dirinya.

Ia menjadi orang asing, tak tahu harus mengerjakan apa. Sehingga satu-satunya kegiatan yang bisa dilakukannya, mengisi hari-hari yang begitu kosong, bermain golf, sambil berceritera tentang visi ataupun masa lalu kepada sesama pegolf.

Sahabatnya tidak bisa memberi analisa. Sehingga David Napitupulu sendiri yang memberi uraian sekaligus jawaban. "*Selama Presiden Soeharto masih mempercayai CSIS, selama itu orang seperti saya, tidak akan pernah mendapat posisi. Yang mendapat rekomendasi pasti tokoh seperti Bung Cosmas Batubara atau sekalian yang beragama Islam tetapi dianggap tidak menjadi ancaman*," tuturnya dengan wajah serius.

Penggalan ceritera ini merupakan salah satu cuplikan bagaimana lembaga pemikir (think tank) CSIS secara diam-diam dikritisi oleh politisi papan atas yang tahu banyak isi perut Orde Baru.

Ceritera berkaitan dengan CSIS ini, mengemuka secara tiba-tiba, bersamaan dengan munculnya CSIS yang disebut-sebut sebagai ‘operator politik’ yang ingin kembali mengulang suksesnya.

David Napitupulu mengkritisi CSIS, sebab yang dia anggap tidak wajar adalah sikap lembaga ini dalam mempromosikan kebhinekaan atau keanekaragaman. David menilai CSIS seperti halnya Amerika Serikat, menerapkan kebijakan yang disebut standar ganda.

Dalam setiap kesempatan CSIS atau anggota-anggotanya selalu mempromosikan pemikiran intelektual tentang pentingnya Indonesia mengadopsi paham kebhinekaan atau keanekaragaman. Tetapi dalam praktek tertutup atau secara diam-diam, lembaga pemikir ini lebih memberi ruang kepada tokoh-tokoh yang berasal dari minoritas.

Lembaga ini sangat aktif mendorong terbentuknya hubungan yang harmonis antara komunitas pribumi dan non-pribumi. Tetapi dalam implementasinya, terkadang atau justru lebih mempromosikan kelompok pemikir dari salah satu etnis atau kepercayaan tertentu. Di dunia bisnis dan usaha pun, konsepnya kurang lebih sama.

Ceritera yang memiliki kesamaan diungkap oleh Taufiq Kiemas (almarhum), suami Megawati Soekarnoputri. Politisi asal Palembang, Sumatera Selatan itu, hanya terdiam, tidak bersemangat berbicara, ketika dalam satu diskusi terbatas, tersembul nama Soerjadi. Tokoh yang dimaksud, Ketum PDI Soerjadi yang berseberangan dengan isterinya.

Selidik punya selidik, Taufiq ketika itu merasa Soerjadi merupakan orang yang diselundupkan CSIS ke jantung PDI. Soerjadi sebagai Ketua Umum,

sementara Sekjennya Nico Daryanto. Nico (Katolik) mengisi posisi yang biasanya diberikan kepada Parkindo (Protestan).

Dalam pandangan Taufiq Kiemas, tugas pengurus PDIP itu untuk menjinakkan PNI (Partai Nasionalis Indonesia) yang masih sangat fanatis pada Proklamator dan Presiden Pertama RI, Soekarno (almarhum). Agenda yang mau diciptakan, paham Soekarno tidak boleh mengental di masyarakat Indonesia.

Tapi yang paling mendasar di era Soeharto, di masa CSIS menjadi pemikir kepercayaan Orde Baru, Soekarno tidak pernah diakui sebagai penemu ataupun penggali Pancasila. Soekarno atau Bung Karno bukanlah negarawan yang memiliki visi begitu luas dan tak terbatas. Soekarno tidak punya *legacy*.

Sekalipun tidak menuduh secara langsung, tetapi Taufiq cukup kecewa dengan sikap CSIS yang tidak berusaha merestorasi nama baik Soekarno selama pemerintahan Orde Baru. Padahal kekuatan dan kesempatan itu, dimiliki oleh CSIS.

Dengan Soerjadi yang sama-sama aktif di GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia), Taufiq tidak melihat keberpihakan sahabatnya itu kepada Soekarno. Taufiq kemudian menyinggung soal peran tersembunyi CSIS dalam membesarkan PDI lewat Soerjadi. Pokoknya PDI boleh eksis tetapi cukup menjadi hiasan demokrasi saja.

Ibarat tanaman hias, PDI oleh Soerjadi melalui konsep CSIS cukup dijadikan seperti pohon bonsai. Enak dipajang sebagai hiasan di sudut manapun dalam rumah, tapi pasti tidak akan menganggu apalagi

membahayakan. PDI di era Soeharto hanya dijadikan simbol demokrasi sekaligus oposisi macan kertas.

Untuk bertugas dalam segala kegiatan politik itu, Soerjadi selaku Ketua Umum PDI kemudian diberi kepercayaan Wanandi Bersaudara (Jusuf dan Sofjan Wanandi) memimpin perusahaan afiliasi mereka PT Aica Aibon. Di perusahaan itu, Soerjadi memegang posisi (rangkap) Presiden Direktur. Pesan moral dari ceritera dua tokoh yang sudah berpulang ini, cukup jelas. Cermati segala usaha “come back”nya CSIS. PDI Perjuangan atau Megawati harus lebih berhati-hati.

Usaha itu mulai terlihat dari peran orangnya yang ada di dunia bisnis, untuk mempertemukan Megawati dan Jokowi dengan para Dubes negara sahabat. Peran CSIS, dulunya disalurkan melalui Golkar. Tapi karena kepemimpinan Golkar tidak cukup kuat dan situasi politik nasional tidak kondusif, CSIS bisa mengalihkan dukungannya kepada PDI Perjuangan.

Peran CSIS dalam dunia politik di Indonesia pernah begitu dominan dan menyentuh sendi-sendi kehidupan bangsa yang sensitif. Paradigma CSIS, bagaimana mengatur dunia politik dan kekuasaan di Indonesia lewat pemikiran-pemikiran yang dibangun oleh para intelektual di lembaga nirlaba itu.

Dari segi pemikiran dan kontribusi itu, hal tersebut sangat positif dan produktif bagi masyarakat luas. Tetapi pengalaman menunjukkan lembaga ini bukanlah lembaga tempat dimana orang-orang suci berkumpul. Sehingga kepentingan mereka tak bisa dianggap yang paling mulia.

Cermati. Lembaga ini sudah pernah membenturkan bangsa sehingga Indonesia nyaris terkotak-kotak. Demokrasi Indonesia tidak membutuhkan mediator-mediator politik seperti yang mau diperankan oleh CSIS lewat Jakob Soetoyo.

Megawati sebaiknya jangan menyerahkan mandat – sekalipun terbatas sifatnya kepada kelompok yang disebut berkali-kali di atas. Kalau butuh konsep dan pemikiran, besarkanlah Mega Center atau hidupkan Taufiq Kiemas Institute. Itu jaub lebih terhormat dan monumental.

Lewat dua lembaga ini, besok pun atau kapan saja Megawati bisa menghadirkan penyeimbang kekuatan dunia seperti Dubes Rusia, India, Afrika Selatan atau Brasil.

G. THE JAKARTA POST, MEDIA PROPAGANDA CSIS

Di bawah ini adalah proses pendirian media The Jakarta Post dari media propaganda Orde Baru menjadi media propaganda CSIS dan keluarga Wanandi yang disarikan dari memoar Bill Tarrant, mantan jurnalis asing the Jakarta Post dalam memoar berjudul RI, Reporting Indonesia, The Jakarta Post Story 1983-2008 terbitan Equinox Publishing.

Jusuf Wanandi took his place in the line outside Minister of Information Ali Murtopo’s office in Jakarta one hot July morning in 1982. After 18 years working with Murtopo, he was not surprised by the parade of leftist intellectuals, jihadists, gangsters, double-dealers, teachers, preachers, journalists, tribalists, union leaders, shamus and finks, also waiting for their turn. This was Murtopo’s intelligence network – a motly group that Indonesians had long called “the Murtopo Zoo.” (halaman 33).

Murtopo, however, was unhappy. He was particularly annoyed about what he deemed was unbalanced coverage of Indonesia by westers wire services and newspapers. And there was no worthwhile English-language publication for foreigners to read Indonesia's side of events. Indonesia was the largest and potentially the richest country in Southeast Asia but had two embarrassingly bad English-language dailies that were more the object of ridicule than a serious source of news (halaman 47).

Jusuf had an answer. "*I asked him: 'Why don't you give us a chance to produce something decent in English*?" Jusuf recalled. "*Because it's such a shame that we as the biggest ASEAN country and who are supposed to be the leader in the region, cannot even produce a decent paper in English*." 'That was the emphasis' (halaman 47).

He [Jusuf Wanandi] proposed that the new newspaper be collectively owned and operated by the largest groups in Indonesia and bitter rivals to boot: Golkar's Suara Karya; the Catholic-affiliated morning newspaper Kompas; its biggest competitor, the afternoon daily and Protestant Sinar Harapan (Ray of Hope); and the secular weekly magazine, Tempo. (halaman 47).

Murtopo, the unorthodox thinker and master political puppeteer, loved the idea. Giving the Jakarta post a license to publish would be one of his last official acts as a cabinet minister. (halaman 47).

In the 1994, after the crackdown against the media and a new independent labor union, Suharto issued a presidential decree that put NGOs on notice. An NGO would be shut down if it was found to be "undermining the authority (of the state), discrediting the government…hindering the

implementation of national development" or upsetting "*political stability or security*" (halaman 180).

The NGOs were coming to realize as well that they needed a media strategy to market their message. The Jakarta Post, for its part, saw the NGOs as source material for the kinds of stories it wanted to cover in the 1990s. If the NGOs were eager sellers, Jakarta Post Managing Director Raymond Toruan was a motivated buyer. He wanted NGO people to hang out with him and other reporters in the office. "*We were a bit political. We knew we couldn't go on with Suharto. But we also knew the country was not prepared for democracy. We had had a dictatorship since 1955. Our philoshopy was to help develop a new Indonesia, a civil society. So what we were doing at the time was to help grow elements of civil society to help prepare for a change of regime to a more democratic one"* (halaman 181).

Raymond Toruan and Susanto Pudjomartono gave money to Muslim leaders, student leaders and in fact, it had been long established that the Jakarta Post's office was the headquarters of the student movement. The newsroom generally supported the activist stance of their top managers, though some were a little uneasy with the intimate relationships that Raymond had developed with student leaders. "*They would come here and have meetings in Raymond's room often from midnight to morning talking about the next moves – what issues to blow up, when the next rallies would be,*" says Harry Bhaskara, the opinion page editor at that tim. "*We in the newsroom supported Susanto's and Raymond's vision about the government. But I was surprised to hear some NGO people saying 'hey your boss gave us money.' I suppose it was going too far as a newspaper to give them money. We could agree with their vision, but not give them*

money. That’s going too far.” (halaman 199).

H. CSIS MERUSAK NAMA BAIK TIONGHOA, KATOLIK DAN KRISTEN

CSIS itu identik dengan istilah “Cina Senang, Israel Senang”. Karena, CSIS itu berdiri dari kolaborasi antara tokoh dan aktifis Katolik (Ordo Jesuit) dengan jenderal “abangan”.

Diantara, kalangan aktivis Katolik, seperti Pater Beek, Hary Tjan Silalahi, Sofjan Wanandi (Liem Bian Kie), Yusuf Wanandi (Liem Bian Koen), dan Markus Wanandi, Mari Elka Pangestu, Daud Yusuf, dan tokoh lainnya.

Para tokoh militernya, yang berkolaborasi dengan kalangan aktivis Katolik, seperti Jenderal Ali Moertopo, Soedjono Humardani, dan Beny Murdani. Mereka inilah yang menjadi ‘backbone’ (tulang punggung) Soeharto, selama berkuasa.

Mereka berada di balik semua kebijakan yang menindas dan menghancurkan golongan Islam. CSIS menjadi ‘cover’ kepentingan Cina dan Zionis-Israel, yang ingin mengendalikan Indonesia.

Maka, sepanjang kekuasaan Soeharto, selama lebih tiga dekade, CSIS memberikan arah kebijakan yang tujuan ‘menukangi’ Islam, dan memberikan keleluasaan kepada kelompok Cina, yang merambah ke semua sektor ekonomi Indonesia.

Maka, selama tiga dekade, kelompok Cina, yang mula-mula ‘gembel’ dengan dukungan para jenderal ‘abangan’ yang memiliki akses langsung

kepada kekuasaan Soeharto, mendapatkan berbagai privilege (keistimewaan), seperti mendapatkan lisensi (izin), modal, dan dukungan politik dari Soeharto.

Hanya dalam waktu kurang dari satu-setengah dekade, kelompok yang menjadi pilar kekuasaan Soeharto itu, sudah berhasil menguasai ekonomi Indonesia.

Kelompok Cina ini, mula-mula oleh Soeharto diberi lisensi ‘HPH’ (Hak Pengusahaan Hutan), yang membuat mereka menjadi ‘kaya raya’ alias menjadi ‘taipan-konglomerat’, seperti Liem Sieo Liong, Prayogo Pangestu, Eka Cipta, dan sejumlah konglomerat lainnya. Inilah cikal bakal lahirnya 200 konglomerat Indonesia, yang menguasai 80 persen ekonomi Indonesia.

Masih ditambah diakhir krisis ekonomi Indonesia l998, Soeharto mengeluarkan kebijakan dana talangan (bailout) kepada sejumlah bank yang menjadi milik konglomerat Cina, dan mereka memarkup bailout, yang dikenal BLBI yang jumlahnya mencapai Rp 650 triliun.

Diantara mereka ada yang melarikan hasil ‘rampokan’ mereka ke Singapura. Sementara itu, Jenderal Ali Moertopo, terus menyudutkan dolongan Islam, melalui isu ‘Komando Jihad’, DOM di Aceh, Pembajakan Woyla, Tanjung Priok, Talangsari-Lampung, semuanya ini hanyalah tujuannya menghancurkan umat Islam.

Bahkan, Ali Moertopo, di awal Orde Baru, melarang investor asing melakukan kerjasama dengan pengusaha Islam. Tujuan menghancurkan ekonomi kalangan Islam dan pribumi. Jadi, golongan Islam dibuat oleh

jaringan Cina Katolik (Ordo Jesuit) menjadi ‘zero’ (nol) di dalam segala sektor kehidupan, sampai menjadi golongan yang pariah (gembel).

Sekarang, menjelang pemilu presiden 2014, masuk kelompok Cina Kristen, yang ingin mengulangi lagi, seperti sejarah awal Orde Baru, dan menggunakan tokoh ‘abal-abal’ Jokowi. Tujuannya sama: “*Menghancurkan dan menindas golongan Islam*”.

Tokoh yang baru muncul sekarang itu, Jacob Soetojo. Dia dekat dengan James Riyadi, pendeta Evengalis, yang menjadi murid Pendeta Pat Robertson, yang sangat membenci Islam dan umat Islam di Amerika. Pat Robertson, terlalu sering mengeluarkan pernyataan yang sangat membenci terhadap Islam. Dengan kata-kata yang ‘super jorok’ menghina Islam dan Nabi Muhammad Shallahu’alaihi Wassalam.

Sekarang, bagaimana Jacob Soetojo bisa menggalang dukungan dari Amerika, Inggris, Vatikan, dan sejumlah negara Barat lainnya, dan kemudian mereka bertemu dengan Mega, Jokowi dan Sabam Sirait di rumahnya. Sungguh luar biasa. CSIS ingin kembali menukangi “merekayasa” perubahan politik yang akan menguntungkan bagi: “Cina dan Israel”.

Indonesia yang penduduknya 240 juta itu, 85 persen Muslim. Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis, secara geopolitik dan ekonomi. Maka, CSIS yang menjadi ‘cover’ berbagai kepentingan itu, sudah bersumpah, harus “Jokowi” yang menjadi presiden Indonesia mendatang.

Mengapa Zionis-Israel ikut bermain di Indonesia? Ini bisa dilihat intensitas kunjungan Dubes Israel di Singapura ke Jakarta, dan melakukan pertemuan

dengan berbagai kelompok dan organisasi, dan ingin merekayasa perubahan politik di Indonesia, tetap menguntungkan bagi kepentingan Zionis-Israel.

Cina dan Israel mempunyai kepentingan yang sama, yaitu melemahkan dan menghancurkan golongan Islam di Indonesia. Cina dan Israel sudah menguasai ekonomi nasional Indonesia. Tinggal selangkah lagi, menguasai kedaulatan politik.

Bayangkan, 85 persen saham perbankan sudah milik asing. Freeport, New Mont, Bumi Resources (Batu Bara), gas dan sumber daya lainnya, termasuk hutan, kelapa sawit, sudah menjadi milik mereka.

Sementara itu, Israel tidak ingin di Indonesia terjadi seperti di Timur Tengah, terjadi 'Arab Spring' (Musim Semi Arab), perubahan politik di dunia Arab, yang membahayakan kepentingan dan keamanan Israel.

Maka, melalui tokoh boneka seperti "Jokowi" sekarang ini, kelompok-kelompok Cina dan Zionis, menggunakan kekuatan lokal, mengendalikan Indonesia, supaya Indonesia tetap terjajah, sumber daya alamnya dikuasai, dan secara politik dikendalikan, sehingga tidak menjadi ancaman bagi: "Asing dan A Seng".

BAB III
TOKOH-TOKOH DI BALIK CSIS

A. PATER JOSEPHUS BEEK

Josephus Beek lahir 12 Maret 1917 di Amsterdam. Tahun 1935, ia bergabung dengan Ordo Yesuit Belanda di Mariëndaal, Grave. Ia menjadi novis di Jawa Tengah antara 1931 dan 1939. Di masa pendudukan Jepang (1942-1945) ia sempat mendekam di penjara. Setelah perang usai, ia melanjutkan pendidikannya di Maastricht, Belanda Selatan.

Ia ditahbiskan menjadi pastur pada tahun 1948 dan ditugaskan kembali ke Indonesia sejak 1956. Mula-mula ia aktif sebagai misionaris di Yogyakarta, kemudian pindah ke Jakarta. Di tahun 70-an ia dinaturalisasi menjadi WNI. Pater Joop Beek wafat 17 September 1983 di Jakarta dan dimakamkan di Giri Sonta, Jawa Tengah.

Di tahun 2005 terbit buku *Dit was Brandpunt, goedenavond* (Demikian Fokus kali ini, selamat malam) tulisan Aad van den Heuvel, mantan presenter radio dan televisi Katholik Belanda, KRO. Cukup banyak media yang menyorot buku ini, tapi tidak banyak yang menyebut pertemuan mantan presenter itu dengan Pater Beek di tahun 1966.

Di sebuah kantor di Jalan Gunung Sahari 88, Jakarta, Van den Heuvel sempat mewawancarai Pater Beek. Pada kesempatan itu, Pater Beek menyatakan keprihatinannya tentang komunisme dan menganggap Islam sudah membahayakan. Ia berambisi ‘menyelamatkan’ minoritas pemeluk agama Katholik saat itu.

Pater Beek berpendapat, hal itu dapat diwujudkan dengan memberi dukungan dan penyuluhan ke TNI. Ia tak segan mengirim satuan tentara untuk memperkuat Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto. Van den Heuvel sendiri mencap Pater Beek sebagai 'dalang wayang politik' di Indonesia.

Sebetulnya, Van den Heuvel sudah menyinggung peran misterius Pater Beek dalam sejarah Indonesia di sebuah roman (1991) dan wawancara (1993). Bahkan, di tahun 1993 Van den Heuvel menyebut Beek sebagai otak genius penggagalan kudeta PKI di tahun 1965 dan makar-makar lainnya setelah itu.

Meskipun banyak kritisi yang menganggap pernyataan Van den Heuvel sebagai isapan jempol belaka, di bukunya Dit was Brandpunt, goedenavond ia kembali menekankan peran Beek di peristiwa sekitar bulan September dan Oktober 1965. Menurutnya, Beek banyak bekerja sama dengan satuan militer Jenderal Soeharto, terutama dengan dua penasehatnya: Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani.

Van den Heuvel sendiri menyaksikan di tahun 1966 Pater Beek sedang menyusun naskah pidato di mesin tik tua merek Remington dan keesokan harinya pidato tersebut dibacakan oleh Soeharto. Selain itu, Van den Heuvel melihat beberapa catatan Beek di tahun 1963 mengenai rencana pembentukan Golkar.

'Arsitek' Golkar larut terlibas zaman Menurut Van den Heuvel, Golongan Karya – 'kendaraan politik' kekuasaan Soeharto hingga tahun 1998 – adalah grup fungsional yang terdiri dari petani, nelayan, wanita, buruh, pegawai dan sebagainya. Partai ini sangat mirip dengan bentuk

korporatisme di Eropa yang berakar dari tradisi Katholik.

Korporatisme menyerukan kerjasama yang erat di antara kelompok-kelompok fungsional tersebut. Pendekatan yang sama sekali bertolak belakang dengan paham komunisme yang justru menyerukan perbedaan kelas. Mungkinkah penggambaran Van den Heuvel meleset? Atau mungkin halusinasinya saja?

Majalah Tempo di tahun 1999 mewawancarai Dick Hartoko, salah seorang Yesuit. "*Bentuk awal Golkar adalah ide Beek sepenuhnya,*" ujar Hartoko tanpa rasa ragu sedikit pun. Setahun sebelumnya, sosiolog George Aditjondro menulis pernyataan yang sama di majalah Islam Media Dakwah.

Aditjondro berpendapat bahwa Beek menerapkan 'teori hierarki lawan' dalam membasmi 'pengaruh buruk' bagi umat Katholik di Indonesia hingga komunisme dapat dibendung di tahun 1965. Untuk Beek tersisa dua musuh utama, tentara dan Islam. Ia menganggap Islam sebagai musuh yang lebih berat dibanding tentara.

Lambert Giebels, penulis biografi Soekarno pada tahun 2001 menulis peran Beek di dalam demonstrasi mahasiswa di tahun 1966 yang dapat menggulingkan Soekarno. Akhirnya, Soeharto dapat duduk di kursi kepresidenan. Hanya saja, data-data Giebels sering dianggap tidak akurat.

Data-data lengkap mengenai aktivitas Beek baru dapat ditelusuri tahun 2006 lalu di publikasi ilmiah seorang mahasiswa doktoral asal Kalimantan Selatan di Universitas Utrecht. Mujiburrahman menulis Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order, sebuah

thesis yang jauh dari sorotan media massa.

Mujiburrahman mengkonfirmasi fakta-fakta tersebut di dalam thesisnya dan ia juga menggambarkan kelompok minoritas Kristen di Indonesia yang merasa terancam dengan merebaknya komunisme pada awal tahun 60-an. Kaum Katholik mencoba mencari jalan keluar dengan menyusupi organisasi-organisasi militer.

Kaderisasi Khalwat Sebulan (Khasebul) Pater Beek pun ingin satuan militer tersendiri. Bersama-sama dengan beberapa pastur dan uskup, ia mengumpulkan dan mengorganisasi latihan militer bagi pemuda dan mahasiswa Katholik. Khalwat dimulai di Asrama Realino di Yogyakarta dan selanjutnya dipindahkan ke Jakarta. Sebagian dana – selain dari Indonesia – didapat Beek dari Belanda dan Jerman.

Dalam training kader militernya, tentara-tentara Beek dilatih selama sebulan penuh. Menurut Richard Tanter, peneliti asal Australia, calon militer tersebut diperlakukan tidak manusiawi. Seringkali mereka mendapat hukuman pukulan dan dibangunkan tengah malam untuk menjalani latihan fisik.

Beberapa anggota militer tersebut memberikan detail secara anonim. Salah seorang dari mereka dikurung selama tiga hari tanpa diberi makan atau diikat di kursi di sebuah ruang yang sengaja digelapkan dan seekor ular – kendati tak berbisa – dibiarkan menjalar di bahu mereka. Ada lagi yang diikat setengah telanjang di pohon dilumuri lumpur dan dibiarkan semalaman digigiti nyamuk.

Setelah Khasebul usai, tentara didikan Beek ditugasi menjadi mata-mata handal untuk kepentingan jemaahnya. Konon, setelah kematian Beek di tahun 1983 bentuk pendidikan militer ini masih terus berlangsung. Di tahun 1971, peran Pater Beek juga disinggung dalam pembentukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Selain keterlibatan langsung dengan lembaga prestisius CSIS semasa Orde Baru ini, Beek dan tentaranya juga membuat banyak manuver politik dan terkait erat dengan BAKIN (kini BIN) dan OPSUS. Bahkan, ada desas desus ia berhubungan dekat dengan lembaga intelijen Amerika, CIA. Friksi dan konflik pun mulai bermunculan.

"*Secara teoretis idenya sebetulnya positif, tetapi pada prakteknya menjadi kisruh*," ujar salah seorang kolega Beek. Banyak pastur-pastur muda waktu itu yang menentang Beek dan membentuk gerakan-gerakan protes. Jenderal Soetopo Joewono, Kepala BAKIN saat itu pun memohon Vatikan untuk menarik Beek dari Indonesia.

B. LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Luhut Binsar Pandjaitan adalah orang yang "menemukan" Jokowi, ketika itu masih menjadi Walikota Solo, kemudian membuka usaha mebel baru bersama Jokowi dan berperan besar atas kemenangan Jokowi pada pemilu 2014. Atas jasanya yang besar kepada Jokowi itulah sehingga Luhut Binsar Pandjaitan turut menerima hadiah berupa jabatan Kepala Staf Kepresidenan yang memiliki kekuasaan lebih besar daripada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Lalu siapakah Luhut Binsar Pandjaitan itu?

Menurut Profesor Salim Said, ahli militer terkemuka dalam buku otobiografinya berjudul Dari Gestapu Ke Reformasi, Serangkaian Kesaksian, Leonardus Benny Moerdani (LB Moerdani) yang dianggap sebagai Raja Intelijen Indonesia mempunyai seorang anak kesayangan atau anak emas yaitu Luhut Binsar Pandjaitan (LB Pandjaitan). Pernyataan Salim Said mengutip Adam Schwarz adalah sebagai berikut:

"*Berbeda dengan panglima-panglima sebelum dan sesudahnya, Benny [Moerdani] memang memelihara sejumlah orang yang disenanginya. "Mereka itu semacam golden boys Benny Moerdani," kata Schwarz. Salah satu yang dikenal sebagai "anak emas" itu adalah Luhut Binsar Pandjaitan*."

(Salim Said, hal. 343)

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Sintong Pandjaitan bahwa ketika terjadi Debennysasi atau menyingkirkan orang-orang yang dekat dengan LB Moerdani, maka posisi LB Pandjaitan yang digolongkan sebagai anak emas LB Moerdani turut terkena imbasnya (Hendro Subroto, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, halaman 463).

Bila LB Pandjaitan alias Luhut Binsar Pandjaitan bisa menjadi anak emas seorang legenda seperti LB Moerdani tentu peraih Adhi Makayasa berkat menjadi lulusan terbaik dari Akademi Militer Nasional angkatan tahun 1970 tersebut mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki rekan sejawat lain. Apakah kelebihan LB Panjaitan itu? Satu hal yang pasti, Luhut Binsar Pandjaitan memiliki kesetiaan tidak tergoyahkan kepada Leonardus Benny Moerdani, sebagaimana diungkap oleh Tempo dalam halaman 173 buku Benny Moerdani, Yang Belum Terungkap, bahwa Luhut tidak menyesal

karena berpegang kepada ajaran Benny Moerdani dan hal tersebut menyebabkan karir militernya mandek ketika terjadi de-Benny-isasi.

LB Moerdani adalah pahlawan palangan Irian Barat, jadi apakah LB Pandjaitan juga seorang pemberani ketika bertempur? Kelihatannya tidak, karena Hendro Subroto, wartawan perang legendaris mencatat bahwa LB Pandjaitan pernah menerima hukuman saat memimpin Tim C Group 1 Para Komando Satuan Lintas Udara, Kopassus dalam Operasi Seroja dan diterjunkan untuk merebut pangkalan udara yang berlokasi di Dili, Luhut Binsar Pandjaitan gemetar ketakutan sampai hampir ngompol karena tidak berani terjun dan hal ini menyebabkan timnya batal diterjunkan (lihat buku Operasi Udara di Timor Timur karangan Hendro Subroto).

Luhut Binsar Pandjaitan juga kurang dari segi kemampuan militer terbukti walaupun sama-sama pernah berlatih dengan Prabowo Subianto di US Army's Special Forces, Fort Bragg, Amerika Serikat tapi pelatih mereka, Jenderal Wayne Downing justru menyebut nama Prabowo Subianto sebagai murid terbaik di antara sekian banyak prajurit asing yang pernah dia latih, padahal LB Pandjaitan lulus empat tahun lebih dulu daripada Prabowo Subianto. Berikut ini pernyataan Jenderal Wayne Downing:

"*Of all the foreign soldiers I ever trained, two stood out. One was Abdullah II bin Al-Hussein, the reigning King of Jordan. The other was Prabowo Subianto.*"

Fakta bahwa kemampuan tempur seorang LB Pandjaitan sangat rendah adalah dia selalu disekolahkan sepanjang karirnya dan dilewatkan setiap ada kebutuhan untuk melaksanakan operasi dengan kesulitan tinggi, pembebasan sandera di pesawat Garuda dalam Operasi Wolya misalnya,

Panglima ABRI Jenderal M. Jusuf LB lebih memilih Sintong Pandjaitan dan Soebagyo HS sebagai pelaksana operasi. Demikian pula bila melihat karirnya selama dinas, Luhut Binsar Pandjaitan tidak pernah diangkat sebagai panglima kodam atau bahkan kasdam manapun, pengalaman teritorialnya hanya sebatas sebagai Komandan Korem 081/Dhirotsaha Jaya, Madiun Jawa Timur tahun 1995 sebab hanya perwira terbaik yang akan menjadi pangdam sebagai bekal bila diangkat menjadi Panglima ABRI atau KSAD. Selain itu, selama karirnya, LB Pandjaitan yang besar di Kopassus juga tidak pernah menjadi Komandan Jenderal Kopassus.

Selain tidak memiliki kemampuan yang memadai sebagai seorang prajurit, Luhut Binsar Pandjaitan juga memiliki sifat yang sombong dan congkak serta pongah yang tidak memiliki tata karma dalam bermasyarakat. Sifat buruk LB Pandjaitan ini pernah diceritakan oleh Brigjend (Purn.) Slamet Singgih dalam memoarnya, Intelijen, Catatan Harian Seorang Serdadu, halaman 204 – 205, sebagai berikut:

"*Pada suatu saat Letnan Kolonel Inf. Luhut Pandjaitan/Angkatan 70/Jenderal (Purn) menghormat dan datang menemui saya di ruangan kerja saya…Pak Luhut minta dibuatkan Security Clearance (SC) sebagai persyaratan administrasi untuk pergi ke Amerika Serikat. Setelah saya berikan seberkas formulir untuk diisi, dia mengatakan: 'Tadi Bang Todo bilang agar minta dibuatkan saja sama Paban D1 Slamet Singgih.; Saya jawab, 'Ya Pak, tapi Bapak harus mengisi dulu formulir ini.' Melihat raut mukanya langsung berubah menunjukan 'rasa kesal', saya katakan kepadanya, 'Kecuali kalau ada instruksi dari Pak Todo untuk tidak perlu mengisi formulir, akan segera saya buatkan atau silakan Bapak menanyakan kepada Pak Todo dulu.'Tidak lama kemudian, saya ditelepon oleh Pak Todo untuk membuatkan Security-Clearance-nya Luhut*

Pandjaitan setelah Pak Luhut menghadap Pak Todo.

Setelah itu saya menghadap Pak Todo dan menyarankan, 'Sebaiknya Luhut Pandjaitan tetap mengisi formulir SC Pak, karena ini sudah merupakan prosedur dan keberangkatan Luhut pun tidak segera. Jenderal-jenderal lain yang akan ditugaskaryakan ataupun untuk keperluan lain kan juga tetap mengisi. Siapa lagi Pak kalau bukan kita yang menjalankan prosedur.'

Alhamdullilah saran saya diterima. Luhut Pandjaitan tetap mengisi formulir SC dengan dispensasi, saya izinkan untuk mengisinya di rumah. Keesokan harinya berkas isian/jawabannya diserahkan kepada saya dan segera saya proses pembuatan SC-nya.

Setelah Letkol Luhut Pandjaitan kembali dari Amerika, saya sempat bertemu dan menanyakan, 'Mana oleh-olehnya? Saya lihat dia agak salah tingkah dalam menjawab, langsung saya katakan, 'Nggak usah Pak, saya main-main aja kok.' Dalam hati saya membatin, andai kata saya jadi Luhut Pandjaitan pasti Slamet Singgih saya bawakan oleh-oleh sekedar souvenir dari Amerika."

Tampaknya kelebihan LB Pandjaitan yang dilihat oleh LB Moerdani bukan pada keberanian atau kemampuan militernya maupun karakternya sebagai manusia, tetapi lebih kepada seberapa jauh LB Pandjaitan bisa bertindak kejam bila keadaan membutuhkan untuk kekejaman, terbukti Luhut Binsar Pandjaitan pernah memberi perintah menembaki sipil tidak bersenjata dengan peluru tajam. Kejadian ini diceritakan sendiri oleh LB Pandjaitan kepada tim dari Tempo:

"*Letusan peluru itu tidak digubris para pendemo. Mereka terus melempari tentara dengan batu. Merasa terdesak Luhut [Pandjaitan] memerintahkan anak buahnya menembak kaki para pendemo. Situasi makin kacau karena mereka kocar-kacir. Tentara yang mengejar tidak lagi mengarahkan moncong ke aspal, tapi sudah mengincar sasaran. Luhut menduga banyak yang tewas saat kejar-kejaran itu.*"

(Massa Misterius Malari, Tempo, hal. 71)

Tentu saja selain kehebatannya sebagai seorang raja intelijen, LB Moerdani juga terkenal akan kemampuannya untuk berbuat kejam dengan tingkat kekejaman jauh melebihi Ali Moertopo dan Zulfikli Lubis yang dapat dibuktikan dengan 90% kekerasan pada era Orde Baru mulai dari Operasi Komodo-Petrus-Tanjung Priuk-Kudatuli-Kerusuhan Mei 1998, adalah buah karya Leonardus Benny Moerdani. Sisa 10%nya adalah pekerjaan Ali Moertopo, guru LB Moerdani.

David Jenkins, wartawan senior Australia dalam orbituari kepada Benny Moerdani, "Charismatic, Sinister Soeharto Man" antara lain menulis sebagai berikut:

"*Hardened in battle and no stranger to violence, Moerdani believed that the ends justify the means…He once shocked members of an Indonesian parliamentary committee by saying, in effect, that if he had to sacrifice the lives of 2 million Indonesians to save the lives of 200 million Indonesians he would do so*."

http://www.smh.com.au/articles/2004/09/09/1094530768057.html

Status anak emas ditambah tidak kompeten bila ada di garis depan tampaknya mendorong LB Moerdani mewariskan ilmu intelijennya kepada Luhut Binsar Pandjaitan, hal ini bisa dilihat dari setelah LB Panjaitan membuat aib selama Operasi Seroja, pekerjaan yang diberikan kepda LB Pandjaitan lebih banyak berkutat di dunia intelijen, dan dimulai dengan dia ditarik ke Pusat Intelijen Strategis (Pusintelstrat) menjadi perwira operasi, selanjutnya kembali menjadi perwira operasi pada Satuan Tugas Intel Badan Intelijen Strategis (BAIS) ABRI dan kemudian atas izin LB Moerdani dan muridnya Try Soetrisno, mendirikan Proyek Intelijen Teknik pada Den 81/Anti Teror Kopassus atau proyek Charlie (1985).

Sayangnya sebagaimana dicatat oleh Sintong Pandjaitan dalam bukunya Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando dan ditulis oleh Hendro Subroto, Proyek Charlie malah digunakan LB Pandjaitan untuk merencanakan kudeta kepada Presiden Soeharto, tapi berhasil dicegah sebelum terlaksana. Komentar LB Pandjaitan setelah ketahuan adalah: "*Matilah aku…Waduh,…! Jadi rempeyek lah aku*," (halaman 461). Tentu LB Pandjaitan dan temannya sesama klik LB Moerdani yaitu Sintong Pandjaitan berdalih bahwa tuduhan usaha kudeta di balik Proyek Charlie adalah *fitnah*, namun demikian mengingat proyek ini sudah disetujui oleh Panglima ABRI Jenderal Try Soetrisno maka bila memang niat memberontak itu adalah berdasarkan laporan tidak benar, tentu tidak akan merusak karir LB Pandjaitan.

Karir militer LB Pandjaitan setelah percobaan kudeta yang gagal tersebut lebih banyak dihabiskan sebagai staf operasi atau memimpin sekolah militer, seperti menjadi Komandan Sekolah Pusdik Para Lintas Udara (1987); Komandan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus (Pusdikpassus) (1993) sampai terakhir Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan

Darat (Kodiklat TNI AD) (1997-1999). Setelah itu pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur dia sempat menjabat sebagai Dubes RI untuk Singapura dan Menperindag, masing-masing selama satu tahun. Setelah pensiun LB Pandjaitan menjadi pengusaha dan kelihatannya menyalahkan Prabowo Subianto atas nasib gurunya, LB Moerdani dan nasib karir militernya yang mentok.

Posisi sebagai pengusaha sendiri tampaknya hanya sekedar kedok bagi LB Pandjaitan, karena setelah pensiun dia lebih memilih mempraktekan ilmu intelijen yang pernah diperolehnya dari bekerja di BAIS dan ajaran LB Moerdani dengan menjadi intelijen partikelir. Setinggi apa ilmu intelijen LB Pandjaitan sulit diukur tapi perkiraan saya jauh di bawah AM Hendropriyono, mantan Kepala BIN kesayangan Megawati itu; sedangkan AM Hendripriyono tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan mantan Kepala Bakin Yoga Soegama. Kendati demikian di era damai dan defisit intelijen hebat seperti sekarang maka kemampuan intelijen dari LB Pandjaitan maupun AM Hendropriyono terlihat menonjol.

Untuk memahami ilmu intelijen yang dimiliki LB Pandjaitan kita harus tahu bahwa secara umum ilmu intelijen terbagi tiga yaitu penyelidikan (pengumpulan informasi); pengamanan; penggalangan (gerakan-gerakan rahasia seperti penggalangan massa, propaganda, anti-teror, spionase dan disinformasi) sampai tingkat tertinggi yaitu analis dan biasanya pendidikan analisis hanya untuk para pemimpin, karena sudah diajarkan membuat produk intelijen untuk beragam kegiatan dan tujuan.

Nah, dilihat dari latar belakangnya, posisi terakhir LB Panjaitan di bidang intelijen hanya menjadi perwira operasi pada Satuan Tugas Intel BAIS ABRI maka saya perkirakan ilmu intelijen yang diajarkan LB Moerdani

paling tinggi hanya sampai tingkat penggalangan dan kebetulan keahlian LB Moerdani dan gurunya, Ali Moertopo adalah penggalangan. Masalahnya bila LB Moerdani sangat kuat dalam selidik, pengamanan dan manajemen intelijen, namun LB Pandjaitan sangat kurang dalam ketiga kemampuan tersebut karena latihan dan bakat yang kurang, makanya sekarang strateginya menciptakan capres boneka bernama Joko Widodo jebol, ketahuan kedok dan permainannya. Itu lantaran fokus LB Pandjaitan hanya tertuju pada penggalangan untuk menciptakan capres boneka untuk menandingi orang yang dianggap mengalahkan gurunya, LB Moerdani dan menyebabkan karir militernya mentok sehingga melupakan pengamanan dan manajemen intelijennya sendiri.

Berkat ketidakjelian Luhut Binsar Pandjaitan, sekarang kita mengetahui langkah demi langkah dari perkenalannya dengan Walikota Solo Joko Widodo/Jokowi atas perintah Dubes Amerika Serikat sampai membina Jokowi hingga siap menjadi capres pesaing Prabowo pada pilpres 2009 yang dilatarbelakangi oleh dendam kesumat karena Prabowo Subianto dianggap bertanggung jawab atas tersingkirnya LB Moerdani dan mentoknya karir militer LB Pandjaitan. Kedekatan LB Pandjaitan dengan duta-duta besar Amerika Serikat bahkan membuatnya bisa memarahi Dubes Robert Gelbard dan memberi rekomendasi orang yang harus dianggap sebagai teman oleh sang duta besar selama di Indonesia (Kiki Syahnakri, Timor Timur The Untold Story, penerbit Gramedia, hal. 319).

Adapun langkah LB Pandjaitan melakukan kegiatan intelijen untuk membina Jokowi terbukti dari beberapa hal sebagai berikut:

- Jokowi yang sukses "mengamankan" Abu Bakar Ba'asyir dan Ponpres Ngruki yang terkenal radikal atas permintaan Amerika Serikat yang

dibuat tahun 2005 menyusul Bom Bali mendapat kunjungan pada tahun 2008 dari AM Hendropriyono dan LB Pandjaitan, dua sejoli murid LB Moerdani. Kedua murid terakhir LB Moerdani tersebut mendapat tugas dari CSIS, lembaga bentukan Pater Beek, agen CIA di Indonesia untuk mempersiapkan pemimpin baru untuk mencegah Prabowo Subianto yang naik daun supaya tidak menjadi Presiden Indonesia.

- Pertemuan antara LB Pandjaitan dan Jokowi tidak akan ketahuan bila saja tabir intelijen yang dibuat untuk menutupi pembinaan terhadap Jokowi bukan berupa PT Rakabu Sejahtera, usaha patungan antara Jokowi dengan LB Pandjaitan yang mana dalam Akta Pendirian tertulis modal dasar perusahaan sebesar Rp. 15,5miliar dari LB Pandjaitan dan Gibran Rakabuming Raka yang masih berusia 20 tahun "menyetor" Rp. 19,2miliar (luar biasa tuyul Jokowi karena anaknya yang umur 20 tahun bisa memiliki uang Rp. 19,2miliar). Selain itu yang lebih mencurigakan lagi adalah untuk apa LB Pandjaitan mendirikan usaha mebel dengan seorang pengusaha mebel antah berantah bernama Jokowi yang menghasilkan produk tidak berkualitas padahal usaha sehari-hari LB Pandjaitan adalah bisnis yang lebih prestisius daripada bisnis mebel, Inalum misalnya. Ini adalah kesalahan pertama.

- Kesalahan kedua, untuk mempersiapkan Jokowi ke panggung nasional, LB Pandjaitan membuat operasi intelijen demi menciptakan citra palsu Jokowi sebagai pemimpin muda terbaik negeri ini dengan cara rekayasa. Masalahnya operasi intelijen tersebut menjadi mencurigakan ketika mereka malah menggunakan majalah Tempo milik Goenawan Mohamad, anak binaan Ivan Kats agen CIA dan Fikri Jufri yang mengidolakan sampai tahap terobsesi terhadap LB Moerdani (Janet E. Steele, Wars Within: The Story of Tempo, an Independent Magazine in

Soeharto's Indonesia, Equinox Publishing, hal. 238).

- Kesalahan ketiga adalah sebelum sosok Jokowi dipublikasikan, kelompok perekayasa Jokowi malah mempublikasikan diri menantang SBY yang menghapus dwifungsi ABRI dan terlalu liberal, terbukti pada tahun 2011 sering diadakan pertemuan antara para purnawirawan jenderal yang hari ini mendukung Jokowi dan semuanya bagian dari klik Leonardus Benny Moerdani di kantor Luhut Binsar Pandjaitan di Wisma Bakrie 2, antara lain dihadiri: Kiki Syahnakri, Fachrul Razi, Jonny Lumintang, Agus Widjojo, dan AM Hendropriyono. Walaupun agenda pertemuan dirahasiakan tapi tampaknya ada kaitan dengan suksesi pasca pemerintahan Presiden SBY tahun 2014.

  http://www.rmol.co/read/2011/03/31/22733/Letjen-(Purn)–Kiki-Syah-nakri:-Ini-Musim-Adu-Domba-Perlu-Lebih-Waspada-

- Setelah Jokowi menjadi capres, tabloid The Politics milik Naniek S. Deyang, mantan pendukung Jokowi mengungkap bahwa LB Pandjaitan mendukung pendanaan dan membayar lembaga survei seperti LIPI, CSIS, KOMPAS, SMRC milik Saiful Mujani untuk mendukung Jokowi. Selain itu saat itu LB Pandjaitan memiliki bisnis bersama Jokowi dengan kantor di Gedung Mazda, Menteng. Walaupun membantah namun hari ini terbukti semua lembaga *survey* di atas mendukung Jokowi, Saiful Mujani bahkan bertindak jauh dengan membagi uang di kampanye untuk Jokowi; dan ada perusahaan LB Pandjaitan mengikuti tender pengadaan ERP Jakarta. Ini adalah kesalahan keempat karena sebagai intelijen tidak memiliki organisasi organik sehingga harus mempercayai organisasi jaring, padahal anggota jaring biasanya gampang buka kartu, membuka belang intelijen

yang harusnya dirahasiakan.

- Kesalahan kelima adalah kebakaran gedung milik perusahaan patungan LB Pandjaitan-Jokowi pada tanggal 26 Juli 2012 yang sampai sekarang tidak ketahuan penyebabnya; padahal kita tahu kegiatan perusahaan ini sendiri sangat aneh dan mencurigakan karena anak Jokowi bisa menyetor uang sebesar Rp. 19,5miliar untuk modal usaha patungan dengan LB Pandjaitan.

Kelemahan terbesar LB Pandjaitan tidak lain dari kedudukannya sebagai intelijen partikelir yang tidak memiliki organisasi intelijen organik sehingga dia harus bergabung dengan CSIS, organisasi intelijen buatan Pater Beek, agen CIA. Masalahnya CSIS yang sudah mengadu domba Ali Moertopo dengan Yoga Soegama, Jenderal Soemitro, Alamsyah, M. Jusuf, Sutopo Juwono, Sudharmono; LB Moerdani dengan BJ Habibie, Sudharmono, Prabowo, Ali Moertopo dan Soeharto sendiri, tidak akan bersedia melepas operasi pencapresan Jokowi begitu saja dan oleh sebab itulah sesungguhnya LB Pandjaitan tidak akan pernah bisa mengendalikan mereka, sebaliknya, CSIS yang akan mengendalikan LB Pandjaitan dan Jokowi, karena mereka memiliki prinsip “*Kuda boleh berganti tapi penunggangnya sama*,” atau dengan kata lain presiden negeri ini boleh berubah tapi CSIS yang akan mengendalikannya.

Demikian kisah kreator sosok Joko Widodo alias Jokowi capres petugas partai yang dendam karena gurunya tersingkir dari arena politik karena mencoba melakukan usaha mendeislamisasi Indonesia; dan karir militernya sendiri mentok, tapi bukannya introspeksi diri, LB Pandjaitan malah menyalahkan orang lain dan berkonspirasi menjatuhkan orang lain tersebut dan orang lain itu bernama Prabowo Subianto. Atas usahanya

menaikan Jokowi sebagai presiden, Jokowi memberi hadiah kepada LB Pandjaitan sebagai Kepala Staf (Kastaf) Kepresidenan dan kemudian Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, yang memiliki kekuasaan dan kewenangan terbesar ketiga di negara ini.

Selama menjadi anggota kabinet pemerintahan Jokowi-JK, Luhut Panjaitan tersangkut skandal-skandal sebagai berikut:

- Michael Buehler menemukan pihak pemerintah Indonesia memberikan uang kepada lembaga konsultan Singapura bernama Pereira International PTE LTD senilai USD 80,000 untuk diteruskan kepada perusahaan pelobi Amerika R&R Partners, Inc, di Las Vegas untuk mengatur agenda lawatan Jokowi di Amerika termasuk bertemu Obama. Terungkap Luhut Panjaitan memiliki hubungan khusus dengan Darwin Pereira, pemilik Pereira International.

- Dari bocoran pesan Akbar Faisal kepada Deputi II Kastaf Kepresidenan Yanuar Nugroho terungkap adanya upaya Luhut Panjaitan menyedot data KPU menggunakan teknologi canggih dari Amerika.

- Dari bocoran rekaman antara Setya Novanto dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoedin terungkap bahwa kunci perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia ada pada Luhut Panjaitan bila PT Freeport Indonesia bersedia menjual saham kepada Luhut Panjaitan melalui *nominee*-nya.

- Dari bocoran Panama’s Papers terungkap Luhut Panjaitan memiliki perusahaan cangkang (*shell company*) di Seychelles bernama Mayfair International Ltd.

C. ABDULLAH MAHMUD HENDROPRIYONO

Jenderal Purn Abdulah Mahmud Hendropriyono mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang dikenal sebagai orang terdekat Presiden Joko Widodo dan mendapat hadiah luar biasa melimpah dari Jokowi sebagai balasan terhadap dukungan kepada dirinya, antara lain: proyek mobil nasional; anaknya menjadi Komisaris PT Telkomsel dan menantunya menjadi Komandan Paspampres, sekarang tengah dihantui perbuatannya sendiri di masa silam, khususnya pada kasus pembantaian ratusan umat Islam Talangsari Lampung pada tahun 1989.

Kedekatan Hendropriyono dengan Joko Widodo sudah diketahui publik sejak beberapa waktu lalu. Bahkan Hendro lah menjadi sosok paling berjasa menjadikan Joko Widodo hingga bisa melangkah sejauh ini di belantara politik nasional.

Pengaruh dan peran sentral Hendropriyono terhadap Joko Widodo menimbulkan kekhawatiran besar di tengah rakyat jika Joko Widodo berkuasa sebagai presiden nantinya. Dapat dipastkan akan marak pelanggaran HAM dan kesewenang-wenangan dari pemerintah kepada rakyat terutama umat Islam mengingat kekuasaan Hendropriyono atas diri Joko Widodo yang sangat besar.

Publik menyadari bagaimana peran Hendropriyono dan Joko Widodo dalam menciptakan ‘terorisme Islam’ palsu untuk mendiskreditkan umat Islam Indonesia di tengah- tengah Perang Global Terhadap Terorisme pada tahun 2001 – 2006 yang dilancarkan oleh Presiden Amerika Serikat George Walker Bush paska peledakan Menara Kembar WTC, 9 September 2001 lalu.

Untuk mengingat kembali peran sentral Hendropriyono terhadap penindasan umat Islam, berikut ini disajikan kembali kronologis peristiwa pembataian umat Islam Talangsari Lampung oleh Komanda Korem Garuda Hitam Lampung, Kolonel Hendropriyono.

Kronologis Kasus Talangsari

7 Februari 1989, Minggu ke-3 Desember 1999- Januari Minggu II 1989 Perpindahan sejumlah warga dari kota Solo, Boyolali, Sukoharjo, Jakarta dan beberapa tempat di Jawa Barat ke Dusun Cihideung, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah. Rabu, 12 Januari 1989 lewat surat bernomor 25/LP/EBL/I/1989, Kepala Desa Rajabasa Lama, Amir Puspa Mega, setelah mendapat informasi dari Kadus Talangsari, Sukidi dan kaum melaporkan kegiatan jama'ah Talangsari yang disebutnya sebagai pengajian yang dipimpin Jayus dan Warsidi tanpa ada laporan ke pamong setempat ke Camat Way Jepara, Drs. Zulkifli Maliki.. Surat ditembuskan ke Danramil dan Kapolsek Way Jepara. Hari itu juga Camat Way Jepara membalas surat Kades Rajabasa Lama lewat surat bernomor 451.48/078/09/331.1/1989 memerintahkan 3 hal, yaitu:

1. Kades agar menghadap Camat hari ini juga dengan membawa 4 orang yang namanya tercantum dibawah ini.

2. Orang-orang tersebut adalah: Jayus, Warsidi, Mansur (Kaum setempat) dan Sukidi (Kadus Talangsari III).

3. Kades harus menghentikan dan melarang adanya kegiatan pengajian tersebut.

Apalagi mendatangkan orang-orang dari luar daerah yang tidak diketahui/sepengetahuan pemerintah. Surat yang akhirnya diantar oleh Sukidi tersebut juga ditembuskan kepada Danramil dan Kapolres Way Jepara. Jum'at, 20 Januari 1989, Warsidi mengirim surat balasan yang isinya menjelaskan tiga hal:

1. Tidak bisa hadir dengan alasan kesibukan memeberi materi pengajian di beberapa tempat.

2. Memegang hadits yang berbunyi "*Sebaik-baiknya umaro ialah yang mendatangi ulama dan seburuk-suruknya ulama yang mendatangi umaro*."

3. Mempersilahkan camat untuk datang mengecek langsung ke Cihideung agar lebih jelas.

Sabtu, 21 Januari 1989, Warsidi menjelaskan orang-orang yang datang ke Talang Sari kepada Camat, Kades Rajabasa Lama, Kadus Talangsari beserta staf pamong praja seluruhnya sekitar 7 orang yang pada saat itu datang meninjau lokasi transmigrasi di Talang Sari. Pertemuan yang berakhir dengan baik dan memenuhi keinginan yang dimaksud oleh kedua belah pihak, membicarakan konfirmasi camat soal surat balasan Warsidi dan ditutup dengan undangan camat kepada warsidi. Minggu, 22 Januari 1989, Tengah malam, Sukidi, Serma Dahlan AR dan beberapa orang aparat keamanan mendatangi perkampungan, Sukidi dan Serka Dahlan yang bersenjata api masuk ke Musholla al Muhajirin tanpa membuka sepatu laras dan Serma Dahlan AR mencaci maki, mengumpat dengan perkataan "ajaran jama'ah itu bathil, menentang pemerintah, perkampungannya akan dihancurkan" bahkan mengacungkan senjata api dan menantang para

jama'ah. Sekitar 10-an orang jama'ah yang antara lain terdiri dari Arifin, Sono, Marno, Diono, Usman berusaha menahan diri untuk tidak terpancing. Setengah jam kemudian melihat tidak ada respon dari jama'ah, kedua aparat tersebut pergi meninggalkan musholla.

Kamis, 26 Januari 1989, Kepala Desa Labuhan Ratu I melayangkan surat bernomor 700.41/LI/I/89 Camat Zulkifli soal Usman, anggota jama'ah Warsidi yang dianggap meresahkan pondok pesantren Al-Islam. Jum'at, 27 Januari 1989, Camat Zulkifli mengirim surat bernomor 220/165/12/1989 kepada Danramil 41121 Way Jepara, Kapten Sutiman untuk meneliti Usman, Jayus dan Anwar yang dalam surat tersebut menurut mereka ketiga orang tersebut mengadakan kegiatan mengatasnamakan agama tanpa sepengetahuan pemerintah. Dalam surat yang ditembuskan ke Kapolsek dan Kepala KUA Way Jepara, Kades Labuhan Ratu I dan Rajabasa Lama, Sabtu, 28 Januari 1989, Kapt. Sutiman memerintahkan Kades Labuhan Ratu I, Kades Lanuhan Ratu Induk dan Kades Rajabasa Lama lewat surat bernomor B/313/I/1989 agar menghadapkan ketiga orang jama'ah tersebut pada hari Senen, 30 Januari 1989 atau selambat-lambatnya 1 Februari 1989. Surat yang ditembuskan kepada Dandim 0411 Metro, unsur pimpinan kecamatan Way Jepara dan Kepala KUA Way Jepara meminta Sukidi untuk menyerahkan daftar nama-nama jema'ah yang pernah dicatatnya bersama Bagian Tata Usaha Koramil 41121 Way Jepara. Minggu, 29 Januari 1989, Jama'ah memperoleh informasi mengenai keputusan Muspika untuk menyerbu perkampungan jama'ah di Cihideung dari Imam Bakri, Roja'i suami ibu lurah Sakeh, salah seorang lurah yang mengikuti pertemuan tersebut. Informasi itu juga diterima jama'ah lainnya yaitu: Joko dan Dayat lewat salah seorang anggota Koramil 41121 Way Jepara yang mengingatkan bahwa dalam minggu-minggu ini perkampungan akan diserbu.

Tak lama kemudian Jayus, salah seorang jama'ah menyaksikan Kepala desa Cihideung dan masyarakat yang berada disekitar perkampungan mengungsi karena tidak merasa melanggar peraturan, jama'ah tetap tinggal di Cihideung untuk menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan, jama'ah melaksanakan ronda malam Rabu, 1 Februari 1989, Kades Rajabasa Lama mengirim surat dengan nomor 40/LP/RBL/1989 kepada Danramil 41121 Way Jepara, Kapt. Sutiman yang meminta untuk membubarkan pondok pesantren jama'ah dengan alasan pengajian gelap dan para anggota jama'ah telah menanti kedatangan aparat untuk memeriksa mereka dengan mempersiapkan bom Molotov. Surat tersebut ditembuskan kepada Kapolsek dan Camat Way Jepara.

Mendapat surat tersebut Kapt. Sutiman langsung menyurati Dandim 0411 Metro dengan nomor surat B/317/II/1989 yang isinya antara lain melaporkan informasi-informasi yang diterima, meminta petunjuk untuk mengambil tindakan dalam waktu dekat dan menyarankan agar menangkapi kesemua jema'ah pada waktu malam hari. Surat tersebut ditembuskan kepada Muspika Way Jepara, Danrem 043 Garuda Hitam di Tanjung Karang, Kakansospol TK II Lampung Tengah dan Kakandepag TK II Lampung Tengah.

Kamis, 2 Februari 1989, Camat Zulkifli menyampaikan informasi lewat surat bernomor 220/207/12/1989 kepada Bupati KDH TK II dan Kakansospol Lampung Tengah yang melaporkan seluruh perkembangan yang mereka dapatkan dan aksi kordinasi dengan Muspika Way Jepara untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Pada saat yang sama di pondok Cihideung sekitar Pk 12.00 siang, datang lelaki tak dikenal dengan ciri-ciri fisik sangat kekar singgah di pondok. Orang tersebut mengaku habis melihat ladangnya di sekitar Gunung Balak lengkap dengan golok

dan pakaian petani yang biasa ke ladang. Selama di perkampungan orang tersebut sempat makan dirumah Jayus, sholat dhuhur berjama'ah, mendengarkan ceramah di mushola Mujahidin dan bolak-balik dari dan ke rumah Jayus-Mushola. Jama'ah menyambut baik tanpa rasa curiga.

Minggu, 5 Februari 1989, Sekitar pukul 23.45, petugas yang terdiri dari Serma Dahlan AR (Ba Tuud Koramil 41121 Way Jepara), Kopda Abdurrahman, Ahmad Baherman (Pamong Desa), Sukidi (Kadus Talangsari III), Poniran (Ketua RW Talangsari III), Supar (Ketua RT Talangsari III) dibantu masyarakat yaitu, Kempul, Sogi dan 2 orang lainnya menyergap salah satu pos ronda jama'ah. 7 orang jama'ah yaitu: Sardan bin Sakip (15 th), Saroko bin Basir (16 th), Parman bin Bejo (19 th), Mujiono bin Sodik (16 th), Sidik bin Jafar (16 tahun), Joko dan Usman ditangkap, Joko terluka parah dihantam popor senjata. Tapi kemudian Joko dan Usman berhasil meloloskan diri.

Malam itu juga, Warsidi dan sekitar 20-an jama'ah berkumpul dan mengirim 11 orang jama'ah: Fadilah, Heriyanto, Tardi, Riyanto, Munjeni, Sugeng, Muchlis, Beni, Sodikin, Muadi dan Abadi Abdullah untuk membebaskan kelima orang jama'ah yang ditangkap. Senin, 6 Februari 1989, Pukul 08.30, Serma Dahlan AR menyerahkan ke lima orang tersebut ke Kodim 0411 Metro. Kemudian Kasdim Mayor Oloan Sinaga mengirim berita ke Muspika dan melapor ke Danrem 043 Gatam tentang rencana penyergapan lanjutan ke Cihideung. Pukul 09.30, Kasdim bersama 9 anggotanya antara lain Sertu Yatin, Sertu Maskhaironi, Koptu Muslim, Koptu Sumarsono, Koptu Taslim Basir, Koptu Subiyanto dan Pratu Kastanto (pengemudi jeep), Pratu Idrus dan Pratu Gede Sri Anta, tiba di Rajabasa Lama.\Muspika menyampaikan situasi dan keadaan di lokasi Talangsari III, Kasdim memberi petunjuk dan pengarahan kepada

rombongan sebelum berangkat ke lokasi. Sekitar Pk 11.00 WIB, Rombongan bersama Muspika, Kades Rajabasa Lama, Kadus Talangsari III dengan menggunakan 2 buah Jeep dan 5 buah sepeda motor Danramil Way jepara Kapten Sutiman, beserta 2 regu pasukannya, menyerbu Cihideung.

Tanpa didahului dialog dan memberikan peringatan terlebih dahulu, mereka menembaki perkampungan pada saat jama'ah baru tiba dari sawah dan ladang. Penyerbuan diawali dengan tembakan 1 kali dari rombongan aparat. Kemudian disambut pekik takbir oleh jama'ah. Pekik takbir itu dibalas dengan tembakan beruntun oleh aparat. Melihat serbuan sporadis, masyarakat yang masih berpakaian dan memegang alat-alat pertanian seperti cangkul, parang, golok dan lain-lain berusaha mempertahankan diri. Dalam penyerbuan yang berlangsung sekitar setengah jam. Kapten Sutiman tewas, sertu Yatin cedera, Mayor Sinaga dan pasukannya kabur, Jeep dan 4 sepeda motor ditinggal dilokasi.

Dipihak jama'ah, dua orang cedera berat. Ja'far tertembak dan jama'ah dari Jawa Barat cedera dibacok Sutiman yang membawa senjata api dan senjata tajam sekaligus. Pukul 12.30, Rombongan Sinaga sampai di Puskesmas untuk menyerahkan Sertu Yatin lalu melaporkan kejadian tersebut ke Korem 043 Gatam dan Polres Lampung Tengah. Pukul 14.00, Fadilah mewakili kelompok 11 melaporkan kegagalan upaya pembebasan 5 orang yang disergap karena kesiangan. Fadilah kemudian diperintahkan Warsidi ke Zamzuri di Sidorejo untuk mengabarkan: 1. berita serbuan Danramil dan terbunuhnya Kapt. Sutiman; 2. Instruksi untuk membuat aksi yang dapat mengalihkan perhatian aparat agar mereka dapat mengungsi dan menyelamatkan diri dari kemungkinan adanya rencana penyerbuah lanjutan. Pukul 15.00, Wakapolres Lampung Tengah bersama anggotanya

tiba di Rajabasa Lama. Pukul 17.00 Kasrem 043 Gatam, Letkol Purbani bersama anggotanya tiba di Rajabasa Lama dan memimpin pengintaian.

Pada saat yang sama, Fadila tiba di Sidorejo. Pukul 18.00 Bupati Lampung Tengah Pudjono Pranyoto bersama rombongan tiba di Rajabasa Lama. Pukul 18.30, Danrem 043 Gatam, Kolonel Hendropriyono beserta pasukan tiba di Rajabasa Lama, Pukul 20.30. 11 orang jama'ah mencarter Bus Wasis untuk digunakan sebagai transportasi ke Metro. Didalam bus tersebut jama'ah menemukan Pratu budi Waluyo. Setelah terjadi dialog, Pratu Budi mengaku berasal dari Way Jepara. Karena dianggap termasuk orang yang menculik 5 orang jama'ah anggota TNI itu dibunuh. Mayatnya dibuang didaerah Wergen antara Panjang dan Sidorejo. Jema'ah juga mencederai supir dan kenek bus tersebut.Pukul 24.00, Riyanto melemparkan bom molotov ke kantor redaksi Lampung Pos yang memberitakan kasus secara tidak berimbang dan cenderung mendeskreditkan korban.

Aksi tersebut juga memang diniatkan untuk mengalihkan perhatian aparat. Selasa, 7 Februari 1989 Pukul 24.00 Terdengar 2 kali suara tembakan dari arah Timur. Sugeng (jama'ah Jakarta) membalas sekali tembakan dengan pistol yang ditinggal tewas Kapt. Soetiman. Pukul 03.00 Salim seorang jama'ah yang melakukan ronda di pos sebelah selatan memergoki 2 orang tentara yang ingin mendekat ke lokasi jama'ah. Karena dipergoki kedua orang tentara tersebut melarikan diri Pukul 05.30 Danrem 043 Garuda Hitam Kol. Hendropriyono bersama lebih dari satu batalion pasukan infantri dibantu beberapa Kompi Brimob, CPM dan Polisi setempat mengepung dan menyerbu perkampungan Cihideung dengan posisi tapal kuda. Dari arah Utara (Pakuan Aji), Selatan (Kelahang) & timur (Kebon Coklat, Rajabasa Lama). Sementara arah barat yang ditumbuhi pohon

singkong dan jagung dibiarkan terbuka. pasukan yang dilengkapi senjata modern M-16, bom pembakar (napalm), granat dan dua buah helikopter yang membentengi arah barat.

Melihat penyerbuan terencana dan besar-besaran, dan tidak ada jalan keluar bagi jama'ah untuk meyelamatkan diri, jama'ah hanya bisa membentengi diri dengan membekali senjata seadanya. Tanpa ada dialog dan peringatan, penyerangan dimulai.Pukul 07.00 Karena kekuatan yang tidak seimbang, pasukan yang dipimpin mantan menteri Transmigrasi berhasil menguasai perkampungan jama'ah dan memburu jama'ah. Dalam perburuan itu, aparat memaksa Ahmad (10 th) anak angkat Imam Bakri sebagai penunjuk tempat-tempat persembunyian dan orang yang disuruh masuk kedalam rumah-rumah yang dihuni oleh ratusan jema'ah yang kebanyakan terdiri dari wanita dan anak-anak. Setelah menggunakan Ahmad, aparat berhasil mengeluarkan paksa sekitar 20 orang ibu-ibu dan anak-anak dari pondok Jayus. Ibu Saudah, salah satu korban yang dikeluarkan paksa sudah melihat sekitar 80-an mayat yang bergelimpangan disana-sini hasil serangan aparat sejak pukul 05.30 tadi pagi.

Setelah dikumpulkan ke-20-an ibu-ibu dan anak-anak dipukul dan ditarik jilbanya sambil dimaki-maki aparat "*Ini istri-istri PKI*". Didepan jama'ah seorang tentara mengatakan "*Perempuan dan anak-anak ini juga harus dihabisi, karena akan tumbuh lagi nantinya*". Pukul 07.30 Tentara mulai membakar pondok-pondok yang berisi ratusan jama'ah dan anak-anak rumah panggung. dengan memaksa Ahmad menyiramkan bensin dan membakarnya. Dibawah ancaman senjata aparat, Ahmad berturut-turut diperintahkan untuk membakar rumah Jayus, Ibu Saudah, pondok pesantren dan bangunan-bangunan yang diduga berisi 80-100 orang terdiri dari bayi, anak-anak, ibu-ibu banyak diantaranya yang masih hamil, remaja

dan orang tua dibakar disertai dengan tembakan-tembakan untuk meredam suara-suara teriakan lainnya.

Sambil membakar rumah-rumah tersebut, Purwoko (10 th) dipaksa aparat untuk mengenali wajah Warsidi dan Imam Bakri diantara mayat-mayat jama'ah yang bergelimpangan. Mayat Pak War dan Imam Bakri ditemukan setelah Purwoko hampir membolak-balik 80-an mayat. Pukul 09.30 Setelah ditemukan, kedua mayat tersebut kemudian diterlentangkan di pos jaga jama'ah dengan posisi kepala melewati tempat mayat tersebut diterlentangkan (dengan-leher terbuka-). Tak berapa lama, seorang tentara kemudian menggorok leher kedua mayat tersebut. Pukul 13.00 Kedua puluhan ibu dan anak-anak tadi kemudian berjalan kaki sekitar 2 Km untuk dibawa ke Kodim 0411 Metro. Pukul 16.00 Hendropriyono mengintrogasi ibu-ibu tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan: Ikut pengajian apa?

Apa yang diajarkan? Gurunya siapa? Dan menerangkan bahwa jama'ah Warsidi batil karena menentang Pancasila dan mengamalkan ajaran PKI. Pukul 17.00 Jama'ah kemudian dimasukan ke dalam penjara. Sementara di Sidorejo pada pagi harinya atas informasi, Sabrawi, supir bis Wasis, aparat bersama warga mengepung rumah Zamjuri. Bersama Zamzuri ada 8 orang jema'ah yaitu: Munjeni, Salman Suripto, Soni, Diono, Roni, Fahrudin, Isnan dan Mursalin Karena dituduh perampok oleh aparat, terjadilah bentrok dengan Polsek Sidorejo. Serma Sudargo (Polsek Sidorejo), Arifin Santoso (Kepala Desa Sidorejo) tewas. Dipihak jama'ah, Diono, Soni dan Mursalin tewas.sedangkan Roni terluka tembak.

Kamis, 9 Februari 1989, Pukul 08.40, Jama'ah yang marah mendengar kebiadaban dan penahanan jama'ah di Kodim 0411 Metro tersebut

menyerbu Kodim dan Yonif 143. Dalam penyerbuan itu, 6 orang jama’ah tewas. Sedangkan dipihak aparat pratu Supardi, Kopda Waryono, Kopda Bambang Irawan luka-luka terkena sabetan golok. 1 sepeda motor terbakar dan kaca depan mobil kijang pick up pecah. Dua minggu kemudian. Tahanan ibu-ibu di Kodim dipindahkan ke Korem 043 Gatam. Di Korem, Hendropriyono memerintahkan anak buahnya untuk melepas paksa jilbab-jilbab ibu-ibu jama’ah sambil berkata “*tarik saja, itu hanya kedok*”. penangkapan sisa-sisa anggota jama’ah oleh aparat dibantu masyarakat oleh operasi yang disebut oleh Try Sutrisno Penumpasan hingga keakar-akarnya; Penangkapan para aktivis islam di Jakarta, Bandung, solo, Boyolali, mataram, Bima & dompu melalui operasi intelejen yang sistematis yang banyak diantaranya sama sekali tidak mengetahui kejadian.

Data Korban Kasus Talangsari Hasil investigasi Kontras 2005 Korban Penculikan: 5 orang. Korban Pembunuhan di luar proses hukum: 27 orang Korban Penghilangan Paksa: 78 orang Korban Penangkapan Sewenang-wenang: 23 orang Korban Peradilan yang Tidak Jujur: 25 orang. Korban Pengusiran (Ibu dan Anak): 24 orang.

Hendropriyono dan Pembunuhan Munir

Bocoran Wikileaks memberikan informasi penting tentang peranan mantan Kepala BIN (Badan Intelijen Negara), Jenderal AM Hendropriyono, yang menjadi Tim Pengarah' Pemenangan Jokowi pada pilpres 2014 ini, dan Hendroprioyono oleh Wikileaks dikaitkan tewasnya aktivis HAM, Munir. Di media sosial media baru-baru ini kembali marak beredar soal berita bocoran Wikileaks tentang mantan Kepala BIN Hendropriyono.

Bocoran Wikileaks mantan Kepala BIN terkait kasus tewasnya aktivis HAM Munir pada 2004 itu muncul kembali setelah Hendropriyono menjadi tim sukses salah satu capres-cawapres.

Bocoran Wikileaks menyebar lewat broadcast Blackberry Messenger disertai link yang mengarah kepada sebuah situs berita nasional. Dalam berita itu diungkapkan, ada beberapa pertemuan melibatkan Hendropriyono untuk rencana pembunuhan Munir. Bocoran Wikileaks ini dan sempat dimuat di Sydney Morning Gerald, Sabtu (18/12/2010). Kawat yang bocor itu dikirimkan dari Kedubes AS ke Washington DC, dengan judul "Kemungkinan Keterlibatan, Pejabat Negara di Jakarta". Seorang perwira polisi berpangkat tinggi, dalam bocoran itu disebutkan mengetahui kalau Hendropriyono terlibat. Informasi itu diungkap pada Desember 2006. ”*Perwira polisi tersebut menyatakan harapannya, bahwa dalang kasus tersebut akan terungkap*,”. Polisi ini mendapatkan informasi dari orang dalam BIN. Tapi orang dalam ini takut untuk memberi kesaksian di pengadilan. "*Saksi itu mengatakan, hanya waktu dan metode pembunuhan berubah dari rencana semula. Rencana aslinya membunuh Munir di kantornya*,". Keterlibatan petinggi BIN juga dibocorkan lagi oleh Wikileaks pada Juni 2008, beberapa saat setelah Muchdi PR ditangkap. Kedutaan AS mendapatkan informasi dari pihak lain, ada bukti dari kepolisian yang mengemukakan ada pertemuan pejabat senior BIN untuk membunuh Munir. Pertemuan itu, lanjut Wikileaks, merancang model seperti apa yang bagus untuk membunuh Munir. Diantaranya yang dipersiapkan adalah menembak Munir melalui penembak jitu, meledakkan mobilnya, hingga meminta bantuan dukun. "*Beberapa usaha gagal sebelum akhirnya Munir diracun dalam. perjalanan ke Amsterdam pada bulan Oktober 2004*,".

Wikileaks juga membeberkan sosok Muchdi, yang dinilai punya keberanian dalam melakukan pembunuhan. Dia juga dinilai punya kepribadian untuk melakukan hal itu. Dari berbagai informasi itu, pihak kedutaan mengambil sejumlah kesimpulan: "*Sebuah terobosan tentang siapa yang memerintahkan pembunuhan itu mungkin akan membutuhkan seseorang dengan informasi orang dalam untuk mengambil risiko luar biasa dalam memberikan kesaksian, dan akan membutuhkan perlindungan. Namun, polisi tampaknya telah diberikan perintah untuk menunjukkan kemajuan dalam kasus ini, mungkin karena perhatian internasional*,".

Selain itu ada dokumen rahasia yang selama ini tidak pernah terungkap. Dokumen tertulis yang disimpan rapat-rapat oleh Tim Pencari Fakta (TPF) maupun penyidik kasus pembunuhan aktivis HAM Munir ini, ternyata berisi beberapa pertemuan yang membahas penyusunan skenario rencana pembunuhan Munir.

Rapat itu digelar di kantor Badan Intelijen Negara (BIN), Kalibata, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Rapat tersebut diikuti oleh sejumlah nama petinggi BIN, seperti Kepala BIN AM Hendro Priyono, Deputi V BIN Muchdi Pr, Deputi II dan Deputi IV. Disamping itu juga dihadiri oleh mantan Dirut Garuda Indra Setaiwan dan Rohainil Aini.

D. JUSUF WANANDI DAN SOFJAN WANANDI

Walaupun Jusuf Wanandi (Lim Bian Kie) dan Sofjan Wanandi (Lim Bian Koen) tidak pernah secara eksplisit mengakui memiliki hubungan dengan gerakan anti Komunis yang digalang agen CIA bernama Pater Beek, namun dalam memoarnya, Jusuf Wanandi secara tersirat mengindikasikan

kedekatannya dengan Pater Beek dan terlatih menghadapi komunis, antara lain dengan mengatakan sebagai berikut:

"*Dari hasil evaluasi kami, terlihat jelas jika arah ini berlangsung terus, PKI akan menang secara legal dan konstitusional pada tahun 1967-1968….kami intelektual dan mahasiswa katolik, mulai memikirkan cara mempersiapkan diri seandainya Indonesia dalam lima tahun menjadi Negara yang dikuasai oleh komunis secara legal dan konstitusional. Kami warga Katolik yang paling antikomunis di antara kelompok Kristen lain, seperti kelompok Protestan atau Partai Kristen Indonesia (Parkindo).*

Melihat PKI sudah mulai melakukan mobilisasi, kalangan Katolik juga melakukan segala sesuatu yang dapat kami lakukan. Sejak 1964, kami sudah melatih dua kelompok kader dari pimpinan mahasiswa dan akademiksi di Gunung Sahari dan melakukan konsolidasi beberapa minggu terakhir secepat mungkin…hanya kamilah-di antara kelompok nonkomunis-yang melakukan pelatihan seperti itu."

(halaman 22 – 23 dan 39).

Dalam melakukan aksinya menentang PKI, komunisme dan G30S/PKI, kelompok yang dipimpin oleh Jusuf Wanandi dan Sofjan Wanandi tidak jarang melakukan kekerasan, termasuk menyerang Kantor Kedutaan Republik Rakyat China di Glodok dan membakar isinya padahal tidak ada bukti bahwa RRC terlibat atau mendalangi G30S/PKI dan belakangan justru terbukti bahwa RRC tidak terlibat sama sekali sebab dalang G30S/PKI sesungguhnya adalah dinas intelijen Cekoslovakia dan Uni Soviet yang bekerja sama dengan agen ganda mereka di Indonesia yakni Carmel Brickman alias Carmel Budiardjo. Pembakaran kedutaan RRC

tersebut digambarkan oleh Bill Tarrant, mantan koresponden asing harian milik keluarga Wanandi yaitu The Jakarta Post dari 1983 s.d. 2008:

"*On March 8, the student movement took a fateful turn when, early that morning, the stormed into the foreign ministry, ransacked it and held it for around five hours before police expelled them with tear gas…The following day, it was the Chinese mission's turn to defend itself. The Wanandi brothers helped lead an attack on the villa housing the official New China News Agency and on March 10 the students overran the Chinese consulate-general and a house used by the commercial attaché. They made a bonfire of the furniture and files on the lawns outside.*

With Jakarta on the brink of anarchy, Sofjan and other student leaders hid out at Ali Murtopo's headquarters in a white, Dutch colonial mansion not far from Independence Square, the epicenter of the protest, which Sofjan bought and restored years later to be the corporate headquarters of his Gemala conglomerate…"

(halaman 38-39).

Peristiwa pembakaran aset-aset milik kedutaan RRC dan kementerian Negara Indonesia dalam serangan yang dipimpin kakak-beradik Wanandi ini membuktikan satu hal bahwa kerusuhan anarkis yang penuh dengan kekerasan adalah metode andalan dalam memenangkan aspirasi politik kelompok mereka dan bagaimana sejak awal mereka sudah bekerja sama dengan dalang kerusuhan Malari bernama Ali Moertopo.

Baru-baru ini, Prabowo Soebianto mengatakan bahwa pemilik The Jakarta Post [Jusuf Wanandi dan Sofjan Wanandi] adalah orang jahat. Pertanyaan

yang adil tentu adalah apakah pernyataan Prabowo bahwa pemilik The Jakarta Post yaitu Sofjan Wanandi jahat dapat dibenarkan? Di bawah ini adalah beberapa “prestasi” dari pemilik The Jakarta Post yaitu Jusuf Wanandi dan Sofjan Wanandi:

- Menurut Jenderal Soemitro; Jusuf Wanandi dan Sofjan Wanandi adalah konseptor dalam jaringan Opsusnya Ali Moertopo dan donatur dana kepada kelompok Gerakan Usaha Pembaharuan Pendidikan islam (GUPPI) yang tidak lain adalah massa perusuh tidak dikenal pada peristiwa 15 Januari 1974 (Malari) yang digarap di kantor CSIS. Sebelum terjadinya Malari, Sofjan Wanandi sering mondar-mandir ke kantor GUPPI dan menurut keterangan Roy Simanjuntak yang mengorganisir tukang becak yang kemudian ikut merusuh, Sofjan mengatakan kepadanya bahwa bila ada apa-apa sebut saja nama Soedjono dan Ali Moertopo (Massa Misterius Malari, Tempo, halaman 62-63). Bukti Jusuf Wanandi adalah orang Opsus diungkap Wikileaks:

  “*6. ASIDE FROM MURTONO, HOWEVER, ALI MURTOPO AND OPSUS SEEM TO HAVE DONE RATHER WELL. NUMBER TWO MAN (MARTONO) HAS LONG BEEN KNOWN AS OPSUS MAN IN OLD KOSGORO ORGANIZATION. JUSUF WANANDI (LIM BIAN KIE) HAS KEY POSITION HEADING LIST OF SECRETARIES ORGANIZED ACCCORDING TO FUNCTION, AND OPSUS STALWARTS DOMINATE AT THIS WORKING LEVEL.*”

  https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1973JAKART10795_b.html

  Fakta bahwa Jusuf Wanandi adalah bagian dari Opsus-nya Ali Moertopo semakin ditegaskan oleh pernyataan Bill Tarrant, mantan

jurnalis asing di The Jakarta Post milik CSIS yang dalam memoarnya "Reporting Indonesia" halaman 40 mengungkap:

"*Jusuf, his work done, prepared to go back to teaching law. But Murtopo had other plans. He wanted Jusuf to join his special operations, Opsus. "That's how I got involved in politics," Jusuf said. He had just turned 30.*

His first task was to help build a political machine to support Suharto. That work was interrupted two years later when he was asked to help organize a plebiscite to ensure that Irian – the western half of the giant island of New Guinea – became Indonesia's newest province."

- Bahwa pendirian CSIS tidak lepas dari unit operasi khusus (opsus) yang dibangun oleh Jenderal Ali Moertopo dapat disimak dari kesaksian Fahmi Idris dalam buku Sofjan Wanandi, Aktivis Sejati, terbitan Gramedia halaman 28:

  "*Lahirnya operasi khusus (opsus) yang merupakan unit khusus Soeharto pimpinan Jenderal Ali Moertopo juga memicu perbedaan. Saya dan teman-teman lain tidak setuju dengan bentuk-bentuk demokrasi misterius seperti opsus…Selain sebagai unit politik, opsus juga menjadi unit ekonomi Soeharto. Unit ekonomi dipimpin Jenderal Soedjono Hoemardani. Sofjan menjadi sekretarisnya.*

  Dalam opsus ada juga Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang merupakan think tank politik Soeharto waktu itu. Saya dan teman-teman lain tidak sependapat dengan unit itu karena bisa menciptakan kilas balik bai proses demokratisasi yang mau kita

bangun.”

- Jusuf Wanandi, dan Sofjan Wanandi adalah perancang utama penyerbuan dan okupasi Indonesia di Timor Timur selama puluhan tahun, sedangkan saudara mereka Markus Wanandi bertugas “menghancurkan” Gereja Katolik setempat guna memuluskan okupasi Indonesia. CSIS dan Wanandi bersaudara juga perancang usaha untuk menghilangkan pengaruh Islam dari Indonesia yang antara lain menyebabkan peristiwa Tanjung Priok. CSIS dan Benny Moerdani membantai secara kejam banyak penduduk Timor Timur dan kemudian mengeruk uang dari lokasi jajahan Indonesia tersebut, dan uang dari Timor Timur digunakan untuk membiayai operasi-operasi politik LB Moerdani dan CSIS (George Junus Aditjondro, CSIS, Pater Beek SJ, Ali Moertopo dan LB Moerdani).

- Kesaksian George Junus Aditjondro tentang Wanandi bersaudara antara lain:

  “…So, in a nutshell, Jusuf Wanandi and the two brothers about whom I have enough knowledge, Sofjan Wanandi and Markus Wanandi, are certainly not democrats, but rather three of the most effective destroyers of democracy in Indonesia (apart from the military and many other civilian anti-democrats). They are very right wing, they have certainly approved if not supported the anti-leftist purge in Indonesia in 1965-1966, and unlike some others of that generation, are still very proud of that ‘achievement,’ then they also showed their very anti-Muslim attitude, by destroying the original Muslim parties and thereby had to destroy also the Christian political parties, and then they played a very important role in crushing nationalist feelings among the West Papuan

and the Maubere peoples…"

http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/02/11/0071.html

- Nama Sofjan Wanandi kembali disebut saat menghadiri rapat di rumah Fahmi Idris ketika untuk pertama kalinya Jenderal Leonardus Benjamin Moerdani alias LB Moerdani menguraikan rencana untuk menjatuhkan Presiden Soeharto melalui aksi massa yang "mengejar orang cina dan gereja," (Salim Said, Dari Gestapu Ke Reformasi, Penerbit Mizan, hal. 316). Kelak rencana revolusi ini berbuah menjadi Kerusuhan 13-14 Mei 1998 dan kerusuhan dikendalikan oleh LB Moerdani dari Hotel Ria Diani, Cibogo, kawasan Puncak Bogor dengan perusuh adalah orang-orang sipil yang dilatih oleh Benny di kawasan Gunung Salak, Bogor. (Tabloid Adil edisi No.46, 19-25 Agustus 1998).

- Sudah bukan rahasia bahwa Sofjan Wanandi adalah penyandang dana Kongres PDI di Medan yang menurunkan Megawati untuk diganti dengan Dr. Soerjadi yang melahirkan peristiwa kudatuli. Masalahnya dari buku Otobiografi Politik RO Tambunan: Membela Demokrasi dan tulisan Rachmawati Soekarnoputri: Membongkar Hubungan Mega dan Orba di Harian Rakyat Merdeka 31 Juli 2002 dan 1 Agustus 2002 terungkap fakta bahwa kudatuli adalah bagian dari politik dizolimi alias *play victim* yang dirancang oleh LB Moerdani bekerja sama dengan Megawati, dan Dr. Soerjadi, dengan tujuan menaikan seseorang dari keluarga Soekarno untuk menandingi Presiden Soeharto. Sofjan Wanandi tentu saja adalah bagian inner circle LB Moerdani di CSIS sehingga dia terlibat kudatuli.

Yang menarik, dalam sebuah acara televisi swasta tahun 2008, mantan Ketua PDI Soerjadi ternyata mengakui bahwa penyerbuan kantor PDI pada 27 Juli 1996 tersebut sebenarnya rekayasa dari Megawati Soekarnoputri sendiri. Menurut Soerjadi, bukti bahwa angkatan bersenjata tidak melakukan tindakan perlindungan adalah bukti telah terjadi semacam "*tau-sama-tau*." Dia mengatakan: "*Buktinya orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu diangkat sebagai pejabat dalam masa pemerintahan Megawati*." Sutiyoso (saat itu Pangdam Jaya) diberi jabatan sebagai Gubernur DKI. Sementara Budiman Sujatmiko bertugas memprovokasi massa Pro-Megawati untuk mati-matian membela harga diri (kantor PDI) walaupun dengan taruhan nyawa. Maka terjadilah bentrok berdarah itu (Dian Andika Winda, Perang Sejarah Para Jenderal, halaman 96).

- Nama Jusuf Wanandi dan Sofjan Wanandi juga disebut dalam dokumen-dokumen yang ditemukan di lokasi ledakan di tanah tinggi tanggal 18 Januari 1998 yang menyebut bahwa mereka berdua mendanai gerakan revolusi berdarah untuk menjatuhkan presiden Soeharto. Bunyi email tersebut adalah sebagai berikut:

  "*Kawan-kawan yang baik! Dana yang diurus oleh Hendardi belum diterima, sehingga kita belum bisa bergerak. Kemarin saya dapat berita dari Alex [Widya Siregar] bahwa Sofjan Wanandi dari Prasetya Mulya akan membantu kita dalam dana, di samping itu bantuan moril dari luar negeri akan diurus oleh Jusuf Wanandi dari CSIS. Jadi kita tidak perlu tergantung kepada dana yang diurus oleh Hendardi untuk gerakan kita selanjutnya*."

Adapun dokumen lainnya adalah notulen berisi pertemuan "kelompok pro demokrasi" yang berlangsung di Leuwiliang, Bogor, 14 Januari 1998 yang dihadiri oleh 19 aktivis mewakili 9 organisasi terdiri dari kelompok senior dan kelompok junior yang sedang merencanakan revolusi di Indonesia. Adapun yang dimaksud sebagai kelompok senior adalah sebagai berikut:

Pertama, CSIS bertugas membuat analisis dan menyusun konsep perencanaan aktivitas ke depan.

Kedua, kekuatan militer yang diwakili oleh Benny Moerdani.

Ketiga, kekuatan massa yang pro Megawati Soekarnoputri.

Keempat, kekuatan ekonomi yang dalam hal ini diwakili oleh Sofjan Wanandi dan Yusuf Wanandi.

Sumber: Majalah Gatra edisi 31 Januari 1998

- Sofjan Wanandi adalah orang yang memulai salah satu pembusukan karakter paling keji terhadap Prabowo ketika diwawancara Adam Schwarz mengatakan Prabowo pernah bilang akan mengusir semua orang cina sekalipun hal itu akan membuat ekonomi Indonesia muncur 20-30 tahun tapi 14 tahun setelah rumor tersebut merasuk ke sumsum rakyat Indonesia atau tahun 2012, barulah Sofjan Wanandi membantah bahwa ia pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu dengan alasan "jurnalis salah paham."
  http://gresnews.com/mobile/berita/Politik/936197-mungkinkah-ini-pelencengan-sejarah-98-Sofjan-wanandi-bantah-tuding-prabowo-

berencana-usir-etnis-tionghoa

- Sofjan Wanandi pernah berupaya memprovokasi Prabowo supaya mengangkat senjata dan melawan Presiden Soeharto tapi ditolak mentah-mentah oleh Prabowo:

  "*...Sofjan had said to him and several other generals that President Suharto had to step down. When I expressed my disbelief, Prabowo insisted Sofjan did say this, and that the Chinese Catholics were a danger to themselves. Both the prime minister and I puzzled over why he should want to tell us this about Sofjan when it was patently unlikely that any Indonesian would tell the president's son-in-law that the president should be forced to step down...*"

  (Lee Kuan Yew, From Third World To First, The Singapore Story: 1965-2000, Marshall Cavendish Editions, halaman 316-317)

- Pernyataan Dewa dibenarkan anggota PRD bahwa anak buah Sofjan Wanandi pernah menelpon mereka dan menawarkan bantuan dana sebesar US$ 15,000 yang sudah diambil sebagian sebelum bom meledak (Manuver Politik: Sofjan Wanandi & CSIS, Forum Komunikasi Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Indonesia, 1998, hal. 21; Gatra edisi 7 Februari 1998).

- Patut dicatat bahwa dalam salah satu debat terbukanya dengan Budiman Sudjatmiko yang terjadi pada tanggal 3 Juli 2015, Andi Arief sudah mengakui bahwa ledakan bom tanah tinggi adalah pekerjaan PRD dan bukan rekayasa intelijen Orde Baru sebagaimana pembelaan anggota-anggota PRD dan aktivis-aktivis 1998 saat itu.

http://www.merdeka.com/politik/budiman-sudjatmiko-andi-arief-perang-di-twitter.html

Ketiga, dari kesaksian jurnalis asing di The Jakarta Post bernama Bill Tarrant terungkap bahwa The Jakarta Post adalah bagian integral dari rencana CSIS (Jusuf Wanandi, Sofjan Wannadi, dan LB Moerdani) untuk memprovokasi agar terjadi revolusi berdarah di Indonesia sesuai pembicaraan di rumah Fahmi Idris dengan tujuan menjatuhkan presiden Soeharto yang telah mengusir CSIS dari dunia politik Indonesia karena CSIS ketahuan belangnya. Lebih jauh lagi melalui tangan Raymond Toruan dan Susanto Pudjomartono, The Jakarta Post adalah donatur utama "gerakan mahasiswa 1998″ dan banyak aksi selama 1998 dilahirkan dari kantor redaksi The Jakarta Post yang tidak lain adalah markas besar "gerakan 1998″. (Bill Tarrant, Reporting Indonesia).

Bahwa CSIS mendorong terjadinya revolusi untuk menjatuhkan Presiden Soeharto juga diutarakan oleh Todung Mulya Lubis dalam buku Sofjan Wanandi, Aktivis Sejati, halaman 393-394, diketahui bahwa setelah terpental dari Orde Baru dan keputusan Presiden Soeharto mendekat kepada Islam dan membentuk ICMI, CSIS justru menjadi tempat berkumpulnya kelompok yang bermaksud memberontak terhadap pemerintahan Presiden Soeharto:

"*Bersamaan pada waktu itu muncul pula gejala sektarianisme yang antara lain terlihat ketika Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) terbentuk. Pada waktu itulah Gus Dur, Marsilam Simanjuntak, Rachman Tolleng, Bondan Gunawan, Daniel Dakidae dan banyak lagi berkumpul merumuskan penolakan terhadap otoriterisme dan sektarianisme. Forum*

Demokrasi adalah awal dari perlawanan politik.

Di sini kami juga mulai bersinggungan dengan CSIS dan kelompok Katolik yang juga ikut dalam pendirian Forum Demokrasi. Perlu diketahui bahwa salah satu wakil ketua Forum Demokrasi yang mendampingi Gus Dur adalah Alfons Taryadi dari harian Kompas, yang saya percaya bukanlah representasi dari CSIS. Tetapi pada waktu-waktu itu kontak dengan CSIS mulai terbuka.

Perlu dicatat bahwa di awal tahun 1990-an pamor CSIS mulai redup antara lain karena terjadinya perubahan peta kekuasaan Orde Baru. Meninggalnya Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani, serta tersingkirnya Benny Moerdani, membuat CSIS sedikit agak gamang menghadapi perubahan. Kekhawatiran CSIS akan bahaya sektarianisme membuat orang-orang Katolik melihat Gus Dur sebagai sosok yang menjadi alternatif.

Di sinilah titik temu itu terjadi, "a marriage of convenience". Dari situ pertemuan tercipta dan pada satu kali saya ikut menghadiri acara di gedung CSIS untuk pertama kali, dan ini membuat media agak heboh karena tiba-tiba saya mampir di gedung CSIS. Saya masih ingat berita yang dimuat di Majalah Tempo yang mencatat dengan jeli peristiwa kedatangan saya dan beberapa aktivis lainnya ke gedung CSIS. Dari situlah saya mulai berdialog, terlibat dan mengenal kelompok CSIS sampai pada satu ketika saya diajak untuk bergabung menjadi anggota Dewan Pembina di CSIS."

Melihat fakta dan bukti di atas maka kita bisa sampai kesimpulan bahwa Prabowo menyebut "jahat" kepada Sofjan Wanandi dan pemilik The

Jakarta Post sebenarnya sudah cukup memberi muka kepada mereka.

Sofjan Wanandi Mendalangi Demo Anti Kwik Kian Gie

Pengusaha Sofjan Wanandi berada dibalik demonstrasi yang menuntut mundur Menko Ekuin Kwik Kian Gie. Hal ini dilakukan Sofjan, karena pemerintah, dan DPR berencana untuk menuntaskan kasus kredit macet yang dilakukan Sofjan Wanandi. Sejumlah anggota Komisi IX DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan mengungkap hal tersebut kepada SiaR, Kamis (3/2) kemarin.

"*Sofjan marah karena kasusnya yang pernah diperiksa Kejaksaan Agung akan diungkap kembali oleh pemerintah, dan DPR*," ujar Aberson Marle Sihaloho, salah seorang anggota Komisi IX DPR-RI.

Selama seminggu terakhir, DPR-RI didatangi sekelompok pengunjuk rasa yang menamakan diri Front Pembela Amar Maruf Nahi Munkar. Dalam aksi protesnya untuk kedua kalinya, Kamis kemarin, mereka menuntut Kwik agar mundur dari jabatannya, karena isu keterlibatannya didalam kepemilikan saham atas namanya di PT Dusit Thani. Perusahaan itu bergerak dalam usaha hiburan termasuk panti pijat.

Para demonstran membawa bukti foto copy akte notaris pendirian perusahaan tersebut yang antara lain memuat nama Kwik Kian Gie sebagai salah seorang pemegang saham dengan besar modal Rp1 juta.

Akte notaris itu sendiri diterbitkan pada tahun 1972, dan Kwik dalam surat tanggapannya terhadap fraksi-fraksi di DPR-RI menegaskan, dirinya menyertakan modal berupa kepemilikan saham semata-mata karena

membantu rekan bisnisnya yang memerlukan modal. Ia sendiri mengaku tak terlibat di dalam pengelolaannya, sehingga tak tahu apakah usahanya itu saat ini –28 tahun kemudian– masih hidup atau sudah gulung tikar.

"*Saya tak terlibat di dalam manajemen. Bahkan saya tak ingat lagi apakah perusahaan itu masih hidup atau sudah mati. Ketika itu saya hanya ingin membantu rekan yang butuh modal. Itu saja*," katanya.

Sementara itu, Didik Supriyanto, salah seorang anggota Komisi IX-DPR RI dari F-PDIP menyesalkan cara-cara teror semacam itu. Menurut dia, penggunaan simbol-simbol agama untuk menyerang lawan politiknya justru membuat citra Islam sebagai agama yang suci terdegradasi. "*Agama itu sendiri menjadi rendah karena jadi komoditas dan alat untuk menjatuhkan lawan politiknya. Agama seharusnya tak bisa dibeli serendah itu,*" ucapnya.

Sofjan Wanandi dan utang 184 tahun

Ini bukan sulap dan bukan sihir. Ini betul-betul nyata dan terjadi di Indonesia. Seorang konglomerat sejak zaman Orde Baru, punya utang kepada sebuah bank sebesar Rp92 milyar, namun pembayaran cicilannya dapat dilakukan selama 184 tahun, tanpa bunga lagi.

Tetapi, Anda jangan heran. Karena begitulah adanya di republik ini.

Sementara bank-bank yang menerima kucuran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) harus mengikatkan diri membayar utang-utangnya selama empat tahun dalam Maste Settlement Aqcusition Agrement (MSAA), tetapi mantan demonstran yang pernah mengeruk keuntungan di

zaman Soeharto itu, bisa mencicil utangnya selama 184 tahun.

Ceritanya begini. PT Gemala Container (GC), salah anak perusahan dari Gemala Grup yang dimiliki Sofjan Wanadi, pada sekitar tahun 1995 meminjam uang senilai Rp92 milyar di Bank Nasional Indonesia (BNI). Pinjaman itu diperuntukan untuk membangun perluasan pabrik dan sejumlah kontainer di kawasan Semper, Cilincing, Jakarta Utara.

Yang dipertanyakan oleh Usman Ermulan, anggota Komisi IX DPR itu, kepada Menteri Keuangan Bambang Sudibyo adalah apa dasarnya seorang konglomerat boleh mencicil utangnya selama 184 tahun. Tanpa bunga dan bebas saja.

Ditilik dari jumlah pembayarannya Rp500 juta/tahun, hal ini berarti uang negara yang dipinjam Ketua Dewan Pengembangan Usaha Nasional (DPUN) ini baru bisa diselesaikan dalam jangka waktu 184 tahun. "*Sejauh mana Bapak Menteri mengetahui hal ini*," tanya Usman Ermula, anggota Komisi IX DPR asal Fraksi Partai Golkar, ketika Rabu (23/2) lalu di Gedung DPR, Jakarta Pusat.

Pertanyaan tersebut dilontarkan anggota asal Fraksi Partai Golkar ini menjelang berakhirnya Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menkeu Bambang Sudibyo.

Menurut Usman Ermulan, sampai saat ini GC mempunyai utang terhadap BNI senilai Rp92 milyar, yang waktu itu peminjamannya dilakukan untuk membangun proyek container. Usman Ermulan sendiri tidak bisa menyebutkan kapan persisnya utang tersebut dilakukan Sofjan. Ia memperkirakan pinjaman tersebut sudah dilakuakan sejak lama. Pada

awalnya, utang Sofjan ini berbentuk dolar Amerika Serikat. Namun, lanjutnya, kemudian dikonversi menjadi rupiah, yang pembayaran utangnya direstrukturisasi BNI sendiri. “Tetapi dengan kesepakatan akan dicicil setiap tahunnya Rp500 juta. Anehnya, tanpa bunga,” ujarnya. Apabila hal itu betul, lanjut Usman, artinya utang tersebut baru bisa diselesaikan oleh Sofjan Wanadi baru bisa diselesaikan dalam waktu selama 184 tahun. “*Apakah karena dia menjadi Ketua DPUN tersebut, sehingga dia mendapat fasilitas itu?*” tanyanya.

Padahal, ungkap Usman lagi, Sofjan mempunyai deposito di BNI senilai Rp40 milyar. Yang mengherankannya, mengapa sih dengan deposito Rp40 milyar itu, BNI tidak mengambil bunganya. Padahal, menurut Usman bunganya pada waktu berkisar antara 10-13 persen/bulan. Apabila diambil 10 persen berarti jumlahnya Rp400 juta dan dia bisa menambah pembayaran sebesar Rp100 juta lagi. Sementara, Menkeu Bambang Sudibyo yang menjawab pertanyaan Usman Ermulan, mengaku tidak tahu sama sekali dengan penyelesaian utang tersebut.

Sofjan Wanandi sendiri sempat ngumpet dan belum berhasil untuk diklarifikasi. Sampai Rabu malam pukul 22.00 wib, Syahril masih belum bisa dihubungi. Telepon rumahnya selalu sibuk.

Meskipun oleh bos PT GC, Herman Gozali disebutkan bahwa sejak 1 Maret 1998 Bos Gemala Grup, Sofjan Wanandi bukan lagi pemilik atau pemegang saham langsung dan tidak ikut mengendalikan jalannya PT Gemala Container (GC), namun menurut anggota Komisi IX Fraksi Partai Golkar itu, dia tidak bisa mangkir dan melepaskan tanggungan utangnya senilai Rp92 milyar di Bank Negara Indonesia (BNI).

Menurut Usman Ermulan, anggota Komisi IX DPR, kepada wartawan, Jumat (25/2) lalu di Jakarta, utang yang diperoleh PT GC, hal itu tidak bisa dilepaskan dari peran dan lobi Sofjan Wanandi yang waktu itu duduk sebagai Presiden Komisaris GC. Ditambahkan oleh Usman, ketika utang tersebut direstrukturisasi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), nama Sofjan Wanandi masih tercatat sebagai Preskom PT GC.

Menurut Usman, tanggapan yang disampaikan Herman Gozali, boleh-boleh saja. Tapi DPR tidak percaya begitu saja. Usman mengakui tetap akan mendesak dan menanyakan Menteri Keuangan agar klarifikasi mengenai PT GC segera disampiakan kepada anggota Dewan.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR, Rabu (23/2) lalu, Usman Ermulan sudah mempertanyakan kepada Menteri keuangan Bambang Sudibyo mengenai utang PT Gemala Container (GC) milik Sofjan Wanadi senilai Rp92 milyar, yang dicicil selama 184 tahun sebesar Rp500 juta/tahun dan tanpa bunga di Bank Nasional Indonesia (BNI). Namun, esoknya Direktur GC Herman Gozali menjelaskan bahwa utang GC senilai Rp92 milyar tersebut bukan merupakan utang pribadi Sofjan Wanadi, melainkan utang badan hukum PT GC. Bahkan, tambah Herman, sejak berdirinya PT GC, Ketua Dewan Pengembangan Usaha Nasional (DPUKN) itu sudah tidak pernah menjabat lagi sebagai direksi, yang bertanggungjawab penuh atas jalannya perusahaan. Disebutkan, sejak 1 Maret 1998, Sofjan juga mundur sebagai komisaris.

Dalam data yang dimiliki sumber Xpos, disebutkan selain nama Sofjan Wanandi juga duduk masing-masing Hiroshi Yoshikawa, Adnan Pranadi dan Biantoro Wanandi sebagai komisaris PT GC. Sedangkan Presiden Direktornya adalah Edward Ismanto Wanandi, dan masing-masing

direkturnya adalah Markus Winata, Herman Gozali dan Kazuo Hanazawa. Per tanggal 31 Maret 1999, ungkap Usman Ermulan, berdasarkan fasilitas kredit di BNI terhadap kredit investasinya telah direstruktur dengan jaminan tanah,bangunan pabrik seluas 4,8 Ha di Semper, Cilincing, Jakarta Utara. Untuk kredit modal kerja, tambahnya juga telah direstrukturisasi dengan jaminan mesin-mesin dan perlasatan FEO stock bahan baku dan invetory. Jumlah seluruhnya, telah direstrukturisasi senilai Rp92 milyar, yang telah dikonversi menjadi rupiah pada tanggal 24 Juni 1996 oleh (waktu itu) BNI'46.

"*Jaminannya penerimaan cessie, gadai saham, personal guarantee atas nama Edward I Wanandi dan Corporate Guarentee PT Gemala Tripakarsa*."

E. GOENAWAN MOHAMAD

Sang Antek CSIS

Terus terang pemilu 2014 adalah yang paling menarik sepanjang reformasi dan semuanya bermula dari kegelisahan banyak pihak terhadap potensi pencapresan seorang Prabowo. Menurut saya terlepas dari nantinya Prabowo terpilih atau tidak, dia harus bangga sebab begitu banyak operasi intelijen dan strategi-strategi disusun demi menjegal langkahnya termasuk kampanye bertema HAM yang sebenarnya sudah tidak berhasil namun akan terus diulang dengan harapan repetisi topik yang sama akan mencuci otak masyarakat.

Menjelang detik-detik terakhir pendaftaran koalisi dan pasangan capres-cawapres begitu banyak intrik dan serangan terhadap Poros Gerindra.

Anggota koalisi yang tadinya sudah begitu solid terus digoyang sementara aksinya mencari anggota baru seperti dijegal oleh kekuatan tidak terlihat. Salah satu aksi menggoyang koalisi itu dilakukan oleh salah satu pendiri PAN sejak bernama MARA yang sudah lama tidak aktif, Goenawan Mohamad mengeluarkan pernyataan mengundurkan diri dari PAN karena Hatta Rajasa maju bersama Prabowo dan hal tersebut menghianati semangat reformasi sebagai alasan berdirinya PAN.

Mundurnya Goenawan Mohamad memang sengaja dirancang supaya terdengar menghebohkan dan menggemparkan, namun sayang Goenawan Mohamad tidak memiliki kharisma dan nama baik yang cukup untuk membuat orang berpikir PAN kehilangan aset terbaiknya, toh diakui Goenawan Mohamad sendiri, dia sudah lama tidak aktif sehingga sudah lama tidak ikut mengurus kegiatan PAN, sehingga tidak layak dan aneh bila dia tiba-tiba protes terhadap suatu keputusan resmi PAN yang menurutnya melanggar visi dan misi pendirian PAN. Kemana saja boss?

Lagipula memangnya siapa Goenawan Mohamad sehingga dia merasa penting dan layak menjadi polisi moral bagi rakyat Indonesia? Wikileaks memang menyebutnya sebagai "*crusader for press freedom*", namun kita tahu bahwa Goenawan Mohamad tidak pernah berani melawan pembredelan rezim Soeharto, setidaknya dari tahun 1970 sampai 1994. Apa yang membuat berubah sehingga tahun 1994 ke atas seorang Goenawan Mohamad seolah makan nyali macan dan melawan Soeharto? Karena adanya jaminan perlindungan Benny Moerdani yang tersingkir dari Orde Baru dan merupakan teman dekat Fikri Jufri.

Goenawan Mohamad juga mendapat limpahan uang dari Amerika melalui USAid demi melemahkan pemerintahan Indonesia sebesar US 300,000 dan

dari uang ini berdirilah lembaga khusus fitnah terhadap Orde Baru serta pembela komunisme bernama Komunitas Utan Kayu, SiaR dan Institut Studi Arus Informasi/ISAI.

Goenawan Mohamad juga memasang beribu topeng di wajahnya sehingga seolah memiliki kepribadian ganda, di satu sisi dia adalah anggota Manifes Kebudayaan (Manikebu) yang melawan Lekra dan komunis; namun di sisi lain ketika akhirnya Goenawan Mohamad bersitegang dengan Taufik Ismail rekan Manikebu terkait majalah Horison, dia malah merangkul elemen-elemen ex Lekra seperti Pramoedya Ananta Toer dan melalui ISAI menerbitkan banyak buku apologetika kaum komunis termasuk buku putih berisi fitnahan yang terkenal dari John Rossa berjudul Pretext to Mass Murder yang isinya hanya sekedar mengambil alih teori yang terbukti salah milik Prof. Wertheim.

Keranjingannya kepada usaha menutup "kesalahan" kepada komunis menyebabkan Goenawan Mohamad ikut membantu Carmel Budiardjo, ex PKI dan istri Budiardjo yang menyelundupkan senjata untuk pasukan G30S/PKI membuat film The Act of Killing dan The Look of Silence yang disponsori organisasi milik Carmel Budiardjo, Tapol UK, demi mendiskriditkan dan menjelek-jelekan nama Indonesia di forum internasional. Sebagai anak didik agen CIA bernama Ivan Kats tampaknya perbuatan semacam ini bukan hal aneh bagi Goenawan Mohamad.

Di kalangan seniman Goenawan Mohamad juga hanya dihormati di Komunitas Salihara dan Komunitas Utan Kayu/KUK yang dibangunnya dari uang asing. Kalangan seniman non-Salihara dan KUK melihat Goenawan Mohamad adalah manusia arogan, congkak dan merasa dirinya paling mengerti seni. Tidak jarang Goenawan Mohamad menyebut karya

seniman lain dengan sindiran kasar seperti majalah Boemiputra yang dibuat penyair Wowok Hesti Prabowo sebagai tidak lebih dari coret-coretan di toilet. Wah, hebat sekali, hanya tulisan Salihara dan KUK yang karya sastra, lainnya coretan di toilet!

Selain itu Saut Situmorang mengkritik politik seni hanya untuk KUK dan Salihara ala Goenawan Mohamad seperti terbukti ditolaknya Wowok Hesti Prabowo, Ahmadun Herfanda dan Radhar Panca, semua seniman non Salihara dan KUK sebagai anggota Dewan Kesenian Jakarta tahun 2006 yang dikuasai penuh oleh orang-orangnya Goenawan Mohamad seperti Marco K, Ayu Utami, Nukila Amal dll (sama seperti AJI dibentuk dan kemudian dikuasai orangnya Goenawan Mohamad dan Tempo). Belum lagi faktanya sebagai orang yang mengaku sebagai aktivis kebebasan pers, Goenawan Mohamad tidak menggunakan hak jawab atau melapor ke Dewan Pers sehubungan dengan sebuah artikel di Media Indonesia yang memberitakan pesta mabuk-mabukan yang diadakan Goenawan Mohamad berbalut acara seni tapi malah mengirim sms marah ke Surya Paloh, pemilik Media Indonesia yang menyebabkan dua jurnalis penulis artikel kehilangan pekerjaannya.

Selanjutnya Saut Situmorang pernah mengkritik acara internasional yang diadakan KUK bertema “Temu Sastra Internasional” di Taman Budaya Surakarta, Solo namun tidak ada satupun sastrawan lokal dari Solo yang dilibatkan untuk ikut di acara tersebut. Sebagai wujud protes, Saut membuat petisi yang ditandatangani seniman lokal dan membagi-bagikan kepada peserta acara, yang dibalas oleh Goenawan Mohamad melalui mesin politiknya, Tempo yang kemudian menerbitkan berita mengenai tindakan Saut dan seniman lokal Solo sebagai cemburu dan iri hati karena tidak diundang tanpa mewawancarai Saut dan satu-satunya narasumber

adalah Goenawan Mohamad sendiri. Luar biasa!

Kritik-kritikan terhadap Goenawan Mohamad masih banyak lagi, termasuk pembelaan Tempo terhadap kasus pemerkosaan yang dihadapi petinggi Salihara, Sitok Srengenge menurunkan berita seolah pemerkosaan terjadi suka sama suka; menurunkan berita tidak benar bahwa MUI menerima suap dari Australia untuk sertifikat halal; dan menempatkan mantan Presiden Soeharto sebagai Yesus, Tuhan umat Kristen dalam cover edisi meninggalnya mantan Presiden Soeharto dan lain sebagainya.

Harga Goenawan Mohamad Hanya US$ 50

Sepak terjang Goenawan Mohamad, bekas pemimpin tertinggi Tempo yang amat kesohor sebagai tokoh liberal dan kini Neo-Lib, dan amat dihormati di lingkungannya dengan panggilan kehormatan: GM. Namun kini tiba-tiba GM dikuliti oleh Wijaya Herlambang dalam buku berjudul, "Kekerasan Budaya Pasca 1965" yang terbit November 2013 lalu. Pengungkapan buku ini membenarkan dugaan banyak pihak, bahwa GM dibiayai lembaga filantropi mulai: Ford Fondation, Rockefeller Fondation, Asia Fondation Open Society Institue, USAID juga George Soros.

Laporan ini tidak bermaksud hendak membedah buku Kekerasan Budaya Pasca 1965, tapi sekadar mengutip di sana sini riset yang dilakukan Wijaya Herlambang sang penulis yang kini dosen di Universitas Pancasila dan Gunadarma, tentang seorang GM. Sangat menarik mengutip dalam buku itu, apa yang dilakukan Ivan Kats, pimpinan teras CCF (Congress for Culture Freedom) yang merupakan sayap operasi CIA, yang telah membina GM pada 1960-an. Bagaimana Kats berkorespondensi dengan GM pada 1969 dan terang-terangan memperlakukan GM bak ‘kacung’,

kita kutip korespondensinya diantaranya:

"Saya ingin kamu memilih seorang pemikir Barat (saya ingat kesukaanmu pada Camus), pilih 40-60 halaman tulisannya. Terjemahkan atau kita minta orang lain menterjemahkan, sesudah kamu memilih teksnya. (Tulis) pengantar yang dalam dan tajam yang bisa menunjukkan kenapa kamu, Gun, merasa bahwa penulis ini memiliki pandangan yang penting bagi orang Indonesia atau generasimu. Pilih sebuah teks dan bertarunglah dengan si penulis bagai daimon Indonesia menghadapi kekuatan cahaya. Atau sebaliknya…Saya akan membayarmu $50 di awal kerja, dan $50 lagi pada saat pengiriman, ditambah ongkos penerjemahan…Sementara itu, saya akan mencari dana, dan akan mendapatkannya. Bagaimanapun, hak-hakmu di atas saya jamin secara pribadi (20 November 1969)."

Sebuah perintah seorang agen Barat kepada seorang komprador yang luar biasa, menghina sekaligus penghargaannya yang sangat murah, kepada seorang GM, 50 dolar saja yang jika disetarakan nilai hari ini tak lebih dari enam ratus ribu saja. Penulis buku itu, Wijaya Herlambang kemudian membuktikan perintah Ivan Kats ini dikerjakan oleh GM setelah pada 1988 Yayasan Obor menerbitkan terjemahan tulisan Albert Camus yang dikumpulkan menjadi sebuah bunga rampai berjudul "Krisis Kebebasan" dengan pengantar Goenawan Mohamad. Goenawan Mohamad sejak Tempo diberangus rezim Soeharto (1994) menempatkan diri sebagai pelawan orde baru yang handal.

Dengan lenyapnya Tempo, GM membangun Komunitas Utan Kayu (KUK) yang bermarkas di Jalan Utan Kayu Jakarta Timur. Lembaga ini kemudian melahirkan serenceng lembaga kebudayaan mulai AJI (Aliansi Jurnalistik Indonesia), Jaringan Islam Liberal (JIL), Teater Utan Kayu

(TUK) yang diplesetkan bulletin Boemiputra menjadi Tempat Umbar Kelamin, sekaligus agen imperialis Barat. Kehadiran JIL dirasakan umat Islam terbesar sebagai alat penghancuran Islam di negeri ini. Karena itu JIL disebut dibiayai lembaga filantropi Barat mencapai 150.000 USD/tahun. Pendek kata KUK melalui lobby GM ke sejumlah orang-orang teras USAID, berhasil menguras dananya sebesar 100.000 -200.000 USD, sehingga menempatkan KUK sebagai agen Barat. Termasuk mendirikan ISAI (Institut Studi Arus Informasi) pada 1995 dan belakangan membangun Salihara di kawasan Pasar Minggu sebagai pusat budaya.

Yang sangat dirasakan menyakitkan bagi kelompok Islam mainstream, kehadiran KUK di bawah GM, misalnya Radio FM 68, JIL, bahkan berbagai penerbitan bawah tanahnya seperti Bergerak, X-Pos hingga Tempo majalah dan Koran Tempo yang kini sejak era reformasi, kembali terbit, kesemua produk GM ini cenderung menghantam aspirasi Islam. Kini terbongkar melalui buku Wijaya Herlambang, semua ini tidak aneh, GM sejatinya seorang komprador sejati, yang diakuinya sendiri, dia memang dibiayai serenceng lembaga filantropi Barat dan Asia termasuk Asia Foundation dan Japan Foundation, termasuk George Soros itu.

Memang Herlambang belum menyajikan ulasan bagaimana peranan GM saat rezim Soeharto jatuh di mana Soros ikut memainkan peranan menghancurkan ekonomi Indonesia. Hanya dikutip sekilas GM bersama Adnan Buyung Nasution terlihat menonjol di saat itu namun bukanlah dua orang itulah sejatinya yang memainkan peranan terpenting dalam reformasi Mei 1998 itu.

Yang jelas melalui seluruh penampilannya, GM cenderung berlawanan arus dengan Islam. Tatkala umat Islam makin bersikeras menentang

eksistensi aliran sesat Ahmadiyah dan mendesak pemerintah membubarkannya, awal 2008, GM dan kelompoknya menentangnya dan mendirikan AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) dan memajang iklan di harian Kompas menunjukkan eksistensinya seraya mengecam umat Islam *mainstream* yang dituduhnya melanggar hak-hak asasi warga Ahmadiyah, mengancam kebhinekaan, sekaligus menyebar kebencian, kekerasan, dan ketakutan di tengah masyarakat.

Pengumuman yang ditandatangani 250-an nama dengan membawa sejumlah tokoh Islam yang kurang pikir, seperti Syafii Maarif, Gus Dur, Amien Rais, Dawam Rahardjo, Utomo Dananjaya, dan Djohan Effendi yang memang agen Ahmadiyah, mengundang masyarakat menghadiri apel akbar di Monas pada 1 Juni 2008. Jadilah bentrokan di bawah tugu Monas dengan FPI yang mengakibatkan Munarman, SH dan Habib Rizieq Syihab dijebloskan ke penjara. Sejak peristiwa Monas itu berkembang adagium melalui wacana dan opini pers bahwa umat Islam dituduh selalu menolak keberagaman, melecehkan minoritas, menolak pluralisme, bahkan tuduhan umat Islam dan sejumlah Ormasnya cenderung memaksakan kehendak, bahkan dengan cara-cara vandalisme, kekerasan fisik, dan kesemuanya itu bagai dibiarkan saja oleh aparat keamanan.

Contoh yang sering dikemukakan dalam hal ketertindasan kaum minoritas oleh Islam adalah kasus Gereja Yasmin di Bogor, kasus bentrokan Cikeusik Banten dengan warga Ahmadiyah, juga kasus Syiah di Sampang Madura. Berbagai kasus yang disebutkan sebagai contoh itu dalam berbagai rubrik di Suara Islam seringkali dibongkar fakta yang sebenarnya terjadi yakni pemutar-balikan fakta yang sangat kurang ajar. Seperti dalam diskusi bertajuk "Memilih Presiden Peduli Pluralisme" di Forum Alumni

Fisip UI Jakarta (26/1), fitnah kepada umat Islam kembali terjadi. Pemutarbalikan fakta di lakukan oleh seoranng panelis. Dalam diskusi itu dihadirkan panelis Budiarto Shambasy dari Kompas, Jaya Suprana, Alvin Lee bekas tokoh PAN.

Pendapat Budiarto Shambasy esok harinya dilansir Kompas dengan pernyataan:

"*Keberagaman sudah terancam sejak insiden Monas 1 Juni 2008. Saat itu pawai kebhinekaan diserbu kelompok radikal dan tidak pernah ada proses hukum yang memberi efek jera. Tragedi Monas memicu insiden lain yang tidak jelas penyelesaian hukumnya seperti kasus HKBP Philadelpia, Syiah Sampang Madura dan Gereja Yasmin Bogor*," Demikian Budi Shambasyi.

Pernyataan ini walau keluar dari wartawan Kompas yang dianggap selama ini sangat cerdas ternyata jauh dari fakta yang sebenarnya. Ia menyebut insiden Monas tidak diselesaikan secara hukum, tentu pernyataan yang sangat salah, karena kasus itu telah menjebloskan Munarman SH ke dalam penjara bersama Habib Rizieq, selama satu setengah tahun. Betapa awamnya seorang Budi Shambasyi?

Itu urusan dia sendiri. Jika dia mau mengikuti seluruh persidangan insiden Monas itu, dia akan mengikuti bahwa Munarman dan Habib Rizieq tidak bersalah. Setiap kali persidangan digelar keduanya dengan telak selalu membuktikan dirinya tidak bersalah. Namun mereka harus mengikuti kompromi mengikuti vonis yang dijatuhkan karena tekanan penguasa. Dokumen persidangan semua itu masih bisa dibaca dengan gamblang oleh siapapun termasuk wartawan Kompas yang kondang sangat pintar itu.

Barangkali sikap Budiarto seperti itu hanyalah berlagak pilon, asal aspirasi Islam apapun harus dihantamnya. Itulah yang juga selalu dilakukan oleh GM yang kini mewabah di negeri ini sebagai sebuah pesanan dari alat-alat propaganda dan intelejen barat, khususnya AS, seperti USAID, Rand Corporation, dan serenceng lembaga filantropi mulai Rockefeller Foundation, Ford Foundation dan serenceng lembaga lainnya. Dulu kita semua hanya menduga-duga peranan GM yang telah menjadi alat Barat, misalnya dukungan GM kepada sistem politik dan ekonomi liberal di Indonesia—khususnya akhir-akhir ini—dan karena itu habis-habisan ia mendukung Wapres Boediono, tapi kini pertanyaan itu terjawab dengan buku hasil riset bertahun-tahun yang dilakukan Wijaya Herlambang dalam bukunya "Kekerasan Pasca Budaya 1965". Ternyata GM hanya dihargai limapuluh dolar saja.

Tempo dan Goenawan Mohamad Memang Bermasalah

Hilangnya respek saya kepada Tempo dan pendiri mereka, Goenawan Mohamad dimulai sejak tahun 2008 ketika mereka menerbitkan edisi kematian Pak Harto dengan cover seolah menyamakan Pak Harto sebagai Yesus Kristus. Vulgar dan jauh dari nilai artistik. Saat itu Tempo segera menjadi sasaran demonstrasi organisasi Katolik dan Kristen, dan *to be fair* Tempo melalui Toriq Hadad sudah menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf.

http://hujanderas.wordpress.com/2008/02/05/cover-majalah-tempo-menuai-kontroversi/

Seharusnya masalah sudah selesai, tapi dalam tahun-tahun berikutnya Tempo terus menerus membuat cover yang melukai perasaan umat

beragama contohnya cover kaleng babi berlabel halal yang membangkitkan kemurkaan MUI dan beberapa elemen umat Islam (http://www.onvsoff.com/2014/02/tempo-melecehkan-mui-dan-umat-islam/). Dari berbagai cover tersebut saya menilai ada yang salah dari cara berpikir Tempo dan redaksinya. Namun saya tidak paham separah apa kesalahan berpikir tersebut mengingat mereka mendukung kebebasan antar umat beragama melalui Jaringan Islam Liberal/JIL; Tifa; dll.

Selain itu artikel seorang kompasianer berakun “Jilbab Hitam” yang belakangan diketahui sebagai salah satu korban fitnahan Tempo bernama Indro Bagus Satrio Utomo, mantan wartawan detik.com mengenai apa yang menurutnya kebusukan dan kebobrokan Tempo sangat menarik sebab data sedetail itu hanya dapat diberikan oleh orang yang mengetahui seluk beluk institusi Tempo dan orang-orangnya.

Dalam komentar ada yang permasalahkan penggunaan id anonim dan bukan nama sebenarnya, tapi menurut saya hal itu tidak masalah, sebab dari data-data yang diberikan sungguh mudah melacak apakah dia benar wartawan Tempo atau bukan. Misalnya mudah dilacak wartawan Tempo berjenis kelamin wanita yang masuk pada tahun 2006 dan mengundurkan diri pada 2013. Kemudian mudah dilacak nama-nama yang disebut sebagai mantan wartawan tempo yang dia temui, apakah benar nama dimaksud adalah mantan wartawan tempo dan telah ditemui si “Jilbab Hitam”. Karena inilah saya bingung melihat reaksi Goenawan Mohamad terhadap artikel tersebut dengan mengancam akan membawa admin Kompasiana ke meja pengadilan. Inikah kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi yang diagung-agungkan Goenawan Mohamad itu?

Kekecewaan penulis artikel tersebut setelah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Tempo maupun Goenawan Mohamad ternyata hanya sekelas wartawan bodrex yang memberitakan berita pesanan sesungguhnya tidak perlu terjadi bila membaca masa lalu Goenawan Mohamad yang bagian dari klik LBH Jakarta, penerima dana-dana yang berasal dari Amerika Serikat atau negara asing lain berjumlah jutaan dolar sejak tahun 1970 sampai sekarang untuk memberitakan semua hal jelek tentang Indonesia untuk menciptakan *image* bahwa Indonesia sangat buruk sehingga layak dijajah asing.

Selain itu data atau fakta lain yang benar dari tulisan “Jilbab Hitam” adalah Tempo menerima uang dalam jumlah besar dari Edwin Soerjadjaja untuk memberitakan kasus Asian Agri dan mendiskriditkan pengusaha bernama Sukanto Tanoto alias Kang Ho. Indikasi hal ini terbukti dari hasil penyadapan terhadap telepon wartawan Tempo yang menangani proyek pembusukan nama Asian Agri, di mana terbukti yang bersangkutan meminta dan menerima uang dari anak Om William sebesar Rp. 100juta. Ketika ketahuan, Tempo beralasan bahwa uang tersebut adalah sumbangan bagi dana menyewa pengacara dari si pengusaha untuk saksi kunci kasus Asian Agri, Vincentius Amin Sutanto yang saat itu sedang terjerat kasus pidana penggelapan uang sebesar US$ 3,1juta atau Rp. 28miliar milik Asian Agri dengan modus pemalsuan dokumen.

Transkrip yang diakui Metta sebagai nomor pribadi flexinya, 02170292XXX kepada Edwin Soerdjaja, 0811980XXX:

"Dari BW. Sobat Metta, jika tak keberatan kontak kolega saya dan bicarakan soal situasinya. Prakiraan biaya itu kan untuk kasih tahu seluruh biaya. Saya duga masih ada yang bisa dinegosiasikan. Salam, BW.

Cc. Iskandar."

"Pagi, kami sudah diskusi dengan BW, masalah minimum cost sulit kami tentukan, karena kami tidak tau berapa kemampuan sebenarnya. Komitmen kami tetap bantu untuk mengangkat kasus penyuapan di AAG, mungkin sebagai lawyer VAS bisa kita carikan pengusaha lain. Tks. Dari Pak Iskandar. Maaf pak, apakah bisa diungkap berapa bujet yang bisa dicover? Metta."

Ada pula isi SMS dari ponsel Metta ke ES yang berbunyi: "'Materi singkat apakah masih diperlukan Pak?". Ada juga, "Pak, jadwal saya bisa saya sesuaikan. Jadi tetap pk 1 saja. Metta."

SMS itu dibalas pengusaha ES. "Bagaimana kalau pkl 13.00 di rumah saya saja, kita makan lotek. Jl Denpasar Raya 2, Kuningan, di belakang Kedutaan Singapore dan India."

Selain itu, ada SMS dari ponsel yang diindikasikan sebagai Iskandar ke Metta: "Usulan untuk tidak indikasikan sponsor, tapi saweran keluarga."

Bunyi SMS lainnya, dari Metta ke adik Vincent, Livina: "Ok Bu, diupayakan sisa bujet yg sudah diberikan kemarin sekitar 70 juta bisa dioptimalkan utk biayanya." Juga, dilanjutkan, "Bu, kalau kunjungan ke Salemba dari jam berapa sampai jam berapa? Bos2 saya ingin ke sana. Pak is dan bw tetap bantu secara volunteer.'

Selain itu ada juga SMS dari 0811130XXX ke ponsel Metta. Bunyinya: "Nanti sore saya ada janji dgn menkeu. Ada titipan? Bhm (diduga atasan Metta)."

Di bagian akhir transkrip itu, tertulis dari 08161488XXX ke ponsel Metta: "TK, Inf. Semoga sj V tetap kuat dn jika tdk, hrs dipikirkan kemungkinan terjeleknya bg Metta dan Tempo spy tdk ada celah bg ST utk lakukan pukulan balik. Salam, BW."

http://m.inilah.com/read/detail/676/soal-metta-tempo-jangan-lari-dari-inti-masalah

Alasan Tempo dan sang wartawan, Metta Dharmasaputra tersebut jelas dibuat-buat, sebab bila benar Vincent membutuhkan jasa hukum, dan Edwin mau membantu demi kemanusiaan, maka Edwin Soerjadjaja sebenarnya dapat dengan mudah meminta bantuan kepada jajaran kantor hukum yang digunakan dirinya atau perusahaannya untuk membela Vincent dan selanjutnya biaya ditanggung oleh Edwin, atau bisa juga para pengacara tersebut memberikan jasa *pro bono* atau mengurangi biaya jasa hukum mereka, sehingga tidak perlu ada uang tunai masuk ke rekening Tempo dan/atau wartawannya langsung.

Selain itu, Bambang Harymurti, dan Goenawan Muhamad maupun Tempo sangat dekat dengan ketua Transparency International Indonesia, lembaga yang bergerak di bidang anti korupsi dan menerima dana asing. Sang ketua memiliki kantor pengacara, dan bila memang benar dia aktivis anti korupsi dan bukan sekedar jualan jamu “anti korupsi” demi pencitraan dan menerima dana asing, maka tentu yang bersangkutan akan sukarela mendampingi Vincent demi membongkar “skandal pajak terbesar”.Perlu juga ditekankan bahwa Transparency International Indonesia adalah anggota Koalisi Anti Peradilan Korup yang pada tanggal 22 September 2008 mengirim surat ke Dewan Pertimbangan Presiden yang intinya meminta pemerintah mengusut secara tuntas “kejahatan” yang dilakukan

oleh Sukanto Tanoto (Metta Dharmasaputra, Saksi Kunci, halaman 245).

Logikanya lagi, memobilisasi ratusan advokat terkemuka Indonesia untuk secara *pro bono* mendukung pencalonan Jokowi-JK saja bisa, masakah kini memobilisasi advokat untuk membantu sang saksi kunci sampai harus minta uang kepada Edwin Soerjadjaja? Jawabannya tentu saja karena saat itu Edwin Soerjadjaja sedang terlibat usaha merebut saham Adaro yang dikuasai Beckett Pte. Ltd., perusahaan Singapura yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Sukanto Tanoto melalui PT Unigaruda Masabadi. Belakangan Edwin Soerjadjaja merebut saham Adaro yang dijaminkan ke Deutche Bank tersebut melalui anak perusahaannya, PT Dianlia Setyamukti. Jual beli inilah yang dipersoalkan oleh kelompok usaha Sukanto Tanoto dan mereka berperang sengit di pengadilan dengan medan perang di Indonesia, dan Singapura (Metta Dharmasaputra, Saksi Kunci, hal. 18-19).

Memang organisasi jurnalis tempat Metta bernaung yaitu Aliansi Jurnalis Independen atau AJI telah melepaskan Metta dari sangkaan pelanggaran kode etik terkait kasus menerima uang sebesar Rp. 100juta dari Edwin Suryadjaja, tapi masalahnya AJI adalah organisasi yang didirikan oleh Goenawan Mohamad, pemilik Tempo dan anggota Koalisi Anti Peradilan Korup yang menuntut pengusutan "kejahatan" yang dilakukan oleh Sukanto Tanoto, dan terakhir AJI mengirim Surat No. 05/AJIJAK-Adv/Pers/IX/2007 tertanggal 12 September 2007 yang intinya menghujat kepolisian karena mengungkap kasus persekongkolan jahat Metta Dharmasaputra dengan Edwin Soerjadjaja untuk menjatuhkan Asian Agri, sehingga keputusan dewan etik AJI tersebut sekalipun berbau amis dan mencurigakan namun sungguh tidak mengherankan (Metta Dharmasaputra, Saksi Kunci, halaman 245).

Kebenaran lain dari tulisan “Jilbab Hitam” adalah kedekatan Metta Dharmasaputra dengan pengusaha-pengusaha kaya raya Indonesia, sehingga dengan mudah dia bisa menjadi penghubung Tempo untuk meminta uang dari Edwin Soerjadjaja.Untuk mengetahui seberapa dekat orang ini dengan konglomerat, kita harus kembali ke tahun 2005, di mana Metta Dharmasaputra menghadiri acara Lim Sioe Liong di Singapura dan membuat laporannya untuk Tempo. Hal ini adalah prestasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata, sebab acara Om Liem tersebut sangat tertutup, rahasia dan eksklusif sampai-sampai undangannya sendiri khusus, yaitu koin emas murni yang dibuat khusus acara, yang harus dibawa untuk bisa masuk ke acara ulang tahun tersebut.

Ajaibnya seorang Metta Dharmasaputra yang saat itu masih wartawan junior bukan saja mendapat informasi jelas mengenai lokasi dan tanggal acara keluarga salim itu, tetapi juga berhasil mendapatkan atau dipinjamkan undangan berupa koin emas yang seharusnya hanya dimiliki pengusaha-pengusaha dan para pejabat yang diundang Om Liem, yang tentunya bukan orang sembarangan. Kemungkinan paling besar adalah seorang pengusaha saingan Om Liem mengabari Metta dan memberikan semua informasi yang diperlukan untuk hadir di acara tersebut dan memberitakan di Indonesia tentang bagaimana “kehidupan mewah” keluarga Salim di pengasingan. Mungkin karena inilah maka Metta Dharmasaputta diminta Bambang Harymurti untuk mencari dan menghubungi konglomerat-konglomerat musuh Sukanto Tanoto untuk bergabung melawan Asian Agri (Metta Dharmasaputra, Saksi Kunci, halaman xxiv).

Pertanyaannya adalah mengapa dari semua wartawan di Tempo, si pengusaha gelap itu menghubungi Metta Dharmasaputra? Dalam kasus

Asian Agri juga demikian, Bambang Harymurti mengakui bahwa awal Tempo membuat laporan kasus tersebut dimulai ketika Vincent, karyawan Asian Agri sedang dalam pelarian karena merampok uang perusahaan, yang bersangkutan menghubungi Metta via email padahal saat itu mereka tidak saling kenal. Ini jelas aneh, di antara ratusan wartawan Tempo, Vincent yang sedang dalam pelarian berinisiatif menghubungi Metta yang tidak dikenalnya. Apakah mungkin pengusaha yang mendanai Vincent untuk menyerang Asian Agri adalah orang yang sama dengan yang memberikan undangan emas keluarga Liem kepada Metta? Kalau ternyata beda orang, maka hebat sekali jaringan konglomerat yang dipegang Metta Dharmasaputra ini.

Kebusukan Goenawan Mohamad dan majalah Tempo juga diungkap oleh pemilik akun twitter @kurawa bernama Rudi Sutanto (pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok) menanggapi pemberitaan-pemberitaan pada majalah dan koran Tempo yang dinilai telah memfitnah Ahok. Menurut Rudi, Goenawan Mohamad telah secara terbuka menyatakan dukungan kepada Ahok pada Pilkada 2017 dan membentuk komunitas TemanAhok di Komunitas Salihara miliknya. Setelah itu Goenawan Mohamad meminta dana besar kepada Ahok dengan alasan untuk mengadakan riset dokumentasi ke rusun-rusun dan tempat yang sudah dibangun oleh pemerintahan Ahok. Karena proposalnya ditolak, maka Goenawan Mohamad mengunakan Tempo untuk menyerang Ahok dengan isu kasus hukum reklamasi yang sedang diperiksa oleh KPK.

Demikian pula cerita Hasan Nasbi Batupahat, CEO Cyrus Network, salah satu konsultan politik Jokowi dan Ahok, melalui akun twitternya @datuakrajoangek bercerita tentang bagaimana majalah Tempo memfitnah Tomi Winata melalui liputan Ada Tomi di Tenabang yang

ketika itu menuding Tomi Winata ada di belakang pembakaran kios-kios Tanah Abang. Menurut Hasan Nasbi, liputan tersebut bersumber dari seseorang yang mengaku memiliki informasi perihal kegiatan di belakang layar Tomi Winata di Tanah Abang. Setelah liputan ditulis ternyata baru ketahuan bahwa ternyata tidak ada Tomi Winata sama sekali, melainkan Djan Faridz.

Terakhir, cover Majalah Tempo edisi Prahara Obor Rakyat sangat kental terasa sebagai kampanye hitam yang bermaksud untuk menghina, menista dan memfitnah kubu Prabowo-Hatta secara sinis dan vulgar yang menurut hemat saya mencerminkan kekurangajaran wartawan Tempo yang sedang menikmati bulan madu dengan iklim kebebasan pers. Alasan saya mengatakan hal ini sangat sederhana, yaitu kata "Prahara" adalah akronim dari nama pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa yang sengaja dibuat kubu Jokowi-JK untuk menghina Prabowo dan Hatta Rajasa.

Cover majalah Tempo tersebut melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers ("**UU Pers**") yang menyebutkan: "*Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah*," dan bila dikaitkan dengan cover Tempo yang menyudutkan Prabowo-Hatta melalui penggunaan kata "Prahara" maka jelas sekali Tempo telah melanggar asas praduga tidak bersalah sebab telah menghakim kubu Prabowo-Hatta Rajasa sebagai pihak di belakang tabloid Obor Rakyat padahal tidak ada bukti dan pemred Obor Rakyat sudah membuat pernyataan bahwa alasan dia menerbitkan tabloid tersebut adalah karena sebagai warga Jakarta merasa kecewa dengan sikap Jokowi yang tidak amanah.

Ini artinya, Tempo juga melanggar perannya sebagai pers nasional untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, melanggar asas praduga tidak bersalah Prabowo-Hatta Rajasa yang merupakan bagian dari hak asasi sekaligus sengaja untuk tidak mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar (Pasal 6 UU Pers). Dengan demikian kemerdekaan pers yang dimiliki Tempo tidak dijalankan dalam bingkai moral, etika dan hukum padahal UU Pers dengan tegas mengatur bahwa kemerdekaan pers harus berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.

Oleh karena itu sesungguhnya edisi Tempo berjudul Prahara Obor Rakyat itu tidak menghasilkan informasi yang mendidik masyarakat dan lebih sebagai sumber provokasi, berita bohong dan pembunuhan karakter supaya rakyat Indonesia tidak memilih kubu Prabowo dan Hatta Rajasa. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Goenawan Mohamad, pendiri Tempo adalah pendukung Jokowi-JK; dan pemred Tempo, Arif Zulfikli pernah mengungkap definisi Tempo tentang "independensi pers" adalah boleh berpihak dan boleh tidak netral dengan alasan kemanusiaan, hak hidup manusia, pluralisme, dll.

Lebih lanjut pemred Tempo tersebut juga mengakui bahwa media boleh tidak netral dalam berbagai hal, termasuk pemilu sehingga media boleh membuka skandal atau masa silam kandidat yang menurut mereka buruk dan yang penting semua kaidah jurnalistik dipenuh serta yang ditulis fakta yang bisa diuji kebenarannya, bukan fiksi apalagi fitnah. Apa yang dikatakan pemred Tempo sebenarnya filosofi dan nafas dari Tempo dalam menjalankan pemberitaan selama ini. Dengan kata lain Tempo memang majalah yang bias, tidak netral dan berpotensi menjadi *conflict intensifier* (mengenai jawaban Arif Zulfikli dapat dilihat di

http://chirpstory.com/li/213683).

Konsep Tempo di atas tentu saja kembali melanggar Pasal 5 ayat (1) UU Pers karena tidak menghormati asas praduga tidak bersalah. Mengapa demikian? Sebab dengan jurnalis berpihak maka mereka sudah tidak lagi objektif menilai seseorang atau suatu peristiwa dan secara psikologis pasti insan pers tersebut dalam membuat tulisan hanya akan menonjolkan sisi negatif dari pihak yang tidak dia sukai karena persepsinya dan hanya akan menonjolkan sisi positif dari pihak yang dia dukung; padahal belum tentu persepsi dia benar sebab persepsi sarat dengan bias yang tidak akurat.

Kita ambil contoh, kalimat Arif Zulfikli bahwa "*skandal atau masa silam kandidat yang buruk harus dibuka*," terkesan mulia, dan dapat dipastikan dia merujuk pada "skandal penculikan aktivis" yang dituduhkan kepada Prabowo Subianto. Karena Tempo sudah memihak pada Jokowi-JK maka informasi-informasi yang dapat menegasikan atau membuktikan bahwa "skandal buruk" tersebut tidak benar pasti ditutupi, dan itulah alasan Tempo tidak pernah membuka fakta bahwa Goenawan Mohamad dan SiaR media bawah tanahnya memiliki informasi bahwa operasi "penculikan aktivis" yang dilakukan Prabowo adalah atas perintah Panglima ABRI/Pangab, sedangkan mantan pangab justru memihak pada Jokowi-JK; dan Tempo juga tidak mengulas dokumen tentang Operasi Kuningan yang diserahkan kepada Komnas HAM yang isinya bila benar bukan saja membuktikan Prabowo difitnah tapi juga membuktikan kelompok penjahat pelanggar HAM sebenarnya mendukung Jokowi dan JK.

http://www.minihub.org/siarlist/msg00741.html

http://m.aktual.co/politik/145428operasi-kuningan-wiranto-perintahkan-

13-aktifis-98-dibumihanguskan

Konsepsi Tempo mengenai "independen" juga menyebabkan mereka berkali-kali melanggar Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Pers ("**Kode Etik Pers**"), khususnya Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dengan penjabaran diberikan khusus cover edisi Prahara Obor Rakyat sebagai berikut:

a. Cover tersebut melanggar Pasal 1 Kode Etik Pers yang mewajibkan wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk sebab jelas sekali cover tersebut tidak sesuai keadaan objektif sebab tidak ada unsur Prabowo-Hatta Rajasa dalam Obor Rakyat; serta terasa niat buruk Tempo untuk mengurangi elektabilitas kedua pasangan itu yang berarti menimbulkan kerugian pada pihak lain.

b. Cover tersebut jelas tidak profesional sesuai ketentuan Pasal 2 Kode Etik Pers sebab gambar yang dimuat dalam majalah tidak ditampilkan secara berimbang, hanya gambar Jokowi meniup koran yang dibuat seperti obor yang bernyala dan disandingkan dengan kata "Prahara".

c. Sebagaimana dijelaskan di atas, cover tersebut telah menerapkan asas praduga bersalah, telah menghakimi dan tidak berimbang sehingga melanggar Pasal 3 Kode Etik Pers.

d. Wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita yang bohong dan fitnah; dan sementara belum ada bukti bahwa Obor Rakyat dibuat oleh kubu Prabowo-Hatta Rajasa tapi Tempo sudah menampilkan cover yang menuduh keduanya sebagai pelaku.

Penjabaran pelanggaran hukum dan kode etik dalam artikel ini memang sengaja difokuskan pada cover sebab bila saya membahas isinya maka bisa-bisa artikel ini menjadi semacam draft untuk menggugat Tempo ke Dewan Pers dengan alasan Tempo telah melakukan viktimisasi melalui pemberitaan dengan menyalahgunakan kebebasan pers yang diberikan. Dalam hal ini Tempo bisa dimasukan kepada kategori invisible criminal karena bisa merugikan masyarakat melalui tindakan main hakim sendiri tanpa perlu takut dicap sebagai pelaku kriminal; apalagi Putusan Mahkamah Agung No. 3173 K/Pdt/1991 tanggal 28 April 1993 dalam kasus Anif v. Surat Kabar Harian Garuda telah memberikan pintu masuk bagi pers untuk tidak memberitakan kebenaran.

Saya pikir Tempo harusnya juga paham bahwa kebebasan pers terkait erat dengan hak sipil masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("**UU HAM**") bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Pengaturan kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi juga diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi melalui Undang-undang No. 2 Tahun 2005; dan Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights*.

Oleh karena itu kasus tabloid Obor Rakyat sesungguhnya penting untuk diteliti sebagai studi dalam kontras. Di satu sisi orang-orang Tempo baik di dalam maupun di luar Tempo sangat aktif memperjuangkan kebebasan pers dan kebebasan berpendapat serta hak warga menerima informasi sehingga kuatir Prabowo akan mengebiri hak asasi ini bila menjadi presiden, akan tetapi di sisi lain Tempo sangat antusias dalam mendukung

kriminalisasi kebebasan berpendapat dan berusaha "menyensor" hak orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia, dan dalam hal ini sarana tersebut berupa tabloid Obor Rakyat.

Benar, sekalipun tabloid Obor Rakyat mungkin bukan merupakan produk pers, namun dia merupakan sarana kebebasan berpendapat dari orang-orang yang berada di belakangnya yang dilindungi oleh Pasal 28F Perubahan Kedua UUD'45 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*". Dengan demikian Tempo sesungguhnya telah mendukung kriminalisasi terhadap sebuah hak yang dijamin sebagai suatu hak asasi dalam konstitusi kita yang juga adalah wujud dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Malah dapat disimpulkan bahwa Tempo baik sengaja maupun tidak sengaja telah merusak dan mendekonstruksi alam demokrasi di Indonesia dengan menggunakan cara atau metode rezim otoriter di mana orang tidak bebas berpendapat karena ada budaya "imbauan"; "budaya telepon"; "intimidasi"; "sensor oleh tamu tidak diundang", misalnya melalui cara kriminalisasi terhadap pendapat yang tidak disukai.

Saya paham bahwa Tempo tidak berada dalam suatu *vacuum social* sebab Tempo berinteraksi dengan pemilik modal dan pendirinya yang merupakan pendukung Jokowi-JK dan Tempo telah menjadi bagian dari sistem ekonomi kapitalisme dan baik sadar atau tidak sadar telah menjadi juru bicara dari kelompok yang mewarisi sistem militerisme, dan otoriter yang mereka lawan. Saya paham kepentingan Goenawan Mohamad sering

menjadi kepentingan Tempo, dan tidak perlu naif dalam hal ini dengan berlindung di balik jargon "independen" sehingga Tempo sering bias secara politik, ekonomi dan ideologi karena mengikuti politik, ekonomi dan ideologi yang dianut oleh Goenawan Mohamad.

Masalahnya adalah beberapa tindakan Goenawan Mohamad mengingatkan kita pada sejarah pahit pers ketika ada *Persbreidel Ordonantie*, misalnya ketika Goenawan Mohamad mengirim sms marah kepada Surya Paloh terkait berita di Media Indonesia yang tidak dia sukai karena memuat cerita pesta alkohol dalam "acara budaya" yang dia adakan sehingga berakibat wartawan yang menulis mengundurkan diri; atau ancaman Goenawan Mohamad kepada Kompasiana karena tulisan akun bernama Jilbab Hitam yang dirasa merugikan Tempo. Bukankah tindakan Goenawan Mohamad ini mengingatkan para jurnalis senior masa di mana "budaya telepon" ke kantor pers karena pemberitaan sedang marak-maraknya?

Sangat ironis bahwa Tempo mendukung kriminalisasi Obor Rakyat sebab mungkin Tempo lupa bahwa trend di dunia sekarang ini adalah dekriminalisasi pasal pencemaran nama baik dan pendapat Andrew Chigovera dalam Manual IFJ halaman 6: "*Di dalam masyarakat demokratis, aktivitas-aktivitas pejabat publik harus terbuka terhadap pengawasan publik. Pasal pidana mengenai pencemaran nama baik mengintimidasi individu-individu untuk tidak mengungkap kebobrokan para pejabat publik dan oleh karenanya pasal semacam ini bertentangan dengan kebebasan berpendapat*," tapi Tempo malah mendukung kriminalisasi kebebasan berpendapat, padahal manual ini diterbitkan oleh AJI, organisasi wartawan yang didirikan oleh Goenawan Mohamad dan sangat dekat dengan personil Tempo.

Artikel ini akan saya tutup dengan mengutip perkataan Thomas Jefferson kepada Elbridge Gerry:

"*I am..for freedom of the press and against all violations of the Constitution to silence by force and not by reason the complaints or criticisms, just or unjust, of our citizens against the conduct of their agents*.."

Jadi mengapa Tempo mendukung kriminalisasi kebebasan berpendapat dan lebih penting lagi mendukung pihak calon presiden dan calon wakil presiden yang menghalalkan kriminalisasi kebebasan berpendapat dengan tujuan membungkam keluhan atau kritik, baik benar atau tidak benar dari warga masyarakat terhadap pejabat mereka, terlebih lagi calon presiden dan wakil presiden mereka yang mungkin memerintah negara ini untuk lima tahun mendatang? Melihat fakta-fakta di atas, maka tampaknya keputusan Orde Baru membredel Tempo majalah yang suka memfitnah demi uang itu sudah benar dan tepat.

F. ALI MOERTOPO

Berikut ini adalah kisah hidup Ali Moertopo yang diringkas dari buku berjudul “Rahasia-Rahasia Ali Moertopo” terbitan Kompas Gramedia bersama dengan Tempo.

Wajah Presiden Soeharto memerah. Dengan nada tinggi ia berkata kepada tamu-tamunya, “Kalau rakyat marah dan menggantung saya, kalian senang, lantas tepuk tangan dan tertawakan saya?” Di hadapan Presiden, Ali Moertopo dan sejumlah aktivis muda yang dikenal sebagai Kelompok Tanah Abang duduk dengan jantung berdebar, antara lain Sumiskun,

Rahman Tolleng, David Napitupulu, Martono dan Murdopo (halaman 24).

Soeharto geram terhadap ulah mereka yang mengkampanyekan penundaan pemilihan umum. Sejak awal, Soeharto memang ingin pemilu dilaksanakan menurut jadwal, pada 1971. Namun Ali dan Kelompok Tanah Abang berpendapat sebaliknya. Menurut mereka, pemilu belum bisa dilaksanakan selama struktur politik belum tertata dengan baik. Sekretariat Bersama Golkar, selanjutnya menjadi Golkar, dianggap belum kuat menjadi mesin politik Soeharto. Soeharto menolak usul para tamunya. Menurut dia, pemilu tidak bisa diundur karena bisa menimbulkan gejolak politik. "*Bila menuruti kemauan kalian, sampai tuek tak bakal ada pemilu*," Kata Soeharto menghardik (halaman 25).

Tak banyak pilihan, Ali mengambil langkah menguasai Golkar. Ia, misalnya, mengeluarkan sejumlah pengurus yang dianggap bermasalah. Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar dikuasai. Wewenang memilih kandidat yang akan mewakili Golkar di parlemen mereka rebut. Untuk biaya awal Bappilu, Ali menyuntikan dana Rp. 50juta. "Ia juga memberi Rp. 50juta lagi untuk mendirikan Koran Suara Karya," kata Jusuf Wanandi (halaman 26 – 27).

Tim Ali bergerak cepat. Pengurusnya mendatangi setiap rumah, menyebarkan propaganda bahwa hanya Golkar yang mampu menjamin stabilitas dan kemajuan pembangunan. Ancaman juga ditebar: jika tidak mendukung Golkar akan dicap tidak mendukung militer dan dianggap bersimpati pada PKI. Dalam kampanye, artis-artis Ibu Kota diboyong untuk menarik massa. Dana kampanye diperoleh dari pengusaha yang ingin pendapat perlindungan dan kemudahan (halaman 27).

Di tempat lain, diam-diam Ali menggelar operasi berbeda. Partai Nasional Indonesia (PNI), pesaing terbesar saat itu, menjadi target utama penggembosan. Keretakan partai dimanfaatkan. Sejumlah sumber menyebutkan, terpilihnya Hadisubeno sebaNI dalam kongres pada 1970 di Semarang tidak lepas dari peran Ali. Hadisubeno yang pro pemerintah dimanfaatkan untuk mendepak Hardi, ketua umum lama, yang dianggap menentang dwifungsi ABRI (halaman 27-28).

Partai-partai Islam bernasib sama. Misalnya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang didirikan sejumlah tokoh Masyumi pada 1968, Dalam kongres pertama Parmusi di Malang, Mohamad Roem sebenarnya terpilih sebagai ketua umum menggantikan Djarnawi Hadikusumo. Namun, karena pemerintah tidak merestui Roem, kepemimpinan Parmusi kembali diambil alih Djarnawi. Begitu pula saat kongres 1970. Manuver Djaelani Naro, yang dikenal dekat dengan Ali Moertopo, membuat H.M.S. Mintaredja yang pro pemerintah terpilih. Ali juga memanfaatkan Mintaredja membendung masuknya orang-orang Masyumi antipemerintah mengendalikan Parmusi (halaman 28-29).

Aloysius Sugiyanto, tangan kanan Ali Moertopo di Operasi Khusus menerangkan bahwa pembinaan tokoh-tokoh Islam, termasuk DI/TII, dilakukan di pavilion di sebuah rumah di Jalan Tanah Abang III/19, Jakarta Pusat. Di sinilah Pitut Soeharto sebagai orang kepercayaan Ali Moertopo "menggarap mereka", Pemanfaatan bekas anggota DI/TII ini agaknya dianggap menguntungkan. Melalui pola "pancing dan jaring", mereka dikumpulkan, lalu dikorbankan dan dilumpuhkan. Melalui rekayasa, diciptakanlah kerusuhan politik sehingga mengesankan bahwa umat Islam selalu berhadapan dengan tentara, selalu memberontak supaya timbul rasa alergi terhadap Islam. Peristiwa Malari, Komando Jihad, kerusuhan

Lapangan Banteng dan pembajakan pesawat Wolya pada dasarnya merupakan produk rekayasa intelijen (hal 125-126, hal 128 – 129).

Menurut Joseph Halim, dokter tentara yang juga perwira Opsus, sejak awal Ali Moertopo terlihat menyiapkan Benny Moerdani. Dari pilihan tugas yang diberikan, Benny selalu menjadi prioritas bahkan lakon utama. Cerita serupa disampaikan Agum Gumelar, ajudan Ali Moertopo semasa menjadi asisten pribadi Soeharto dan Komandan Opsus. Benny termasuk yang paling sering dikontak Ali Moertopo jika ada tugas penting di luar negeri. "*Kalau keduanya bertemu, itu bisa berjam-jam*," Agum mengenang (halaman 111).

Boleh jadi karena itu, ketika peta politik Indonesia berubah dan Ali Moertopo tersingkir pasca peristiwa Malari pada 15 Januari 1974, Ali menyodorkan nama Benny ke Presiden Soeharto untuk menangani intelijen. Ali menelpon Benny di Korea Selatan agar segera pulang. Ali Moertopo pula yang mengantar Benny menghadap langsung Soeharto. Benny diserahi jabatan sebagai Komandan Satuan Tugas Intel Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) merangkap Asisten Intelijen Pertahanan dan Keamanan menggantikan Mayor Jenderal Kharis Suhud enam bulan kemudian. Artinya, Benny bertugas mengendalikan seluruh aparat intelijen Angkatan Darat dan Kepolisian RI (halaman 111-112).

G. LEONARDUS BENJAMIN MOERDANI

LB Moerdani

Richard Borsuk dan Nancy Chng dalam buku Liem Sioe Liong's Salim

Group, The Business Pillar of Suharto's Indonesia terbitan ISEAS Publishing menuturkan bahwa awal naiknya karir Benny Moerdani, murid Ali Moertopo adalah sejak peristiwa Malari:

"*The incident [Malari] led to the rise of another general who would undertake a significant political and advisory role until the late 1980s. It was Benny Murdani, once Murtopo's assistant and intelligence protégé. Suharto had him recalled from his posting in South Korea and installed him in the Defense Ministry. Murdani would supplant Murtopo as the president's top henchmen.*"

(halaman 75)

Edisi Terjemahan Indonesia:

"*Peristiwa Malari melejitkan jendral lain yang nantinya menyandang peran politik dan penasehat siginifikan sampai akhir 1980-an. Dialah Benny Moerdani, yang pernah menjadi asisten dan anak didik intelijen Murtopo. Soeharto memanggilnya pulang dari posnya di Korea Selatan dan mengangkatnya menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan. Murdani menggantikan Murtopo sebagai kaki tangan nomor satu presiden.*"

(Richard Borsuk dan Nancy Chng dalam buku Liem Sioe Liong's Salim Group, Pilar Bisnis Soeharto, terbitan Kompas-Gramedia, halaman 76).

Jauh setelah Benny tersingkir dari pusat kekuasaan, beberapa tahun sebelum dia jatuh sakit yang akhirnya mengantarkan kepada kematiannya, saya berkesempatan beberap akali mewawancarainya di CSIS, yang

terletak di Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat. Setelah itu Benny mulai bercerita tentang bahaya ICMI sebagai organisasi sectarian, suatu tuduhan yang sering juga saya dengar dari Gus Dur. Benny cerita bagaimana dia berkali-kali mengingatkan Soeharto mengenai bahaya ICMI (Salim Said hal. 304-305).

Serangan kepada ICMI menjadi semakin serius karena BJ Habibie lah yang menjadi ketuanya. Waktu itu Habibie sudah lama dikabarkan sebagai tidak popular di kalangan pimpinan ABRI karena sebagian besar proyek tentara yang berhubungan dengan teknologi diserahkan Soeharto kepadanya. Tentang Habibie, Benny juga bercerita mengenai apa yang disebutnya sebagai "kebohongan" Menteri Riset dan Teknologi itu kepada Soeharto. Ini mengenai proyek penjualan helicopter Puma rakitan Bandung. Cerita tentang Habibie, dalam versi yang sama, saya dengar juga dari Teddy Rusdy. Masih mengenai Habibie, menurut seorang purnawirawan yang pernah bertugas di Bais, Benny juga sangt khawatir melihat Menteri Ristek itu bekerja selama tiga bulan di pabrik kapal Jerman, tempat Habibie dulu memulai kariernya pada industri kapal terbang. Benny berpendapat seorang menteri tidak boleh merangkap jabatan lain di luar negeri. Tudingan ini dibantah keras oleh Habibie (Salim Said hal. 306-309).

Menurut Habibie, hubungan dirinya makin lama makin erat dengan Soeharto, sementara hubungan Bapak Presiden dengan Benny-terutama setelah menjadi Pangab-makin lama makin berjarak. Hubungan Habibie-Moerdani memuncak buruk ketika Benny tersingkir dari lingkungan Soeharto. Habibie merasa sejak itu Benny cemburu kepadanya (Salim Said hal. 309-310).

Menarik untuk diingat bahwa pada awal tahun sembilan puluhan, kekuatan-kekuatan yang pada awalnya merupakan pendukung penting Soeharto, terutama dalam menghadapi Islam, secara perlahan mulai berbalik gagang bersamaan dengan berubahnya sikap politik Soeharto terhadap Murtopo dan Benny. Gejala perubahan politik ini makin mencolok setelah ICMI terbentuk. Nama Benny, Edi Sudrajat dan Try Sutrisno disebut-sebut sebagai dekat dengan kekuatan anti-ICMI (baca: anti-Soeharto) tersebut (Salim Said hal. 315).

Perubahan sikap Soeharto terhadap Islam tidak bisa dilepaskan dari gerakan pembaharuan Islam yang dilancarkan Nurcholish Madjid sejak 1970an melalui semboyan “Islam Yes, Partai Islam No.” Salah satu akibat dari populernya pemikiran pembaharuan Nurcholish itu adalah berkurangnya kecurigaan tentara dan penguasa kepada Islam, sebagaimana tercermin dalam kebijakan Soeharto. Dengan latar belakang itulah semua, antara lain kita harus melihat kebijakan Soeharto yang membolehkan jilbab dipakai murid-murid sekolah yang sebelumnya dilarang oleh Menteri Pendidikan Daud Jusuf. Soeharto juga memfasilitasi berdirinya Bank Muamalat dan ICMI. Daud Jusuf, salah seorang pendiri dan tokoh CSIS, tidak mendukung kebijakan Soeharto yang “bersahabat” terhadap Islam syariah, karena itu tidak lagi duduk dalam kabinet (halaman 317-318).

Pada 1991, Soeharto sekeluarga melaksanakan ibadah haji. Terhadap kepergian Soeharto ke Tanah Suci itu, Benny cemas. “Wah, kalah Bapaknya serius, bakal repot kita.” Apa pun alasan dan motifnya, Benny dan sejumlah golongan anti-Soeharto akhirnya melanjutkan crusading mereka terhadap kebijakan baru Bapak Presiden terhadap Islam, terutama terhadap ICMI. Akibatnya, Benny akhirnya yang menerima tuduhan sebagai anti-Islam (Salim Said hal. 319).

LB Moerdani menurut David Jenkins

D**i** bawah ini adalah orbituari untuk Benny Moerdani dari David Jenkins, seorang jurnalis senior Australia yang memiliki jaringan kuat ke personil militer Indonesia.

General Benny Moerdani, who has died in Jakarta at the age of 71, was a special forces officer who went on to become the head of Indonesia's widely feared intelligence services and the architect of his nation's brutal subjugation of East Timor. He was for many years the second most powerful man in Indonesia, after his mentor, President Soeharto.

Moerdani did not, as is often supposed, plan the botched December 1975 invasion of East Timor - he was, in fact, privately scathing about the way his military colleagues went about the task - but he had directed Indonesia's earlier covert intervention in the territory, and he was to go on to supervise a merciless campaign against the Fretilin independence movement.

Moerdani always thought East Timor belonged within Indonesia, and was consumed with bitterness when, in 1999, President Habibie, whom he'd always detested, allowed East Timor to vote itself out of the republic.

However some of his country's failings in East Timor weighed on his conscience and he once apologised to the governor, Mario Carrascalao, who had been appointed by Jakarta to rule a devastated territory in which at least 100,000 people had died, many of them after they were driven into the mountains without food or medicine.

There was never any apology, however, for the continuing army operations, which were pursued without quarter. Nor was there an apology for the deaths in East Timor of six Western journalists, at least two of

whom appeared to have been killed in cold blood by Indonesian forces.

In May 1980, not long after the first dreadful years of the Indonesian occupation of East Timor, I came across Moerdani in the coffee shop at Jogjakarta airport. He was sitting alone, a darkly handsome man, dapper in a pinstripe suit. We chatted for a while and I asked if I could take a photograph. His response was revealing: "You want to take a picture of the two-headed monster of East Timor?"

Carrascalao, a man well placed to judge him, did not see Moerdani as a monster at all. "Benny Moerdani," he confided not long afterwards, "is the only one who is dedicated. He told me, 'When I think of our broken promises to the Timorese people I could cry.' "

A Eurasian Catholic with granite features and a combative personality, brusque to the point of rudeness, yet modest and endowed with considerable charm, Moerdani came to national prominence as a red beret commander and went on to direct an intelligence network that not only kept tabs on every important aspect of Indonesian civilian life but also watched, hawk-like, for any dissension in the army, the bedrock of Soeharto's 32-year rule.

There were, as a perceptive Indonesian newspaper editor observed, two major threads running through Moerdani's career.

He was, first and foremost, a professional soldier, well trained, capable, ruthless. He had seen action on all the major islands in the Indonesian archipelago, fighting the Japanese, the Dutch, the British and the East Timorese, as well as CIA-backed Indonesian rebel colonels and Muslim extremists bent on turning Indonesia into an Islamic state.

Hardened in battle and no stranger to violence, Moerdani believed that the ends justify the means. He had a reputation for shooting from the hip and his language was sometimes intemperate, even when he held high office. He once shocked members of an Indonesian parliamentary committee by saying, in effect, that if he had to sacrifice the lives of 2 million Indonesians to save the lives of 200 million Indonesians he would do so.

In the parlance of the Indonesian army, Moerdani was "a fighting animal". He was not in any real sense a political animal. He lacked the political instincts of the late General Ali Moertopo, an older, freewheeling intelligence officer who handled any number of bag jobs for Soeharto, himself one of the most consummate of all Indonesian politicians, despite his professed disdain for politics.

The second salient point about Moerdani is that he was a Soeharto loyalist through and through, at least in the years when the president needed him most. As Moerdani saw it, Soeharto was the only person who could hold the vast and ethnically diverse Indonesian republic together.

Later, it is true, the two men fell out. Moerdani became disenchanted in the 1980s as Soeharto bestowed increasing power on Habibie, who, as minister for research, was permitted to make forays into the budgets of other departments, including military procurement.

Moerdani worried, too, that the untrammelled greed of Soeharto's children was becoming a political liability for the regime, and in 1988 dared to tell Soeharto as much. Not long afterwards Soeharto dumped him as armed forces commander in humiliating circumstances. As they parted, Moerdani assured him: "You don't need to ever doubt my loyalty."

That was probably true, but Soeharto, knowing Moerdani's power and influence and never a man to take chances, proceeded to root out all those officers associated with Moerdani in a campaign that came to be known as "de-Benny-isation".

"*Benny was disenchanted with Soeharto*," a friend recalled, "*but at the same time could not liberate himself from his loyalty to Soeharto. Soeharto had become a symbol of the state of Indonesia and the centre of his life*."

Born in Cepu, Central Java, Leonardus Benyamin Moerdani was the sixth of 13 children. R.M. Moerdani Sosrodirdjo, his father, was a member of the Javanese nobility and a Muslim who worked as an official in the Dutch-run railways. His mother, Jeanne Roech, was a Catholic of German and Javanese descent. The family spoke Dutch at home and lived a largely European existence. The children attended Dutch-language schools and played the piano.

In 1945, not long after his 13th birthday, Moerdani got hold of a Japanese rifle and joined the so-called Student Army in the struggle for independence from Holland, only to be sent home from one early battle because of his youth. He stayed on in the army after the Dutch left Indonesia, and carved out a reputation as a bold and courageous officer.

By the early 1960s, Moerdani was a favourite not only of senior army officers but also of President Soekarno, who decorated him for his achievements in West New Guinea. According to one story, Soekarno tried to get Moerdani to marry one of his daughters. In the event, Moerdani married Hartini, a former Garuda flight attendant. Soekarno held a party for the couple at the presidential palace in Bogor.

In 1974, after Soeharto's regime was shaken by violent anti-government and anti-Japanese demonstrations, Moerdani was brought back from a diplomatic posting in Seoul and appointed head of intelligence at army headquarters.

From then on, his rose rapidly, with Soeharto giving him an unprecedented number of intelligence and security positions. On policy matters, he proved to be a hardliner and a hawk. Subtlety was not his strong suit.

In August 1975, when the defence minister, General Panggabean, briefed Soeharto on plans for a full-scale invasion of East Timor, Soeharto asked who had drawn up the plans. When told it was Benny, his manner was gently dismissive. "*If you listen to Benny*," he said, "*you'll get into a war every day*."

Sometimes the fighting animal side manifested itself in inappropriate ways. In the late 1970s Moerdani was in a party of Indonesian cabinet ministers who found themselves holed up in the London School of Economics during an anti-Indonesia student demonstration which was turning ugly.

As the ministers prepared to run the gauntlet of the protesters, Moerdani took a fork from the lunch table and slipped it into his pocket. Outside, people were shouting, in Indonesian, "Pembunuh! [Murderer!]" An Indonesian colleague, seeing Moerdani reach inside his pocket, bundled him into a waiting taxi.

Moerdani's critics held him responsible for a string of human rights abuses, in East Timor and elsewhere. They pointed to the 1978 crackdown on students and the media. They complained about the so-called "mysterious killings" in which several thousand criminals were bound and garrotted,

apparently by army death squads, who left their bodies in the open as a warning to others. They claimed that he was hostile to political Islam, and drew attention to his role in the Tanjung Priok incident, in which troops opened fire on Muslim demonstrators.

But there was another side to Moerdani's personality. In an army in which anti-Chinese feeling runs deep, he stood out as a campaigner for an end to discrimination.

Australian officials were never in any doubt that Moerdani had a lot to answer for. They believed, however, that he was a man they could work with and that he supported many of the things Australia supported, including a stable and prosperous South-East Asia and strengthened Australian military ties with the Indonesian defence forces.

One Australian diplomat, convinced that Moerdani would be a fitting successor to Soeharto but aware that no Catholic could aspire to the presidency, suggested to him on at least two occasions that he become a Muslim. Moerdani deflected the idea with a diplomatic disclaimer. "No one," he said, "would believe me."

What the diplomat did not know was that Moerdani was deeply offended by any suggestion that he might be prepared to change his religion to advance his career. As he said once to a fellow Indonesian Christian, "Do they think I'm that cheap?"

For a long time, Moerdani seemed to have little time for Australia or Australians, partly because this country didn't seem very important and partly because he had been irritated by Australian criticism of Indonesian actions in Timor. But he got over that and was happy enough to banter at Australia's expense.

In the early 1990s Moerdani hosted a meeting in Jakarta for then prime minister Paul Keating, who knew the Indonesian leaders less well than he sometimes supposed but who is remembered quite fondly in Jakarta as a breath of fresh air from Australia.

At the end of their discussions, Moerdani said to Keating, "*You and I have a lot in common*." As Keating preened, basking in the thought, Moerdani went on, "*We both married air hostesses*."

Despite his aura as a reticent, moody and somewhat sinister figure, Moerdani did not lack admirers. Indonesian editors, including some whose newspapers he had once closed, enjoyed his company. As one said, "*He kills people. But I like him*."

H. WIRANTO

Membongkar Hubungan Wiranto dan CSIS

Memasuki bulan Januari 1998, suhu politik di Indonesia semakin memanas. Persaingan untuk merebut kekuasaan pun menjadi pembicaraan aktual di mana-mana. Para ekonom sudah angkat tangan untuk dapat mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia. “Masalahnya sudah politik,” kata Feisal Basri, salah seorang ekonom yang sedang naik daun. Feisal tak sendiri, banyak ekonom lain yang berpendapat sama.

Yang menarik adalah desakan Sofjan Wanandi (Lim Bian Koen), seorang tokoh CSIS, agar Golkar segera umumkan daftar calon wapresnya. Dalam bulan Januari 1998, Sofjan tercatat dua kali bicara terbuka tentang calon wapres. Yang kedua kalinya, secara terang-terangan ia menyebut nama Try adalah yang paling cocok untuk mendampingi Pak

Harto lagi, pada periode 1998-2003. Tokoh CSIS lainnya Dr. J Kristiadi juga secara terbuka mencalonkan Try.

Namun, CSIS sadar benar, bahwa tak gampang menaikkan Try kembali, sebagaimana tahun 1993. Sebabnya, banyak kalangan umat Islam yang sudah apriori dengan Try. Selain kualitasnya yang pas-pasan, Try juga sangat dekat dengan LB Moerdani. Yang secara terbuka membabat habis Try adalah Majalah Media Dakwah edisi Januari 1998. Di situ Try benar-benar "dihabisi" Media Dakwah, majalah resmi yang diterbitkan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Majalah ini sangat luas beredar di seluruh Indonesia. Bahkan, di masjid-masjid kampus, majalah ini menjadi pedoman politik mahasiswa Islam. Biasanya, artikel-artikel Media Dakwah difoto kopi dan ditempel di papan-papan pengumuman masjid.
Di Masjid Arif Rahman Hakim UI, Jalan Salemba, artikel tentang Try sempat difokopi dan ditempel di papan pengumuman Masjid. Namun, beberapa hari kemudian fotokopian itu dicabut.

Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) juga tidak tanggung-tanggung dalam menolak Try Sutrisno. Dalam refleksi akhir tahun KISDI di Gedung YTKI, 20 Desember 1997, KISDI terang-terangan mengimbau agar MPR tidak memilih calon wapres yang pernah terlibat kriminalitas politik, seperti pembantaian terhadap umat Islam dan yang intelektualnya pas-pasan. Sebab, menurut KISDI, orang yang intelektualitasnya pas-pasan itu akan berpeluang dijadikan boneka oleh orang lain. Kalangan KISDI meyakini bahwa jika Try yang naik, maka yang sebenarnya menjadi raja adalah Benny Moerdani. Cerita begitu dekat dan merasa berhutang budinya Try kepada Benny bukanlah cerita baru lagi. Soalnya Try sendiri pernah bercerita kepada beberapa tokoh Islam, bahwa Benny Moerdanilah yang telah menjadikannya sampai menduduki

jabatan wapres seperti sekarang.

Keterkaitan Try dengan CSIS juga masih sangat erat. Benny Moerdani sendiri hingga saat ini masih tetap ngantor di CSIS. Sumber-sumber di kalangan CSIS menyebutkan, mengingat beratnya peluang Try tersebut, maka CSIS sudah siapkan calon alternatif, yaitu Wiranto. Hampir pasti, Wiranto akan menjadi Pangab. Malah kabarnya ia akan naik menggantikan Feisal Tanjung pada pertengahan Februari 1998. Pada saat itulah Wiranto akan memegang komando ABRI dan dapat memerintahkan Kassospol ABRI untuk mentaati perintahnya. Mungkin, peristiwa 1993 akan terulang.

Waktu itu, Kassospol ABRI Harsudiyono Hartas mencalonkan Try (Pangab) sebagai wapres. Yang agak mengherankan adalah mengapa CSIS mencalonkan Wiranto. Wiranto adalah orang kepercayaan Soeharto. Ia dekat dengan keluarga Cendana. Oleh Abdurrahman Wahid, Wiranto memang dikelompokkan ke dalam "ABRI merah putih" bersama Bambang Yudhoyono, Farid Zainuddin, Agum Gumelar, dan Hendropriyono. Dalam pengarahannya di depan para pangdam di bulan Januari, Wiranto meminta agar masalah agama jangan dilibatkan dalam urusan pengangkatan personil ABRI. Yang penting kualitas. Islam atau Kristen, tidak peduli.

Tak mudah mencari hubungan antara Wiranto dengan CSIS. Salah seorang yang dekat dengan CSIS mengakui, Wiranto memang pernah dibantu Benny Moerdani saat ia diangkat menjadi ajudan presiden. Benny-lah yang meyakinkan Pak Harto, bahwa Wiranto adalah orang yang tepat. Apakah karena itu, lalu Wiranto masih tetap menyimpan hubungan historis dengan CSIS. Yang jelas, CSIS memang aktif mempromosikan Wiranto.

Setelah ekonomi Indonesia babak belur, bahkan sempat dikacaukan oleh serbuan rakyat terhadap sembilan barang kebutuhan pokok pada tanggal 8 Januari 1998 yang lalu, maka AS turun tangan. Clinton menelepon Soeharto. Begitu juga beberapa kepala negara/pemerintahan yang lain. Goh Cok Tong datang ke Jakarta. Clinton mengirim Wakil Menkeu Lawrence Summer dan Menhan AS W. Cohen ke Jakarta.

Apa persisnya pembicaraan Soeharto dengan para pejabat tinggi AS itu masih belum jelas. Pada saat yang sama, IMF juga sedang giat-giatnya menekan pemerintah Indonesia. Beberapa pejabatnya sedang berada di Jakarta. Di kalangan media massa, Rabu (14 Januari 1998) siang, beredar kabar bahwa baik AS maupun IMF meminta jaminan keamanan politik, dan secara terang-terangan meminta agar Soeharto menerima Try sebagai calon wapres mendatang. Bahkan ada sumber yang menyatakan, agar Try langsung saja menjadi Presiden menggantikan Soeharto. Itulah yang diminta oleh kelompok YKPK (Ketua: Bambang Triantoro, Sekjen: Matori Abdul Djalil — dua orang yang dekat dengan Benny Moerdani).

CSIS dan AS menolak mentah-mentah calon-calon yang dianggap "berbau Islam", seperti Habibie atau R. Hartono. Kalau itu yang jadi, nilai 1 dolar akan mereka bikin sampai Rp 20.000. Jaringan Cina-Katolik-Zionis-Barat tetap mencoba mencengkeram Indonesia dengan berbagai cara. Yang mutakhir adalah dengan senjata "ekonomi". Sebab sektor inilah yang benar-benar mereka kuasai saat ini. Jaringan tersebut kabarnya akan berusaha menggoyang Indonesia terus-menerus sampai Soeharto kapok dan akhirnya menyerah kepada kemauan mereka.

Secara ekonomi, pada tanggal 15 Januari 1998, Soeharto akhirnya "menyerah" pada tekanan IMF. RAPBN diubah. Standar kurs dolar naik

dari Rp 4000 menjadi 5.000. Subsidi BBM akan dihapus. Monopoli Bulog atas terigu dan minyak goreng dilepas. Mobnas praktis bubar. IPTN tak lagi dikucuri dana istimewa. Dan sebagainya.

Apakah secara politik, Soeharto juga akan menyerah pada tekanan AS, dalam soal suksesi. Hingga tulisan ini dikeluarkan masih belum ada kejelasan yang dapat dipercaya. Sumber-sumber di kalangan Istana menyebutkan, bahwa Soeharto sangat tidak rela kalau kursinya ditempati Try. Karena hubungan yang terlalu erat antara Try dan Benny-CSIS. Persoalanya, bagaimana jika kelompok ini berhasil "memaksa" Soeharto untuk memenuhi tuntutan mereka? Sasaran lain kelompok CSIS-Benny ini adalah menjatuhkan Soeharto sebelum tahun 1998. Caranya adalah dengan melalui "pemakzulan" secara paksa, sehingga Soeharto berhalangan tetap (sakit, mati, dan sejenisnya), atau dengan cara menggalang kekuatan rakyat melalui gerakan rakyat untuk menggulingkan Soeharto.

Oleh sebab itu, dapat dikatakan, awal Maret 1998 ini adalah saat-saat paling menarik dan paling panas dalam perebutan kekuasaan di Indonesia. Lagi-lagi, posisi umat Islam dalam percaturan ini tidak menguntungkan. Karena umat Islam tidak memiliki visi yang sama. Amien Rais sudah punya keyakinan bahwa hanya ada satu jalan untuk memperbaiki negara ini, yaitu Soeharto harus turun pada bulan Maret 1998. Pokoknya, kata Amien, ganti Soeharto, makin cepat makin baik.

Pada sisi yang lain, banyak umat Islam yang melihat posisi Soeharto masih penting dalam setahun dua tahun ini, terutama untuk membereskan kebijakan politiknya yang memberi keleluasaan dakwah Islam. Soeharto juga masih merupakan kekuatan yang efektif untuk menghadapi Benny-Try-CSIS. Pilihan-pilihan politik akhirnya menjadi nisbi dan tidak pasti.

Sebabnya adalah banyaknya variabel yang saling terkait satu sama lain.

Yang seperti biasanya main di banyak kaki adalah Abdurrahman Wahid. Ia mendekati semua pihak. Basisnya memang kelompok Benny. Akan tetapi, ia berhasil mendekati Tutut, Hartono, dan kelompok Wiranto. Barisan oposisi juga masih disantuninya, seperti kelompok Megawati. Pokoknya, siapa yang naik, diharapkan, Wahid dan kelompoknya akan terbawa. Ujung dari pertarungan ini akan sengat tergantung pada kemampuan Soeharto dalam menangani persoalan ekonomi. Selama ini Soeharto kelihatannya salah persepsi terhadap “klien” bisnisnya, terutama dari kalangan non-pri Cina. Kelompok yang dibesarkan oleh Soeharto ini sekarang justru mulai membandel dan tidak mau menuruti perintahnya.

Dalam GETAR (Gerakan Cinta Rupiah) saja, tak banyak yang ikut serta. Hanya Eka Tjipta Widjaja yang melepaskan uang dolar senilai 1 juta dolar AS. Yang lain kabarnya malah sudah banyak yang lari ke luar negeri, menyelamatkan diri dan hartanya.

Pemerintah Orde Baru ini memang agak terlambat melakukan reformasi politik dan ekonomi. Malaysia saja yang jumlah Cinanya mencapai 40 persen dapat bersikap tegas terhadap IMF. Malaysia memiliki tabung haji yang menyimpan dana cadangan sekitar 20 miliar dolar. Belum lagi cadangan devisanya. Mahathir dan Anwar Ibrahim dapat membusungkan dada di hadapan Barat.

Di Indonesia, kaum non-pri Cina yang jumlahnya hanya 3 persen dari jumlah penduduk justru menguasai 75 persen pangsa ekonomi Indonesia. Mereka kaya raya. Banyak yang merampok uang bank karena banyak birokrat Indonesia gampang dibodohi Cina, atau dibeli oleh Cina. Ini fakta

yang amat sangat nyata. Setelah merasa kuat, kaum non-pri itu dapat melakukan apa saja, termasuk mendiktekan kemauan politik mereka.

Dimotori oleh kalangan CSIS (Katolik-Cina), mereka berusaha mengembalikan dominasi politik yang sempat terlepas dari tangan mereka selama 10 tahun. Peluang mereka sekarang sangat besar, sebab mereka memiliki dana yang nyaris tanpa batas dan orang yang sudah berada pada posisi kedua di negara ini. Mereka juga sudah berhasil menggarap rakyat, pemuda, mahasiswa, termasuk beberapa organisasi dan tokoh Islam untuk memberikan dukungan kepada Try Sutrisno.

Sebenarnya tidak semua orang non-pri atau Katolik suka dengan gerakan CSIS. Justru permainan CSIS ini sangat berbahaya, karena berusaha memaksakan dominasi minoritas — seperti di Vietnam dan Ethiopia — terhadap mayoritas. Tindakan kelompok CSIS yang lebih merupakan aspirasi kaum Katolik Ordo Jesuit, untuk mencengkeram negara ini, dapat menimbulkan reaksi balik dari kalangan muslim. Akhirnya, negara ini tidak pernah dapat menyelesaikan agendanya sendiri. Selalu diadu domba antara satu potensi dengan yang lain.

Hubungan antar-agama dan antar-ras menjadi tegang. Mungkin, itulah yang diinginkan oleh kelompok Katolik CSIS itu. Kondisi sekarang benar-benar dapat dikatakan kritis. Jika kaum non-pri Cina sampai ramai-ramai kabur dari Indonesia, maka uang akan tersedot habis. Hanya gedung-gedung kosong yang ditinggalkan para pengusaha non-pri itu. Apakah tidak sebaiknya, jika Cina-cina itu diusir dari Indonesia sekalian? Jelas, tindakan ini tidak manusiawi. Harusnya dipilah, mana Cina yang masih mau menjadi orang Indonesia dan Cina yang mau pergi dari Indonesia.

Persilakan saja mereka yang mau pergi.

http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1998/01/16/0046.html

Wiranto Tak Hanya ke Benny. Konon sejak Sidang Istimewa 1998, Wiranto bekerja sama dengan Benny. Tapi ia juga menemui para senior lain. Reposisi 100 perwira ABRI pada Januari lalu, dipandang sebagai langkah Menhankam/Pangab Wiranto untuk mengamankan posisinya. Menyatukan garis komando dan "visi", terlebih dalam situasi seperti sekarang, tentu amatlah penting. Apalagi ABRI dicap tidak kompak dan tidak profesional. Tuntutan agar Wiranto diganti juga tiada henti, seiring kerusuhan yang bertubi-tubi. Toh, pergeseran Januari itu belum jaminan aman bagi Wiranto. Sebab, intelijen belum bisa digenggam sepenuhnya. Ia pun perlu menggeser Ka-Bakin Z.A. Maulani, dan memasukkan orang dekatnya, Arie J. Kumaat.

Yang menarik, seperti dilansir Far Eastern Economic Review (FEER), ada Benny Moerdani di balik sepak terjang Wiranto ini. Benny dilihat seolah bangkit dari pertapaannya. Dan kini "bergandengan" dengan Wiranto. Hasilnya, Wiranto menyingkirkan perwira-perwira "hijau" dan menaikkan perwira "merah-putih". Adakah Wiranto salah langkah? Tidak, menurut Arbi Sanit. "Kalau ini demi keselamatan dia, kenapa tidak?" tandas pengamat politik dari UI ini.

"*Apa boleh buat, ABRI yang Islam tak mendukung Wiranto. Sementara, dukungan datang dari mereka yang non-Muslim*." Abdul Qadir Jaelani, Ketua Partai Bulan Bintang yang 100% anti-Benny, malah tak terlalu curiga bahwa Wiranto kian dekat dengan Benny. "Saya belum terlalu percaya," ujarnya. Menurut Qadir, kesan intim itu bukan berarti Wiranto

ingin mendekatkan diri dengan kelompok Benny. Tapi karena ia terjepit dan kewalahan menghadapi perlawanan orang-orang Benny yang banyak di operasional. Ia menghitung, Wiranto hanya menguasai 40% ABRI. Sementara 60% lainnya,masih dipegang orang-orangnya Benny, Try Sutrisno, dan Edy Sudrajat.

Nah, karena persoalan politik, yang 60% itu bergabung. "*Jadi, posisi Wiranto benar-benar terjepit*," ujarnya. Memang, kerusuhan yang marak gampang diarahkan ke tangan-tangan Benny. Setidaknya, begitulah penilaian Farid Prawiranegara, kawan dekat Prabowo Subianto. Ia cukup menggunakan analogi saja lantaran tindakan intel sulit dibuktikan. "*Hanya orang-orang yang punya kaliber saja yang mampu membuat kerusuhan hebat di beberapa daerah. Kita tahu Benny punya kaliber*," ujar Farid. Sementara Wiranto sendiri di mata Farid bukan orang yang capable untuk memimpin dan mengatasi keadaan. Pengalamannya di bidang militer sangat terbatas, kata Farid.

Tak mengherankan ABRI terus terpuruk. "*Namun, kedekatannya dengan Benny bukanlah inisiatif Wiranto sendiri*," tandas Farid. Itu tidak lepas dari hubungan dan loyalitas dia terhadap Soeharto. Artinya, apa yang Soeharto lakukan, akan dilakukan pula oleh Wiranto. Karena Soeharto dekat dengan Benny, membuat Wiranto dekat pula dengan Benny. Soeharto-lah yang kemudian mempererat hubungan Wiranto-Benny. "*Indikasi ini dikuatkan lagi dengan pertemuan mereka bertiga di Solo membentuk realiansi baru*." Benny sendiri, sebagai loyalis Soeharto, tentu punya keinginan memegang kekuasaannya lagi, meski dalam bentuk yang lain. Targetnya, mengatur mereka yang di panggung politik agar dirinya terbebas dari jerat hukum.

Demikian juga Soeharto. Tak Hanya Benny. Pengamat politik dari UNS Solo, M.T. Arifin, juga melihat Wiranto belakangan ini banyak bekerja sama dengan Benny dalam mencoba mengeliminasi persoalan di sekitar Soeharto, tidak menjadi kerucut politik yang tajam di Indonesia. "*Setahu saya sejak Sidang Istimewa*," ujarnya, seperti dikutip Abadi. Dr Indria Samego, peneliti senior pada Puslitbang Politik dan Kewilayahan (PPW) LIPI, memperhitungkan Benny bagi Wiranto adalah suatu keharusan. "*Langsung atau tidak, Wiranto harus mempertimbangkan masukan-masukan dari kelompok Benny*," katanya. Sebagai panglima, ia tidak hanya melakukan pembinaan organisasi, tapi juga pemilihan pemimpinnya yang kira-kira representatif. Jadi, misalnya ada komentar "terlalu banyak hijaunya", maka Wiranto-terlepas dari mana datangnya, apalagi kalau juga dari kubu Benny-harus mempertimbangkannya.

Habibie toh tak seperti Soeharto dalam intervensi reorganisasi ABRI. Namun Indria juga menegaskan bahwa Wiranto saat ini tak hanya minta masukan dari Benny, tapi juga terhadap senior-senior lainnya, seperti Sayidiman. "*Mereka secara resmi sudah beberapa kali berkumpul melakukan komunikasi politik tentara*." Yadi Sastro, Ahmad Muayad, Yuyun Hadiwiratmo, Dedi Irawan, AFK.

Fakta kerja sama Benny Moerdani dan Wiranto untuk menggusur Soeharto dan Prabowo Soebianto diperkuat dengan temuan Notulen Rapat tertanggal 17 Juli 1998 yang ditandatangani oleh Pangab Jenderal Wiranto, KASAD Jenderal Subagio HS, Kasum Jenderal Fachrul Razi, Letjend Agum Gumelar dan Letjend Yusuf Kartanegara yang digelar di rumah Pangab Wiranto dan pada tanggal 23 Juni 2014, aslinya telah diserahkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia oleh Eko Wardaya selaku Koordinator Umum Jaringan Mahasiswa Indonesia untuk Keadilan

(Jamaika). Dari notulen rapat tersebut terungkap hal-hal penting berikut:

- Pucuk pimpinan ABRI memiliki pengetahuan perihal penculikan 13 (tiga belas) aktivis yang sampai hari ini masih hilang, yaitu di dalam kontrol Pangkoops Jaya.

- Pangab Jenderal Wiranto marah karena Pangkostrad Jenderal Prabowo Soebianto tanpa izin melepas Sembilan aktivis. Perbuatan ini dianggap Wiranto sebagai langkah subordinasi yang menyebabkan tuntutan reformasi sebagai membesar.

- Agum Gumelar berpendapat perlu kanalisasi agar tercipta dalang penculikan aktivis dan kerusuhan 13-14 Mei 1998 dengan memanfaatkan kepergian para jenderal ke Malang. Disepakati mereka akan mengarahkan Prabowo Soebianto sebagai pelaku utama dengan cara dibentuk Dewan Kehormatan Perwira tanpa Mahkamah Militer untuk memberhentikan Prabowo agar tercipta opini publik yang mengotori nama Prabowo.

- Terakhir Wiranto memerintahkan agar aktivis yang masih di bawah pengendalian Pangkoops Jaya agar "disukabumikan."

Menurut sejarahwan Hermawan Sulistiyo dalam buku Palu Arit di Ladang Tebu, halaman 163, istilah "sukabumi," bermakna ganda. Suka bumi adalah nama kota peristirahatan di Jawa Barat. Sukabumi juga gabungan dari dua kata "suka" dan "bumi". Istilah "sukabumi" yang kedua pada saat operasi penganyangan Angkatan Darat terhadap PKI diartikan sebagai "membuat seseorang menyukai bumi." Istilah ini

merupakan penghalusan untuk tindakan pembunuhan, karena "pergi ke kota sukabumi," juga berarti "beristirahat."

Pembiaran Wiranto atas Kerusuhan 13-14 Mei 1998 secara gamblang terlihat dari deskripsi peran Mayjend Sjafrie Sjamsudin selaku Pangdam Jaya dan Jenderal Wiranto selaku Panglima ABRI saat terjadinya Kerusuhan 13-14 Mei 1998, Atmadji Sumarkidjo, wartawan senior Suara Pembaruan, dalam buku Mereka Tentang Sjafrie, terbitan White & Red Publishing, halaman 37 – 39:

"*Sebenarnya pada waktu itu, tidak banyak yang tahu bahwa kewenangan seorang Pangdam Jaya sebagian "terbelenggu". Berdasarkan Telegram Rahasia (TR) Panglima ABRI/Ketua Bakorstanas (Badan Koordinasi Stabilitas Nasional) No. TR/14/STANS/1998, ditegaskan bahwa komando pengendalian (kodal) operasi penanggulangan huru-hara di setiap provinsi adalah tanggung jawab Kepala Kepolisian Daerah. Butir selanjutnya TR tersebut menyebutkan bahwa Pangdam bisa mengambil alih Kodal "bila terjadi perkembangan situasi" atau bila ada perintah khusus dari Panglima ABRI.*

Jelas sekali bahwa Kepolisian, dalam hal itu Polda Metro Jaya, yang bertanggung jawab atas masalah keamanan di seluruh wilayah DKI Jakarta, sementara Pangdam Jaya hanya memberi dukungan…Harus dicatat, rapat malam itu Polda tidak memutuskan pelimpahan Kodal dari Kapolda kepada Pangdam Jaya; di samping itu Pangab juga belum menginstruksikan hal demikian…

Kata Bambang Soeharto dalam bukunya, "...situasi politik waktu itu sangat kompleks di mana kekuatan-kekuatan politik maupun pimpinan

militer saling bertabrakan…" Ketika pada tanggal 14 Mei 1998 situasi semakin tidak dapat dikendalikan, polisi banyak yang tidak bertugas atau meninggalkan posnyaa; bahkan Polsek Matraman habis dibakar, sementara jumlah pos polisi lainnya dirusak massa, Pangdam Sjafrie akhirnya mengambil alih Kodal Operasi dari Kapolda Metro Jaya. Itu terjadi baru sekitar pukul 11.00 pagi itu…Seandainya Kapolri dan Kapolda [dan Panglima ABRI] sudah menyerahkan Kodal sejak hari pertama, mungkin situasi akan berbeda…"*

*Kata dalam kurung penambahan dari penyusun.

I. FIKRI JUFRI

Belum lama berselang, mantan pendiri Tempo, Goenawan Mohamad melalui majalahnya secara mencolok mengingatkan calon pemilih untuk tidak memilih pasangan Prabowo Soebianto-Hatta Rajasa karena takut Orde Baru lahir lagi. Dengan kata lain Goenawan Mohamad memvonis bahwa koalisi yang dia dukung yaitu pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah pasangan reformis. Selanjutnya dia bercerita bagaimana keluarga Prabowo mencoba membeli Tempo setelah majalah tersebut dibredel pada tahun 1994. Tampaknya Goenawan Mohamad sudah mulai *out-of-touch* dengan realitas di dalam tubuh koalisinya sendiri sebab pernyataan di atas sama sekali tidak edukatif dan bertentangan dengan perspektif sejarah.

http://m.tempo.co/read/news/2014/06/21/078586922/Goenawan-Mohamad-Kita-Takut-Orde-Baru-Lahir-Lagi

http://m.tempo.co/read/news/2014/06/21/063586917/Usai-Diberedel-

Keluarga-Prabowo-Ingin-Beli-Tempo

Salahkah Goenawan Mohamad? Dari kacamata hukum memang tidak ada yang dilanggar sebab bagian dari program yang diusung Jokowi dan JK adalah ajakan memilih "koalisi orang baik" yang kebalikan dari, meminjam istilah Wimar Witoelar, Gallery of Rogues di kubu Prabowo-Hatta Rajasa. Sayangnya pernyataan Goenawan Mohamad mengandung mispresentasi yang fatal, sebab lihat saja para pemain politik yang bertengger di dalam koalisi Jokowi-JK kalau mau ditelusuri sejarahnya adalah para pemain besar atau kroni Orde Baru, termasuk PDIP sekalipun.

Coba kita lihat di koalisi yang didukung Goenawan Mohamad ada: Ginandjar Kartasasmita (raja KKN pada tahun-tahun terakhir Orde Baru yang pernah dipenjara karena kasus korupsi); ada Jusuf Kalla dari Golkar (yang pernah dipecat Gus Dur karena melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme); ada jenderal-jenderal kelompoknya Benny Moerdani (Luhut Pandjaitan, Wiranto, Soebagyo HS, Fachrul Razi, Da'i Bachtiar. AM Hendropriyono, Muchdi Pr, Agum Gumelar dll); ada keluarga Salim (konglomerat paling kaya era Orde Baru), dan lain sebagainya.

Semua tokoh di atas menunjukan bahwa memang koalisi Jokowi-JK adalah tempat berkumpulnya sisa-sisa Orde Baru. Oleh karena itu sebelum Goenawan Mohamad mengkritik bahwa koalisi Prabowo-Hatta Rajasa yang didukung Bapak Reformasi Amien Rais dan Bapak Reformasi TNI/Polri Susilo Bambang Yudhoyono adalah koalisi pembangkit Orde Baru, ada baiknya dia terlebih dahulu melihat di kaca refleksi apa yang dimunculkan koalisi Jokowi-JK. Saya hanya tidak sampai hati menyebut bahwa koalisi yang didukung Goenawan Mohamad sesungguhnya adalah Orde Baru jilid II.

Lantas bagaimana dengan isu pembelian Tempo oleh Hashim Djojohadikusumo? Benar Hashim mencoba membeli Tempo setelah majalah tersebut dibredel pada 21 Juni 1994 menyusul edisi yang membahas pembelian kapal bekas Jerman Timur yang digawangi anak emas Presiden Soeharto, Menristek BJ Habibie, dan penggantian pimred Tempo, namun tidak benar pimred yang dicalonkan adalah "orangnya Prabowo", sebab orang tersebut adalah salah satu pendiri Tempo sendiri yaitu Yusril Djalinus.

Apa motivasi Hashim membeli Tempo? Sebab mereka memiliki kesungguhan untuk menyelamatkan majalah tersebut sedangkan saat itu majalah Tempo sedang dikendalikan oleh teman bangku kuliah Goenawan Mohamad di FE-UI yakni Fikri Jufri, *co-founder* tempo yang sangat terobsesi dan mengagumi Benny Moerdani secara tidak rasional sampai pernah menangis ketika memohon Benny menjadi mualaf supaya bisa menjadi presiden Indonesia menggantikan Presiden Soeharto. Dalam keterangannya kepada Janet E. Steele, penulis Wars Within, The Story of Tempo, an independent Magazine in Soeharto's Indonesia, Goenawan Mohamad sendiri mengakui bahwa dia melihat Fikri Jufri terlalu dekat dengan Benny Moerdani. Janet juga mencatat keterangan beberapa orang Tempo pada masa kepemimpinan Fikri Jufri dan mereka mengatakan Fikri Jufri membawa politik pribadinya ke redaksi Tempo dan hal tersebut membuat majalah ini tidak sehat dan menjadi beracun (halaman 238-241).

Majalah yang dibredel karena isinya mengkritik BJ Habibie dengan luar biasa keras itu adalah buktinya. Sudah bukan rahasia bahwa selain Prabowo, orang yang dibenci oleh Benny Moerdani adalah BJ Habibie karena dianggap terlalu mencampuri ikhwal pengadaan alat-alat militer ABRI. Apa tema edisi Tempo 11 Juni 1994 yang menyebabkan majalah

tersebut dibredel? Laporan seputar pembelian alat militer (39 kapal perang Jerman Timur) yang menjadi proyek BJ Habibie serta menimbulkan keributan antara BJ Habibie dengan Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad dan beberapa perwira tinggi Angkatan Laut yang menganggap BJ Habibie telah menggerogoti wewenang mereka. Patut diduga sumber Tempo untuk majalah itu adalah Benny Moerdani sendiri, bila tidak bagaimana mungkin Tempo bisa mengetahui ribut besar Mari'e Mohammad dan BJ Habibie sampai ke detail dialog mereka? Besarnya pengaruh Benny Moerdani kepada Fikri Jufri membuat Fikri juga turut membenci dan meremehkan BJ Habibie dengan mengatakan bahwa Habibie tidak bisa membuat apa-apa selain membuat ekor pesawat terbang.

Menurut Agus Sopian, dkk dalam buku Jurnalis Sastrawi, untuk menghindari pembredelan Tempo 1982 terulang maka dibentuk tim lobi tingkat tinggi. Goenawan Mohamad mendekati Moerdiono, Mensesneg dan orang dekat Soeharto. Fikri Jufri sebagai wakil pimpinan redaksi bergandengan tangan dengan mesra dengan CSIS yang secara kelembagaan dekat dengan Benny Moerdani. Agus Sopian mengutip Janet Steele menulis pembredelan Tempo pada 21 Juni 1994 adalah akibat Fikri Jufri terlalu dengan Jenderal Benny Moerdani. Selanjutnya Zaim Uchrowi, mantan wartawan Tempo yang pada tahun 1990 pindah ke Berita Buana, mengungap kesalahan Goenawan Mohamad adalah menyerahkan tanggung jawab redaksi kepada Fikri Jufri padahal dia terkenal dekat dengan Benny Moerdani. Seandainya Tempo dipegang Goenawan Mohamad maka sekalipun tulisannya lebih keras daripada Fikri Jufri, namun hanya akan dianggap tulisan orang jengkel yang tidak akan ngapa-ngapain karena Goenawan Mohamad tidak punya kepentingan, sedangkan Fikri Jufri kalau nulis pasti untuk kepentingan Benny Moerdani.

Demi menyelamatkan Tempo maka pengaruh Benny Moerdani di majalah itu berupa Fikri Jufri harus dicabut, dan inilah sebabnya Fikri harus diganti oleh pendiri lain, yaitu Yusril Djalianus. Bahkan Goenawan Mohamad kepada Janet E. Steele bercerita bahwa Adi Sasono dengan sinis mengatakan "*Jangan terlalu membela Tempo sebab Tempo adalah majalah Benny Moerdani dan CSIS. Membela Tempo berarti membela Benny Moerdani*"

Fikri Jufri memang mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa Tempo memutuskan menurunkan laporan tersebut karena "*uang rakyat yang tidak kecil jumlahnya yang telah disalahgunakan*." Dia juga berdalih bahwa isi laporan atau berita ditentukan secara kolektif bukan oleh perorangan. Namun demikian kepada Janet Steele, Agus Basri, wartawan Tempo menyebutkan dipilihnya laporan tentang kapal perang rongsokan dari Jerman Timur tersebut "punya maksud tertentu." (halaman 240). Agus bahkan menuduh Fikri "*bias terhadap Habibie*." Menurut Agus lagi, ketika tersiar kabar salah satu dari kapal perang butut dari Jerman Timur itu tenggelam dalam pelayaran menuju Indonesia, saking senangnya, Fikri Jufri mencak-mencak bersyukur dan berteriak dengan sinis, "*Alhamdulillah!*" Isma Sawitri, yang sedang mengedit laporan itu, terpengaruh oleh Fikri, dan menjadi anggota barisan pembenci Habibie.

Apapun pembelaan Fikri Jufri terutama bagian BJ Habibie dalang pembredelan Tempo yang terus disebarkan sampai hari ini namun harus diingat bahwa selain kedekatannya dengan CSIS dan Benny Moerdani yang sudah menjadi pengetahuan umum, jauh sebelum pembreidelan, Susanto Pudjomartono sebagai pelobi Benny sudah menjabat sebagai Pemimpin Redaksi The Jakarta Post, (harian berbahasa Inggris di mana Tempo punya saham).Goenawan Mohamad sendiri mengatakan kepada

Janet E. Steele bahwa sama seperti Susanto Pudjomartono, Fikri juga tergoda (*seduced*) oleh Benny, yang digambarkan olehnya sebagai perwira tinggi yang sulit dicari tandingannya. Cerdas. Tangkas. Sangat bersahabat. Tahu segala. Berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih. Apalagi. "*Dia (bersikap) sangat bersahabat terhadap saya setiap kali kami bertemu. Dan Anda bisa tergoda*," ucap Goenawan kepada Janet (halaman 137).

Dalam buku Sofjan Wanandi, Aktivis Sejati halaman 265, Fikri Jufri mengaku sudah mengenal Jusuf Wanandi sewaktu sekolah di SMP Kanisius. Kemudian dia mengenal Sofjan Wanandi pada tahun 1966 saat aktif di kesatuan aksi. Saat itu Sofjan Wanandi aktif di KAMI sedangkan Fikri bergabung dengan KAPPI. Kedekatan Fikri Jufri dengan orang-orang CSIS masih berlangsung sampai sekarang. Terbukti, bersama Harry Tjan Silalahi, Jusuf Wanandi, Wirjono Sastrohandoyo, dan Sofjan Wanandi, Fikri Jufri adalah anggota *Board of Trustees* Yayasan CSIS. Di Yayasan CSIS juga terdapat anak Ali Moertopo yakni Lucky Ali Moerfiqin sebagai anggota *Board of Directors* dan Ria Moerdani, anak Benny Moerdani sebagai anggota *Board of Supervisors* (http://csis.or.id/about/csis-foundation). Selain itu Fikri Jufri juga menduduki posisi sebagai direktur di PT Bina Media Tenggara, perusahaan yang menerbitkan The Jakarta Post (www.zoominfo.com/p/fikri-jufri/141136897).

Menutup artikel ini saya juga mau mengingatkan kembali bahwa sebelum ini Goenawan Mohamad mengatakan alasan dia keluar dari PAN adalah karena mendukung Prabowo sebagai capres padahal dia adalah "dalang penculikan aktivis", tapi 16 tahun lalu, SiaRnya milik Goenawan Mohamad justru mengakui bahwa Prabowo sekedar menjalankan perintah Pangab Jenderal TNI Feisal Tandjung, yang tentunya juga diketahui

KSAD Jenderal Wiranto:

"*Tapi, teknik ABRI menyelesaikan intern soal penculikan ini, agaknya memang sengaja ditempuh untuk menghindari terbongkarnya orang-orang di belakang Prabowo. Sebuah sumber di Mabes ABRI mengatakan, sebetulnya Prabowo punya surat perintah penculikan itu, yang diteken oleh Jenderal Feisal Tanjung, Pangab sebelumnya. Surat itu, konon, akan dibeberkan kalau Prabowo diseret ke Mahmilub. Akibatnya, Wiranto berkompromi dengan menjatuhkan hukuman yang ringan untuk Prabowo*."

http://www.minihub.org/siarlist/msg00741.html

J. TRY SOETRISNO

Try Soetrisno Menurut Salim Said

Ketika Harsudiono Hartas dan para jenderal, pada 1993 nekat mencalonkan Try Sutrisno sebagai Wakil Presiden, tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Presiden Soeharto dan juga Jenderal Try Sutrisno sendiri, banyak pengamat yang mencurigai Benny berada di balik punggung Hartas. Bagi orang-orang itu, Benny adalah sutradara yang “making things happen” sebab mantan Pangab itu, karena alasan agama dan latar belakang keluarga, memang hanya mungkin jadi “sutradara”. Seperti diketahui lima tahun sebelumnya, sesaat setelah diturunkan secara mendadak dari posisi Panglima ABRI, Benny menolak dicalonkan sebagai Wapres oleh Fraksi ABRI di MPR. Dia menunjuk Try Sutrisno, Panglima ABRI yang baru, sebagai tokoh yang harus dicalonkan (halaman 349).

Ketika Benny menunjuk Try Sutrisno sebagai calon Wapres, alasannya Try adalah Panglima ABRI-“Ketua Partai ABRI”, menurut istilah Benny waktu itu-sedangkan Benny sudah meninggalkan posisi tersebut. Di kemudian hari baru kita ketahui Try Sutrisno memang teman lama Benny, yakni sejak keduanya bersama-sama memulai karir militer di Bandung. Waktu itu Moerdani baru saja menjadi perwira infantri dengan pangkat Letnan Dua, sedangkan Try masih Sersan Taruna pada Akademi Teknik Angkatan Darat (Atekad) (halaman 349-350).

Ketika meninggalkan jabatan Ajudan Presiden, Try diajak Benny bergabung ke komunitas intel yang berada di bawah pimpinannya. Sebagai teman lama, bisa diduga bahwa Benny tahu betul siapa Try, kapasitas dan kemampuannya. Dan karena itu memerlukan bimbingan Moerdani. Dalam salah satu wawancara kami, dengan nada setengah memprovokasi saya tanya Benny, “*Anda ini dua kali*, “jadi Pangab,” Dengan sedikit membelalakan mata, Benny bertanya, “*Bagaimana bisa?*” Jawab saya “*Waktu Pak Benny jadi Pangab, itu jelas Pak Benny Pangab. Tapi ketika Try Sutrisno jadi Pangab, menurut banyak Jenderal, Pak Benny juga Pangab*.” Komentar Benny “*Well, in a way*” (halaman 350).

Inilah tampaknya penjelasan mengapa sebagian staf yang dipakai benny sebagai Panglima ABRI dimanfaatkan terus oleh Try Sutrisno. Inilah juga barangkali penjelasannya mengapa Benny menjagokan Try menjadi Wapres ketika usia Soeharto sudah beranjak sepuh. “*Kalau terjadi sesuatu dengan Soeharto, orang Benny sudah siap menunggu di samping puncak kekuasaan*,” Kata Jenderal Rudini yang sudah lama bersikap kritis dan waspada kepada Moerdani. Hubungan akrab Moerdani dan Sutrisno ini jugalah penjelasannya mengapa hubungan Soeharto dengan ABRI makin tidak mulus pada masa kepanglimaan Try Sutrisno (halaman 350-351).

“*Kami mengambil keputusan itu lima tahun yang lalu. Kami memutuskan setelah Sudharmono terpilih sebagai wakil presiden 1988, bahwa ABRI harus memutuskan wakil presiden mendatang maka kami menetapkan Try*” (LB Moerdani, 1993) Sekitar medio April 1997, seorang tokoh masyarakat dari Jawa Barat datang ke Media Dakwah. Ia bercerita, sejumlah kyai, purnawirawan, dan kalangan ABRI datang ke pesanteren. “*Kami diminta mendukung Pak Try*”,” paparnya. Lebih jauh ia bercerita, para pelobi itu memaparkan fakta-fakta bahwa Pak Try adalah yang paling pantas didukung dan sudah mendapat restu dari keluarga Pak Harto. Pokoknya, Pak Try adalah orang yang disiapkan oleh Pak Harto sebagai calon penggantinya.

Si Tokoh bercerita, bahwa gerakan untuk memberikan dukungan kepada Pak Try juga dilakukan ke sejumlah Pesantren dan majlis-majlis ta’lim serta perkumpulan tarekat.”*Gimana sih sebenarnya?*” ujar si tokoh yang mengaku dekat dengan sejumlah pejabat tinggi negara itu.

Setahun sebelumnya, kelompok Al Washliyah sudah menyatakan dukungannya pada Pak Try. Dalam acara ulang tahunnya yang ke-66 jama’ah ini mengumpulkan puluhan ribu massa di Medan, dan mengundang Try Sutrisno. Disitulah “kebulatan tekad” mendukung Pak Try dikumandangkan.

Semakin mendekati Maret 1998 arus dukungan buat Pak Try pun terasa kian kencang. Ketua YKPK letjen (Purn) Bambang Triantoro termasuk yang sangat vokal mendukung Pak. Try. Menurut Bambang yang dekat dengan Benny Moerdani ini duet Pak. Harto-Try harus dipertahankan. Lalu

menyusul dukungan Kentot Harseno yang pernah membocorkan dokumen tentang Menhub Haryanto Dhanudirto. Benny, Try, Bambang dan Sentot bisa dikatakan masih dalam satu Warna. Dukungan lainnya datang dari Persatuan Masyarakat Kristen Indonesia Timur. Kelompok ini terdiri atas organisasi-organisasi masyarakat, profesi agama dan lain-lain. Para pengurusnya adalah para pendeta atau teolog yang berasal dari daerah Irian Jaya, Ambon, Toraja, NTB dan Kalimantan Timur.

Dukungan dari Kalangan Kristen juga datang dari Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI), dalam rapat kerja dan konsultasi nasional II di Pontianak. “Gerakan Try” ini telah berhasil membuat opini di kalangan masyarakat, bahwa Pak Try adalah calon Wapres terkuat saat ini.

Salah satu alasannya adalah Pak Try bisa bekerjasama, pak Try paling rendah tingkat kontroversialnya. Seorang tokoh Kristen DR. Victor Tanja ketika diwawancarai Media Dakwah mengapa kalangan Kristen menjagokan Try Sutrisno menjawab. “*Walaupun saya tahu, tapi saya tidak akan memberi tahu, karena ini rahasia*”. Katanya.

Namun Keraguan terhadap Pak Try mencuat tatkala Pak Harto Istrirahat selama 10 hari. Dua acara kenegaraan penting seperti KTT OKI di Teheran dan KTT Informal ASEAN di Kuala Lumpur tak diwakilkannya kepada Try Sutrisno. Justru Ali Alatas yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Indikasi serupa sudah tampak saat Pak Harto berobat ke Jerman, tahun 1996. Waktu itu, “kekuasaan” ikut diboyong pak Harto ke Jerman, tidak didelegasikan ke wakilnya. Ketika negara sibuk menghadapi krisis moneter, Pak harto juga sama sekali tak melibatkan Try.

Radio Nederlan Wereldomroep, 8 Des 1997 edisi Indonesia menurunkan topik pembahasan dengan judul: ”*Kalau Presiden berhalangan, Kenapa Wapres tidak ambil alih tugasnya*.”

Berikut kutipan siaran Radio Nederland yang juga disiarkan di internet.

“*Yang menarik adalah mengapa dalam keadaan Presiden berhalangan atau sakit, tugas kenegaraan tidak diserahkan kepada kepada wakil presiden? Kenapa tugas itu justru diserahkan kepada Mensesneg? Menurut seorang pengamat, Presiden Soeharto kurang setuju jika wapres Try Sutrisno diberi mandat untuk mewakilinya dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Selain Try Sutrisno masih berhubungan dengan Benny Moerdani. Wapres ini juga dinilai belum bebas dari dosa-dosa lama seperti masalah Tanjung Priok, Aceh maupun Lampung yang menyebabkannya tidak terlalu diterima oleh kelompok Islam*.”

Try termasuk salah satu jendral yang menolak pembentukan ICMI.

Menurut Robert W. Hefner, beberapa hari menjelang Simposium di Malang, Try Sutrisno mengusulkan agar Pak Harto menolak rencana pembentukan ICMI. Persaingan antara Soeharto dengan Kelompok Moliter tertentu – khususnya Benny Moerdani memang sedang menguat (Hefner, 1997:57). Saat itu Benny Moerdani menjabat Menhankam. Try Sutrisno menjabat Pangab. Hingga saat terakhir, izin untuk Simposium tidak keluar.

R. Hartono yang waktu itu menjabat Pangdam Brawijaya, menyokong penuh pendirian ICMI. “*Hartono waktu itu pasang dada*,” kata KH Hasan Basri. Sejumlah saksi mata menceritakan, bahwa Hartono

malah mengerahkan panser "mengepung" kampus Unibraw, mengamankan jalannya simposium dan pembentukan ICMI.

Peluang Try Sutrisno untuk menggantikan Pak Harto memang tinggal selangkah lagi. Tahun 1993, kelompok LB Moerdani berhasil menggolkan Try menjadi wapres, setelah Harsudiono Hartas, mengumumkan nama Try mendahului Golkar dan Fraksi Utusan Daerah.

L.B. Moerdani mengaku kepada Michaek R.J. Vatikotis, naiknya Try itu sudah dia rencanakan jauh sebelumnya (Majalah Media Dakwah)

http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1998/01/20/0034.html

Bagaimana Prabowo Menghalangi Ambisi Benny Moerdani

Mayjen (Purn) Kivlan Zein gusar. Dia merasa kok sepertinya dirinya dan Letjen (Purn) Prabowo Subianto ditulis BJ Habibie sebagai orang yang tidak mendukungnya naik menjadi presiden. Padahal, dari awal keduanya mendukung Habibie dan berusaha mencegah Jenderal Benny Moerdani menjadi presiden. "*Saya kupas nanti bagaimana Habibie bisa menjadi wapres, kemudian menjadi presiden, supaya dia tahu kita back up dia. Agar kita tahu mengapa dia mengambil keputusan seperti itu terhadap kita dan Prabowo yang mendukung dia. Tapi, mengapa Habibie tak berdaya untuk membela kita. Tapi saya bilang, kalau tak berdaya membela kita janganlah pula kita ditendang begitu*," kata Kivlan.

Pernyataan Kivlan ini disampaikan dalam diskusi Kontroversi Mei 98 di Institute for Policy Studies, di Jl. Penjernihan IV No. 8, Jakarta, Selasa (3/10/2006) kemarin. Diskusi ini digelar secara tidak langsung menanggapi

buku 'Detik-detik yang Menentukan' tulisan Habibie. Menurut dia, peristiwa jatuhnya Soeharto dan naiknya Habibie menjadi presiden, sebenarnya merupakan pertarungan antara kanan dan kiri. "*Yang kiri itu Kristen, yang kanan itu Islam. Ada yang mengatakan kiri itu nasionalis, yaitu kubu Benny Moerdani dan Pak Harto,*" ujar Kivlan yang sudah biasa ceplas-ceplos itu. Kivlan, yang saat itu merupakan perwira muda, berada dalam kelompok kanan bersama para perwira muda lainnya, termasuk Prabowo. "*Para perwira muda ini berharap janganlah Orde Baru ini anti Islam, paling tidak netral. Maka berkumpullah para perwira yang eks-PII (Pelajar Islam Indonesia) dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Prabowo, walaupun dia sempat ikut KAPPI, ya ikut saya. Kemudian Adityawarman, kemudian Sjafrie Sjamsoeddin. Ini kita yang perwira mudalah, kita yang Akabri 70 ke atas*."

Kemudian ada Muchdi PR dan Syamsul Maarif. Semua perwira-wira muda itu, jelas dia. Suatu saat, pada tahun 1984, Prabowo dicopot dari Kopassus dipindahkan ke Kasdim. "*Itu kan sakit, orang dari lapangan dipindahkan ke Kasdim. Karena apa? Karena Prabowo melaporkan ke Pak Harto ada gerakan Benny Moerdani tahun 1984. Dia (Prabowo) sunyi, lonely, maka dia mencari kawan. Dicarilah saya yang merupakan kakak kelasnya*," ujar Kivlan. Kivlan mengaku sangat dekat dengan Prabowo. "*Dia itu adik kelas yang saya asuh, mulai dari tingkat satu, saya lindungi dari senior, supaya tidak dihancurkan sama senior dalam plonco dan dalam kehidupan. Itulah Prabowo yang dalam keadaan lonely mencari orang yang bisa diajak ngomong*," aku Kivlan.

Beberapa saat kemudian di tahun 1984, Kivlan bertemu Prabowo di Malang. "*Prabowo yang sakit hati dikeluarkan dari Den 81, ketemulah sama kita, saya, Sjafrie Sjamsoeddin, Ismet Huzairi, dan banyak yang lain,*

sampai terbentuklah grup 7 untuk melawan Benny Moerdani," terang dia. Gerakan penolakan terhadap gerakan Benny ini terus berjalan hingga pada tahun 1988. Bagaimana cara menyaingi grup Benny? "*Kita naikkanlah Pak Wiranto yang saat itu Asisten Operasi Timor Timur dan batalyon yang dipimpin Prabowo, serta Ismet Huzairi. Terus bagaimana caranya Prabowo bisa sukses? Kita kasih perlengkapan tempur, helikopter yang bagus, peralatan yang lengkap. Pak Wiranto diusulkan sama Prabowo disusupkan sebagai ajudan Pak Harto. Okelah, kata saya. Jadilah dia (Wiranto) sebagai ajudan Soeharto*," kata dia. Namun, Kivlan dan Prabowo cs melihat Wiranto semakin lama semakin dekat dengan Benny.

Akhirnya, pihaknya mencari jenderal baru yang bisa mengimbangi Benny Moerdani. Dapatlah nama ZA Maulani, yang rencananya akan diusahakan sebagai KSAD terlebih dulu. Tapi, ZA Maulani tidak berani. "*Lantas, kita carilah yang lain, ketemu nama Feisal Tanjung. Saya diminta Prabowo menemui Feisal Tanjung untuk menyampaikan pesannya. Saat itu, Feisal masih di Timor Timur. Setelah pesan Prabowo saya sampaikan, Feisal terkejut: masak letkol dan mayor menawarkan saya (jabatan panglima). Feisal yang saat itu Dan Seskoad yang telah dimasukkan kotak oleh grup Benny Moerdani, kita angkat," terang Kivlan. Pada bulan Januari 1989, Kivlan dkk berencana mempertemukan Feisal Tanjung dengan Habibie.*"7 Perwira naik pesawat terbang dari Halim sekitar 28 Januari 1989 untuk ketemu Habibie. Sunarto (angkatan 68), saya, Ismet Huzairi, Prabowo, Sjafrie Sjamsoeddin, Ampi Nur Kamal, Suaedy Marasabesy. "*7 Perwira itu terbang ke IPTN Bandung malam-malam*," ujar dia.

Habibie yang saat itu masih menjabat sebagai Menristek menerima mereka. "*Kita sampaikan kepada Pak Habibie bahwa Pak Harto ingin ada yang bisa mengimbangi Benny, dan Feisal Tanjung yang kita majukan.*

Kita mengatakan hal itu agar Feisal diangkat," kata dia. Setelah itu, Kivlan dkk mempertemukan Habibie dan Feisal Tanjung dalam acara Seskoad tahun 1989. Tapi, setelah pertemuan itu hingga tahun 1992, tidak ada kabar dari Habibie kalau Feisal Tanjung berpeluang diangkat sebagai Panglima TNI. Akhirnya, Feisal Tanjung bertanya kepada Habibie.

"*Nah, pada tahun 1991, muncullah peristiwa Dili. Kejadian ini merupakan kesempatan kita untuk mengajukan Feisal Tanjung sebagai Ketua Dewan Kehormatan (untuk memeriksa pelanggaran TNI itu). Bertemulah dengan Pak Harto. Di situ, Prabowo meminta agar Feisal ditunjuk sebagai ketua DK. Nah di DK itulah, dicopotlah Sintong Panjaitan sebagai Pangdam. Sakit hatinya Sintong Panjaitan*," ujar dia. Hingga 3 Juni 1992, tidak ada kabar bahwa Feisal Tanjung bisa naik menjadi panglima. Tanggal 5 Juni 1992, kubu Kivlan menghadap Pak Harto saat acara peresmian Stasiun Gambir. "*Saya dihubungi Pak Azwar Anas, disetujui bahwa Feisal Tanjung akan naik. Jam 09.00 dia dilantik menjadi letjen, dilantiklah dia jadi bintang 3. Kemudian, tanggal 11 Juni 1992, ketemulah dengan Habibie, naiklah dia jadi Kasum ABRI,*" ujar dia. Upaya untuk menaikkan Feisal Tanjung terus dilakukan. Saat Sidang Umum MPR tahun 1993, Feisal belum juga dilantik menjadi panglima. Saat itu, jabatan Panglima ABRI masih dirangkap oleh Jenderal Edi Sudradjat yang menjabat sebagai KSAD dan Menhankam. "*Tapi, itulah pintarnya Pak Harto. Tanggal 15 Juni, diangkatlah Feisal Tanjung sebagai Panglima ABRI, dan jabatan KSAD diberikan kepada Wismoyo Arismunandar*," jelas dia.

Setelah itu hubungan Feisal Tanjung dengan Habibie semakin dekat. Januari 1998, terjadilah pertemuan tokoh-tokoh masyarakat dengan Kopassus untuk menaikkan Habibie sebagai wakil presiden. "*Reaksi dari Singapura ribut, perwira yang tak senang yang berada di grup Benny juga*

ribut," tutur dia. Dan akhirnya, tanggal 2 Maret 1998, dengan dukungan Fraksi ABRI dan Panglima ABRI, Habibie diangkat sebagai wakil presiden. "*Saya sampaikan di kantor Habibie tanggal 2 Maret 1998. Saya yang menjadi penghubung. Itulah kejadiannya mengapa dia menjadi wakil presiden. Dia menjadi wakil presiden, karena dirancang oleh perwira-perwira muda ini*," jelas mayjen purnawirawan mantan Kepala Staf Kostrad ini. Dengan fakta ini, Kivlan mempertanyakan mengapa Habibie malah melupakan para perwira muda ini. "*Kalau mau dicopot, copotlah. Jangan dibilang kudeta. Jadi, memang Habibie ini naiknya oleh perwira muda. Pengangkatan Feisal Tanjung kita rancana untuk menghadang Benny, karena Benny sejak 1988 ingin jadi wapres, tapi terus kita gagalkan*," tegas dia. Tentang Gerakan Benny Kivlan menceritakan bahwa pada tahun 1988, ada kabar Benny Moerdani ingin jadi presiden. Isu panas ini dibahas oleh Kivlan dan Prabowo cs di Restoran Rindu Alam, 12 Februari 1988. "*Saya bilang, Wo (Prabowo-Red), kamu hadap Pak Harto, (minta) copot Benny jadi Pangab sebelum SU MPR tanggal 1 November 1988*," kata Kivlan kepada Prabowo saat itu. "*Wah bahaya, nanti dia kudeta*," ujar Prabowo.

"*Kalau dia kudeta, kita balas dengan kudeta*. *Saya pegang satu batalyon, si Ismet satu batalyon, Sjafrie satu batalyon, kau satu batalyon. Kalau dia kudeta, kita kontra kudeta. Kita rebut semua ini*," kata Kivlan saat itu. Tidak berapa lama kemudian, terbuktilah semua ini. Isu keinginan Benny menjadi presiden didengar Soeharto. "*Setelah pulang dari Yugoslavia, Pak Harto bilang biar menteri, biar jenderal, kalau dia inkonstitusional akan saya gebuk. Itu laporan saya, karena dia (Benny) mau melakukan kudeta. Tahun 1989, Benny pun diberhentikan*," ungkap dia. Kasus Benny ini, kata Kivlan, berlanjut saat Habibie naik menjadi wakil presiden. "*Habibie naik jadi wakil presiden, maka tidak senanglah Singapura. Dirancanglah*

bagaimana supaya Soeharto jatuh, Habibie ikut jatuh. Koalisi Nasional pimpinan Barnas, di belakangnya Benny Moerdani, di depan ada Ratna Sarumpaet. Itulah duduk soalnya mengapa terjadi kerusuhan," kata dia.

BAB IV
CSIS DAN MALARI

A. WAWANCARA JENDERAL SOEMITRO TENTANG MALARI

I Have Never Offended Pak Harto. Soemitro admitted to write the memoir not for the purpose of offending CSIS. He even agreed that more institutions like CSIS should be established. His voice still boomed, puntuated once in a while with his index finger pointing upward General (ret.) Soemitro seemed stimulated when exposing the intrigues played during the Malari Incident of January 15, 1974. The hurly-burly of Jakarta which in the end causing his resignation as Pangkopkamtib and Deputy Military Commander was revealed in his memoir Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974 published and circulating since mid January. To reveal more in the writing of the memoir, GATRAs reporters Genot Widjoseno, Sapto Waluyo, and Astadi Priyanto (photographer) interviewed Soemitro for one and a half hour at his residence in Menteng, Jakarta, Friday last week. Excerpts:

How was the process of the writing of your memoir?

I wrote the memoir because my previous book Dari Pangdam Mulawarman Sampai Pangkopkamtib (From Regional Military Commander of Mulawarman to Supreme Military Operation Commander for Security and Order) I have only made a summary statement about the Malari Incident. On the launching of this memoir I was challenged by Hariman Siregar to expose who was the actor of the incident. I responded that I dont want to blame anyone. I have nobody to blame, I told him. Then he (Hariman) said

“Blame yourself.” Since then I have pushed myself to get to know more.

For the material?

When I proposed for my resignation on my own accord, with a feeling that I have failed in performing my duty as Pangkopkamtib in the Malari Incident, there were many people who previously suspected me paid me a visit. Some of them were active in Opsus (Special Operation). I received information from them.

Who are they?

I have promised not to reveal their names, it would be unethical.

You received important documents from them?

None. How could their group leave documents? But they are reliable sources.

Did you suspect of Ali Moertopos manouver that time?

Absolutely not. Not even when I tendered my resignation. I summoned Ali, after meeting Pak Harto. I say, “Li, my name is ruined.” He seemed surprised. Or whether he was pretending or really surprised I dont know. “How could this be like this, Pak,” he had replied.

Surely Pangkopkamtib has the intelligence network?

Yes, no one reported that Ali Moertopo wanted to oust me I was quite

familiar with the tricks played by Ali. For instance, when he left for Manado, he made a transit in Ujungpandang. Then he telephoned someone, saying I have proposed you to become a brigadier general. While actually he was not a member of Wanjakti (The Board for Position and Ranks). How could he knew.. He just turned the facts upside downs.

Why such tricks played by Ali was not reported to Pak Harto?

I just dont know why, maybe it was plain ignorance. Perhaps it was because of his position as the personal assistance to the president, so he was very close to Pak Harto. It was assumed that whatever he said and performed was as instructed by Pak Harto. But eventually we all knew. Ali was then transferred by Pak Harto to become minister of information relieving him of his Opsus duty. Further he was assigned as deputy chairman of Supreme Advisory Council. Practically has no more assigments.

Being a military commander, you are supposed to know everything of what is going on through the operating command for security and order (kopkamtib)?

It was an extractructural bureau, outside of Kopkamtib and Hankam (Defence and Security). Actually Opsus didnt exist. I have my intelligence, but it was institutional, it has nothing to do with Opsus. Ali Moertopo was directly under Pak Harto with his Opsus, not under my jurisdiction. Although an extrastructural bureau, Ali would made use of the power on behalf of Pak Harto. I was used, through Pak Harto such as in the transfer of General Nichlany to Washington. It seems the idea came from Ali Moertopo, because Nichlany was his enemy at Bakin (Intelligence). Others were also used, including Panggabean and even Pak Harto himself.

Why no one seemed to oppose Ali Moertopo at that time?

Because at that time Pak Harto relied heavily on him. I didnt meet him daily, Ali did. As a man from East Java, I dont particulary made complimentary visit.

Who were those in support of Ali Moertopo? Was Benny Moerdani included?

I dont think so. It would be very difficult for me to give details.

In the bureaucracy who was in support of Ali Moertopo?

I just dont know exactly. Certainly, some people classified as among the group of Ali Moertopo appointed as ministers, such as A.R.Soehoed as Minister of Industry and Daoed Yoesoef as Minister of Education. Just for one term, then no longer. Some of CSIS member appointed as DPR/MPR representatives, but then later eliminated. That is Pak Hartos policy, not my business.

Was Ali Moertopo have the backing of foreign power, such as CIA?

I think it has no connection with CIA. Connection with CIA was actually through our formal intelligence division, particularly in matters relating to the Indonesian Communist Party.

Was it true CSIS received external financial supports?

They particularly received financial supports from Japan through Soedjono

Hoemardani. Their sources of funds were factions opposing Tanaka. During Tanaka tour of Asia, they distributed money to overthrow Tanaka.

What concepts from CSIS accommodated by the government?

There were two as far as I can remember. Firstly, the strategy for the development acceleration for 25 years came from Ali and CSIS. When I asked the group of technocrates (Widjojo Nitisastro and his group), I found out it was rejected. They applied the Repelita (Five-year development plan) concept. Secondly, CSIS proposed the idea of Asia Pasific. Previously the name was Aspac, not APEC. Thus, they also produced good assessments.

The NKK/BKK concept was said to come from CSIS?

Well, that was Pak Hartos business, I know nothing about this. Probably I came from there, but certainly not from me, so a sterilization process in the campus life.

The Marriage Draft originated from CSIS?

This I have mentioned in the memoir. It was originally from Ali but then amended by Alamsyah.

Draft in economy was also prepared at CSIS?

Whether they are KIK, KCK and KMKP, I have no business with economy matters. If they produced side-effect in economy, then I requested a meeting with the technocrates. Once I challenged the requirement for

collateral for the small people application for credit. How would you expect them to provide the collateral.

As engineered by Opsus making used of Moslem institutions such as GUPPI, it was this that initiated the mass rally?

Thats correct. I knew about this after my retirement from members of GUPPI. Those promised with the ministrial position. They were manipulated.

Including the lower class?

Yes. Particularly from Banten and Sumedang.

The intellectuals and the businessmen, such as Sofjan Wanandi?

At that time Sofjan Wanandi was Soedjono Hoemardani's secretary. Soedjono kept a close relationship with businessmen from Tokyo, particularly those opposing Tanaka.

Was Soedjono involved in this rally?

Of course. They performed duet. His duty was to distribute money and rallied for the spiritual adherents.

Was this kind of engineering still continue?

I think this has already changed. People said, Benny followed through the Ali Moertopo lines? O, no. Benny being active at CSIS, the study center.

Benny was Ali’s disciple, but he certainly has his own pride. Those who joined CSIS didnt have to be the institutes henchman.

Where was the sources of Ramadi Document cornering you?

That was what I termed as similar to the Gillchrist Document, an engineered document. Eventually, even Ramadi didnt acknowledge it. I dont even know who is this person Ramadi. I knew about this from Pak Harto, upon returning from a conference in Algiers. I have no idea of the content. I knew about the document through an interrogation, when Ramadi was arrested.

Pak Harto was influenced by the document?

How could he not influenced? There were many people fell as victims. Perhaps Pak Harto was influenced by Ali. I dont know. But I could understand the reason.

What do you mean?

There was the impression at that time that certain power wanted me to step up the lader. Thus, during the demonstration there was also the purpose to overthrow Pak Harto. If Pak Harto suspected me, it was because of existing power of which I knew nothing about.

If you remained at the post at the time, the situation might have been better controlled?

Oh, no. I was a soldier trained by the West and the Japanese. If I failed I

only have one option: that was to resign myself. It was a fact that my superior will be too perplexed to fire me.

In this critical situation, again the negative feeling was aimed at CSIS. The publication of your memoir was as if a new evidence of engineering was done by CSIS.

Oh, no. Dont try to connect them. I have a good relationship with CSIS until now. All of this is a matter of process. What Ali Moertopo has done was influenced by the transitional period of Nasakom (national, religion, communism) period to the New Order. And during that time Ali Moertopo has performed many things.

Do you agree with the protest made on members of CSIS at this point in time?

I objected because people like Benny and Hasnan Habib visited this place as a study centre, not for other purposes. We already have an established CSIS, why would we want to destroy it?

Perhaps they are playing games to maintaining their establishment?

I am sure they didnt. CSIS was established and internationally acknowledged. We need more similar institutions.

Perhaps some people were hurt by CSIS because their proposals mostly putting the Moslem community at a disadvantage?

I dont know. I was only disappointed that H.R.Dharsono (Siliwangi

Military Commander now deceased – Ed.) was being connected in this. I knew Dharsono a brilliant, honest, very loyal person.

What if your memoir may provoke a controversy, then causing protests such as from the relatives of Ali Moertopo?

Well, it was my name that was slandered. This is my right to defend myself. That was a wrong question.

Why was the momentum of its publication at this point in time?

Actually the memoir was completed when I had my 70th birthday. But I was to make the haj pilgrimage, I need the money for this purpose, so I had to postpone the publication. According to A.H. Nasution, in the critical situation like this, there are many political advonturers who are taking a ride. I agreed. During my active years, many people dared not to speak up. I dared to comment but they were not exposed. The important thing, I have never offended Pak Harto. I gave my full support any time he made a decision, but I also proposed my own ideas, although they were not compatible with the thought of Pak Harto. When I disconnected my contact with Pak Harto, then I was forced to write in the papers since 1988.

You still perform the usual complimentary visit to Pak Harto?

Yes. On October 5 meeting at the State Palace, I attended and greeted Pak Nas and Pak Harto. They are both my seniors. I believe the 45 generation has forgiven one and another. Let's bygone be bygone.

Since the recent substitution, the Indonesian military again is united. They begin to withdraw themselves from getting too involved in politics. Their dual functions still exists. They may think about the nation building, but they dont need to cawe-cawe nangkepi wong (arresting people), engineered parties. That methods belong to the past.

B. MEMOAR DAN PEMBELAAN JENDERAL (PURN. SOEMITRO) TERKAIT MALARI

Gatra Number 14/IV, February 21, 1998

Sofjan Wanandi and CSIS In Soemitros Memoir. In the midst of barraging protests against Sofjan Wanandi and CSIS, former Military Commander for Security And Order Soemitro launched a memoir regarding the January 15, 1974 Incident, allegedly engineered by CSIS founders. The drizzling rains at twilight time at Metropolitan Police of Jakarta again witnessed the return of Sofjan Wanandi to Indonesia. Wearing a cream-colored safari the tycoon who for a time allegedly to have fled the country, Tuesday afternoon last week, showed up at the front gate of the Directorate of Police Detective of Jakarta, after an interrogation conducted on him since nine in the morning. There was a tired look in his face. Not a word was heard from the boss of the Gemala Group.

Under a tight controll by the security officers of the Mertopolitan Police, he hurriedly entered his blue BMW car who had been waiting for him for sometime. The car slowly moved and leaving the police compound and the crowding press waiting on him. Head of Police Information Lieutenant Colonel Edward Aritonang informed that Liem Bian Koen – other name of Sofjan – reported to the police station since 8.30 in the morning in

complying with the request sent to him since last January 29, at the time when Sofjan and his wife were still in Australia. His attendance was required as a witness in providing information regarding the bomb explosion at an apartment in Tanah Tinggi, Central Jakarta, last January 18. Arriving at the office of Gemala Group on Jalan Kebon Sirih, Jakarta, other reporters had been waiting for him. He made a statement. “I hope this clarification should be settled immediately by the government, because it has been very disadvantageus for me as a businessman.”

As reported earlier, at the location of the bomb explosion the security found and confiscated a number of documents as evidence, allegedly to have been the property of the Democratic Peoples Party (PRD), a non governmental organization already banned by the government assumed to indicate having a left wing tendency and suspected to have provoked various public unrests back in 1996. Among the content of the documents the name of Sojan was mentioned as to have promised to provide funds for PRD activities. His older brother Yusuf Wanandi (Liem Bian Koen), with his position as chairman of board of the Center for Strategic and International Study (CSIS), was also mentioned to have provided “overseas moral support”. In other documents – regarding the meeting of a group calling themselves as “prodemocracy” group – both allegedly to have joined forces of elite and the masses to perform “reformation” through “revolution”.

Based on the information from these documents, on January 26, Sofjan was invited for a “chat” by The National Stability Coordination Board of Jakarta for clarification. A day later he flew down to Australia, under a strong reaction from the community. There were unrelenting demonstrations and protests against Sofjan and CSIS institution.

Sofjan was known as the co-founder of CSIS and incidentally the name CSIS – also Yusuf Wanandi – were mentioned in the documents. Stronger reactions was heard when Sofjan went to Australia without informing the Directorate General of Immigration, who issued a "postponement of Sofjan trip overseas", two days after his flight.

This was demonstrated by the agenda carried out at the Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, South Jakarta. on Sunday two weeks ago. The Indonesian Ulemas and the notables of the Indonesian Commmittee for Moslem World Solidarity, Joint-Cooperation of Pondok Pesantren, Assyafiiyah School, and the Indonesian Moslem Defence Front was able to collect some 10.000 Moslem members to come and heard the tabliq themed "A CSIS Heart Surgery". In addition to exposing the sins of CSIS in the past, a speaker disclosed a secret meeting in Lenteng Agung, South Jakarta, which was among others was attended by J.B.Kristiadi of CSIS and a number of. activists from non-governmental organization. "They discussed plan to lead this country into bankruptcy, by starting to destroy the rupiah currency, creating crisis of confidence, to the effort of promoting their candidates to the community into the MPR (Peoples Advisory Council) Plenary Meeting," said Abdul Qadir Djaelani, who was once sent to prison because of his involvement in the 1984 Tanjung Priok Incident.

The report was denied by J.B. Kristiadi. "I never knew there was such meeting," he told GATRA. In the midst of demonstrations and protests against the distinguised figures and the institution, former Military Operation Commander for Security and Order (Pangkopkamtib) General (ret.) Soemitro published a memoir tittled Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974 (Pangkopkamtib General Soemitro and the January 15, 1974 Incident) compiled by Heru Cahyono.

The memoir was published last January by Pustaka Sinar Harapan. The content among others revealed the involvement of CSIS and mentioning of the name of Sofjan Wanandi in the event 24 years ago.

But Soemitro categorically denied the reason in publishing the book by taking advantages of the moment for the Sofjan case and the barrage of critics made on the CSIS. “The book was already finished at the anniversary of my 70th birthday. I need the money to make the pilfgrimage. Therefore I couldnt possibly launched the book at that time,” Soemitro strictly pointed out he has no other purpose but just to reveal the historical fact. The 70th birthday of Soemitro was on January 13 last year. While the book was prepared three years ago. In the 312-page memoir Soemitro narrated in the form of subject “I” – the story around the January 15, 1974 Incident known as the Malari Incident, at the time when Soemitro was Pangkopkamtib.

The Malari Incident was a grey story about Jakarta, when masses of people took to the street ransacking Jakarta for two days – on the 15 and 16 January 1974. Fires and smokes raging all over Jakarta, in Glodok, Jalan Sudirman, Matraman, Cempaka Putih, Roxy, and Jakarta-By-Pass. People fell to the ground caught by straying bullets, hit by glass fragments, stone throwing, scratched by the police dogs, or trampled down by the stampedeing crowd. Official reports mentioned 11 people dead, 17 severely injured, and 200 with superficial injureis. Among them a number of military personnel. Some 200 people were arrested, including student leaders, such as Hariman Siregar. Material losses covered 807 cars destroyed or burned, 187 motorcycles damaged or burned, 144 stores badly damaged by stone throwing or burned to the ground. Two blocks of Pasar Senen Building in Central Jakarta with 700 kioks were burned down.

The exploding event was initiated by various student demonstrations from Jakarta in the protest of the Japanese domination in economy. At first the demonstrations were carried out calmly and solely performed by the students. On January 15, 1974, the student representing many universities made a big rally at University Trisakti, then they moved to University Indonesia (UI) on Jalan Salemba. But suddenly out of nowhere the masses appeared throughout every corner of Jakarta, raging uncontrollably at several locations. The students were confused. While at the rally, Hariman Siregar, chairman of Student of University of Indonesia has asked his colleagues to avoid violence and chose to stay inside the camp of UI. on Jalan Salemba.

"*At the time we have two types of demonstrations. One performed by the students performing rally at Trisakti University, the other the masses at Senen area. They rallied for the destruction, the students were not involved in this*," Hariman Siregar told GATRA, last week. Then there were the spreading rumour, that another group was using this momentum of the student rally to make it a political movement by creating riots. The target was to "dethroned President Soeharto," Well, the man rumoured to have "this ambition" was General Soemitro.

Certainly Soemitro denied this. In his memoir, Soemitro told that after his resignation he found some documents and informations prepared before or not long after the Malari Incident. Among others, the "Ramadi Document" with the story of a general whose initial name was "S" that planned for a coup detat by dethroning the President on April to June 1974. The document also mentioned that "revolution will take place", and "Pak Harto will fall". The document caused a deeply bad situation for general Soemitro, because he was the general with the "S" initial. From the

document, informations provided by those involved in the historical moments and other informations, Soemitro made a conclusion that the Malari Inciddent occurred because of the dualism taking place in the bureaucracy. On the one hand, some ministries in the cabinet were occupied by the group of technocrates.

On the other hand, there were the non-institutional bureaus such as the Personal Assistance to President Soeharto (Aspri), consisted of Soedjono Humardani and Ali Moertopo and the Special Operation (Opsus) led by Ali Moertopo. The relationship between the cabinet and the two noninstitutional offices, according to Soemitro was not running in harmony. It was not rare for the Aspri and Opsus made short cut to the President in submitting their ideas which were prepared at a certain "research institution" established in 1971. "There were impressions that all government concepts were the product of thoughts and ideas as prepared by this research institute," the memoir said.

It was not impossible that the Malari Incident was engineered by this group, for the purpose of discrediting or at least making more difficult for the jobs assigned to these group of technocrates. "From the information I gathered, it was found that this "research institute" has amibition to replace the position of these technocrates. They even had already formed their own cabinet estimate," Soemitro told in the memoir. Soemitro frequently only mentioned a "research institution" or a "certain research institution", without mentioning the name of the institute. Only in page 91, in the last paragraph, he then mentioned CSIS. He wrote the "certain research institution" was founded by Ali Moertopo, Soedjono Humardani, Sofjan Wanandi, Yususf Wanandi, Panglaykim, Harry Tjan Silalahi, etc. Apparently they were all the founders of CSIS on Jalan Tanah Abang III,

Jakarta. And in his clarification made to GATRA, Soemitro didnt deny that the "certain research institution" he meant was none other than CSIS. It was these names, according to Soemitro, who prepared the government policy and was behind the mass movement during the Malari Incident.

They played at the elite level and tried to propose the policy concepts to President Soeharto. Ali also used Opsus, the noninstitutional bureau, who was under his controll, and CSIS to attack the figures they dont like, such as Widjojo Nitisastro, Soemitro, A.H.Nasution, and Yoga Soegama (Head of State Intelligence Coordination Board at that time). In addition to running the games at the elite level, wrote Soemitro, Ali Moertopo and his group were also trying to create mass actions/riots to undermine the government. For instance, taking a ride on the student rally of January 15, 1974. Those players who were responsible in this operation were Opsus through their organizational cadres and " free intelligence network," certain research institution, some members of the Association for the Upgrading of Moslem Education (GUPPI), groups of hoodlums, pedicap drivers, and former members of Darul Islam/Indonesian Moslem Forces (DI/TII), trained by Ali Moertopos group. The fund provided to initiate their movement was estimated Rp 100 million, some even estimated Rp 300 million. Then they also spread the issue of Soemitro intension to overthrow Soeharto.

On the eve of the Malari Incident, this distinguish figures in the network conducted a series of meeting such as at Jalan Timor and Jalan Sabang, Jakarta, to provide a strategy in riding with the student rally. Attending in the meeting were – according to the memoir – among others, Cosmas Batubara (former Minister of Housing and Minister of Labor), Sofjan Wanandi, Harry Tjan Silalahi and Group of 10 of the University of

Indonesia. Group of 10 was the student board of management of UI under Hariman Siregar, which was later on splitted because Hariman refused to become Ali Moertopos tools. Attending also notables from GUPPI, such as Ramadi – who has the "Ramadi Document", Amminuddin Day, and Amminuddin Ramadi (they were referred to as Ramadi Group), and Dardo Kartosoewirjo (son of Kartosoewirjo, former leader of DI/TII).

Several of the names mentioned when contacted by GATRA all denied this. Batubara, for instance, at that time was member of the Legislative Assembly for Golkar representative.. "I declared that I didnt attend and knew nothing of the meetings," he told A. Latief Siregar of GATRA. Even other name who at present an executive member of GUPPI denied of such meeting. "There was no such meetings. They were only rumours," said the executive of GUPPI who asked for his anonymousity. He also was not aware that CSIS was behind Soedjono and Ali. But he admitted to have received money from Soedjono Hoemardani and Ali Moertopo for the financing in the running of the organizational programs on behalf of the Moslem community and Golkar – GUPPI was an organization under Golkar.

Hariman Siregar also was not aware of the meeting on Jalan Timor and Jalan Sabang. However, he knew of certain members of the student board of UI called Group 10. "They were assigned by Ali Moertopo to infiltrate the student board to oust me from the board. But I fired them from the board of the student board of University of Indonesia," Hariman Siregar told GATRA, supporting Soemitro story. Actually it was not only the Malari Incident which were causing denials. Other parts of Soemitros memoir mentioned the games played by Ali Moertopo and colleagues on the national arena, prompting the Moslem community to make their moves.

In July 1973, the government proposed the Marriage Draft to the Legislative Assembly. The Moslem community reacted with their disapproval because they think, among others, that the draft marked the determination of the Christian community and scholars to build a purely secular Pancasila state.

Soemitro was asked by President Soeharto to handle this case without giving any further clarification. “The only thing I heard was that it was Ali Moertopo who prepared the Marriage Draft. That it was of CSIS concept,” wrote Soemitro on page 150.

By placing Ali Moertopo as the “main figure” in the previous political games certainly was causing some concerns for the family of the former Ministry of Information. Ali Mursalam, who is now member of the Legislative Assembly representing Golkar Faction denied the accusation that his older brother had engineered the Malari Incident.

C. INILAH YANG TERJADI SAAT MALARI

Menurut Tempo dalam buku Massa Misterius Malari: Rusuh Politik Pertama Dalam Sejarah Orde Baru, terbitan Tempo Publishing 2014, peristiwa Malari berawal dari kritik atas strategi pembangunan yang kemudian bergeser menjadi sentiment anti modal Jepang sebab saat itu Jepang langsung tampil sebagai pemodal utama ketika perekonomian Indonesia baru siuman setelah terpuruk selama Orde Lama. Di forum Inter-Governmental Group on Indonesia pada Mei 1973, Jepang berkomitmen mengucurkan pinjaman US$ 180juta, menggusur Amerika di peringkat kedua dengan komitmen US$ 150juta. Saat itu investasi Jepang merambah semua sektor industri selain pertambangan yang didominasi Amerika.

Pengusaha Jepang jorjoran di sektor manufaktur sebab di Indonesia bahan mentah melimpah dan tenaga buruh murah. Memasuki semester kedua 1973, total investasi Jepang di Indonesia mencapai US$ 467,7juta untuk 119 proyek (halaman 12 – 13).

Berdasarkan temuan Tempo dan kesaksian Jenderal Soemitro dalam memoarnya, pemimpin gerakan mahasiswa saat itu yakni Hariman Siregar adalah orang binaan Ali Moertopo. Benar saja, Jenderal Yoga Soegama yang ditugaskan Presiden Soeharto menyelidiki kerusuhan Malari dan kemudian dikisahkan dalam memoarnya menemukan bahwa di penghujung 1973, Hariman Siregar sangat aktif memprovokasi gerakan-gerakan mahasiswa, misalnya setelah setelah melakukan pertemuan di Bandung dengan pengurus Dewan Mahasiswa UI, ITB, ITT, IKIP, Unpar, Unpad, Unbraw dan ITS, Hariman segera berangkat ke Jogjakarta untuk bertemu dengan ITS, Undop, Unair dan beberapa perguruan tinggi di Jogjakarta (halaman 229-230). Hariman Siregar juga berkali-kali berbicara mengenai merombak struktur pemerintah, kalau perlu angkat senjata (halaman 233). Dalam satu kesempatan Hariman berseru: "*Mari abang-abang becak, kita bergerak bersama untuk membuka kesempatan kerja. Kepada para penganggur yang puluhan juta, yang berada di desa-desa, dengan kita-kita untuk bergerak menuntut kesejahteraan*" (halaman 234). Tukang becak dan pengangguran tentu saja adalah salah satu tulang punggung massa yang menunggangi aksi mahasiswa.

Ulasan Yoga Soegama mengenai Malari diakhiri dengan kesimpulan bahwa ucapan-ucapan provokatif dan agitatif Hariman Siregar dan teman-temannya menjelang meletusnya Malari membuktikan adanya penggarapan yang dilakukan oleh kalangan tertentu dengan memanfaatkan generasi muda sebagai media perjuangan mereka. Salah satu ucapan

Hariman Siregar yang mengindikasikan bahwa dia memang sengaja menggiring gerakan mahasiswa untuk menciptakan kondisi yang tepat bagi sebuah kerusuhan massal adalah ucapannya dalam rapat Dewan Mahasiswa se-Jakarta di IKIP Rawamangun bahwa "*Saya mau revolusi lebih dari Muangthai dan Athena. Caranya, kita adu antara Aspri [Asisten Presiden/Ali Moertopo-Soedjono Hoemardani] dan Pangkopkamtib [Jenderal Soemitro] agar Presiden jatuh*." (halaman 249-250).

Bersamaan dengan Hariman Siregar memprovokasi mahasiswa, Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani menggalang Ramadi seorang kolonel bidang hukum militer yang berkantor di Jalan Timor 14 Jakarta lewat Gerakan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam (GUPPI). Berdasarkan keterangan Heru Cahyono dalam buku Peranan Ulama dalam Golkar 1971-1980: Dari Pemilu sampai Malari seperti dikutip Tempo, rapat di rumah Ramadi bukan untuk membahas pembaharuan Islam melainkan menyiapkan gerakan huru-hara di Jakarta dengan cara menyusup dan menunggangi aksi mahasiswa menolak kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka (halaman 37). Konon Ramadi adalah pembuat dokumen yang menghebohkan dunia intelijen dalam negeri yang menuding Soemitro hendak melakukan gerakan menggulingkan Presiden Soeharto (dokumen ini dikenal dengan sebutan Dokumen Ramadi) (halaman 38).

Dalam rapat terakhir, menurut Heru, diputuskan sasaran perusakan adalah mobil-mobil Jepang serta kantor Toyota Astra dan Coca-Cola. Gerakan ini akan dibungkus dengan isu "bantulah mahasiswa" untuk menciptakan kesan bahwa kerusuhan dilakukan mahasiswa. Diharapkan, bila berhasil, operasi itu bisa memukul Panglima Kopkamtib Jenderal Soemitro yang dikenal dekat dengan mahasiswa, sekaligus menghukum para aktivis

mahasiswa (halaman 37). Pertemuan rahasia di Jalan Timor semakin sering digelar menjelang Malari. Orang-orang binaan Ali Moertopo terutama mantan aktivis Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) sering bertandang ke sana. Mereka antara lain Danu Muhammad Hasan (mantan Panglima DI Jawa Barat) dan Ki Mansyur, yang disebut sebagai bekas Gubernur DI/TII. Anak Kartosoewirjo, Dardo Kartosoewirjo juga dikabarkan sering datang (halaman 40).

Dalam salah satu rapat di Jalan Timor itu, menurut Heru Cahyono, Ramadi terpilih sebagai pelaksana utama pengerahan massa. Sedangkan massa yang akan dimobilisasi berasal dari kelompok aktivis DI/TII Karawang yang telah menjadi binaan Ali Moertopo. Massa juga akan dikerahkan dari para pengikut GUPPI Banten. Di sana massa akan dikoordinasi Kiai Nur, tokoh GUPPI yang kala itu terkenal memiliki pengaruh luas di Banten. Di luar massa Islam, tukang becak dan preman yang digalang Roy Simanjuntak di Jakarta juga akan bergerak. Roy mendapat tugas khusus: menciptakan kerusuhan di wilayah Senen hingga Harmoni (halaman 40).
Pitut Soeharto, salah satu orang kepercayaan Ali Moertopo di Opsus, dalam wawancara dengan Heru Cahyono, tidak menyangkal jika sebagian orang binaan Ali di DI/TII terlibat dalam peristiwa Malari. Pitut, yang ditugasi Ali menggarap berbagai kelompok Islam, juga tidak membantah kabar bahwa orang binaan Ali kerap berkunjung ke kantor GUPPI beberapa hari sebelum Malari. Pitut juga membenarkan bahwa mobil Ramadi kerap dipinjamkan kepada orang-orang binaan Ali (halaman 41).

Setelah Malari meletus, pemerintah menangkap orang-orang yang dianggap terlibat termasuk beberapa tokoh GUPPI antara lain Ramadi, Suadi, Baharsan, Aminuddin Day dkk. Heru Cahyono yang mewawancarai sejumlah tokoh GUPPI menulis kelompok Ramadi digerakan Ali

Moertopo dan Soedjono Hoemardani. Tak hanya disokong dana, mereka juga diiming-imingi jabatan. Ramadi misalnya dijanjikan menjadi menteri dalam negeri. Bukannya memperoleh jabatan, Ramadi dkk justru mendekam di penjara tanpa kejelasan kapan dibebaskan. Itu yang membuat mereka sakit hati dan merasa dihianati kemudian menghembuskan kabar Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani ada di balik Malari. Kemudian pada awal Desember 1974 Ramadi yang tampak sehat digiring ke rumah tahanan lain, dia sempat menolak karena merasa tidak sakit. Tapi Ramadi akhirnya bersedia berangkat setelah dijanjikan dia hanya akan menjalani pemeriksaan rutin. Begitu sampai di rumah sakit, Ramadi dilarang kembali. Pihak rumah sakit juga melarang keluarga menjenguk. Satu pekan kemudian, Ramadi koma dan meninggal (halaman 67).

Banyak pihak segera menduga Ramadi sengaja dibunuh. Soemitro mengatakan Ramadi sengaja dibungkam karena tahu terlalu banyak tentang permainan di belakang layar kasus Malari. "*Ini salah satu teori dalam intelijen. Kalau seseorang sudah tahu terlalu banyak, ia harus dilenyapkan*." (halaman 67).

Jenderal Soemitro mengutip laporan intelijen, penuturan bekas anak buah Ali dan dokumen rahasia yang diperoleh setelah pension mengatakan bahwa Ali menggerakan massa melalui jaringan Opsus, CSIS, GUPPI dan jaringan intel lepas yang dipimpinnya untuk menyingkirkan Soemitro dan Sutopo Juwono sebagai Kepala BAKIN waktu itu. Soemitro juga menuding bahwa Komandan Pelaksana Operasi Malari diserahkan kepada anggota Opsus Bambang Trisulo dengan didukung sejumlah mahasiswa UI antara lain Freddy Latumahina, Leonard Tomasoa dan Aulia Rahman. Menurut Soemitro, Bambang menggelontorkan uang Rp. 30juta untuk memuluskan gerakan Malari, sedangkan Aulia Rahman mengamini bahwa

Bambang adalah tangan kanan Ali Moertopo (halaman 60 – 61).

Soemitro juga menyebut pendiri CSIS, Jusuf Wanandi dan adiknya Sofjan Wanandi sering menggelontorkan duit Soedjono Hoemardani kepada GUPPI pada awal 1970-an. "*Ada urusan apa Lim Bian Khoen [Sofjan Wanandi] yang bukan muslim mondar-mandir ke kantor GUPPI dengan sedang mewah warna hitamnya?*" Soemitro menulis. Sofjan dan Jusuf Wanandi disebut Soemitro berperan secara konseptual dalam jaringan Ali dan Soedjono. Soemitro menyodorkan bukti keterlibatan Sofjan Wanandi dengan mengutip percakapan Roy Simanjuntak yang mengorganisasi tukang becak pada 15 Januari dengan Sofjan keesokan harinya. Waktu itu Roy ketakutan diburu Polisi Militer. Ketika itu, menurut Soemitro, Sofjan mengatakan, "*Kalah ada apa-apa, sebut saja nama Soedjono Hoemardani dan Ali Moertopo*." (halaman 62-63).

D. KESAKSIAN VENTJE SUMUAL TENTANG MALARI

Di bawah ini adalah kesaksian Ventje Sumual tentang keterlibatan Ali Moertopo dalam mendalangi Malari yang dimuat dalam memoarnya terbitan Bina Insani.

Bulan-bulan akhir 1973, ketegangan politik memanas dan makin memanas di antara elit nasional. Khususnya polarisasi antara Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Mayjen Ali Moertopo. Puncaknya ialah peristiwa yang kemudian disebut Malapetaka 15 Januari 1974, Malari. Awal retaknya bulan madu Orde Baru (halaman 530).

Dari hari ke hari semakin tegang. Jenderal Soemitro yang semula ditugaskan meredam kampus-kampus mahasiswa yang bersuara kritis

terhadap praktik-praktik korupsi di pemerintahan malah jadi gemar berorasi di depan mahasiswa dengan nada yang tidak kalah kritis terhadap pemerintah nasional. Padahal Pangkopkamtiblah yang selama ini, untuk alasan ketertiban demi kelancaran pembangunan nasional, paling keras mengawasi suara minor seperti itu sehingga terbit larangan ceramah semacam itu di kampus-kampus. Tapi sekarang Soemitro malah sudah mulai secara eksplisit bicara tentang “kepemimpinan baru”, yang tentu saja harus diartikan tak lain dari mengganti presiden. Dan tentu saja ia mendapat dukungan luar biasa, termasuk dari kalangan politisi yang tersingkir maupun tercecer dari barisan kekuasaan Orde Baru (halaman 530-531).

Saya menganalisa situasi ini. Dan menurut saya, kalau dibiarkan terus situasi ini menuju klimaks maka klimaksnya itu justru bukan kemenangan Soemitro, baik dalam hal upayanya membawa perubahan dalam kepemimpinan nasional maupun sebatas pertarungannya khusus dengan Ali Moertopo. Malah sebaliknya Soemitrolah yang bisa jatuh secara konyol. Karena saya tahu betul Ali Moertopo, kemampuannya untuk mengalahkan rival. Juga kelebihannya disbanding Soemitro dalam hal mengambil pemihakan Soeharto untuk dirinya. Saya kasihan Soemitro. Dia teman baik saya, jauh sebelum saya mengenal Ali. Ia perwira yang diperlukan bangsa ini (halaman 531).

Pertentangan terus meruncing. Suasana sudah amat tegang. Sebagai ‘orang dalam’ di lingkungan Ali dan Soeharto, cerita sampai ke saya bahwa Pangkowilhan Jenderal Widodo bahkan sudah tanya ke Soeharto kapan dia bergerak. Kemudian ia mengirim surat rahasia ke Ali Moertopo, tanya apa instruksi untuknya. Untuk menindak kelompok Soemitro. Bahaya! Hanya soal waktu. Tinggal tunggu komando (halaman 532).

Saat bersama Ali Moertopo dan Benny Murdani dalam perjalanan ke Seoul, Korea Selatan – tempat Benny bertugas – saya langsung bicara. Sayaminta Ali melakukan langkah-langkah untuk mencegah konflik fisik dengan Soemitro. Tak perlu ada pengerahan pasukan.

"*Tapi, sudah sukar, Pak*," kata Ali Moertopo.

"*Bisa! Harus bisa*," desak saya

"*Bagaimana caranya*?"

"*Begini. Semua kekuasaan kan bersumber dari Soeharto. Kalau Pak Harto cut, selesai. Jajaran di bawahnya, yang semula berpihak, pasti akan pindah. Jadi, tak perlu ada korban secara fisik. Dan tak perlu ada penangkapan-penangkapan*."

Meski mengangguk, perlahan, tapi Ali diam. Cukup lama [Di kemudian hari saya duga, ia terdiam karena sedang memikirkan siarat-siasatnya yang sudah terlanjur ia pasang. Atau sedang mengeraskan hatinya, sambil mengingat apa-apa yang dianggap dosa Soemitro baginya, sehingga ia harus tetap memberi "pelajaran".

Saya lalu mengulangi permintaan saya, "*Pokoknya jangan sampai ada serangan fisik pada Soemitro. Juga jangan sampai ditangkap!*"

"*Baik. Baik*," Ali berjanji. (halaman 533).

BAB V
CSIS DAN TIMOR LESTE

A. DOSA CSIS MENURUT THE COMMISSION FOR RECEPTION, TRUTH AND RECONCILIATION IN EAST TIMOR (CAVR) DALAM LAPORAN CHEGA

Chega adalah laporan 2.500 halaman melingkupi pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur sejak April1974 s.d. Oktober 1999 yang dibuat oleh komisi penerimaan, kebenaran dan rekonsiliasi Timor Timur atau yang dikenal dengan akronim dalam bahasa portugis: CAVR, *Comissao de Acolhimento, Verdade e Reconciliacao de Timor Leste*, antara lain mengungkap keterlibatan CSIS, Ali Moertopo dan klik Benny Moerdani dalam merancang penyerbuan dan pendudukan Timor Leste serta pelanggaran hak asasi manusia setelahnya.

Di bawah ini adalah beberapa kutipan mengenai tanggung jawab CSIS dari Bagian 3: Sejarah Konflik dan Bagian 4: Rezim Pendudukan.

Bagian 3: Sejarah Konflik

66. Sampai tahun 1974 penerus Soekarno, Soeharto, tidak pernah melenceng dari posisi pendahulunya, namun, setelah Revolusi Bunga, berbagai argumen “kembali ke pangkuan ibu pertiwi” untuk mengambil alih Timor Portugis mulai muncul. Tokoh-tokoh politik Timor-Leste mengingat di hadapan Komisi kekhawatiran mereka saat pidato John Naro, wakil ketua DPR-RI, yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki klaim

historis atas Timor Portugis. Orang-orang yang mendekati masalah ini dari sisi strategis melihat pentingnya pandangan-pandangan ini. **Dalam wawancara mereka dengan Komisi, Jusuf Wanandi dan Harry Tjan Silalahi, dari *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), yang keduanya sangat terlibat dalam mengembangkan kebijakan tentang Timor Portugis pada tahun 1974-75 atas nama mentor mereka Jenderal Ali Moertopo, keduanya menyebutkan kuatnya pandangan-pandangan seperti ini**.Kolonel Aloysius Sugianto, seorang anggota seksi operasi khusus Jenderal Ali Moertopo dalam badan intelijen, Bakin, yang memainkan peran penting dalam berbagai kegiatan rahasia awal di Timor Portugis tahun 1974-75, mengatakan kepada Komisi bahwa ia melihat dirinya bekerja untuk menyatukan kembali bangsa yang terpecah akibat kolonialisme.

Kalau kita begitu. Apodeti itu landasannya selalu, kita ini satu saudara, satu pulau. Kita jadi pecah, jadi dua antara Timor Dili sama Timor Kupang. Itu karena penjajah. Mereka itu, kalau kita lihat, benar kan? Karena penjajah jadi pecah. Di sana menjadi daerah Portugal di sini daerah Belanda. Sebetulnya solusi kita satu. Logika itu benar, cara berpikir rakyat itu benar.

Keputusan Indonesia untuk menginvasi dan melakukan perang terbuka

225. Pada tanggal 28 November 1975, Pasukan Indonesia sudah menguasai cukup banyak daerah di Timor-Leste. Pemerintah Indonesia menyelesaikan persiapan akhir politiknya pada awal bulan Desember, dan membulatkan tekadnya untuk mengambil alih wilayah itu. Ini bukanlah suatu berita baru bagi para penguasa Barat. Intelijen AS dan **Australia telah memantau penguatan pasukan Indonesia, dan pemerintah**

mereka telah terlibat dalam dialog yang terus menerus dengan Indonesia selama periode operasi militer di bawah Operasi Flamboyan, terutama melalui Harry Tjan Silalahi dan Yusuf Wanandi dari CSIS, think-tank yang dibentuk oleh Kepala Intelijen Jenderal Ali Moertopo. Setelah mendapat peringatan dari Pemerintah Australia pada tanggal 2 Desember sebagian besar warga asing yang masih tersisa segera pergi dari Dili. Warga Australia Roger East adalah satu-satunya wartawan asing yang tersisa di wilayah itu.

Perdana Menteri Australia Whitlam telah menyatakan dalam pertemuannya di Townsville dan Wonosobo dengan Presiden Soeharto persetujuannya kepada Indonesia untuk menggabungkan Timor-Leste.298 Menyadari akan adanya kunjungan Presiden AS Ford dan Menteri Luar Negeri Kissinger ke Jakarta, pada tanggal 5 Desember Fretilin dengan putus asa mengirimkan sebuah surat kepada Presiden Ford:

Kami telah dituduh di Majelis Umum PBB sebagai negara agresor...Kini kami mendengar bahwa "Timor-Leste telah melakukan tindakan agresi" melawan Indonesia dan bahwa rakyatnya menuntut intervensi penuh. Pemerintah kami yakin bahwa tuduhan-tuduhan tidak berdasar ini adalah awal dari sebuah perperangan terbuka.

Bagian 4: Rezim Pendudukan

1. Dari sejak awal proses dekolonisasi oleh Portugal menyusul Revolusi Bunga bulan April 1974, militer Indonesia menjadi terlibat dalam masa depan Timor-Leste. ABRI menerapkan solusi militer untuk masalah-masalah politik. ABRI memaksakan penyelesaian militer atas masalah politik yang sedang berkembang, yang berakibat bencana bagi rakyat

Timor-Leste. **Kekhawatiran Indonesia atas Timor-Leste pasca kolonial yang baru muncul tidak perlu berakibat pada intervensi militer jika pemimpin militer garis keras tidak memiliki posisi yang demikian dominan dalam rezim Orde Baru Presiden Soeharto**. Begitu terjun dengan intervensi militer, ABRI mengambil peran utama dalam masa-masa awal pendudukan. Mereka meningkatkan kekerasan militer untuk mencapai tujuan politik penaklukan dan integrasi. Untuk melakukan hal ini, mereka membawa konflik ke setiap tingkatan masyarakat Timor-Leste, melibatkan pria, wanita dan anak- anak Timor-Leste dalam peran-peran tempur, intelijen, penyiksaan dan pembunuhan untuk menguasai penduduk. Pada tahun 1980-an, ketika konflik militer besar-besaran bergeser menjadi perlawanan bawah tanah oleh generasi baru pemuda Timor-Leste, militer Indonesia sekali lagi mengupayakan solusi kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Pasukan pembunuh dan paramiliter pada pertengahan 1990-an menjadi pendahulu milisi-milisi yang merajalela setelah dibentuk pada tahun 1998-99. Sejak 1974 sampai 1999, hal ini sesuai dengan pola tetap membangun pasukan paramiliter Timor-Leste bersenjata yang beroperasi dengan dukungan ABRI dan dengan impunitas total.

4.2 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Perannya di Timor Leste

4. ABRI memainkan peran penting dalam campur tangan dan pendudukan Indonesia di Timor Leste selama 24 tahun. Tahun 1974-1975, setelah Revolusi Bunga (*Carnation Revolution)* di Portugal **yang membuka jalan bagi terjadinya dekolonisasi di Timor Portugis, adalah BAKIN atau Badan Koordinasi Intelijen Nasional dan pemikir-pemikir sipil yang berhubungan dekat**

<u>dengan lembaga tersebut, yakni *Center for Strategic and International Studies* atau CSIS, yang mendalangi operasi rahasia dan kampanye untuk menciptakan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Sejak akhir 1974, kelompok-kelompok ini mulai mempersenjatai dan melatih rakyat Timor-Leste di Timor Barat, dengan akibat konflik menyebar masuk ke dalam masyarakat Timor- Leste, hal mana berlanjut hingga 1999</u>.

5. Menurut kesaksian salah seorang staf senior CSIS, Yusuf Wanandi, yang didengar oleh Komisi ini, pada tahun 1975 ketika Indonesia memutuskan untuk melakukan intervensi penuh dan invasi ke Timor-Leste, perdebatan ketika itu didominasi oleh tokoh-tokoh militer garis keras. Sejak awal mereka telah menggambarkan intervensi ke Timor-Leste sebagai perang suci antikomunis yang heroik, agar sesuai dengan ideologi dan sejarah masa lalu rezim Orde Baru dan dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dunia barat dalam suasana perang dingin yang berkelanjutan. Invasi ke Timor-Leste itu merupakan gerakan militer besar-besaran. Tokoh militer garis keras telah meyakinkan pemerintah Indonesia dan para pendukung internasional mereka, bahwa mencaplok Timor-Leste akan menjadi langkah yang cepat dan sederhana. Kredibilitas ABRI dipertaruhkan dalam usaha tersebut. Ketika kemenangan militer ternyata tak secepat dan semudah yang diharapkan, ABRI mencari dan mendapat bantuan militer internasional yang memungkinkannya untuk memperkuat operasinya.

…..

28. Presiden Soeharto mulai berkuasa pada masa-masa yang bergolak, dan salah satu dari struktur pertama yang dibentuknya untuk melindungi posisinya adalah Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib. Ia memiliki kendali langsung terhadap lembaga yang berada di luar konstitusi dan sangat kuat ini.28 Lembaga ini sangat anti komunis dalam tujuannya, dan misinya adalah:

Memulihkan keamanan dan ketertiban sebagai akibat pemberontakan G30S/PKI [yaitu 'kup' 1965] serta kegiatan-kegiatan ekstrimis dan subversif lainnya.

29. Pada tahun 1966, BPI atau Badan Pusat Intelijen diganti namanya menjadi Koordinasi Intelijen Nasional atau KIN dan dibawahi oleh Presiden Soeharto melalui Kopkamtib. Sebuah lembaga lebih informal yang memainkan peran penting pada masa-masa awal pemerintahan Orde Baru di Indonesia adalah Satuan Operasi Khusus atau Opsus yang dipimpin oleh Jenderal Ali Moertopo. Badan ini membantu mengatur pemilu tahun 1971 dan secara rahasia menjawab berbagai tantangan seperti mengakhiri ‘Konfrontasi’ dengan Malaysia dan merekayasa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Papua Barat pada tahun 1969.30 Pada tahun 1974, Opsus erat dikaitkan dengan *think-thank* sipil, Centre for International Strategic Studies atau CSIS, dalam membangun strategi yang berujung pada pengambilalihan Timor-Leste.

30. Pada tahun 1974, setelah kerusuhan besar yang dikenal dengan Malari yang menyingkap adanya ketidakpuasan yang meluas pada Orde Baru dan terjadinya perpecahan yang serius dalam tubuh militer sendiri, Soeharto melakukan konsolidasi dan pemusatan aparat intelijen dan keamanan dalam negeri. Kekuatan yang besar dipusatkan pada Mayor Jenderal Benny

Moerdani yang mengepalai bagian intelijen di Departemen Pertahanan dan Keamanan sekaligus wakil kepala Badan Koordinasi Intelijen dan kepala Pusat Intelijen Strategis. Sistem pemeriksaan dan keseimbangan militer dan politik yang biasanya mengendalikan badan intelijen dihapuskan, dan intelijen memperoleh kekuatan dan pengaruh dalam tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jenderal Moertopo serta Moerdani, dengan jaringan intelijen mereka, memainkan peran kunci dalam pengembangan dan penerapan kebijakan di Timor-Leste pada tahun 1974-1975.

Komando Tugas Gabungan Operasi Seroja, Agustus 1975 - Agustus 1976

34. Keterlibatan militer Indonesia di Timor-Leste dimulai pada pertengahan 1974, ketika Satuan Operasi Khusus (Opsus) di bawah pimpinan Mayor-Jenderal Ali Moertopo mulai melaksanakan operasi rahasia yang disebut dengan *Operasi Komodo*. Pada awal 1975, Operasi Komodo berakhir dan diganti dengan Operasi Flamboyan, di bawah kendali Mayor-Jenderal Benny Moerdani, kepala intelijen di Departemen Pertahanan dan Keamanan. Operasi tersebut mendapat dukungan sumber daya yang lebih baik dan melibatkan satuan pasukan khusus (Kopassandha), serta melakukan aktivitas yang lebih luas daripada Operasi Komodo, termasuk menciptakan ketidakstabilan, mengumpulkan intelijen, dan melatih anggota kelompok paramiliter yang direkrut dari masyarakat Timor Timur. Pada tanggal 31 Agustus 1975, Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jenderal Panggabean, membentuk Komando Satuan Tugas Gabungan Operasi Seroja (Kogasgab Seroja).

Konsekuensi kerja sama milisi-TNI

136. Ian Martin, Utusan Khusus Sekretaris Jendral PBB selama masa UNAMET, mengatakan kepada Komisi:

[W]akil Jaksa untuk Kejahatan Berat yang ditunjuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menemukan bukti yang cukup untuk menuntut kepemimpinan tertinggi TNI dengan kejahatan terhadap umat manusia...Dalam pendapat saya, tidak ada lagi keraguan bahwa penghancuran Timor Timur bukan semata merupakan hasil respon emosional milisi dan pembangkangan orang Timor Timur di dalam TNI: ini merupakan operasi yang direncanakan dan dikoordinasi di bawah arahan TNI.159,

137. Konflik, bab 7.2 tentang pembunuhan dan penghilangan, bab 7.3 tentang pemindahan dan kelaparan, bab 7.4 tentang penahanan dan penyiksaan, dan bab 7.7 tentang kekerasan seksual). Dalam kaitannya dengan bab ini, penting untuk diperhatikan adanya hubungan erat antara TNI dan kelompok-kelompok milisi Timor Timur, serta dominasi TNI atas pemerintahan sipil dan kepolisian di Timor Timur. Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa masuk ke Timor Timur tahun 1999, milisi yang didukung TNI menteror penduduk, tanpa intervensi oleh polisi Indonesia.

138. Pihak berwenang Indonesia menyatakan bahwa kelompok-kelompok milisi ini adalah ungkapan spontan dukungan setempat untuk integrasi, dan bahwa kekerasan merupakan hasil konflik antara orang Timor Timur yang pro-kemerdekaan dengan yang pro-integrasi. Akan tetapi tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah ancaman-ancaman ini. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembantaian di Liquiça dan Dili pada bulan April 1999 tidak pernah dicari dan dibawa ke pengadilan. “Pelucutan

senjata" milisi pada bulan Agustus 1999 jelas-jelas merupakan sandiwara yang dirancang untuk memberi kesan bahwa milisi menyambut keputusan Falintil untuk "mengkantonisasi" pasukannya.

139. Ketika kekerasan besar-besaran terjadi setelah jajak pendapat, TNI mencoba menggambarkan hal ini sebagai kekerasan spontan akibat kejutan dan kemarahan atas hasil yang pro-kemerdekaan. Akan tetapi, implementasi yang cepat dan luasnya skala kekerasan dan penghancuran menengarai sebuah operasi yang direncanakan dengan baik dengan dukungan logistik yang canggih. Walaupun milisi sering kali berada di garis depan aktifitas seperti ini, dalam banyak kasus mereka didukung secara langung oleh anggota militer dan polisi.162 Mereka pada dasarnya menjalankan rencana TNI. Dan memang, ancaman milisi untuk menghancurkan Timor Timur jika pilihan kemerdekaan yang menang pernah diperingatkan sebelumnya oleh Komandan Militer Timor Timur Kolonel Suratman beberapa bulan sebelum jajak pendapat, ketika ia mengatakan dalam wawancara dengan televisi Australia:

Saya mau sampaikan satu pesan: kalau pihak pro- kemerdekaan menang, bukan hanya Pemerintah Indonesia yang akan berurusan dengan hasilnya. PBB dan Australia juga harus mengatasi masalahnya, dan jika ini memang terjadi, tidak akan ada yang menang. Semuanya akan dihancurkan. Timor Timur tidak akan ada lagi seperti sekarang. Akan jauh lebih buruk dari 23 tahun yang lalu.

Berikut adalah kutipan terkait tanggung jawab anak buah Benny Moerdani dari CSIS dalam pembantaian rakyat Timor Leste pasca jajak pendapat dari Bab 8: Tanggung Jawab dan Pertanggungjawaban.

Seperti yang telah disebutkan, individu bisa dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan terhadap umat manusia atau kejahatan perang dalam tiga keadaan. Pertama, dimana seorang individu secara sengaja melakukan, merencanakan, mengajak, memerintahkan, membantu, atau memperlancar perencanaan, persiapan atau pelaksanaan suatu kejahatan. Kedua, seorang individu bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mengambil bagian dalam rencana bersama atau persekongkolan untuk memperlancar pelaksanaan suatu kejahatan. Tujuan atau rencana bersama bisa ditarik dari kenyataan bahwa dua atau lebih orang bertindak bersama untuk membuat terjadinya upaya kriminal bersama. Tidak harus ada perencanaan, rancangan atau tujuan yang telah dibuat sebelumnya. Pengetahuan tentang adanya satu rencana bersama untuk menganiaya orang-orang bisa ditarik dari kedudukan otoritas orang tersebut dalam kelompok.

Dalam sejumlah kasus, para perwira dan pejabat tinggi bertanggungjawab langsung atas pelaksanaan tindakan ilegal. Ini paling jelas dalam kasus penyusupan-penyusupan yang mengarah pada invasi penuh tanggal 7 Desember dan invasi itu sendiri, yang melanggar asas- asas dasar hukum internasional yang melarang penggunaan tidak sah kekuatan oleh satu negara terhadap negara lain. Arsitek utama kebijakan ini – Mayor Jenderal Ali Murtopo, Kepala Operasi Khusus (Opsus), Mayor Jenderal Benny Murdani, Asisten Intelijen pada Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Wakil Kepala Bakin (Badan Koordinasi Intelijen Negara), Letnan Jenderal Yoga Sugama, Kepala Bakin, dan Jenderal Maraden Panggabean, Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia – bertanggung jawab atas perancangan dan pelaksanaannya. Presiden Soeharto bertanggung jawab atas pengesahannya.

Jarang tetapi bukan tidak ada perwira tinggi terlibat langsung dalam pelaksanaan pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi sebagai masalah hukum dan masalah fakta, pertanggungjawaban atas kejahatan dari jenis yang telah dilakukan di Timor-Leste mengena jauh melampaui orang-orang yang menjadi pelaku langsungnya.

Menurut hukum internasional, mereka bertanggung jawab tidak hanya untuk pelanggaran yang mereka sendiri terlibat secara langsung sebagai pembunuh, penyiksa atau pemerkosa. Seperti yang telah dicatat dalam bab ini (dan lebih panjang dalam Bagian 2: Mandat Komisi), orang juga bertanggung jawab sebagai individu untuk kejahatan terhadap umat manusia jika mereka membantu atau menyuruh pelaksanaan kejahatan tersebut atau jika mereka berbuat untuk mencapai "tujuan kriminal bersama." Mereka juga bisa memiliki pertanggungjawaban komando untuk, dan dengan demikian dimintai pertanggungjawaban mengenai, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Mereka memiliki tanggung jawab ini tidak hanya jika mereka memerintahkan seorang bawahan untuk melakukan suatu kejahatan. Selain itu, seseorang yang dalam kedudukan atasan (baik menurut hukum atau dalam kenyataan) dan yang punya kontrol efektif atas bawahannya7 punya tanggung jawab komando jika suatu kejahatan dilakukan oleh bawahannya dan atasan mengetahui atau semestinya mengetahui kejahatan tersebut tetapi tidak melakukan apa-apa untuk mencegah atau menghukumnya. Hukum Timor-Leste dan Indonesia telah menyerap asas-asas ini dalam hukum dalam negerinya.

Tanggung jawab Indonesia untuk menjaga keamanan dan melindungi penduduk sipil

Menurut Kesepakatan 5 Mei 1999 antara Indonesia, Portugal dan PBB, pasukan keamanan Indonesia diberi tanggung jawab untuk "menjaga ketertiban dan keamanan di Timor-Leste untuk menjamin agar Konsultasi Rakyat [bisa] diselenggarakan secara adil dan aman atau tanpa campur tangan pihak manapun". Kesepakatan lebih lanjut menyatakan bahwa: Sebuah lingkungan yang aman bebas dari kekerasan atau bentuk intimidasi lain merupakan syarat untuk melaksanakan Konsultasi Rakyat yang bebas dan adil di Timor-Leste. Tanggung jawab untuk menjamin lingkungan semacam ini serta tertib hukum ada di tangan penguasa Indonesia yang sesuai. Netralitas absolut dari TNI dan Polisi Indonesia sangat penting dalam hal ini.

Meskipun menurut Kesepakatan 5 Mei tanggung jawab satu-satunya untuk menjaga tertib hukum ada di tangan polisi, pada kenyataannya polisi tetap berada di bawah TNI bahkan setelah restrukturisasi pada tanggal 1 April 1999.

Setelah pengumuman hasil Konsultasi Rakyat pada tanggal 4 September 1999, TNI sekali lagi mengambil alih kontrol keamanan di Timor-Leste. Pada tanggal 6 September Presiden Indonesia, B.J. Habibie, memerintahkan berlakunya keadaan darurat, mulai jam 12 malam pada tanggal 7 September. Setelah itu TNI mempunyai tanggung jawab sepenuhnya untuk menjaga tertib hukum di Timor. Tanggungjawab ini tidak berakhir sampai kedatangan pasukan mulitilateral, Interfet, yang disponsori oleh PBB pada tanggal 20 September 1999.

Pelaku pelanggaran

Anggota militer Indonesia, polisi dan kelompok binaan Timor (termasuk kelompok milisi) dikenal sebagai pelaku dalam 14.922 (95,2%) pelanggaran yang dilaporkan ke Komisi yang terjadi tahun 1999.

Untuk menentukan tanggung jawab Komisi mengelompokkan bersama pelanggaran yang dilakukan oleh TNI, polisi Indonesia dan kelompok binaan Timor, termasuk milisi, karena banyaknya bukti bahwa TNI memainkan peran utama dalam menciptakan kelompok milisi, dan bertanggung jawab dalam mempersenjatai, membiayai, mengarahkan dan mengontrol mereka. Bukti yang mendukung temuan ini dirinci sebagai berikut:

Tanggung jawab TNI atas pelanggaran

Anggota TNI terlibat danal keseluruhan perencanaan dan koordinasi pelanggaran yang dilakukan pada tahun 1999. Mereka juga sering terlibat secara langsung sebagai pelaku. Selain itu mereka juga terlibat dalam tindakan bersama kelompok milisi yang mereka arahkan dan kontrol.

Anggota TNI sebagai pelaku pelanggaran

Insiden besar dimana anggota TNI terlibat langsung, bak sendiri maupun bersama milisi yang mereka arahkan, termasuk berikut:

- Pada tanggal 6 April 1999 sekitar 2.000 penduduk sipil yang mencari perlindungan di Gereja Liquiça diserang oleh milisi Besi Merah Putih, bersama tentara dari Kodim Liquiça dan anggota Brimob. Antara 30

dan 100 penduduk terbunuh, kebanyakan mayat mereka dibawa dan dibuang ke lokasi rahasia.

- Pada tanggal 12 April 1999, sebagai balasan menurut cerita atas pembunuhan seorang tentara TNI dan pemimpin pro-otonomi oleh Falintil, ratusan penduduk sipil di desa di sub-distrik Cailaco (Bobonaro) dikumpulkan dan disuruh menghadiri pemakaman pemimpin pro-otonomi. Paling tidak tujuh orang yang dicurigai sebagai pendukung pro- kemerdekaan dieksekusi oleh tentara TNI dan milisi Halilintar pos Koramil 100 meter dari orang-orang yang hadir. Paling tidak 13 orang laki-laki dieksekusi di berbagai lokasi selama minggu-minggu berikutnya.

- Pada tanggal 17 April 1999 sebuah demonstrasi pro-otonomi dilakukan di depan Kantor Gubernur di Dili yang dihadiri Governor, Bupati Dili, Komandan Korem Timor-Leste, Kolonel Tono Suratman, Asisten Operasio Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri dan empat perwira senior. Selama demonstrasi para pemimpin Timor kelompok milisi Aitarak secara terbuka mendorong pengikutnya untuk membunuh pendukung pro-kemerdekaan. Sesaat setelah demonstrasi ini anggota milisi dan pasukan keamanan pergi ke rumah tokoh pro-kemerdekaan terdekat, Manuel Carrascalão, dimana sekitar 150 orang pengungsi berlindung. Mereka membunuh paling tidak 12 penduduk sipil tidak bersenjata yang berlindung di rumah itu.

- Pada tanggal 6 September 1999 anggota milisi Laksaur, bersama anggota pasukan keamanan Indonesia, menyerang ribuan pengungsi yang berlindung di Gereja Suai di distrik Covalima. Paling tidak 40 dan kemungkinan sebanyak 200 orang terbunuh, termasuk tiga pendeta.

Mayat mereka dibakar, dan beberapa dibawa ke perbatasan dan dikubur di Timor Barat, Indonesia.

- Setelah pembantaian di Gereja Suai, sekitar 125 korban perempuan dan anak-anak yang ditahan oleh milisi Laksaur dengan bantuan anggota TNI. Banyak perempuan ini diperkosa. Korban hidup dipaksa dibawa ke Timor Barat dimana banyak yang diperkosa atau dijadikan budak seksual.

- Pada tanggal 5-6 September 1999 milisi Aitarak, bersama anggota TNI menyerang ratusan orang yang berlindung di sejumlah lokasi di Dili, termasuk rumah Pemenang Hadiah Nobel Uskup Carlos Ximenes Belo, kantor Diosis, biara, dan kantor Komite Internasional Palang Merah di Dili. Paling tidak 19 penduduk sipil terbunuh atau hilang dari tempat-tempat pengungsian ini. Sehari sebelumnya, pada tanggal 4 September, TNI dan milisi melakukan serangan terhadap masyarakat di Becora, suatu masyarakat pro- kemerdekaan di timur Dili, dan membunuh paling tidak tujuh orang.

- Pada tanggal 8 September 1999 milisi Dadurus Merah Putih dan milisi lainnya, di bawah komando pasukan keamanan Indonesia, menyerang orang-orang yang berlindung di kantor polisi Maliana. Sebelum menyerang, pemimpin organisasi payung pro- kemerdekaan CNRT meminta polisi Indonesia untuk melindungi mereka. Tetapi polisi tidak bertahan di satu bagian gedung dan menyuruh mereka pergi. Paling tidak 26 penduduk sipil terbunuh atau dihilangkan, kebanyakan pemimpin CNRT setempat dan orang-orang yang dicurigai mendukung CNRT, termasuk satu anak laki-laki berusia 12 tahun. Korban termasuk orang-orang yang lari dari kantor polisi yang diburu

dan dibunuh beberapa hari berikutnya. Mayat mereka dibawa ke tampat rahasia untuk dibuang.

- Pada tanggal 10 September 1999 milisi Sakunar, di bawah arahan TNI, membawa penduduk sipil dari tiga desa di Oesilo, Oecusse ke Timor Barat, Indonesia, dengan alasan mereka akan lebih aman di sana. Setelah tia di wilayah Indonesia TNI dan milisi memisahkan 50-70 anak muda yang dipilih atas dasar bahwa mereka mempunyai pendidikan SMA. Korban diikat bersama dan dibawa kembali ke Oecusse, dimana mereka disuruh berdiri sejajar dan dieksekusi di sungai Passabe.

- Pada tanggal 12 September 1999, milisi Laksaur dan angota TNI mencoba secara paksa untuk membawa penduduk desa Laktos (Fohorem, Covalima) ke Timor Barat, Indonesia. Empat belas orang yang menolak dibunuh.

- Pada tanggal 20-21 September 1999 tentara TNI dari Batalion 745 menembak penduduk sipil secara membabi buta saat mereka menarik diri dari Lospalos (Lautém) ke Dili. Paling tidak 21 penduduk sipil, termasuk seorang wartawan Belanda, terbunuh atau dilenyapkan oleh anggota Batalion 745 saat mereka menarik diri melalui Lospalos, Baucau, dan Dili.

- Pada tanggal 23 September 1999, anggota milisi Mahidi, didukung oleh TNI, menembak sekelompok penduduk desa dari Maununu, Distrik Ainaro, yang baru saja mereka kumpulkan untuk dibawa ke Timor Barat, dan membunuh 11 orang, termasuk perempuan dan anak-anak.

- Pada tanggal 20 Oktober 1999 milisi Sakunar dan Aitarak dan anggota TNI, saat mengumpulkan penduduk desa dari Maquelab (Pante Makassar, Oecusse) untuk dibawa ke Timor Barat, memisahkan dan mengeksekusi sebayak enam penduduk laki-laki di pasar Maquelab. Enam orang lainnya dibunuh kemudian dalam serangan di desa tersebut.

Selain insiden besar ini, Komisi menerima banyak laporan mengenai pelanggaran oleh perorangan yang dilakukan oleh anggota TNI, baik sendiri maupun bersama milisi Timor. Di antara laporan tentang berbagai perkosaan, kadang dilakukan berulang-ulang selama periode beberapa hari, dalam konteks kampanye teror secara umum sebelum dan sesudah Konsultasi Rakyat atau selama deportasi setelah Konsultasi Rakyat. Komisi menerima lebih dari 4.000 laporan mengenai penyiksaan dan perlakuan buruk yang dilakukan oleh atau dengan melibatkan TNI atau polisi Indonesia. Komisi menerima sekitar 731 laporan terpisah mengenai pengrusakan harta benda atau pelanggaran ekonomi yang melibatkan TNI dan polisi.

Bukti yang diberikan oleh korban dan saksi dalam wawancara dengan Komisi, dan data statistik yang dikumpulkan dari pernyataan yang dikumpulkan oleh Komisi jelas memperkuat temuan bahwa anggota TNI secara langsung terlibat dalam sejumlah besar pelanggaran berat selama tahun 1999.

Tanggung jawab TNI atas tindakan kelompok milisi

Tanggung jawab TNI atas tindakan kelompok milisi mempunyai tiga dasar. Pertama TNI terlibat dalam merancang, merekrut, mendanai,

mempersenjatai dan melatih kelompok milisi. Kedua TNI ikut serta dalam operasi gabungan dengan kelompok milisi. Dan ketiga, meskipun mengetahui sifat dan skala pelanggaran yang dilakukan, TNI tidak mengambil tindakan efektif untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut atau menghukum pelaku.

Peran TNI dalam membentuk dan mendukung milisi

Dalam membentuk milisi TNI mengambil dari berbagai kelompok binaan yang sudah dikerahkan TNI sejak tahun 1975. Beberapa kelompok milisi pada kenyataannya sudah ada selama satu dekade atau lebih. Kelompok milisi lain merekrut pemimpinnya dari pasukan “pertahanan sipil” serta kelompok pro-integrasi yang secara resmi didukung oleh Indonesia seperti Wanra, Hansip dan Gadapaksi. Sebuah dokumen militer tertanggal bulan April 1998 menunjukkan bahwa 12 “tim” paramiliter, yang berada di setiap distrik di Timor-Leste kecuali Dili dan Oecusse, sudah ada waktu itu. Struktur yang sudah ada sangat membantu dalam pembentukan kelompok baru dan perluasan kelompok yang sudah ada, dan menjelaskan mengapa milisi bisa dimobilisasi dengan cepat pada tahun 1999.

Tiga perwira senior tentara Indonesia terlibat dalam perencanaan, pembentukan dan perekrutan milisi. Tiga komandan senior yang memainkan peran penting dalam pembentukan kelompok milisi adalah Mayor Jenderal Adam Rachmat Damiri, Komandan Kodam IX/Udayana yang meliputi beberapa provinsi di wilayah Tengah dan Timur Indonesia, termasuk Timor-Leste, Kolonel Suhartono Suratman yang menjadi Komandan Korem Timor Timur dan Letnan Kolonel Yayat Sudrajat, seorang perwira Kopassusyang menjadi komandan Satuan TugasTribuana VIII yang ditugaskan di Timor-Leste pada awal tahun 1999. Komisi

diijinkan melihat materia yang dikumpulkan oleh penyelidik internasional PBB yang bekerja untuk Unit Kejahatan Berat PBB. Komisi percaya bahwa pernyataan saksi mata yang diambil oleh penyelidik PBB memberikan bukti yang sangat terpercaya. Komisi percaya bahwa pernyataan saksi mata dan peserta pertemuan antara tokoh pro-integrasi dengan anggota senior TNI dan pemerintah lokal dan pusat secara akurat diringkas dalam penyataan berikut dari dakwaan terhadap delapan pejabat senior Indonesia yang diajukan oleh Wakil Jaksa Agung Timor-Leste urusan Kejahatan Berat pada bulan Februari 2003.

1. Pada atau sekitar bulan Agustus 1998 [Komandan Kodam IX Udayana, Mayor Jenderal] Adam Rachmat Damiri mengatur penerbangan pemimpin Timor yang pro-Indonesia dari Timor Timur ke Denpasar, Bali untuk bertemu. Dalam pertemuan ini, Damiri meminta mereka untuk membentuk kelompok untuk mempromosikan integrasi.

2. Pada dan sekitar bulan Agustus 1998 Damiri berkunjung ke Dili dan bertemu para komandan TNI dan pemimpin Timor yang pro-Indonesia. [Komandan Korem 164, Kolonel] Suhartono Suratman hadir dalam pertemuan tersebut. Damiri mengatakan kepada mereka bahwa perhatian internasional tertuju pada Timor Timur dan ini menjadi masalah bagi Indonesia. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka perlu membuat rencana untuk membuat organisasi yang akan menyebarkan semangat pro-Indonesia di seluruh wilayah Timor Timur. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus membentuk pasukan pertahanan sipil yang didasarkan pada model yang sebelumnya didukung TNI dan bahwa pasukan ini harus diperluas dan dikembangkan untuk melindungi integrasi.

3. Pada atau sekitar bulan Nopember 1998 Damiri mengunjungi Timor. Dalam kunjungan ini dia bertemu lagi dengan para pemimpin Timor yang pro-Indonesia di Dili, termasuk orang-orang yang nantinya menjadi pemimpin kelompok milisi. Damiri meminta orang- orang ini untuk bergabung dan membantu TNI melawan kelompok pro-kemerdekaan Fretilin (*Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente*). Dalam pertemuan dengan pemimpin pro-Indonesia ini, Damiri memuji pemimpin masa depan milisi Eurico Guterres sebagai anak muda yang bersemangat untuk bertempur mempertahankan integrasi dan berkata bahwa dia siap memberi give Guterres 50 juta rupiah untuk memulai kegiatannya.

4. Pada atau sekitar bulan Nopember 1998 Suratman bertemu pemimpin Timor pro- Indonesia di markasnya di Dili. [Komandan Tribuana, Letnan Kolonel] Yayat Sudrajat hadir dala pertemuan tersebut. Suratman mengatakan kepada orang-orang ini bahwa dia menginginkan pemimpin masa depan milisi Eurico Guterres untuk membentuk organisasi baru untuk melindungi integrasi yang mirip dengan organisasi pemuda pro-Indonesia Gadapaksi.

5. Pada awal tahun 1999 [Mayor Jenderal] Zacky Anwar Makarim [yang menjadi kepala BIA, sampai bulan Januari 1999] menerima para pendiri Barisan Rakyat Timor Timur – BRTT] di kantornya di Jakarta. Dalam pertemuan dia mengatakan bahwa perang gerilya perlu untuk mengalahkan pendukung kemerdekaan jika opsi otonomi kalah dalam Konsultasi Rakyat.

6. Pada atau sekitar bulan Februari 1999 Damiri bertemu pemimpin Timor yang pro- Indonesia di markas Kodam IX di Denpasar, Bali.

Damiri mengatakan kepada para pemimpin ini bahwa TNI siap memberi dukungan rahasia kepada kelompok pro- Indonesia. Dia menjelaskan bahwa hal ini harus dirahasiakan untuk menghindari kecaman dan kritik internasional. Damiri meminta orang-orang ini untuk mengumpulkan orang-orang Timor yang pernah bertugas dengan TNI. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus bertemu dengan Suratman untuk mendapat perintah lebih lanjut.

7. Pada atau sekitar bulan Februari 1999 Suratman bertemu pemimpin Timor yang pro- Indonesia di Dili. Dia mengatakan bahwa karena TNI berada di bawah rejim reformasi, maka TNI tidak bisa terlibat dalam operasi terbuka melawan gerakan kemerdekaan. Suratman meminta pemimpin pro-Indonesia untuk membentuk kelompok milisi. Suratman mengatakan bahwa TNI bersedia memberi bantuan apa saja yang diperlukan kelompok milisi.

8. Pada awal tahun 1999 [Gubernur Abilio] Soares mendorong Bupati untuk membentuk kelompok milisi di setiap distrik. Beberapa Bupati menjadi pemimpin milisi.

Pada awal tahun 1999 Kepala Staf Korem Timor Timur, Letnan Kolonel Supardi, dikutip saat mengatakan bahwa TNI telah merekrut 1.200 milisi dan akan terus merekrut sampai bulan Maret. Selain menggunakan uang sebagai insentif untuk merekrut, TNI juga menggunakan ancaman dan paksaan. Target ditetapkan dalam perekrutan anggota milisi di setiap distrik, yaitu sekitar 10 orang per desa. Ada sekitar 450 desa di Timor-Leste.

Pengakuan TNI endorsement atas milisi

Anggota TNI dan pemerintah Indonesia memberi status resmi kepada milisi. Mereka melakukan ini, misalnya, dengan menghadiri dan berbicara di upacara peresmian milisi dan demonstrasi di seluruh Timor-Leste. Komandan Korem, Kolonel Suratman, bertemu dan memberi "pengarahan" kepada nggota milisi Besi Merah Putih (BMP) di Distrik Liquiça di Markas Kodim pada tanggal 16 April 1999, sepuluh hari setelah pembantaian penduduk sipil oleh anggota BMP, TNI dan polisi di Gereja Liquiça, dan satu hari sebelum serangan milisi di Dili dimana milisi BMP juga ikut ambil bagian.

Seperti dicatat sebelumnya, Komandan Korem Timor Timur, Kolonel Suratman dan perwira lainnya, termasuk Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, hadir dalam demonstrasi di depan Kantor Gubernur di Dili, pada tanggal 17 April, dimana pemimpin milisi Eurico Guterres berbicara di depan anggota milisi dan mendorong mereka untuk membunuh "mereka yang mengkhianati integrasi". Pembunuhan yang selanjutnya terjadi sudah disebut di atas.

PerwiraTNI hadir dan ikut serta dalam upacara peresmian di Cassa (Ainar) pada tanggal 12 Desember 1998; Same (Manufahi) pada tanggal 11 Maret 1999; Viqueque (Viqueque) pada tanggal 11 Maret 1999l Dili (Dili) pada tanggal 17 April 1999; Maliana (Bobonaro) pada bulan April 1999; Suai (Covalima) pada pertengahan April 1999; Oecusse, (Oecusse) pada tanggal 1 Mei 1999; Lolotoe (Bobonaro) pada tanggal 10 Mei 1999; Laclubar (Manatuto) pada tanggal 18 Mei 1999; dan Gleno (Ermera) pada bulan April atau Mei 1999. Komandan Kodim TNI, kepala Polres dan Bupati menghadiri dan ikut serta dalam upacara ini di distrik masing-masing.

Pengakuan milisi sebagai bagian dari struktur resmi

Selain dukungan terbuka, pemerintah Indonesia memberi milisi pengakuan resmi dengan memperlakukan mereka sebagai bagian resmi dari struktur kelompok binaan militer.

Dalamsebuah komunikasi internal resmi, kelompok milisi secara teratur disebut sebagai bagian dari kelompok pertahanan sipil yang sudah ada, Wanra, Hansip atau Ratih. Sebuah surat yang ditandatangani perwira Kopassus di distrik Baucau tertanggal bulan Maret 1999, menyebut kelompok milisi Saka, Sera, dan Alfa sebagai "Ratih". Dari bulan 1999, kelompok milisi juga secara resmi diakui sebagai Pam Swakarsa.32 Menganggap milisi sebagai kelompok pertahanan sipil yang secara resmi diakui ditujukan untuk memberi dasar legitimasi bagi TNI dan pemerintah untuk mendukung mereka. Kenyataannya ini memberikan bukti bahwa TNI dan pemerintah Indonesia mengakui kelompok milisi sebagai lembaga resmi yang bertindak dibawah arahan pemerintah.

Pengakuan resmi milisi sampai di tingkat atas Panglima ABRI, Jenderal Wiranto, yang menyatakan bahwa pasukan milisi terdiri dari "angkatan bewrsenjata" dan basis pendukung masa sebagai "pendukung militan". Tingkat kontrol yang dimiliki TNI atas milisi tercermin dari pengetahuan TNI tentang jumlah pasti senjata yang mereka miliki. Jenderal Wiranto dikutip dalam Laporan Komnas HAM Indonesia mengenai Timor Timur yang mengatakan bahwa:

Angkatan bersenjata memiliki 1.100 orang dengan 546 senjata dari berbagai jenis, termasuk senjata rakitan; Mereka digabungkan ke organisasi pro-integrasi. Pendukung militan terdiri dari 11.950 orang,

yang digabungkan dalam kelompok oposisi seperti Besi Merah Putih, Aitarak, Mahidi, Laksaur Merah Putih, Guntur Kailak, Halilintar, Junior, Team Pancasila, Mahadomi, Ablai and Red Dragon (Naga Merah).

Partisipasi personil TNI dalam kelompok

Hubungan dekat antara TNI dan milisi secara jelas ditunjukkan oleh keanggotaan ganda mereka. Banyak anggota milisi juga terdaftar sebagai tentara TNI, sebuah fakta yang dibenarkan oleh dokumen militer dan pemerintah sipil Indonesia.

- Pada bulan Agustus 1999, pejabat UNAMET menyampaikan sebuah keluhan resmi kepada ketua gugus tugas pemerintah Indonesia yang menangani hubungan dengan misi PBB, Agus Tarmidzi, dan kepada Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, wakil militer di gugus tugas tersebut bahwa personil TNI, secara khusus dua orang Sersan yang bertugas di Kodim Bobonaro, juga bertugas di kelompok milisi Dadurus Merah Putih.* Mayor Jenderal Makarim mengakui bahwa kedua orang ini memang anggota TNI dan sekaligus anggota milisi DMP. Sebagai tangapan atas keluhan UNAMET dia menyatakan bahwa kedua orang ini diperintahkan untuk kembali ke barak. Pejabat UNAMET yang bertugas di Bobonaro menyadari bahwa hal ini tidak benar.

- Sebuah dokumen tahun 1998 yang mendaftar nama 49 anggota milisi Makikit di distrik Viqueque menyatakan bahwa enam anggota milisi juga merupakan anggota TNI Batalion Infantri 328.

- Sebuah surat dari pemimpin milisi Aitarak, Eurico Guterres, kepada Dandim TNI di Dili secara terbuka meminta agar intel TNI Sersan Satu Elizario da Cruz, diberi ijin untuk bergabung dengan Aitarak untuk waktu yang tidak terbatas.

- Sebuah daftar resmi berjudul "Daftar anggota Kompi Khusus Pusaka, Kodim 1628/Baucau", dari Kodim 1628/Baucau, tertanggal 3 Februari 1999, menunjukkan bahwa kesemua 91 anggota kelompok milisi Team Saka di distrik Baucau adalah tentara TNI, dan menyebut pangkat militers erta nomor induk mereka. Daftar ini menyebut kelompok milisi sebagai sebuah "kompi khusus" di Kodim 1638 Baucau. Komandan kelompok milisi ini, Joanico Césario Belo, saat ini berpangkat Sersan Satu di Kopassus dan Komandan Wilayah Sektor A Pasukan Pejuang Integrasi, sebuah lembaga yang membawahi semua milisi nasional.

- Sebuah dokumen yang merinci upah yang dibayar kepada anggota milisi Aitarak di Dili, tertanggal 24 Agustus 1999, menyebutkan pembayaran kepada 96 anggota kelompok milisi baik yang anggota maupun pegawai pemerintah.

- Komisi menerima bukti bahwa kelompok milisi berikut dikomandani oleh personil TNI yang kebanyakan ada hubungannya dengan Kopassus:

- DMP (Dadurus Merah Putih), dengan basis di Bobonaro, dengan komandan Sersan Domingos dos Santos

- Team Alfa (juga dikenal sebagai Jati Merah Putih, JMP), dengan markas di distrik Lautém, dan dipimpin oleh seorang Sersan Kopassus Syaful Anwar dan Letnan Rahman Zulkarnaen (Komandan Kopassus di Distril Lautém).

- Team Saka, dengan basis di distrik Baucau, dengan komandan Joanico Césario Belo, yang menjadi Sersan di Kopassus.

- Team Morok, dengan basis di distrik Manatuto dan dipimpin oleh anggota TNI Filomeno Lopes da Cruz.

Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI bersama kelompok milisi

Komisi menerima butkti yang kuat yang menunjukkan bahwa sudah menjadi praktek umum bagi anggota TNI untuk mengikuti milisi selama operasi dan bahwa dalam banyak kasus perwira TNI memerintahkan anggota milisi untuk melakukan pelanggaran. Dalam banyak kasus anggota milisi mematuhi perintah. Dalam laporan yang jumlahnya lebih sedikit saksi menyatakan bahwa saat anggota milisi tidak mematuhi perintah untuk melakukan pelanggaran, TNI melakukan sendiri pelanggaran tersebut.

Korban dan saksi mata memberikan kesaksian dalam pernyataan kepada Komisi mengenai lebih dari 2.000 pelanggaran berbeda dimana mereka mengenal anggota TNI dan milisi yang bersama-sama sebagai pelaku pelanggaran. Kasus-kasus yang dilaporkan termasuk 761 kasus pembunuhan diluar hukum, 968 kasus penyiksaan dan perlakuan buruk, 883 kasus penahanan sewenang-wenang, 553 kasus pelanggaran ekonomi dan harta benda dan 11 kasus pelanggaran seksual.

Dari kesaksian seorang korban pemerkosaan yang mereka wawancarai selama kunjungan lapangan pada akhir tahun 1999, tim gabungan Pelapor Khusus PBB melaporkan pada akhir tahun 1999 bahwa:

[D]alam banyak kesempatan tidak bisa dibedakan antara anggota milisi dan TNI, karena sering orangnya sama tetapi memakai seragam yang berbeda.

Seorang mantan anggota tentara TNI Timor mengatakan kepada Unit Kejahatan Berat bahwa selama penyerangan setelah pengumuman hasil Konsultasi Rakyat:

Gabungan antara milisi Aitarak dan TNI membakar rumah di sub-distrik Metinaro. Rumah-rumah dibakar secara membabi buta ...Ini karena kami tidak diijinkan meninggalkan apapun milik Indonesia untuk pendukung pro-kemerdekaan ...Perintah masih tetap sama: jika otonomi kalah, Timor Timur akan kembali dari nol...Saya sadar situasi buruk di Dili karena kami lihat banyak asap di atas Dili. Kami tidak bisa mengenal lagi siapa TNI dan siapa milisi, milisi menggunakan senjata yang sama dengan TNI.

TNI mengarahkan tindakan milisi

Selain tentara TNI yang menjadi anggota kelompok milisi banyak perwira berperan mengarahkan milisi. Komisi menerima banyak laporan bahwa anggota TNI yang mengikuti anggota milisi selama insiden dimana korban dibunuh, disiksa atau menderita pelanggaran lainnya, mengarahkan milisi. Komisi menerima bukti yang diberikan oleh banyak saksi mata, termasuk mantan anggota TNI dan milisi, bahwa TNI secara langsung mengontrol tindakan kelompok milisi. Pemenang Hadiah Nobel Uskup Carlos

Ximenes Belo, menggambarkan serangan di rumahnya pada pagi hari tanggal 6 September:

Kemudian sekitar jam 9.15 seorang Letnan Kolonel dari Kostrad tiba... Dia bertanya: "Bagaimana situasi di sini?" Saya jawab bahwa kami ingin perlindungan untuk menghentikan serangan milisi ...tetapi orang-orang lain di rumah saya mendengar Letnan Kolonel tersebut ...tiba di ujung jalan ... Dia berteriak kepada milisi yang menunggu di sana: "Serang sekarang, serang sekarang! Jika tidak saya akan bunuh kalian." Sekitar jam 9.30 mereka mulai mengelilingi rumah saya dengan sepeda motor, berteriak dan melempar batu ...Pemuda di rumah saya kemudian kepada saya bahwa polisi sendiri juga melempar bensin ke api waktu itu.38

TNI mempersenjatai milisi

TNI juga memberikan latihan, senjata dan dukungan operasional kepada milisi. Peran TNI dalam mempersenjatai dan melatih milisi dikuatkan oleh berbagai sumber termasuk dokumen pemerintah dan militer Indonesia dan pernyataan saksi mata yang bisa dipercaya.

Pada awal bulan Februari 1999 Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Subagyo Hadisiswoyo, mengatakan bahwa tentara mempersenjatai "Wanra" untuk membantu ABRI mengamankan Timor Timur.39 Pada pertengahan bulan Februari juru bicara ABRI di Jakarta, Jenderal Sudradjat, menegaskan bahwa senjata telah disalurkan kepada milisi tetapi menekankan bahwa "kami hanya memberikan senjata kepada mereka yang kita percaya".

Pada saat yang sama pemimpin milisi Mahidi di distrik Ainaro, Cancio Lopes de Carvalho, mengatakan kepada wartawan bahwa TNI telah memberi kelompoknya 20 senapan otomatis SKS buatan Cina pada akhir bulan Desember 1998, yang kemudian sudah dipakai untuk melakukan sejumlah serangan mematikan di desa-desa sekitar.

Daftar nama 91 anggota milisi Team Saka militia di distrik Baucau yang disebut di atas juga merinci jenis dan nomor registrasi senjata yang diberikan kepada setiap anggota. Senjata yang masuk dalam daftar termasuk: 1 PMI/Pindad, 19 G-3, 56 SP-II, 10 SP-I, 1 FNC, 1 M16A1, 1 AK, dan 1 Mauser. Dokumen ini ditandatangani oleh Joanico Césario Belo, yang diketahui sebagai Sersan Satu dan Komandan Kompi Khusus Pusaka.

Sebuah dokumen berjudul "Daftar Anggota Team Makikit yang Diijinkan Membawa Senjata," yang dipersiapkan oleh Kodim Viqueque, mendaftar lebih dari 49 anggota milisi Makikit dan merinci jenis dan nomor registrasi senjata yang diberikan kepada setiap anggota. Senjata yang masuk di daftar termasuk 3 M16A-1, 35 SP-1, dan 11 Garand. Meskipun tidak tercantum tangal pada dokumen tersebut, catatan di pinggir menyatakan bahwa dokumen ini ditemukan di markas Kodim Viqueque pada tanggal 28 Oktober 1998.43

Pada bulan April 2000 seorang pemimpin kelompok milisi Sakunar di Oecusse, Laurentino Moko, diaporkan memberi kesaksian di hadapan pengadilan Indonesia bahwa dia diberi senjata pada tahun 1999 oleh dua perwira Kopassus.

Dalam pengadilannya atas kejahatan terhadap kemanusiaan di hadapan Panel Khusus di Pengadilan Distrik Dili, pemimpin milisi Team Alfa Joni

Marques mengatakan bahwa dia dilatih oleh Kopassus sejak tahun 1986, dan menerima senjata dari perwira Kopassus setelah Konsultasi Rakyat tanggal 30 Agustus.45 Marques dan orang lainnya divonis dengan kejahatan atass kemanusiaan karena membunuh suster, pendeta dan orang-orang lain pada tanggal 25 September 1999. Dalam keputusannya Pengadilan Distrik Dili menyimpulkan: "Pasukan Khusus Kopassus memberi senjata dan pelatihan kepada anggota Team Alfa".

TNI melatih milisi

Dalam sebuah telegram kepada semua Dandim tertanggal 13 April 1999 dan diberi tanda "rahasia", Kolonel Suratman, Komandan Korem Timor Timur mengakui bahwa milisi (yang dikenal dengan nama "Ratih") sedang dilatih personil TNI di semua distrik. Ini memberi bukti kuat bahwa program dukungan kepada milisi dikontrol dan dikelola paling tidak di tingkat Korem. Kolonel Suratman memerintahkan Komandan Kodim untuk:

Melaksanakan pengawasan dan kegiatan pengamanan dalam konteks pelatihan setiap Ratih agar kegiatan ini berjalan mulus [dan] menekankan perlunya melaksanakan perintah dan disiplin untuk mencegah adanya kerugian, baik fisik maupun non-fisik, ataupun di dalam maupun di luar unit.

Dalam dokumen lain, yang diindetifikasi sebagai laporan intelijen TNI dari Kodim Liquiça, tertanggal 18 April 1999, penulis menggambarkan kunjungan Kolonel Suratman ke distrik itu. Dokumen ini menyatakan bahwa Suratman berbicara di depan masa anggota milisi Besi Merah Putih yang berkumpul di pos Koramil Maubara (Liquiça) hanya dua minggu

setelah kelompok milisi yang sama, bersama TNI dan polisi, membuunuh puluhan penduduk sipil tidak bersenjata di kompleks Gereja Liquica.

Pada tanggal 16 April 1999 jam 14.00, DanRem 164/WD Kolonel Suratman dan pengawalnya tiba di markas Kodim Liquiça. Kemudian dia mengunjungi pos Koramil 1638/ Maubara untuk memberi pengarahan kepada sekitar 500 anggota milisi BMP di sana.

Penggunaan secara resmi instalasi TNI oleh kelompok milisi

Dalam sebuah telegram tertanggal 18 April 1999 Komandan Kodim TNI di Dili, Letnan Kolonel Endar Priyanto, melaporkan kepada atasannya, Kolonel Tono Suratman, bahwa:

Pada jam 13.15 pada tanggal 18 April 1999 satu unsur pasukan Aitarak menyelesaikan operasi pembersihannya dan kembali ke Kompi B Batalion 744/SYB dimana mereka bergabung dengan kelompok Aitarak lain yang telah berkumpul di sana. Mereka kemudian kembali ke Hotel Tropical.

Laporan ini tertanggal satu hari setelah demonstrasi milisi di depan Kantor Gubernur di Dili dimana pemimpin milisi Eurico Guterres, didampingi perwira senior TNI dan pejabat pemerintah, menyuruh anggota milisi membunuh pendukung kemerdekaan. Laporan menyebutkan bahwa milisi menggunakan basis TNI sebagai tempat berkumpul sebelum dan sesudah “operasi pembersihan” hanya satu hari setelah serangan mematikan yang dilakukan setelah demonstrasi itu, dimana milisi membunuh paling tidak 12 orang di rumah Manuel Carrascalão di Dili.

Di distrik Lautém Kopassus menyediakan markanya untuk basis kelompok milisi Team Alfa dan memberi dukungan logistik dan transportasi.

Paling tidak di dua sub-distrik di distrik Covalima markas milisi Laksaur berada di markas Koramil. Sebuah tim UNAMET mengunjungi salah satu basis milisi ini di kompleks TNI pada bulan Juni 1999.

Di Liquiça, Koramil di Maubara juga berfungsi sebagai markas milisi Besi Mera Putih. Kelompok milisi menggunakan markas resmi TNI sebagai basis di seluruh wilayah ini.

Senjata diberikan, dan kontrol penggunaan senjata ini dilakukan oleh TNI. Komisi menerima banyak laporan tentang milisi yang dipersenjatai dengan senjata modern dengan model dan jenis yang sama dengan yang dipakai militer dan polisi Indonesia.

Komisi mencermati dan menerima bukti dalam pernyataan saksi dan dokumen yang dikumpulkan oleh Wakil Jaksa Agung urusan Kejahatan Berat di Timor-Leste mengenai sebuah pertemuanpada bulan Maret 1999 yang dihadiri oleh Kolonel Suhartono Suratman dan Letnan Kolonel Sudrajat, Perwira Kopassus yang menjadi komandan Gugus Tugas Intel Satgas Tribuana VIII dan gubernur sipil Abilio Soares.54 Pada pertemuan tersebut Abilio Soares mengatakan kepada para pemimpin pro-otonomi bahwa TNI dan dia akan memasok senjata dan dana. Senjata kemudian disalurkan kepada milisi oleh Letnan Kolonel Sudrajat.

Pada bulan April 1999 Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, yang menjadi wakil militer dalam gugus tugas PT33 yang ditugaskan untuk berhubungan dengan misi UNAMET, menawarkan untuk memasok

kelompok milisi dengan senjata otomatis dan memberi instruksi kepada Kolonel Suratman agar ini dilaksanakan. Kolonel Suratman memerintahkan Letnan Kolonel Sudrajat untuk mengatur distribusi senjata. Senjata kemudian disalurkan kepada milisi melalui personil Kopassus.

Penyediaan dukungan dana dan material oleh TNI dan lembaga lain

Ada bukti melimpah yang menunjukkan bahwa penguasa sipil dan militer Indonesia mendanai milisi dan memberikan sumber daya untuk digunakan mereka. Diperkirakan sekitar 5,2 juta dolar Amerika dikeluarkan untuk program "sosialisasi" yang bertujuan untuk meyakinkan penduduk bahwa mereka harus memilih tetap bersama Indonesia. Sekitar 400.000 dolar Amerika dijatah untuk setiap distrik. Sebagian dari uang ini dialokasikan untuk membayar kelompok milisi melalui pemerintahan sipil Indonesia. Anggaran dasar untuk "sosialisasi otonomi" dibuat oleh setiap distrik, yang meliputi alokasi untuk milisi, dan diajukan ke Gubernur untuk disetujui. Dana tambahan diberikan oleh lembaga pemerintah lain dan TNI/ABRI.

Komisi mencermati sejumlah dokumen yang berisi anggaran dan permintaan uang dari milisi yang ditandatangani oleh pemimpin milisi, yang ditujukan kepada pejabat pemerintah dan perwira militer. Kmisi percaya bahwa pendanaan kelompok milisi sebagian besar diambil dari program "Jaringan Pengamanan Sosial" Bank Dunia, yang seharusnya diberikan kepada kelompok rentan.

Ada juga bukti yang menunjukkan bahwa kelompok politik pro-integrasi, seperti FPDK (Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan) dan BRTT (Barisan Rakyat Timor Timur), keduanya memiliki hubungan yang dekat

dengan pemerintah sipil, dipakai untuk menyalurkan dana dari pemerintah dan militer ke milisi (lihat Bagian 4: Rejim Pendudukan).

FPDK diketuai oleh Bupati Dili, Domingos (Koli) Maria das Dores Soares, sementara BRTT diketuai oleh Francisco Lopes da Cruz, mantan Presiden UDT yang menjadi Wakil Gubernur Timor Timur selama pendudukan dan yang pada tahun 1999 menjadi duta besar keliling yang ditugaskan untuk mempromosikan TimorTimur di dunia internasional.

Kemampuan TNI mengontrol milisi dan tingkat kekerasan yang dilakukan

Panglima TNI, Jenderal Wiranto, sendiri tampaknya mengatakan dalam beberapa kesempatan bahwa TNI bisa melucuti senjata milisi apabila mereka mau. Dalam pernyataannya kepada Unit Kejahatan Berat, Utusan Khusus Sekertaris Jenderal PBB dalam misi UNAMET, Ian Martin, mengatakan bahwa dalam pertemuan tanggal 7 Juli 1999 di Jakarta:

Saya jelas mengingat Jenderal Wiranto mengatakan kepada saya bahwa jika Falintil siap menyerahkan senjata kepada polisi Indonesia, dia menjamin bahwa milisi bisa dilucuti dalam waktu dua hari ...Saya yakin ini bukan satu- satunya kesempatan Jenderal Wiranto mengatakan ini.

Seorang anggota Polisi Sipil UNAMET PBB, Stephen Polden, memberikan kesaksian kepada Unit Kejahatan berat bahwa dia mengamati kemampuan perwira TNI berpakaian sipil untuk menghentikan serangan milisi di kompleks UNAMET di Maliana pada tanggal 29 Juni 1999.

Bukti berlimpah dan bukti dokumenter menunjukkan bahwa milisi yang dikontrol dan diarahkan oleh TNI juga dikuatkan oleh fakta bahwa TNI

bisa menghentikan kekerasan milisi pada saat tertentu sebelum Konsultasi Rakyat, khususnya selama kunjungan tamu internasional dan, yang lebih penting, lembaga pengawas.

Pada tanggal 28 Januari 1999 Kolonel Suratman mengeluarkan perintah kepada semua Komandan Kodim dimana dia secara jelas berasumsi bahwa komandan Kodim di setiap kabupaten mempunyai kontrol atas milisi, termasuk senjata mereka, dan bahwa mereka bisa memanggil milisi dan melucuti senjata mereka apabila mau. Perintah ini juga menunjukkan bahwa komandan TNI mempunyai peran untuk memastikan bahwa milisi dipersenjatai secara layak saat melakukan operasi tempur dan tugas lain. Perintah itu menyebut pembunuhan yang baru dilakukan oleh milisi dan kemudian mengarahkan perwira TNI untuk mencegah milisi agar tidak membawa dan menggunaka senjata yang berada di bawah kontrol TNI selama kunjungan yang akan dilakukan oleh utusan Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Perlu dicatat bahwa penyebutan tentang pembunuhan tidak dalam konteks tindakan apapun terhadap milisi yang terlibat pembunuhan, hanya bahwa program mereka harus dihentikan selama kunjungan kelompok hak asasi manusia.

Dalam perintah resmi Suratman menyebut "rencana kunjungan Komisi Hak Asasi Manusia PBB ke Timor Timur pada tanggal 9 Februari 1999" dan "sejjumlah kasus yang telah terjadi di Timor Timur yang melibatkan Wanra (persisnya, milisi) yang mengakibatkan hilangnya nyawa." Perintah itu kemudian menyatakan:

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, kalian diperintahkan untuk ...menarik kembali senjata yang dibawa Wanra dan Ratih anggota [milisi] apabila mereka tidak melakkan tugas khusus atau operasi tempur di

wilayah Kodim masing- masing.

Dalam contoh lain, pada tanggal 12 April, Kolonel Suratman mengeluarkan perintah lewat telegram sebagai tanggapan adanya kunjungan berbagai “tamu asing”– termasuk Atase Militer, Duta Besar dan LSM – ke Timor-Leste, dan terutama ke Liquiça”, yang menyatakan bahwa “untuk menghindari kritik tentang operasi teritorial kita oleh para tamu asing ini, untuk sementara kegiatan harus dibatasi pada operasi keamanan dasar.”

Tidak bertindaknya TNI untuk mencegah kekerasan milisi

TNI mempertahankan jumlah pasukan yang tinggi di Timor-Leste sepanjang tahun 1999 sampai mengundurkan diri pada bulan September. Pasukan ditugaskan di distrik, sub-distrik dan desa di seluruh wilayah ini. Meskipun demikian, dan fakta bahwa anggota TNI ada di berbagai tempat saat pelanggaran hak asasi manusia terjadi, TNI tidak mencegah kekerasan milisi.

Satu contoh adalah penolakan komandan TNI untuk melakukan campur tangan untuk mencegah pembantaian di rumah Manuel Carrascalão di Dili pada tanggal 17 April 1999. Perwira senior TNI ada saat terjadi demonstrasi sebelum pembantaian, dimana Eurico Guterres berbicara dan mengatakan bahwa milisi segera memulai “pembersihan” Dili dari mereka yang menentang integrasi. Mereka melihat amukan milisi di seluruh Dili. Sore harinya saat Manuel Carrascalão mengunjungi rumah Kolonel Suratman untuk meminta bantuan segera untuk mencegah serangan milisi terhadap orang-orang yang berlindung di rumahnya, Suratman menolak melakukan apapun.

Satu contoh ketidakmampuan menjaga keamanan ialah saat TNI menolak mengambil langkah apapun untuk mencegah perlakuan buruk dan deportasi penduduk sipil di Dili pada tanggal 5 dan 6 September, meskipun ada permintaan pribadi dari Uskup Belo langsung kepada Jenderal Wiranto, Kapolda, Kolonel Timbul Silaen, dan Danrem (Komandan Resort Militer) Timor Timur, Kolonel Noer Muis. Bukannya mengambil langkah untuk mencegah deportasi, personil TNI mengambil peran aktif dalam mengagalang dan memindahkan mereka yang dipaksa pergi.

Komisi menilai bahwa tidak ada bukti substantif yang mendukung argumen bahwa pasukan keamanan Indonesia tidak mampu mencegah kekerasan kelompok milisi. Lebih jauh, Komisi menilai bahwa ada bukti kuat yang berlimpah yang memperkuat temuan bahwa mereka bisa dengan mudah menghentikan kekerasan tetapi tidak melakukan hal tersebut. Kenyataannya persoalannya bukan mencegah kekerasan, karena pasukan keamanan Indonesia merekayasa dan terlibat langsung dalam kekerasan. Tidak ada penjelasan lain yang mungkin tentang ketidakmampuan tentara TNI untuk melucuti anggota milisi yang melanggar hukum Indonesia dan menjadi ancaman keamanan utama dengan membawa senjata secara terbuka.

Seorang mantan staf internasional misi UNAMET memberikan kesaksian tentang permintaannya kepada seorang tentara TNI untuk menangkap anggota milisi yang membawa granat setelah diumumkannya keadaan darurat:

Dia [tentara itu] berkata kepada saya: "Kami tidak menerima perintah untuk melakukan hal itu." Saya terkejut dengan hal itu, dan sangat ingat hal itu ...[U]ntuk saya mereka mendapat perintah untuk tidak menangkap

milisi, karena tidak sah membawa senjata. Mereka tidak perlu perintah untuk menangkap orang yang membawa senjata, tetapi mereka perlu perintah sebaliknya untuk tidak menangkap mereka.

Pada bulan Agustus 1999 ada 17.941 pasukan reguler TNI di Timor-Leste. Selain itu, ada lebih dari 6.500 polisi Indonesia yang bertugas. TNI merupakan tentara modern, yang diperlengkapi dengan senjata modern dengan dukungan pesawat udara, helikopter tempur, artileri dan perlengkapan militer berat lainnya. Militer Indonesia menunjukkan kemauannya untuk menggunakan berbagai persenjataan ini di Timor-Leste selama 24 periode pendudukan. Polisi juga diperlengkapi dengan senjata modern, gas air mata dan peralatan lain yang sesuai untuk mengontrol perilaku tidak sah. Kelompok milisi relatif tidak terlatih, dibentuk secara tergesa-gesa dan terdiri dari orang Timor yang tidak berpendidikan, yang kebanyakan sangat muda.

Apabila ada upaya sungguh-sungguh oleh pasukan keamanan Indonesia untuk mengontrol tindak kekerasan yang dilakukan milisi, maka, paling tidak, ada konfrontasi bersenjata antara anggota pasukan keamanan Indonesia dan kelompok milisi dan banyak penangkapan oleh polisi. Tidak ada konfrontasi seperti itu, dan juga tidak ada penangkapan besar-besaran, meskipun ada ribuan polisi dan dilakukannya ribuan pelanggaran menurut KUHP. Komisi menilai bahwa penjelasan mengenai sebuah pasukan militer dan polisi yang terorganisir dan bersenjata lengkap yang terdiri dari lebih dari 20.000 personil tidak bisa menguasai kelompok orang-orang yang tidak profesional yang jauh lebih kecil jumlahnya sebagai kebohongan, yang semakin jelas karena tidak ada bukti adanya upaya sungguh-sungguh untuk mencegah kekerasan atau menghukum pelaku.

Pengetahuan, ancaman dan peringatan TNI sebelum kekerasan masal bulan September 1999

Beberapa peringatan yang dikeluarkan jauh sebelum Konsultasi Rakyat menjadi awal dari penghancuran dan kekerasan yang mengikuti pengumuman hasil Konsultasi Rakyat. Komandanmiliter TNI di Timor Timur, Kolonel Tono Suratman, mengatakan dalam sebuah wawancara dalam program Televisi Australia tiga bulan sebelum Konsultasi Rakyat:

Saya ingin memberi kalian peringatan ini: jika pihak pro- kemerdekaan menang, Bukan pemerintah Indonesia yang akan mananggung akibatnya. PBB dan Australia harus menyelesaikan masalah dan yah, jika ini terjadi, maka tidak akan ada pemenang. Semua akan dihancurkan. Timor Timur tidak akan ada lagi seperti sekarang. Ini akan lebih buruk dibanding 23 tahun yang lalu.

Selain itu Unit Kejahatan Berat menerima bukti bahwa pada bulan Juni 1999 Kolonel Suratman mengadakan pertemuan di Dili dimana dia mengatakan kepada tentara TNI dan milisi bahwa apabila rakyat Timor memilih merdeka dalam Konsultasi Rakyat semua yang diberikan Indonesia kepada Timor-Leste harus dihancurkan, bahwa kebijakan bumi hangus akan dilancarkan agar Timor-Leste merdeka harus mulai dari nol, dan bahwa perintah ini harus dilaksanakan oleh semua pasukan di Timor-Leste.

Sejauh mana peringatan ini mencerminkan kebijakan tetap pemerintah mengenai konsekuensi memilih kemerdekaan dan bukannya hanya ancaman yang dirancang untuk memastikan hasil yang pro-integrasi tidak jelas.* Namun demikian, fakta bahwa peringatan ini dikeluarkan oleh

perwira senior militer setelah penandatanganan Kesepakatan 5 Mei paling tidak menunjukkan keberpihakan yang tidak sejalan dengan kewajiban Indonesia sesuai kesepakatan. Lebih jauh, fakta bahwa peringatan ini menjadi kenyataan dengan adanya kekerasan dan penghancuran yang dilakukan TNI dan sekutu milisinya setelah Konsultasi Rakyat menunjukkan bahwa peringatan tersebut tidak kosong.

Tidak bertindaknya TNI untuk menghukum pelaku/penghargaan lembaga kepada mereka yang terlibat

Komisi menilai bahwa ketidakmampuan TNI untuk menyelidiki atau melakukan tindakan disipliner terhadap anggotanya atas tindakan mereka di Timor-Leste pada tahun 1999, disamping bukti berlimpah keterlibatan langsung pasukan TNI dalam pelanggaran, menujukkan bahwa di tingkat senior lembaga tidak menganggap pelanggaran-pelanggaran tersebut perlu dihukum. Apabila dipertimbangkan dengan bukti-bukti lain tentang keterlibatan secara lngsung maupun tidak langsung seperti dibicarakan di atas, Komisi berkesimpulan bahwa personil TNI yang melakukan pelanggaran tidak dihukum atas partisipasi mereka dalam kekerasan karena mereka bertindak sesuai dengan, tidak menentang, perintah atasan.

Menurut prinsip tanggung jawab komando, Tidak bertindaknya komandan TNI untuk mencegah dan mengontrol bawahan mereka agar tidak melakukan pelanggaran dan menghukum mereka yang bertanggung jawab, saat mereka tahu secara langsung bahwa pelanggaran tejadi menjadikan mereka bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan pelanggaran tersebut.

Tidak hanya pelaku dan komandan mereka tidak diminta pertanggungjawaban hukum, mereka bahkan tidak dihukum melalui mekanisme kelembagaan. Bisa diharapkan bahwa ketidakmampuan para komandan menjaga keamanan meskipun diberi sumber daya yang jauh mencukupi untuk menguasai situasi paling tidak akan merusak karier mereka. Kenyataanny sebaliknya yang terjadi. Sejumlah komandan senior diberi penghargaan dengan promosi setelah mereka memainkan peran kunci dalam peristiwa di Timor-Leste. Komisi menilai ini bukti lebih jauh bahwa di tingkat senior TNI tidak menolak peran yang dimainkan perwira senior ini, tetapi sebaliknya menyetujui.

Tanggung jawab komando dalam TNI

Komisi berkesimpulan bahwa perwira senior TNI secara aktif ikut dalam mengorganisir dan mengarahkan program pelanggaran masal. Selain itu bukti berlimpah bahwa para komandan ini bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip tanggung jawab komando. Definisi tanggung jawab komando yang dipakai Komisi menyatakan bahwa orang dalam posisi berwenang – baik militer maupun sipil – yang memiliki kontrol langsung atas pelaku pelanggaran, dan yang tahu atau seharusnya mengetahui adanya pelanggaran, mereka bertanggung jawab apabila mereka tidak mengambil langkah untuk mencegah atau menghukum pelaku pelanggaran.

Komisi percaya bahwa mereka yang memegang jabatan senior di TNI tahu atau seharusnya mengetahui kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste. Informasi ini berasal dari hirarki TNI sendiri. Misalnya, Jenderal Wiranto memberikan bukti di pengadilan Kolonel Timbul Silaen di Jakarta bahwa dia (Wiranto) secara teratur menerima laporan tentang situasi di Timor-

Leste dari berbagai sumber, termasuk Komandan Kodam Udayana/IX Mayor Jenderal Adam Damiri, Komandan Korem Timor Timur, Kolonel Suhartono Suratman, dan Kapolwil Timbul Silaen.

Selain itu Jenderal Wiranto sendiri, serta orang lainnya, berulang-ulang mengunjungi Timor-Leste sepanjang tahun 1999. Dalam lima kunjungannya ke Timor-Leste Wiranto secara langsung diberi tahu oleh pejabat senior PBB, media dan pemimpin Timor-Leste tentang tindak kekerasan yang dilakukan TNI dan kelompok milisi. Setelah kedatangan UNAMET pada bulan Juni, Utusan Khusus Sekjen PBB, Ian Martin, memberi laporan berkala kepada pejabat Indonesia, dan pimpinan TNI secara khusus, yang termasuk informasi mengenai bukti tentang keterlibatan TNI dan hubungan TNI dengan kelompok milisi. Dalam kesaksiannya di bawah sumpah dalam Audiensi Publik Nasional Komisi tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, dia mengatakan:

Saya dan teman-teman selalu memberikan informasi dan memberi tahu kekhawatiran kita kepada anggota sipil dan militer Gugus Tugas Indonesia. Kami sering bertemu dengan Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, yang menurut Jenderal Wiranto adalah utusan pribadinya di lapangan. Polisi sipil dan penghubung militer kami melakukan hal yang sama, di Dili dan di distrik. Informasi dan protes diberikan secara langsung kepada penasehat Jenderal Wiranto dan DEPLU oleh kantor UNAMET di Jakarta. Kalangan diplomatik yang mengamati situasi di Timor selalu diberi tahu. Setelah serangan di kantor UNAMET di Maliana dan terhadap konvoi kemanusiaan di Liquiça, saya terbang ke Jakarta untuk menyerahkan bukti kami langsung kepada Jenderal Wiranto tentang hubungan TNI dan milisi, pada pertemuan tanggal 7 Juli. Kekhawatiran

internasional saat ini mendorong Presiden Habibie untuk mengirim menterinya ke Dili, dimana saya dan teman-teman memberitahukan kekhawatiran kami kepada Menteri Luar Negeri Alatas.

Dewan Keamanan diberi informasi secara teratur berdasar laporan kami, dan Dewan Keamanan menekan Indonesia melalui pernyataan Ketuanya, dan melalui pertemuan Ketuanya dan wakil Indonesia. Kekhawatiran Sekertaris Jenderal diberitahukan secara terus-menerus di berbagai tingkat, oleh Utusan Pribadinya, Duta Besar Jamsheed Marker, dan oleh pejabat senior. Negara-negara utama, termasuk Amerika Serikat dan Australia, diberi tahu di New York, di Jakarta, dan ketika anggota senior pemerintah mereka mengunjungi Timor-Leste. Saya tidak tahu semua rincian megenai tekanan yang diberikan oleh setiap pemerintah kepada Indonesia, tetapi ada banyak tekanan.

Peran penting Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim

Dari bulan Mei 1999 Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim secara resmi menjadi anggota Gugus Tugas untuk mengawasi Konsultasi Rakyat di Timor-Leste dan dari bulan Juli 1999 dia menjadi kepala Tim Khusus/Ajudan Umum Gugus Tugas. Namundemikian Komisi berkesimpulan bahwa dalam kapasitas resmi Makarim terlibat dalam mengorganisir dan mengarahkan kelompok milisi Timor paling tidak dari bulan Maret 1999 dan kemungkinan lebih awal lagi.

Pernyataan mantan pemimpin pro-otonomi kepada Wakil Jaksa Agung urusan Kejahatan Berat menunjukkan bahwa Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, mengatakan kepada pemimpin pro-otonomi Timor pada bulan Maret 1999 bahwa Makarim

adalah orang yang akan bertanggung jawab mengorganisasir kegiatan-kegiatan sebelum Konsultasi Rakyat.

Pernyataan mantan pemimpin pro-otonomi kepada Wakil Jaksa Agung urusan Kejahatan Berat juga menunjukkan bahwa Makarim bertanggung jawab dalam mengorganisir pasokan senjata termasuk senjata otomatis kepada kelompok milisi, melalui Kolonel Suhartono Suratman, yang menjadi Komandan Korem di Timor Timur sampai tanggal 13 Agustus 1999.

Temuan dan Kesimpulan: Komisi menarik kesimpulan berikut:

1. Perwira senior TNI membentuk kelompok milisi, memberi mereka jaminan bahwa mereka akan didanai, dipersenjatai dan didukung oleh TNI, dan memberi tahu mereka bahwa mereka akan dipakai melawan pendukung pro-kemerdekaan.

2. Perwira senior TNI secara terbuka mendukung kelompok milisi dalam pertemuan akhbar serta pertemuan-pertemuan terbuka lain.

3. Personil TNI bertugas dalam kelompok-kelompok milisi ini. Beberapa kelompok milisi dipimpin oleh personil TNI

4. TNI mendanai milisi. Dana pemerintah juga dialihkan untuk membayar anggota milisi. Pembayaran yang secara teratur diberikan kepada ribuan anggota milisi memerlukan perencanaan, pengelolaan dan koordinasi, yang melibatkan baik pejabat militer dan sipil

5. TNI mempersenjatai milisi, dan bisa menggalang senjata secara

mudah.

6. TNI melatih milisi, di basis-basis resmi TNI dan lokasi lain.

7. TNI membiarkan kelompok milisi menggunakan markas militer sebagai basis mereka, termasuk sebelum dan sesudah pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran yeng melibatkan pembunuhan penduduk sipil.

8. Anggota TNI sering melakukan pelanggaran bersama anggota milisi sebagai bagian kerja sama.

9. TNI bisa mengatur insiden kekerasan semau mereka, termasuk tindakan milisi.

10. Dengan sedikit perkecualian TNI tidak melakukan tindakan terhadap anggota milisi yang melakukan pelanggaran, meskipun mum diketahui bahwa milisi membawa senjata secara terbuka, dan membunuh, menyiksa dan menganiaya penduduk sipil di depan personil TNI.

11. Personil senior TNI mengeluarkan ancaman dan peringatan bahwa kekerasan dan penghancuran harta benda secara masal akan terjadi setelah Konsultasi Rakyat, apabila pilihan merdeka menang. Kekerasan dan penghancuran benar-benar terjadi setelah Konsultasi Rakyat, sesuai peringatan.

12. Pejabat senior pemerintah Indonesia disarankan membuat rencana darurat yang meliputi evakuasi masal dan penghancuran fasilitas dan

aset utama, enam minggu sebelum tindakan ini dilakukan oleh TNI dan milisi.

13. Tingkat kekerasan dan penghancuran meningkat tajam setelah TNI diberi wewenang luas atas perkembangan di Timor-Leste, setelah pengumuman keadaan darurat pada tanggal 7 September 1999.

14. Anggota TNI, polisi dan pejabat pemerintah yang terlibat dalam pelanggaran tidak ditangkap atau dikenakan tindakan disiplin atas peran mereka sebagai pelaku.

15. Hampir tidak ada tindakan dilakukan untuk menghentikan pelanggaran, meskipun telah ada permintaan dari PBB dan negara-negara lain, dan kapasitas yang jelas-jelas ada untuk mematahkan resistensi milisi karena jumlah persenjataan dan personil yang jauh lebih besar dari TNI dan polisi.

16. Sejumlah perwira senior TNI yang memegang jabatan komando atas pasukan di Timor- Leste pada saat pelanggaran terjadi justru diberi penghargaan berupa promosi jabatan atas tindakan mereka di Timor-Leste, meskipun pasukan yang mereka bawahi terlibat dalam pelanggaran masal dan tidak memenuhi kewajiban mereka dalam memberikan keamanan di wilayah ini.

Kesimpulan:

Komisi berkesimpulan bahwa anggota senior pasukan keamanan Indonesia terlibat dalam perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan program yang termasuk pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis dan berskala

luas terhadap penduduk sipil Timor yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Para komandan senior ini memikul tanggung jawab langsung maupun tanggung jawab komando atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi.

Komisi berkesimpulan bahwa tujuan awal rencana yang diterapkan ialah untuk memastikan bahwa mayoritas penduduk Timor-Leste memilih tetap sebagai bagian dari Indonesia dalam Konsultasi Rakyat bulan Agustus 1999. Bagian integral dari rencana untuk mencapai tujuan ini ialah dengan menggunakan kelompok milisi Timor sebagai suruhan TNI, dalam upaya untuk mengelak tuduhan mengenai tanggung jawab TNI. TNI secara kelembagaan bertanggung jawab dalam membentuk, mempersenjatai, mendanai, mengarahkan tindakan kelompok milisi. Selain itu banyak pelanggaran dilakukan oleh anggota aktif TNI, baik sendiri maupun dengan kelompok milisi. Anggota polisi Indonesia dan pegawai pemerintah sipil juga terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam tindak pelanggaran secara sistematis. TNI, polisi dan pemerintah Indonesia semua terlibat dalam melindungi pelaku dari tanggung jawab atas tindakan mereka.

B. KESAKSIAN GEORGE JUNUS ADITJONDRO TENTANG PERAN WANANDI BERSAUDARA DI TIMOR LESTE

Dear David;

Sorry for the delay. I am really very busy preparing my new sillabi, as well as updating my 1994 book on East Timor, which will be published in Portugal this year.

Now about references on the Wanandis:

First, John Taylor, James Dunn, and Jose Ramos-Horta (Funu)'s books about East Timor all mention the role of Liem Bian Kie (or Jusuf Wanandi) and his CSIS (Center for Strategic & International Studies), a quasi-academic think tank, in defending Suharto's East Timor policy in the international arena.

Secondly, in the dossier published by the Catholic Institute for International Relations (CIIR) on the role of the Catholic Church in East Timor, there is a reference to Father Markus Wanandi, Jusuf Wanandi's younger brother, who works within the church in Dili as the main defender of the Indonesian occupation among the Indonesian Jesuits in Dili.

Thirdly, in the US, a company owned by the Wanandi family, Trailmobile Corporation in Charleston, Ill., became the target of union-and-East Timor solidarity activists, because they locked out 1,200 workers in January 1996. This is documented extensively in ETAN/US East Timor documents. I forgot which volume, but you can also contact the UPIE (United Paperworkers) in Nashville, TN, USA (phone: 615/834 8590; fax: 115/333-6667), for more info about the Gemala Group and what they did at Trailmobile. This Group is heavily involved in batteries, and own the formerly Japanese brand, Yuasa, as well as two formerly Australian/British brands, Exide and Century.

Fourthly, in the magazine, Asia, Inc., 1997 Special Issue on Who's Who of Business in Asia, page 66, you can read how rich and powerful the Wanandi family's Gemala Group is and its genesis. Annual sales of the group is estimated at more than US$ 1 billion. It belongs to the 15 most

powerful conglomerates in Indonesia. Interestingly, the closing paragraph on the Wanandi group in that business magazines states as follows:

"*The Wanandi brothers' army connections, and their support for the government's actions against opposition leader Megawati Sukarnoputri, led dissidents to call for a boycott of Gemala products in 1996*."

So, from all those references you can understand the 'division of labour' within the Wanadi family, to play their very powerful role in Indonesian politics and economics, domestically as well as internationally, which may equal the more notorious Lippo Group.

Jusuf Wanandi, the eldest of the Wanandi Brothers, a lawyer, is the politician who plays the role as an academic, especially a political scientist, to provide a quasi academic justification of what the regime is doing;

Sofjan Wanandi, Jusuf's immediate younger brother, an economist, is the family's business tycoon, and often plays the role as spokeperson of the top Sino-Indonesian business tycoons in Indonesia, who are organized under the Prasetya Mulia Foundation;

Marcus Wanadi, a Jesuit priest, played his role in trying to undermine the role of the Catholic church in East Timor (he has been moved back to the Loyola college of the Jesuits in Semarang, Central Java).

There are still other Wanandi brothers and sisters, and the second generation of the Wanandis are also beginning to play a role in the family's Gemala Group, but I do not have enough info — and time — to dig and explain their roles.

Apart from their role in supporting the annexation of East Timor, the Wanandi Brothers, through their close association with the two late generals who were the protectors of CSIS, (Generals Ali Murtopo and Sudjono Humardani), they have also played a damaging role in Indonesia's political system. They were the ones, when those two late generals were still trusted advisers of Suharto, who masterminded the destruction of the existing political parties in Indonesia, to create the current system of Golkar as the ruling party, with a Muslim party (PPP) and a non-Muslim party (PDI) as figurants in this Javanese shadow puppet play.

The CSIS clique of General Ali Murtopo was also responsible for eliminating religion, cq Islam, as an ideological platform for Indonesian political parties, which has caused a lot of animosities among Indonesian Muslims, which culminated in the September 1986 uprising in the Tanjung Priok harbour of Jakarta, where about 200 Muslim activists were gunned down by the Indonesian Army, using American (M-16) and Israeli (Uzi) weapons. This Tanjung Priok massacre is actually trhe predecessor of the November 1991 Santa Cruz massacre.

For more info about the Tanjung Priok massacre, read Douglas E. Ramage, Politics in Indonesia: democracy, Islam and the ideology of tolerance (1995, Routledge); and Michael R.J. Vatikiotis, Indonesian politics under Suharto: oder, development, and pressure for change (1994, Routledge).

The CSIS clique, although dominated by (right-wing) Catholics, was also very intolerant towards Indonesian Catholics, who did not want to yield all their power to the military-backed Golongan Karya (Golkar) ruling party. But with the buldozing tactics of Golkar in the early 1970s, enforced by the then Minister of Interior, the late General Amir Macmud, all the

branches of the Catholic Party in Indonesia (which was strong in Nusa Tenggara Timur — West Timor & Flores) were crushed, and many priests and bishops who were critical and were still symphatetic to the Catholic Party, were harassed by the local military commanders. So you can say, that the harassments of the Catholic church in East Timor now, has found its predecessor in the experiences of the Catholic Church in West Timor and Flores in the 1970s. And ironically, the late bishop of Atambua in West Timor, who gave his blessing to the "integration' of East Timor into Indonesia in 1975, two years later began to have 'problems' with the local military commander, for his opposition against the freedom of Indonesian Catholics to choose their own party, instead of Golkar.

The CSIS role is also responsible for the way Indonesia has aborted the chance of the West Papuan people to excert their right to self-determination in the 1969 'Act of Free Choice', which was agreed upon by Indonesia and the Netherlands in the 1962 New York agreement, brokered by the US diplomat, Ellsworth Bunker. It was the CSIS clique who recruited many young Catholic activists (many of them my friends in the Indonesian Catholic Student Association, PMKRI) to carry out the subversive operation of General Ali Murtopo, Operasi Khusus (Opsus), which tried — with sticks as well as carrots — to win over the West Papuan leaders to Indonesia. The result of that operation was that 'strangely anough', 100% of the West Papuan leaders chose to join Indonesia in an excercise which rejected the 'one person one vote' principle, because the West Papuans were considered not sophisticated enough to understand that system, and only relied on their leaders (who had already been screened by the Indonesian military).

The CSIS clique is also responsible for the Japanese economic domination in Indonesia, because their economic doyen in the 1970s, General Sudjono Humardani, was the one Suharto had trusted to woo Japanese foreign investment into Indonesia. That is why the CSIS clique was also involved in masterminding some of the burnings during the anti-Tanaka riots in January 1974, to discredit Ali Murtopo's rival, General Sumitro, as well as to discredit the student movement, who were very critical of the role of Suharto's special advisors (Ali Murtopo & Sudjono Humardani, in particular), foreign investment (especially Japanese foreign investment, which was so pervasive in all layers and sectors), and the domination of this right-wing Catholic clique in Golkar.

I am saying this as a former Tempo journalist who has closely observed the political restructuring process in the 1970s, as an alumnus from the right-wing Catholic cadre training programme, KASBUL (Kaderisasi Sebulan), which was run by a right-wing Dutch Jesuit, the late Father Beek, spiritual (and intellectual) father of the Wanandi Brothers, as an early critic of the CSIS, as a person who has studied the Indonesian political system thoroughly at Cornell (1981 -1982, 1987-1989, 1991-1992), as a person who has tried to build bridges with Muslim organizations and activists (during my student activist and journalist days), and as a person who has tried to build bridges between 'mainstream Indonesians' and the Papuan and East Timorese intellectuals.

So, in a nutshell, Jusuf Wanandi and the two brothers about whom I have enough knowledge, Sofjan Wanandi and Markus Wanandi, are certainly not democrats, but rather three of the most effective destroyers of democracy in Indonesia (apart from the military and many other civilian anti-democrats). They are very right wing, they have certainly approved if

not supported the anti-leftist purge in Indonesia in 1965-1966, and unlike some others of that generation, are still very proud of that ‘achievement,’ then they also showed their very anti-Muslim attitude, by destroying the original Muslim parties and thereby had to destroy also the Christian political parties, and then they played a very important role in crushing nationalist feelings among the West Papuan and the Maubere peoples.

How can persons, who are so much afraid of the people (Indonesian, West Papuan, and Maubere), call themselves democrats?

Hence, I strongly support Jose Ramos-Horta’s to become a co-member of a forum of pro-democracy leaders, which include Jusuf Wanandi. I hope that this will answer your question, and hopefully, all the persons to whom I have carbon-copied this letter, may further verify — or disagree with — what I have said,

Dr. George J. Aditjondro

http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/02/11/0071.html

BAB VI
CSIS DAN PETRUS

Di bawah ini adalah cerita Jusuf Wanandi mengenai apa yang disebut sebagai petrus yang disarikan dari otobiografinya berjudul Menyibak Tabir Orde Baru, Memoar Politik Indonesia 1965-1998 terbitan Kompas Gramedia, Salim Said dalam otobiografinya berjudul Dari Gestapu Ke Reformasi, Serangkaian Kesaksian terbitan Mizan dan Robert Edward Elson, Suharto: Sebuah Biografi Politik terbitan Pustaka Minda Utama.

Setiap ada masalah keamanan, nama Benny Moerdani selalu mencuat. Contohnya tentang kasus penembakan misterius (petrus). Ini adalah istilah Orde Baru untuk serangkaian pembunuhan misterius pada awal tahun 1980-an ketika ratusan, malah mungkin ribuan, orang dieksekusi. Pembunuhan mulai terjadi di Jogjakarta, Maret 1983, ketika Komandan Kodim Letkol M. Hasbi melakukan pembasmian terhadap para preman, kemudian mayat-mayat para tokoh kriminal yang dibunuh ditemukan di tempat-tempat umum; tak lama kemudian gejala yang diberi akronim Petrus (Penembak Misterius) meluas ke Jakarta dan kota-kota lainnya di Jawa serta luar Jawa (R.E. Elson halaman 454). Mereka sudah diluar kendali, menyerbu pesta perkawinan dan merampok para tamu. Harus ada gebrakan untuk menghentikannya (Jusuf Wanandi, halaman 296).

Anggota pelbagai geng ini umumnya adalah para residivis. Setelah ikut memenangi pemilu, mereka merasa sebagai pahlawan bagi pemerintah dan Golkar sehingga boleh berbuat semaunya. Ketika Letkol. M. Hasbi memulai gerakan membasmi mereka, dan tampak berhasil, gebrakan ini diikuti oleh daerah-daerah lain. Benny Moerdani menganggap langkah ini

efektif dan mengambil alih untuk diberlakukan di seluruh Indonesia (Salim Said, halaman 283). Mungkin beberapa ribu preman telah berhasil dihabisi nyawanya (Jusuf Wanandi, halaman 296).

Pembunuhan terhadap para preman tetap misterius karena pemerintah, setidaknya pada awal peristiwa, tidak bersedia berkomentar. Setelah banyak korban dan protes dari luar negeri yang dirasakan mulai "mengganggu" pusat kekuasaan di Jakarta, Moerdani tampil di depan pers (Salim Said, 283). Benny Moerdani merujuk kematian beruntun tersebut pada perkelahian antar geng atau karena mereka melakukan perlawanan ketika ditangkap-meski masyarakat banyak yakin bahwa pasukan keamanan main hakim sendiri dalam upaya mengurangi tingkat kriminalitas yang membumbung yang ikut marak mengikuti pembangunan perekonomian serta penggusuran-penggusuran di kota-kota Indonesia yang padat penduduk itu (R.E. Elson halaan 454). Benny tidak pernah mengakui kepada siapa pun apa yang sebenarnya terjadi. Ia tahu bahwa ini sebuah preseden buruk dan dia tahu juga bahwa sesuatu yang buruk seperti ini sebaiknya tidak diungkap (Jusuf Wanandi, halaman 297). Tapi dalam memoarnya yang terbit tahun 1989, Soeharto mengakui keterlibatan pemerintah dalam pembantaian tersebut. Sebagai "terapi kejut", menurut sang Presiden. Moerdani yang menjabat Menteri Pertahanan ketika buku tersebut terbit, sangat kesal. Dia merasa dipermalukan oleh atasannya (Salim Said, halaman 283).

Yang tidak banyak diketahui waktu itu adalah penembakan misterius tersebut ditengarai juga sebagai mempunyai dimensi politik. Konon banyak penjahat yang dibantai itu tadinya adalah para kriminal yang dibina Opsus pimpinan Ali Moertopo. Kelompok kriminal yang di Jawa Tengah dikenal sebagai Gabungan Anak Liar/Gali tersebut terutama dipakai pada

kampanye pemilihan umum untuk meneror saingan-saingan politik pemerintah. Di kemudian hari, Opsus tidak mampu mengendalikan para kriminal binaannya itu dan para Gali mulai mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Karena itulah operasi pembantaian para kriminal tersebut juga ditafsirkan sejumlah wartawan dan pengamat pada masa itu sebagai usaha pembersihan kaki tangan Ali Moertopo. Kemudian terungkap bahwa preman-preman itu memang dipekerjakan untuk memenangkan Golkar dalam kampanye Pemilu 1977 dan 1982, sebagai yang ditulis oleh Jusuf Wanandi dalam memoarnya, Shades of Grey (Salim Said 284).

Jusuf Wanandi kepada Bill Tarrant (Reporting Indonesia, halaman 69) mengakui temuan Salim Said di atas:

"*But the truth was far different, as so ofter was the case in the opaque political world of Suharto's Indonesia. Jusuf Wanandi, in an interview's a quarter-century later, told me that the campaign originated because the military wanted to exterminate part of Murtopo's zoo – the thugs hired in the 1982 election campaign to disrupt opposition rallies.*"

Bahwa petrus adalah pembersihan agen-agen Ali Moertopo dari CSIS sudah dicurigai oleh RE. Elson, penulis biografi Presiden Soeharto sejak tahun 2000:

"*Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa sasaran utama dari kampanye Petrus itu adalah penjahat kelas teri dan tukang pukul yang sebelumnya menjadi agen-agen Ali Moertopo untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan keamanan, namun yang kemudian memiliki potensi*

mempermalukan pemerintah atau sudah tidak berguna lagi, atau ternyata tidak dapat dipakai untuk tujuan-tujuan baru Murdani.

Namun, tidak ada bukti jelas akan pendapat ini, dan pendapat tentang perlunya rezim Orde Baru memberlakukan kedamaian berdasarkan versinya sendiri menjadi masuk akal dan sejalan dengan etos yang berlaku bahwa individu pada dasarnya mesti tunduk pada kebutuhan masyarakat. Tak dapat diragukan lagi bahwa pihak keamanan seluruhnya terlibat dalam operasi tersebut; operasi yang menelan korban 5.000 hingga 10.000 orang sebelum diakhiri pada awal 1985."

(R.E. Elson, halaman 456)

BAB VII
CSIS DAN TANJUNG PRIUK

A. KEJAHATAN KLIK CSIS DI TANJUNG PRIUK

Wawancara Abdul Quadir Djaelani: “Peristiwa Tanjungpriok Tak Lepas dari Rekayasa Militer” RODA hidup akhirnya berputar bagi Abdul Quadir Djaelani. Setelah belasan tahun berdiam di bui, ia pindah ke salah satu lokasi paling terhormat di negeri ini: Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Di lantai 22, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Bulan Bintang ini berkantor sejak November 1999. Tampil dalam setelan jas warna gelap dalam kegiatan harian di kantor wakil rakyat itu, penampilan Abdul Quadir, 62 tahun, lebih mirip seorang eksekutif ketimbang pria yang pernah dibalut masa lalu penuh kekerasan: dijadikan buron, digebuk dalam tahanan, dan menghuni penjara.

Ayah delapan anak ini lahir di Jatipadang, Pasarminggu, Jakarta Selatan, pada 1938. Sejak remaja, ia sudah menunjukkan minat yang besar pada agama. Masa kecil dan remaja ia habiskan dengan berkelana dari masjid ke masjid. “*Saya banyak tidur di masjid sembari belajar mengaji*,” ujarnya. Ustad yang dikenal radikal dalam prinsip-prinsip agama ini juga mendidik anak-anaknya dengan keras, terutama dalam hal agama. “*Ia pukul anaknya yang tak mau salat*,” tutur Lis, istrinya, kepada TEMPO, sekali waktu.

Radikal dalam agama tidak hanya membuatnya kerap berbenturan dengan rezim yang berkuasa, tapi juga mengantarnya ke gerbang penjara. Pada 1960-saat menjadi Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia (PII) Jakarta-ia ditahan karena menyebar pamflet antikomunis selepas salat Idul Adha di

Lapangan Ikada, Jakarta Pusat. Pada 1963, ia kembali masuk tahanan sampai meletus peristiwa G30S. Pada 1973, Abdul Quadir kembali lagi ke “hotel prodeo”.

Saat itu, sebagai Ketua I Gerakan Pemuda Islam (GPI), ia memimpin demonstrasi menentang pelaksanaan Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang bersifat monogami. Ia sempat jadi buron selama empat bulan, hidup berpindah-pindah antara Garut, Cirebon, dan beberapa tempat lain. Kakek tujuh cucu ini kembali masuk penjara selama 2 tahun 6 bulan. Kali ini karena ia menentang masuknya aliran kepercayaan, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ke dalam GBHN 1978.

Namanya kembali mencuat secara nasional ketika pecah peristiwa berdarah Tanjungpriok, 12 September 1984. Abdul Quadir mengaku tak terlibat secara langsung. “Saya orang yang dikorbankan dalam kasus Tanjungpriok,” kata jebolan Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta ini. Toh, peristiwa itu pula yang mengantarnya ke penjara selama 13 tahun sejak 1985. Perguruan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) yang ia pimpin ditutup pemerintah-tapi dibuka kembali pada 1993-menyusul kerusuhan tersebut karena dianggap menjadi “sarang pengacau”.

Saat diadili dalam kasus Tanjungpriok pada 1985, Abdul Quadir membuat pembelaan setebal 500 halaman yang diberi judul “Musuh-Musuh Islam Melakukan Serangan Ofensif terhadap Islam”. Pembelaannya ini kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku. Era reformasi mempercepat masa hukumannya-ia menjalani “hanya” 13 tahun dari vonis hukuman penjara 18 tahun. Kini, di sela-sela kegiatan sebagai anggota DPR, Abdul Quadir tetap giat melakukan dakwah.

Dua pekan lalu, di Kompleks DPR RI Kalibata, Jakarta Selatan, ia menerima wartawan TEMPO, Setiyardi, untuk sebuah wawancara khusus. Petikannya:

Komisi Penyidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) untuk peristiwa Tanjungpriok dibentuk pekan silam. Apa komentar Anda?

Peristiwa itu (Tanjungpriok) sampai kini masih jadi tanda tanya buat saya. Tapi, kalau dimintai bantuan, saya sudah menyiapkan data cukup banyak, dari data jumlah korban sampai kemungkinan lokasi kuburan massal.

Anda punya data yang membuktikan kuburan massal?

Memang sangat sulit. Jasad mereka sudah jadi debu. Tapi kami bisa memberikan nama-nama saksi mata. Orang-orang ini melihat truk yang mengangkut mayat korban tembakan tentara dalam peristiwa Tanjungpriok, 12 September 1984. Secara pribadi, saya membuat investigasi tentang kerusuhan di Priok selama 13 tahun di penjara. Ini saya lakukan karena kedekatan saya dengan Amir Biki (tokoh di Tanjungpriok).

Apa saja yang Anda temukan dari investigasi tersebut?

Ada seorang korban bernama Yusron yang ikut tertembak. Oleh tentara, ia dikira sudah mati. Tubuhnya ditumpuk bersama mayat-mayat di atas truk, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto. Saat akan dimasukkan ke kamar mayat oleh perawat, Yusron bangun. Ia dirawat dan tiga butir peluru di tubuhnya bisa dikeluarkan. Dari Yusron, saya tahu bahwa mayat-mayat korban tembakan dikubur di beberapa tempat seperti Cogrek (Kampungrambutan), Slipi, dan ada yang

dibakar di krematorium Cilincing.

Penjelasan resmi Jenderal Benny Moerdani-Pangab dan Pangkopkamtib ketika itu-pada 13 September 1984 menyebutkan "*9 orang meninggal dan 53 luka-luka karena terkena tindakan tegas aparat maupun akibat kerusuhan itu sendiri*..." (TEMPO, 22 September 1984). Sementara itu, penjelasan Anda memberi kesan banyak sekali yang meninggal?

Peristiwa Tanjungpriok tidak bisa dilepaskan dari rekayasa penguasa militer pada waktu itu-yang dipimpin Jenderal Benny Moerdani. (Dalam bukunya, Benny Moerdani; Profil Prajurit Negarawan, halaman 503, Benny menegaskan bahwa tak pernah ada niat pemerintah memojokkan umat Islam. Sebaliknya, sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan mengatasnamakan umat, selalu berusaha memperuncing situasi dan membakar emosi.)

Anda punya alasan tertentu?

Laporan tentang rencana tablig akbar dan demonstrasi di Tanjungpriok-Rabu, 12 September 1984-itu sudah masuk ke pihak intelijen Kodam sebelumnya. Apalagi, kegiatan itu berlangsung malam hari. Jadi, seharusnya pihak keamanan mengambil tindakan preventif-seperti yang pernah kami alami saat melakukan apel akbar soal jilbab di Lapangan Bomber, Rawasari, pada 1983.

Apa yang terjadi saat itu?

Rencana apel akbar itu bocor ke pihak Kodam Jaya sehingga semua panitia dan kiai yang akan memberikan ceramah diciduk pihak Kodam. Yang akan

memberikan ceramah adalah saya, Idrus Jamalulail, dan Tony Ardie. Namun, lapangan lantas diblokir tank baja dan digunakan untuk tempat latihan tentara. Otomatis, massa tidak bisa masuk ke sana.

Apa relevansinya membandingkan kasus Lapangan Bomber dengan peristiwa Tanjungpriok?

Saya membandingkannya tatkala diadili dalam kasus Tanjungpriok. Saya kemukakan keheranan saya mengapa pihak keamanan tidak menerapkan tindakan yang sama terhadap kasus Tanjungpriok. Jadi, pihak keamanan memang sengaja "membiarkan" kasus Tanjungpriok itu terjadi. Seharusnya, kalau mau serius, tangkap saja tokoh-tokohnya seperti Amir Biki, Syarifin Maloko, Salim Qodar, dan lain-lain.

Lo, apa keuntungan pihak keamanan dengan membiarkan kerusuhan Tanjungpriok terjadi?

Mereka bisa memanfaatkan peristiwa Tanjungpriok untuk menghabisi orang-orang yang tidak disukai. Ceramah dilakukan pada pukul 10-12 malam. Saat itu, yang memberikan ceramah adalah Amir Biki, Syarifin Maloko, Yayan, dan Salim Qodar. Setelah ceramah, mereka melakukan demonstrasi dengan cara berjalan kaki menuju Kodim yang jaraknya sekitar 1,5 kilometer dari tempat ceramah. Baru sampai di depan kantor polisi di daerah itu, jamaah dicegat oleh pasukan keamanan. Penembakan terjadi setelah itu.

Di mana Anda berada ketika peristiwa itu terjadi?

Di rumah saya di Leuwiliang, Bogor. Saat itu, petugas dari Kodim

menunggui saya di depan rumah. Malam saat terjadinya peristiwa, saya diciduk petugas Kodim di rumah saya di Leuwiliang.

Dengan alasan apa Anda ditangkap?

Pada zaman Orde Baru, setiap bulan saya ditangkap oleh aparat. Petugas Kodim yang datang ke rumah saya di Leuwiliang malam itu adalah petugas yang biasa menangkap saya. Dengan dia, saya bahkan sudah biasa ber-”elu-gue”.

Apakah betul Anda menjadi salah satu “otak” peristiwa Tanjungpriok?

Itu yang ditulis media massa pada waktu itu-termasuk TEMPO. Padahal, saya tidak terlibat secara langsung. Setelah ditangkap, saya langsung dibawa ke Guntur (Markas Pomdam Jaya). Mobil yang membawa saya sudah ada di depan rumah sejak pukul 22.00, sedangkan peristiwa Tanjungpriok kan terjadi pukul 23.00. Jadi, penangkapan itu benar-benar sudah direncanakan.

Bagaimana proses pemeriksaan di Guntur?

Kepala saya digunduli. Tiga orang prajurit Corps Polisi Militer (CPM) tidak bertanya apa-apa. Saya cuma ditendang ke sana kemari seperti bola. Padahal, mereka memakai sepatu lars. Aduh, prajurit-prajurit itu kan sedang gagah-gagahnya. Akibatnya, selama tiga bulan di Guntur saya tidak bisa tidur dengan posisi miring. Rasanya tulang rusuk saya hancur di dalam, walau di luarnya tidak berbekas.

Anda ditahan bersama siapa?

Dengan sekitar 400 orang lain dari Tanjungpriok. Pada malam hari, kami semua ditelanjangi, kemudian disuruh merangkak dan jalan jongkok di lapangan tanpa mengenakan pakaian. Peristiwa penganiayaan-yang terjadi empat hari setelah saya ditangkap-ini pernah saya ungkapkan di pengadilan, tapi tak ada tanggapan apa-apa.

Apakah ada yang disiksa sampai mati?

Saya tidak tahu karena kemudian saya dipindahkan ke Rumah Tahanan Militer (RTM) di Cimanggis-yang dibangun sebagai pengganti RTM Boedi Oetomo, yang digusur. Saya adalah tahanan pertama yang merasakan RTM Cimanggis. Saya tinggal di sana selama sekitar satu tahun. Sepertinya, saya diisolasi dari kawan-kawan. Mungkin karena saya dianggap bisa memengaruhi mereka.

Dari tahanan, Anda diadili dan masuk bui. Apa alasan resmi pengadilan terhadap Anda?

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan juga di pengadilan, tidak ada secuil kalimat pun yang bicara soal Tanjungpriok. Media massa menyebut saya otak peristiwa Tanjungpriok. Padahal, saya diadili karena saya menolak asas tunggal Pancasila dalam Undang-Undang Keormasan. Aparat intelijen menyita 42 kaset rekaman ceramah saya di berbagai tempat.

Lantas, mengapa Anda dihubungkan dengan kasus Tanjungpriok?

Mungkin karena saya sangat dekat dengan Amir Biki. Dia kerap meminta saya memberi ceramah. Kami sahabat dan sudah seperti saudara. Dia tokoh yang sangat disegani di Tanjungpriok. Dia kenal banyak orang di pemerintahan, termasuk orang-orang Kodam. Menurut saya, pemerintah memanfaatkan kasus Tanjungpriok untuk menciduk dan menghukum orang-orang yang tidak disukai. Saya satu-satunya orang yang dituntut hukuman mati. Rupanya, pihak kejaksaan masih menunggu instruksi. Akhirnya, saya divonis 18 tahun penjara. Saya menjalaninya "cuma" 13 tahun.

Apa aktivitas Anda di penjara?

Saya dibui di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang. Di sana ada sekitar 1.500 tahanan. Tiap hari, saya mengajar para tahanan-terutama yang kriminal-tentang salat, puasa, dan pengetahuan agama lainnya. Selain itu, saya menulis buku-buku agama Islam.

Bukankah Anda juga pernah dihukum karena ingin membakar Gedung Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Tanahabang?

Ya, saat itu tahun 1978. Saya memerintahkan 33 orang untuk membakar Gedung CSIS. Semua orang berikut bensinnya ditahan polisi. Kemudian, mereka dibebaskan karena saya yang bertanggung jawab. Dalam kasus ini, saya dihukum selama 2 tahun 6 bulan.

Memangnya ada perseteruan apa antara Anda dan CSIS?

Saya punya sejarah panjang dengan lembaga itu. Saya tahu “permainan” mereka, yang menganggap umat Islam sebagai penghalang pembangunan nasional.

Kembali ke soal Tanjungpriok. Jenderal Rudini pernah menyatakan-saat itu sebagai KSAD-bahwa pelaku peristiwa Tanjungpriok adalah orang-orang PKI (TEMPO, 29 September 1984). Bagaimana pendapat Anda?

Itu komentar yang asal omong saja. Saat itu, tokoh-tokoh PKI masih ada di penjara. Bahkan, yang masuk golongan B (golongan pelaksana, bukan otak G30S) belum dibebaskan. Kalau Rudini menuduh orang-orang seperti saya, Amir Biki, dan Syarifin Maloko sebagai orang PKI, banyak orang tentu akan tertawa. Dalam sebuah pidato di Masjid Al-Furqon, Kramat Raya, Jakarta Pusat, saya tegas-tegas menolak tuduhan komunis itu.

Kabarnya, Anda cukup dekat dengan kalangan tentara pada masa itu-antara lain Ali Moertopo?

Awal-awalnya saya memang melakukan kerja sama dengan Ali Moertopo. Saat itu dia masih berpangkat letnan kolonel. Dulu, untuk melawan komunis, tentara dan umat Islam bergabung. Waktu itu, saya sering mengadakan rapat dengan Ali Moertopo di Kantor Opsus, Jalan Raden Saleh, Jakarta. Sebetulnya, kantor itu miliknya Pater Beek. Namun, pada 1967, saya pisah dengan Ali Moertopo. Saya sadar, ia sangat berbahaya bagi Islam.

Menurut Anda, siapa yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa Tanjungpriok?

Secara struktural, jelas Pangab L.B. Moerdani, Pangdam Jaya Try Sutrisno, dan Dandim Sibutar-butar. Saat itu, masih ada lembaga Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Jadi, polisi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.

Bagaimana Anda melihat militer, khususnya setelah peristiwa Tanjungpriok?

Secara institusi, saya tidak pernah dendam. Tapi orang-orang yang menyebabkan peristiwa Tanjungpriok harus diadili.

Sebetulnya bagaimana hubungan Anda dengan ABRI/TNI? Ibaratnya, Anda bolak-balik "dihajar" tapi terus membela ABRI/TNI?

Saya membedakan antara militer sebagai institusi dan orang-orang yang memimpin. Kalau sekarang saya membela, itu institusi militer yang saya bela. Tidak ada negara mana pun di dunia ini yang tidak butuh tentara. Dulu, yang saya lawan adalah orang-orang di tentara seperti Jenderal Benny Moerdani, Laksamana Sudomo, M. Panggabean.

Apa bedanya dengan para pimpinan TNI yang kemudian? Semua tentara bekerja dengan etos dan prinsip yang sama, kan?

Jelas beda. Panggabean, Benny Moerdani, dan Sudomo tidak suka dengan kelompok Islam. Pada zaman mereka, demonstrasi langsung berhadapan

dengan moncong senjata, seperti kasus Tanjungpriok itu. Sedangkan pada zaman Feisal Tanjung dan Wiranto, demonstrasi dihadapi dengan tameng.

Masa? Waktu peristiwa Semanggi tahun silam, mahasiswa kan ditembaki tentara yang bersenjata?

Pernah saya diajak diskusi oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Kantor PBNU. Ternyata pesertanya kebanyakan dari Forum Kota (Forkot). Mereka bilang, tentara sama saja, mahasiswa ditembaki di Semanggi. Saya bilang, itu lain. Tentara menembak karena mahasiswa sendiri melawan dengan bom molotov.

http://setiyardi.wordpress.com/2009/04/03/wawancara-abdul-quadir-djaelani-peristiwa-tanjungpriok-tak-lepas-dari-rekayasa-militer/

BAB VIII
CSIS DAN KUDATULI

A. TEMPO: MEGAWATI SUDAH TAHU AKAN TERJADI PERNYERBUAN KE KANTOR PDI

26 Juli 2004 Diponegoro 58, Suatu Hari pada 1996

Di ujung lain telepon, Soesilo Muslim melapor dengan terburu-buru. Wakil Komandan Satgas PDI pro-Mega itu melaporkan adanya serangan terhadap kantor PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, tempat ia sedang berada. Suara teriakan dan benda-benda beradu nyaris menenggelamkan suaranya. Pesan yang tertangkap, Muslim mengaku baru saja menolak tawaran Komandan Kodim dan Kepala Polres Jakarta Pusat yang memintanya menyerah dan meninggalkan kantor itu.

Dari Kebagusan yang sejuk, Megawati memberi perintah. "*Pak Muslim, Bapak tetap di tempat dan jangan melakukan apa-apa*." Gagang telepon kembali diletakkan. Sebentar berlalu, Ricardo, seorang staf pribadi Megawati, datang ke rumah yang asri itu. Megawati, yang masih memakai daster warna krem, memanggilnya. "*Kamu temani saya di sini*," permintaan Mega kepada Ricardo, yang kini menjadi Wakil Sekjen Partai Nasionalis Bung Karno (PNBK).

Ricardo, yang menceritakan kembali kejadian nahas itu, mencoba menghubungi nomor telepon ruang ketua umum di Jalan Diponegoro. Seorang satgas dari Papua mengangkatnya dengan napas memburu. Belum lagi obrolan dimulai, terdengar suara pintu yang somplak karena didobrak.

Satgas itu langsung melompat melemparkan gagang telepon yang kemudian jatuh lemas. Ricardo masih bisa mendengar suara tendangan dan pukulan yang menghantam segala benda di ruang itu. Sesekali terdengar jeritan orang-orang digebuk. Kengerian yang didengar lewat telepon itu terdengar hingga beberapa menit hingga akhirnya, tuuut?, hubungan terputus.

"*Ini keadaannya sudah enggak bener, Mbak*," kata Ricardo kepada Megawati, yang tampak makin gelisah. "*Sekarang saya mau bilang apa, mau ngapain? Sudah, kamu temani saya di sini*," jawab Mega. Sang empunya rumah kemudian memerintahkannya memusnahkan dokumen yang kira-kira tidak baik, begitu istilah yang dipakai. Ricardo segera naik ke lantai dua. Mesin penghancur kertas tangkas merajam dokumen dari tumpukan kertas di ruang itu.

Jarum jam seakan bergerak lebih lambat, sementara dering telepon makin sering terdengar. Tak lama kemudian satu per satu para tokoh pendukung Megawati mulai berdatangan. Mulai dari Sophan Sophian, Mangara Siahaan, Dimyati Hartono, Eros Djarot, dan beberapa tokoh lainnya. Beberapa di antara mereka melaporkan suasana terakhir di Jalan Diponegoro.

Semua yang hadir mendesak Megawati agar segera turun ke lapangan, sementara Megawati tidak memberi komentar sedikit pun. Semua yang hadir menangis. Wajah lelah mereka makin tampak kuyu. Mereka tidak akan berpikir dua kali jika Megawati memerintahkan serangan balik. "*Kita semua sudah stay di Kebagusan*," kata Eros.

Setelah lama menanti tidak tahu apa yang harus dikerjakan, satu per satu tetamu itu meninggalkan Kebagusan sekitar pukul tiga sore. Tiba-tiba sebuah pesan melalui faksimile yang berisi daftar korban masuk ke Kebagusan. Alamat pengirimnya kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), yang letaknya hanya seratusan meter dari kantor PDI yang telah diambil alih. "*Entah siapa yang mengirim, karena saya tahu saat itu LBH sudah diduduki militer*," kata Ricardo.

Pesan itu menyebut ada 59 orang menjadi korban. Namun, tidak jelas apakah ada korban yang meninggal. Membaca laporan itu, Mega meminta stafnya menghubungi orang-orang yang dikhawatirkan menjadi korban. Ternyata pesan itu bukanlah satu-satunya. Menjelang petang, mesin faksimile terus-menerus memuntahkan pesan yang dikirim dari segala penjuru, mulai data korban dari berbagai versi, ucapan simpati, sampai sekadar kalimat-kalimat pemompa semangat. Namun suasana di Kebagusan tetap tenang.

Jumlah korban masih simpang-siur. Tiga bulan kemudian, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut korban tewas hanya lima orang, itu pun terjadi di luar gedung. Namun sejumlah saksi mata meyakini korban di dalam gedung bisa mencapai belasan orang. Orang pun berandai-andai. Kalau saja Megawati tahu penyerbuan akan terjadi hari itu, mungkin jatuhnya korban bisa dihindari.

Namun, banyak yang meragukan Megawati tidak tahu peristiwa itu bakal terjadi. Salah satunya Alex Widya Siregar, saat itu menjadi Wakil Bendahara PDI versi Soerjadi yang mengaku bertanggung jawab atas penyerbuan itu. Pada 21 Juli, Alex merekrut Sena Bela, yang mengaku sebagai koordinator preman, di Kebun Raya Bogor. Sena ternyata gagal

membuktikan janjinya membawa 5.000 preman untuk membantu penyerbuan. Alex yang marah kemudian mengusir Sena. Sena ternyata langsung membelot ke kubu Mega dan membocorkan rencana penyerangan itu.

Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), R.O. Tambunan, mengatakan Megawati pernah berterus terang kepadanya. Saat itu Mega mengaku mendapat informasi penyerbuan akan dilakukan pada hari Sabtu dari seorang mantan petinggi militer. "*Benny Moerdani. Dia telepon saya*," kata Tambunan menirukan ucapan Megawati. Bahkan dalam persidangan kasus korban 27 Juli, yang berlangsung setahun setelah peristiwa penyerangan, Megawati juga mengaku sudah tahu rencana tersebut sebelum hari penyerangan.

"*Dia (Megawati) sudah tahu dua hari sebelumnya*," kata Eros Djarot, yang kini mendirikan PNBK. Bahkan anak-anak pergerakan yang terlibat panggung demokrasi di Jalan Diponegoro juga sudah tahu. Makanya, sejak pukul dua malam, Eros memerintahkan mereka keluar dari Diponegoro. Namun ada pula yang tinggal, seperti Albert, yang akhirnya harus mereparasi kulit kepalanya yang sobek.

Haryanto Taslam, yang saat itu menjabat Wakil Sekjen DPP PDI, menguatkan pernyataan Eros. Menurut dia, malam itu pimpinan PDI mengalihkan koordinator keamanan dari Mangara Siahaan ke Soesilo Muslim, mantan Mayor Kopasgat (Komando Pasukan Gerak Cepat). "*Ketika itu dia (Soesilo) sudah kontrak mati*," kata Taslam. Hanya, serangan yang diduga akan terjadi tengah malam ternyata molor hingga pagi hari. Akibatnya, saat serangan terjadi, semua anggota satgas baru saja tidur setelah berjaga sepanjang malam.

Para tokoh yang saat itu berada di sekitar Mega ini akhirnya harus menelan kekecewaan. Taslam dan Eros masih ingat para korban yang tergabung dalam Forum Komunikasi Korban 124 saat bertemu Megawati menanyakan sikap dan tanggung jawab partai terhadap para korban peristiwa itu. Pertemuan itu terjadi April 2000, saat Megawati sudah jadi wakil presiden.

Ternyata jawaban Megawati di luar dugaan, termasuk Taslam, yang waktu itu diminta menemani sebagai fungsionaris PDI Perjuangan. Megawati balik bertanya pada para korban, "*Siapa suruh kalian datang ke Diponegoro? Siapa suruh kalian membela saya*?" begitu Taslam menirukan kalimat Megawati. Para korban kehilangan kata-kata. Mereka langsung menangis. Ternyata Fraksi PDI Perjuangan sendiri tidak mendukung langkah pengungkapan kasus ini.

Eros juga merasa heran dengan sikap Megawati ini. Menurut dia, setelah peristiwa 27 Juli itu Megawati selalu berusaha menghindar melewati kantor yang menjadi simbol perjuangan PDI tersebut. Bahkan hingga dua minggu menjelang Sidang Umum MPR 1999, Megawati masih menitikkan air mata saat terpaksa melintas di depan kantor tersebut. "*Saya tidak ngerti, apa artinya air mata itu?*" tanya Eros.

Sayangnya, permohonan TEMPO untuk mewawancarai Presiden Megawati belum mendapat jawaban hingga berita ini ditulis. Namun Sekjen PDI Perjuangan, Sutjipto, memastikan Megawati tidak tahu hari penyerbuan itu. Dia mengaku sebagai orang pertama yang tersinggung kalau memang Megawati membiarkan peristiwa itu terjadi. "*Kalau ancaman-ancaman (akan ada serangan) yang diterima sebelumnya itu kan biasa,*" ujarnya.

“Misteri Diponegoro pun belum terkuak seluruhnya.

B. RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI MEMBONGKAR HUBUNGAN MEGAWATI DENGAN BENNY MOERDANI

Catatan Kesaksian Rachmawati ttg Megawati di Harian Rakyat Merdeka Juli 31, 2002 dan Aug 1, 2002

MEMBONGKAR HUBUNGAN MEGA DAN ORBA

BAGI saya, kisah Mega dan Orde Baru bukan hal baru.Begitu juga soal hubungan antara Mega dengan bekas Pangab L.B. Moerdani dan faksi faksi yang bertikai ditubuh TNI, pun bukan hal baru.

Makanya, waktu mendengar bekas Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) RO Tambunan membongkar informasi yang diberikan Benny Moerdani kepada Mega sebelum terjadi tragedy 27 juli 1996 terjadi, saya cuma manggut manggut.Saya sudah memperkirakan itu yang akan terjadi. Mega cuma jadi alat dari pertikaian di tubuh TNI, khususnya Angkatan Darat.

Benny Moerdani mulai mendekati keluarga Bung Karno awal 1980-an. Suatu ketika, pertengahan 1980-an, dalam sebuah acara keluarga Bung Karno di Bandung, Benny Moerdani datang. Katanya dia mau mengenal lebih jauh dan berteman dengan anak-anak Bung Karno. Kami persilahkan saja. Tapi saat itu saya sudah waspada. Pasti ada apa-apanya nanti.

Waktu itu Benny Moerdani mulai pecah kongsi dengan Soeharto. Hubungan mereka tidak harmonis lagi. Padahal sebelumnya, Benny

Moerdani ini anak buah yang baik bagi Soeharto.

Dalam acara keluarga itu, saya sempat ngomong ngomong dengan dia. Kelihatannya Benny Moerdani memang sedang sakit hati dengan Soeharto. Dia dicopot dari posisi Pangab dan tidak dipakai Soeharto lagi. Ibarat wayang, oleh sang dalang Benny Moerdani dimasukin kotak.

Ia mengakui, dirinya menyimpan obsesi untuk menjadi orang kedua di republik ini. Tapi dia kecewa ambisi itu bagai menggantang asap. Menurutnya dia tidak mungkin tampil sebagai wakil presiden. Sebab dia beragama non Muslim. Dan memang walaupun Benny Moerdani menggosok-gosok namanya, tahun 1988 Soeharto memilih Soedharmono yang dikenal sebagai arsitek sekretariat negara dan orang top di Golkar menjadi wakil presiden.

Saya sampai dipanggil ketek sama Soeharto. Waktu mau dicopot pun, saya tidak diberi tahu sebelumnya. Saya diberi tahu akan dicopot dari posisi Pangab Cuma satu hari sebelumnya, begitu dia mengeluh.

DULU, akhir 1970-an, kami, anak anak Bung Karno membuat kesepakatan bersama. Dikenal dengan konsensus keluarga Bung Karno. Isinya, kami tidak akan terjun ke dunia politik. Kami tidak mau anak dan keturunan Bung Karno dimanfaatkan oleh Orde Baru untuk kepentingan mereka Kami tidak mau dijebak

Tapi sejak bergaul dengan Benny Moerdani, Mega mulai terlihat hendak keluar dari konsensus keluarga. Dan akhirnya Mega memang keluar. Dia bergabung dengan PDI. Memang tidak tiba tiba. Sebelumnya Mega, juga suaminya Taufik Kiemas, aktif di Gerakan Mahasiswa Nasionalis

Indonesia (GMNI).

Nah, Mas Guntur sebagai anak tertua, yang tadinya saya harap bisa mencegah langkah Mega itu, ternyata memilih untuk diam saja. Bahkan cenderung untuk mendukung. Saat itu saya mulai was-was. Langkah Mega mendekati faksi Moerdani dalam tubuh Orde Baru akan merugikan,tidak Cuma keluarga Bung Karno, tapi juga seluruh Bangsa ini.Saat itu saya membaca, mereka tengah mempersiapkan tampilnya seorang anak Bung Karno untuk memenangkan ambisi politik mereka.

DIJADIKAN ALAT LB MOERDANI, KOK BANGGA.

Sebelum mendekati Mega, kelompok Benny Moerdani mendekati saya terlebih dahulu. Mereka membujuk dan meminta saya tampil memimpin PDI. Permintaan orang dekat dan tangan kanan Soeharto itu jelas saya tolak, Bagi saya, PDI itu cuma alat hegemoni Orde Baru yang dibentuk sendiri oleh Soeharto tahun 1973. Coba renungkan, untuk apa jadi pemimpin boneka.

Orang-orang PDI yang dekat dengan Benny Murdani, seperti Soerjadi dan Aberson Marie Sihaloho, pun ikut mengajak saya gabung ke PDI. Tetapi tetap saya tolak.

Tapi Mega tidak begitu, tidak seperti saya. Dia menuruti permintaan itu dan dan senangpula. Ajakan itu diartikannya sebagai dukungan dan kepercayaan dari orang banyak, kaum Marhaen, kepada dirinya untuk memimpin PDI. Padahal motivasi di balik ajakan ajakan itu samasekali tidak ada hubungannya dengan aspirasi kaum Marhaen.

Nah, pintu yang dipakai kelompok ini untuk mendekati Mega adalah Taufik Kiemas, suaminya. Taufik memang dekat dengan kelompok itu. Hari ini pun, desas desus soal kedekatan Taufik Kiemas dengan kelompok Benny Murdani beredar luas.

Di awal 1990-an, Mega semakin larut kejebak dalam scenario pmbusukan itu. Tahun 1993, dalam kongres luar biasa (KLB) PDI, di Surabaya, dia mendeklarasikan dirinya sebagai ketua umum PDI. Beberapa saat kemudian dalam Munas PDI di Jakarta, deklarasi itu dikukuhkan. Benny Moerdani mengerahkan orang orangnya untuk memback up Mega dalam suksesi di tubuh PDI itu. Beberapa orang yang terlibat mengamankan Mega dalam fase itu sekarang ini mendapat posisi enak di kabinet.

Di tahun 1993 pula saya sebelum KLB Surabaya, saya sempat bertemu dengan Mega. Saksi pertemuan itu Panda Nababan. Saya tanya Mega, mengapa mau bersekutu dengan Benny Moerdani. Tapi dia tidak menjawab sepatah katapun pertanyaan itu.

Saya katakan lagi kepadanya, untuk melawan Orde Baru kita harus melihat lihat siapa kawan yang bisa digandeng. Dan orang macam Benny Moerdani tidak bisa dijadikan kawan abadi, Suatu saat mereka akan balik menyerang. Jangan mau terjebak dalam pertarungan antara Benny Moerdani dan Soeharto. Saya tanya lagi Mega, mengapa kamu mau menari di atas gendang orang orang lain. Mengapa kamu mau diperalat.

Tiga jam saya bicara dengan Mega. Tapi tak satu patahpun dia menjawab pertanyaan saya. Saya kira dia sudah tidak peduli lagi dengan nasehat nasehat saya. Terakhir ya itu, saya dengar dia sudah mengantongi dukungan Benny Moerdani untuk memimpin PDI.

Anggota keluarga Bung Karno lainnya tetap bungkam ketika Mega jadi ketua umum PDI. Mereka tidak membaca situasi yang berkembang saat itu seperti saya. Mas Guntur juga diam. Alasannya semua anak Bung Karno sudah dewasa.

Tapi apakah menggadaikan dan menggunakan nama Bung Karno untuk kepentingan politik sesaat adalah sikap dewasa? Saya yakin, Mega pun tidak akan menjawab pertanyaan itu. ***

C. R.O. TAMBUNAN: MEGAWATI TAHU RENCANA KUDATULI

Tepat peringatan 12 tahun tragedi penyerbuan kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia atau DPP PDI, Minggu (27/7), mantan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Robert Odjahan Tambunan meluncurkan buku otobiografi politik. Buku itu sebagian isinya mengungkapkan kembali sisi lain kasus 27 Juli 1996 yang menewaskan lima aktivis PDI.

Ketika penyerbuan Kantor DPP PDI pro-Megawati Soekarnoputri, yang kini bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, terjadi, RO Tambunan adalah penasihat hukum PDI dan Megawati. Sebagai Koordinator TPDI, ia membela PDI dan Megawati yang pada 1996 terus ditekan pemerintahan Orde Baru.

Kasus 27 Juli 1996, yang juga membuat 124 pendukung Megawati diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dinilai melawan kekuasaan yang sah, menjadi ”inti” dari buku *Otobiografi Politik RO Tambunan: Membela Demokrasi*, terbitan TPDI. Bahkan, dalam buku yang sebagian isinya

adalah kompilasi pemberitaan terkait PDI dan kasus 27 Juli memberikan 93 halaman disertai foto, pada tragedi itu, yang saat itu diduga direncanakan dan dilakukan aparat.

Pemaparan Kasus 27 Juli diawali dengan deskripsi pada halaman 147. *Pukul 07.00 pagi, 27 Juli 1996. Telepon di rumah RO Tambunan di Kebun Jeruk, Jakarta Barat, berdering. ”Halo! Halo, Pak RO!” Suara perempuan terdengar dari ujung telepon. Perempuan itu, Megawati Soekarnoputri.... Ia menelepon dari rumahnya di Jalan Kebagusan, kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. ”Kantor DPP PDI diserbu!” sergah Megawati.*

”Abang tengok dulu kantor DPP untuk mengetahui dan mencegah pengambilalihan itu,” pinta Megawati. RO Tambunan pun meluncur ke kantor DPP PDI (halaman 148).

Tambunan harus menembus penjagaan aparat yang amat ketat untuk bisa sampai ke kantor DPP PDI. Ia bertemu Letnan Kolonel Abubakar, Kepala Polres Jakarta Pusat, dan Kolonel Zul Efendi, Komandan Kodim Jakarta Pusat. Ia diizinkan memasuki kantor DPP PDI yang saat itu selesai diserbu. Terkait kondisi terakhir kantor itu, ia menyatakan, *Dengan diantar Letnan Kolonel Abubakar saya melihat ruangan-ruangan yang hancur dan digenangi oleh air yang disemprot serta di sana-sini terlihat dengan jelas darah yang berceceran* (halaman 149).

Tambunan juga menyebutkan, dia tidak menemukan lagi massa dan anggota Satuan Tugas (Satgas) PDI, sekitar 300 orang, di lokasi itu. Menurut Abubakar, semua orang yang ada di kantor DPP PDI saat itu diangkut ke Polda Metro Jaya dan dijadikan tersangka. Dalam

perkembangannya, yang diadili 124 orang. Mereka dipidana paling lama empat bulan tiga hari, sesuai dengan masa tahanan mereka.

Megawati mengetahui

Tambunan semula memberikan judul Renungan Indonesia untuk bukunya itu. Namun, sejumlah kalangan yang terlibat dalam penulisan buku itu memilih judul Membela Demokrasi. Dosen Filsafat Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Dr Selu Margaretha P, yang membedah buku itu, mengakui, inti dari buku itu terletak pada pembeberan kasus 27 Juli. Tambunan wajar memaparkannya panjang lebar sebab kasus itu sampai kini belum tuntas.

Pada halaman 173, Tambunan menuliskan, *Peristiwa 27 Juli adalah anomali karena korban penyerangannya yang ditangkap, ditahan, diadili, dan dihukum. Para penyerangnya bebas. Dalam perkembangan waktu karena pergantian kekuasaan, sebagian pelaku ditangkap, ada yang dilepas, ada yang diadlili, dan dihukum ringan. Tapi mereka yang diproses hukum hanya pada sekundan dan boneka politik. Para perencana, para aktornya, yang tangan-tangannya bersimbah darah, masih bebas hingga buku ini diterbitkan*.

Jatuhnya korban dalam peristiwa 27 Juli 1996 sebenarnya juga bisa dicegah apabila Megawati, selaku Ketua Umum PDI, menghendakinya. Karena, pada halaman 150, Tambunan menegaskan, *Beberapa hari sebelumnya Megawati memberitahu para pimpinan Satgas, bahwa akan terjadi pengambilalihan paksa. Megawati menerima informasi itu dari seorang pejabat tinggi militer.*

Pemaparan Tambunan itu sejalan dengan pengakuan mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI DKI Jakarta Roy BB Janis. Saat memberikan testimoni pada peluncuran buku itu, dia mengakui ditunjuk oleh Megawati sebagai penanggung jawab keamanan kantor DPP PDI. ”Saya dua hari sebelumnya diberi tahu Ibu Megawati akan ada penyerbuan ke kantor. Karena itu, penjagaan ditingkatkan,” ujarnya. Dengan peringatan itu, dia selalu berjaga-jaga di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, hingga tanggal 27 Juli 1996 dini hari. Ia juga sempat berbincang-bincang dengan sejumlah anggota Brigade Mobil (Brimob), yang kala itu berjaga-jaga di sekitar Cikini. Ia meninggalkan kantor DPP PDI sekitar pukul 05.00.

”*Saya pulang karena rasanya tidak mungkin ada pengambilalihan paksa pada pagi itu. Selain sudah pagi, masyarakat sudah beraktivitas, dan jalanan di depan kantor DPP PDI sangat ramai. Jadi, dalam pemikiran saya, tak mungkin ada penyerbuan itu*,” tutur mantan Ketua Fraksi PDI-P DPR itu. Akan tetapi, baru tiba di rumah, Roy mengakui ditelepon Megawati yang memberitahukan kantor DPP PDI diserbu massa. ”*Saya langsung kembali ke kantor DPP PDI*,” kata dia lagi.

Menurut Roy, sebenarnya sebagai Ketua Umum PDI, Megawati bisa menghindari jatuhnya korban dalam peristiwa 27 Juli itu apabila memerintahkan satgas dan massa meninggalkan lokasi itu. Karena tidak mungkin mereka menghadapi ”serbuan” aparat. Akan tetapi, Megawati ternyata lebih menitikberatkan pilihan politik daripada pilihan kemanusiaan.

Buku *Membangun Demokrasi* juga menjadi tempat ungkapan kekecewaan Tambunan kepada Megawati. Pada halaman 172, ia menyatakan, *Megawati tak sungguh-sungguh menegakkan kebenaran dan keadilan*

dalam peristiwa 27 Juli. Cukuplah orang sipil yang diadili dalam kasus itu. Bahkan, Megawati berusaha memberikan uang kepada Kelompok 124, korban serbuan ke kantor DPP PDI yang diadili, agar mereka tidak terus-menerus menuntut kelompok ABRI untuk diadili.

Roy Janis melalui komentarnya pada halaman 374 buku itu juga menuliskan, *Mengenai penyelesaian kasus 27 Juli yang sempat dibuka lagi di DPR pada 2003, tetapi kemudian hilang begitu saja sampai sekarang, disebabkan juga karena sikap Mega sendiri yang tidak mempunyai untuk menyelesaikan kasus ini. Salah satu contohnya, Mega memilih gubernur yang terlibat langsung kasus 27 Juli. Mega sudah mengampuni pelaku....*

Roy Janis ”menunjuk” Sutiyoso yang pada saat kasus 27 Juli terjadi menjabat Panglima Kodam Jaya. Tahun 2002, Megawati merestui Sutiyoso menjadi calon gubernur DKI Jakarta untuk yang kedua kalinya. ”Saat itu saya sempat bertemu dengan Pak Sutjipto (Sekjen PDI-P). Saya diminta menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta, mendampingi Sutiyoso. Rekomendasi DPP PDI-P sudah ada. Tetapi, saya tidak mau,” ungkap Roy.

Tambunan juga menuliskan di halaman 163 bukunya, dia tahun 2002 ditelepon Sutiyoso dan diajak bertemu. Dalam pertemuan di kantor Gubernur DKI Jakarta, RO Tambunan diminta mendukung pencalonan kembali Sutiyoso. Tambunan tak memberikan jawaban. Namun, di surat kabar, Sutiyoso membantah telah bertemu Tambunan.

Dalam buku setebal 396 halaman itu, Tambunan juga menyebutkan sejumlah nama yang diduga terlibat kasus 27 Juli, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono dan Sudi Silalahi, yang proses hukumnya belum

tuntas. Ia memang melontarkan sangkaan yang diyakininya sebagai fakta dan sejarah. Tinggal kini menunggu jawaban dari mereka yang disebutkan itu melalui buku sehingga ada obyektivitas sejarah bagi generasi berikut.

D. MEGA, CSIS DAN BENNY MOERDANI MENDALANGI KUDATULI

CSIS dan Benny Moerdani Dalang Kudatuli

Menurut sumber dari CSIS, gejolak di PDI juga adalah ‘kerjaan’ mereka. Kelompok raja intel Benny Moerdani, yang bermarkas di Tanah Abang, tahu betul bahwa Megawati dan PDI tidak akan menjadi radikal dan bersikap oposisi terhadap Soeharto kalau tidak mendapat tekanan dan gangguan. Megawati dan PDI memang potensial sebagai kekuatan alternatif menandingi kekuasaan Soeharto, tapi karena sudah sekian lama dikooptasi dan juga berpolitik dengan watak konservatif, PDI sesungguhnya tidak berbahaya bagi kekuasaan Soeharto. Kalaupun dibiarkan ikut dalam pemilihan umum, paling banter adalah memperoleh peningkatan suara dan kursi di DPR. Karena itu dilakukan ‘upaya’ (rekayasa) untuk mendesak Megawati menjadi oposan terhadap Soeharto.

Di sini peran Soerjadi menjadi penting. Soerjadi adalah antek opsus Ali Moertopo dan orang Benny Moerdani. Ia naik menjadi ketua umum PDI pada tahun 1987 tidak terlepas dari peran Benny Moerdani. Dan juga jangan dilupa bahwa naiknya Megawati menjadi Ketua Umum PDI tidak terlepas dari peran dua anak didik Benny, yaitu Agum Gumelar dan Hendro Priyono. Nah, dengan bantuan keuangan dari Sofjan Wanandi, boss Soerjadi di PT. AICA, dirancanglah strategi untuk menekan Megawati. Perlu diketahui bahwa Sofjan Wanandi ini adalah tokoh penting dari CSIS,

antek opsus Ali Moertopo dan Benny Moerdani, juga dikenal sebagai agen CIA di Indonesia. Dia menjadi broker penjualan senjata, baik legal dan illegal, dari Amerika Serikat ke Indonesia.

Sementara itu, kepada Mabes ABRI ditiupkan isyu bahaya dan. ancaman Megawati terhadap stabilitas kekuasaan. Petinggi ABRI seperti Faizal Tanjung, Hartono, Soejono, dan Syarwan Hamid dengan mudah dikelabui karena mereka memang bukanlah perwira intel dan perwira yang cerdik. Mereka naik ke posisi mereka diangkat oleh Soeharto hanya karena 'durian runtuh' dan untuk melicinkan jalan naiknya Prabowo menjadi Pangab.

Strategi lainnya adalah penugasan Aberson M Silaholo (juga anak didik Ali Moertopo) untuk membuat angket yang mendukung pencalonan Megawati sebagai Presiden. Sasaran angket ini adalah untukmembangkitkan kemarahan Soeharto dan juga fraksi-fraksi yang mengelilingi Soeharto yang merasa bila tiba saatnya merekalah yang mendapat peluang menjadi Presiden berikut. Selain itu, Aberson juga dalam beberapa kesempatan, baik di dalam diskusi maupun media massa, menyuarakan kritik keras terhadap dwifungsi ABRI.

Dengan begitu terciptalah imej bahwa Megawati berbahaya bagi kekuasaan. Apalagi Abdurachman Wahid, Ketua Umum PB NU yang juga menjadi orang kepercayaan Benny Moerdani turut memainkan rolnya dengan baik. Ia dan NU gembor-gembor berdiri di belakang PDI, dan massa NU siap turun ke jalan untuk mendukung PDI. Iapun membisiki Megawati bahwa 10.000 LSM dan Jutaan massa akan turun ke jalan mendukung PDI pimpinan Megawati.

Abdurachman juga turut menciptakan imej bahwa aliansi antara NU, Fordem, YKPK, dengan PDI kelak menjadi kekuatan alternatif. Padahal sesungguhnya pengaruh Abdurachman Wahid di NU sudah jauh merosot dibanding ketimbang pertama kali ia menjadi Ketua Umum.

Massa NU yang turun ke jalan mendukung PDI, adalah segelintir anak-anak muda NU yang tergabung dalam FKGMNU dan sebagian anggota PMII. Ironisnya, malah ulama-ulama yang menjadi anggota NU baru-baru ini mengusulkan kembali Soeharto menjadi Presiden dan mendoakan kesehatan Soeharto. Hal yang sama juga dengan Fordem (Forum Demokrasi), forum yang kini hanya sekedar menjadi grup diskusi.

Sekarang ini Fordem didominasi orang-orang berorientasi PSI seperti Rahman Tolleng dan Marsilam Simanjuntak, yang terkenal pintar mengambil hati mahasiswa sekuler. Peran mereka antara lain adalah dalam pembentukan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). KIPP sebetulnya tidak bertujuan menjadi badan pemantau pemilu dalam arti sejati. KIPP hanya alat yang digunakan untuk menjadi isyu politik.

Strateginya KIPP digunakan untuk menyatakan bahwa pemilu 1997 nanti berjalan tidak bersih dan tidak sah. Lalu KIPP mendesak agar PDI tidak bersedia menandatangani persetujuan hasil pemilu. Kalau ini yang terjadi berarti pemerintah masa tahun 1998-2003 tidak mendapat legitimasi, dan timbul gejolak dari rakyat. Langkah Abdurachman lainnya adalah dengan menyuarakan petisi keprihatinan 1 Juli, yang juga dikenal sebagai petisi 96. Isinya mengecam kekerasan yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus-kasus politik. Sebagian besar tokoh penandatangan petisi itu adalah anggota YKPK dan mantan pejabat pemerintah. Gembor-

gembor Abdurachman adalah bahwa petisi akan diedarkan dan mengumpulkan tandatangan 1 Juta orang.

Strategi Benny tampaknya berhasil dengan baik. Akibat penjegalan terhadap PDI, Megawati dan kelompoknya menjadi dekat dengan kelompok-kelompok pro demokrasi dan LSM lainnya. Rakyat yang sudah sekian lama tertindas bangkit. Ini suatu hal yang tidak mungkin terjadi, kalau tidak ada kejadian penjegalan. Memang sebelumnya beberapa kelompok pro demokrasi sadar bahwa Megawati adalah figur penting bagi pembaharuan politik di Indonesia, apalagi di bawah bayang-bayang nama besar Soekarno, tapi mereka tidak berhasil mendekat kepada Megawati karena tidak ada kesempatan dan juga ulah beberapa pembantu Megawati yang tidak menyukai kelompok pro demokrasi yang dianggap radikal.

Pihak kelompok Prabowo tampaknya menyadari strategi kelompok Benny Moerdani. Ia terlihat di lapangan ketika terjadi insiden ‘Gambir Berdarah’. Ia mencoba mencegah agar tidak terjadi bentrokan antara demonstran dengan militer. Ia juga mencoba untuk mengalihkan gerak dan rute demonstran serta arus lalu lintas agar tidak menjadi rumit dan bertumpuk. Tapi tidak berhasil. Bagaimanapun juga Prabowo harus mengakui kehandalan seniornya.

SOEHARTO SAKIT?

Soeharto sendiri sebetulnya juga mengetahui permainan Benny Murdani. Namun ia biarkan, karena ia juga bisa mengambil keuntungan dari situ. Soeharto menyadari bahwa Megawati secara laten berbahaya bagi kekuasaannya. Cepat atau lambat Megawati harus dibatasi pengaruhnya, hanya tinggal waktu dan bagaimana caranya. Itu sebabnya ia berdiam saja,

ketika ada gejolak PDI. Malah Soeharto berlagak arif dengan menganjurkan musyawarah sebagai jalan keluar.

Perlu dipahami secara psikologis, Soeharto karena sudah sedemikian lama berkuasa dan tanpa saingan yang berarti, kesombongan dan percaya dirinya begitu kuat. Ia merasa tetap bisa mengendalikan kekuasaan politik, meskipun dibayangi muncul persaingan diantara elit politik dan fraksi di tubuh tentara.

Itu sebabnya terhadap ulah Benny, ia menganggap bukan suatu hal yang perlu dikuatirkan. Lagipula seperti yang pernah diutarakannya dalam biografi 'Pikiran, Ucapan, dan Tindakan saya', Soeharto menganggap Ali Murtopo, dan sekarang Benny, adalah 'murid' dia. Tidak mungkin murid bisa kalahkan guru. Perjalanan berobat Soeharto ke luar negeri juga bukan suatu hal yang mengejutkan. Hal itu sudah lama dijadwalkan.

Bukan mendadak seperti yang diduga orang. Ia memang berencana untuk melakukan pemeriksaan dan operasi untuk penyakitnya. Hanya saja, dengan waktu yang begitu bertepatan dengan gejolak PDI dan selang beberapa waktu kematian istrinya, Soeharto justru menggunakan menjadi kesempatan untuk: Pertama, selama berada di luar negeri, ia ingin menguji apakah ada di antara elit politik dan fraksi tentara yang mencoba memanfaatkan melakukan manuver politik. Kedua, ia mengajak seluruh anak-anaknya untuk membicarakan pembaharuan surat warisan. Sebelumnya seperti yang pernah dikatakan Soeharto dalam 'biografinya' ia menganggap dirinya lebih dulu mati dari istrinya. Karenanya segala urusan warisan diserahkan pada istrinya. Dengan kematian istrinya ia harus perbarui surat warisan. Soeharto adalah tipikal orang Jawa yang sangat

perhatikan keluarga dan anak. Melihat kesombongan dan PD (istilah anak baru gede untuk percaya diri) Soeharto, tampaknya ia yakin bahwa tidak ada gejolak berarti dalam waktu dekat bagi kekuasaannya. Ia tetap berkeinginan akan menjadi Presiden untuk masa tahun 1998 sampai 2003. Tidak hanya semata alasan untuk melindungi modal dan bisnis anaknya, tapi karena ia merasa mampu.

E. DR. SOERJADI, PELIHARAAN SOFJAN WANANDI

Dalam politik tidak ada teman dan lawan sejati, yang ada kepentingan politik itu sendiri. Mungkin inilah kalimat yang tepat untuk menggambarkan perjalanan politik Soerjadi, ketua boneka Partai Demokrasi Indonesia hasil "konggres IV" yang disponsori pemerintah di Medan 20-22 Juni 1996.

Tahun 1986 Soerjadi "diculik" orang orangnya Jendral Benny Moerdani, panglima ABRI waktu itu, dan diterbangkan ke Denpasar begitu kongres menemui jalan buntu. Di Denpasar itulah Soerjadi diajak membicarakan rencana pihak militer terhadap "masa depan" PDI.

Kemudian pemerintah bertindak sebagai formatur dan membentuk pengurus PDI serta menunjuk Soerjadi menjadi ketua umum periode 1986-1992 dan Nico Daryanto, seorang politisi Katolik yang dekat dengan Center for Strategic and International Studies, sebagai sekretaris jendral.

Soerjadi akhirnya ikut berdekatan dengan orang-orang CSIS dan bekerja di sebuah bank milik Gemala grup yang dipimpin oleh Sofjan Wanandi, salah seorang pendiri CSIS. Kini Soerjadi bekerja sebagai Presiden Direktur PT Aica Indonesia, sebuah perusahaan di bawah kontrol Gemala

dan dimodali sejumlah konglomerat.

Di kemudian hari Soerjadi memperpanjang masa kepemimpinannya dengan menunda kongres. Alasannya, menurut AD/ART kongres diselenggarakan setelah Pemilu. Barulah setelah Pemilu 1992 PDI menyelenggarakan kongres di Medan tahun 1993. Tetapi saat itu Soerjadi sudah tidak dikehendaki pemerintah mengingat di masa kepemimpinannya, Soerjadi berhasil membesarkan partai, memasukkan para pendukung Soekarno dan menambah jumlah suara pemilih. Soerjadi juga dianggap nakal karena mengeluarkan pernyataan tentang perlu dibatasinya masa jabatan presiden. Menurut bahasa militer saat itu, Soerjadi dianggap "cacat hukum."

"*Waktu itu Pak Soerjadi ada problem dengan pihak eksternal. Jadi saya mempersiapkan diri untuk mengisi namun tidak mengubah konsep dan prinsip politik Pak Soer*," kata Budi Hardjono, tokoh yang dijagokan militer untuk menggusur Soerjadi di Medan 1993. Pada kenyataannya waktu itu Budi memang harus memusuhi Soerjadi.

Budi Hardjono adalah teman Soerjadi sejak tahun 1965 ketika mereka duduk bersama-sama dalam presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Sejak 1965 hingga 1975 Soerjadi dan Budi Hardjono bersama-sama duduk sebagai Ketua dan Sekretaris Presidium GMNI. Tetapi kini Budi Hardjono justru mendukung Soerjadi yang kali ini didukungpemerintah dan ABRI untuk menjadi ketua boneka dalam kongres Medan 1996. Soerjadi sendiri merasa tidak pernah berubah. "*Kalau Anda lihat pernyataan-pernyataan saya atau wawancara pers saya, Anda akan berkesimpulan bahwa Soerjadi tahun 1986 sama dengan Soerjadi tahun 1996*," katanya di sela-sela pertemuan Medan Juni lalu.

Soerjadi mengakui di kongres Medan 1993, dia dijegal oleh "*pihak eksternal*" dan tidak tahu mengapa dijegal. "*Tapi sampai sekarang saya kan tidak berusaha untuk berbeda,*" lanjutnya.

Sulit menyimpulkan apakah pendirian politik Soerjadi memang tidak pernah berubah. Yang jelas, ia pintar memilih dan memanfaatkan berbagai pihak — entah kawan atau lawan — yang bisa diajak bekerjasama.

Begitulah Soerjadi. Menjelang Pemilu 1992 dia membujuk keluarga Presiden Sukarno berkampanye untuk PDI. Maka Guruh Soekarnoputra berkampanye di televisi dan Megawati Soekarnoputri berkampanye ke kota-kota besar di Indonesia.

"*Kampanye PDI dipenuhi massa jika Megawati yang datang namun sepi jika Soerjadi yang datang*," kata sebuah sumber PDI pro-Megawati. Kalangan PDI meyakini melonjaknya jumlah suara PDI justru karena terlibatnya keluarga Bung Karno dalam kampanye-kampanye.

Mengetahui dirinya tidak terlalu populer di kalangan "arus bawah" maka Soerjadi mempopulerkan konsep bahwa PDI bukan partai massa namun merupakan partai kader. Namun ada saatnya ia menyerah. Di Kongres Luar Biasa (KLB) 1993 di Surabaya, dia meminta para pendukungnya untuk memilih Megawati daripada memilih Budi Hardjono. Di Surabaya itu Megawati akhirnya menyatakan dirinya sebagai "ketua de facto" dan kemudian disahkan dalam munas Desember 1993 di Jakarta.

Soerjadi kemudian jadi "warga biasa" di PDI. Megawati memang tidak memberinya jabatan tertentu di partai kecuali tetap mempertahankannya sebagai Wakil Ketua DPR-MPR dari PDI. Kalau Megawati mau Soerjadi

memang bisa di-*recall* sewaktu-waktu. Ini menunjukkan betapa rapuhnya posisi Soerjadi dalam partai.

Hubungan Soerjadi dengan Megawati, entah apa penyebabnya, menjadi renggang. Menurut sumber yang dekat dengan Megawati, hubungan mereka sudah renggang sejak Pemilu 1993. Dalam sebuah kampanyenya Soerjadi pernah mengatakan bahwa Megawati tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dirinya.

"*Saya tidak pernah mengatakan itu dalam kampanye saya. Kalau anda punya buktinya ya terserah*," kilah Soerjadi.

Soerjadi menjelaskan bahwa hubungannya dengan Megawati memang tidak sedekat hubungannya dengan Fatimah Achmad. "*Kalau ada masalah-masalah partai saya memang selalu menghubungi Bu Fat*," tambahnya, merujuk kepada ketua panitia kongres Medan 1996.

Maka, ketika Soerjadi bersama-sama dengan ABRI dan pemerintah, akan menggulingkan Megawati, dia pilih Fatimah Achmad sebagai ujung tombaknya. ABRI berkepentingan menggusur Megawati karena dia anti ABRI dan mengancam pencalonan Soeharto dalam pemilihan presiden 1998. Soerjadi memiliki kepentingan untuk menguasai kembali PDI dengan caranya sendiri.

Soerjadi mungkin satu-satunya politisi Indonesia, sepanjang pemerintahan Soeharto, yang mampu tampil kembali ke panggung politik. Kontadiksi sosok Soerjadi memang tidak hanya dalam politik. Setidaknya sebagai "ketua umum" di sebuah lembaga politik yang anti terhadap monopoli di bidang ekonomi, Soerjadi harus menempatkan dirinya sebaik-baiknya.

"*Saya dekat dengan Liem Bian Koen (Sofjan Wanandi-red), saya dekat dengan para konglomerat tapi saya akan tetap memperjuangkan UU Anti Monopoli karena itu sikap partai. Lha itulah Soerjadi. Saya bisa dekat dengan siapapun tapi tidak merubah pendirian saya*," katanya di ruang VIP Pondok Haji Pangkalan Mansyur Medan, setelah terpilih sebagai ketua boneka PDI. Bila dia bisa berbaik-baik kembali dengan Soeharto yang pernah dikritiknya dan yang pernah menggusurnya, jika dia tega menggusur Megawati yang tidak lain adalah kadernya sendiri, maka dia pasti juga bisa berbalik memusuhi para konglomerat, yang telah menghidupinya selama ini dan yang konon ikut membiayai "kongresnya" di Medan.***

F. RENCANA CSIS MEMFITNAH ROMO SANDYAWAN

DIBALIK BENCANA POLITIK 27 JULI. Hal Kecil Untuk Menyelesaikan Hal Besar. Perkembangan Bencana Politik 27 Juli masuk ke dalam babak-babak yang. menentukan. Mulai dari prolog sampai pada saat kejadian sendiri sesungguhnya adalah manifestasi dari pertarungan elit tingkat tinggi.

Dalam perkembangannya sampai saat ini, ada hal kecil yang kemungkinan akan bisa dipakai untuk selesaikan hal-hal besar dalam pertarungan antar elit. Hal kecil tersebut adalah saat penangkapan Budiman Sujatmiko Cs yang secara tidak sengaja melibatkan seorang Pastor Katolik, Romo Ignatius Sandyawan Sumardi, SJ.

Peristiwa tersebut sesungguhnya kecil saja. Hal ini tidak menjadi hebat jika harian milik ICMI, Republika, mengangkatnya sedemikian rupa dalam pemberitaannya. Republika menjadikan peristiwa kecil ini menjadi sangat

besar dan merambah kemana-mana. Pada pemberitaan awalnya, Republika memberitakan Pastor ini menghilang. Pemberitaan tersebut menggiring kearah kesimpulan pembacanya bahwa Romo Sandyawan adalah aktor intelektual yang berdiri di belakang PRD. Republika mensitir ungkapan Syarwan Hamid bahwa ada *die hard* yang berdiri di belakang semua gerakan PRD. Model pemberitaan ini segera diikuti oleh media-media yang selama ini bergabung ke dalam klik elit penguasa tertentu.

Ada tendensi bahwa pemberitaan tersebut hendak mengalihkan perhatian dari persoalan pertikaian antar elit yang hampir terkuak ke permukaan. Setelah kasus PDI dan PRD, pastilah akan timbul banyak pertanyaan, siapakah dalang di balik semua kejadian tersebut? Pernyataan-pernyataan para elit memang sangat kuat mengindikasikan bahwa sedang terjadi pertarungan besar-besaran antar mereka sendiri. Namun, dengan munculnya kasus Romo Sandyawan perhatian semua media dialihkan pada kasus yang menimpa Pastor relawan ini.

Pemberitaan media massa, terutama media massa yang berafiliasi membela kepentingan penguasa, nampaknya hanya ingin membuktikan bahwa konspirasi di dalam kasus 27 Juli ini. Mereka menemukan sasaran yang empuk ketika kasus Romo Sandyawan muncul ke permukaan. Konspirasi yang ingin dijelaskan masih dalam kerangka menurunkan “Brahmana” yang dalam pengertian sebagian elit itu adalah Benny Moerdani. Kebetulan antara korban dan sasarannya ada persamaan yakni sama-sama berasal dari kalangan Katolik.

Pada mulanya, Syarwan Hamid bersikeras bahwa Romo Sandyawan bukan tidak mungkin adalah die hard dari PRD. Kalangan militer pun berkeyakinan bahwa semua kegagalan operasional militer mereka yang

mengakibatkan timbulnya korban jiwa, akan bisa diselesaikan dengan memperkuat kambing hitam mereka, yakni PRD. Romo Sandyawan adalah sasaran yang paling bagus dengan tuduhan bahwa dia adalah otak di balik gerakan PRD. Syarwan Hamid sendiri dalam beberapa media telah menyebut bencana politik ini sebagai "Gerakan 27 Juli" (G27J) untuk mencari paralel dengan G30S. Apalagi, ekspose media massa memperlihatkan bahwa nama-nama Katolik sangat banyak di kalangan mereka yang menjadi aktivis PRD.

Dengan meletakkan Romo Sandyawan sebagai pemerkuat kambing hitam, jelaslah klik militer tertentu mencoba menggiring kearah keterlibatan Benny Moerdani. Namun usaha ini tidak berhasil sepenuhnya. Pertama, Romo Sandyawan ternyata lebih banyak memiliki kaitan dengan kalangan-kalangan humanis-demokratis di negeri ini. Kegiatannya pun adalah kegiatan karitatif. Kedua, dia adalah seorang pastor Katolik. Kedudukan sebagai agamawan tentulah menyulitkan posisi tuduhan bahwa ia adalah otak sebuah organisasi yang dicap Kiri.

Sementara, bagi beberapa pihak, terutama kalangan politisi Katolik sendiri sangat ketakutan dengan masuknya Romo Sandyawan kedalam permainan kambing hitam PRD ini. Kalangan yang dekat dengan CSIS informasikan bahwa kalangan di dalam CSIS berusaha untuk memisahkan keterlibatan Romo Sandyawan dengan kalangan Katolik pada umumnya.

"Dalam hal ini CSIS sudah kepalang basah. Mereka juga terlibat, khususnya dalam men-support Soerjadi lewat politisi-politisi Katolik. Mereka nampaknya juga sudah siap bahwa situasi kekerasan akan muncul dalam menghadapi Mega. Dalam pengalaman mereka kekerasan ini toh pada ujung-ujungnya bisa diselesaikan lewat uang. Artinya, sepanjang

mereka memiliki uang, tentara-tentara itu pasti masih mau bekerja sama dengan mereka. Isu PRD adalah taktik klasik. Nampaknya, dalam membuat isu model beginian CSIS-lah jagonya. Ini yang menguatkan kemungkinan bahwa CSIS punya link tertentu dengan CIDES,“ kata seorang pengamat.

Untuk mencegah kebakaran lebih luas, agaknya CSIS berusaha melokalisir api hanya di sekitar Sandyawan. Adalah jauh lebih aman membiarkan seorang Sandyawan mendapatkan cap Pastor Kiri ketimbang mengorbankan seluruh jaringan Katolik yang mereka miliki. Taktik CSIS terhadap golongan Katolik selalu sama. Mereka akan bilang, jangan mencoba benturkan kepala ke tembok yang masih sangat kuat. Sekaligus mereka menakut-nakuti pihak gereja yang memang selalu menganggap bahwa CSIS sumber informasi politik mereka.

Dengan kejadian Sandyawan, CSIS juga bisa menangguk keuntungan. Mereka bisa mendisplinkan kembali orang-orang Katolik dengan menjadikan Sandyawan sebagai “percontohan”. Itulah akibatnya kalau mau membenturkan kepala ke tembok. Dengan contoh tersebut, diharapkan kredibilitas politisi Katolik sendiri (yang sempat ambrol di mata umat karena dukungan mereka pada Soerjadi) akan bisa dipulihkan. Mereka akan membuat aksi yang lebih programatis untuk menunjukkan kepada kalangan Katolik bahwa mereka berdiri di pihak yang benar. Mungkin sekali kalangan politisi Katolik ini bekerja sama dengan tentara dan mengorbankan Sandyawan.

Di kalangan Katolik CSIS adalah die hard dalam berpolitik. Di samping kelompok die hard masih ada kelompok yang relatif moderat. Mereka inilah yang berada dalam jaringan kerja Kompas-Gramedia. Orang-orang

ini juga memiliki perhatian pada demokratisasi. Namun, sebagaimana kalangan menengah minoritas lainnya, Kompas juga berusaha agar agar jalan kearah demokrasi atau perubahan politik berlangsung tanpa melibatkan massa-rakyat. Cukuplah urusan tersebut diselesaikan di tingkat segelintir elit, atau paling banter di tingkat kelas menengah saja. Dalam kasus Sandyawan, nampak sekali bahwa Kompas hendak cuci tangan.

Mereka sudah menghadapi tekanan yang cukup berat ketika pemberitaan mereka dinilai sangat memihak Megawati. Rasionalisasi kelas menengah mereka mengatakan bahwa permainan politik harus berlangsung fair. Dalam kasus Mega, kecurangan memang begitu transparan. Begitu terjadi kerusuhan 27 Juli, Kompas adalah koran yang paling dahulutiarap. Ketakutan itu bertambah besar ketika akhirnya nama Sandyawan yang adalah seorang Pastor Katolik itu terbawa-bawa. Kompas paling tidak berani menyinggung Sandyawan dalam pemberitaannya. Menurut informasi, jajaran senior dalam Kompas, mencap bahwa tindakan Sandyawan tersebut sebagai tindakan tolol dan bunuh diri. Mereka memandang bahwa apa yang dilakukan oleh Sandyawan akan juga membahayakan kedudukan Kompas, yang memang tidak berafiliasi kepada Katolik tetapi selalu mendapat cap Katolik. Dalam hal ini, yang paling mungkin dilakukan oleh Kompas adalah dengan sukarela memblokade diri untuk mengikuti setiap kata yang didiktekan oleh penguasa.

G. KESAKSIAN SALIM SAID PERIHAL HUBUNGAN MEGAWATI DAN CSIS

Yang juga semakin memperburuk hubungan Soeharto dengan Benny Moerdani adalah sikap Panglima ABRI terhadap Soedharmono sebagai

Ketua Golkar waktu itu. Sudharmono bertekad Golkar menang 70% pada pemilu menjelang Sidang Umum MPR 1988. Benny berpendapat kemenangan demikian tidak akan bisa tercapai tanpa melibatkan upaya paksa dari ABRI. "*Wah, ini tidak benar. Merusak ABRI*," kata Benny, menurut penuturan Teddy Rusdi. Tapi karena Sudharmono menjalankan kebijakan Presiden Soeharto yang Ketua Dewan Pembina Golkar, "*maka pendapat Pak Benny dinilai sebagai tanda tidak loyal*," kata Teddy. Pada masa itu, Benny malah dituduh mendukung Megawati dan PDI (hal 327).

Mengenai dukungan terhadap Megawati ini, menurut Jusuf Wanandi, dalam ABRI waktu itu memang muncul dua kelompok. Satu yang bersimpati kepada Megawati, yang lainnya tidak ingin melihat putri Soekarno itu memimpin PDI. Termasuk yang bersimpati kepada Megawati adalah Brigjen TNI Agum Gumelar dan Mayjen TNI Abdullah Mahmud Hendropriyono. Menurut Wanandi, Moerdani menyarankan kepada Agum dan Hendro untuk melindungi Megawati (hal 327-328).

Cerita tentang Megawati, PDI dan Moerdani sebenarnya sudah bermula pada 1987, ketika Benny sebagai Pangab dan Pangkopkamtib membiarkan partai tesebut melakukan kampanye pemilu besar-besaran di Jakarta dengan peserta berpakaian merah sembari membawa gambar-gambar Bung Karno. Para hari-hari kampanye itu, Jakarta berubah menjadi kota yang metal, merah total (halaman 328).

Saya menonton kampanye itu di beberapa tempat. Kesan saya, selain merupakan hura-hura anak muda, keramaian itu sekaligus juga sebagai semacam pernyataan protes kepada pemerintah lebih dari sekedar dukungan kepada PDI. "*Lewat koneksi pribadinya dengan orang-orang PDI dan keluarga Bung Karno, Benny lalu bekerja sama dengan Agum*

dan Hendro. Itu yang diceritakan Benny kepada Harry dan saya di kemudian hari," tulis Wanandi dalam memoarnya (halaman 329).

Yang barangkali tidak diceritakan Benny kepada Jusuf adalah Mantan Pangab itu pernah "dilamar" oleh Sukarno untuk menjadi suami Megawati tidak lama setelah Moerdani mendapatkan Bintang Sakti. Benny menolaknya dengan alasan sudah punya pacar. Pilihan Benny adalah Hartini, seorang pramugari yang kemudian menjadi istrinya (hal 329).

BAB IX
CSIS DAN KERUSUHAN MEI

A. INILAH YANG TERJADI TAHUN 1998

Latar Belakang Penangkapan Terduga Teroris Tahun 1998

Dari Majalah Gatra edisi 31 Januari 1998 kita tahu bahwa pada tanggal 18 Januari 1998 ada bom rakitan meledak prematur karena tidak dirakit dengan benar berlokasi di Rumah Susun Johar di Tanah Tinggi, Tanah Abang. Saat aparat keamanan menyelidiki lokasi ledakan, mereka menemukan sebuah laptop yang terdapat arsip *e-mail* dan dokumen notulen rapat dari sebuah "kelompok pro demokrasi" yang membuat rencana revolusi di Leuwiliang, Bogor, pada tanggal 14 Januari 1998.

Isi dari email dimaksud adalah:

"*Kawan-kawan yang baik! Dana yang diurus oleh Hendardi belum diterima, sehingga kita belum bisa bergerak. Kemarin saya dapat berita dari Alex [Widya Siregar] bahwa Sofjan Wanandi dari Prasetya Mulya akan membantu kita dalam dana, di samping itu bantuan moril dari luar negeri akan diurus oleh Jusuf Wanandi dari CSIS. Jadi kita tidak perlu tergantung kepada dana yang diurus oleh Hendardi untuk gerakan kita selanjutnya*."

Adapun dokumen notulen berisi pertemuan orang-orang yang mengaku “kelompok pro demokrasi” berlangsung di Leuwiliang, Bogor, 14 Januari 1998 yang menurut keterangan di dalamnya dihadiri oleh 19 aktivis

mewakili 9 organisasi terdiri dari kelompok senior dan kelompok junior yang merencanakan revolusi di Indonesia. Adapun yang dimaksud kelompok senior adalah:

Pertama, CSIS yang bertugas membuat analisis dan menyusun konsep perencanaan aktivitas ke depan.

Kedua, Benny Moerdani.

Ketiga, PDI Pro Megawati Soekarnoputri.

Keempat, kekuatan ekonomi diwakili oleh Sofjan Wanandi dan Yusuf Wanandi.

Berdasarkan dokumen di atas ada beberapa nama untuk diperhatikan yaitu: Hendardi; Alex Widya Siregar; Sofjan Wanandi-Jusuf Wanandi dari CSIS; Benny Moerdani; dan Megawati Soekarnoputri. Selain itu seorang aktivis Partai Rakyat Demokratik/PRD bernama Agus Priyono alias Agus Jabu tertangkap tangan sebagai perakit bom yang meledak prematur tersebut (hari ini Agus "Jabu" Priyono adalah Ketua PRD) sedangkan dua orang lagi berhasil melarikan diri. Apakah isi dokumen tersebut dapat dipercaya? Di bawah adalah analisa saya:

Pertama, Hendardi: Bila email tersebut rekayasa maka Hendardi perlu ruwatan untuk buang sial karena di antara banyak aktivis demokrasi mengapa hanya nama Hendardi yang tercantum? Nah, kebetulan setahu saya, kerjaan sehari-hari yang dilakukan Hendardi adalah menyusup masuk ke berbagai daerah (*clandestine*) untuk mengumpulkan data pelanggaran hak asasi manusia. Untuk alasan inilah saya tidak percaya

bahwa email yang dikirim seseorang yang menggunakan nama sandi "dewa" tersebut palsu, sebab spesialisasi Hendardi memang kegiatan-kegiatan bawah tanah yang bahkan teman-temannya di LBH Jakarta sendiri tidak tahu apa yang sedang dia kerjakan.

Selain itu, pernyataan “Dewa” perihal Sofjan Wanandi mendanai gerakan makar PRD sudah dibenarkan oleh anggota PRD kepada Majalah Gatra, bahwa anak buah Sofjan Wanandi pernah menelpon mereka dan menawarkan bantuan dana sebesar US$ 15,000 yang sudah diambil sebagian sebelum bom meledak (Manuver Politik: Sofjan Wanandi & CSIS, Forum Komunikasi Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Indonesia, 1998, hal. 21; Gatra edisi 7 Februari 1998).

Patut dicatat bahwa dalam salah satu debat terbukanya dengan Budiman Sudjatmiko yang terjadi pada tanggal 3 Juli 2015, Andi Arief sudah mengakui bahwa ledakan bom tanah tinggi adalah pekerjaan PRD dan bukan rekayasa intelijen Orde Baru sebagaimana pembelaan anggota-anggota PRD dan aktivis-aktivis 1998 saat itu.

http://www.merdeka.com/politik/budiman-sudjatmiko-andi-arief-perang-di-twitter.html

Kedua: di atas kertas Alex Widya Siregar merupakan tokoh PDI versi Dr. Soerjadi dan dia adalah orang yang mengumpulkan massa penyerang kantor PDI yang melahirkan Peristiwa 27 Juli 1996, tapi tidak pernah ada PDI pimpinan Dr. Soerjadi atau PDI Pro Mega karena elit kedua kubu berada dalam kubu yang sama yaitu kubu Benny Moerdani yang mau merekayasa kerusuhan demi jatuhkan Presiden Soeharto.

(http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2004/07/26/LU/mbm.20040726.LU94166.id.html).

Ketiga: CSIS didirikan oleh Pater Beek, agen CIA untuk melawan Islam di Indonesia ini mendalangi kerusuhan Malari 15 Januari 1974 dan juga perencana operasi Komodo menyerbu Timtim sehingga informasi dalam email layak dipertimbangkan. Yang menarik Prabowo pernah cerita kepada Lee Kuan Yew bahwa Sofjan Wanandi menghasut Prabowo untuk melakukan kudeta kepada mertuanya tapi Lee Kuan Yew tidak percaya ada orang sebodoh itu menghasut menantu presiden untuk mengkudeta mertua:

"...Sofjan had said to him and several other generals that President Suharto had to step down. When I expressed my disbelief, Prabowo insisted Sofjan did say this, and that the Chinese Catholics were a danger to themselves. Both the prime minister and I puzzled over why he should want to tell us this about Sofjan when it was patently unlikely that any Indonesian would tell the president's son-in-law that the president should be forced to step down..."

(Lee Kuan Yew, From Third World To First, The Singapore Story: 1965-2000, Marshall Cavendish Editions, hal 316-317).

Namun demikian Jusuf Wanandi dan Bill Tarrant, koresponden asing di koran milik CSIS membenarkan ada pembicaraan antara Prabowo dengan Sofjan Wanandi tapi pernyataan tersebut disalahpahami (Jusuf Wanandi, Shades of Grey, hal. 273; Bill Tarrant, Reporting Indonesia, hal. 176).

Keempat: Rencana Benny Moerdani menurunkan Presiden Soeharto dengan merekayasa gerakan massa yang berpotensi mengejar orang China

dan Kristen terungkap dari pertemuan di rumah Fahmi Idris yang antara lain dihadiri oleh Sofjan Wanandi dan Dr. Soerjadi dari PDI sebagaimana dicatat oleh Professor Salim Said, ahli militer terkemuka (Salim Said, Dari Gestapu Ke Reformasi, Penerbit Mizan, hal. 316).

Oleh karena itu informasi dalam email dan notulen rapat bahwa Benny Moerdani terlibat kegiatan merekayasa revolusi demi menurunkan Presiden Soeharto layak dipertimbangkan. Apalagi fakta bahwa pihak di belakang bom tanah tinggi ini adalah Partai Rakyat Demokratik/PRD telah diakui oleh Andi Arief mantan Ketua Umum PRD saat itu dalam wawancara dengan website Vivanews berjudul “Prabowo Bukan Penculik” yang dimuat tanggal 30 Juni 2014. Dalam wawancara yang sama, Andi Arief juga mengakui bahwa PRD telah disusupi agen Benny Moerdani (http://wawancara.news.viva.co.id/news/read/517127-wawancara-andi-arief-prabowo-bukan-penculik).

Kelima: Megawati Soekarnoputri. Setelah reformasi terungkap persekongkolan antara Megawati; Benny Moerdani; Dr. Soerjadi; Alex Widya Siregar; dan Aberson Marie Silaloho. Sumber informasi ini adalah petinggi PDIP yaitu RO Tambunan dalam buku Otobiografi Politik RO Tambunan: Membela Demokrasi yang mengungkap Megawati sengaja membiarkan terjadinya Peristiwa 27 Juli 1996 padahal bisa dicegah karena sudah tahu akan ada penyerbuan; dan adiknya Rachmawati Soekarnoputri melalui tulisan berjudul Membongkar Hubungan Mega dan Orba yang dimuat di Harian Rakyat Merdeka 31 Juli 2002 dan 1 Agustus 2002.

Apalagi fakta bahwa pihak penyerbu markas PDI yang dijaga oleh massa pro-Megawati dan PRD ternyata bersekongkol dengan Megawati semakin diperkuat bila kita menyimak pernyataan Bambang Beathor Suryadi,

aktivis PDIP yang dekat dengan almarhum Taufik Kiemas dan pada masa pemerintahan Jokowi-JK bekerja sebagai Direktur Kepala Staf Kepresidenan sebagaimana dikutip dari website Rakyat Merdeka Online berjudul “Beathor: Sutiyoso Pahlawan Reformasi,” tanggal 12 Juni 2015 sebagai berikut:

“*Di dalam sebuah rapat, Sutiyoso dengan tegas mengatakan dirinya siap pasang badan dan bertanggung jawab demi mengakhiri kekuasaan Soeharto…Sampai akhirnya terjadi perpecahan di tubuh PDI yang semakin melambungkan nama Megawati sebagai ikon penantang Soeharto. Ini juga sebabnya Sutiyoso selalu mendapat posisi strategis setiap kali PDIP berkuasa. Saat Mega menjadi Presiden RI, Sutiyoso dipercaya menjadi Gubernur DKI. Sekarang menjadi Kepala BIN. Melihat perannya dalam kronik reformasi, saya kira Sutiyoso pantas disebut sebagai pahlawan reformasi, juga pantas dipercaya menjadi Kepala BIN.*”

Walaupun layak dipertimbangkan kebenarannya, namun tidak mudah memproses kelompok senior karena mereka masih memiliki kekuatan politik yang sangat besar. Sebagai contoh, setelah menghadiri acara pelantikan Wiranto sebagai Panglima ABRI yang baru, ada jurnalis bertanya kepada Benny Moerdani tentang pencantuman namanya dalam dokumen tanah tinggi, Benny menantang: "*Kalau memang ada bukti silakan tangkap saya*," lalu saat bersamaan Zacky Anwar Makarim lewat, dan Benny bertanya dengan suara keras sehingga terdengar wartawan: "*Apakah saya akan diproses*?," tanggapan Zacky kepada Benny yang sudah pensiun dari dinas militer itu: "*Siap Pak, tidak benar Pak.*."

Karena sulit memproses kelompok senior maka aparat keamanan memproses kelompok junior yaitu 19 aktivis yang mewakil 9 organisasi

yang nama-namanya tercantum dalam dokumen notulen rapat di di Leuwiliang, Bogor, 14 Januari 1998 yang bermaksud menganggu jalannya Sidang Istimewa MPR 1998 dan karena itu dilakukanlah Operasi Mantap Jaya untuk mengamankan para aktivis radikal yang diberi sandi "Setan Gundul" resmi dimulai.

Operasi Mantap Jaya

Tahun 2006 tim Ad Hoc Komnas HAM yang mengusut Operasi Mantap Jaya menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Tujuan Operasi Mantap Jaya adalah mengamankan para Setan Gundul yang bermaksud mengacaukan stabilitas politik dan karena itu mereka memenuhi unsur sebagai "joint criminal enterprises" atau teroris yang melakukan kegiatan terorisme;

- Operasi Mantap Jaya adalah instruksi dari Presiden Soeharto kepada Panglima ABRI Feisal Tandjung dan petinggi ABRI lainnya;

- Pelaksana Operasi Mantap Jaya adalah: Kepolisian RI; Badan Intelijen ABRI (BIA); Kodim Jakarta Timur; dan pasukan-pasukan di bawah ABRI termasuk Kopassus. Kepada masing-masing pelaksana operasi diberikan daftar nama untuk diamankan;

- 9 nama diamankan oleh Kopassus dan 9 nama diamankan oleh pasukan lain. Nama yang diamankan oleh Kopassus sudah dikembalikan dengan selamat dan sehat sedangkan 9 nama lain yang belum kembali diamankan secara permanen oleh pasukan non-kopassus.

Temuan Tim Ad-Hoc Komnas HAM juga diamini oleh Andi Arief, target utama "penculikan" yang setelah dilepas menyatakan tidak mungkin penanggung jawab utama adalah Prabowo Subianto karena pasukan yang menahan dia berasal dari berbagai kesatuan, dan Kopassus masih menangkapi para "aktivis" sekalipun komandan Kopassus beralih kepada Muchdi Pr karena terhitung bulan Maret 1998 Prabowo diangkat sebagai Panglima Kostrad. Selain itu Andi Arief juga mengatakan:

"*Penculikan ini tidak mungkin salah prosedur. Jika salah prosedur, kok operasi sampai setahun, bahkan sampai ada pergantian Pangab. Seperti diketahui, Pius dan beberapa kawan yang lain diculik waktu Pangabnya Feisal Tanjung, sementara ketika saya, Pangabnya sudah ganti Wiranto. Juga bukan oknum. Kalau dilihat dari materi interogasi mereka mewakili sebuah rejim, bukan mewakili faksi tertentu dalam tentara*."

(http://www.minihub.org/siarlist/msg00378.html)

Semua tangkapan Kopassus dilepaskan dalam kondisi hidup sehingga Prabowo sudah tidak memiliki beban moral lagi, sedangkan untuk yang masih belum diketahui nasibnya kita harus bertanya kepada petinggi ABRI yang tahun 1997 dan 1998 memiliki kewenangan untuk memberi perintah kepada komandan Kopassus seperti Prabowo dan Kodim Jakarta Timur untuk menjalankan Operasi Mantap Jaya.

Kewenangan hanya dimiliki Panglima ABRI dan KSAD yang membawahi Kodam-Kodim-Korem-Koramil seluruh Indonesia, yakni: Panglima ABRI adalah Feisal Tanjung (21 Mei 1993 - 12 Februari 1998) sedangkan KSAD adalah Wiranto (13 Juni 1997 - 15 Februari 1998). Tahun 1998 Panglima ABRI adalah Wiranto (16 Februari 1998 - 26 Oktober 1999) sedangkan

KSAD adalah Soebagyo HS (16 Februari 1998 - 19 November 1999). Karena Soeharto dan Feisal Tanjung sudah meninggal maka bila mau membuka Operasi Mantap Jaya kita harus meminta pertanggung jawaban petinggi yang masih hidup yaitu Wiranto dan Soebagyo HS.

Kita bermain logika saja, bila "penculikan aktivis" adalah aksi spontan Prabowo yang tidak dilaporkan kepada Panglima ABRI dan KSAD, pertanyaan sederhananya, apa yang sudah dilakukan oleh Panglima ABRI dan KSAF untuk menindaklanjuti ledakan bom dan temuan dokumen di rumah susun Tanah Tinggi? Kita tahu kelompok senior sudah dipanggil dan diintrogasi, lantas tindakan apa yang sudah dilakukan terhadap 19 nama dalam rapat di Bogor karena zaman kepresidenan Megawati saja ledakan Bom Bali segera ditindaklanjuti dengan membentuk Densus 88 yang diberi kewenangan menembak mati terduga teroris tanpa dibawa ke pengadilan serta pengesahan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Semua fakta di atas sedikit banyak telah terkonfirmasi oleh temuan Notulen Rapat tertanggal 17 Juli 1998 yang ditandatangani oleh Pangab Jenderal Wiranto, KASAD Jenderal Subagio HS, Kasum Jenderal Fachrul Razi, Letjend Agum Gumelar dan Letjend Yusuf Kartanegara yang digelar di rumah Pangab Wiranto dan pada tanggal 23 Juni 2014, aslinya telah diserahkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia oleh Eko Wardaya selaku Koordinator Umum Jaringan Mahasiswa Indonesia untuk Keadilan (Jamaika). Dari notulen rapat tersebut terungkap hal-hal penting berikut:

- Pucuk pimpinan ABRI memiliki pengetahuan perihal penculikan 13 (tiga belas) aktivis yang sampai hari ini masih hilang, yaitu di dalam kontrol Pangkoops Jaya.

- Pangab Jenderal Wiranto marah karena Pangkostrad Jenderal Prabowo Soebianto tanpa izin melepas Sembilan aktivis. Perbuatan ini dianggap Wiranto sebagai langkah subordinasi yang menyebabkan tuntutan reformasi sebagai membesar.

- Agum Gumelar berpendapat perlu kanalisasi agar tercipta dalang penculikan aktivis dan kerusuhan 13-14 Mei 1998 dengan memanfaatkan kepergian para jenderal ke Malang. Disepakati mereka akan mengarahkan Prabowo Soebianto sebagai pelaku utama dengan cara dibentuk Dewan Kehormatan Perwira tanpa Mahkamah Militer untuk memberhentikan Prabowo agar tercipta opini publik yang mengotori nama Prabowo.

- Terakhir Wiranto memerintahkan agar aktivis yang masih di bawah pengendalian Pangkoops Jaya agar "disukabumikan."

  Menurut sejarahwan Hermawan Sulistiyo dalam buku Palu Arit di Ladang Tebu, halaman 163, istilah "sukabumi," bermakna ganda. Suka bumi adalah nama kota peristirahatan di Jawa Barat. Sukabumi juga gabungan dari dua kata "suka" dan "bumi". Istilah "sukabumi" yang kedua pada saat operasi penganyangan Angkatan Darat terhadap PKI diartikan sebagai "membuat seseorang menyukai bumi." Istilah ini merupakan penghalusan untuk tindakan pembunuhan, karena "pergi ke kota sukabumi," juga berarti "beristirahat."

Kerusuhan 13-14 Mei 1998 Dan Operasi Menghancurkan Prabowo Soebianto

"*Saya menganggap lawan utama Benny adalah Prabowo Subianto,*

menantu Presiden Soeharto."

(Jusuf Wanandi, Menyibak Tabir Orde Baru, hal. 327)

Mengapa Benny Moerdani menganggap Prabowo Subianto adalah lawan utamanya? Karena Prabowo telah menghancurkan rencana dan harapan kelompok Benny Moerdani dan CSIS untuk mendeislamisasi Indonesia dengan melakukan apa yang dikenal sebagai "debennysasi" atau menyingkirkan para perwira binaan Benny Moerdani. Sekarang kita pikirkan saja, bila Benny yang memandang Presiden Soeharto seperti seorang ayah saja bisa merekayasa kejadian untuk mendelegitimasi pencapaian Presiden Soeharto, bayangkan apa yang akan dia lakukan kepada musuh utamanya?

Sejalan dengan ini, Drs. H.M. Cholil Badawi dalam buku Mereka Tentang Sjafrie terbitan Red & White Publishing menulis:

"*Dalam suasana seperti itu, saya diberi informasi yang sangat penting bahwa kekuatan di tubuh Golkar yang menguasai politik di Indonesia secara mutlak itu, hakikatnya menjadi kuda tunggangan tokoh-tokoh Katholik, di antaranya Jenderal LB. Moerdani, yang menungganginya sebagai kendaraan menuju RI-II alias wakil presiden. Ambisi Benny Moerdani itu bahkan sudah mendapat dukungan dari DJ. Naro, Ketua Umum PPP. Diketahui pula untuk meraih ambisinya ini, Benny Moerdani bahkan siap berpindah agama. Tapi belakangan dengan melakukan re-check ke sekitar orang dekat Naro, rupanya informasi ini mengandung kebenaran.*"

Yang pasti Benny Moerdani bersama kliknya Merah-Putihnya yang tersisa di Angkatan Darat saat itu: Wiranto; Fachrul Razi; Soebagyo HS; dan lain-lain mempertahankan Kerusuhan 13-14 Mei 1998 dan bertujuan ganda yaitu delegitimasi Presiden Soeharto dan fitnah Prabowo dan tugas untuk melakukan hal tersebut dibebankan kepada Jenderal Wiranto, di bawah adalah buktinya:

1. Wiranto melaporkan kepada Presiden Soeharto bahwa Prabowo sering bertemu dengan pihak oposisi dan merupakan bagian dari komplotan untuk menjatuhkan Presiden Soeharto, padahal ini hanya fitnah karena Prabowo hanya berdialog dengan mereka dan berulang kali mengatakan kepada pihak oposisi bahwa selama konstitusional maka dia tidak akan menghalangi sekalipun rakyat ingin menurunkan Soeharto, posisi yang sebenarnya juga berulang kali dikatakan oleh Presiden Soeharto.

2. Wiranto menghasut BJ Habibie bahwa Prabowo mau kudeta dengan kerahkan pasukan ke rumah Habibie di Kuningan dan Istana Merdeka. Hasutan Wiranto membuat BJ Habibie "membuang" Prabowo ke Bandung untuk menjadi kepala Seskoad, padahal hal ini sama sekali tidak benar karena pasukan yang dikerahkan adalah bagian dari pengamanan presiden atas instruksi Wiranto sendiri.

3. Wiranto adalah orang yang memberi instruksi untuk mengadakan sebuah Dewan Kehormatan Perwira/DKP terhadap Prabowo dengan menempatkan tiga anggota klik Benny Moerdani yaitu: Jenderal Soebagyo HS; Letjend Fachrul Razi; dan Letjend Agum Gumelar bertentangan dengan SK Pangab No. 838/III/1995 bahwa DKP dibentuk setelah ada putusan Mahkamah Militer dan anggota

pemeriksa minimal satu tingkat lebih tinggi dari terperiksa. Rekomendasi DKP rekayasa tersebut diterima oleh Wiranto dan diajukan pemberhentian kepada Prabowo kepada BJ Habibie yang tanpa pikir panjang pada November 1998 langsung membuat keppres pensiun dini kepada Prabowo (bukan pemecatan).

4. Patut diduga kuat bahwa Wiranto adalah orang yang membocorkan rekomendasi DKP asli tentang Prabowo karena dia adalah penerima DKP asli yang ditandatangani oleh seluruh majelis DKP. Cara yang sama pernah dilakukan untuk fitnah SBY ketika beredar di kalangan wartawan draft press release tanggapan ABRI terhadap desakan NU supaya Presiden Soeharto mundur buatan SBY dan Mardiyanto. Draft buatan SBY terkesan ABRI menuntut Soeharto mundur sementara versi final tidak segamblang itu.

5. Mengapa Wiranto patut dicurigai? Karena menjelang dan sesudah Presiden SBY jatuh, Wiranto terbukti menjatuhkan semua perwira tinggi yang berpotensi menjadi saingan contoh Abdullah Mahmud Hendropriyono (sesama klik Benny Moerdani dan disebut sebagai calon Panglima ABRI) selain itu saat dijadwalkan membaca tanggapan ABRI, dia malah pergi tidur, sehingga ketika Wahab Mokodongan membacakan press release resmi, dan pada saat bersamaan draft versi SBY dibagikan ke jurnalis, maka Wiranto bisa cuci tangan pura-pura tidak tahu. Dampak kepada SBY cukup fatal karena dia dianggap tidak loyal kepada atasan dan sejak itu karir militernya tersumbat sampai diselamatkan Megawati dengan mengangkatnya menjadi menteri (buku Selalu Ada Pilihan).

6. Tudingan bahwa Wiranto sengaja tidak memadamkan Kerusuhan 13-14 Mei 1998 juga datang dari koleganya: Letnan Jenderal (Purnawirawan) Sintong Panjaitan, yang dalam memoir berjudul Perjalanan Prajurit Para Komando halaman 3 – 4 menuduh bahwa Wiranto membiarkan kerusuhan rasial itu karena ingin dipilih lagi menjadi Menhan/Panglima TNI untuk rezim pasca Soeharto.

Selain itu Tim Gabungan Pencari Fakta/TGPF Kerusuhan 13-14 Mei 1998 yang dibentuk saat itu dan belakangan diamini oleh Brigjend (Purn) Slamet Singgih, menemukan bahwa ada sekelompok orang tidak dikenal yang sangat lihai memprovokasi dan menghasut warga untuk menjarah; membunuh dan membakar di lokasi-lokasi kerusuhan, selain itu terkesan ada pembiaran dari aparat keamanan supaya kerusuhan meluas yang terbukti dari tidak ada satupun polisi atau tentara yang menghalau perusuh. Dengan demikian ada dua fakta yang harus dicari untuk membawa pelakunya ke pengadilan:

1. Siapa dalang yang merekayasa kerusuhan di lapangan?; dan

2. Siapa perwira tinggi ABRI (TNI/Polri) yang merekayasa supaya semua aparat keamanan berdiam di tempat?

Di bawah ini adalah jawabannya:

Ad. 1. Dalang kerusuhan adalah Benny Moerdani yang dalam sebuah rapat di rumah tokoh Golkar yang sekarang mendukung Jokowi, Fahmi Idris, pernah melontarkan gagasan menjatuhkan Presiden Soeharto menggunakan gerakan massa yang berpotensi mengejar orang-orang China dan gereja. Saat itu hanya Benny yang memiliki kemampuan merekayasa

kerusuhan sebesar Kerusuhan 13-14 Mei 1998.

Ad. 2. Namun demikian untuk bisa melancarkan operasi merekayasa kerusuhan tersebut Benny Moerdani yang sudah tidak mempunyai jabatan membutuhkan orang yang bisa menahan aparat keamanan supaya tidak memadamkan kerusuhan sebelum meluas. Siapa orang itu? Tidak lain dari Panglima ABRI Jenderal Wiranto sendiri sebagaimana ditulis oleh sahabat Benny, Jusuf Wanandi dan Professor Salim Said, pakar militer terkemuka bahwa setelah diangkat sebagai Panglima ABRI, Wiranto meminta kesempatan bertemu secara berkala dan ditolak Benny Moerdani:

"*Jangan berilusi, orang tua itu [Soeharto] tidak menyukai saya, tidak percaya kepada saya. Anda harus tetap di sana karena Anda satu-satunya yang kita miliki. Jangan membuat kesalahan karena kariermu akan selesai jika Soeharto tahu Anda dekat dengan saya*."

(Jusuf Wanandi, Menyibak Tabir Orde Baru, hal. 365-366; Salim Said, Dari Gestapu Ke Reformasi hal. 320).

Adakah alasan bagi Panglima ABRI Jenderal Wiranto untuk pergi ke Malang membawa seluruh pucuk pimpinan tertinggi ABRI yaitu KSAS, KSAL, KSAU, Pangkostrad ke Malang sementara malam sebelumnya sudah ada peringatan dari Zacky Anwar Makarim bahwa besok pasti terjadi kerusuhan menunggangi tertembaknya mahasiswa Trisakti oleh peluru Brimob yang menyamar sebagai kopassus itu dan Presiden Soeharto sedang ke Kairo? Tidak ada, kecuali Panglima ABRI Jenderal Wiranto secara sengaja bermaksud membiarkan kerusuhan yang sudah dia ketahui pasti akan terjadi.

Apakah acara ke Malang itu begitu penting sehingga kehadiran Panglima ABRI Jenderal Wiranto sangat diperlukan dan acara tersebut harus didahulukan sampai membawa KSAU, KSAD, KSAL, Pangkostrad di atas keamanan ibukota yang sudah diperkirakan akan rusuh? Tidak, karena acaranya hanya penggantian komandan sebuah pasukan dan Panglima ABRI Jenderal Wiranto sudah diusulkan untuk diganti oleh Kasum Letjend Fachrul Razi tapi ditolak Panglima ABRI Jenderal Wiranto dengan alasan: "*The show must go on*."

Siapa lagi orang di Indonesia yang cukup berkuasa untuk mencegah pasukan tiga angkatan dari Laut, Udara, Darat dan Kepolisian keluar dari barak untuk menghalau perusuh selain Panglima ABRI Jenderal Wiranto? Dia sendiri mengakui bahwa saat itu yang cukup kuat untuk melakukan kudeta adalah Panglima ABRI, yaitu Wiranto. Selain itu, dalam memoirnya berjudul Bersaksi Di Tengah Badai, terbitan Ide Indonesia, Wiranto secara tidak langsung mengakui bahwa kerusuhan rasial tahun 1998 adalah berkaitan dengan usaha menjatuhkan Presiden Soeharto dan mendatangkan reformasi, antara lain dalam halaman 51:

"*Mengapa dalam judul ini saya menyatakan bahwa peristiwa kelabu pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998 adalah garis sejarah. Peristiwa tersebut tidak terjadi begitu saja, peristiwa itu juga tidak terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa itu sebenarnya merupakan puncak dari rangkaian peristiwa yang mengawalinya. Bisa dikatakan pula sebagai titik kulminasi dari suatu proses panjang dinamika kehidupan suatu bangsa yang disebut Indonesia yang sedang menginginkan suatu perubahan, baik menyangkut perubahan format perpolitikan nasional maupun perubahan yang mengara kepada perbaikan ekonomi nasional. Dan yang paling signifikan adalah adanya kehendak melakukan sirkulasi kekuasaan yang selama lebih dari tiga*

dasawarsa dikuasai Orde Baru yang mengedepankan dominasi kekuaan politik dari Golongan Karya."

Pada halaman 58 memoirnya, Wiranto semakin menegaskan bahwa Kerusuhan 13-14 Mei 1998 membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang ingin "menjebol Orde Baru," yakni sebagai berikut ini:

"*Sedangkan pihak yang menginginkan Orde Baru tumbang katakanlah Orde Reformasi-yang sebenarnya merupakan pihak yang diuntungkan atas peristiwa itu-tentu akan memandang peristiwa Mei 1998 sebagai 'kepedihan yang membawa berkah' Ini logis juga bukan? Sebab mereka atau katakanlah sebagian dari mereka, termasuk yang menggagas, memulai dan melakukan demonstrasi sebagai cara menentang Orde Baru, langsung atau tidak langsung, telah mendorong terjadinya peristiwa Mei 1998…Namun di sisi lain, tak dapat dipungkiri adanya nuansa kebahagiaan dengan keberhasilannya menjebol tembok pertahanan rezim Orde Baru yang selama ini dikenal sangat kokoh.*"

Penjahat berikutnya adalah Kasum Letjen Fachrul Razi. Kesalahan dia yang paling fatal dan menentukan kematian ribuan rakyat Indonesia yang tidak berdosa adalah melarang Pangkostrad Letjend Prabowo mengintegrasikan pasukan di bawah Kostrad dengan Kodam Jaya untuk menambah pasukan. Alasan penolakan tersebut adalah bahwa pasukan di bawah Kodam Jaya sudah cukup mengatasi kerusuhan. Namun kesaksian mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana (Purn) Arief Kusharyadi melibas habis keterangan Letjend Fachrul Razi bahwa pasukan di Jakarta sudah cukup karena di depan Tim Ad Hoc Kerusuhan Mei 1998 Komisi Nasional HAM, dia mengatakan bahwa ketika kerusuhan terjadi tanggal 14 Mei 1998, dia keliling Jakarta dan TIDAK ADA SATUPUN

PASUKAN di lapangan, padahal jumlah pasukan di Jakarta adalah 110 satuan setingkat kompi yang terdiri dari Yonif 327 Brawijaya, Grup I Kopassus, Kostrad, Marinir, dan tiga skuadron helikopter TNI Angkatan Udara. Keterangan di atas serupa dengan kesaksian dari Brigjend (Purn) Slamet Singgih yang tidak menemukan aparat keamanan ketika dia hendak menyelamatkan kawan anaknya dari massa perusuh. Kemana pasukan-pasukan tersebut ketika kerusuhan terjadi?

Tentu saja semua pasukan tadi tidak bisa asal keluar barak karena mereka membutuhkan izin dari atasan, termasuk Pangkostrad Letjend Prabowo sekalipun harus meminta izin terlebih dahulu untuk menerjunkan pasukan, dan permintaan Prabowo menurunkan pasukan ditolak mentah-mentah oleh Kasum Letjend Fachrul Razi yang merupakan anggota klik Wiranto tersebut! Senada dengan penolakan Prabowo mengerahkan pasukan mengatasi perusuh, dalam hal ini atasan-atasan mereka yaitu KSAD, KSAL, KSAU dan Kapolri tidak menerima instruksi apapun dari atasan para kepala staf itu yakni Panglima ABRI Jenderal Wiranto. Seandaipun Wiranto tidak bersalah mendalangi Kerusuhan Mei tapi semua tindakannya telah membiarkan kerusuhan meluas dan ini sudah cukup alasan untuk membawanya ke Mahkamah Militer atau mempidanakan dia! Preseden hal ini sudah ada ketika Sintong Panjaitan dipecat dari posisi Pangdam Udayana karena kerusuhan Santa Cruz.

Pembiaran Wiranto atas Kerusuhan 13-14 Mei 1998 secara gamblang terlihat dari deskripsi peran Mayjend Sjafrie Sjamsudin selaku Pangdam Jaya dan Jenderal Wiranto selaku Panglima ABRI saat terjadinya Kerusuhan 13-14 Mei 1998, Atmadji Sumarkidjo, wartawan senior Suara Pembaruan, dalam buku Mereka Tentang Sjafrie, terbitan White & Red Publishing, halaman 37 – 39:

“*Sebenarnya pada waktu itu, tidak banyak yang tahu bahwa kewenangan seorang Pangdam Jaya sebagian “terbelenggu”. Berdasarkan Telegram Rahasia (TR) Panglima ABRI/Ketua Bakorstanas (Badan Koordinasi Stabilitas Nasional) No. TR/14/STANS/1998, ditegaskan bahwa komando pengendalian (kodal) operasi penanggulangan huru-hara di setiap provinsi adalah tanggung jawab Kepala Kepolisian Daerah. Butir selanjutnya TR tersebut menyebutkan bahwa Pangdam bisa mengambil alih Kodal “bila terjadi perkembangan situasi” atau bila ada perintah khusus dari Panglima ABRI.*

Jelas sekali bahwa Kepolisian, dalam hal itu Polda Metro Jaya, yang bertanggung jawab atas masalah keamanan di seluruh wilayah DKI Jakarta, sementara Pangdam Jaya hanya memberi dukungan…Harus dicatat, rapat malam itu Polda tidak memutuskan pelimpahan Kodal dari Kapolda kepada Pangdam Jaya; di samping itu Pangab juga belum menginstruksikan hal demikian…

Kata Bambang Soeharto dalam bukunya, “...situasi politik waktu itu sangat kompleks di mana kekuatan-kekuatan politik maupun pimpinan militer saling bertabrakan…” Ketika pada tanggal 14 Mei 1998 situasi semakin tidak dapat dikendalikan, polisi banyak yang tidak bertugas atau meninggalkan posnyaa; bahkan Polsek Matraman habis dibakar, sementara jumlah pos polisi lainnya dirusak massa, Pangdam Sjafrie akhirnya mengambil alih Kodal Operasi dari Kapolda Metro Jaya. Itu terjadi baru sekitar pukul 11.00 pagi itu...Seandainya Kapolri dan Kapolda [dan Panglima ABRI] sudah menyerahkan Kodal sejak hari pertama, mungkin situasi akan berbeda…”*

*Kata dalam kurung penambahan dari penyusun.

Sekali lagi diingatkan saat Panglima Tertinggi ABRI Jenderal Besar Presiden Haji Mohamad Soeharto ada di luar negeri, maka di Indonesia hanya seorang Panglima ABRI yang bisa menahan instruksi untuk menggelar pasukan empat angkatan sekaligus, dan bahkan Pangkostrad Letjend Prabowo Subianto juga tidak mampu melakukan hal tersebut.

Kita kembali kepada kesaksian KSAL Laksamana (Purn) Arief Kusharyadi yang melihat kosongnya Jakarta, dia mendatangi lokasi parkir panser marinir tapi kosong juga, karena itu dia berinisiatif tanpa melapor ke Panglima ABRI Jenderal Wiranto mendatangkan pasukan marinir dari Surabaya ke Jakarta. Dari markas marinir di Cilandak KKO, pasukan disebar ke seluruh Jakarta menghalau para perusuh, dan karena itulah nama marinir sesudah Kerusuhan 13-14 Mei 1998 menjadi sangat harum karena para pasukan marinir tersebut menyelamatkan jiwa mereka.

Coba pikir apakah seorang pangkostrad bisa membuat marinir di Jakarta menghilang dari markas marinir tanpa sepengetahuan KSALnya? Tidak mungkin, hanya Panglima ABRI Jenderal Wiranto yang berkuasa melakukan hal tersebut. Nah, kita juga mengetahui bahwa sebagai Pangkostrad, Prabowo memiliki pasukan kostrad tapi tidak bisa digunakan atau keluar karena dilarang oleh Panglima ABRI Jenderal Wiranto dan Kasum Letjend Fachrul Razi.

Dari apa yang dilakukan oleh mantan KSAL Laksamana (Purn) Arief Kusharyadi yang berinisiatif menerjunkan marinir dari barak sekalipun harus menarik dari Surabaya maka terungkap satu fakta menentukan bahwa bila ada elemen militer yang terlibat dalam kerusuhan maka dapat dipastikan berasal dari angkatan darat karena terbukti Angkatan Laut tidak tahu apa-apa, sedangkan Angkatan Udara sudah lama menjadi anak tiri

karena mantan panglima mereka yaitu Omar Dhani terlibat G30S/PKI sehingga saat Orde Baru kekuatan Angkatan Udara sangat kecil dan kurang diperhitungkan, sedangkan kepolisian tidak mungkin menjalankan operasi seperti Kerusuhan 13-14 Mei 1998.

Karena terbukti personil Angkatan Darat terlibat maka Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) saat itu yaitu Jenderal Soebagyo HS juga wajib dibawa ke Mahkamah Militer karena dia juga membiarkan terjadinya kerusuhan terbukti mengapa dia tidak memiliki inisiatif seperti koleganya, KSAL Laksamana (Purn) Arief Kusharyadi untuk memeriksa lapangan kemudian mengerahkan pasukan menghalau perusuh? Apa kerja dia sebagai KSAD? Di mana tanggung jawab Soebagyo HS sebagai KSAD? Kemana hati nurani Soebagyo HS?

Soebagyo HS memang hampir dicopot dari jabatan KSAD sejak kerusuhan di Solo, Jakarta dan Medan meledak pada bulan Mei 1998 karena dianggap sebagai klik Prabowo namun batal. Mengapa demikian? Karena jenderal yang anaknya, Letda (Inf) Agus Isrok pernah ditangkap karena terlibat perdagangan narkoba dan pelecehan seksual kepada tiga wartawati ini sebelum Kerusuhan Mei diam-diam telah mengalihkan kesetiaannya kepada Panglima TNI Jenderal Wiranto, namun dasar culas setelah Kerusuhan Mei, dia berusaha mengipasi Presiden Soeharto untuk menggeser Wiranto sebagai Panglima ABRI ketika ditawari posisi panglima kopkamtib yang akan dibentuk dengan alasan tidak mau ada "dua matahari" di dalam ABRI. Akhirnya Soeharto memberikan "supersemar" yang sedianya diberikan kepada Soebagyo HS kepada Wiranto.

Selanjutnya tim SiaR yang dibentuk Goenawan Mohamad pernah menemukan bukti bahwa perancang, perekayasa, dalang kerusuhan di

Timor Timur pasca referendum tidak lain dari KSAD Jenderal Soebagyo HS dan hal ini mengemuka dari dokumen rahasia TNI yang diungkap koran Inggris, The Independen edisi minggu 6 Januari 2000 bahwa KSAD Jenderal Soebagyo HS adalah salah satu otak kerusuhan dan bumi hangus di Timor Timur salah satunya terbukti dari surat perintah dari Soebagyo HS untuk melakukan tindakan represif dan kekerasan di Timor Timur demi mempertahankan kawasan tersebut di dalam Timor Timur. Sumber the Independent adalah dokumen-dokumen rahasia yang tercecer di gedung bekas markas Korem 164/Wiradharma, Dili yang telah ditinggalkan.

lihat: http://www.minihub.org/siarlist/msg04428.html

Tentu saja Panglima ABRI Jenderal Wiranto juga bertanggung jawab dan saat itu sudah hampir dipastikan akan dibawa ke International Court of Justice untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya membantai rakyat Timor Timur, namun perlindungan yang dilakukan Presiden SBY dan keinginan Xanana Gusmao untuk berdamai dengan masa lalu demi pembangunan Timor Leste yang bertetangga dengan Indonesia berhasil melindungi diseretnya Wiranto yang dapat dipastikan akan digantung seperti Sadam Hussein atau para penjahat Nazi bila dinyatakan bersalah oleh panel majelis hakim di ICJ.

Selain itu tentu saja "atasan" Prabowo ketika menjadi Komandan Kopassus adalah Panglima ABRI Jenderal Wiranto; Letnan Jenderal Fachrul Razi; dan KSAD Jenderal Soebagyo HS yang hari ini mendukung Jokowi-JK. Ditambah AM Hendropriyono; Muchdi Pr; Ass'at; Da'i Bachtiar; Sutiyoso; Megawati Soekarnoputri, maka lengkaplah kelompok pembunuh rakyat di kubu Jokowi-JK. Mau menegakan HAM di Indonesia? Mulailah dengan membawa Wiranto; Fachrul Razi; Soebagyo HS; AM Hendropriyono;

Muchdi Pr; Ass'at; Da'I Bachtiar; Megawati Soekarnoputri; Agum Gumelar; Sutiyoso ke meja pengadilan dan menggantung mereka di depan rakyat Indonesia!

B. BENANG MERAH KERUSUHAN MEI DAN KERUSUHAN TIMOR LESTE

Membicarakan Kerusuhan 13-14 Mei 1998 sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari pembantaian, pemerkosaan, penganiyaan, pengusiran paksa penduduk setempat, sampai pembumihangusan massal terhadap rumah, kantor dan gereja terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat yang dilakukan 5 September 1999 dengan hasil mayoritas memilih merdeka. Polanya sungguh mirip dengan perampokan, pemerkosaan, pembumihangusan rumah dan kantor, serta penganiyaan pada Kerusuhan 13-14 Mei 1998 bukan?

Menanggapi kejadian tersebut, Komisi Hak Asasi Manusia PBB mengadakan sidang darurat yang diadakan di Jenewa tanggal 23-27 September 1999 dan menyimpulkan telah terjadi kolusi antara tentara, polisi dan milisi lokal. “Kebetulan”, walaupun memiliki posisi berbeda, tapi pemimpin militer saat Kerusuhan 13-14 Mei 1998 adalah orang yang sama dengan saat kerusuhan di Timor Timur 1999: Wiranto (Panglima ABRI saat 1998; Menhankam saat 1999); Subagyo HS tidak berubah; dan Fachrul Razi (Kasum saat 1998 dan Wakil Panglima TNI saat 1999).

Atas desakan internasional, Pemerintah Indonesia dan Komnas HAM melalui Keputusan No. 770/TUA/IX/99 tanggal 22 September 1999 membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia Timor Timur (KPP HAM Timtim) dengan hasil telah terjadi kejahatan

kemanusiaan (*crime against humanity*) karena terjadi pembunuhan massal, perbudakan, pemerkosaan, pembumihangusan rumah tinggal dan kantor, dan pengusiran paksa.

Temuan lain adalah pelaku berdasarkan bukti yang dikumpulkan KPP HAM Timtim adalah tentara, polisi, milisi yang melanggar hak asasi *by commission* dan *by omission*, jadi pelaku bukan orang di lapangan saja, melainkan orang yang memegang tampuk komando, dan dalam hal ini Jenderal Wiranto dianggap yang paling bertanggung jawab serta direkomendasikan untuk disidik dan diadili. Dalam kasus ini ini KPP HAM Timtim memberlakukan doktrin "command responsibility" yang lahir dari pengadilan Nuremberg untuk menjerat puncak komando saat itu. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia sudah memberlakukan doktrin ini (lihat Pasal 42 UU No. 26/2000).

Anda tahu yang ironis dan menyedihkan dalam kasus ini? Munir, salah satu anggota KPP HAM Timtim dibunuh oleh trio BIN: Hendropriyono; Muchdi Pr; dan Ass'at; dan Todung Mulya Lubis adalah Wakil Ketua dari KPP HAM Timtim yang menyatakan Jenderal Wiranto bersalah karena membantai rakyat Timtim. Hari ini Todung Mulya Lubis bukan saja bergandengan tangan dengan trio pembunuh Munir koleganya, tapi juga bergandengan tangan dengan Wiranto yang dalam laporan akhir KPP HAM Timtim adalah penanggungjawab utama kerusuhan di Timtim tahun 1999. Sungguh, saya tidak tahu harus menangis atau meringis.

Sama halnya dengan kerusuhan di Timtim tahun 1999, Kerusuhan 13-14 Mei 1998 adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh tentara, polisi dan preman yang terjadi by commission dan by ommission oleh puncak komando ABRI, yaitu Panglima ABRI Jenderal

Wiranto, KSAD Letjend Soebagyo HS, dan Kasum Letjend Fachrul Razi karena berdasarkan kesaksian mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana (Purn) Arief Kusharyadi dan Pangkostrad Letjend (Purn) Prabowo Subianto ternyata tidak ada pasukan di Jakarta pada saat kerusuhan berlangsung, dengan kata lain terjadi pembiaran berlangsungnya kerusuhan yang diikuti dengan perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, pembumihangusan rumah dan kantor, dan Kasum Letjend Fachrul Razi bahkan secara aktif melarang siapapun untuk mengeluarkan pasukan dari barak demi menghalau perusuh.

Bukti pembiaran pertama dengan terang benderang dilakukan oleh Panglima ABRI Jenderal Wiranto karena setelah terjadinya kerusuhan di Jakarta tanggal 13 Mei 1998, keesokan harinya dia malah membawa seluruh perwira tinggi yang punya kewenangan komando ke Malang demi sebuah acara seremonial padahal sudah diperkirakan kerusuhan akan berlanjut. Coba pikir dengan logika, Panglima Militer mana yang akan membawa KSAL, Pangkostrad, KSAU, KSAD dan Komandan Jenderal Kopassus ke luar kota untuk acara serah terima jabatan tidak penting selama 6,5 jam ketika ibukota dilanda kerusuhan? Selain itu, dalam memoirnya berjudul Bersaksi Di Tengah Badai, terbitan Ide Indonesia, Wiranto secara tidak langsung mengakui bahwa kerusuhan rasial berkaitan dengan usaha menjatuhkan Presiden Soeharto dan mendatangkan reformasi, antara lain dalam halaman 51:

"*Mengapa dalam judul ini saya menyatakan bahwa peristiwa kelabu pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998 adalah garis sejarah. Peristiwa tersebut tidak terjadi begitu saja, peristiwa itu juga tidak terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa itu sebenarnya merupakan puncak dari rangkaian peristiwa yang mengawalinya. Bisa dikatakan pula sebagai titik kulminasi dari suatu*

proses panjang dinamika kehidupan suatu bangsa yang disebut Indonesia yang sedang menginginkan suatu perubahan, baik menyangkut perubahan format perpolitikan nasional maupun perubahan yang mengara kepada perbaikan ekonomi nasional. Dan yang paling signifikan adalah adanya kehendak melakukan sirkulasi kekuasaan yang selama lebih dari tiga dasawarsa dikuasai Orde Baru yang mengedepankan dominasi kekuaan politik dari Golongan Karya."

Pada halaman 58 memoirnya, Wiranto semakin menegaskan bahwa Kerusuhan 13-14 Mei 1998 membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang ingin "menjebol Orde Baru," yakni sebagai berikut ini:

"*Sedangkan pihak yang menginginkan Orde Baru tumbang katakanlah Orde Reformasi-yang sebenarnya merupakan pihak yang diuntungkan atas peristiwa itu-tentu akan memandang peristiwa Mei 1998 sebagai 'kepedihan yang membawa berkah' Ini logis juga bukan? Sebab mereka atau katakanlah sebagian dari mereka, termasuk yang menggagas, memulai dan melakukan demonstrasi sebagai cara menentang Orde Baru, langsung atau tidak langsung, telah mendorong terjadinya peristiwa Mei 1998…Namun di sisi lain, tak dapat dipungkiri adanya nuansa kebahagiaan dengan keberhasilannya menjebol tembok pertahanan rezim Orde Baru yang selama ini dikenal sangat kokoh.*"

Bukti pembiaran kedua dilakukan oleh KSAD Jenderal Soebagyo HS yang tidak melakukan apapun ketika Ibukota rusuh, padahal dia adalah atasan langsung Panglima Kodam Jaya, Sjafrie Syamsoedin. Mengapa Soebagyo HS diam saja? Padahal koleganya dari angkatan laut yaitu mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana (Purn) Arief Kusharyadi secara aktif memeriksa lokasi parkir panser angkatan laut yang ternyata

kosong (!) dan secara aktif memanggil pasukan marinir dari Surabaya untuk datang ke Jakarta sebelum berangkat ke Malang. Pasukan marinir inilah yang menyelamatkan jiwa rakyat Jakarta sementara KSAD kabur ke Malang bersama Panglima ABRI dan Kasum!

Pembiaran ketiga adalah fakta bahwa Kasum Letjend Fachrul Razi melarang Pangkostrad menyerahkan pasukannya kepada Kodam Jaya dengan alasan pasukan di Jakarta sudah cukup padahal alasan ini dibantah oleh mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana (Purn) Arief Kusharyadi karena dia menyaksikan menggunakan mata dan kepala sendiri bahwa tidak ada pasukan penjaga di Jakarta saat kerusuhan!

Wiranto, Fachrul Razi, dan Soebagyo HS memang selamat dari pengadilan ICJ atas pelanggaran HAM berat yang mereka lakukan di Timtim karena SBY berhasil mengagalkan pembentukan The Commission of Expert oleh PBB dan diganti dengan The Commission of Truth and Friendship dan Xanana Gusmao bersedia menerima karena dia mau menutup catatan buruk dengan Indonesia dan memulai lembaran baru. Kendati selamat dari ICJ tapi bukan berarti Wiranto, Fachrul Razi dan Soebagyo HS bisa bebas melenggang begitu saja sebab hukum nasional kita masih berlaku atas mereka dan kesimpulan akhir KPP HAM Timtim yang merekomendasikan penyidikan dan pengadilan terhadap Wiranto masih ada.

Demikian pula dengan Kerusuhan 13-14 Mei 1998, Wiranto; Fachrul Razi; dan Soebagyo HS harus diadili dan dihukum mati karena membiarkan terjadinya kerusuhan yang membunuh ribuan jiwa manusia tidak berdosa; pemerkosaan; penganiayaan dan pembumihangusan harta benda milik rakyat, dan bahkan Fachrul Razi secara aktif melarang pengerahan pasukan untuk menghalau perusuh!!!

C. BERBUKA DENGAN BOM DI TANAH TINGGI

Sebuah bom meledak di rumah susun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.

Benarkah bom itu dirakit oleh aktivis PRD? Ruang seluas 4 x 4 meter itu hancur berantakan. Langit-langitnya yang bercat putih porak-poranda, atapnya ambrol, dindingnya retak-retak, dan salah satu sudutnya jebol. Sejumlah perlengkapan dapur berserakan di sana-sini. Ada mihun, panci, piring, dan kompor. Dan daun pintunya terlepas. Ada pula bercak darah hingga koridor ke arah tangga. Itulah rumah apartemen No. 510 di lantai 5 Blok V, Rumah Susun (rusun) Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, tempat meledaknya bom rakitan, Ahad (18/1).

Bom itu meledak selang beberapa saat setelah bedug buka puasa ditabuh. Dan warga rumah susun berlantai lima itu tengah menikmati hidangan buka bersama keluarga masing-masing. Dor! Lampu mendadak padam. Warga tampak panik dan berlarian menuju tempat terdengarnya suara mengejutkan itu. Membekuk Pelaku. Melihat warga menyerbu rumah berdinding putih itu, tiga pemuda yang tampak terluka berusaha melarikan diri. Tapi di lantai IV, warga berhasil membekuk Agus Prayitno (24), salah seorang penghuni rumah tersebut. Dua lainnya berhasil melarikan diri.

"*Kami curiga karena ia belepotan darah dan luka di bagian kepala dan tangannya*," kata Mukhlis, Ketua RT 10 Tanah Tinggi. Agus dan kawan-kawannya semula diduga menyulut petasan.

Tak pelak, warga kontan ramai-ramai memukuli Agus, yang konon adalah mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Jawa Tengah, sebelum akhirnya diserahkan kepada Polres Jakarta Pusat. Polisi segera memeriksa tempat

kejadian. Dari kamar yang porak-poranda itu, polisi menemukan peralatan untuk meracik bom. Ada obeng, stang, kabel, dan botol berisi belerang. "*Kami juga menyita 10 bom yang sudah siap diledakkan*," kata Kapolres Jakarta Pusat, Letkol (Pol) Iman Haryatna.

Ada pula telepon genggam, pager, dan laptop. Iman menduga, alat-alat tersebut dipakai untuk menjalin hubungan dengan jaringan perakit bom itu. "*Kami masih terus melacak beberapa orang yang sering datang ke kamar itu*," tambah Iman. Polisi juga menyita beberapa buku dan dokumen penting yang tercecer di kamar tersebut. Di antaranya, buku Peristiwa 27 Juli –yang resmi dilarang. Dari beberapa barang bukti, Iman mensinyalir bahwa perakit bom yang meledak di luar rencana itu adalah aktivis KNPD (Komite Nasional Perjuangan Demokrasi). Menurut Iman, ini adalah organisasi pengganti Partai Rakyat Demokratik (PRD), yang dibubarkan pemerintah pada September tahun lalu. "*Mereka hanya ganti nama saja*," tandasnya. Sejak beberapa pekan silam, nama KNPD memang beredar di tengah masyarakat. Mereka mencatut nama sejumlah tokoh seperti Abdurahman Wahid dan Amien Rais –tentu tanpa konfirmasi– sebagai pendukung organisasi tersebut.

Tapi, benarkah perakit bom itu adalah aktivis PRD? Kassospol ABRI, Letjen Yunus Yosfiah tak menunjuk langsung organisasi tersebut. Yang jelas, katanya, kasus tersebut menunjukkan adanya kelompok yang ingin berbuat jelek terhadap bangsa. Karena itu, "*Kalau ABRI selalu menyampaikan agar masyarakat waspada*," katanya, "*itu bukan mengada-ada.*" Ketua Umum Partai Rakyat Demokrat (PRD), Budiman Sudjatmiko, membantah keterlibatan kelompoknya. "*Prinsip perjuangan PRD adalah gerakan damai. Jadi, tidak benar PRD yang melakukan kegiatan tersebut,*" ujarnya kepada UMMAT. Budiman mempersilakan aparat terkait untuk

melakukan pembuktian atas kasus ini. "*Kalau memang terbukti perakitan bom tersebut adalah kebijakan organisasional PRD, saya bersedia bertanggung jawab*," katanya.

Jarang Bergaul. Ketiga pemuda itu mulai tinggal di rusun Tanah Tinggi sejak dua bulan silam. Warga rusun mengaku sudah lama mencurigai penghuni rumah kontrakan milik Sunardi itu. "*Mereka tertutup dan jarang bergaul dengan warga lainnya*," kata Khomiruddin, pemuda yang tinggal di depan rumah itu. Setiap hari, puluhan pemuda datang silih berganti. Dari kamar yang hanya beralaskan tikar itu, sering pula terdengar rapat atau suara-suara sedang merakit sesuatu. Sunardi sendiri agaknya tak ambil peduli dengan kegiatan anak-anak muda yang menyewa rumahnya itu. "*Dia (Sunardi) jarang mengontrol ke sini dan tak tahu-menahu dengan kegiatan penyewa,*" tambah Khomiruddin.

Kegiatan di rumah tersebut agaknya memang sangat serius. Menurut Dandim Jakarta Pusat, Letkol Moeldoko, berdasar dokumen yang disita, KNPD malah sedang merencanakan serangkaian gerakan untuk mengacaukan keamanan. Namun, Moeldoko tak merinci bentuk dan waktu kekacauan yang direncanakan itu. Yang jelas, katanya, kalau terlaksana ia bisa meresahkan masyarakat.

Apalagi, organisasi yang secara resmi dibentuk awal Januari lalu itu, masih menurut Moeldoko, diorganisasikan secara rapi dan disokong oleh dana yang besar. Ini, setidaknya, bisa dilihat dari alat komunikasi canggih yang mereka gunakan. Maka, dengan meledaknya bom rakitan itu, Moeldoko tampak lega. "Syukurlah sudah bisa kita gagalkan," katanya. Dan warga rusun Tanah Tinggi pun bisa berbuka puasa dengan tenang. Jamal D. Rahman, Hamid Abidin, Taufik Rinaldi.

D. SURYA PALOH, BOM TANAH TINGGI DAN PRD

Pemimpin Umum Media Indonesia (MI) Surya Paloh membantah dirinya memiliki kaitan dengan organisasi yang menamakan dirinya ”Partai Rakyat Demokratik” (PRD). “*Saya katakan saya tidak kenal sama sekali, dan memang sejujurnya pada bulan suci Ramadhan ini saya tidak mengenal orang-orang itu. Saya tidak pernah ada sangkut paut apa pun*.”

Jadi tidak ada korespondensi, tidak pernah ada pertemuan,” ujarnya. Surya Paloh mengemukakan hal itu dalam jumpa pers yang dilaksanakan di kantor Media Indonesia, Jakarta, Selasa (27/1) sore, sehubungan dengan kedatangan Surya Paloh pagi harinya ke kantor Komandan Satuan Tugas Detasemen Intel Kodam Jaya di Jl Kramat V, untuk memenuhi undangan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional Daerah (Bakorstanasda) Jaya. Menurut Surya Paloh, dalam pertemuan sekitar 40 menit itu, ia ditanya soal fotokopy sebuah dokumen (*e-mail*) yang berkaitan dengan kelompok PRD.

Dalam dokumen itu nama Surya Paloh disinggung. “Di situ tertulis bahwa peranan media massa saat ini cukup membantu gerakan PRD, dan di sini Bung Surya telah memberikan jasa yang besar,” kata Surya Paloh. Pada kesempatan itu Surya Paloh menegaskan garis politisnya, yaitu menentang gerakan-gerakan seperti PRD yang ingin merusak pembangunan bangsa.

Ia percaya Pemerintah Indonesia memiliki kemampuan untuk mengatasi krisis yang melanda negeri ini. “Tapi sebagai warga negara saya harus bersikap proaktif. Ini upaya yang preventif dari pihak aparat keamanan. Jadi saya tidak melihat undangan ini sebagai hal yang luar biasa,” katanya. Menanggapi pertanyaan, Suryo Paloh mengatakan,”*Saya ajak diri saya*

untuk berpikir positif. Dan saya ajak agar kita semua berpikir positif. Ini mungkin hanya tindakan preventif yang diambil oleh aparat keamanan, dan saya pikir sampai batas ini kita harus sambut baik.” Ketika ditanya apakah pemanggilan dirinya berkaitan juga dengan pemecatan terhadap seorang wartawati Media Indonesia yang menulis kasus ledakan bom rakitan di Tanahtinggi, Surya Paloh mengemukakan bahwa masalah tersebut tidak ditanyakan. “*Tapi seperti saya katakan, saya tidak akan ragu mengambil tindakan apa pun juga kalau hal itu dianggap memang mengganggu dan mengancam upaya penerbitan yang kita jalankan, dalam kaitan keamanan nasional*.”

Ia juga menambahkan, dalam pertemuan tersebut aparat menanyakan apakah ia anggota FKPPI (Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri ABRI). “*Saya jawab, saya bukan saja dari FKPPI tapi saya pendiri FKPPI.*” Surya tidak bisa memastikan apakah dirinya masih akan dipanggil lagi. “*Tapi saya siap untuk memenuhi apa saja demi kepentingan pemerintah*.”

Didampingi asisten Surya Paloh datang ke Kramat V hanya didampingi seorang asistennya dan sopir dengan menggunakan Range Rover warna hitam bernomor polisi B 2135 NE, sekitar pukul 09.00 WIB. Surya Paloh meninggalkan kantor Inteldam Jaya pukul 09.45 WIB. Begitu keluar kantor, wajahnya terlihat tersenyum ke arah beberapa wartawan yang sudah menunggunya. Namun ia tidak memberikan keterangan. Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Jaya Letkol (Inf) DJ Nachrowi yang dimintai konfirmasi tentang hal itu, mengatakan, pemanggilan Surya Paloh itu berkaitan dengan temuan dokumen di mana namanya tercantum.

“*Nama Surya Paloh memang tercantum dalam salah satu dokumen tersebut. Prosesnya tidak jauh berbeda dengan pemanggilan Sofjan Wanandi. Kami hanya minta klarifikasi, apakah benar atau tidak, sesuai dengan temuan dokumen itu. Ternyata dia membantah*,” kata Nachrowi.

Dijelaskan, tim Bakorstanasda Jaya memperlihatkan bukti temuan dokumen, yaitu dalam surat elektronik (*e-mail*). Selain itu, Surya Paloh juga dimintai pendapatnya. Ditanya tentang materi dokumen yang mengakibatkan pemanggilan Surya Paloh, Nachrowi mengatakan, dalam dokumen tersebut Surya Paloh dianggap banyak berperan membantu gerakan PRD. “*Dalam dokumen itu tertulis bahwa Surya Paloh dianggap sudah banyak berperan dalam mengkomunikasikan gerakan mereka di media massa, sehingga membakar semangat massa*,” ujar Nachrowi.

Dijelaskan pula, panggilan terhadap Surya Paloh, demikian halnya terhadap Sofjan Wanandi, tidak dianggap cukup. “*Tidak dianggap cukup. Bisa dilanjutkan berdasarkan pengembangan. Yang jelas Surya Paloh bersedia membantu aparat keamanan*,” kata Nachrowi seraya menjelaskan pertemuan tersebut dalam suasana lebih santai. Kapendam Jaya yang ditanya juga tentang pemanggilan terhadap tokoh-tokoh lainnya yang tertera dalam dokumen tersebut termasuk sejumlah wartawan, mengatakan, pihaknya belum menentukan memanggil tokoh-tokoh itu.

E. SOFJAN WANANDI DAN BOM TANAH TINGGI

Percobaan merakit bom kecil yang menimbulkan ledakan di sebuah rumah susun Tanah Abang, Jakarta pekan lalu, ternyata menimbulkan ekor panjang. Bom itu sendiri oleh polisi diduga hanya untuk menimbulkan kekacauan, bukan pengrusakan berat. Tetapi pihak keamanan cenderung

memandang persoalnnya lebih serius. Pangdam Jaya Mayjen Syafrie Syamsuddin mengatakan bahwa pelakuknya dapat diancam hukuman mati.

Senin 26 Januari ini seorang pengusaha bekas aktivis 1966, Sofjan Wanandi, dipanggil Bakostranasda Jakarta untuk dimintai keterangan. Menurutsebuah sumber, di dalam rumah susun itu ditemukan sebuah pesan *e-mail* ke para aktivis PRD yang menyebut hubungan Sofjan Wanandi, lembaga CSIS dan pendanaan.

Pesan *e-mail* itu menyatakan bahwa aktivis PRD sedang menunggu dana dari Asia Watch, sebuah lembaga hak asasi manusia di AS, dan karena dana itu tidak datang juga, dinyatakan bahwa lebih baik tidak usah ditunggu lebih lama, dan lebih baik menantikan dana dari Sofjan Wanandi dan CSIS.

PERAN CSIS

Sofjan Wanandi adalah bekas aktivis 1966, bekas tokoh PMKRI (Katolik) dan CSIS adalah lembaga pengkajian straegi yang pendirinya adalah Letjen Ali Moertopo dan Mayjen Soedjono Hoemardani (keduanya sudah mendiang). Didukung penuh oleh para cendekiawan yang beragama Katolik dan keturunan Cina, CSIS dianggap sebagai “think-tank” yang sangat berpengaruh kepada pemerintah di masa lalu, dengan bias yang mencurigai kekuatan Islam dan kekuatan yang dianggap beroposisi kepada pemerintahan Soeharto. Peran mereka tampak menonjol di periode permulaan Golkar bermaksud menjadi pemegang mayoritas tunggal di DPR dan MPR. Ali Moertopo, yang juga Ketua Opsus (Operasi Khusus) dan pembantu terpercaya Presiden Soeharto, dengan bantuan CSIS mensukseskan target ini.

Juga menonjol peran mereka di bulan Januari 1974, menjelang dan sesudah "Peristiwa Malari". Peristiwa yang diwarnai oleh demonstrasi besar dan pembakaran mobil itu oleh beberapa analis dianggap sebagai bagian dari konflik antara Pangkopkamtib waktu itu, Jend. Sumitro dan Ketua Bakin Letjen Sutopo Yuwono, dengan kubu Ali Moertopo. Mereka berebut pengaruh siapa yang paling dekat dengan Presiden Soeharto. Pihak Sumitro menggunakan siasat provokasi dan penggalangan ke kalangan mahasiswa UI, dengan menggunakan isyu anti modal Jepang dan anti "Aspri" (asisten pribadi Presiden) yang dekat dengan Jepang, yaitu Soedjono Hoemardani dan Ali Moertopo.

Terpojok, pihak Ali Moertopo kemudian menggunakan sebuah organisasi Islam, bernama Guppi. Demonstrasi besar-besaran mahasiswa tanggal 15 Januari kemudian ditunggangi oleh gerakan Guppi dan pembakaran serta pengrusakan terjadi di Jakarta. Jend. Sumitro dan Letjen Sutopo Yuwono tidak bisa menguasai keadaan dan bahkan dituduh oleh Ali Moertopo mau "melakukan kudeta". Akibatnya Sumitro jatuh dari kekuasaan. Untuk lebih meyakinkan, Ali Moertopo mengeluarkan teori bahwa di belakang "Peristiwa Malari" itu ada gerakan "Masyumi dan PSI". Masyumi adalah partai Islam terbesar sebelum dibubarkan oleh Bung Karno dan PSI adalah Partai Sosialis kecil yang dipimpin oleh sejumlah cendekiawan. Menarik, bahwa kedua partai yang musuh PKI ini oleh pemerintahan Orde Baru tetap dianggap sebagai lawan yang berbahaya. Sebuah buku putih dikeluarkan untuk mempropagandakan "teori komplotan" ini, dan sejumlah besar orang yang dianggap dekat dengan Masyumi dan PSI ditangkap. Setelah dua tahun disekap, mereka dilepas tanpa diadili.

Tetapi setelah "Malari", kekuasaan Ali Moertopo tampak sangat merosot. Ia yang dibisikkan sebagai calon pengganti Soeharto, kemudian ternyata

oleh Soeharto dijadikan Menteri Penerangan. Ali Moertopo sangat kecewa, dan meninggal oleh serangan jantung. CSIS sejak itu juga merosot pengaruhnya.

Ketika Benny Moerdani menjadi Pangab, posisi mereka terangkat kembali sedikit di mata orang luar. Meskipun sebenarnya Benny Moerdani lebih mengandalkan aparat intelnya sendiri untuk operasi, dan CSIS dipakainya buat hubungan ke luar negeri. Ketika Benny Moerdani dicopot, dan bahkan dianggap memusuhi Soeharto, CSIS semakin jauh dari sumber kekuasaan.

Dana-dana yang diperolehnya dari konglomerat, misalnya Liem Soei Liong, mulai menipis. Biaya overhead dari lembaga non-profit ini kini disangga oleh Sofjan Wanandi. Kegiatan CSIS berkurang dan tokoh-tokohnya, Daoed Joesoef, bekas Mendikbud, Harry Tjan dan Jusuf Wanandi (kakak Sofjan) semakin tidak kelihatan di muka umum. Umur mereka bertambah tua (Daoed Joesoef sudah 70 tahun lebih) dan terisolir dari gerakan di luar. Di antara pengurus mereka juga banyak konflik.

Oleh kalangan Islam mereka dicurigai dan bahkan tidak disukai oleh kalangan Katolik sendiri, termasuk para pastur terkenal, misalnya Romo Mangunwijaya dan Sandyawan dan Mudji Sutrisno. Ada juga yang masih ingat bagaimana CSIS dulu mendukung mati-matian rezim Orde Baru dan bahkan menggunakan fitnah. Tetapi oleh sementara kalangan akademisi Jakarta CSIS dianggap masih punya sumbangan penting, yakni penelitian dan perpustakaannya.

Sikap CSIS juga semakin menjauhi pemerintah Soeharto. Juga ada usaha sporadios CSIS mendekati gerakan pro demokrasi. Tetapi Sofjan Wanandi tetap dekat dengan Ketua PDI yang didukung Pemerintah, Soerjadi, dan

dekat dengan kalangan AD, karena ia pernah menjalankan bisnis mereka. Sofjan juga dekat dengan KSAD Letjen Wiranto. Dalam krisis ekonomi sekarang, dipastikan dana CSIS semakin menciut.

Peran Partai Rakyat Demokratik/PRD

Semenjak Budiman Soedjatmiko dipenjarakan, PRD dipimpin oleh tokoh muda, bekas ketua SMID, Andi Arief, yang juga bekas dosen UGM yang berasal dari keluarga Islam Palembang. PRD di bawah tanah ini masih bersemangat, tetapi kekuatannya semakin terbatas. Andi Arief sendiri kini menderita sakit dan bersembunyi. PRD di akhir Agustus yang lalu mengeluarkan statemen yang menganjurkan perlawanan bersenjata, tetapi oleh kalangan gerakan pro-demokrasi tidak ditanggapi dengan serius. Kalangan pro-demokrasi umumnya bersimpati kepada PRD, tetapi ada yang menganggap PRD kurang mau bekerja sama dan melebur dalam gerakan yang lain. PRD "*selalu main klaim*", kata seorang aktivis, "*seakan-akan mereka yang paling jago*". Tetapi ada yang mengatakan bahwa baik Budiman dan Andi Arief selalu mengadakan pendekatan kepada gerakan pro-demokrasi yang lain. Misalnya ke kalangan PDI, dan malah juga ke kalangan Amien Rais, dan kalangan cendekiawan yang tidak punya massa, misalnya bekas Pemred Tempo Goenawan Mohamad.

Pihak-pihak yang dekat dengan PRD belum mau menjawab secara tegas apakah usaha perakitan bom yang meledak di Tanah Abang itu merupakan usaha PRD.

Bambang Sudjatmiko sudah mengeluarkan bantahan. Tetapi ada kemungkinan bahwa kepemimpinan Budiman sudah hanya bersifat sebagai simbul, dan tidak bersifat operasional. Andi Arief sendiri belum

kedengaran pernyataannya.

Ditangkapnya seorang yang bernama Agus, setelah ledakan di rumah susun itu, mungkin dapat mengungkap lebih jauh. “Agus” sendiri tidak dikenal sebagai anggota PRD lama.

Luas dugaan bahwa ledakan bom kecil itu merupakan rekayasa pihak ABRI. Akan tetapi dari dokumen yang diketemukan, tampaknya dugaan ini tidak benar. Kamar rumah susun itu memang tampak sebagai tempat persembunyian pimpinan PRD. Tetapi adanya pesan *e-mail* yang menghubungkan PRD dengan Sofjan Wanandi diduga merupakan “tambahan” dari pihak keamanan. Atau ada orang yang mengaku mengatas-namakan PRD kepada Sofjan Wanandi atau mengatasnamakan Sofjan Wanandi ke kalangan PRD. “*Orang-orang PRD sangat alergi kepada CSIS*”, kata seorang aktivis yang bersimpati kepada PRD.

Ada yang dugaan bahwa perakitan bom itu memang hasil rencana pemegang komando PRD yang di belakang Andi Arief. Tokohnya adalah Daniel Indrakusuma. Dalam temuan polisi di rumah susun Tanah Abang yang sial itu, ditemukan paspor atas nama Daniel. Pemuda berumur akhir 30-an ini punya hubungan dengan seorang akademisi sayap kiri Australia, Max Lane, yang selama ini sangat mendukung PRD, dan punya hubungan luas dengan sisa-sisa gerakan kiri di Eropa. Max Lane ini diketahui sebagai sumber pendanaan utama dari PRD.

Daniel sendiri seorang yang misterius, dan mempunyai daya tarik karena sifat misteriusnya ini. Ia mengklaim bahwa ayahnya seorang PKI yang dibunuh ABRI, meskipun seorang anggota keluarga Daniel menganggap cerita ini termasuk “dongeng Daniel”. Ia diketahui pernah ikut latihan

dengan gerakan komunis Filipina. Meskipun sebuah sumber mangatakan bahwa latihan itu tidak termasuk latihan perang gerilya kota, dan “lebh merupakan perkenalan dengan cara kerja gerilya komunis Filipina”. Beberapa bekas anggota PKI menganggap tindakan Daniel hanya petualangan “penyakit kekiri-kirian”.

Seorang ahli gerakan di bawah tanah menganggap bahwa rencana di rumah susun Tanah Abang itu memang bagian dari rencana terorisme, tetapi “masih sangat amatir”. Menurut sumber yang mengaku pernah berlatih di Timur Tengah dan Eropa Timur ini, sebuah usaha terorisme harus dilakukan terpisah jauh dari tempat yang memudahkan diketahuinya pimpinan gerakan politik. Dan jika kalangan bawah-tanah PRD melakukan hal ini, mereka melakukan kekeliruan besar karena mereka meninggalkan begitu saja dokumen-dokumen penting.

G. PERISTIWA KABURNYA SOFJAN WANANDI SETELAH BOM TANAH TINGGI

In leaving Indonesia, the tycoon appears to have offended the military

THE contents of this column last week has upset some people in Jakarta. The column touched on a private meeting that took place in a suburban house in Simpruk in south Jakarta, which involved Indonesia’s beleaguered business tycoon Sofjan Wanandi and about a dozen other people, including a few retired generals. Among those at the Jan 27 meeting were retired Gen Benny Murdani, the former armed forces chief; retired Maj-Gen A Pranowo, the current director-general of immigration; and retired Maj-Gen Zen Maulani, a senior staffer in the office of Research and Technology Minister BJ Habibie who is a possible contender for the

vice-presidency in next month's presidential elections. The column also noted how, following the meeting, Mr Wanandi left for Australia, presumably to help defuse the growing animosity towards him and his think-tank group, the Centre for Strategic and International Studies (CSIS). This followed the adverse publicity over an alleged bomb plot which implicated him as well as others linked to the CSIS. Following the Simpruk meeting, protests took place in Jakarta against the CSIS, and in Solo, central Java, against Gen Murdani.

The column elicited a statement from Gen Maulani, who said he had received a telephone call from the former army chief of staff and home affairs minister, Gen Rudini. The latter, who had read it in the Internet edition of BT, wanted to know: Was he, Gen Maulani, involved in the meeting? Two days later, Gen Maulani apparently received more telephone calls, including some from another former military colleague, retired Gen Sayidiman, as well as from a number of Muslim groups. All of them wanted to know the same thing. Was it true? In his statement, Gen Maulani denied any involvement in the meeting.

He added that on the stated day, he was fully occupied in his office and at home. He even listed his activities for the day. "*I know nothing about the meeting, what more be involved in the meeting as reported…Even if there had been such a meeting, it wouldn't make sense for Benny Moerdani's group to involve me to discuss issues of such a sensitive nature*," he said. Gen Maulani dismissed the article as being unfounded and a "total fabrication". We shall leave it at that for now.

Meanwhile, the Indonesian military has taken offence with Sofjan Wanandi's trip to Australia. So upset they are with his decision that the

armed forces chief, Gen Feisal Tanjung, had been hitting out at the tycoon in unusually blunt terms, at least by Indonesian standards. This makes one wonder whether Mr Wanandi had indeed been cleared of all allegations, as he claimed, after he left the office of the security authority, Bakorstanas, on Jan 26, where he had been asked to go to make a statement. The businessman was invited to clear the air on his alleged involvement in a bomb plot. Investigations into the blast on Jan 18, blamed on the banned leftist People's Democratic Party (PRD), implicated him, his brother Jusuf Wanandi and a few others. Sofjan, as well as Jusuf, had firmly denied the allegations. But Sofjan subsequently left for Australia, a day after the Simpruk meeting and two days after his appearance at Bakorstanas.

It was to be a trip which he probably, with hindsight, must have regretted, given the stir that it created in Jakarta. Gen Feisal said Mr Wanandi may not have been treated as a suspect but his absence from the country was "irresponsible" and "not consistent with the traits of a good citizen". "*Apa mau dicekal dulu baru dia jangan pergi? Kalau di seorang warga negara yang baik dia akan berada di sini*," he said after a Cabinet meeting. ("*Does he need to be banned from travelling in order that he not leave the country? If he is a good citizen, he would have remained here*.") Gen Feisal said Sofjan's trip has caused complications for the police in their ongoing investigations. "*If the investigations had required his presence, it would have been difficult. So he had not been sporting*."

Sofjan has since, with his family, returned to Jakarta from Australia. Apparently, he has been summoned to appear at the Jakarta police headquarters tomorrow for a statement on the Jan 18 bomb blast. Indonesia's military is certainly in no mood to be treated lightly these days. Least of all Gen Feisal, regardless of whether he is about to give up his

commandership soon for a minister’s post in the new cabinet.

H. PRABOWO MELAWAN PENGHIANAT BANGSA

Suara Islam memuat kembali sebagian laporan “Melawan Pengkhianat Bangsa’ di Majalah Media Dakwah, edisi Februari 1998. Berikut kutipan selengkapnya:

Sebuah peristiwa bersejarah digelar di Markas Komando Kopassus Cijantung, Jumat (23/1/1998) lalu. Suatu perhelatan akbar yang melibatkan ribuan kaum Muslimin dari berbagai kalangan. Suasana malam Ramadhan ke-24 di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur saat itu (23/1) tampaknya baru kali ini terjadi. Di markas besar pasukan elit tersebut, sekitar 7000 umat Islam dan prajurit Kopassus mengadakan buka puasa bersama, dilanjutkan dengan shalat Maghrib, shalat Isya dan tarawih berjamaah.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, Ketua MUI KH. Hasan Basri, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Dr Anwar Haryono SH, Ketua BKSPPI KH Cholil Ridwan, Ketua Dewan Pimpinan KISDI KH Abdul Rasyid Abdullah Syafii, Sekretaris Umum Muhammadiyah Dr Watik Pratiknya, Sekretaris Umum Dewan Dakwah Hussein Umar, Ir. AM Luthfie (Forum Ukhuwah Islamiyah), Pengurus PBNU Dr Said Agil dan KH Ma’ruf Amin.

Hadir pula dari kalangan ABRI, Pangdam Tanjungpura Mayjen Muchdi Pr, Kasdam Jaya Brigjen Sudi Silalahi, Kaskostrad Mayjen TNI Ismet Yuzairi, Mayjen TNI Cholid Ghozali dan lain-lain. Tak ketinggalan pula ulama-ulama terkemuka pesantren daerah di Jawa Barat seperti KH Asep

Mausul (Tasikmalaya), KH Abdul Wahid Sahari (Pandeglang), KH Shihabudin (Kotabumi Lampung) dan lain-lain.

Dari kalangan wartawan hadir Wapemred Majalah Ummat M Syafii Anwar dan Redpel Media Indonesia Bambang Harymurti. Sekitar 40 wartawan juga hadir dalam acara tersebut. Dari kalangan intelektual dan DPR RI nampak Ketua SPSI Bomer Pasaribu, MSc, Dr Laode Kamaluddin, Dr Din Syamsuddin, Dr Jimly Ashiddiqie, Dr Didin Damanhuri dan lain-lain. Nampak pula Chairul Umam dan H Rhoma Irama mewakili kalangan seniman.

Dalam perhelatan akbar ini, sebagai penghormatan tamu, Kopassus membentangkan beberapa tenda panjang mengelilingi Gedung Serbaguna. Sejumlah kendaraan militer nampak disiagakan. Beberapa perwira berbaris di depan pintu masuk utama dan menyalami para tamu. Sebagian lainnya mengantarkan dan mencarikan kursi duduk buat para ulama. Sementara itu, di tengah-tengah kesibukannya menangani urusan teknis, beberapa prajurit dengan senyum ramah ikut menyalami undangan.

Sekitar pukul 18.00 Mayjen Prabowo Subianto diiringi Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin, memasuki tempat acara dari pintu Timur dan langsung menyalami satu persatu para undangan yang duduk di kursi terdepan. Ia menyebar senyum dan juga mengulurkan tangannya kepada yang duduk di belakang. Kedua jendral ini juga tampak berpelukan dengan beberapa ulama sepuh.

Suasana silaturahmi malam Ramadhan itu begitu mengharukan. Sekitar 3000 prajurit Kopassus duduk bersimpuh menanti buka shaum, berbaur dengan para ulama, santri, intelektual dan aktivis-aktivis muda Islam yang

jumlahnya sekitar 4000 orang.

Ketika bedug Maghrib tiba, makanan yang terhidang di meja ‘diserbu’ oleh nikmatnya berbuka di markas pasukan elit ABRI itu. Begitu membludaknya para jamaah yang melebihi dari undangan tertulis yang diedarkan- sehingga para petugas konsumsi harus mondar-mandir mengisi tempat nasi dan lauk-pauk yang telah kosong.

Setelah sholat Maghrib, dilanjutkan shalat jamaah Isya’ dan tarawih acara utama pun digelar. Para jamaah yang ter-diri dari sipil dan ABRI itu menyatu dalam Aula Serbaguna Kopassus yang telah disulap jadi masjid.

Pidato pertama disampaikan oleh KH Cholil Ridwan Ketua BKsPPI (Badan Kerjasama Pondok Pesantren se-Indonesia). Dalam pidato pembukanya, Cholil menyebut adanya pihak-pihak tertentu yang ingin mengacaukan bangsa Indonesia. Ia memperingatkan, mengacau bangsa Indonesia berarti mengganggu umat Islam yang merupakan mayoritasnya. “*Kami peringatkan kepada mereka itu, jangan coba-coba mengganggu umat Islam*,” ujar Cholil Ridwan yang malam itu mendatangkan ratusan wakil-wakil dari pondok pesantren yang dibawahinya. BKsPPI mengkoordinasi tidak kurang 1400 pondok pesantren se-Indonesia.

Cholil juga menyatakan rasa gembiranya pasukan elit Kopassus ini menerima ulama dan umat Islam dengan dada yang terbuka. “Ini adalah upaya dari para ulama-ulama untuk masuk dalam barak-barak militer,” tegas Cholil. Hal ini menurut Kholil adalah sebagai tindak lanjut dari pernyataan Jenderal (TNI) R Hartono dalam pertemuan BKSPP di Bogor tahun 1996. Hartono waktu itu menyatakan bahwa selain ABRI masuk pesantren-pesantren, maka ia mengharapkan pula para ulama segera masuk

ke markas-markas ABRI. Pernyataan Cholil ini, disambut para hadirin dengan pekikan Allahu Akbar dan tepuk tangan.

Cholil Ridwan, yang juga pimpinan Pondok Pesantren Husnayain di Pekayon, Jaktim, juga mengharapkan agar Kopassus dapat melatih para santri-santri untuk berjuang bersama-sama dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di Indonesia.

“*Jika memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir*,” kata Cholil mengutip Alquran surat Al-Baqarah 191. Para hadirin yang kebanyakan para aktivis Islam memahami makna ayat ini ayat yang terkait erat dengan kondisi ekonomi Indonesia akhir-akhir ini dimainkan oleh sekelompok pengusaha tertentu (non pribumi).

Setelah Cholil, ceramah dilanjutkan dengan sambutan dari tuan rumah Danjen Kopassus Mayjen TNI Prabowo Subianto. Dalam pidatonya Prabowo menekankan adanya persatuan rakyat (umat Islam mayoritas 90 persen di Indonesia) dan ABRI untuk berjuang membangun negeri ini.

Pekikan Allahu Akbar dan tepuk tangan para hadirin pun menggema berulang-ulang ketika Mayjen Prabowo berpidato. Prabowo menyatakan siap menerima pengaduan dan laporan dari para ulama dan hadirin yang datang malam itu. “*Saya berikan nomor telepon kantor saya, saya instruksikan kepada pasukan saya untuk membuka pintu, 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, 31 hari sebulan, untuk menerima kedatangan bapak-bapak semua,*” tegas Prabowo.

Sambutan kemudian dilanjutkan oleh Ketua Pelaksana Harian KISDI Sumargono SE. Dalam pidatonya Sumargono menyebut pertemuan

Kopassus itu sebagai kemajuan besar. “*Dulu selama duapuluh tahun, tempat ini menjadi tempat yang paling angker bagi rakyat. Saya sendiri waktu itu ngeri lewat sini*,” ujarnya disambut tawa hadirin.

Sumargono berharap wujud kemanunggalan ABRI Rakyat ini bisa diteladani oleh kesatuan-kesatuan ABRI yang lain. Sehingga keduanya tidak mudah diadudomba dan salah paham.

Sumargono menjelaskan bahwa kini kelompok-kelompok yang tersingkir dalam kekuasaan itu ingin menguasai panggung politik Indonesia ini kembali. Siapa kelompok itu? “*Mereka adalah Benny Moerdani dan CSIS*,” ungkap Sumargono.

Seperti diketahui CSIS adalah organisasi yang di tahun 70 dan 80-an sangat berperan dalam menata kehidupan politik di Indonesia. Organisasi ini secara formal didirikan pada 1 September 1971, dengan disupport kuat oleh Ali Murtopo.

Menurut Dr. George Aditjondro dalam tulisannya yang disebarkan lewat internet, CSIS ini mempunyai kebijakan anti Islam dan merupakan gerakan radikal. “*Saya tahu bagaimana permainan Moerdani bersama orang-orang CSIS dalam mengeruk uang Timor Timur, setelah sebelumnya membantai secara kejam banyak penduduk bekas jajahan Portugis tersebut. Dengan uang yang terus mengalir (monopoli kopi yang dikelola oleh Robby Ketek dari Solo) itulah, mereka antara lain, bisa membiayai operasi-operasi politik Moerdani bersama CSIS*,” tulis Aditjondro.

Kini CSIS (Centre for Strategic and International Studies) dipimpin oleh bekas Menteri Pendidikan Daoed Joesoef (Presiden Direktur), Wakil

Presdir dipegang oleh Harry Tjan Silalahi, Direktur Pelaksananya Hadi Soesastro (kini diganti Dr Marie Pangestu). Duduk di Dewan Komisaris (Supervisory Board) adalah Jusuf Wanandi, Soedjati Djiwandono dan Sofjan Wanandi alias Liem Bian Koen.

Sekretariat CSIS yang berada di Jl. Tanah Abang II, tiap hari selalu ramai dikunjungi generasi muda. Kebanyakan mereka adalah peneliti atau mahasiswa. Koran-koran, majalah-majalah, jurnal dan buku-buku berbahasa Indonesia atau asing cukup lengkap tersedia di sana. Jurnal Timur Tengah, Jurnal Palestina, Hasil Sensus terbaru dapat kita temukan di sana. Yang paling rapi dan banyak di-minati pengunjung adalah kliping-kliping korannya. Pengunjung pun kalau ingin pelayanan cepat, dapat memfotokopi sendiri, dokumen-dokumen, buku/jurnal yang diinginkan (mesin fotokopi tersedia khusus), tentu dengan biaya ganti fotokopi.

CSIS sendiri juga menerbitkan beberapa publikasi diantaranya: analisa CSIS, jurnal dua bulanan berbahasa Indonesia, The Indonesian Quarterly, dan Nawala CSIS, serta buletin bulanan CSIS. Selain itu juga menerbitkan dokumentasi kliping dengan topik-topik tertentu dan buku-buku. Kegiatan ilmiah ini mungkin hanyalah bungkus dari kegiatan CSIS yang utama.

Ini paling tidak terlihat dari fasilitas kamar yang disediakan untuk Benny Moerdani, Menurut Aditjondro, “Moerdani adalah seorang Katolik yang kebetulan secara pribadi sangat benci kepada Islam. Karena itu lancar saja kerjasama Moerdani dengan CSIS. Sebagai orang Katolik ekstrim kanan, Moerdani di CSIS merasa di rumah sendiri. Itulah sebabnya mengapa Moerdani sekarang dengan tenang berkantor di CSIS (menggunakan kantor bekas Ali Murtopo).

Sofjan Wanandi

Menurut Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin dalam keterangannya kepada pers di sela-sela acara Cijantung itu, Sofjan Wanandi salah seorang pimpinan teras CSIS akan dimintai keterangan sehubungan dengan kasus peledakan bom di rumah susun Johar, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Sementara Sofjan belum diperiksa, ia telah terburu ke luar negeri. Sumber yang dihubungi Media Dakwah (26/1) mengatakan bahwa Sofjan telah pergi ke Singapura dengan Benny Moerdani.

Data-data yang dihimpun Media Dakwah mengungkapkan bahwa Sofjan Wanandi alias Liem Bian Koen diduga mempunyai kaitan dengan gerakan PRD dan peledakan bom di Tanah Tinggi tersebut. Seperti dokumen yang berbentuk email yang ditemukan aparat keamanan di rumah korban peledakan itu. Dokumen yang dikirim oleh seorang yang berinisial Dewa itu antara lain berbunyi:

"*Kawan-kawan yang baik! Dana yang diurus oleh Hendardi belum diterima, sehingga kita belum bisa bergerak. Kemarin saya dapat berita dari Alex bahwa Sofjan Wanandi dari Prasetya Mulya akan membantu kita dalam dana, di samping itu bantuan moril dari luar negeri akan diurus oleh Yusuf Wanandi dari CSIS. Jadi kita tidak perlu tergantung kepada dana yang diurus oleh Hendardi untuk gerakan kita selanjutnya.*"

Tentang isi email ini, Hendardi kepada majalah Gatra edisi 31 Januari 1998 menolak keterkaitannya dengan masalah dokumen yang ditemukan di rumah gerombolan PRD. Sofjan tentu saja juga menolak keterkaitan dirinya dengan PRD sebagaimana yang disebut dalam email itu.

Nama Sofjan dan Yusuf Wanandi bukan hanya disebutkan dalam email, tapi juga dalam dokumen yang disita petugas keamanan tentang pertemuan orang-orang yang mengaku sebagai “kelompok pro demokrasi”. Pertemuan itu berlangsung malam hari di Leuwiliang, Bogor, 14 Januari 1998 lalu.

Pertemuan itu, seperti tersebut dalam dokumen tadi, dihadiri oleh 19 aktivis, mewakili 9 organisasi yang mengklaim dirinya sebagai kelompok pro demokrasi. Menurut mereka situasi politik dan ekonomi Indonesia saat ini tak karuan. Untuk menanggulanginya adalah dengan revolusi. Untuk melakukan revolusi, kata mereka, diperlukan visi dan strategi antara senior dan yunior dalam merencanakan sebuah aktivitas. Generasi yunior adalah para pemuda yang intensif mengikuti pertemuan-pertemuan seperti di Leuwiliang itu. Sedangkan generasi senior terbagi dalam empat kekuatan:

Pertama, kekuatan ilmiah dan strategi yang diwakili sebuah lembaga terkenal (CSIS, red) di Jakarta. Kekuatan ini bertu-gas membuat analisis dan menyusun konsep perencanaan aktivitas ke depan.

Kedua, kekuatan militer yang diwakili oleh seorang purnawirawan ABRI yang dulu pernah amat berkuasa (Benny Moerdani red).

Ketiga, kekuatan massa yang pro Megawati Soekarnoputri.

Keempat, kekuatan ekonomi yang dalam hal ini diwakili oleh Sofjan Wanandi dan Yusuf Wanandi.

Ketika wartawan Gatra mengonfirmasikan semua isi dokumen ini ke Jusuf dan Sofjan, tentu saja mereka menolaknya. Tapi sumber terpercaya di

Media Dakwah mengungkapkan bahwa dokumen ini sah dan bahkan dalam hari-hari terakhir ini, orang-orang grup CSIS melakukan pertemuan rutin di dalam negeri dan luar negeri seperti Vancouver, New York dan Perth, Australia. Kelompok CSIS dan ‘konco-konco’nya juga mencanangkan bulan Pebruari ini sebagai bulan berdarah!

Mungkin kelompok ini yang dimaksudkan Dr Amien Rais sebagai kelompok yang telah bermain ugal-ugalan dalam krisis di Indonesia akhir-akhir ini. “*Inilah salah satu pelajaran yang harus kita petik, bahwa mereka itu ibarat makhluk Franskenstein yang setelah dibesarkan, kemudian mau menolong orang yang te-lah menolong dan memberikan fasilitas tanpa batas kepada mereka itu*,” tegas Amien.

Menurut Amien, permainan politik kasar yang dimainkan sementara pihak di dalam maupun di luar negeri itu bermaksud menjatuhkan pemerintah. Bahkan kata sejawat Amien, Dr Afan Gaffar, “*Saya menduga konspirasi beberapa kelompok itu hendak menjatuhkan Presiden Soeharto sebelum SU MPR 98.*”

Setelah gagal melalui jalur politik, bidang ekonomi memang menjadi sasaran empuk untuk menggoyang pemerintah Orde Baru. Apa boleh buat, sistem perekonomian yang di setup oleh Mafia Berkeley (Trio RMS =Radius Prawiro, Adrianus Moy, JB Sumarlin) ini ternyata tak mampu membangun basis yang kokoh. Kebijakan pembangunan *trickle down effect* misalnya, ternyata mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang luar biasa lebar antara segelintir konglomerat dengan ratusan juta rakyat Indonesia yang lain.

Dibesarkan oleh pemerintah selama Repelita I (25 tahun). Para konglomerat yang kebanyakan non pribumi itu tumbuh meraksasa hingga menguasai sekitar 70% madu pembangunan. Di tangan merekalah nadi-nadi perekonomian bangsa ini berdenyut. "*Kekuatan ekonomi itu merupakan segala-galanya sekarang ini*," kata Amien Rais menggambarkan kekuatan yang mereka miliki.

Dalam keadaan krisis moneter, mereka yang juga perajin utang luar negeri itu ternyata justru menimbun kekayaan dollar di luar negeri senilai trilyunan rupiah (sekitar 80 milyar dolar). Sebelumnya, konglomerat Liem Sioe Liong sepertinya sudah membaca keadaan ketika ia memutuskan memindahkan mesin udang -PT Indofood Sukses Makmur- ke Singapura. Meskipun Mensesneg Moerdiono menyebutnya sebagai bentuk "nasionalisme baru', banyak pengamat ekonomi yang menyebut langkah itu sebagai pelarian modal (*capital flight*).

Krisis moneter yang dimainkan oleh sekelompok orang itu, mengambil alasan karena tidak ditunjuknya secara jelas nama Cawapres. Sejatinya mereka menginginkan calon-calon dari mereka dapat terealisir sehingga keinginan dan nafsu mereka terpenuhi.

Umat Islam dan ABRI Bersatu

Keterlibatan kelompok-kelompok tertentu di negeri ini dalam situasi moneter yang buruk akhir-akhir ini juga ditengarai oleh H Hussein Umar Sekum DDII- dalam ceramahnya yang disambut pekikan Allahu Akbar dan applaus tepuk tangan para peserta dan prajurit. "*Perjuangan umat Islam sejak Diponegoro, Cik Ditiro, Pangeran Antasari, Tuanku Imam Bonjol dan tokoh-tokoh lain telah membuktikan bahwa umat Islam sangat*

mencintai negeri Indonesia ini. Umat Islam Indonesia tidak rela negeri ini dijajah oleh orang-orang luar atau orang luar (asing) yang punya kaki tangan di Indonesia," tegas Hussein dengan suara yang menggelegar.

Pembicara selanjutnya adalah Dr Watik Praktiknya (Sekum Muhammadiyah) dan KH Dr Said Agil Munawwar (NU), yang juga bertindak sebagai Imam shalat Isya' dan tarawih. Keduanya menyampaikan persetujuannya untuk bersama-sama antara ABRI dengan umat Islam bahu membahu dalam menindak para pengkhianat bangsa.

Sambutan terakhir disampaikan oleh Ketua MUI KH Hasan Basri. Ketua MUI menyatakan bahwa haram hukumnya menimbun dolar dan bahan kebutuhan pokok, karena sangat merugikan masyarakat, dalam hal ini notabene umat Islam. Ia juga mensyukuri kemesraan ABRI rakyat yang tercermin dalam acara silaturrahim Cijantung ini, Itu, katanya, tak lepas dari sosok Prabowo. "Prabowo adalah tokoh masa kini dan tokoh masa depan," ujar Hasan Basri, disambut tepuk tangan hadirin. Hasan Basri juga mewanti-wanti agar umat Islam dapat menjaga Prabowo.

I. CSIS SOGOK AKTIVIS KIRI DAN ORMAS ISLAM

Hari-hari ini orang-orang Center, kependekan dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) sibuk melakukan konsolidasi menghadapi serangan-serangan orang Islam terhadap CSIS. Dalam rapat hari Senin tanggal 16 Februari 1998 di Wisma Samedi, Klender, Jakarta Timur terjadi perdebatan sengit di kalangan pengurus teras CSIS. Hadir dalam pertemuan selama tiga jam itu (pukul 11.00 s.d. 14.00 – diselingi makan siang) antara lain Harry Tjan Silalahi, Cosmas Batubara, Jusuf Wanandi (Lim Bian Kie), Sofjan Wanandi (Lim Bian Koen), J. Kristiadi, Hadi

Susastro, Clara Juwono, Danial Dakidae dan Fikri Jufri.

Dalam pertemuan konsolidasi itu, sebuah sumber yang dekat dengan kalangan CSIS, mengatakan terjadi ketegangan antara J. Kristiadi dengan Sofjan Wanandi dan kawan-kawannya. Apa pasal? Sumber itu mengatakan bahwa selama ini Kristiadi sudah ditugaskan untuk menggarap ormas-ormas pemuda, mahasiswa dan tokoh-tokoh gerakan untuk membantu misi mereka, terutama menggalang massa anti Suharto. Selain itu untuk melindungi CSIS dari serangan pemuda dan mahasiswa Islam, karena sudah diantisipasi sejak meledaknya bom di Tanah Tinggi, CSIS akan didemonstrasi karena keterlibatan Sofjan Wanandi dan Jusuf Wanandi. Untuk itulah Kristiadi ditugasi melakukan lobi-lobi dengan dana yang tidak sedikit, kurang lebih 5 milyar rupiah. Toh, ternyata CSIS tetap diterpa gelombang demonstrasi barkali-kali.

Sofjan dan kawan-kawan menuding Kristiadi tidak becus bahkan dituduh menggelapkan dana. Dengan keras Kristiadi membantah sambil menunjukkan suksesnya menggalang massa anti Suharto ke DPR berkali-kali. Bahkan setelah CSIS didemo kelompok pemuda dan mahasiswa Islam, tidak lama kemudian, sebuah kelompok yang setahun terakhir ini telah digarap melakukan protes dan kecaman terhadap kelompok pemuda Islam yang demonstrasi tersebut. Kelompok yang telah mereka garap itu, kata Kristiadi adalah salah satu kantung aktivis mahasiswa Islam yang aktif melakukan aksi demonstrasi dan sering muncul disuratkabar. Kelompok itu adalah Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta (FKMIJ) yang beralamat di Jalan Bunga No. 21, Palmeriam, Jakarta Timur.

Dalam laporan pertanggungjawabannya, Kristiadi membeberkan penggunaan dana 5 milyar yang dialokasikan bagi aktivis-aktivis pemuda

dan mahasiswa. Ternyata sebagian besar dana itu dibagi kepada aktivis “kiri” di sekitar Jabotabek. Yang terbesar menerima dana adalah Daniel Indrakusuma alias Daniel Tikuwalu, tokoh belakang layar PRD, sebesar satu setengah milyar. Yang paling kecil adalah Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta (FKMIJ) sebesar Rp. 175.000.000 (melalui perantara Ahmad Yani dan Wakil Kamal).

Ketika digugat kenapa hanya sedikit ormas Islam yang digalang, Kristiadi menjawab karena FKMIJ termasuk yang paling aktif melakukan aksi-aksi dan berpengaruh di kalangan mahasiswa Islam di Jakarta. Dari pengalaman ini, Kristiadi mengatakan sudah berusaha menggalang ormas Islam yang lain, tapi sejauh ini belum berhasil. Kesulitan ini, kata Kristiadi, karena Gus Dur, hingga kini masih sakit, sedangkan Amin Rais ternyata berkhianat sehingga tak bisa dipakai.

Di akhir rapat, diputuskan agar Kristiadi menggalang lebih jauh ormas Islam yang lain dan ia disediakan dana tambahan 5 milyar rupiah.

J. GOENAWAN MOHAMAD PEMEGANG KUNCI KASUS KEKERASAN 1998

Dalam debat capres pertama Prabowo meminta JK untuk bertanya pada atasannya bila mau tahu perihal kasus penangkapan terduga teroris oleh Tim Mawar atau yang dikenal sebagai "penculikan aktivis" tahun 1998, mengindikasikan bahwa yang terjadi adalah operasi resmi negara. Sementara itu Wiranto; Fachrul Razi; Agum Gumelar, ketiganya jenderal yang bertanggung jawab memecat Prabowo menyatakan bahwa Prabowo penanggung jawab pertama dan utama, karena "penculikan aktivis" adalah inisiatif pribadi.

Siapa pihak yang benar? Bila sejarah mengajarkan kita sesuatu maka kita harus percaya pada perkataan Prabowo sebab dia lebih jujur dan tidak suka menutup-nutupi. Namun masalahnya apakah ada bukti?

"Kebetulan", lebih dari 16 tahun lalu website SiaR dan Xpos pernah mengulas sedikit mengenai putusan DKP dan mereka mengatakan bahwa alasan Prabowo tidak dibawa ke Mahkamah Militer adalah karena sebenarnya operasi penangkapan teroris tersebut adalah operasi resmi negara dan bukan itu saja, Prabowo malah memiliki surat perintah dari Panglima ABRI Jenderal Feisal Tandjung yang mana pada saat bersamaan Wiranto adalah KSADnya. Petikan dari SiaR dan XPos itu sebagai berikut:

"*Tapi, teknik ABRI menyelesaikan intern soal penculikan ini, agaknya memang sengaja ditempuh untuk menghindari terbongkarnya orang-orang di belakang Prabowo. Sebuah sumber di Mabes ABRI mengatakan, sebetulnya Prabowo punya surat perintah penculikan itu, yang diteken oleh Jenderal Feisal Tanjung, Pangab sebelumnya. Surat itu, konon, akan dibeberkan kalau Prabowo diseret ke Mahmilub. Akibatnya, Wiranto berkompromi dengan menjatuhkan hukuman yang ringan untuk Prabowo*."

http://www.minihub.org/siarlist/msg00741.html

Bila SiaR benar maka artinya terang dan jelas bahwa Prabowo memang tidak bersalah sebab dia hanya seorang prajurit yang menjalankan tugas dari Panglima ABRI dan sampai derajat tertentu KSAD. Bila SiaR benar maka kita bisa menyatakan dengan tegas bahwa Wiranto, Fachrul Razi, Agum Gumelar telah melakukan suatu kebohongan publik ketika mereka mengatakan Prabowo dipecat karena melakukan perbuatan tercela dan alasan hukumannya ringan adalah mempertimbangkan marwah mantan

Presiden Soeharto, sebab hukuman ringan justru untuk mencegah Prabowo menyeret Panglima ABRI Feisal Tandjung dan penggantinya, Wiranto.

Masalahnya tentu saja apakah SiaR bisa dipercaya? Bukankah SiaR hanya website anonymous? Perlu saya katakan bahwa pendiri SiaR adalah Goenawan Mohamad yang juga adalah pendiri Tempo, dan oleh karena itu kita bisa bertanya kepada yang bersangkutan untuk menjelaskan tentang "*sebuah sumber SiaR di ABRI yang mengungkap bahwa Prabowo memegang Surat Perintah dari Panglima ABRI Feisal Tandjung*." Dalam hal SiaR tidak ada isu perlindungan terhadap sumber pers sebab SiaR bukan pers karena tidak memiliki badan hukum pers.

Dengan demikian Goenawan Mohamad yang mendukung Jokowi tersebut memegang kunci penting untuk membuka kasus "penculikan aktivis" yang terjadi tahun 1998, yaitu apakah kasus tersebut operasi resmi negara atau inisiatif pribadi Prabowo? Dan dari media buatan Goenawan Mohamad ternyata terungkap bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah operasi resmi negara untuk mengamankan terduga teroris. Bila demikian maka semua petinggi teras ABRI saat itu termasuk Wiranto; Soebagyo HS; Agum Gumelar; Fachrul Razi terlibat!!

Bila kita hubungkan pernyataan SiaR milik Goenawan Mohamad dengan pernyataannya kepada Wijaya Herlambang bahwa Prabowo tidak bersalah merekayasa Kerusuhan 13-14 Mei 1998, maka Goenawan Mohamad juga memegang kunci Prabowo sebagai orang tidak bersalah yang menjadi kambing hitam orang-orang jahat di negara ini. Kata-kata Goenawan Mohamad itu adalah sebagai berikut ini:

"*Kerusuhan Mei, dikatakan Prabowo di belakangnya, saya tidak percaya.*

Karena itu kita harus melawan yang menulis tentang itu karena bohong dan tidak mengerti.."

Lalu apa yang harus dilakukan sekarang? Sebagai pemegang kunci membuka semua kasus ini tentu Goenawan Mohamad harus membuka informan SiaR di dalam ABRI yang menyatakan ada Surat Perintah Panglima ABRI Feisal Tandjung untuk memulai Operasi Mantap Jaya.

Semua fakta ini sekaligus membuka alasan Munir membela Prabowo dan menyatakan Prabowo sebagai orang tidak bersalah yang dikorbankan "mereka," Siapa mereka sebagaimana dimaksud Munir? Hanya beliau yang tahu, tapi yang jelas sebelum ke Belanda, Munir pernah menyatakan bahwa dia akan mengungkap dalang "penculikan" aktivis dan tentu saja kita tahu bahwa Munir kemudian dibunuh Abdullah Mahmud Hendropriyono; Ass'at dan Muchdi Pr, ketiganya juga pendukung Jokowi.

K. KESAKSIAN KIVLAN ZEN TENTANG 1998

MAYJEN TNI (Purn.) Kivlan Zen, 58 tahun, membuat pentas politik pemilihan presiden “hangat-hangat kuku”. Soalnya, pensiunan jenderal kelahiran Langsa, Aceh, ini meluncurkan buku Konflik dan Integrasi TNI AD. Dalam buku setebal 178 halaman itu, bekas Kepala Staf Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat (Kostrad) ini menulis perihal konflik antarperwira tinggi di kalangan TNI Angkatan Darat. Termasuk konflik yang melibatkan Jenderal (Purn.) Wiranto, yang tengah getol berkampanye untuk pemilu presiden. Salah satu bab buku itu mengungkap aktivitas masa lalu Wiranto. Kivlan, misalnya, menganggap Wiranto harus bertanggung jawab atas tragedi Mei 1998 dan pembentukan Pam Swakarsa.

Buku ini disebut Kivlan sebagai “*pengembangan atas tesis saya pada saat mengambil gelar S2 magister social development di pascasarjana Universitas Indonesia pada tahun 2002"*. Tesis yang diterbitkan oleh Fadli Zon, kawan dekat Letjen (Purn.) Prabowo Subianto, berjudul Hubungan Integrasi Internal TNI AD dan Integrasi Bangsa Indonesia. Sebagai sebuah karya ilmiah, tesis Kivlan terbilang “biasa saja”. Spektrum waktu dalam buku ini terlalu lebar. Kivlan mencoba merangkum konflik TNI-AD sejak 1945 hingga tahun 2000. Akibatnya, “Tesis ini seperti buku sejarah yang dangkal,” ujar Anhar Gonggong, sejarawan dari LIPI. Toh tesis ini mengantarkan Kivlan meraih gelar magister dari Fakultas Pascasarjana UI.

Berikut beberapa nukilan yang penting.

* Benny Moerdani Versus Prabowo

Perseteruan Jenderal L.B. Moerdani dengan Mayor Prabowo Subianto berawal dari persoalan ideologi dan agama. Menurut Kivlan, konflik ini mulai terjadi saat Prabowo menjadi staf khusus Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal L.B. Moerdani (1982-1985).

“*Sebagai staf khusus, Mayor Prabowo Subianto mendapat penjelasan rencana menghancurkan gerakan-gerakan Islam secara sistematis. Prabowo memperoleh informasi ini karena Jenderal Benny Moerdani melihat latar belakang bapaknya, Prof. Soemitro Djojohadikusumo, seorang sosialis, dan ibunya seorang penganut Kristen dari Manado. Namun Prabowo Subianto merasa tidak cocok dan melaporkan langkah-langkah Benny kepada mertuanya, Presiden Soeharto*.”

Mengetahui rencananya dibocorkan kepada Presiden Soeharto, tutur Kivlan, Benny Moerdani marah besar. Prabowo, yang telah menjadi Wakil Komandan Detasemen 81 Kopassus, kesatuan elite antiteror, dimutasi menjadi Kepala Staf Kodim.

"*Ini menimbulkan kebencian dan ketidakberdayaan sangat mendalam Prabowo Subianto terhadap Jenderal Benny Moerdani. Prabowo juga melakukan pendekatan terhadap Komandan Seskoad Mayjen TNI Feisal Tanjung dan Pangdam Brawijaya Mayjen R. Hartono. Bersamaan dengan itu, Benny menyiapkan penggantinya, mulai dari Letjen Sahala Radjagukguk, Mayjen Sintong Panjaitan, Brigjen Theo Syafei, Kolonel Luhut Panjaitan, dan Letkol R.R. Simbolon*."

* Feisal Tanjung Versus Hartono

Setelah tongkat komando ABRI pada 21 Mei 1993 beralih ke pundak Jenderal TNI Feisal Tanjung, peta persaingan pun berubah. Peran kelompok pendukung Benny Moerdani, yang dikenal dengan "ABRI merah-putih", mulai digeser oleh "ABRI hijau", yang dekat dengan kelompok Islam. Tak seperti panglima sebelumnya, Feisal Tanjung lebih dekat ke Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang dipimpin oleh B.J. Habibie. Tapi persaingan merebut jabatan dan pengaruh tetap ada. Pangab Feisal Tanjung sering tak sepaham dengan KSAD Jenderal R. Hartono.

"*Konflik juga terjadi antara Jenderal Feisal Tanjung dan Mayjen Prabowo. Soalnya, Prabowo dinilai dekat dengan Jenderal R. Hartono, yang dianggap ingin menjadi Panglima ABRI sebelum Sidang Umum MPR 1998. Feisal Tanjung juga menilai Hartono sering membawa nama ABRI untuk mendukung Golkar*."

Di lain paragraf:

"*Jenderal Hartono dinilai gagal menghambat naiknya Abdurrahman Wahid menjadi Ketua Umum PB NU untuk ketiga kalinya. Soeharto tak mau menghadiri pelantikan Abdurrahman Wahid karena suka mengkritik Soeharto dan pernah mendukung Benny menjadi presiden pada 1993″*

* Wiranto Versus Prabowo

Pada Maret 1998 terjadi mutasi besar-besaran di tubuh ABRI. Jenderal Wiranto, bekas ajudan Presiden Soeharto, diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, menggantikan Feisal Tanjung. Sedangkan Prabowo, menantu Presiden Soeharto, pangkatnya dinaikkan menjadi jenderal berbintang tiga. Prabowo menempati pos baru sebagai Panglima Kostrad, yang secara historis merupakan "jalur resmi" menuju kursi KSAD dan Panglima ABRI.

Tapi Wiranto dan Prabowo diam-diam bersaing untuk memperkuat posisinya. Kedua jenderal ini terlibat persaingan merebut simpati Soeharto dan para perwira ABRI lainnya.

"*Jenderal Wiranto dianggap tidak senang dengan kalangan Islam dan lebih dekat dengan Benny Moerdani. Kemudian terjadi persaingan antara Letjen Prabowo dan Jenderal Wiranto untuk mendapatkan perhatian Soeharto. Terutama ketika gerakan anti-Soeharto semakin kuat dimotori kalangan mahasiswa. Panglima ABRI Wiranto mengatakan dengan tegas bahwa demonstrasi mahasiswa tak boleh keluar kampus*."

Saat kerusuhan Mei 1998, pertikaian antara Wiranto dan Prabowo

memuncak.

"*Keadaan semakin kacau ketika meletus peristiwa Trisakti 12 Mei 1998 dan diikuti kerusuhan massa 13-15 Mei 1998. Jenderal Wiranto tak serius menanganinya. Padahal ia memegang kekuatan TNI dan Polri. Pada tanggal 14 Mei, Wiranto tetap berangkat ke Malang untuk menjadi inspektur upacara serah-terima tanggung jawab Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC). Padahal sebelumnya Letjen Prabowo telah menyarankan agar Wiranto membatalkan acaranya di Malang.*"

Proses pembiaran, cerita Kivlan, juga terlihat dari sikap Wiranto yang tak mendukung upaya pemindahan pasukan Kostrad dari Jawa Timur dan Makassar. Padahal Kodam V Jakarta Raya saat itu sangat membutuhkan pasukan tambahan untuk mengamankan Ibu Kota.

"*Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin, Pangdam V Jaya, meminta tambahan pasukan ke Kostrad. Namun Mabes ABRI tidak memberikan angkutan Hercules untuk membawa pasukan Kostrad dari Jawa Timur dan Makassar. Karena keadaan mendesak, Kostrad akhirnya mencarter pesawat milik Mandala di Makassar dan pesawat milik Garuda di Surabaya untuk membawa pasukan dengan biaya sendiri*."

Selain mengungkap konflik antarperwira tinggi ABRI, Kivlan Zen juga mengungkap beberapa kisah menarik. Kivlan, misalnya, menyatakan pernah mengancam akan menembak "Tokoh Reformasi" Amien Rais bila pada 20 Mei 1998 berani melakukan people power di Lapangan Monas.

"*Pada hari Kebangkitan Nasional itu, Amien Rais merencanakan people power mengepung Istana Negara. Namun people power itu tak jadi*

dilaksanakan antara lain karena adanya ancaman dari Kepala Staf Kostrad Mayjen Kivlan Zen. Kepala Staf Kostrad akan menangkap atau terjadi pertumpahan darah seperti peristiwa Tiananmen di Beijing tahun 1989. Untuk menghadang gerak laju massa, aparat keamanan telah menyiapkan kawat berduri pada jalan-jalan masuk ke Monas. Aparat juga menempatkan tank yang siap menghalau massa serta tembakan peluru tajam seperti di Tiananmen."

Tanggal 21 Mei 1998 menjadi hari bersejarah bagi Republik. Presiden Soeharto, yang sudah 32 tahun berkuasa, menyatakan berhenti. Wakil Presiden B.J. Habibie, di hadapan Ketua Mahkamah Agung, disumpah menjadi presiden.

"*Letjen Prabowo menghadap Habibie di rumahnya di Patra Jasa, Kuningan, pukul 23.00. Prabowo membawa konsep susunan kabinet yang disiapkan oleh Mayjen Kivlan Zen, Fadli Zon, dan Din Syamsuddin. Calon terkuat Pangab dalam kabinet Habibie waktu itu adalah Letjen Hendropriyono. Namun Jenderal Wiranto berhasil mempengaruhi Presiden Habibie dengan mengatakan ada pasukan liar mengepung rumah Presiden*."

Pada 10-13 November 1998 MPR mengadakan sidang istimewa. Agenda utamanya adalah soal percepatan pemilu dari 2002 menjadi 1999. Sidang Istimewa MPR juga mengubah Ketetapan MPR tentang GBHN. Tapi sidang istimewa itu banyak ditentang mahasiswa dan tokoh politik. Panglima ABRI Jenderal Wiranto, menurut Kivlan Zen, meminta dirinya melakukan pengerahan massa untuk mendukung SI MPR. Dari sinilah kemudian muncul pasukan milisi Pam Swakarsa.

"*Jenderal Wiranto memanggil Mayjen Kivlan Zen pada 4 November 1998 sekitar pukul 15.30 di Mabes ABRI Jalan Merdeka Barat. Jenderal Wiranto kira-kira mengatakan, 'Kiv, kok orang anti-SI semua. Saya dengar kamu bisa mengalahkan massa untuk masuk MPR. Nah, sekarang kamu kerahkan lagi mendukung SI. Ini juga perintah dari Presiden Habibie.' Pertemuan itu berlangsung empat mata sekitar 15 menit. Soal pendanaan awal, Wiranto mengarahkan Kivlan untuk bertemu pengusaha Setiawan Djody dan staf wakil presiden, Jimmly Ashiddiqie*."

Setelah terbentuk Pam Swakarsa, Wiranto terlibat pertemuan yang mengkoordinasikan pergerakan pasukan milisi itu. Pada 9 November 1998, sekitar pukul 09.00-10.00, dilakukan rapat di rumah dinas Wiranto di Kompleks Menteri, Jalan Denpasar Raya, Jakarta. Hadir dalam pertemuan itu, ujar Kivlan, antara lain: Pangab Jenderal Wiranto, Pangdam Jaya Mayjen Djadja Suparman, Kapolda Metro Jaya Mayjen Noegroho Djajoesman, dan Mayjen Kivlan Zen.

"*Dalam rapat tersebut disepakati bahwa tugas pokok Kodam adalah mengamankan Pam Swakarsa apabila terjepit. Pola operasinya: Pam Swakarsa di depan menghadapi massa dan ABRI di belakangnya. Namun dalam prakteknya tidak jarang Pam Swakarsa malah digebuki pasukan Marinir karena mereka tidak diberi tahu."*

Pendukung Jokowi Dalang Kerusuhan Mei

Mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen akhirnya angkat bicara terkait foto-foto kekerasan yang diperlihatkannya di tengah dialog terbuka dengan tim pemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla di hadapan mahasiswa Universitas Indonesia, Rabu 18 Juni 2014.

“Ini adalah foto-foto kekerasan yang terjadi pada waktu kerusuhan Mei 98,” kata Kivlan sambil memperlihatkan foto-foto kekerasan.

Kivlan mengatakan, foto-foto yang diperlihatkannya di depan mahasiswa merupakan salah satu bukti untuk mengungkap siapa yang paling bertanggung jawab pada kerusuhan Mei 1998 silam.

“*Tak usah saya sebut orangnya, kerusuhan ini sudah direncanakan dan mereka menggelar rapatnya di Senayan. Kalau saya buka ini adalah aib bangsa*,” beber Kivlan.

Lebih lanjut, Kivlan menegaskan, kasus kekerasan kerusuhan Mei 98 itu tidak ada kaitannya dengan Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat Panglima Kostrad. Prabowo, kata dia, tidak pernah meninggalkan Jakarta.

“*Kalau dia pergi, maka habislah Jakarta. Saya bicara ini, karena saya ada bersama dia*,” ujarnya.

Menurutnya, kerusuhan dan kekerasan Mei 98 sengaja direncanakan dengan menggelar rapat dan dikontrol dari Bogor.

“*Jadi jelas, Pak Prabowo hanya terkena fitnah. Kalian bisa lihatkan di foto ini, orang-orangnya ada dan ada spanduk merah, jelas di situ bertuliskan Komite Pendukung Megawati*,” ungkap Kivlan.

“*Kalau mau blak-blakan ayo di pengadilan. Biar kita buka semua. Kasihan Pak Prabowo difitnah terus. Kalau tidak ada Prabowo, Jakarta bisa hancur berbulan-bulan seperti yang terjadi di Mesir dan negara lain*,”.

L. BENNY MOERDANI DALANG KERUSUHAN MEI

Gerakan Pasukan Perusuh Benny Moerdani Tercium Sejak Awal 1998

Setelah aksi spekulasi rupiah untuk meruntuhkan sistem perekonomian Indonesia ternyata gagal karena negosiasi brilian Suharto dengan AS, Jepang serta negara-negara ASEAN, maka Benny Moerdani mulai menjalankan skenario B dengan menggunakan kekuatan militernya.

Aksi-aksi militer yang dilakukan Benny Moerdani yang disinyalir sebagai purnawirawan ABRI yang menjadi dalang segala bencana di Indonesia ini didukung oleh lima anasir yaitu gereja (PGI dan KWI), konglomerat (Kelompok Jimbaran – Sofjan Wanandi), perwira menengah dan tinggi ABRI yang loyal pada Benny, kelompok prodemokrasi (PRD dan CSIS) serta bantuan dana dan militer dari luar negeri terutama dari Australia.

Secara garis besar, gerakan kelompok Benny bisa dibagi menjadi empat kategori besar, yaitu:

1. Kegiatan perusuhan di sentra-sentra pemukiman di pulau Jawa. Hal ini dilakukan dengan mengkoordinir preman-preman serta perusuh profesional yang didukung oleh militer binaan Benny. Perusuh-perusuh itu bergerak dengan cepat dari satu kota ke tempat lain dan didukung oleh suplai bahan perusuh seperti bom molotov yang sudah disediakan di gereja-gereja sekitar lokasi kerusuhan.

   Di bulan Januari kemarin, mereka bergerak di enam tempat. Dimulai tanggal 5 Januari dengan awal kerusuhan di Bandung, kemudian bergerak dan menyebar secara cepat di Pasuruan, Jember dan

Banyuwangi pada tanggal 13 Januari. Kemudian bergerak lagi tanggal 23 Januari di Probolinggo serta di Kragan tanggal 26 Januari 1998. ABRI resmi di bawah Feisal Tanjung pun sudah dikomando untuk melakukan tembak di tempat. Perintah tersebut terbukti efektif karena gerakan di Bandung segera bisa ditumpas sebelum menjalar ke Jakarta. Maka mereka pun menjadi berhati-hati dengan membuat kerusuhan sporadis di seputar Surabaya, sekarang mereka sudah bergerak di Kragan. Kita tinggal menunggu gerakan ABRI Feisal Tanjung apakah mereka bisa memukul mundur, kalau tidak, mereka akan segera bergerak di Surabaya. Untuk menyamarkan perusuhan tersebut, maka target kerusuhan adalah toko-toko Cina serta gereja-gereja kecil yang sudah kosong/tidak ada ummatnya.

2. Para konglomerat yang menguasai sembilan bahan pokok (sembako) melakukan aksi penghentian produksi selama sebulan terakhir sehingga bahan-bahan sembako menghilang dari pasaran. Eka Tjipta Wijaya yang menguasai 100% produksi minyak goreng, bahkan menghentikan produksi sehingga minyak goreng Bimoli lenyap dari pasaran. Begitu juga Liem Sioe Liong yang menguasai pasaran terigu serta mi instan. Bahkan Bulog pun tak berdaya menghadapi aksi penghentian produksi mereka, gertakan Feisal Tanjung pada para konglomerat tersebut pun tak mempan.

3. Pasukan militer profesional sudah mulai dilatih dan ditempatkan di lokasi-lokasi strategis terutama di Indonesia Timur dengan persenjataan yang disuplai penuh oleh Israel dan Australia. Bahkan rakyat-rakyat setempat sudah mulai dilatih kemiliteran untuk menjadi tentara cadangan.

Insiden terakhir yang menimpa pesawat DC-9 Filipina yang mengangkut 100 penumpang pun disinyalir hilang karena ditembak setelah melewati markas pasukan tersebut di perairan Sulawesi Utara. Rupanya Filipina juga sudah tahu sama tahu akan gerakan tersebut sehingga menginformasikan lokasi pesawat palsu di sekitar Filipina.

4. Sedangkan media massa luar negeri yang didukung konspirasi Yahudi serta gerakan pro demokrasi di luar negeri seperti PRD Eropa dan Melbourne rajin membuat isyu-isyu di media massa asing akan hancurnya pemerintahan Suharto dalam waktu dekat, serta permintaan bantuan dan dukungan akan gerakan mereka. Aksi tersebut akan sangat efektif karena akan mempengaruh investor asing di Indonesia.

Benny Moerdani Menggerakan Kerusuhan Mei Dari Bogor

Diam, tak terdengar suaranya, dan tak juga diketahui kiprahnya. Pentas kekuasaan formal pun sudah menyingkirkan namanya. Namun sosoknya tetap jadi sorotan dan diperhitungkan. Itulah dia Jenderal (purn) LB Moerdani. Namanya hampir selalu diserempetkan dengan sebuah peristiwa. Kali ini serempetan ke alamat Benny tergolong serius.

Maklum, serempetan ini berkaitan dengan peristiwa kerusuhan 13-14 Mei lalu, yang dihujat oleh seantero dunia: Benny dituding sebagai dalang di balik kerusuhan mengegerkan, yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor yang memaksa Soeharto lengser dari kursi kepresidenan.

Tudingan itu marak dibicarakan orang pada pekan ini setelah Tabloid Adil mengangkatnya menjadi laporan utama pada edisi No.46, 19-25 Agustus 1998. Hanya saja, tabloid milik Timmy Habibie (adik Presiden BJ

Habibie), masih memberi tanda tanya besar soal tudingan Benny sebagai dalang kerusuhan. Soalnya, ya itu tadi, bukti-bukti kongritnya tak ada.

Tudingan ke alamat Benny tersebut, oleh Adil, dikembangkan dari pernyataan tiga pihak. Pertama dari seorang jenderal yang dekat dengan Letjen Prabowo Subianto, kedua dari seorang jenderal di Bina Graha, dan yang ketiga berasal dari politisi yang mengaku dekat dengan Benny.

Jenderal yang dekat dengan Prabowo, sebagaimana dikutip Adil, yakin seyakin-yakinnya bahwa Benny adalah otak di balik kerusuhan 13-14 Mei lalu. Benny disebutnya mengendalikan aksi itu dari Hotel Ria Diani, Cibogo, di kawasan Puncak Bogor. "*Cek kalau tak percaya*,"begitu kata sang jenderal. Ia menambahkan, perusuh di lapangan adalah orang-orang sipil yang dilatih Benny di kawasan Gunung Salak.

Fakta-fakta yang disodorkan Jenderal sahabat Prabowo ini nampaknya sulit dibuktikan. Adil yang rupanya tidak mau terjebak menjadi hakim yang memvonis Benny, melacak pernyataan Pak Jenderal yang konon kini sudah digeser dan tidak memiliki job. Hasilnya? Boleh dibilang nihil. Sumber-sumber yang diinvestigasi tidak satu pun yang melihat dan mengakui Benny pada saat kerusuhan itu marak berada di Hotel Ria Diani.

Sedangkan jenderal yang kini berada di lingkungan Bina Graha menyodorkan fakta tidak berfungsinya alat komunikasi ABRI pada saat kerusuhan pecah. Akibatnya, koordinasi antarpasukan amburadul. Penyebaran penugasan untuk mengatasi aksi kerusuhan dan penjarahan morat-marit. Mengapa sarana komunikasi itu macet? "Ditimpa sistem komunikasi lain yang frekuensinya lebih kuat,"kata Pak Jenderal itu sebagaimana dikutip Adil.

Yang lebih kuat itu konon hanya dimiliki oleh Kedutaan Besar AS di Jakarta. Kedutaan Besar AS lantas jadi kata kunci. Sudah barang tentu dikaitkan kedekatan Benny dengan badan intelijen negeri Paman Sam, CIA. Dan satu-satunya orang yang punya akses kuat untuk memanfaatkan sistem komunikasi canggih itu, tidak lain adalah Benny.

Hanya saja, seorang jenderal senior yang dulunya dikenal sebagai musuh Benny, ketika dihubungi detikcom, Selasa (18/8), menepis kemungkinan itu. “Kalaupun benar sistem komunikasi itu dikacaukan, memangnya ABRI tidak memiliki sarana lain. Sebut saja, telepon ataupun HP yang bisa dimanfaatkan dalam kondisi darurat,”kata Pak Jenderal yang enggan disebut namanya. Atau menggunakan sarana tradisional alias lewat kurir. Toh saat itu Jakarta lengang. Dari satu sudut kota ke sudut lain hanya membutuhkan jangkauan beberapa puluh menit saja.

Tepisannya itu juga diikuti dengan fakta lain. Yakni banyak pasukan di tempat di mana kerusuhan itu berlangsung. Pasukan-pasukan dengan persenjataan lengkap itu terlihat membiarkan massa yang melakukan kerusuhan dan penjarahan. “*Putar lagi dokumentasi televisi swasta. Nanti akan terlihat adanya pasukan itu namun nggak ngapain-ngapain, terutama yang terlihat di Jakarta Pusat, Utara dan Barat*” katanya.

Sebaliknya, fakta juga menyatakan, pasukan Marinir yang didrop di kawasan Salemba-Senin, justru melakukan suatu aksi yang pada akhirnya mampu menangkal terjadinya kerusuhan di kawasan yang biasanya rawan itu. “*Jadi terlihat sekali, masalahnya bukan pada sarana komunikasinya, tetapi pada perintah apa yang dikomunikasikan*,”katanya.

“*Tanpa bermaksud membela Benny, tapi kalau menuduh dia dengan alasan perusakan sistem komunikasi kok rasanya kurang masuk akal*,” katanya. Namun ia mengingatkan, Benny selama ini dikenal sebagai seorang jenderal brilian yang terbiasa bekerja dengan rapi dan sistematis. “*Jadi kalau menuding dia sebagai dalang kerusuhan, sodorkan bukti yang kuat,*” tambahnya.

Sedangkan pernyataan politisi yang dekat dengan Benny menyatakan, bahwa aksi kerusuhan 13-14 Mei lalu, sangat mustahil jika dilakukan oleh “pemain baru” seperti Prabowo. “*Mereka tidak memiliki pengalaman seperti itu,*”katanya seperti dikutip Adil. Ia lantas merujuk kasus penyerbuan kantor DPP PDI oleh para “pemain baru” yang hasilnya berantakan. Politisi tersebut yakin bahwa kerusuhan lalu itu dimotori oleh jenderal senior yang berada di luar lingkaran kekuasaan.

M. CATATAN SEORANG KORBAN KERUSUHAN MEI

Saya adalah korban kerusuhan Mei 1998. Sekian tahun setelah kerusuhan itu harus tinggal di luar negeri akibat trauma dan mengamankan keluarga sebelum kembali ke Indonesia untuk bekerja dan berusaha. Selama di luar negeri, saya terus mengikuti berita Indonesia melalui SiaR dan Xpos yang kini saya ketahui merupakan produk dari Gunawan Muhammad. SiaR dan Xpos acapkali memberitakan tentang sepak-terjang Prabowo sebagai buruk, anti Tionghoa dan psikopat. Di antaranya adalah tulisan Andreas Harsono di majalah asing yang sangat negatif tentang Prabowo dan Fadli Zon, yang mengesankan bahwa Prabowo ingin menghabisi Tionghoa Indonesia karena kekuatan ekonomi yang dimilikinya.

Tulisan Andreas Harsono tersebut masih bisa dilihat di webnya, di

antaranya saya lampirkan di sini:

http://www.andreasharsono.net/1998_08_01_archive.html

Dan ini adalah tulisan Andreas Harsono di AMREP:

http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1998/02/21/0183.html

Supaya fair, ini tanggapan Fadli Zon tentang tulisan Andreas Harsono:

http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1998/02/21/0183.html

Dengan menyimak tulisan-tulisan yang tendensius tersebut, tidaklah heran minoritas Tionghoa maupun non muslim menjadi sangat paranoid terhadap Prabowo Soebianto dan Fadli Zon, termasuk saya. Saya bersyukur Prabowo Soebianto diberhentikan dari dinas militer dan harus meninggalkan negeri sendiri mengungsi (ke Yordania) seperti saya. Hidup di luar negeri seberapa tenang dan amannyapun tetap berbeda dengan hidup di bumi tumpah darah. Termasuk di antaranya saya harus menerima, bahwa sebagian keluarga kini tetap trauma kembali ke Indonesia dan menjadi warga negara asing.

Dalam bincang pagi ini di TV One, ada Andre Rosiade, mantan Ketua BEM Trisakti pada masa reformasi, dengan narasumber lainnya Mayjend Purn. Kivlan Zen, berbicara bahwa apabila Prabowo Soebianto menjadi Presiden RI, maka kasus Mei 98 akan dibuka dan diproses melalui institusi formal, dalam kasus ini tentunya adalah Pengadilan HAM Ad Hoc; dan saat itulah mereka bersedia untuk mengikuti proses dan memberikan kesaksiannya. Sebelumnya, diberitakan alumni Trisakti dan keluarga Pahlawan Reformasi di antaranya ibu Hira Tetty, ibunda alm. Elang Mulia Lesmana, juga menyatakan mendukung Prabowo Soebianto dengan

catatan membuka kembali kasus Mei 98.

Selama 3x pemilu, saya senantiasa memilih PDIP dengan anggapan bahwa PDIP adalah satu-satunya partai yang berkomitmen melindungi minoritas Tionghoa non muslim. Sampai hari inipun mereka masih menjual image yang sama. Acapkali saya menerima broadcast di ponsel dan email untuk memilih PDIP dan Jokowi-JK, seringnya dengan menginsinuasikan bahwa Prabowo berkuasa akan menjadi bencana bagi minoritas karena Wahabbi, karena PKS, karena FPI, karena gerbong Islam di belakangnya.

Pada acara ILC sehari setelah pendaftaran capres-cawapres, Effendi Simbolon, mantan Ketua Pansus orang hilang dan timses PDIP kembali menyerang kubu Prabowo-Hatta mengenai kasus HAM penculikan aktifis. Yang menarik adalah pernyataan Effendi Simbolon, bahwa kasus hilangnya 13 aktivis adalah Pelanggaran HAM berat sementara kasus Mei 98, yang menyebabkan kematian ribuan orang tidak bersalah, di antaranya dibakar hidup-hidup di mal, kenalan saya suami istri berikut dua orang putrinya dikunci di dalam ruko di Kebun Jeruk yang dibakar, tragedi Semanggi I dan II, pembantaian di jalan Ketapang; semuanya bukanlah pelanggaran HAM berat…!

Ini sangat mencengangkan, telah sia-sia saya belasan tahun mendukung PDIP, ternyata HAM seperti ini yang mereka perjuangkan. Apakah tidak berharga nyawa yang hilang pada kejadian-kejadian luar biasa tersebut dibandingkan 13 orang aktivis, yang dikabarkan telah dan berpotensi melakukan aksi-aksi kekerasan, di antaranya merakit dan menyebarkan bom…?

Semasa mahasiswa dulu, saya pernah menjadi aktivis pemberontak melawan Orba karena pergaulan. Apabila kita vokal dan mulai membentuk

atau ikut organisasi-organisasi vokal di kampus, akan ada agen-agen dengan berpakaian sipil yang mendekati kita dan memberikan nasehat. Apabila kita tetap saja vokal, maka mereka akan datang kembali dan bicara lebih keras. Jika tetap saja kita ngeyel, maka kita bisa dijemput dan dibawa ke kantor dan diberi peringatan yang lebih keras lagi. Saya tidak bisa mencontohkan lebih, sebab tingkat kebandelan saya hanya sampai taraf ini. Tapi yang jelas saya paham, bahwa seseorang yang innocent tidaklah mungkin mendadak, mengalami penghilangan secara paksa.

Setelah bertahun lewat Mei 98, akibat yang kasat mata adalah turunnya rezim Soeharto, habisnya karir militer Prabowo Soebianto, dan pelarian dana BLBI dikabarkan lebih dari Rp 1000 triliun, dimana akhirnya kita berhutang pada IMF, yang harus dibayar sampai ke anak cucu kita sampai dengan tahun 2032…! Belum lagi sedemikian banyak nyawa yang hilang, kehidupan yang hancur, ekonomi yang terpuruk. Ibunda teman saya, yang saya anggap seperti orang tua sendiri, kiosnya di Glodok dijarah habis-habisan dan suaminya terkena serangan jantung. Setelah itu pikirannya kosong dan berkali-kali meninggalkan rumah untuk menjenguk puing-puing tokonya, sampai akhirnya setahun kemudian menghadap yang kuasa dalam kesedihan.

Saat ini apabila kita melihat, siapa yang diuntungkan oleh kejadian Mei 98 tersebut. Adalah rezim yang berkuasa sesudahnya, yang bukanlah mantan Presiden Habibie yang ketiban pulung. Bukan pula mantan Presiden Gus Dur yang naik karena skenario di luar dugaan dari manuver Amien Rais. Dulu saya tak bisa melihat jernih, tapi kini semakin jelas.

Rezim ini yang akhirnya memberikan *Release and Discharge* kepada sejumlah konglomerat, yang mendapat BLBI, yang menggunakan dana masyarakat di banknya sesuka hati. Mereka yang seharusnya bangkrut

karena hutang-hutangnya, tapi ternyata sekarang di saat bangsa Indonesia masih mencicil hutang, mereka sudah mendapatkan pembebasan hutang dan semakin hari semakin kaya saja, dengan kerajaan bisnis baru melampaui batas Indonesia.

Saya juga terheran-heran atas sikap sekelompok Jendral Purnawirawan, di antaranya yang berada di dalam DKP yang memberhentikan Prabowo, kini sangat aktif menjegal Prabowo dengan segala cara. Hendropriyono menyebut Prabowo psikopat. Agum Gumelar dan Luhut Pandjaitan menjelek-jelekkan Prabowo setiap ada kesempatan, di koran, media, TV. Sutiyoso yang tidak dianggap sedikitpun oleh kubu Jokowi-JK juga manut luar biasa. Wiranto pun telah tertutup mata hatinya. Jendral2 purnawirawan ini tak terpengaruh oleh pergantian rezim, bahkan menikmati keuntungan luar biasa. Melanjutkan jabatannya, mendapat jabatan baru, menjadi Menteri, terpakai, bahkan hidupnya kaya dan bahkan ada yang sudah menjadi konglomerat.

Kasus Mei 98 adalah catatan kelam Republik ini. Anak cucu kita perlu tahu mengapa generasi kita meninggalkan hutang ekonomi dan sejarah hitam yang sedemikian besar. Dengan melihat gerbong di belakang Jokowi, dan PDIP yang selama masa reformasi hanya memperjuangkan HAM sempit, dan kini mempolitisasi HAM 13 aktivis sekuat tenaga sebagai bagian dari upaya mereka melakukan kampanye hitam menjatuhkan Prabowo; sudah jelas tidak perlu mengharapkan Jokowi akan menuntaskan Mei 98. Kemungkinan besar Jokowi memang hanya figur boneka yang karena sukses dipopulerkan, akhirnya diangkat untuk menjegal Prabowo, sehingga alasan dan dalang di balik Mei 98 tidak pernah terbongkar.

Kepada Prabowo Soebianto, sebagaimana alumni Trisakti dan keluarga pahlawan Reformasi, saya menggantungkan harapan agar kasus kerusuhan

Mei 98 diungkap dan diproses melalui prosedural hukum dan tata-negara yang telah diUndang-Undangkan. Sudah terlalu lama kita menunggu dan berdiam diri. Pihak-pihak yang berdosa kepada rakyat dan sejarah Republik ini, biarlah mereka menghadapi hari penghakiman mereka.

N. STRATEGI TERAKHIR CSIS BILA JOKOWI KALAH

"*In real life, the hardest aspect of the battle between good and evil is determining which is which*." – George R.R. Martin

Saya sudah menyampaikan bahwa Jusuf Wannadi, Sofjan Wanandi dan segenap koalisi CSIS sudah menggunakan seluruh kekuatan serta modal mereka untuk mencegah Prabowo Subianto naik menjadi presiden Republik Indonesia karena dua alasan: 1. Dendam akibat usaha mereka mendeislamisasi Indonesia digagalkan Prabowo, dan 2. Ketakutan bila Prabowo naik maka kejahatan mereka sehubungan dengan ledakan bom di rumah susun tanah Tinggi akan kembali dibuka.

Karena mengagalkan usaha Prabowo menjadi presiden berhubungan dengan eksistensi lembaga CSIS dan diri mereka sendiri, maka klik CSIS siap melakukan apa saja, termasuk dengan menginstigasi aksi massa yang melumpuhkan perekonomian negara apabila KPU dan/atau MK memutuskan pemenang pilpres adalah Prabowo dan Hatta Rajasa. Metode ini adalah strategi cadangan yang sudah disiapkan sejak lama dengan meniru Orange Revolution di Ukraina yaitu dengan membuat *quick count* prematur yang memenangkan mereka dan kemudian menolak hasil pemilu bila hasilnya berbeda dari *quick count*.

Selengkapnya mengenai dua paragraf di atas bisa dibaca di bawah ini:

http://m.kompasiana.com/post/read/674808/1/tidak-ada-jokowi-tanpa-bom-tanah-tinggi.html

http://m.kompasiana.com/post/read/673409/1/jokowi-pertaruhan-terakhir-jusuf-wanandi.html

http://m.kompasiana.com/post/read/674688/1/apabila-jokowi-jusuf-kalla-gagal-menang.html

http://m.kompasiana.com/post/read/674298/1/skenario-cadangan-csis-bila-jokowi-kalah.html

Kemarin saya menerima informasi bahwa "kader-kader" PDIP sebagai bagian Orange Revolution tersebut sudah mulai masuk Jakarta dari Jawa Tengah. Hari ini informasi ini dikonfirmasi oleh Juru Bicara PDIP yaitu Eva Sundari bahwa lima ribu "relawan pendukung" Jokowi-JK akan turun ke jalan pada pengumuman resmi KPU tanggal 22 Juli 2014 yang terdiri dari Projo, Seknas Petani, Seknas Perempuan, dan Bara JP. Dengan demikian 4 hari menjelang pengumuman KPU, massa calon perusuh dari kubu Jokowi-JK sebanyak lima ribu orang sudah berada di Jakarta!!

http://m.news.viva.co.id/pemilu2014/read/522423-pdip–22-juli–ribuan-relawan-joko-widodo-turun-ke-jalan

Keberadaan massa sebesar lima ribu orang tentu sangat luar biasa mengerikan dan mencekam apalagi di belakang massa tersebut ada Jusuf Wanandi dan Sofjan Wanandi yang mendapat gemblengan langsung dari

dua intelijen paling sadis di Indonesia yaitu Ali Moertopo dan Leonardus Benjamin Moerdani alias LB Moerdani yang terkenal mendalangi kerusuhan Malari, pembantaian rakyat Timor Leste, Tanjung Priuk, Kerusuhan kudatuli dan Kerusuhan 13-14 Mei 1998. Bayangkan apa yang bisa mereka lakukan dengan lima ribu massa militan yang baru-baru ini melakukan vandalisme dan penyegelan terhadap kantor TVOne hanya karena masalah pemberitaan yang tidak disukai?

Ingat juga bahwa vandalisme tersebut dilakukan massa cukup dengan provokasi bahwa TVOne menyebut PDIP adalah partai komunis, sekarang bayangkan apa yang akan dilakukan massa pendukung Jokowi-JK dengan provokasi yang telah rutin dilakukan sejak tanggal 9 Juli 2014 bahwa ada kecurangan sistematis yang dilakukan oleh Prabowo-Hatta sehingga "kemenangan" Jokowi-JK telah "dicuri" dan "dicurangi" oleh kubu Prabowo-Hatta apabila tanggal 22 Juli 2014 KPU memutuskan pemenang pilpres adalah Prabowo-Hatta Rajasa.

Pertanyaan di sini tentu saja adalah sejauh mana kerusuhan akan terjadi ketika KPU menemukan bahwa suara rakyat ternyata mengalahkan Jokowi-Jusuf Kalla? Tinggi sekali dan sudah pasti terjadi, apalagi rekapitulasi KPUD sejauh ini menunjukan fakta tidak terbantahkan bahwa Prabowo-Hatta relatif menguasai Sumatera, menang di Jawa Barat (sapu bersih di Depok, Bogor, Bekasi, dll) yang diakui Denny JA bernilai kemenangan di enam propinsi lain, menang di Banten, berhasil mengambil suara di lumbung PDIP sebesar 35%, imbang di Jawa Timur yang merupakan lumbung suara PKB, menang di sebagian Indonesia Tengah dan berhasil mengambil suara di Indonesia Timur, benteng Kalla yang sulit ditembus bahkan oleh SBY pada tahun 2009.

Saya tidak mengatakan Prabowo-Hatta pasti menang, tapi saya hanya mengatakan bahwa mereka masih memiliki kemungkinan, seberapa kecilpun itu untuk mengalahkan Jokowi-JK dan saat hal tersebut terjadi maka lima ribu massa Jokowi-JK dapat dipastikan akan mulai berteriak-teriak: “curang, curang,” sedangkan sepuluh ribu massa buruh pendukung Prabowo-Hatta yang berinisiatif menjaga kemenangan itu mungkin akan terpancing dan selanjutnya dapat dipastikan: KERUSUHAN yang menelan korban jiwa dan harta!! Masih mending bila yang hilang adalah jiwa perusuh, bagaimana bila rakyat kecil yang kembali menjadi korban politikus busuk? Kecuali Jokowi-JK menarik kembali lima ribu pasukan mereka maka kematian rakyat tidak berdosa pada tanggal 22 Juli 2014 sampai selesainya pilpres adalah keniscayaan, dan hal ini mengingatkan saya pada perkataan Lord Varys kepada Eddard Stark:

“*Why is it always the innocents who suffer most, when you high lords play your game of thrones*?”

O. TABIR ASAP KERUSUHAN MEI

“*Salah satu di antara kekerasan dalam kerusuhan Mei 1998 yang paling mendapat perhatian, terutama oleh kalangan internasional kala itu, adalah kekerasan seksual yang menimpa perempuan-perempuan etnis cina. Namun, yang paling ditutup-tutupi oleh kalangan pemerintah di bawah BJ Habibie yang mengganti posisi Soeharto sebagai presiden, adalah mengenai kekerasan seksual tersebut. Semua pengungkapan cenderung dibantah, termasuk data dari sumber yang layak dipercaya karena dikenal memiliki integritas yang tinggi*”.

DUABELAS tahun telah berlalu, tapi tabir asap yang menyelimuti kerusuhan 13-15 Mei 1998 yang berlangsung dalam ruang dan momentum yang berimpit dengan penembakan mahasiswa Universitas Trisakti di Grogol Jakarta 12 Mei, tetap tak terkuak. Dengan demikian, kebenaran dalam peristiwa itu belum berhasil dibuat 'terang benderang' –meminjam kata majemuk yang lazim digunakan kalangan penguasa dan politisi belakangan ini untuk penggambaran suatu keadaan clear atau sepenuhnya terungkap– sehingga dengan sendirinya tak pernah ada pihak yang bisa dimintai pertanggunganjawab, khususnya dari kalangan jenderal para pengendali keamanan kala itu.

Tak satupun dari para pejabat tinggi bidang keamanan –mulai dari Panglima ABRI Jenderal Wiranto, Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsuddin dan Kepala Staf Kodam Jaya Brigjen Sudi Silalahi, sampai Kapolda Mayjen Polisi Hamami Nata atau Panglima Kostrad Letjen Prabowo Subianto yang disebut-sebut mengerahkan pasukan dalam peristiwa– yang secara serius diproses untuk dimintai pertanggungjawaban. Begitu pula kalangan intelejen, yang semestinya harus bisa menguasai informasi, seperti Kepala BIA Mayjen Zacky Makarim, serta komandan-komandan satuan intel di berbagai angkatan, termasuk kepolisian.

Kecurigaan tentang adanya konspirasi dan skenario dalam rangka pergulatan kekuasaan, muncul dalam berbagai analisis, namun dalam kenyataannya tak pernah ada sentuhan lanjut untuk mengungkap peristiwa. Ini sedikit banyak merupakan pertanda bahwa dalam tubuh kekuasaan hingga kini, mereka yang terlibat dalam konspirasi politik dan kekuasaan –yang namanya sudah tercium di tengah khalayak maupun yang masih tersembunyi– yang menyebabkan meletupnya kerusuhan Mei 1998 itu,

beberapa di antaranya masih bercokol dalam posisi kunci kekuasaan pemerintahan maupun dalam kekuasaan politik. Sudah berapa masa kepresidenan ganti berganti, tanpa memperlihatkan upaya yang cukup berarti untuk mengungkap kejahatan kemanusiaan, kejahatan politik dan kejahatan kekuasaan yang terjadi di bulan Mei 1998. Barangkali, sampai suatu hari para keluarga yang kehilangan anak atau suami menangis dengan air mata darah pun para penguasa tetap takkan tergerak mencari kebenaran, karena pekerjaan mencari kebenaran seperti itu lebih musykil dan bisa membahayakan kepentingan kekuasaan itu sendiri.

Kerusuhan dalam konteks keadaan dan dinamika sosial politik

TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) yang dibentuk segera setelah peristiwa, diketuai Marzuki Darusman SH dari Komnas HAM, menemukan berbagai kejanggalan dalam aspek pertanggungjawaban keamanan. Dari hasil verifikasi saksi dan korban, testimoni para pejabat ABRI dan mantan pejabat terkait, dari aspek keamanan TGPF menemukan fakta bahwa koordinasi antara satuan keamanan kurang memadai, adanya keterlambatan antisipasi, adanya aparat keamanan di berbagai tempat tertentu membiarkan kerusuhan terjadi, ditemukan adanya bentrokan antar-pasukan di beberapa wilayah dan adanya kesimpangsiuran penerapan perintah dari masing-masing satuan pelaksana. Menurut laporan TGPF yang terdiri beberapa jilid dengan jumlah halaman hampir seribu, di beberapa tempat didapatkan bukti bahwa jasa-jasa keamanan dikomersilkan, suatu penggunaan kesempatan dalam kesempitan, dengan konsumen tentu saja etnis keturunan cina yang berduit banyak. Begitu pula TGPF menemukan adanya kesenjangan persepsi antara masyarakat dan aparat keamanan. "*Masyarakat beranggapan bahwa di beberapa lokasi telah terjadi vakum kehadiran aparat keamanan, atau bila ada, tidak*

berbuat apa-apa untuk mencegah atau meluasnya kerusuhan. Sebaliknya, para pejabat keamanan berkeyakinan tidak terjadi vakum kehadiran aparat keamanan, meskipun disadari kenyataan menunjukkan bahwa untuk lokasi tertentu masih tetap terjadi kerusuhan (di luar prioritas pengamanan), hal ini disebabkan oleh terbatasnya kekuatan pasukan".

Dalam bukunya 'Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando' (Penerbit Kompas, 2009), Letnan Jenderal Purnawirawan Sintong Pandjaitan mempersoalkan tindak-tanduk Jenderal TNI Wiranto di seputar peristiwa. Salah satunya, adalah bahwa pada tanggal 14 Mei 1998 Menteri Hankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto tetap berangkat ke Malang Jawa Timur untuk bertindak sebagai Inspektur upacara dalam serah terima tanggung jawab Pasukan Pemukul Reaksi Cepat ABRI dari Divisi I kepada Divisi II Kostrad". Bagi Sintong ini menjadi tanda tanya besar. "*Alangkah tidak masuk akal, sampai hari ini pun sangat tidak masuk akal. Mengapa sebagian besar pimpinan ABRI pada waktu itu berada di Malang? Kalau mereka tahu akan terjadi kerusuhan yang begitu dahsyat tetapi memutuskan tetap pergi ke Malang, maka mereka membuat kesalahan. Tetapi kalau mereka tidak tahu akan terjadi kerusuhan, mereka lebih salah lagi. Mengapa mereka sampai tidak tahu? Kerusuhan yang terjadi di Jakarta bukan hanya merupakan masalah Kodam Jaya, tetapi sudah menjadi masalah nasional*".

TGPF berkeyakinan, bahwa peristiwa tanggal 13-15 Mei 1998 tidak dapat dilepaskan dari konteks keadaan dan dinamika sosial-politik masyarakat Indonesia pada periode waktu itu, serta dampak ikutannya. Peristiwa-peristiwa sebelumnya seperti Pemilihan Umum 1977, penculikan sejumlah aktivis, krisis ekonomi, Sidang Umum MPR-RI 1998, unjukrasa/demonstrasi mahasiswa yang terus menerus, serta tewas

tertembaknya mahasiswa Universitas Trisakti, semuanya berkaitan erat dengan peristiwa tanggal 13-15 Mei 1998. Kejadian-kejadian tersebut merupakan rangkaian tindakan kekerasan yang menuju pada pecahnya peristiwa kerusuhan yang menyeluruh pada tanggal 13-15 Mei 1998. Dalam abstraksi laporannya, TGPF menyatakan keyakinannya, bahwa salah satu dampak utama peristiwa kerusuhan tersebut adalah terjadinya pergantian kepemimpinan nasional pada tanggal 21 Mei 1998. Dampak ikutan lainnya ialah berlanjutnya kekerasan berupa intimidasi dan kekerasan seksual termasuk perkosaan yang berhubungan dengan kerusuhan 13-15 Mei 1998.

Bila keyakinan TGPF ini dilanjutkan dengan suatu analisis lebih jauh, bisa ditemukan bahwa rangkaian peristiwa Mei 1998 –yang mengambil tumbal nyawa empat mahasiswa Universitas Trisakti dan kalangan masyarakat lainnya serta terenggutnya kehormatan sejumlah perempuan– tidak boleh tidak adalah bagian dari permainan perebutan kekuasaan, bertujuan akhir menggulingkan kekuasaan Soeharto yang sudah berlangsung 32 tahun lamanya. Sementara itu, sikap para 'pendukung' Soeharto yang umumnya adalah kaum opportunis, kalau tidak tiarap, cepat-cepat menyeberang ke barisan yang ingin menjatuhkan Soeharto melalui pembusukan membuka lebar pintu kejatuhan Soeharto. Gerakan-gerakan mahasiswa kritis dalam konteks ini adalah suatu kondisi objektif yang dimanfaatkan di 'luar' pengetahuan para mahasiswa itu sendiri, suatu hal yang juga dialami dalam peralihan kekuasaan tahun 1966-1967, saat gerakan kritis mahasiswa dimanfaatkan dalam penciptaan peluang lanjut setelah peluang yang diakibatkan Peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Tapi sayang analisa seperti ini tak mendapat bukti perkuatan karena memang pencarian kebenaran masalah yang sesungguhnya, tak pernah

dilakukan. Bila kebenaran terungkap seluas-luasnya, akan sangat banyak pihak terseret, dan sebagian di antaranya merupakan bagian dari rezim demi rezim kekuasaan pasca Soeharto dan atau bagian dari pelaku kehidupan politik saat ini yang masih sedang berkiprah. Masalahnya, sebagian besar dari pelaku kekuasaan negara dan kekuasaan politik maupun kekuasaan ekonomi di Indonesia adalah spesis manusia berkulit loreng abu-abu yang bergelimang perilaku korup dan dosa masa lampau. Banyak tokoh penting di segala lini kehidupan saat ini, memiliki rekam jejak yang sewaktu-waktu bisa diungkapkan dan dipermasalahkan. "Kau tahu apa yang aku tahu mengenai kau. Tetapi aku juga tahu bahwa kau tahu mengenai aku" telah menciptakan keseimbangan yang terus diperbaharui.

"*Di semua wilayah yang dikaji oleh TGPF didapati adanya kesamaan waktu pecahnya kerusuhan*". Temuan ini menunjukkan adanya faktor perencanaan. "Kedekatan, bahkan kesamaan pola kejadian mengindikasikan kondisi dan situasi sosial-ekonomi-politik yang potensial memungkinkan pecahnya suatu kerusuhan". Kondisi objektif tersebut pada gilirannya menurut TGPF sebagian memang pecah secara alamiah dan sebagian lagi dibuat pecah melalui sarana-sarana pemicu. Pola kerusuhan bervariasi, mulai dari yang bersifat spontan, lokal, sporadis, hingga yang terencana dan terorganisir. Para pelakunya pun beragam, mulai dari massa ikutan yang mula-mula pasif tetapi menjadi pelaku aktif kerusuhan, provokator, "*termasuk ditemukannya anggota aparat keamanan*".

TGPF mendefinisikan bahwa kerusuhan adalah keseluruhan bentuk dan rangkaian tindak kekerasan yang meluas, kompleks, mendadak dan eskalatif dengan dimensi-dimensi kuatitatif dan kualitatif. Skala kerusuhan 13-15 Mei 1998 mencakup aspek-aspek sosial, politik, keamanan, ekonomi bahkan kultural. Dilihat dari kerangka waktu atau time frame, kerusuhan

ini membawa dampak ikutan. Dengan demikian, rentang kerusuhan harus dirujuk pada dinamika krisis nasional, sehingga dampak-dampak pasca kerusuhan, dalam lingkup geografis yang berskala nasional. Enam kota yang dikaji merupakan cerminan dari skala nasional kerusuhan yang terjadi. Secara ringkas, kerusuhan 13-15 Mei 1998 harus diletakkan dalam rentang waktu sebelum dan sesudahnya, dimensinya menyeluruh dan multi aspek, serta wilayah cakupannya bersifat nasional. Dari sudut aktivitas, klasifikasi kerusuhan yang ditetapkan TGPF mencakup rangkaian tindak perusakan, penjarahan, pembakaran, kekerasan seksual, penganiayaan, pembunuhan, penculikan dan intimidasi yang menjurus.

Salah satu di antara kekerasan dalam kerusuhan Mei 1998 yang paling mendapat perhatian, terutama oleh kalangan internasional kala itu, adalah kekerasan seksual yang menimpa perempuan-perempuan etnis cina. Namun, yang paling ditutup-tutupi oleh kalangan pemerintah di bawah BJ Habibie yang mengganti posisi Soeharto sebagai presiden, juga adalah mengenai kekerasan seksual tersebut. Semua pengungkapan cenderung dibantah, termasuk data dari sumber yang layak dipercaya karena dikenal memiliki integritas yang tinggi.

Beberapa kasus yang ada dalam tabel TGPF adalah sebagai berikut ini. Seorang isteri jaksa yang beralamat di Taman Galaxi Bekasi melaporkan menyaksikan seorang perempuan diperkosa beramai-ramai di belakang rumahnya. Seorang suami yang sudah diverifikasi oleh Bakom PKB melaporkan bahwa isterinya yang berusia 26 tahun diperkosa 5 orang, setelah itu secara keji kemaluannya dijejali dengan botol. Seorang suami lainnya, menceritakan bahwa ia bersama isterinya yang juga berusia 26 tahun (namanya disebut jelas dalam laporan) pada tanggal 14 siang berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk berangkat ke Singapore.

Dalam perjalanan, mobil yang mereka tumpangi dicegat belasan laki-laki yang kemudian masuk ke mobil dan memaksa berjejal ikut ke Bandara. Pukul 14.30 di bawah tangga terminal F, isteri dan anaknya yang berusia 9 tahun diperkosa. Isterinya lalu dibunuh. Anaknya sempat dibawa ke Singapura, dibawa ke rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia. Para pelakunya umumnya berbadan tegap. Pada hari yang sama pukul 15.00. di Jalan A. Yani Jakarta Timur, saat terjadi amuk massa, seorang ibu dan dua anak gadisnya ditelanjangi sejumlah lelaki dan sudah akan diperkosa, namun berhasil diselamatkan oleh anggota Marinir. Pada tempat dan waktu yang hampir bersamaan, seorang anak roboh dengan luka tembakan di kepalanya. Bukan hanya yang hidup mengalami pelecehan. Seorang saksi pegawai Rumah Duka di Pluit yang sudah diverifikasi, menceritakan penyerbuan ke tempat kerjanya, dan ada sejumlah orang mempermainkan dan melecehkan tiga jenazah yang ada di rumah duka tersebut.

Bila mereka yang berkompeten dalam penegakan hukum dan ketertiban bersungguh-sungguh, kasus-kasus yang sudah hampir terang benderang jalan peristiwanya, saksi dan pelakunya, semestinya bukan hal yang sulit untuk ditangani lanjut secara hukum.

"*Dari segi intensitas kekerasan terhadap sebagian korban yang menjadi sasaran serangan, dimensi sentimen anti rasial terhadap golongan etnik cina yang laten merupakan faktor penyebab dominan yang mudah dieksploitir untuk menciptakan kerusuhan". "Terkait faktor sosial-ekonomi, dapat dicatat bahwa tekanan dan kesenjangan sosial-ekonomi yang diperparah oleh kelangkaan bahan pokok yang dialami masyarakat, rawan terhadap eksploitasi sehingga melahirkan dorongan-dorongan destruktif untuk melakukan tindak-tindak kekerasan. Sebagian besar mereka yang terlibat ikut-ikutan dalam kerusuhan, pada dasarnya adalah*

korban dari keadaan serta struktur yang tidak adil. Mereka berasal dari lapisan rakyat kebanyakan".

KERUSUHAN 13-15 Mei 1998 "mempunyai pola umum yang dimulai dengan berkumpulnya massa pasif yang terdiri dari massa lokal dan massa pendatang tak dikenal". Kemudian muncul sekelompok provokator yang memancing massa dengan berbagai modus tindakan seperti membakar dan atau memancing perkelahian, meneriakkan yel-yel yang memanaskan situasi, merusak rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya. Setelah itu, provokator mendorong massa untuk mulai melakukan perusakan barang dan bangunan, disusul dengan tindakan menjarah barang, dan di beberapa tempat diakhiri dengan membakar gedung atau barang-barang lain. Pada beberapa lokasi juga beberapa variasi, yaitu kelompok provokator langsung melakukan perusakan, baru kemudian mengajak massa untuk ikut merusak lebih lanjut.

TGPF membagi para pelaku kerusuhan 13-15 Mei 1998 atas dua golongan, yakni, pertama, massa pasif yang adalah pendatang lalu diprovokasi sehingga berubah menjadi massa aktif, dan kedua, provokator. Provokator umumnya bukan dari wilayah setempat, secara fisik tampak terlatih, sebagian memakai seragam sekolah seadanya (tidak lengkap), tidak ikut menjarah, dan segera meninggalkan lokasi setelah gedung atau barang terbakar. Para provokator ini juga yang membawa dan menyiapkan sejumlah benda untuk keperluan merusak dan membakar, seperti jenis benda logam pendongkel, bahan bakar cair, kendaraan, bom molotov dsb.

Dari sudut urutan peristiwa, TGPF menemukan bahwa titik picu paling awal kerusuhan di Jakarta terletak di wilayah Jakarta Barat, tepatnya wilayah seputar Universitas Trisakti pada tanggal 13 Mei 1998. Sementara

pada tanggal 14 Mei 1998, kerusuhan meluas dengan awal titik waktu hampir bersamaan, yakni rentang waktu antara pukul 08.00 WIB sampai pukul 10 WIB. Dengan demikian untuk kasus Jakarta, jika semata-mata dilihat dari urutan waktu, ada semacam aksi serentak. TGPF menemukan bahwa faktor pemicu (triggering factor) terutama untuk kasus Jakarta ialah tertembak matinya mahasiswa Universitas Trisakti pada sore hari tanggal 12 Mei 1998. Dalam derajat yang lebih rendah, tertembaknya mahasiswa Trisakti tersebut juga menjadi faktor pemicu kerusuhan di lima daerah yang dipilih TGPF, terkecuali kerusuhan di Medan dan sekitarnya yang telah terjadi sebelumnya. Sasaran kerusuhan adalah pertokoan, fasilitas umum (pompa bensin, tanda dan rambu lalu lintas dan lain-lain), kantor pemerintah (termasuk kantor polisi) yang menimbulkan kerusakan berat termasuk pembakaran gedung, rumah dan toko, serta kendaraan bermotor umum dan pribadi. Sasaran kerusuhan kebanyakan etnis cina.

Kelompok pelaku, korban dan kerugian

Para pelaku kerusuhan menurut TGPF dapat dibagi atas tiga kelompok sebagai berikut.

Kelompok pertama, kelompok provokator. Kelompok inilah yang menggerakkan massa, dengan memancing keributan, memberikan tanda-tanda tertentu pada sasaran, melakukan perusakan awal, pembakaran, mendorong penjarahan. Kelompok ini datang dari luar, tidak berasal dari penduduk setempat, dalam kelompok kecil yang jumlahnya belasan orang, terlatih dan mempunyai kemampuan serta terbiasa menggunakan alat kekerasan. Mereka bergerak dengan mobilitas tinggi, menggunakan sarana transpor sepeda motor atau mobil yang umumnya jenis jeep, dan memiliki pula sarana komunikasi seperti handy talkie atau HP. Kelompok ini juga

menyiapkan alat-alat perusak seperti batu, bom molotov, cairan pembakar, linggis dan lain-lain. Pada umumnya kelompok ini sulit dikenal, walau pada beberapa kasus ada pelaku dari kelompok sebuah organisasi pemuda. TGPF memberi contoh di Medan tentang ditemukannya keterlibatan langsung Pemuda Pancasila. Diketemukan pula fakta keterlibatan anggota aparat keamanan, seperti yang terjadi di Jakarta, Medan dan Solo.

Kelompok kedua adalah massa aktif. Massa dalam jumlah puluhan hingga ratusan, mulanya adalah massa pasif pendatang yang sudah terprovokasi sehingga menjadi agresif, melakukan perusakan lebih luas, termasuk pembakaran. Massa ini juga melakukan penjarahan pada toko-toko dan rumah. Mereka bergerak secara terorganisir.

Kelompok ketiga adalah massa pasif. Pada awalnya massa pasif lokal berkumpul untuk menonton dan ingin tahu apa yang (akan) terjadi. Sebagian dari mereka lalu terlibat ikut-ikutan merusak dan menjarah setelah dimulainya kerusuhan, tetapi tak sedikit pula yang hanya menonton sampai akhir kerusuhan. Sebagian dari mereka menjadi korban kebakaran. Pada mulanya kecenderungan perhatian utama pemerintah, masyarakat maupun media massa, adalah pada aspek korban akibat kekerasan seksual. Tidak mengherankan, karena setelah sekian lama barulah terjadi suatu kerusuhan yang diiringi peristiwa perkosaan seintensif dan sespektakuler kali ini. Penjarahan, pembakaran dan kekerasan lainnya sudah amat sering terjadi dan masyarakat cukup terbiasa mengalami dan menyaksikannya. TGPF mencatat dalam suatu ringkasan eksekutif, "Fakta menunjukkan bahwa yang disebut korban dalam kerusuhan Mei 1998 adalah orang-orang yang telah menderita secara fisik dan psikis karena hal-hal berikut, yaitu: kerugian fisik/material (rumah atau tempat usaha dirusak atau dibakar dan hartanya dijarah), meninggal dunia saat terjadinya kerusuhan karena

berbagai sebab (terbakar, tertembak, teraniaya dan lain-lain), kehilangan pekerjaan, penganiayaan, penculikan dan menjadi sasaran tindak kekerasan seksual".

Korban dalam kerusuhan Mei 1998 dibagi dalam beberapa kategori.

Kategori pertama adalah kerugian material. Kerugian ini meliputi kerugian bangunan, seperti toko, swalayan, atau rumah yang dirusak, termasuk harta benda berupa mobil, sepeda motor, barang-barang dagangan dan barang-barang lainnya yang dijarah dan atau dibakar massa. Temuan TGPF menunjukkan bahwa korban material ini bersifat lintas kelas sosial, tidak hanya menimpa etnis cina, tetapi juga warga lainnya. Namun memang, yang paling banyak menderita kerugian material adalah dari etnis cina.

Korban kehilangan pekerjaan, adalah kategori kedua. Termasuk dalam kategori ini adalah orang-orang yang akibat terjadinya kerusuhan, karena gedung atau tempat kerjanya dirusak, dijarah dan dibakar, membuat mereka kehilangan pekerjaan atau sumber kehidupan. Yang paling banyak kehilangan pekerjaan adalah anggota masyarakat biasa.

Kelompok korban kategori ketiga, adalah yang meninggal dunia dan luka-luka saat terjadinya kerusuhan. Mereka adalah korban terjebak dalam gedung terbakar, korban penganiayaan, korban tembak dan kekerasan lain.

Sedang kategori keempat adalah mereka yang menjadi korban penculikan. Mereka diculik saat kerusuhan terjadi, dan kehilangan mereka dilaporkan ke YLBHI/Kontras. Setidaknya saat itu ada 4 orang yang dilaporkan hilang/diculik, yakni Yadin Muhidin (23 tahun) hilang di daerah Senen, Abdun Nasir (33) hilang di daerah Lippo Karawaci, Hendra Hambali (19)

hilang di daerah Glodok Plaza dan Ucok Siahaan (22) yang hilangnya tidak jelas di daerah mana.

Korban yang meninggal dunia di Jakarta menurut data Tim Relawan adalah 1.190 orang akibat terbakar atau dibakar, 27 karena senjata, sedang yang luka-luka 91 orang. Data Polda maupun data Pemda DKI, menunjukkan angka-angka yang jauh lebih rendah. Ada kecenderungan instansi resmi mengecilkan angka. Tetapi mengenai korban luar Jakarta, data Polri dan data Tim Relawan relatif sama, yakni 32 dan 33 yang meninggal dunia. Dikembangkan opini bahwa mereka yang meninggal adalah akibat kesalahannya sendiri, tetapi menurut TGPF ditemukan banyak orang meninggal bukan karena kesalahannya sendiri.

Korban karena kekerasan seksual menunjukkan angka-angka yang cukup tinggi. TGPF membagi bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam beberapa kategori, yakni perkosaan, perkosaan dengan penganiayaan, penyerangan seksual/penganiayaan dan pelecehan seksual. TGPF memverifikasi 52 korban perkosaan baik berdasarkan keterangan yang didengar langsung dari korban, keterangan dokter medis yang memeriksa, keterangan orang tua korban, keterangan saksi (perawat, psikiater, psikolog) maupun kesaksian rokhaniawan/pendamping (konselor). Korban perkosaan dengan penganiayaan tercatat 14 orang berdasarkan keterangan dokter, saksi mata/keluarga dan konselot. Korban penyerangan/penganiayaan seksual ada 10 orang berdasarkan keterangan dokter, keterangan rohaniawan, keterangan korban atau saksi (keluarga). Dan ada 9 orang korban pelecehan seksual menurut keterangan korban maupun saksi. Selain korban-korban kekerasan seksual yang terjadi dalam kerusuhan Mei, terdapat juga korban sebelum dan sesudah kerusuhan Mei. Kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998 mayoritas terjadi di dalam rumah,

selain di jalan dan di tempat usaha. TGPF menemukan bahwa sebagian besar kasus perkosaan adalah gang rape, yakni korban diperkosa oleh sejumlah orang secara bergantian pada waktu yang sama dan di tempat yang sama. "*Kebanyakan kasus perkosaan juga dilakukan di hadapan orang lain*". Meskipun korban kekerasan seksual tidak semuanya berasal dari etnis cina, namun sebagian besar kasus kekerasan seksual dalam kerusuhan 13-15 Mei 1998 diderita oleh perempuan etnis cina. Korban kekerasan seksual ini pun bersifat lintas kelas sosial.

Khusus mengenai kekerasan seksual ini, TGPF menganalisis bahwa kekerasan seksual yang telah terjadi selama kerusuhan, merupakan satu bentuk serangan terhadap manusia yang telah menimbulkan penderitaan yang dalam, serta rasa takut dan trauma yang luas. Kekerasan seksual terjadi karena adanya niat tertentu, peluang, serta pembentukan psikologi massa yang seolah-olah membolehkan tindakan tersebut dilakukan, sehingga melipatgandakan terjadinya perbuatan tersebut. Dan soal kenapa etnis cina menjadi sasaran utama? "Dari segi intensitas kekerasan terhadap sebagian korban yang menjadi sasaran serangan, dimensi sentimen anti rasial terhadap golongan etnik cina yang laten merupakan faktor penyebab dominan yang mudah dieksploitir untuk menciptakan kerusuhan". Faktor lain yang telah menyebabkan penyerangan terhadap kelompok etnis cina, karena penyerangan awal memang ditujukan terhadap toko-toko dan rumah-rumah milik golongan etnis tersebut yang terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu.

Terkait faktor sosial-ekonomi, dapat dicatat bahwa tekanan dan kesenjangan sosial-ekonomi yang diperparah oleh kelangkaan bahan pokok yang dialami masyarakat, rawan terhadap eksploitasi sehingga melahirkan dorongan-dorongan destruktif untuk melakukan tindak-tindak

kekerasan (perusakan, pembakaran, penjarahan dan lain-lain). Sebagian besar mereka yang terlibat ikut-ikutan dalam kerusuhan, pada dasarnya adalah korban dari keadaan serta struktur yang tidak adil. Mereka berasal dari lapisan rakyat kebanyakan.

"*Martir diciptakan lebih cepat, bukan di Yogya tapi di Jakarta, dan kemudian disusul kerusuhan yang amat terorganisir. Perencananya bisa sama, bisa juga berbeda. Yang menciptakan martir lain, yang melakukan kerusuhan dengan pengorganisasian provokasi secara sistematis lain lagi, dalam suatu pola pertarungan kekuasaan. Hasil akhirnya, Presiden yang sedang berkuasa tak tahan lagi, lalu mundur. Sebenarnya semua hal ini menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Tetapi kenyataannya para decision makers per momentum maupun pasca momentum senantiasa menghindari suatu penelusuran lanjut. Hingga kini*".

KESIMPULAN terpenting dari TGPF mengenai kerusuhan 13-15 Mei 1998 adalah bahwa kerusuhan terjadi karena disengaja. Kerusuhan diciptakan sebagai bagian dari pertarungan politik di tingkat elite. Menurut TGPF, terdapat sejumlah 'mata rantai yang hilang' (*missing link*), yaitu hilang atau sukarnya diperoleh bukti-bukti atau informasi yang merujuk pada hubungan secara jelas antara pertarungan antar elite dengan arus massa. Namun, terdapat indikasi yang kuat adanya hubungan semacam itu, terutama di Solo dan sebagian wilayah Jakarta.

Dari temuan lapangan, TGPF juga berkesimpulan, bahwa banyak sekali pihak yang 'bermain' untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok atau golongan, dari terjadinya kerusuhan. Lebih jauh disimpulkan bahwa semua pihak yang terlibat bermain pada semua tingkat. Kesimpulan TGPF ini merupakan penegasan bahwa terdapat keterlibatan

semua pihak, mulai dari preman lokal, hingga kelompok-kelompok di dalam ABRI pada kerusuhan tersebut. Mereka mendapatkan keuntungan bukan saja dari upaya secara sengaja untuk ‘menumpangi’ kerusuhan, melainkan juga dengan cara tidak melakukan apa-apa. Dalam konteks inilah, ABRI dianggap bersalah karena ‘tidak cepat bertindak’ untuk mencegah terjadinya kerusuhan, padahal memiliki sarana dan tanggungjawab untuk itu.

Setelah berjalannya waktu hingga 12 tahun lamanya, tabir asap yang menutupi peristiwa dan peran dalam kerusuhan Mei 1998 masih belum ‘terkuak’ secara formal. Apa sebenarnya yang terjadi dalam rangka pergulatan kekuasaan, masih selalu ditutup-tutupi. Ketua Kontras Munir, yang mencoba mengungkit dan mengungkap peranan busuk sejumlah kalangan kekuasaan, khususnya dalam rangkaian penculikan sejumlah aktivis menjelang peristiwa dan kemudian mengenai peran-peran dalam peristiwa, mati dibunuh. Siapa dalang pembunuhan Munir itu sendiri tetap ‘dibuat’ gelap, sehingga terjadi kegelapan ganda.

Dari berkas testimoni para jenderal dan sejumlah perwira lainnya yang dimintai keterangan oleh TGPF, terlihat betapa para jenderal itu cenderung memberi keterangan yang berbelit-belit kepada pewawancara TGPF. Beberapa di antaranya ‘berlagak pilon’, sementara yang lainnya menyampaikan penjelasan-penjelasan normatif yang tak berguna untuk memperjelas persoalan. Bahasa dan kalimat para jenderal itu juga seringkali kurang jelas, tidak fix, entah sengaja entah tidak. Terlihat pula ada situasi saling ‘melemparkan’ tanggungjawab, padahal nyata-nyata secara formal tanggungjawab keamanan itu ada di tangannya. Sayang pula, umumnya para pemeriksa TGPF terkesan kurang berhasil ‘mengejar’ para jenderal itu dengan pertanyaan-pertanyaan mereka, entah karena

kekurangan data atau entah apa. Dan yang paling sulit, Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto sebagai puncak komando kala itu, justru tidak bersedia, tegasnya tak mau memberi keterangan kepada TGPF.

Para jenderal dan perwira yang dimintai keterangan oleh TGPF, antara lain adalah Mayjen TNI Sjafrie Sjamsuddin yang saat peristiwa terjadi menjabat selaku Panglima Kodam Jaya yang bertanggungjawab atas keamanan ibukota. Sebelum Mei 1998 ia dianggap punya kedekatan dengan Letnan Jenderal Prabowo Subianto, menantu Presiden Soeharto. Setelah itu, khususnya pada saat peristiwa berlangsung terlihat bahwa ia 'beralih' menjadi lebih dekat dengan Pangab Jenderal Wiranto. Sementara per saat itu, Letnan Jenderal Prabowo Subianto diposisikan 'berseberangan' kepentingan dengan Jenderal Wiranto. Letnan Jenderal Prabowo, yang saat peristiwa adalah Panglima Kostrad, juga diperiksa TGPF. Jenderal lain yang ikut diperiksa TGPF adalah Mayjen Zacky Makarim, Kepala BIA (Badan Intelijen ABRI), yang juga dikenal punya kedekatan khusus dengan Letjen Prabowo Subianto. Berturut-turut yang ikut diperiksa TGPF adalah, Gubernur DKI Letjen Sutiyoso, Kastaf Kodam Jaya Brigjen Sudi Silalahi, Kapolda Metro Jaya Mayjen Pol Hamami Nata, Komandan Korps Marinir Mayjen Marinir Suharto, KSAD Jenderal Subagyo HS, Drs Fahmi Idris, serta sejumlah perwira menengah dari Kodam Jaya maupun Polda Metro Jaya.

TGPF memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Namun baik pemerintahan Presiden BJ Habibie maupun pemerintahan-pemerintahan Presiden sesudahnya, tak pernah memperlihatkan kesungguhan untuk menuntaskan peristiwa. Sejumlah nama yang justru disorot, belakangan malahan masuk ke dalam kekuasaan pemerintahan maupun dalam kekuasaan politik. Terbunuhnya empat mahasiswa

Universitas Trisakti sempat disidangkan dengan terdakwa sejumlah perwira bawahan dan bintara, tanpa menyentuh para penanggungjawab yang ada pada tingkat lebih tinggi.

Mereka yang disorot namun tak pernah tuntas dalam proses pertanggungjawaban, terutama adalah Jenderal Wiranto dan Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Bekas Panglima Kostrad ini memang sempat diajukan ke Dewan Kehormatan Perwira, dan setelah itu ia diberi penugasan 'samping' untuk akhirnya pensiun dini dan sempat hidup di luar Indonesia untuk beberapa tahun. Ia terjun ke dalam kancah politik dan mendirikan Partai Gerindra menyongsong Pemilihan Umum 2009. Sempat tampil sebagai calon Wakil Presiden berpasangan dengan Megawati Soekarnoputeri dalam Pemilihan Presiden yang lalu, namun dikalahkan SBY-Budiono dalam satu putaran. Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsudin yang juga menjadi fokus sorotan, hanya 'terparkir' sejenak sebelum berturut-turut menjabat sebagai Sekjen Departemen Pertahanan kemudian Wakil Menteri Pertahanan dalam Kabinet terbaru Presiden SBY.

Mayjen Zacky Makarim terkena 'pukulan' lebih telak, keluar gelanggang meninggalkan karir militernya setelah peristiwa Mei 1998. Sebagai Kepala BIA Zacky mengaku sudah memberi early warning ke berbagai pihak. Misalnya kepada Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsuddin. "*Saya sudah bilang khusus kepada Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya agar mewaspadai aksi-aksi yang turun ke jalan akan menuju ke Istana Presiden, Merdeka Utara, dan Merdeka Selatan dan simbol kenegaraan lainnya*". Zacky Makarim mengaku memberi *early warning* pada 11 Mei kepada semua pihak yang berwewenang, agar mencegah jangan sampai ada korban jatuh dan menjadi martir, seraya menyebut tanggal-tanggal yang perlu diwaspadai yakni 14, 16, 18 dan 20 Mei 1998 akan terjadi tindakan-

tindakan destruktif. "*Hindari adanya martir, karena akan dicerca rakyat*", ujar Zacky yang mengaku mengira martirnya jatuh di Yogya, tapi ternyata di Universitas Trisakti dan terjadi lebih cepat, 12 Mei 1998. "*Saya tidak tahu bahwa tanggal 14 Mei 1998 akan dijadikan bancaan habis*".

Apakah bahan-bahan informasi BIA memang lemah dan menyebabkan perkiraan-perkiraannya pun dengan sendirinya meleset sehingga serba tertinggal sekian langkah? Atau, ada pihak di dalam tubuh kekuasaan sendiri yang sengaja 'mewujudkan' apa yang justru dikuatirkan dan diperingatkan BIA dan mempercepat, sehingga segala sesuatunya terjadi bagai bola liar di luar perkiraan? Martir diciptakan lebih cepat, bukan di Yogya tapi di Jakarta, dan kemudian disusul kerusuhan yang amat terorganisir. Perencananya bisa sama, bisa juga berbeda. Yang menciptakan martir, lain. Dan yang melakukan kerusuhan dengan pengorganisasian provokasi secara sistematis, lain lagi, dalam suatu pola pertarungan kekuasaan. Hasil akhirnya, Presiden yang sedang berkuasa tak tahan lagi, lalu mundur. Sebenarnya semua hal ini menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Tetapi kenyataannya para decision maker per momentum maupun pasca momentum senantiasa menghindari suatu penelusuran lanjut. Hingga kini.

Awal Oktober 1965 enam jenderal dan satu perwira pertama jadi tumbal, tercipta alasan bagi penumpasan PKI. Tahun 1966, Arief Rahman Hakim gugur sebagai martir bersama marah, dan bola salju lalu menggelinding ke arah Presiden Soekarno. Tahun 1998 giliran empat mahasiswa Trisakti jadi tumbal, Jenderal Soeharto terpaksa turun. Akan adakah peristiwa-peristiwa baru dengan tumbal-tumbal baru?

P. KESAKSIAN MANTAN KSAL ARIEF KUSHARYADI TENTANG KERUSUHAN 13-14 MEI 1998

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana (Purn) Arief Kusharyadi mengungkap Tragedi Kerusuhan Mei 1998 yang diwarnai oleh konflik elite militer. Arief mengungkapkan hal itu ketika memenuhi panggilan Tim Ad Hoc Kerusuhan Mei 1998 Komisi Nasional HAM, Kamis (19/6).

"*Penjelasan Pak Arief selama satu setengah jam di depan kami -Ester Indahyani Yusuf, MM Billah, dan Philips Jusuf- sangat penting untuk mengungkap, apa sebenarnya yang terjadi di balik kerusuhan Mei yang diduga diwarnai oleh konflik elite militer itu, sekaligus menunjuk siapa saja yang harus bertanggung jawab atas tragedi itu*," tutur Ester di Jakarta, Jumat, 20 Juni 2003.

Ester lalu menjelaskan secara umum apa yang diungkap Arief. *"Ini pun hanya sebatas apa yang diizinkan Pak Arief. Rinciannya tak bisa saya kemukakan*," ujar Ester.

Kepada ketiga anggota tim, Arief menjelaskan, waktu kerusuhan terjadi tanggal 14 Mei 1998, Arief berkeliling Jakarta dan tak melihat adanya pasukan di lapangan. Padahal, jumlah pasukan yang di bawah kendali operasi di Jakarta kala itu 110 satuan setingkat kompi. Pasukan tersebut terdiri dari pasukan Yonif 327 Brawijaya, Grup I Kopassus, Kostrad, Marinir, dan tiga skuadron helikopter TNI Angkatan Udara.

Melihat kejanggalan itu, Arief lalu mendatangi lokasi parkir panser-panser marinir. Di tempat ini pun tak seorang marinir ditemukan. Karena

khawatir, Arief lalu memerintahkan marinir di Surabaya datang di Jakarta.

Pasukan yang tiba di Halim Perdanakusuma ditempatkan di Cilandak. Dari markas marinir di Jakarta tersebut, pasukan disebar. "*Pasukan tiba sebelum Jenderal Wiranto ke Malang,*" ujar Ester menirukan penjelasan Arief.

Q. KESAKSIAN RELAWAN PENDAMPING KORBAN KERUSUHAN 13-14 MEI 1998

Di bawah ini adalah kesaksian dari para relawan yang mendampingi korban Kerusuhan 13-14 Mei 1998, disarikan dari buku yang disusun oleh Dewi Anggraeni berjudul Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan terbitan Kompas Gramedia.

Ketika isu kekerasan seksual [saat Kerusuhan 13-14 Mei 1998] diangkat dalam salah satu pertemuan dengan Presiden BJ Habibie, Habibie menyatakan keraguan terhadap cerita tersebut karena gambaran yang beredar memang sulit dipercaya: sejumlah perempuan diperkosa ramai-ramai di Jalan Thamrin atau jalan besar lain, sambil ditonton orang ramai sekalipun peristiwa dimaksud memang terjadi. Habibie juga mengatakan bahwa apa yang terjadi tidak berbeda dari apa yang terjadi di Tiananmen Square di RRC pada tahun 1989 sehingga dia menolak meminta maaf dengan mengatakan: “*Jangan lupa, saya baru 53 hari menjadi presiden. Banyak persoalan penting lain, terutama persoalan ekonomi, yang harus saya tangani.*” Dokumentasi data pun dikeluarkan, ditunjukan, lalu dibacakan. Presiden mendengarkan dengan penuh perhatian, peristiwa demi peristiwa disebutkan dan dpaparkan satu per satu di berbagai tempat di ibukota. Tiba-tiba wajah Habibie berubah dan dia berkata (hal. 8-10): “*Saya ingat sekarang. Seorang keponakan saya, seorang dokter, pernah*

menceritakan hal serupa. Saya percaya anda sekalian. Keponakan saya tidak akan berbohong kepada saya.” Lalu menambahkan bahwa dia bersedia meminta maaf atas nama pemerintah.

Sintong Panjaitan, ajudan BJ Habibie saat itu yang juga merupakan bagian dari anggota klik Benny Moerdani terkejut. Dia menolah, lalu menyela, “*Pak, apakah tidak sebaiknya hal ini dibahas dulu dengan kabinet?*” Habibie menoleh dan mengatakan: “*Can’t I have my own opinion?*” lalu tambahnya, “*Saya kebetulan setuju dengan pendapat ibu-ibu tokoh masyarakat ini.*” Saat itu Sintong Panjaitan tampak menggerakan bibirnya seolah-olah hendak mengatakan sesuatu, lalu beringsut agak gelisah di tempat duduknya. Pada tanggal 15 Juli 1998, BJ Habibie memenuhi janjinya dan menyatakan permintaan maafnya di depan berbagai tim media televisi nasional dan internasional (hal. 11 s.d. hal 15).

Temuan dari tim relawan yang kemudian diangkat oleh Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan 13-14 Mei 1998 ke dalam laporannya antara lain: sampai 3 Juli 1998, total korban dan perkosaan dan pelecehan seksual massal yang melapor atau dilaporkan sebanyak 168 korban, 20 di antaranya meninggal. Yang masih hidup kebanyakan menderita luka-luka fisik dan trauma psikologis yang dalam. 152 dari 168 korban ini adalah dari serangan yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya. 16 lainnya di Medan, Palembang dan Solo (halaman 154). Jumlah korban sesungguhnya masih jauh lebih banyak lagi, hal ini mengingat tidak semua korban terjangkau oleh para aktivis dan anggota relawan karena banyak korban dan keluarganya yang mengundurkan diri sama sekali dari kontak dengan dunia luar. Banyak korban juga mendengar sendiri dari pelaku pemerkosaan bahwa mereka diperkosa karena mereka “Tionghoa”, mereka secara intuitif tahu untuk tidak mengharapkan simpati dari masyarakat

luas, karena sebagai perempuan "Tionghoa" mereka merasa tidak layak mendapatkan simpati orang lain (halaman 166).

Tim relawan juga menemukan pola kerusuhan dan perusakan yang muncul ke permukaan:

Pertama, ada upaya pengkondisian massa. Massa diberi arahan untuk berkumpul di lokasi yang akan menjadi sasaran perusakan, penjarahan dan pembakaran. Isu disebarkan bahwa akan ada aksi-aksi ini di lokasi-lokasi tertentu. Isu lalu menyebar, melalui telepon maupun dari orang per orang atau melalui sopir-sopir angkutan. Lalu ada sekelompok orang yang membawa kayu, ban-ban bekas atau benda-benda lain disertai semacam tuduhan dan ajakan.

Pada hari yang disebutkan, datang sekelompok orang yang mengajak dan memimpin atau mengarahkan massa agar melakukan perusakan, penjarahan dan pembakaran. Dengan meneriakan yel-yel yang menggugah kemarahan terhadap warga Tionghoa Menariknya, massa pada umumnya berasal dari daerah-daerah sekitar lokasi peristiwa, sementara para pengajak perusakan dan pembakaran tidak dikenal atau diketahui asal-usulnya oleh warga setempat. Yang jelas, mereka bukan dari daerah di sekitar lokasi. Adapun deskripsi para pengajak/pengarah/pimpinan penjarahan menurut laporan saksi mata sangat konsisten (hal. 156 – 158):

- kelompok pemuda yang memakai pakaian pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau pakaian yang biasa dikenakan mahasiswa – jaket dengan warna-warna tertentu;

- kelompok anak-anak remaja berpakaian lusuh dan berwajah tanpa emosi atau dingin, sangar;

- kelompok pemuda kekar, berambut cepak, bersepatu bot militer;

- kelompok pemuda berbadan kekar, berwajah dingin, sangar dan bertato.

Salah satu pengakuan dari perwira angkatan darat bahwa kerusuhan selalu dimulai dari datangnya "pelopor" berjumlah kurang lebih tujuh orang dengan mengendarai truk membawa gerombolan massa yang terorganisir dan beringas, kemudian mengajak masyarakat sekitar gedung yang menjadi sasaran untuk menyerbu, menjarah dan membakar juga datang dari perwira intelijen Brigjend (Purn) Slamet Singgih dalam memoarnya, Intelijen, Catatan Harian Seorang Serdadu, halaman 13. Slamet Singgih juga mengatakan bahwa salah satu pelopor pembakaran Bintaro Plaza yang tertangkap memakai cincin yang terbut dari batok kelapa dan mengaku berasal dari Jawa Tengah dan telah diserahkan kepada Kodim Jakarta Selatan untuk diusut, namun sampai sekarang tidak ada kelanjutan dari kasus tersebut. Pada halaman 15 Memoarnya, Slamet Singgih mengatakan:

"*...Kerusuhan yang banyak memakan korban itu tetap berlangsung, seolah-olah terjadi 'pembiaran' dan penanganannya sangat terlamat. Saya mempunyai perasaan, jangan-jangan hal tersebut merupakan suatu rekayasa dengan tujuan tertentu hingga sekarang masih belum dapat diketahui penyebabnya mengapa mereka tidak bertindak. Saya bisa mereka-reka. Pasukan ABRI baru digerakan pada tanggal 15 Mei 1998 untuk melakukan pengamanan, yang menurut saya setelah tidak ada lagi sasaran yang bisa dijarah maupun dibakar*."

Tudingan bahwa Wiranto sengaja tidak memadamkan Kerusuhan 13-14 Mei 1998 juga datang dari koleganya: Letnan Jenderal (Purnawirawan) Sintong Panjaitan, yang dalam memoir berjudul Perjalanan Prajurit Para Komando halaman 3 – 4 menuduh bahwa Wiranto membiarkan kerusuhan rasial itu karena ingin dipilih lagi menjadi Menteri Pertahanan/Panglima TNI untuk rezim pasca Soeharto.

Selama kerusuhan warga etnis Tionghoa didatangi dan diperas, dengan ancaman kalau tidak membayar sejumlah uang-dari Rp. 2 juta sampai Rp. 80 juta-kepada para pendatang ini, kediaman dan properti mereka akan dirusak dan dibakar. Yang "luput" dari perusakan, penjarahan dan pembakaran, didatangi dan diancam, kalau tidak membayar akan mengalami musibah yang sama dengan para korban (halaman 156).

Memang salah satu tujuan para pelakunya [Benny Moerdani, dan CSIS] menjadikan Tionghoa sebagai sasaran adalah berdasarkan asumsi bahwa mereka tidak akan berani berbicara – jangankan meminta bantuan, perekayasa mengira mereka aman dari hukuman, baik hukuman pengadilan maupun hukuman stigma masyarakat. Perekayasa percaya bahwa stigma yang sudah menempel pada kelompok etnis Tionghoa akan terus memisahkan mereka dari masyarakat luas, sehingga apa pun musibah yang menimpa mereka akan dianggap tidak ada kaitannya dengan mereka yang di luar kelompok itu, alias masyarakat luas (halaman 171-172).

Seperti dapat diduga, bahwa dalam memperjuangkan kebenaran dengan mengungkap pemerkosaan yang terjadi pada periode Kerusuhan 13-14 Mei 1998 sampai berminggu-minggu setelahnya (yang tidak banyak diliput media massa), pada relawan menerima berbagai teror dan intimidasi, seperti yang menimpa seorang dokter bernama Lie Dharmawan ketika dia

menerima telepon dari penelpon berbeda-beda dengan gaya ancaman berbeda-beda pula:

"*Eh, lo udah pulang dengan selamet, ya? Untung juga lo*!"

"*Eh, anak lo yang sulung tuh, suruh dia masuk akademi militer aja. Nanti kalo 'dah jadi letnan, lumayan bisa lindungin elo*!"

"*Eh, nama saya X. Saya ini membawahi ribuan preman. Nanti saya kirim beberapa preman saya bawa cenderamata untuk kamu. Kamu dengar kan, Romo Sandyawan juga dikirimi cenderamata. Kebetulan tidak meledak, ya? Untung juga dia.*"

Puncaknya adalah pembunuhan yang menimpa Martadinata Haryono alias Ita Martadinata, seorang siswi sekolah menengah atas berusia 18 tahun, dan korban perkosaan yang berhasil merajut kembali jati dirinya untuk bergabung dengan Tim Relawan untuk Kemanusiaan untuk membantu para korban Kerusuhan 13-14 Mei 1998 yang mengalami gangguan jiwa lebih parah. Sebelum terbunuh, Ita Martadinata sudah diagendakan memberikan kesaksian di hadapan beberapa kelompok internasional pembela hak asasi manusia di Amerika Serikat, berangkat bersama rombongan Karlina Supelli. Begitu tersiar kabar mengenai rencana keberangkatan ini, ancaman terhadap aktivis dan relawan semakin gencar agar mengurungkan niat mereka membantu pengusutan peristiwa Mei 1998. Akhirnya tanggal 9 Oktober 1998, Ita Martadinata yang sudah siap berangkat kedapatan tewas dalam kondisi mengerikan. Dr. Mun'im Idris dikutip Antara, mengatakan bahwa kepala korban hampir putus terpotong pada lehernya. Terdapat sepuluh bekas tikaman pada perut, dada dan lengan kanannya (halaman 129-130).

Selain Sintong Panjaitan, klik Benny Moerdani yang juga berusaha mengubur kasus pemerkosaan pada Kerusuhan 13-14 Mei 1998 dari terungkap sepenuhnya ke permukaan adalah Jenderal Wiranto, Pangab saat itu dan Mayjend Noegroho Djajoesman. Sebagai contoh, Smita Notosusanto dalam pertemuan tokoh yang melobi pendirian Komnas Perempuan di Bina Graha dengan BJ Habibie pernah mengambil kesempatan mendekati Jenderal Wirano supaya diberi waktu menyampaikan keprihatinan para aktivis hak asasi perempuan bahwa penyerangan fisik terhadap perempuan masih terus terjadi, terutama di taksi-taksi. Tanggapan Jenderal Wiranto hanya mengulang pernyataannya di televisi, bahwa semua hanya dugaan semata, tidak ada buktinya. Sementara Nugroho Djajoesman secara prematur karena tanpa penyelidikan memadai mengatakan bahwa kasus pembunuhan Ita Martadinata hanya perampokan biasa tanpa unsur politik, dan bahwa Ita adalah seorang pemakai narkoba (hal. 126 dan 131).

Human Rights Watch di Asia pimpinan Sidney Jones yang dananya ditunggu oleh Hendardi untuk “melakukan gerakan” sebagaimana dinyatakan dalam *e-mail* yang ditemukan di lokasi bom Tanah Tinggi, berusaha mendiskriditkan temuan atau laporan tim relawan di tingkat internasional supaya kejadian tersebut tidak diakui atau tidak dianggap kredibel oleh negara-negara lain, antara lain dengan mengatakan tidak percaya ada pemerkosaan karena “*tidak ada bukti dan tidak ada saksi*” sehingga Sidney Jones meminta bertemu dengan korban-korban pemerkosaan, sebuah permintaan yang tidak mungkin dikabulkan oleh para korban pemerkosaan maupun para relawan karena sama saja artinya membuka identitas mereka ke publik dan “memperkosa” mereka untuk kedua kalinya. Menanggapi permintaan Sidney Jones yang tidak menunjukan kepekaan tersebut, Palupi dari tim relawan mengatakan:

“*Bayangkan seandainya ibu kamu, kakak kamu, adik kamu, adalah salah seorang korban perkosaan, apa kamu mau mereka muncul ke publik? Kredibilitas? Kredibilitas yang kami pentingkan bukan kredibilitas kalian, tapi kredibilitas para korban. Kepercayaan korban pada kami.*.”

Sesudah terbunuhnya Ita Martadinata, Romo Sandyawan menyampaikan kepada Palupi bahwa Sidney Jones minta maaf setelah melihat dan sadar apa yang bisa terjadi pada korban atau pendamping yang tampilkan diri.

(halaman 71-73).

Terlepas permintaan maaf tersebut, namun perekayasa [Benny Moerdani dan CSIS], dalam menghindari keadilan hukum, dengan sengaja atau tidak, juga berhasil mendapatkan dukungan sebagian penguasa yang terus menyangkal bahwa perkosaan terjadi. Menariknya, mereka tidak menyangkal bahwa perusakan terjadi. Rupanya merusak barang dan properti milik kelompok yang menyandang stigma sosial yang direkayasa secara politik, tidak terlalu memalukan tetapi memperkosa beramai-ramai setidaknya memalukan dan merusak citra bangsa. Karena itu agaknya ada harapan bahwa seluruh masyarakat luas turut menyangkalnya dan kalaupun ada yang tidak menyangkalnya, setidaknya mempertahankan narasi yang membatasi aksi perkosaan ini dalam bingkat etnis Tionghoa (halaman 172 – 173).

Jusuf Kalla, wakil presiden terpilih periode 2014-2019 yang juga “kuda pacu” terbaru CSIS dalam menguasai Indonesia dalam buku Mereka Berbicara Sjafrie Sjamsoedin terbitan Kompas-Gramedia mengulangi narasi usang bahwa Kerusuhan 13-14 Mei 1998 tidak lain adalah kejadian

spontan dari masyarakat setempat karena lapar dan persoalan ekonomi. Laporan Tim Relawan untuk Kemanusiaan menghancurkan pandangan ini:

"*Bagaimana 'kebetulan' harus dijelaskan oleh fakta keluasan lingkup kejadian di wilayah seluas Jakarta dan sekitarnya? Bagaimana sang 'kebetulan' itu harus dijelaskan oleh kesamaan waktu dari banyak peristiwa perusakan, penjarahan dan pembakaran di wilayah seluas Jakarta dan sekitarnya? Bagaimana si 'kebetulan' itu harus dijelaskan oleh berbagai kesamaan 'awal peristiwa' perusakan, penjarahan dan pembakaran? (misalnya: pengajak dan pemimpin perusakan tidak datang dari daerah warga setempat; modus kedatangan pengajak dan pemimpin perusakaan dengan kendaraan; tidak ada peristiwa perusakan yang dimulai oleh warga setempat). Dan bagaimana si 'kebetulan' itu harus dijelaskan oleh kesamaan pola janggal berikut: bahwa para pengajak dan pemimpin perusakan/pembakaran tidak ikut menjarah. Bahkan dalam banyak kasus, para pengajak dan pemimpin segera meninggalkan massa yang mulai bergerak untuk merusak dan menjarah.*"

(halaman 158-159)

R. IMF CIPTAKAN KONDISI UNTUK MENURUNKAN PRESIDEN SOEHARTO

8 Juni 1921, hari ini tepat kelahiran Presiden Soeharto. Presiden kedua Indonesia ini memimpin selama 32 tahun. Nyaris akan menjadi presiden seumur hidup jika tak ada arus reformasi yang dipicu oleh krisis ekonomi.

Namun siapa sangka ternyata krisis itu sengaja diciptakan oleh Amerika Serikat dan International Monetary Fund (IMF). Tujuannya untuk membuat Indonesia bergolak dan membuat Soeharto jatuh.

Krisis ekonomi yang disusul krisis politik mengakibatkan pelarian modal ke luar Indonesia secara masif, hingga menyebabkan anjloknya nilai rupiah sampai mencapai Rp 17.000,- per dolar. Rupiah yang lemah membuat pebisnis kolaps karena tidak dapat lagi mengelola utang luar negerinya.

Pendapat ini antara lain dikemukakan Prof Steve Hanke, penasehat ekonomi Soeharto dan ahli masalah Dewan Mata Uang atau Currency Board System (CBS) dari Amerika Serikat. Menurut ahli ekonomi dari John Hopkins University itu, Amerika Serikat dan IMF-lah yang menciptakan krisis untuk mendorong kejatuhan Soeharto.

Hal ini dibuktikan dari pengakuan Direktur Pelaksana IMF Michael Camdessus sendiri. Camdessus mengakui IMF berada di balik krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

"*Kami menciptakan kondisi krisis yang memaksa Presiden Soeharto turun,*" aku Camdessus saat diwawancarai The New York Times dan dikutip Kantor Antara dalam artikel IMF di Balik Kejatuhan Soeharto? Di tengah krisis ekonomi yang memburuk, Soeharto terpaksa menandatangani 'letter of intent' dengan IMF di kediaman Cendana, pada 15 Januari 1998. Sepintas IMF seperti membantu, tapi kenyataannya sebaliknya. Bantuan dengan sejumlah syarat itu malah sangat merugikan perekonomian Indonesia.

Hanya beberapa pekan kemudian, tanda tangan itu terbukti membelenggu Soeharto sendiri. Mencoba lepas dari tekanan IMF, Presiden mencari 'jalan lain' yang tidak disukai lembaga donor internasional itu.

Pada akhir Januari 1998, Presiden menerima Steve Hanke yang menawarkan proposal Currency Board System (CBS) atau Dewan Mata Uang. Dengan CBS, rupiah akan dipatok pada 5.500 per dolar. Soeharto tertarik dan hampir memberlakukan CBS. Dia sudah menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang CBS.

Namun, IMF marah. Mereka menilai hal ini merugikan rencana mereka di Indonesia. Koran The Washington Post mengabarkan bocornya surat pribadi Michel Camdessus kepada Soeharto tertanggal 11 Februari 1998. Surat itu berisikan ancaman bahwa IMF akan menangguhkan pinjaman sebesar 43 miliar dolar AS jika tidak ada kejelasan mengenai masa depan reformasi sesuai LoI yang telah diteken 15 Januari. Ancaman tersebut manjur. CBS akhirnya dibatalkan menyusul tekanan Barat yang keras.

Menurut Steve Hanke, serangan terhadap gagasan CBS dan dirinya sebagai penasehat ekonomi presiden dilancarkan begitu keji. Pelaksanaan CBS Indonesia ditentang habis-habisan. Akan tetapi Argentina, yang juga pasien IMF, dibolehkan. Begitu pula kontrol devisa, yang digelar begitu mulus di Chili, ternyata diharamkan di Indonesia. Padahal, kata Steve Hanke, kalau saja Indonesia kala itu diizinkan memakai CBS atau bahkan kontrol devisa, "*Perekonomian Indonesia mungkin bisa selamat*." Berkali-kali Hanke mengingatkan Soeharto agar tidak mempercayai IMF, karena IMF sangat khawatir CBS bakal sukses diterapkan di Indonesia.

"*Washington punya kepentingan agar krisis berlangsung terus sehingga Anda jatuh*" kata Hanke kepada Soeharto.

Seiring dengan berjalannya waktu, Hanke kemudian mendapat jawaban lebih jelas mengapa idenya tentang CBS dibantai habis-habisan, padahal di negara lain bisa jalan dengan baik.

Merton Miller, seorang penerima Hadiah Nobel untuk Ilmu Ekonomi, mengatakan bahwa penolakan pemerintah Clinton dan IMF terhadap CBS "*Bukan karena itu tidak akan jalan tapi justru kalau itu jalan maka Soeharto akan terus berkuasa*".

Pendapat sama, lanjut Hanke, dikemukakan mantan PM Australia Paul Keating. Keating mengatakan "*AS tampak dengan sengaja menggunakan ambruknya ekonomi sebagai alat untuk menggusur Soeharto*".

Menurut para ekonom, masuknya IMF ke Indonesia seperti membawa kunci pembuka bagi gudang harta terpendam, yakni pasar Indonesia yang luar biasa dahsyat.

Ini terbukti, setelah IMF menjadi 'dokter' perekonomian Indonesia, perusahaan asing begitu leluasa berbisnis di negeri ini. Di setiap pojok kota, kini begitu banyak kantor cabang bank asing, restoran asing, perusahaan multinasional dan barang produk luar negeri.

Indonesia baru bebas dari utang IMF di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut SBY, sejak tahun 2006, Indonesia bisa bernapas lega terbebas dari utang IMF.

"*Keseluruhan utang Indonesia terhadap IMF adalah USD 9,1 miliar, jika dengan nilai tukar sekarang setara dengan Rp 117 triliun, dan pembayaran terakhirnya kita lunasi pada tahun 2006, atau 4 tahun lebih cepat dari jadwal yang ada. Sejak itu kita tidak lagi jadi pasien IMF*," kata SBY beberapa waktu lalu.

S. CIA DAN AMERIKA MENDANAI KERUSUHAN-KERUSUHAN 1998

UNREST IN INDONESIA: THE OPPOSITION; U.S. Has Spent $26 Million Since '95 on Suharto Opponents

WASHINGTON, May 19— While trying to shore up President Suharto, the Clinton Administration has also been giving support to some of the most important Indonesian opposition groups, hoping to promote a transition to a democratic society.

The money has come from the United States Agency for International Development, better known for building dams and roads than creating bridges to political opponents of authoritarian leaders.

The sum, $26 million since 1995, is relatively small among United States foreign-aid programs. But it has been important to the survival of groups that support human rights and free speech in Indonesia.

The money from A.I.D. is the largest source of support for groups like the Indonesia Legal Aid Society, headed by Adnan Buyung Nasution, a leading figure in the Indonesian democracy movement and the nation's best-known civil rights lawyer. The group is giving free legal counsel to

political figures and students arrested by the Government in the current crisis, the type of role that the society has played for years.

The United States agency has helped Indonesian rights advocates "monitor human-rights issues, mobilize public opinion and monitor extralegal activities, corruption and abuse of the poor" by the Suharto Government, said Sharon Cromer, deputy director of the A.I.D. mission in Indonesia.

The support has helped insure the survival of private groups that are emerging as leaders of the opposition in Indonesia, "despite their being constrained by the authoritarian system," Ms. Cromer said.

A.I.D. has supported 30 nongovernmental organizations in Indonesia, agency officials said. The organizations include an environmental group that is fighting a large American mining company on behalf of people who live near the company's projects; a coalition of journalists whose work was banned by the Indonesian Government, a women's rights group and a consumers' rights foundation.

"A.I.D. is the largest financial supporter to and the most active donor in this controversial sector," the agency told Congress in a recent budget request.

Peter Galbraith, a former senior counsel to A.I.D., said: "The idea was to send a message that the United States was concerned about something other than the banks and the economic issues, that we thought about the ordinary people of Indonesia, and to prepare for a possible transition from Suharto to what we hope will be a more democratic and stable system."

William Little, a professor of Indonesia studies at Ohio University and a former A.I.D. consultant, said the program had been a success.

"A democracy requires a civil society," Professor Little said. "Indonesia has been like the Soviet Union. The Government controls most civil society organizations. It creates them or determines who their leaders are. The point of the program was to try to develop these groups. The groups are now leading figures in the opposition."

In the last five years, programs like the one in Indonesia have been created by the director of the agency, J. Brian Atwood, in more than 25 missions around the world in nations including Guatemala, Kenya, South Africa and the Philippines.

But the Indonesian program has come under fire from some supporters of the present Jakarta Government, including Freeport-McMoran Copper and Gold of New Orleans, the largest single foreign investor in Indonesia. Freeport-McMoran argues that the United States should not support Walhi, an Indonesian environmental and human-rights group that has attacked the company's projects as detrimental to Indonesians near Freeport mines. "Walhi's trying to shut us down," said a spokesman for the company, Garland Robinette. "That's their avowed intention."

Despite intense pressure from the company, the United States Ambassador in Indonesia, Stapleton Roy, stood by the program.

The idea behind such programs, according to Charles E. Costello, director of the Center for Democracy and Governance, an A.I.D. office founded in 1993, is that economic development alone cannot create a civil society.

"Democratic political systems and market economies should go together," Mr. Costello said.

Human-rights organizations fiercely critical of the United States' foreign policy in Indonesia say the program has been invaluable for the Indonesian groups, which are known as nongovernmental organizations, or N.G.O.'s.

The Asia director at Human Rights Watch, Sidney Jones, said the program gave the United States Embassy in Jakarta insights it might otherwise lack.

"It keeps the embassy in touch with all the N.G.O.'s," Ms. Jones said. "And of course that's useful. It also gives the N.G.O.'s a kind of protection." Correction: May 22, 1998, Friday An article on Wednesday about United States aid to Indonesian groups opposed to President Suharto misspelled the surname of a professor of political science who commented on the aid, and misstated his affiliation. He is William Liddle, not Little, and he teaches at Ohio State University, not Ohio University.

BAB X
CSIS DAN BONEKA BARUNYA

A. DALANG TEROR INDONESIA MENDUKUNG JOKOWI

"*...Kendati demikian, sebagai pengagum Jenderal Sudirman, sebagai seorang patriot, Moerdani juga tidak bisa tinggal diam ketika Soeharto sudah dipandangnya sebagai telah membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Dengan sikap itulah, saya duga, Moerdani bersedia hadir dalam sebuah diskusi terbatas Yayasan Pembangunan Pemuda Indonesia (YPPI) di rumah Fahmi Idris pada suatu malam pada paruh pertama 1991.*

Bersama Presiden Soeharto, Benny adalah Penasihat YPPI yang didirikan oleh para mantan tokoh demonstrasi 1966 dengan dukungan Ali Moertopo. Hadir di rumah Fahmi [Idris] pada malam itu para pemimpin demonstrasi 1966 seperti Cosmas Batubara, dr. Abdul Ghafur, Firdaus Wajdi, Suryadi [Ketua PDI yang menyerang Kubu Pro Mega tanggal 27 Juli 1996]; Sofjan Wanandi; Husni Thamrin dan sejumlah tokoh. Topik pembicaraan, situasi politik waktu itu...

Moerdani berbicara mengenai Soeharto yang menurut Menhankam itu, 'Sudah tua, bahkan sudah pikun, sehingga tidak bisa lagi mengambil keputusan yang baik. Karena itu sudah waktunya diganti'...Benny kemudian berbicara mengenai gerakan massa sebagai jalan untuk menurunkan Soeharto. Firdaus menanggapi, 'Kalau menggunakan massa, yang pertama dikejar adalah orang Cina dan kemudian kemudian gereja."

(Salim Said, Dari Gestapu Ke Reformasi, Penerbit Mizan, halaman 316)

Pembicaraan di rumah Fahmi Idris, tokoh senior Golkar yang menyeberang ke kubu Jokowi-JK demi melawan Prabowo adalah bukti paling kuat yang menghubungkan Benny Moerdani dengan berbagai kerusuhan massa yang sangat marak menjelang akhir Orde Baru karena membuka informasi adanya pemikiran Benny Moerdani untuk menjatuhkan Soeharto melalui gerakan massa yang berpotensi mengejar orang Cina dan orang Kristen. Kesaksian Salim Said ini merupakan titik tolak paling penting guna membongkar berbagai kerusuhan yang belum terungkap seperti Peristiwa 27 Juli 1996 dan Kerusuhan 13-14 Mei 1998.

Peristiwa 27 Juli 1996 Adalah Politik Dizalimi (Play Victim) Paling Keji Sepanjang Sejarah Indonesia

Selanjutnya Robert Odjahan Tambunan dalam bukunya Otobiografi Politik RO Tambunan: Membela Demokrasi mengungkap bahwa Megawati bisa mencegah jatuhnya korban dalam Peristiwa 27 Juli 1996 bila menghendaki karena dia sudah tahu beberapa hari sebelumnya dari Benny Moerdani, akan tetapi Megawati ternyata lebih memilih kepentingan politik daripada kemanusiaan (hal. 150); Megawati menyogok Kelompok 124, korban serbuan kantor PDI yang diadili, agar tidak menuntut kelompok TNI (hal. 172); dan Megawati tidak pernah ingin menyelesaikan kasus tersebut antara lain terbukti tahun 2002 memilih gubernur yang terlibat kasus Peristiwa 27 Juli 1996 [Sutiyoso] (hal. 374).

Bila catatan Salim Said, R.O. Tambunan dihubungkan dengan catatan Rachmawati Soekarnoputri: Membongkar Hubungan Mega dan Orba di Harian Rakyat Merdeka 31 Juli 2002 dan 1 Agustus 2002 maka terbukti

bahwa akhirnya Benny Moerdani mulai menjalankan rencana yang dia lontarkan di rumah Fahmi Idris ketika dia bersekongkol dengan Megawati demi menaikan seseorang dari keluarga Soekarno sebagai lawan tanding Soeharto dengan merekayasa Peristiwa 27 Juli 1996. Kutipan dari Catatan Rachmawati Soekarnoputri:

"*Sebelum mendekati Mega, kelompok Benny Moerdani mendekati saya [Rachmawati] terlebih dahulu. Mereka membujuk dan meminta saya tampil memimpin PDI. Permintaan orang dekat dan tangan kanan Soeharto itu jelas saya tolak, bagi saya, PDI itu cuma alat hegemoni Orde Baru yang dibentuk sendiri oleh Soeharto tahun 1973. Coba renungkan untuk apa jadi pemimpin boneka?*

Orang-orang PDI yang dekat dengan Benny Moerdani, seperti Soerjadi dan Aberson Marie Sihaloho pun ikut mengajak saya gabung ke PDI. Tetapi tetap saya tolak."

Dari ketiga catatan di atas kita menemukan nama-nama yang saling terkait dalam Peristiwa 27 Juli 1996, antara lain: Benny Moerdani; Megawati; Dr. Soerjadi; Sofjan Wanandi; dan Aberson Marie Sihaloho, dan ini adalah "eureka moment" yang membongkar persekongkolan jahat karena Aberson Marie adalah orang yang pertama kali menyebar pamflet bahwa Megawati calon pemimpin masa depan sehingga menimbulkan kecurigaan Mabes ABRI (modus Dokumen Ramadi sebelum Malari); sedangkan Dr. Soerjadi adalah Ketum PDI pengganti Megawati pasca Kongres Medan (atas biaya Sofjan Wanandi) yang menyerbu kantor PDI dan selama ini diasumsikan perpanjangan tangan Soeharto ternyata agen ganda didikan Benny Moerdani, dan tentu saja Agum Gumelar (mantan ajudan Ali Moertopo)-Abdullah Mahmud Hendropriyono (murid Benny Moerdani)

juga berada di sisi Megawati atas perintah Benny Moerdani sebagaimana ditulis oleh Jusuf Wanandi dari CSIS dalam memoarnya, Shades of Grey (versi Inggris)/Membuka Tabir Orde Baru (versi Bahasa Indonesia).

Fakta di atas menjawab alasan Presiden Megawati menolak menyelidiki Peristiwa 27 Juli 1996 sekalipun harus mengeluarkan kalimat pahit kepada para korban seperti "*Siapa suruh kalian mau ikut saya*?" dan malah memberi jabatan tinggi kepada SBY yang memimpin rapat Operasi Naga Merah; Sutiyoso komando lapangan penyerbuan Operasi Naga Merah; dan tidak lupa Agum Gumelar dan AM Hendropriyono yang pura-pura melawan koleganya. Sama saja Megawati bunuh diri bila dia sampai menyelidiki kejahatannya sendiri!

Kenyataan bahwa pihak penyerbu markas PDI yang dijaga oleh massa pro-Megawati dan PRD ternyata bersekongkol dengan Megawati semakin diperkuat bila kita menyimak pernyataan Bambang Beathor Suryadi, aktivis PDIP yang dekat dengan almarhum Taufik Kiemas dan pada masa pemerintahan Jokowi-JK bekerja sebagai Direktur Kepala Staf Kepresidenan sebagaimana dikutip dari website Rakyat Merdeka Online berjudul "Beathor: Sutiyoso, Pahlawan Reformasi," tanggal 12 Juni 2015 sebagai berikut:

"*Di dalam sebuah rapat, Sutiyoso dengan tegas mengatakan dirinya siap pasang badan dan bertanggung jawab demi mengakhiri kekuasaan Soeharto…Sampai akhirnya terjadi perpecahan di tubuh PDI yang semakin melambungkan nama Megawati sebagai ikon penantang Soeharto. Ini juga sebabnya Sutiyoso selalu mendapat posisi strategis setiap kali PDIP berkuasa. Saat Mega menjadi Presiden RI, Sutiyoso dipercaya menjadi Gubernur DKI. Sekarang menjadi Kepala BIN. Melihat*

perannya dalam kronik reformasi, saya kira Sutiyoso pantas disebut sebagai pahlawan reformasi, juga pantas dipercaya menjadi Kepala BIN."

Dalam sebuah acara televisi swasta tahun 2008, mantan Ketua PDI Soerjadi ternyata mengakui bahwa penyerbuan kantor PDI pada 27 Juli 1996 tersebut sebenarnya adalah rekayasa dari Megawati Soekarnoputri sendiri. Menurut Soerjadi, kenyataan bahwa angkatan bersenjata tidak melakukan tindakan perlindungan adalah bukti telah terjadi semacam "*tau-sama-tau*." Dia mengatakan: "*Buktinya orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu diangkat sebagai pejabat dalam masa pemerintahan Megawati. Sutiyoso (saat itu Pangdam Jaya) diberi jabatan sebagai Gubernur DKI*". Sementara Budiman Sujatmiko bertugas memprovokasi massa Pro-Megawati untuk mati-matian membela harga diri (kantor PDI) walaupun dengan taruhan nyawa. Maka terjadilah bentrok berdarah itu (Dian Andika Winda, Perang Sejarah Para Jenderal, halaman 96).

Fakta-fakta dan bukti-bukti di atas semakin membuktikan bahwa dokumen yang ditemukan pasca ledakan di Tanah Tinggi tanggal 18 Januari 1998 yang berisi informasi rencana revolusi dari Benny Moerdani; Megawati; CSIS dan Sofjan-Jusuf Wanandi membiayai gerakan PRD adalah dokumen asli dan otentik serta bukan buatan intelijen untuk mendiskriditkan PRD sebagaimana pembelaan mereka selama ini. Bunyi salah satu dokumen yang berupa email di laptop adalah:

"*Kawan-kawan yang baik! Dana yang diurus oleh Hendardi belum diterima, sehingga kita belum bisa bergerak. Kemarin saya dapat berita dari Alex bahwa Sofjan Wanandi dari Prasetya Mulya akan membantu kita dalam dana, di samping itu bantuan moril dari luar negeri akan diurus oleh Jusuf Wanandi dari CSIS. Jadi kita tidak perlu tergantung kepada*

dana yang diurus oleh Hendardi untuk gerakan kita selanjutnya."

(Majalah Gatra edisi 31 Januari 1998)

Apalagi pernyataan "Dewa" tersebut sudah dibenarkan oleh anggota PRD bahwa anak buah Sofjan Wanandi pernah menelpon mereka dan menawarkan bantuan dana sebesar US$ 15,000 yang sudah diambil sebagian sebelum bom meledak (Manuver Politik: Sofjan Wanandi & CSIS, Forum Komunikasi Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Indonesia, 1998, hal. 21; Gatra edisi 7 Februari 1998).

Patut dicatat juga bahwa dalam salah satu debat terbukanya dengan Budiman Sudjatmiko yang terjadi pada tanggal 3 Juli 2015, Andi Arief sudah mengakui bahwa ledakan bom tanah tinggi adalah pekerjaan PRD dan bukan rekayasa intelijen Orde Baru sebagaimana pembelaan anggota-anggota PRD dan aktivis-aktivis 1998 saat itu.

http://www.merdeka.com/politik/budiman-sudjatmiko-andi-arief-perang-di-twitter.html

Kerusuhan 13-14 Mei 1998, Gerakan Benny Moerdani Menggulung Soeharto; Prabowo; dan Menaikan Megawati Soekarnoputri Ke Kursi Presiden.

Pernah dengar kisah Kapten Prabowo melawan usaha kelompok Benny Moerdani dan CSIS mendeislamisasi Indonesia? Kisah ini fakta dan sudah banyak buku sejarah yang membahas kisah-kisah saat itu, salah satunya cerita Kopassus masa kepanglimaan Benny. Saat Benny menginspeksi ruang kerja bawahan dia melihat sajadah di kursi dan bertanya "*Apa ini*?,"

jawab sang perwira, "*Sajadah untuk shalat, Komandan*." Benny membentak "*TNI tidak mengenal ini*." Benny juga sering rapat staf saat menjelang ibadah Jumat sehingga menyulitkan perwira yang mau sholat.

Hartono Mardjono sebagaimana dikutip Republika tanggal 3 Januari 1997 mengatakan bahwa rekrutan perwira Kopassus sangat diskriminatif terhadap yang beragama Islam, misalnya kalau direkrut 20 orang, 18 di antaranya adalah perwira beragama non Islam dan dua dari Islam. Penelitian Salim Said juga menemukan hal yang sama bahwa perwira yang menonjol keislamannya, misalnya mengirim anak ke pesantren kilat pada masa libur atau sering hadiri pengajian diperlakukan diskriminatif dan tidak mendapat kesempatan sekolah karena dianggap fanatik, singkat kata karirnya pasti suram.

Perhatikan perwira tinggi yang menduduki pos penting ketika Benny Moerdani berkuasa: Sintong Panjaitan; Try Sutrisno; Wiranto; TB Silalahi; TB Hasanuddin; R.S. Warouw; Albert Paruntu; AM Hendropriyono; Agum Gumelar; Sutiyoso; Susilo Bambang Yudhoyono; Luhut Panjaitan; Ryamizard Ryacudu; Jonny Lumintang; Tyasno Sudarto; Albert Inkiriwang; HBL Mantiri; Fachrul Razi; Adolf Rajagukguk; Theo Syafei; Soebagyo HS dll, maka terlihat pola tidak terbantahkan bahwa perwira tinggi pada masa kekuasaan Benny Moerdani adalah non Islam atau Islam abangan ("non-fanatik" atau "non-Islam santri" menurut versi Benny). Ketidakadilan inilah yang dilawan Prabowo antara lain bersama BJ Habibie membentuk ICMI yang sempat dilawan habis-habisan oleh kelompok Benny Moerdani. Tidak heran anggota kelompok Benny Moerdani yang masih tersisa membenci Prabowo karena dia menghancurkan cita-cita mendeislamisasi Indonesia.

Kebencian CSIS kepada ICMI dan Islam adalah titik singularitas di mana mereka akhirnya serius bergerak untuk menjatuhkan kekuasan Presiden Soeharto. Hal ini dijelaskan oleh Todung Mulya Lubis dalam buku Sofjan Wanandi, Aktivis Sejati, halaman 393-394 di bawah ini:

"*Bersamaan pada waktu itu muncul pula gejala sektarianisme yang antara lain terlihat ketika Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) terbentuk. Pada waktu itulah Gus Dur, Marsilam Simanjuntak, Rachman Tolleng, Bondan Gunawan, Daniel Dakidae dan banyak lagi berkumpul merumuskan penolakan terhadap otoriterisme dan sektarianisme. Forum Demokrasi adalah awal dari perlawanan politik.*

Di sini kami juga mulai bersinggungan dengan CSIS dan kelompok Katolik yang juga ikut dalam pendirian Forum Demokrasi. Perlu diketahui bahwa salah satu wakil ketua Forum Demokrasi yang mendampingi Gus Dur adalah Alfons Taryadi dari harian Kompas, yang saya percaya bukanlah representasi dari CSIS. Tetapi pada waktu-waktu itu kontak dengan CSIS mulai terbuka.

Perlu dicatat bahwa di awal tahun 1990-an pamor CSIS mulai redup antara lain karena terjadinya perubahan peta kekuasaan Orde Baru. Meninggalnya Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani, serta tersingkirnya Benny Moerdani, membuat CSIS sedikit agak gamang menghadapi perubahan. Kekhawatiran CSIS akan bahaya sektarianisme membuat orang-orang Katolik melihat Gus Dur sebagai sosok yang menjadi alternatif.

Di sinilah titik temu itu terjadi, "a marriage of convenience". Dari situ pertemuan tercipta dan pada satu kali saya ikut menghadiri acara di

gedung CSIS untuk pertama kali, dan ini membuat media agak heboh karena tiba-tiba saya mampir di gedung CSIS. Saya masih ingat berita yang dimuat di Majalah Tempo yang mencatat dengan jeli peristiwa kedatangan saya dan beberapa aktivis lainnya ke gedung CSIS. Dari situlah saya mulai berdialog, terlibat dan mengenal kelompok CSIS sampai pada satu ketika saya diajak untuk bergabung menjadi anggota Dewan Pembina di CSIS."

Mengapa Benny Moerdani dan CSIS mau mendeislamisasi Indonesia? Hal ini dikarenakan CSIS didirikan oleh agen CIA bernama Pater Beek yang awalnya ditempatkan di Indonesia untuk melawan komunis namun setelah "Bahaya Merah" (komunis) teratasi, dia membuat analisa bahwa lawan Amerika Serikat berikutnya ada dua yaitu: "Hijau ABRI" dan "Hijau Islam," lalu menyimpulkan ABRI bisa dimanfaatkan untuk melawan Islam, maka berdirilah CSIS yang dioperasikan oleh anak didiknya: Sofjan, Jusuf Wanandi, Harry Tjan, dan mewakili ABRI: Ali Moertopo, dan Soedjono Hoemardani (lihat: tulisan George Junus Aditjondro, mantan murid Pater Beek: CSIS, Pater Beek SJ, Ali Moertopo dan LB Moerdani).

Sejalan dengan ini, Drs. H.M. Cholil Badawi dalam buku Mereka Tentang Sjafrie terbitan Red & White Publishing menulis:

"*Dalam suasana seperti itu, saya diberi informasi yang sangat penting bahwa kekuatan di tubuh Golkar yang menguasai politik di Indonesia secara mutlak itu, hakikatnya menjadi kuda tunggangan tokoh-tokoh Katholik, di antaranya Jenderal LB. Moerdani, yang menungganginya sebagai kendaraan menuju RI-II alias wakil presiden. Ambisi Benny Moerdani itu bahkan sudah mendapat dukungan dari DJ. Naro, Ketua Umum PPP. Diketahui pula untuk meraih ambisinya ini, Benny Moerdani*

bahkan siap berpindah agama. Tapi belakangan dengan melakukan re-check ke sekitar orang dekat Naro, rupanya informasi ini mengandung kebenaran."

Tidak percaya gerakan anti Prabowo di kubu Golkar-PDIP-Hanura-NasDem-Demokrat berhubungan dengan kelompok anti Islam dan impian Benny Moerdani untuk menjadi wakil presiden R.I. yang dihancurkan Prabowo? Perhatikan pendukung Jokowi-JK: Sutiyoso (Gubernur DKI saat Kerusuhan 13-14 Mei 1998); Agus Widjojo; Fachrul Razi (klik Wiranto dan pengusul Jonny Lumintang, orang Benny, Pangkostrad pengganti Prabowo), Ryamizard Ryacudu (menantu wapres Try Sutrisno periode 1993-1998, agen Benny Moerdani); Agum Gumelar (Ajudan Ali Moertopo)-Hendropriyono; Andi Widjajanto (anak Theo Syafei); Fahmi Idris (rumahnya lokasi ketika ide Peristiwa 27 Juli 1996 dan Kerusuhan 13-14 Mei 1998 pertama kali dilontarkan); Luhut Panjaitan; Tyasno Sudarto; Soebagyo HS (KSAD saat Kerusuhan 13-14 Mei 1998); Wiranto; TB Silalahi; TB Hasanuddin, Indra J. Pialang mantan peneliti CSIS dll.

Wiranto anak buah Benny Moerdani? Benar, dan Jusuf Wanandi dalam memoarnya menulis bahwa ketika Presiden Soeharto berhasil menetralisir pengaruh Try Soetrisno dengan menempatkan Feisal Tanjung dan Prabowo Subianto dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan klik Benny Moerdani, maka mereka menempatkan semua harapan kepada Wiranto. Selain itu setelah dilantik sebagai Panglima ABRI, diketahui Wiranto menghadap Benny Moerdani dan meminta bertemu setiap bulan. Tanggapan Benny menurut Jusuf Wanandi dan Salim Said adalah:

"*Jangan berilusi, orang tua itu [Soeharto] tidak menyukai saya, tidak percaya kepada saya. Anda harus tetap di sana karena Anda satu-satunya*

yang kita miliki. Jangan membuat kesalahan karena kariermu akan selesai jika Soeharto tahu Anda dekat dengan saya."

(Menyibak Tabir Orde Baru, hal. 365-366; Salim Said, hal. 320)

Wiranto memang membantah memiliki hubungan dekat dengan Benny, namun ada cara membuktikan Wiranto telah berbohong. Pertama, dalam memoarnya, Jusuf Wanandi bercerita pasca jatuhnya Soeharto, Wiranto menerima dari Benny daftar perwira yang dinilai sebagai "ABRI Hijau", dan dalam sebulan semua orang dalam daftar nama tersebut disingkirkan Wiranto. Ketika dikonfrontir mengenai hal ini, Wiranto mengatakan cerita "daftar nama" adalah bohong, namun bila kita lihat kembali masa-masa setelah Soeharto jatuh maka faktanya pada tanggal 4 Januari 1999, Wiranto melakukan mutase besar-besaran terhadap 100 perwira tinggi yang dianggap "hijau". Tindakan Wiranto ini sempat menuai protes.

Wiranto adalah orang Benny Moerdani di samping Presiden Soeharto menjawab alasan Wiranto menjatuhkan semua kesalahan terkait Operasi Setan Gundul kepada Prabowo; menghasut BJ Habibie bahwa Prabowo mau kudeta sehingga Prabowo diberhentikan dari dinas militer; dan adu domba Soeharto dengan menantunya seolah Prabowo dan BJ Habibie bekerja sama menjatuhkan Soeharto sehingga dipaksa bercerai dari Titiek Soeharto. Alasannya tidak lain Wiranto adalah eksekutor dari rencana Benny menistakan Prabowo Subianto.

Semua fakta ini diperkuat oleh temuan Notulen Rapat tertanggal 17 Juli 1998 yang ditandatangani oleh Pangab Jenderal Wiranto, KASAD Jenderal Subagio HS, Kasum Jenderal Fachrul Razi, Letjend Agum Gumelar dan Letjend Yusuf Kartanegara yang digelar di rumah Pangab Wiranto dan

pada tanggal 23 Juni 2014, aslinya telah diserahkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia oleh Eko Wardaya selaku Koordinator Umum Jaringan Mahasiswa Indonesia untuk Keadilan (Jamaika). Dari notulen rapat tersebut terungkap hal-hal penting berikut:

- Pucuk pimpinan ABRI memiliki pengetahuan perihal penculikan 13 (tiga belas) aktivis yang sampai hari ini masih hilang, yaitu di dalam kontrol Pangkoops Jaya.

- Pangab Jenderal Wiranto marah karena Pangkostrad Jenderal Prabowo Soebianto tanpa izin melepas Sembilan aktivis. Perbuatan ini dianggap Wiranto sebagai langkah subordinasi yang menyebabkan tuntutan reformasi sebagai membesar.

- Agum Gumelar berpendapat perlu kanalisasi agar tercipta dalang penculikan aktivis dan kerusuhan 13-14 Mei 1998 dengan memanfaatkan kepergian para jenderal ke Malang. Disepakati mereka akan mengarahkan Prabowo Soebianto sebagai pelaku utama dengan cara dibentuk Dewan Kehormatan Perwira tanpa Mahkamah Militer untuk memberhentikan Prabowo agar tercipta opini publik yang mengotori nama Prabowo.

- Terakhir Wiranto memerintahkan agar aktivis yang masih di bawah pengendalian Pangkoops Jaya agar "disukabumikan."

  Menurut sejarahwan Hermawan Sulistiyo dalam buku Palu Arit di Ladang Tebu, halaman 163, istilah "sukabumi," bermakna ganda. Suka bumi adalah nama kota peristirahatan di Jawa Barat. Sukabumi juga gabungan dari dua kata "suka" dan "bumi". Istilah "sukabumi" yang

> kedua pada saat operasi penganyangan Angkatan Darat terhadap PKI diartikan sebagai “membuat seseorang menyukai bumi.” Istilah ini merupakan penghalusan untuk tindakan pembunuhan, karena “pergi ke kota sukabumi,” juga berarti “beristirahat.”

Bicara “kebejatan” Prabowo tentu tidak lengkap tanpa mengungkit Kerusuhan 13-14 Mei 1998 yang ditudingkan pada dirinya padahal jelas-jelas Wiranto sebagai Panglima ABRI pergi ke Malang membawa Kasau, Kasal, Kasad dan Pangkostrad serta menolak permohonan Prabowo untuk mengerahkan pasukan demi mengusir perusuh. Berdasarkan temuan fakta di atas bahwa Benny Moerdani mau menjatuhkan Soeharto melalui kerusuhan rasial dan Wiranto adalah satu-satunya orang Benny di lingkar dalam Soeharto maka patut diduga Wiranto sengaja melarang pasukan keluar dari barak karena berniat membiarkan kerusuhan, tapi rencananya berantakan ketika marinir berinisiatif keluar kandang menghalau perusuh.

Tudingan bahwa Wiranto sengaja tidak memadamkan Kerusuhan 13-14 Mei 1998 juga datang dari koleganya: Letnan Jenderal (Purnawirawan) Sintong Panjaitan, yang dalam memoir berjudul Perjalanan Prajurit Para Komando halaman 3 – 4 menuduh bahwa Wiranto membiarkan kerusuhan rasial itu karena ingin dipilih lagi menjadi Menteri Pertahanan/Panglima TNI untuk rezim pasca Soeharto.

Pembiaran Wiranto atas Kerusuhan 13-14 Mei 1998 secara gamblang terlihat dari deskripsi peran Mayjend Sjafrie Sjamsudin selaku Pangdam Jaya dan Jenderal Wiranto selaku Panglima ABRI saat terjadinya Kerusuhan 13-14 Mei 1998, Atmadji Sumarkidjo, wartawan senior Suara Pembaruan, dalam buku Mereka Tentang Sjafrie, terbitan White & Red Publishing, halaman 37 – 39:

"*Sebenarnya pada waktu itu, tidak banyak yang tahu bahwa kewenangan seorang Pangdam Jaya sebagian "terbelenggu". Berdasarkan Telegram Rahasia (TR) Panglima ABRI/Ketua Bakorstanas (Badan Koordinasi Stabilitas Nasional) No. TR/14/STANS/1998, ditegaskan bahwa komando pengendalian (kodal) operasi penanggulangan huru-hara di setiap provinsi adalah tanggung jawab Kepala Kepolisian Daerah. Butir selanjutnya TR tersebut menyebutkan bahwa Pangdam bisa mengambil alih Kodal "bila terjadi perkembangan situasi" atau bila ada perintah khusus dari Panglima ABRI.*

Jelas sekali bahwa Kepolisian, dalam hal itu Polda Metro Jaya, yang bertanggung jawab atas masalah keamanan di seluruh wilayah DKI Jakarta, sementara Pangdam Jaya hanya memberi dukungan…Harus dicatat, rapat malam itu Polda tidak memutuskan pelimpahan Kodal dari Kapolda kepada Pangdam Jaya; di samping itu Pangab juga belum menginstruksikan hal demikian…

Kata Bambang Soeharto dalam bukunya, "...situasi politik waktu itu sangat kompleks di mana kekuatan-kekuatan politik maupun pimpinan militer saling bertabrakan…" Ketika pada tanggal 14 Mei 1998 situasi semakin tidak dapat dikendalikan, polisi banyak yang tidak bertugas atau meninggalkan posnyaa; bahkan Polsek Matraman habis dibakar, sementara jumlah pos polisi lainnya dirusak massa, Pangdam Sjafrie akhirnya mengambil alih Kodal Operasi dari Kapolda Metro Jaya. Itu terjadi baru sekitar pukul 11.00 pagi itu...Seandainya Kapolri dan Kapolda [dan Panglima ABRI] sudah menyerahkan Kodal sejak hari pertama, mungkin situasi akan berbeda…"*

*Kata dalam kurung penambahan dari penyusun.

Selain itu tiga fakta yang menguatkan kesimpulan bahwa klik Benny Moerdani mendalangi Kerusuhan 13-14 Mei 1998 adalah sebagai berikut:

1. Menjatuhkan lawan dengan "gerakan massa" adalah keahlian Ali Moertopo (guru Benny Moerdani) dan CSIS yang terkenal sejak Peristiwa Malari'74 yang meletus karena provokasi Hariman Siregar, binaan Ali Moertopo (selengkapnya lihat kesaksian Jenderal Soemitro yang dicatat Heru Cahyono dalam buku Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 74 terbitan Sinar Harapan).

2. Menurut temuan TGPF Kerusuhan 13-14 Mei 1998, penggerak lapangan adalah orang berkarakter militer yang sangat cekatan memprovokasi warga untuk menjarah dan membakar. Ini ciri-ciri orang yang terlatih sebagai intelijen, padahal baik Wiranto atau Prabowo adalah perwira tipe komando dan bukan tipe intelijen, sedangkan saat itu hanya Benny Moerdani yang memiliki kemampuan merekayasa kerusuhan skala besar karena dia mewarisi taktik dan jaringan yang dibangun Ali Moertopo (mengenai jaringan dimaksud bisa dibaca di Rahasia-Rahasia Ali Moertopo terbitan Tempo-Gramedia). Lagipula saat kejadian terbukti Benny sedang rapat di Bogor dan ada laporan intelijen bahwa provokator kerusuhan 27 Juli 1996 dan 13-14 Mei 1998 dilatih di Bogor!!

3. Saat Kerusuhan 13-14 Mei 1998, Fachrul Razi yang saat itu menjabat sebagai Kasum melarang pengerahan pasukan untuk membantu Kodam Jaya menghentikan kerusuhan sistematis dan penjarahan. Fachrul Razi adalah klik Wiranto yang di atas sudah terbukti adalah binaan Benny di dalam kabinet Presiden Soeharto yang terakhir. (http://www.liputan6.com/fullnews/77958.html).

Penutup

Benarkah Benny Moerdani tega membasahi tangannya dengan darah rakyat tidak berdosa? Tidak ada keraguan: Benny Moerdani berprinsip membunuh sebagian rakyat demi selamatkan negara layak dilakukan, sebagaimana diungkap David Jenkins, wartawan senior Australia yang memiliki jaringan luas dengan jenderal Orba dalam orbituari kepada Benny Moerdani, "Charismatic, Sinister Soeharto Man":

"*Hardened in battle and no stranger to violence, Moerdani believed that the ends justify the means…He once shocked members of an Indonesian parliamentary committee by saying, in effect, that if he had to sacrifice the lives of 2 million Indonesians to save the lives of 200 million Indonesians he would do so*."

http://www.smh.com.au/articles/2004/09/09/1094530768057.html

Para murid Benny Moerdani pendukung Jokowi tampaknya mewarisi kekejaman sang guru, misalnya Luhut Panjaitan, Kepala Staf Kepresidenan pada kabinet Jokowi-JK, pernah menghujani mahasiswa yang sedang berdemo dengan peluru tajam, menimbulkan banyak korban jiwa, dan hal ini diceritakan tanpa rasa bersalah:

"*Letusan peluru itu tidak digubris para pendemo. Mereka terus melempari tentara dengan batu. Merasa terdesak Luhut [Panjaitan] memerintahkan anak buahnya menembak kaki para pendemo. Situasi makin kacau karena mereka kocar-kacir. Tentara yang mengejar tidak lagi mengarahkan moncong ke aspal, tapi sudah mengincar sasaran. Luhut menduga banyak yang tewas saat kejar-kejaran itu*."

(Massa Misterius Malari, Tempo, hal. 71)

Kekejaman Luhut Panjaitan membuatnya menjadi anak emas Benny Moerdani, sehingga wajar Luhut Panjaitan menyimpan kebencian begitu besar terhadap Prabowo karena dia kehilangan status dan fasilitas istimewa setelah Benny Moerdani tersingkir:

"*Berbeda dengan panglima-panglima sebelum dan sesudahnya, Benny memang memelihara sejumlah orang yang disenanginya. "Mereka itu semacam golden boys Benny Moerdani,*" kata Schwarz. Salah satu yang dikenal sebagai "anak emas" itu adalah Luhut Binsar Panjaitan."

(Salim Said, hal. 343)

Kekejaman yang sama turut dimiliki AM Hendropriyono, murid Benny lain yang juga mendampingi Jokowi karena dia pelaku pembantaian Talangsari, Lampung; DOM di Aceh, lalu bersama Muchdi Pr dan Ass'at (keduanya mendukung Jokowi-JK) adalah dalang pembunuhan Munir (lihat: http://www.wikileaks.org/plusd/cables/07JAKARTA163_a.htm).

Sudah tidak bisa dibantah bahwa alasan klik Benny Moerdani mendukung Jokowi-JK sekalipun mengorbankan keutuhan partai masing-masing (PDIP, Hanura, Golkar, Demokrat) sekedar untuk melawan Prabowo adalah dendam kesumat yang belum terpuaskan sebab Prabowo menghalangi usaha mendeislamisasi Indonesia.

Menutup artikel ini saya akan mengutip Jusuf Wanandi, sahabat baik Benny Moerdani:

"*But, maybe Benny's biggest nemesis was Soeharto son-in-law, Prabowo Subianto*."

(Shades of Grey, hal. 240)

"...Saya menganggap lawan utama Benny adalah Prabowo Subianto, menantu Presiden Soeharto."

(Menyibak Tabir Orde Baru, hal. 327)

B. PROSES CSIS MENCIPTAKAN BONEKA JOKOWI

Kita harus berterima kasih kepada Julian Assange karena mendirikan website Wikileaks yang membocorkan berbagai dokumen rahasia milik Amerika Serikat sebab tanpanya kita tidak akan mengetahui bahwa Jokowi sudah menjalankan agenda Amerika di Indonesia sejak tahun 2005. Berdasarkan dokumen rahasia CIA tertanggal 7 April 2006 yang diunggah Wikileaks kita mengetahui bahwa pada tanggal yang sama agen rahasia CIA bernama Pierangelo dan David S. Williams bertemu Jokowi selaku Walikota Solo yang baru dilantik 7 bulan sebelumnya.

Agenda pertemuan adalah membahas Abu Bakar Ba'asyir dari Ponpres Ngruki yang disebut oleh pelaku serangan 9/11 bernama Riduan Isamuddin alias Hambali terkait jaringan Al Qaeda di Indonesia bernama Jamaah Islamiyah. Dalam pertemuan agen CIA tersebut minta Jokowi mengendalikan Abu Bakar Ba'asyir dan disanggupi oleh Jokowi. Setelah itu Jokowi mendekati Abu Ba'asyir secara pribadi dan hubungan keduanya menjadi sangat dekat bagai seorang ayah dan anak, terbukti kendati sedang mendekam di dalam penjara namun pada tanggal 30 Januari 2013 Abu

Bakar Ba’asyir sempat mengirim utusan menemui Jokowi sekedar menyampaikan salam; yang dibalas oleh Jokowi dengan ucapan terima kasih dan salam balik.

Jokowi memang berhasil mengontrol Abu Bakar Ba’asyir dan mendapat pujian dari Dubes AS bernama Cameron R. Hume pada tahun 2008 sebagaimana bocoran kawat diplomatik di Wikileaks yang dikirim ke Pentagon dengan judul “Solo, From Radical Hub To Tourist Heaven,” yang intinya melaporkan bahwa Jokowi telah berhasil mengendalikan Abu Bakar Ba’asyir dan menekan tingkat kemilitanan Ponpres Ngruki yang terkenal radikal.

Selanjutnya pada tahun yang sama yaitu tahun 2008, Jokowi kedatangan Agus Widjojo, Luhut Binsar Pandjaitan dan AM. Hendropriyono. Tidak beberapa lama setelah kedatangan ketiganya, Luhut Panjaitan membuat usaha patungan bersama Jokowi yang bernama PT Rakabu Sejahtera dengan modal awal dari Luhut Rp. 15,5miliar dan dari anak Jokowi bernama Gibran Rakabumi Raka sebesar Rp. 19,2miliar (anak dua puluh tahun yang pelihara tuyul tampaknya). Perlu dicurigai bahwa perusahaan hanya kedok sebuah operasi intelijen karena tidak lama setelah Jokowi menjadi Gubernur DKI, kantor perusahaan tersebut dua kali terbakar dalam waktu berdekatan.

Kehadiran Hendropriyono, Agus Widjojo dan Luhut Pandjaitan semakin melekatkan pengaruh Amerika pada kehidupan Jokowi sebab mereka adalah murid langsung dan anak emas Jenderal Benny Moerdani, seorang petinggi CSIS, sebuah lembaga yang didirikan agen CIA bernama Pater Beek. CSIS dan Pater Beek bukanlah satu-satunya hubungan CIA dengan Jokowi, sebab penanggung jawab proses memoles citra Jokowi dari

walikota gagal menjadi “pemimpin muda masa depan” hingga masuk gerbang pencapresan adalah Goenawan Mohamad yang kerap menerima uang negara asing dan anak didik Ivan Kats, seorang agen CIA. Khusus CSIS, sejak awal mereka memiliki hubungan dengan Ali Moertopo yang terkenal dengan Opsus dan pernah merekayasa kerusuhan Malari pada 15 Januari 1974 dan setelah kematian Ali Moertopo, tampaknya Opsus diwariskan kepada Jusuf Wanandi, pemimpin tertinggi CSIS saat ini karena Wikileaks menemukan Jusuf Wanandi adalah orang Opsus:

“6. *ASIDE FROM MURTONO, HOWEVER, ALI MURTOPO AND OPSUS SEEM TO HAVE DONE RATHER WELL. NUMBER TWO MAN (MARTONO) HAS LONG BEEN KNOWN AS OPSUS MAN IN OLD KOSGORO ORGANIZATION. JUSUF WANANDI (LIM BIAN KIE) HAS KEY POSITION HEADING LIST OF SECRETARIES ORGANIZED ACCCORDING TO FUNCTION, AND OPSUS STALWARTS DOMINATE AT THIS WORKING LEVEL.*”

https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1973JAKART10795_b.html

Bahwa pendirian CSIS tidak lepas dari unit operasi khusus (opsus) yang dibangun oleh Jenderal Ali Moertopo dapat disimak dari kesaksian Fahmi Idris dalam buku Sofjan Wanandi, Aktivis Sejati, terbitan Gramedia halaman 28:

“*Lahirnya operasi khusus (opsus) yang merupakan unit khusus Soeharto pimpinan Jenderal Ali Moertopo juga memicu perbedaan. Saya dan teman-teman lain tidak setuju dengan bentuk-bentuk demokrasi misterius seperti opsus…Selain sebagai unit politik, opsus juga menjadi unit ekonomi Soeharto. Unit ekonomi dipimpin Jenderal Soedjono*

Hoemardani. Sofjan menjadi sekretarisnya.

Dalam opsus ada juga Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang merupakan think tank politik Soeharto waktu itu. Saya dan teman-teman lain tidak sependapat dengan unit itu karena bisa menciptakan kilas balik bai proses demokratisasi yang mau kita bangun."

Kemunculan anak emas Benny Moerdani dari CSIS yang merupakan kepanjangan tangan kepentingan Amerika di Solo dan dilengkapi perangkat rekayasa ala Opsus sangat patut diduga terkait usaha mempersiapkan Jokowi sebagai presiden boneka Amerika Serikat. Jokowi dan timsesnya berhak membantah dia adalah boneka Amerika dan CSIS namun keberadaan Ajianto Dwi Nugroho yang dikader oleh murid-murid Pater Beek di dalam Jasmev untuk memenangkan Jokowi pada Pilkada DKI dan sekarang melalui cabang Jasmev, PartaiSocmed untuk memenangkan pilpres tidak bisa dibantah. Selain itu kita ingat kejadian memalukan di mana Jokowi membawa mantan Presiden Megawati menghadap Duta Besar Amerika, Inggris dan Kanada di rumah petinggi CSIS bernama Jacob Soetoyo dan kembali menyerahkan lehernya beberapa hari sebelum deklarasi pencapresannya adalah fakta umum yang tidak bisa dibantah.

Salah satu taktik deislamisasi yang dilakukan oleh CSIS adalah melalui kebijakan kader mereka Daoed Joesoef yang saat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melarang sekolah libur pada hari Ramadhan dan siswi beragama Islam dilarang menggunakan jilbab yang mana serupa dengan kebijakan Benny Moerdani yang melarang sajadah di lingkungan ABRI dan selalu mempersulit prajurit yang bermaksud sholat Jumat (http://tikusmerah.com/?p=1204).

Dengan fakta di atas maka sangat tidak mengherankan bila beberapa hari lalu seorang Dubes AS Robert Blake mencoba melakukan kampanye hitam menyerang Prabowo demi membantu meningkatkan peluang bagi capres boneka Amerika memenangkan pertarungan pilpres mendatang. Selain itu tidak heran juga ketika menjelang pilpres terbit sebuah fitnah keji bahwa Prabowo menghina kebutaan Gus Dur yang dilancarkan oleh media massa Time melalui tulisan jurnalis anti Indonesia bernama Yenny Kwok yang bersumber dari tulisan jurnalis anti Indonesia lain bernama Allan Neirn karena artikel tersebut memang hampir dapat dipastikan pesanan dari Pemerintah Amerika Serikat.

Belum selesai serangan kampanye hitam dari Dubes AS; dan Time melalui tangan duo Yenny Kwok dan Allan Neirn yang terafiliasi dengan mantan pelaku G30S/PKI, warga Negara Inggris keturunan Yahudi bernama Carmel Budiardjo yang selama 50 tahun melancarkan kampanye anti Indonesia di dunia internasional, sekarang datang serangan dari Sofjan Wanandi, pemimpin para pengusaha-pengusaha di Indonesia yang mengatakan bahwa para pengusaha kuatir bila Prabowo menjadi presiden.

Siapa Sofjan Wanandi? Dia adalah adik Jusuf Wanandi dan orang yang memulai salah satu pembusukan karakter paling keji terhadap Prabowo ketika diwawancara Adam Schwarz mengatakan seolah Prabowo pernah bilang akan mengusir semua orang cina sekalipun hal itu akan membuat ekonomi Indonesia muncur 20-30 tahun tapi 14 tahun setelah rumor tersebut merasuk ke sumsum rakyat Indonesia atau tahun 2012, barulah Sofjan Wanandi membantah bahwa ia pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu dengan alasan “jurnalis salah paham.”

http://m.sindonews.com/read/876961/113/kubu-prabowo-sebut-dubes-as-

melakukan-intervensi

http://m.merdeka.com/peristiwa/Sofjan-wanandi-pengusaha-takut-kalau-prabowo-jadi-presiden.html

http://gresnews.com/mobile/berita/Politik/936197-mungkinkah-ini-pelencengan-sejarah-98-Sofjan-wanandi-bantah-tuding-prabowo-berencana-usir-etnis-tionghoa

Sebagai adik penguasa Opsus, Sofjan Wanandi memang bukan pengusaha biasa, terbukti dia adalah donatur utama banyak penggarapan yang dilakukan Opsus era pimpinan Jusuf Wanandi dan CSIS seperti membiayai Kongres PDI di Medan ketika Benny Moerdani merekayasa politik dizolimi dengan “menjatuhkan” Megawati dari kursi Ketua Umum PDI dan diganti oleh “antek Orde Baru” Dr. Soerjadi yang menurut kesaksian dari Rachmawati Soekarnoputri sebenarnya adalah orang binaan Benny Moerdani juga.

Nama Sofjan Wanandi juga kembali disebut dalam dua dokumen yang ditemukan pasca meledaknya bom rakitan di Rumah Susun Johar di Tanah Tinggi, Tanah Abang.tanggal 18 Januari 1998. Saat aparat menyisir lokasi ledakan ditemukan sebuah laptop berisi arsip *e-mail* dan dokumen notulen rapat “Kelompok Pro Demokrasi” di Leuwiliang, Bogor, pada tanggal 14 Januari 1998 yang merencanakan revolusi dan dihadiri oleh 19 aktivis mewakili 9 organisasi terdiri dari kelompok senior dan kelompok junior. Adapun kelompok senior terdiri atas:

Pertama, CSIS yang bertugas membuat analisis dan menyusun konsep perencanaan aktivitas ke depan.

Kedua, Benny Moerdani.

Ketiga, PDI Pro Megawati Soekarnoputri.

Keempat, kekuatan ekonomi diwakili oleh Sofjan Wanandi dan
Yusuf Wanandi.

Sedangkan isi email:

"*Kawan-kawan yang baik! Dana yang diurus oleh Hendardi belum diterima, sehingga kita belum bisa bergerak. Kemarin saya dapat berita dari Alex [Widya Siregar] bahwa Sofjan Wanandi dari Prasetya Mulya akan membantu kita dalam dana, di samping itu bantuan moril dari luar negeri akan diurus oleh Jusuf Wanandi dari CSIS. Jadi kita tidak perlu tergantung kepada dana yang diurus oleh Hendardi untuk gerakan kita selanjutnya*."

Sumber: Majalah Gatra edisi 31 Januari 1998

Kedua dokumen di atas selain membuktikan Sofjan Wanandi, Jusuf Wanandi, CSIS, Benny Moerdani dan Megawati adalah bagian dari kelompok yang bermaksud membuat sebuah kerusuhan yang dibungkus sebagai revolusi, ternyata terungkap juga bahwa Hendardi dari PBHI yang beberapa bulan terakhir konsisten meributkan pencapresan Prabowo dengan membawa isu HAM dan penculikan adalah bagian dari kelompok tersebut dengan tugas mencari pendanaan. Aksi-aksi Hendardi mempolitisasi penangkapan terduga teroris pada tahun 1998 tersebut juga dilakukan oleh Tempo, majalah milik anak didik agen CIA yaitu Goenawan Mohamad dan Haris Azhar dari Kontras yang pernah meminta

Uni Eropa melanggar kedaulatan Indonesia dengan melakukan intervensi terhadap pemerintah Indonesia. Selain itu politisasi juga dilakukan Metro TV, tapi Surya Paloh hanya politisi/pengusaha oportunis, jadi dia bukan CSIS atau antek CIA.

http://protectioninternational.org/video/haris-azhar-on-the-role-of-kontras/

Bagi kalangan aktivis yang sampai sekarang masih memegang teguh idealisme, orang seperti Hendardi, Goenawan Mohamad, dan Haris Azhar dimasukan ke dalam kelompok "Pedagang Orang Hilang," sebab mereka memperdagangkan isu "Orang Hilang" melalui serangkaian politisasi demi untuk mencapai keinginan mereka baik berupa uang donasi, jabatan, kedudukan sosial, atau mendiskriditkan lawan mereka. Hal ini terbukti dari fakta bahwa para orang yang berkumpul dalam Asosiasi Pedagang Orang Hilang ini tidak meliput pernyataan Andi Arief, salah satu "korban penculikan 1998″ bahwa Wiji Thukul, orang yang kerap menjadi salah satu ikon para Pedagang Orang Hilang ternyata masih hidup dengan sehat setidaknya dua bulan setelah reformasi dan fakta ini diketahui oleh Goenawan Mohamad dan Stanley dari Tempo, dan Jaap Erkelens.

http://m.inilah.com/read/detail/2114481/akhirnya-andi-arief-bercerita-soal-widji-thukul

http://m.rmol.co/news.php?id=161521

Selain fakta Wiji Thukul masih hidup dan sehat, para Pedagang Orang Hilang juga menyembunyikan fakta bahwa sejak 16 tahun lalu tim SiaR bentukan Goenawan Mohamad sudah menemukan bukti bahwa Prabowo

tidak bersalah dan hanya difitnah. Mereka juga sengaja tidak meliput berita penyerahan dokumen kepada Komnas HAM berisi notulen rapat pembahasan Operasi Kuningan di antara para jenderal Orde Baru untuk memfitnah Prabowo.

Temuan tim SiaR adalah:

"*Tapi, teknik ABRI menyelesaikan intern soal penculikan ini, agaknya memang sengaja ditempuh untuk menghindari terbongkarnya orang-orang di belakang Prabowo. Sebuah sumber di Mabes ABRI mengatakan, sebetulnya Prabowo punya surat perintah penculikan itu, yang diteken oleh Jenderal Feisal Tanjung, Pangab sebelumnya. Surat itu, konon, akan dibeberkan kalau Prabowo diseret ke Mahmilub. Akibatnya, Wiranto berkompromi dengan menjatuhkan hukuman ringan untuk Prabowo*."

http://www.minihub.org/siarlist/msg00741.html

Dokumen yang diserahkan kepada Komnas HAM adalah notulen rapat terbatas tanggal 17 Juli 1998 di rumah Wiranto yang dihadiri oleh Agum Gumelar, Soebagio HS, Fachrul Rozi, dan Yusuf Kartanagara yang mana Agum Gumelar mengemukakan pendapat mengenai perlunya menciptakan "aktor" yang akan dijadikan dalang segala dalang kerusuhan Mei dan "penculikan aktivis," selanjutnya Soebagyo HS menyarankan agar kepergian ke Malang tanggal 14 Mei 1998 dijadikan alibi untuk mengarahkan Prabowo sebagai aktor utama kerusuhan di Jakarta dan penangkapan aktivis. Letjend Fachrul Rozi juga mengusulkan pembentukan Dewan Kehormatan Perwira tanpa Mahkamah Militer untuk memberhentikan Prabowo sekaligus menciptakan opini bahwa Prabowo adalah dalang kerusuhan di Jakarta. Terakhir Wiranto memberi perintah

agar para “aktivis” yang belum dilepas untuk “disukabumikan.”

Menurut sejarahwan Hermawan Sulistiyo dalam buku Palu Arit di Ladang Tebu, halaman 163, istilah “sukabumi,” bermakna ganda. Suka bumi adalah nama kota peristirahatan di Jawa Barat. Sukabumi juga gabungan dari dua kata “suka” dan “bumi”. Istilah “sukabumi” yang kedua pada saat operasi penganyangan Angkatan Darat terhadap PKI diartikan sebagai “membuat seseorang menyukai bumi.” Istilah ini merupakan penghalusan untuk tindakan pembunuhan, karena “pergi ke kota sukabumi,” juga berarti “beristirahat.”

Untuk membuktikan keaslian atau kepalsuan dokumen tersebut cukup mudah yaitu melakukan pemeriksaan forensik terhadap tanda tangan para peserta rapat yang dibubuhkan di dalam dokumen notulensi. Bila tanda tangannya asli, maka BOOM!!, tidak ada alasan untuk tidak membawa Wiranto, Soebagyo HS, Fachrul Razi, dan Agum Gumelar ke pengadilan.

http://m.aktual.co/politik/145428operasi-kuningan-wiranto-perintahkan-13-aktifis-98-dibumihanguskan

Kenapa Tempo; Media Indonesia; Metro TV; Jawa Pos dll yang biasa “peduli HAM” dan “penculikan aktivis” tidak membuat laporan kejadian tersebut? Padahal bila dokumen ternyata asli, maka kita akan bisa mengungkap penembakan Trisakti sampai Kerusuhan 13-14 Mei 1998. Namanya juga Pedagang Orang Hilang, yang membantu dagangan pasti dijadikan bahan marketing sedangkan yang merusak dagangan akan disingkirkan dan dianggap tidak ada. Kendati demikian terbukti kunci membuka misteri 1998 bukan di Bukit Hambalang, melainkan di Tanah Abang, Utan Kayu, Salatiga dan Semarang.

C. TIDAK ADA JOKOWI TANPA BOM TANAH TINGGI

Pendahuluan

Melihat komposisi elit koalisi Jokowi-JK baik sipil dan/atau purnawirawan maka sulit untuk tidak menyimpulkan bahwa koalisi ini tidak lain adalah koalisi lembaga pemikir (think-tank) CSIS yaitu:

1. Sipil: Jusuf Wanandi (bos CSIS); Sofjan Wanandi (bos Apindo dan CSIS); Jacob Soetoyo (elit CSIS, mempertemukan Jokowi-Megawati dengan dubes-dubes negara imperialis di rumahnya); Indra J. Piliang (politisi Golkar pendukung Jokowi-JK yang berlatar belakang peneliti CSIS); The Jakarta Post (koran milik CSIS); Marie Elka Pangestu (elit CSIS); Goenawan Mohamad/GM (pendiri Tempo, bawahan CSIS); Tempo (media milik GM dan Fikri Jufri, menerbitkan berita pesanan CSIS); Todung Mulya Lubis (lawyer bos CSIS), dkk;

2. Purnawirawan terdiri atas binaan Benny Moerdani dari CSIS, antara lain: Sutiyoso (Gubernur DKI saat Kerusuhan 13-14 Mei 1998); Agus Widjojo; Fachrul Razi (klik Wiranto dan pengusul Jonny Lumintang sebagai Pangkostrad), Ryamizard Ryacudu (mertuanya Try Sutrisno agen Benny); Agum Gumelar-AM Hendropriyono (bodyguard Mega atas perintah Benny); Theo Syafei (via anaknya Andi Widjajanto); Fahmi Idris (rumahnya lokasi ide Kerusuhan 27 Juli 1996 dan Kerusuhan 13-14 Mei 1998 pertama kali dilontarkan); Luhut Binsar Panjaitan (anak emas Benny Moerdani); Tyasno Sudarto; Soebagyo HS (KSAD saat Kerusuhan 13-14 Mei 1998); Wiranto (agen Benny di kabinet Soeharto); TB Silalahi; TB Hasanuddin, dkk.

(Anggota sipil dan militer yang terafiliasi CSIS secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Klik CSIS**").

Ledakan Bom Tanah Tinggi Dan CSIS

Sosok Jokowi tidak akan diciptakan CSIS apabila tokoh belakang layar Partai Rakyat Demokratik/PRD yaitu Daniel Indrakusuma alias Daniel Tikuwalu yang dilatih gerilya oleh komunis Filipina dan berhubungan dekat dengan Max Lane, komunis Australia sekaligus donatur utama PRD pada Agustus 1997 tidak membuat PRD deklarasikan perlawanan bersenjata. Seruan tersebut ditindaklanjuti dengan kedatangan tiga pemuda ke Rumah Susun Johar di Tanah Tinggi, Tanah Abang untuk menyewa kamar Blok V, No. 510. Lokasi rumah susun tidak jauh dari kantor CSIS di Jl. Tanahabang III/27, Jakarta Pusat.

Menurut keterangan Ketua RT, ketiganya tidak bermasalah selama tinggal di sana sampai tiba-tiba hari Minggu, 18 Januari 1998 terjadi ledakan dari dalam kamar mereka karena percobaan merakit bom kecil yang gagal. Ketentuan rumah susun mengatur bila terjadi insiden maka listrik dimatikan, dan hal ini menyulitkan usaha tiga pemuda tadi untuk melarikan diri sehingga satu berhasil ditangkap sedangkan dua lainnya melarikan diri dengan luka bakar cukup serius. Orang yang ditangkap warga diketahui bernama Agus Priyono (kini Ketua PRD), aktivis Solidaritas Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi (SMID), organisasi sayap PRD dan aktivis PRD lain bernama Rahmat Basuki juga tertangkap di Jogjakarta.

Bukti pihak di belakang bom tanah tinggi ini adalah Partai Rakyat Demokratik/PRD juga datang dari pihak Andi Arief mantan Ketua Umum PRD saat itu dalam wawancara dengan website Vivanews berjudul

“Prabowo Bukan Penculik” yang dimuat tanggal 30 Juni 2014. Dalam wawancara yang sama, Andi Arief juga mengakui bahwa PRD telah disusupi agen Benny Moerdani.

(http://wawancara.news.viva.co.id/news/read/517127-wawancara-andi-arief-prabowo-bukan-penculik).

Dari pemeriksaan aparat keamanan di lokasi ledakan ditemukan 52 alat bukti yang disita antara lain berupa: laptop berisi email, dokumen notulen rapat, beberapa paspor dan KTP antara lain atas nama Daniel Indrakusuma, buku tabungan, disket-disket, detonator, amunisi, baterai, timer dan lain sebagainya. Adapun isi *e-mail* dan dokumen yang ditemukan antara lain:

a. *E-mail* dari orang yang memakai nama “Dewa” berbunyi:

“*Kawan-kawan yang baik! Dana yang diurus oleh Hendardi belum diterima [Dari Asia Watch], sehingga kita belum bisa bergerak. Kemarin saya dapat berita dari Alex [Widya Siregar] bahwa Sofjan Wanandi dari Prasetya Mulya akan membantu kita dalam dana, di samping itu bantuan moril dari luar negeri akan diurus oleh Jusuf Wanandi dari CSIS. Jadi kita tidak perlu tergantung kepada dana yang diurus oleh Hendardi untuk gerakan kita selanjutnya.*”

Pernyataan Dewa tersebut sudah dibenarkan oleh anggota PRD kepada Gatra bahwa anak buah Sofjan Wanandi pernah menelpon mereka dan menawarkan bantuan dana sebesar US$ 15,000 yang sudah diambil sebagian sebelum bom meledak (Manuver Politik: Sofjan Wanandi & CSIS, Forum Komunikasi Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Indonesia, 1998, hal. 21; Gatra edisi 7 Februari 1998).

b. *E-mail* lain menyebut nama Surya Paloh, bos harian Media Indonesia yang antara lain menerangkan: “Peranan Surya Paloh pada surat kabar Media sangat membantu rencana kita dalam membakar massa.”

c. Adapun dokumen lainnya adalah notulen berisi pertemuan “kelompok pro demokrasi” dengan penyandang dana mereka yang berlangsung di Leuwiliang, Bogor, 14 Januari 1998 yang dihadiri oleh 19 aktivis mewakili 9 organisasi terdiri dari kelompok senior dan kelompok junior yang merencanakan revolusi. Anggota kelompok senior adalah sebagai berikut:

Pertama, CSIS bertugas membuat analisis dan menyusun konsep perencanaan aktivitas ke depan.

Kedua, kekuatan militer yang diwakili oleh Benny Moerdani.

Ketiga, kekuatan massa yang pro Megawati Soekarnoputri.

Keempat, kekuatan ekonomi yang dalam hal ini diwakili oleh Sofjan Wanandi dan Yusuf Wanandi.

Atas penemuan dokumen di atas, Jusuf Wanandi, dan Sofjan Wanandi didampingi pengacaranya Todung Mulya Lubis telah diperiksa Bakortanasda Jaya. Kemudian peristiwa tersebut ditambah fakta Sofjan Wanandi menolak membantu negara yang terkena krisis moneter karena memikirkan diri sendiri membuat kantor CSIS diterjang demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa yang antara lain menuntut pembubaran lembaga ini. Semua kejadian ini membuat klik CSIS panik dan terlihat dalam tegangnya rapat konsolidasi pada hari Senin, 16 Februari 1998 di Wisma Samedi, Klender, Jakarta Timur (dekat lokasi Kasebul) dan dihadiri

oleh Harry Tjan, Cosmas Batubara, Jusuf Wanandi, Sofjan Wanandi, J. Kristiadi, Hadi Susastro, Clara Juwono, Danial Dhakidae dan Fikri Jufri.

Ketegangan terjadi antara J. Kristiadi dengan Sofjan Wanandi sebab Kristiadi menerima dana Rp. 5miliar untuk untuk menggalang massa anti Soeharto tapi sekarang CSIS malah menjadi sasaran tembak karena ketahuan mendanai gerakan makar. Akibatnya Sofjan dkk menuduh Kristiadi tidak becus dan menggelapkan dana. Tuduhan ini dijawab dengan membeberkan penggunaan dana terutama kepada aktivis "kiri" di sekitar Jabotabek, misalnya Daniel Indrakusuma menerima Rp. 1,5miliar dll. Kristiadi juga menunjukan berkali-kali sukses menggalang massa anti Soeharto ke DPR, dan setelah CSIS didemo, Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta (FKMIJ) yang setahun terakhir digarap segera mengecam demo tersebut. Di akhir rapat disepakati bahwa Kristiadi menerima dana tambahan Rp. 5miliar.

(http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1998/02/21/0088.html).

Demi menyelamatkan CSIS yang sudah di ujung tanduk membuat klik CSIS segera merencanakan untuk menjatuhkan Presiden Soeharto dan Prabowo Soebianto. Hasil dari rencana tersebut adalah Kerusuhan 13-14 Mei 1998 sebagaimana direncanakan oleh Benny Moerdani di rumah Fahmi Idris yang juga dihadiri oleh Sofjan Wanandi. Menurut kesaksian George Junus Aditjondro, Jusuf dan Sofjan Wanandi adalah ekstrim kanan yang tidak peduli ras atau agama, dan karena itu Tionghoa, Kristen, dan Katolik bisa dihantam bila hal tersebut menguntungkan mereka. Bukankah mereka yang menghancurkan Gereja Katolik Timor Timur? Bukankah guru mereka, Ali Moertopo yang anak kiai itu justru mendiskriditkan Islam melalui DI/TII dan GUPPI? David Jenkins, wartawan Australia dalam

orbituari Benny Moerdani, “Charismatic, Sinister Soeharto Man” menulis:

“*Hardened in battle and no stranger to violence, Moerdani believed that the ends justify the means…He once shocked members of an Indonesian parliamentary committee by saying, in effect, that if he had to sacrifice the lives of 2 million Indonesians to save the lives of 200 million Indonesians he would do so.*”

http://www.smh.com.au/articles/2004/09/09/1094530768057.html

Tidak heran beberapa pastur Katolik seperti Romo Mangunwijaya, Sandyawan dan Mudji Sutrisno justru tidak menyukai Wanandi bersaudara padahal saudara kandung mereka, Markus Wanandi adalah pastur.

16 tahun kemudian, Prabowo Soebianto, orang yang pernah mereka jatuhkan karena memimpin penyelidikan atas bom Tanah Tinggi malah tidak memiliki saingan untuk menjadi presiden Indonesia berikutnya. Tentu saja mereka kembali panik sebab bila Prabowo memimpin negeri ini maka kemungkinan besar semua kejahatan mereka di masa lalu khususnya periode 1998 terbongkar. Untuk itulah klik CSIS perlu menciptakan sosok lawan tanding Prabowo dan sosok tersebut adalah Jokowi.

Proses penciptaan Jokowi dimulai pada tahun 2008 dengan mengirim Agus Widjojo untuk menjajaki kerja sama dan setelah itu penggarapan Jokowi dilakukan oleh Luhut Panjaitan anak emas Benny Moerdani dengan kedok PT Rakabu Sejahtera sedangkan kegiatan memoles citra Jokowi diserahkan kepada Goenawan Mohamad dan grup Tempo. Selanjutnya dukungan negara-negara imperialis diatur oleh Jacob Soetoyo dan Sofjan Wanandi bersama Marie Elka Pangestu sejak tahun 2013 sudah melempar

wacana duet Jokowi-JK dengan gelontoran dana minimal Rp. 2trilyun (http://m.rmol.co/news.php?id=129021).

Keterlibatan Surya Paloh dan Megawati dalam ledakan bom Tanah Tinggi menjawab keanehan PDIP, dan NasDem begitu saja mendukung kursi presiden kepada Jokowi dan wakil presiden kepada Jusuf Kalla

(http://m.rimanews.com/read/20140413/147888/duet-jokowi-jusuf-kalla-didukung-Sofjan-wanandi-apindocsiskompas-mau-diumumkan).

D. KEBENCIAN CSIS KEPADA PRABOWO SOEBIANTO

"*But, maybe Benny's biggest nemesis was Soeharto son*-in-*law, Prabowo Subianto.*"

(Jusuf Wanandi, Shades of Grey, hal. 240)

"*Saya menganggap lawan utama Benny adalah Prabowo Subianto, menantu Presiden Soeharto.*"

(Jusuf Wanandi, Menyibak Tabir Orde Baru, hal. 327)

Dari hasil debat presiden pertama rakyat Indonesia bisa menyaksikan bahwa Jusuf Kalla adalah pihak yang mendominasi dan menguasai materi debat sedangkan Jokowi tampak seperti anak kecil yang dalam setiap ada kesulitan selalu mencari perlindungan ke orang tuanya. Sudah sah dan meyakinkan bahwa Jokowi adalah boneka, tapi boneka siapa? Melihat komposisi pendukung Jokowi rata-rata pendukung Benny Moerdani seperti Luhut Panjaitan; AM Hendropriyono, Fahmi Idris, Tempo, The

Jakarta Post, Indra J. Pialang mantan peneliti CSIS dll maka tidak ada kesangsian bahwa Jokowi adalah produk CSIS, yang mana ketika masih hidup, Benny Moerdani adalah anggotanya.

Siapa CSIS dan bagaimana sepak terjangnya sudah sering dibahas mulai dari awal pembentukan sampai tersingkir dari Orde baru lalu ketahuan berniat melakukan revolusi untuk menjatuhkan Presiden Soeharto. Tulisan ini berniat membahas sedikit mengenai organisasi rahasia di belakang Jokowi ini.

Embrio CSIS adalah KAP-Gestapu, sebuah kelompok mahasiswa yang melawan PKI pasca G30S/PKI, dan menariknya dalam salah satu dokumen CIA yang berstatus *declassified* atau dikeluarkan dari status rahasia sehingga bisa diakses publik diketahui bahwa CIA menyalurkan dana sebesar Rp. 50juta kepada KAP-Gestapu sebagai dana perang melawan PKI. Rp. 50juta untuk ukuran sekarang tentu tidak berarti banyak namun untuk ukuran zaman itu sangat besar, sebagai perbandingan, uang pensiun Bung Hatta sebagai wakil presiden saja perbulannya hanya Rp. 115.000,00 (selengkapnya lihat Surat Bung Hatta kepada Soekarno tanggal 1 Desember 1965).

Yang menarik bukan hanya jumlahnya yang besar, tetapi juga alasan CIA menyalurkan dana perang kepada KAP-Gestapu dan bukan kepada TNI yang juga berjuang melawan PKI, melalui Pangkostrad Mayjend Soekarno misalnya. Kita baru mengerti alasannya ketika mengetahui bahwa pemimpin KAP-Gestapu yaitu Sofjan Wanandi; Jusuf Wanandi; Harry Tjan Silalahi adalah murid Pater Beek, agen CIA di Indonesia yang menerima tugas untuk mempersiapkan kelompok perlawanan terhadap komunis. Selanjutnya sejarah mencatat anak-anak KAP-Gestapu

berkenalan dengan intel paling unik di Indonesia, Ali Moertopo.

Setelah PKI dikalahkan, anak-anak Kap-Gestapu tersebut bersama Ali Moertopo dan Soedjono Hoermardani membentuk lembaga pemikir (think-tank) yang sekarang dikenal dengan singkatannya saja, CSIS. Pendirian CSIS tentu tidak lepas dari tangan Pater Beek namun untuk alasan yang dapat dimengerti nama Pater Beek tidak pernah muncul secara resmi sampai mantan muridnya George Junus Aditjondro membuka rahasia keterlibatan agen CIA dalam pendirian CSIS.

Dalam perjalanannya nama CSIS sering dicatat berdekatan dengan berbagai kerusuhan dan vandalisme negeri ini, misalnya massa tidak dikenal yang menunggangi aksi mahasiswa pada 15 Januari 1974 adalah massa Guppi yang dilatih oleh Ali Moertopo di gedung CSIS dengan tujuan mendiskriditkan saingannya, Jenderal Soemitro. Nah, ketika dikonfrontir tentu CSIS membantah mereka terlibat peristiwa Malari 1974.

Sebagaimana dikutip dari Majalah Gatra edisi 31 Januari 1998 sekali lagi tudingan CSIS terlibat tindak teror dan intimidasi kembali terjadi tepat 24 tahun plus 3 hari setelah Malari atau tanggal 18 Januari 1998 ketika ada bom yang salah rakit meledak di Tanah Abang Jakarta, dan penyisiran oleh aparat keamanan di lokasi menemukan dua dokumen yang mengkaitkan personil CSIS dengan teror-teror bom yang melanda Jakarta saat itu, yaitu berupa email dan dokumen notulen rapat di Bogor, 14 Januari 1998.

Bunyi email tersebut adalah sebagai berikut:

"*Kawan-kawan yang baik! Dana yang diurus oleh Hendardi belum diterima, sehingga kita belum bisa bergerak. Kemarin saya dapat berita*

dari Alex [Widya Siregar] bahwa Sofjan Wanandi dari Prasetya Mulya akan membantu kita dalam dana, di samping itu bantuan moril dari luar negeri akan diurus oleh Jusuf Wanandi dari CSIS. Jadi kita tidak perlu tergantung kepada dana yang diurus oleh Hendardi untuk gerakan kita selanjutnya."

Sedangkan dokumen notulen berisi pertemuan orang-orang yang mengaku sebagai "kelompok pro demokrasi" yang berlangsung di Leuwiliang, Bogor, 14 Januari 1998 yang dihadiri oleh 19 aktivis mewakili 9 organisasi terdiri dari kelompok senior dan kelompok junior yang merencanakan revolusi di Indonesia. Adapun kelompok senior adalah:

Pertama, CSIS yang bertugas membuat analisis dan menyusun konsep perencanaan aktivitas ke depan.

Kedua, kekuatan militer yang diwakili oleh Benny Moerdani.

Ketiga, kekuatan massa yang pro Megawati Soekarnoputri.

Keempat, kekuatan ekonomi yang dalam hal ini diwakili oleh Sofjan Wanandi dan Yusuf Wanandi.

Sebagaimana dicatat oleh Bill Tarrant dalam bukunya Reporting Indonesia dan Jusuf Wanandi dalam buku Shades of Grey, karena penemuan dokumen tersebut Jusuf dan Sofjan Wanandi sempat dipanggil oleh Zacky Anwar Makarim di Guntur dan Jusuf Wanandi menyatakan bahwa ketika diintrogasi, dia menantang petugas yang memeriksa dengan mengatakan bahwa karena dialah Soeharto bisa menjadi presiden kemudian bercerita bagaimana Soeharto menjadi presiden karena dirinya dan kawan-

kawannya (Lihat Shades of Grey halaman 274 – 275).

Salah satu pembelaan diri Jusuf Wanandi terkait dokumen Tanah Tinggi tersebut adalah “seseorang” menaruh dokumen dan email untuk memfitnah mereka. Saya berpikir malang sekali nasib mereka, sudah dituduh dalang Malari dan sekarang malah dituduh mendanai kaum radikal yang bermaksud mengadakan revolusi di Indonesia. Tentu saja mereka bisa saja bernasib buruk atau memang memiliki hobi menjadi konspirator atau dalang kekacauan di negeri ini. Tapi masa sih mereka sejahat itu, apalagi bila melihat Jusuf, Sofjan dan Harry Tjan memiliki perawakan seperti kakek-kakek yang sangat ramah.

Perlu dicatat bahawa pernyataan “Dewa” tersebut telah dibenarkan anggota PRD bahwa anak buah Sofjan Wanandi pernah menelpon mereka dan menawarkan bantuan dana sebesar US$ 15,000 yang sudah diambil sebagian sebelum bom meledak (Manuver Politik: Sofjan Wanandi & CSIS, Forum Komunikasi Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Indonesia, 1998, hal. 21; Gatra edisi 7 Februari 1998).

Pantas diperhatikan juga bahwa dalam salah satu debat terbukanya dengan Budiman Sudjatmiko yang terjadi pada tanggal 3 Juli 2015, Andi Arief sudah mengakui bahwa ledakan bom tanah tinggi adalah pekerjaan PRD dan bukan rekayasa intelijen Orde Baru sebagaimana pembelaan anggota-anggota PRD dan aktivis-aktivis 1998 saat itu.

http://www.merdeka.com/politik/budiman-sudjatmiko-andi-arief-perang-di-twitter.html

Baru-baru ini Jusuf Wanandi menerbitkan buku otobiografi yang ditulisnya sendiri dalam bahasa Inggris dan terbitan Equinox, tapi ada juga edisi bahasa Indonesia terbitan Kompas, dan saya membeli keduanya. Buku tersebut memuat beberapa cerita tentang Prabowo Subianto dan sebagaimana umumnya tulisan orang yang dekat dengan Benny Moerdani, maka Jusuf Wanandi juga menulis tentang Prabowo secara sangat negatif, seolah tidak ada baiknya, seolah semuanya buruk. Inti tulisan klik Benny Moerdani memiliki satu tema pokok yaitu: Prabowo bukan manusia, melainkan setan iblis dedemit jahanam berkulit manusia.

Beruntung baru-baru ini saya menemukan Majalah Media Dakwah edisi Februari 1998 yang memberitakan buka puasa bersama tanggal 23 Januari 1998 di Markas Komando Kopassus Cijantung yang dihadiri ribuan Umat Muslim dan berbagai tokoh lintas kalangan, antara lain: Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, Ketua MUI KH. Hasan Basri, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Dr Anwar Haryono SH, Ketua BKSPPI KH Cholil Ridwan, Ketua Dewan Pimpinan KISDI KH Abdul Rasyid Abdullah Syafii, Sekretaris Umum Muhammadiyah Dr Watik Pratiknya, Sekretaris Umum Dewan Dakwah Hussein Umar, Ir. AM Luthfie (Forum Ukhuwah Islamiyah), Pengurus PBNU Dr Said Agil Munawwar, KH Ma’ruf Amin, Pangdam Tanjungpura Mayjen Muchdi Pr, Kasdam Jaya Brigjen Sudi Silalahi, Kaskostrad Mayjen TNI Ismet Yuzairi, Mayjen TNI Cholid Ghozali, KH Asep Mausul (Tasikmalaya), KH Abdul Wahid Sahari (Pandeglang), KH Shihabudin (Kotabumi Lampung), Wapemred Majalah Ummat M Syafii Anwar dan Redpel Media Indonesia Bambang Harymurti, Ketua SPSI Bomer Pasaribu, MSc, Dr Laode Kamaluddin, Dr Din Syamsuddin, Dr Jimly Ashiddiqie, Dr Didin Damanhuri, Chairul Umam dan H Rhoma Irama mewakili seniman.

Bila dilihat dari daftar nama yang hadir, sebenarnya acara di atas biasa saja, sama seperti acara buka bersama yang sering dilakukan beberapa tahun terakhir di Indonesia, tapi memang saat itu peristiwa ini sangat menggemparkan sebab untuk pertama kalinya Kopassus yang sempat dianggap menyeramkan oleh Umat Islam membuka pintu markasnya dan menunjukan sisi kemanusiawian mereka. Mau tahu bagaimana Jusuf Wanandi menggambarkan peristiwa ini?

"…*I was thinking, this could go horribly wrong, because you don't know, once you started using preman, what they would do next. And of course that is exactly what happened two years later, when Prabowo used extrimists to oppose the students. At that time, he had a buka puasa (breaking of the fast) at his place, while he was still commander of Kopassus. Up to 3.000 people came, all of them from the extreme right*."

(Jusuf Wanandi, Shades of Grey hal. 272)

Untuk memastikan pemahaman saya benar, maka saya melakukan komparasi dengan terjemahan di edisi bahasa Indonesianya:

"…*Saya merasa situasi ini akan berkembang lebih buruk karena dengan menggunakan preman, tak terbayang apa lagi yang dapat mereka perbuat. Kekhawatiran saya menjadi kenyataan dua tahun kemudian ketika Prabowo mengerahkan kelompok ekstrimis untuk menghadapi mahasiswa. Ketika itu, sebagai Komandan Kopassus, ia [Prabowo] mengadakan acara buka puasa di rumahnya yang dihadiri oleh hampir 3.000 orang yang terdiri dari kelompok garis keras kanan*."

(Jusuf Wanandi, Menyibak Tabir Orde Baru, hal. 376)

Wow, mengerikan sekali acara buka puasa yang diadakan Prabowo bila membaca bagaimana Jusuf Wanandi memakai istilah “preman”, “ekstrimis” dan “kelompok garis keras kanan” dalam satu paragraf untuk menggambarkan acara buka puasa di Markas Komandan Kopassus tersebut, trifecta! Dengan kata lain Prabowo mengadakan acara buka puasa dengan preman, ekstrimis, kelompok garis keras kanan, di markas Kopassus yang terkenal sebagai pasukan “penculik aktivis” lagi! Siapa tidak ngeri? Saya saja menggigil ketakutan sampai meriang.

Namun begitu, bila kita mencermati nama-nama yang hadir di acara tersebut, rasanya aneh apabila Sjafrie Sjamsoeddin, KH. Hasan Basri, Dr Said Agil Munawwar, KH Ma’ruf Amin, Sudi Silalahi, Bambang Harymurti, Bomer Pasaribu, MSc, Dr Laode Kamaluddin, Dr Din Syamsuddin, Dr Jimly Ashiddiqie, dan H Rhoma Irama dikategorikan sebagai preman, ekstrimis dan kelompok garis keras kanan sesuai deskripsi Jusuf Wanandi bahwa: “all of them from the extreme right” dan “yang terdiri dari kelompok garis keras kanan,” berarti tanpa terkecuali, semua yang hadir di acara Prabowo adalah ekstrimis sayap kanan.

Sekali lagi tanggapan sinis dan minir penuh kebencian dari teman-teman Benny Moerdani terhadap apapun yang dilakukan oleh Prabowo sangat wajar karena Prabowo adalah lawan utama Benny Moerdani, tentu sebagai teman baiknya, Jusuf Wanandi wajib membela teman baiknya. Kendati demikian apa yang ditulis Jusuf Wanandi tentang acara buka puasa yang diadakan Prabowo tentu terhitung fitnah, sebab menceritakan hal yang tidak pernah ada seolah-olah menjadi ada secara negatif dengan tujuan menghantam, mendiskriditkan dan mencemarkan nama baik yang menjadi objek cerita, dalam hal ini Prabowo.

Sejalan dengan ini, Drs. H.M. Cholil Badawi dalam buku Mereka Tentang Sjafrie terbitan Red & White Publishing menulis:

"*Dalam suasana seperti itu, saya diberi informasi yang sangat penting bahwa kekuatan di tubuh Golkar yang menguasai politik di Indonesia secara mutlak itu, hakikatnya menjadi kuda tunggangan tokoh-tokoh Katholik, di antaranya Jenderal LB. Moerdani, yang menungganginya sebagai kendaraan menuju RI-II alias wakil presiden. Ambisi Benny Moerdani itu bahkan sudah mendapat dukungan dari DJ. Naro, Ketua Umum PPP. Diketahui pula untuk meraih ambisinya ini, Benny Moerdani bahkan siap berpindah agama. Tapi belakangan dengan melakukan re-check ke sekitar orang dekat Naro, rupanya informasi ini mengandung kebenaran.*"

Yang mau saya katakan dengan fitnah di atas adalah ternyata terbukti Jusuf Wanandi memiliki kemampuan untuk berdusta dengan wajah tetap lurus tanpa merasa berdosa. Pertanyaan kita tentu bila Jusuf Wanandi bisa berbohong sekedar untuk mendiskriditkan Prabowo dengan sikap memusuhi, maka kebohongan macam apalagi yang pernah dilakukan Jusuf Wanandi dan CSIS? Mengenai tidak terlibat dalam Malari'74? Atau tidak terlibat dalam gerakan revolusi 1998? Atau tidak ada hubungan dengan capres boneka bernama Joko Widodo?

Mengapa CSIS dan kelompok Benny Moerdani menciptakan capres boneka bernama Joko Widodo? Karena mereka semua masih mendendam atas tindakan Prabowo yang menghalangi usaha mereka untuk mengurangi pengaruh Islam atau melakukan proses deislamisasi di Indonesia, sehingga sekarang mereka berupaya menghalangi keinginan Prabowo menjadi presiden sekalipun harus mengorbankan Indonesia dengan menempatkan

capres tipe “ndak mikir” seperti Jokowi.

Kebencian CSIS kepada Prabowo adalah karena dia berhasil mempengaruhi Soeharto untuk mendekat kepada Islam dan membentuk ICMI. Akibatnya CSIS melibatkan diri dalam gerakan untuk menjatuhkan Presiden Soeharto sebagaimana dijabarkan oleh Todung Mulya Lubis dalam buku Sofjan Wanandi, Aktivis Sejati, halaman 393-394, berikut:

“*Bersamaan pada waktu itu muncul pula gejala sektarianisme yang antara lain terlihat ketika Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) terbentuk. Pada waktu itulah Gus Dur, Marsilam Simanjuntak, Rachman Tolleng, Bondan Gunawan, Daniel Dakidae dan banyak lagi berkumpul merumuskan penolakan terhadap otoriterisme dan sektarianisme. Forum Demokrasi adalah awal dari perlawanan politik.*

Di sini kami juga mulai bersinggungan dengan CSIS dan kelompok Katolik yang juga ikut dalam pendirian Forum Demokrasi. Perlu diketahui bahwa salah satu wakil ketua Forum Demokrasi yang mendampingi Gus Dur adalah Alfons Taryadi dari harian Kompas, yang saya percaya bukanlah representasi dari CSIS. Tetapi pada waktu-waktu itu kontak dengan CSIS mulai terbuka.

Perlu dicatat bahwa di awal tahun 1990-an pamor CSIS mulai redup antara lain karena terjadinya perubahan peta kekuasaan Orde Baru. Meninggalnya Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani, serta tersingkirnya Benny Moerdani, membuat CSIS sedikit agak gamang menghadapi perubahan. Kekhawatiran CSIS akan bahaya sektarianisme membuat orang-orang Katolik melihat Gus Dur sebagai sosok yang menjadi alternatif.

Di sinilah titik temu itu terjadi, "a marriage of convenience". Dari situ pertemuan tercipta dan pada satu kali saya ikut menghadiri acara di gedung CSIS untuk pertama kali, dan ini membuat media agak heboh karena tiba-tiba saya mampir di gedung CSIS. Saya masih ingat berita yang dimuat di Majalah Tempo yang mencatat dengan jeli peristiwa kedatangan saya dan beberapa aktivis lainnya ke gedung CSIS. Dari situlah saya mulai berdialog, terlibat dan mengenal kelompok CSIS sampai pada satu ketika saya diajak untuk bergabung menjadi anggota Dewan Pembina di CSIS."

E. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI KEMBALI BERSEKONGKOL DENGAN CSIS

Megawati melakukan blunder dengan bersedia melakukan pertemuan yang digagas tokoh CSIS Jacob Soetoyo. Partai Nasional Indonesia (PNI) sempat diacak-acak operasi Ali Moertopo.

Yang menarik, seiring munculnya Jacob Soetoyo sebagai 'tokoh' baru di pentas politik saat ini, akankah CSIS kembali mendominasi politik Indonesia seperti zaman Ali Moertopo dulu?

Seperti diketahui, Senin malam (14/4/2014) lalu Megawati-Jokowi menggelar pertemuan bersama beberapa duta besar negara asing, dengan tamu kehormatan Dubes AS, Robert Orris Blake. Pertemuan bertempat di rumah Jacob Soetoyo, mediator sekaligus tokoh kunci yang membawa ketujuh dubes tersebut.

Meski latar belakang Jacob adalah pengusaha, yang menarik adalah hubungannya dengan lembaga wadah pemikiran Center of Strategies and

International Studies (CSIS). Sampai 2005 lalu Jacob adalah anggota Dewan Pengawas CSIS.

Mengapa menarik? CSIS tak mungkin dipisahkan dari sejarah Indonesia, khususnya Indonesia era Orde Baru. Zaman kekuasaan Soeharto itu memang ditandai dengan dominannya lembaga tersebut memengaruhi kebijakan sang pemimpin.

Dominasi CSIS saat itu sebenarnya secara langsung menegaskan posisi Indonesia dalam hubungannya dengan AS. CSIS adalah lembaga di balik beragam kebijakan Orde Baru di masa-masa awal. Sementara, nama CSIS yang didirikan Ali Moertopo, Soedjono Hoemardhani, Duo Wanandi (Sofjan dan Jusuf) serta Harry Chan Silalahi, itu sendiri diambil *copy paste* begitu saja dari lembaga sejenis di AS.

Di AS, CSIS didirikan tahun 1962 oleh David M. Abshire dan Admiral Arleigh Burke, sebagai lembaga think thank anti-Komunis di saat memanasnya perang dingin. Abshire sendiri adalah tokoh terkemuka yang sempat menjadi penasihat politik Presiden Reagan dan dubes AS untuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Di Indonesia, sebagaimana buku terbitan Grup Tempo Media, ‘Rahasia-rahasia Ali Moertopo’, CSIS dibentuk untuk membantu Soeharto menjalankan pemerintahan baru. Soeharto awalnya bahkan mengusulkan lembaga itu masuk struktur pemerintahan. Jusuf dkk memilih mendirikan lembaga ”independen” di luar pemerintah. ”*Agar bebas meneliti dan menyampaikan pendapat,*” kata Jusuf Wanandi dalam buku itu.

Masalahnya, Ali Moertopo tak hanya pemikir. Yang lebih penting dia adalah tokoh intelijen dan politikus yang memiliki peranan penting pada masa-masa awal Orde Baru. Ali tak hanya berperan besar dalam melakukan modernisasi intelijen Indonesia. Ia juga terlibat dalam operasi-operasi intelijen dengan nama Operasi Khusus (Opsus) yang terutama ditujukan untuk memberangus lawan politik pemerintahan Soeharto.

Lihat saja. Pada 1968 Ali menggagas peleburan partai-partai politik menjadi beberapa partai saja agar lebih mudah dikendalikan. Hal itu kemudian terwujud pada 1973 ketika semua partai melebur menjadi tiga partai, Golkar, PPP (penggabungan partai-partai berbasis Islam), dan PDI (penggabungan partai-partai berbasis nasionalis).

Yang monumental, Ali bahkan menerbitkan tulisannya, "Dasar-dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun" yang selanjutnya dijadikan MPR sebagai strategi Pembangunan Jangka Panjang. Malangnya, meski lembaga think-thank, tak jarang publik mengidentikkan CSIS dengan Ali. Saat Ali yang kala itu kepala Opsus ditugaskan melakukan rekayasa politik semacam penggalangan (*conditioning*) dan rekayasa dari atas (*engineering from above*), CSIS pun terbawa-bawa. Karena seringkali rekayasa itu merugikan kelompok Muslim, jadilah CSIS musuh bersama kelompok Muslim Tanah Air.

Bisa dibilang, saat itu Ali selalu dibawa-bawa dalam berbagai 'kekacauan' politik Indonesia, dari Malari sampai Peristiwa Banteng. Kelicinan Ali dan perannya dalam setiap riak politik Indonesia itu sempat membuat atasannya, Yoga Soegomo berkata, "*Selama di Indonesia ini masih ada kekacauan, pasti kamu naik pangkat. Tapi kalau Indonesia sudah tenang, jangan harap kamu naik pangkat*."

Satu hal yang sering dinisbahkan kepada Ali dan CSIS: perusakan partai nasionalis terbesar, PNI. Operasi yang dilakukan Opsus menghasilkan terpilihnya Hadisubeno, menyingkirkan Mr Hardi yang dikenal sebagai pengecam peranan Dwifungsi ABRI dan lebih cenderung pro Bung Karno.

Rekayasa itu diikuti utak-atik terhadap partai kecil IPKI dari kelompok nasionalis lainnya, sehingga kongres tahunan pada bulan Mei 1970 menghasilkan pimpinan yang pro-pemerintah.

"*Jangan sekali-kali melupakan sejarah*," kata Bung Karno. Megawati pun seringkali mengutip perkataan ayahnya itu. Sayang sekali, sepertinya ia lupa kata-katanya sendiri.

E. SOFJAN WANANDI SIAPKAN RP. 2 TRILYUN SUKSESKAN JUSUF KALLA SEBAGAI CAWAPRES DARI PDIP

Jusuf Kalla digadang-gadang jadi calon wakil presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Siapapun capres yang diusung PDIP tak jadi soal. Yang penting, JK, panggilan akrab Jusuf Kalla, jadi cawapresnya. Duet Mega-JK atau Jokowi-JK harus yang diusung.

Berkembang informasi kelompok Sofjan Wanandi yang menargetkan JK untuk bisa berduet dengan Megawati atau Jokowi pada pilpres 2014. Untuk menggolkan target tersebut, Sofjan yang bos Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bekerja tidak sendirian. Marie Elka Pangestu dari CSIS yang kini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ikut bekerja bersamanya.

Kabarnya, kubu Sofjan-Mari Pangestu diam-diam menyiapkan dana bagi duet Megawati-JK atau Jokowi-JK Rp 2 triliun. Megawati atau Jokowi

bakal “klepek-klepek dan terpesona” dengan dana sebesar itu. Duet Mega-JK atau Jokowi-JK pun mereka yakini bakal diusung PDIP.

Tentu semua maklum dan mahfum bahwa tak ada makan siang gratis dalam mengajukan capres-cawapres. Kalau manuver tersebut benar adanya, maka keyakinan bahwa akan ada cukong atau bandar pemodal kakap di balik pencapresan Jokowi dari PDIP, juga jadi benar adanya.

Pertanyaannya, kenapa harus JK? Popularitas JK dianggap cocok untuk mendampingi Mega atau Jokowi, ketimbang menduetkan keduanya dengan Aburizal Bakrie atau capres lainnya.

Jika kabar ini benar, hal ini menimbulkan resistensi sosial politik dari kalangan Muslim di Jawa dan luar Jawa, sebab itu isu sangat sensitif. Kelompok pedagang Tionghoa di APINDO pimpinan Sofjan Wanandi dengan CSIS-nya masih jadi ”momok politik-ekonomi” bagi golongan Islam di Indonesia yang mayoritas NU, Muhammadiyah dan kelompok lainnya,” kata pengajar UIN Jakarta Nanang Tahqiq MA, mantan aktivis ITB Ir Abdulrachim dan Andar Nubowo, Direktur IndoStrategi.

Politisi Golkar, PDIP dan PKPI yang enggan diseubut namanya menyingkapkan, duet Jokow-JK sudah disepakati konglomerat APINDO/CSIS/Kompas dan mau diumumkan pekan ini. ”*Dan, isu itu sudah jadi momok bagi masyarakat politik dan publik, juga kalangan santeri dan abangan*,” kata Andar Nubowo, inteligensia Muslim modernis, yang juga dosen UIN Jakarta.

Dan selebihnya manuver Jokowi ke parpol apapun hanya basa-basi politik rendahan, dan pamor Megawati pun jatuh, tak berharga lagi. Megawati jadi

dagangan politik di tengah kesendirian dan kesepiannya karena dikepung pedagang politik dan broker politik tanpa ada lagi Taufiq Kiemas sebagai kekuatan penyangga.

Alumnus Perancis Andar Nubowo dalam berbagai diskusi di Jakarta menyingkapkan, kalau Jokowi berduet dengan Jusuf Kalla, maka Megawati dikangkangi, Jokowi dikadali dan malah keduanya jadi ”kambing congek-nya JK, sebab yang menjadi the real president adalah Jusuf Kalla. PDIP bakal bablas ke laut. Megawati bakal jadi dagangan JK dan Jokowi jadi anak bawang belaka. Pengalaman era SBY menunjukkan, JK mampu melipat habis SBY dan menjadi gurita bisnis yang merajalela.Demikian pandangan para aktivis GMNI dan HMI yang mendukung Jokowi, namun sangat miris dan ngeri melihat sepak terjang bisnis konglomerasi JK.

Frans Aba MA, alumnus GMNI dan Umar Hamdani, alumnus HMI, menilai, JK bakal jadi the real president dan Jokowi maupun Megawati cuma jadi ”ornamen demokrasi”, istilah lain kambing congek demokrasi yang kini populer di kalangan anak muda. ”JK bakal mendominasi, dan Jokowi jadi tak berarti, sedangkan PDIP bakal kehilangan segalanya karena pragmatisme JK sebagai pedagang,” kata kedua aktivis itu.

SBY yang jenderal dan Doktor saja dikangkangi Jusuf Kalla, apalagi Jokwo yang masih ingusan itu. ”*Jokowi di mata JK dianggap anak ingusan dan politisi kemarin sore yang harus dibimbing, aje gile*,” ujar Umar.

Setelah berpisah dengan SBY, media melihat M. Jusuf Kalla merapat ke Megawati Soekarnoputri, sebagaimana laporan majalah Tempo beberapa waktu silam. Namun PDIP dan Megawati belum lupa bahwa ditendangnya

Jusuf Kalla oleh SBY untuk tak jadi wapres lagi pada pilpres 2009 untuk sebagian akibat dominasi bisnis JK dan oligarkinya serta kelompok Golkar dengan KKN-nya yang akut, sebagian juga akibat kedekatan Jusuf Kalla dengan Sofjan Wanandi (Liem Bian Koen), Ketua APINDO yang merupakan organisasi lobi para pengusaha Tionghoa.

Kedekatan JK dan Sofjan Wanandi juga meresahkan kalangan kelas menengah Muslim kota dan kaum santeri desa secara umum. Bahkan menimbulkan kecurigaan bahwa JK dan Soyan Wanandi adalah semacam hopeng dalam ekonomi-politik yang membuat golongan Muslim Jawa sangat curiga atas maksud-maksud ekonomi-politik keduanya. ”*Hal itu mencemaskan atau menimbulkan prasangka di kalangan Muslim yang trauma dengan politik CSIS di masa lalu*,” kata M Ridwan, aktivis HMI. ”*JK menakutkan kalangan PDIP karena bisnisnya menggurita*,” kata seorang aktivis GMNI yang enggan disebut namanya.

Megawati dan PDIP masih cemas dan curiga kalau menarik JK sebagai calon wapres Mega atau Jokowi, maka akan membuat bisnis JK menggulung kepentingan PDIP sendiri, sementara sejumlah pengusaha menengah PDIP jelas tak bisa mengimbangi JK dan Sofjan Wanandi (APINDO). Sofjan Wanandi (Liem Bian Khoen) dulu orang Golkar/CSIS dan Sekutu Cendana yang kemudian melawan Soeharto pada tahun-tahun terakhirnya.

Bisnis JK memang sangat besar di Indonesia Timur, dan sudah lama bergerak ke ibukota. Suripto, Tokoh PKS, di masa SBY-JK 2004-2009 sering mengeluh bahwa binis JK merajalela dan mengkhawatirkan Cikeas dan koalisi politiknya, meski SBY nampak menahan diri dan seolah diam. Namun SBY tidaklah pasif, melainkan mencari masukan dari berbagai

kalangan soal sepak terjang bisnis JK, sampai akhirnya harus menyingkirkannya pada pilpres 2009.

Sumber-sumber di kalangan akademisi UI dan UGM menyebutkan, SBY mendapat ‘’masukan’’ dari dalam negeri dan juga Amerika Serikat agar menendang Jusuf Kalla karena alasan-alasan tersebut.

Selain itu, selama hampir 4 tahun SBY-JK menutup-nutupi adanya dana dari Aburizal Bakrie masuk ke kas kampanye Pilpres 2004, akhirnya Tempo dengan berani mengungkap fakta bahwa Aburizal Bakrie berkontribusi dalam menyumbang dana kampanye SBY-JK. Dan kurang ajarnya, laporan dana kampanye SBY-JK jelas-jelas tidak mencantumkan nama Aburizal Bakrie. Aburizal Bakriepun berusaha mengelak tuduhan tersebut dan menggugat Tempo. Tapi, karena kekuatan informasi Tempo, akhirnya Wapres Jusuf Kalla pada bulan Desember 2008 mengakui bahwa Aburizal Bakrie menyumbang kepada SBY-JK. Dan akhirnya Bakrie harus mengakui kekalahan dalam gugatannya ke majalah ‘’Tempo’’ tahun-tahun era SBY-JK. Publik sangat berterimakasih dan memberi Selamat kepada ‘’Tempo’’, meski tidak digembar-gemborkan Tempo.

Semua itu jadi kasus-kasus bermasalah SBY-JK. Terkait sumbangsih Aburizal Bakrie pada pemenangan pilpres 2004, maka SBY juga manusia artinya penunjukan Aburizal Bakrie sebagai Menko Ekonomi (pada awal jabatan) sarat politis dibanding kapabilitasnya. Meskipun terlibat dalam semburan lumpur lapindo, Aburizal Bakrie tetap dipertahankan duduk di Kabinet dan di-reshuffle menjadi Menko Kesra. Hal ini sangat berbeda pada perlakuan yang diberikan menteri lain, misalnya Yusril Ihza Mahendra yang dipecat karena dugaan kasus pidana. Tampaknya SBY-JK menerapkan standar ganda. Sangat ironis, bukan?

Bukti persengkokolan SBY-JK-Ical semakin menguat tatkala SBY lamban dan tidak tegas menyikapi tunggakan royalti yang dilakukan oleh sebagian perusaahan milik keluarga Bakrie. Selain menunggakan royalti, perusahaan milik Bakrie dan pengusaha lain, jelas-jelas tindakan penunggakan royalti SDA merupakan pelecehan UU di negeri ini yang sengaja dipelihara oleh SBY-JK. Belum tuntas masalah royalti, SBY-JK kembali terlibat dalam skandal suspensi saham BUMI Resources (saham milik Aburizal Bakrie) dengan motif melindungi usaha Bakrie lantaran Bakrie adalah penyumbang dana kampanye SBY yang awalnya ditutup-tutupi oleh mereka-mereka. Cukup sudah dugaan bahwa pola kepemimpinan SBY-JK saat ini tidak jauh berbeda dengan era Soeharto. Jika era Soeharto KKN terjadi dalam lingkaran dalam (keluarga dan kroninya) sedangkan penguasa (kecil) di daerah tidak berani melakukan korupsi serta tidak ada penanganan kasus korupsi. Maka di era reformasi, korupsi merajela dari level paling bawah hingga ke istana. Bedanya adalah SBY memberangus korupsi kelas teri, sedangkan kelas kakap yakni korupsi institusi dan kebijakan tidak tersentuh oleh niat pemerintah.

Kini berbagai kalangan mengintai JK yang merapat ke Megawati, mengintai JK-Sofjan Wanandi dengan kekuatan bisnis mereka. Namun PDIP Juga mengintai siapa memanfaatkan siapa, dan PDIP tidaklah bodoh, sehingga hati-hati dan waspada dengan JK dan Sofjan Wanandi sebab sosok seperti Jokowi dan Megawati jika jadi presiden pasti digulung JK-Sofjan jika JK berduet dengan Mega atau Jokowi. ”*Itulah masalahnya, jadi PDIP pun wait and see saja, tidak akan mampu mengimbangi JK-Sofjan, sebab SBY saja kewalahan*,” kata Hatta Taliwang, mantan anggota DPR-RI dan pemerhati ekonomi politik.

KONYOL, NASDEM TERNYATA USUNG JK

Konyol, Surya Paloh membuka tabir pertemuan dirinya dengan petinggi PDI Perjuangan kemarin. Pendiri Nasdem itu menyodorkan nama Jusuf Kalla untuk "ditangkap" rekan ideologisnya, PDI Perjuangan.

Kepastian peta politik pasca pemilu legislatif itu sudah mengudara beberapa jam sebelum pertemuan Surya dengan dua pejabat teras partai banteng, Tjahjo Kumolo dan Hasto Kristiyanto, di kantor Nasdem, kemarin.

Seorang sahabat lama Surya Paloh menyayangkan langkah itu. Alasannya masuk akal. Kawan lama itu mengetahui betul bagaimana bos Media Group itu bekerja keras membangun Nasdem, dari bentuk ormas menjadi partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu.

Perjuangan politik kebangsaan Surya Paloh dilakukan bukan dengan mudah. Boleh dikatakan, uang, tenaga dan batin dikerahkan Paloh untuk membangun Nasdem dan memajukannya sebagai peserta pemilu.

Kini, kekaguman publik dan para analis politik terhadap Partai Nasdem terbukti pada 9 April. Hasil hitung cepat menunjukkan Nasdem mencapai 6,5 – 7 persen suara nasional. Sebagai kelompok politik umurnya kurang dari lima tahun. Prestasi gemilang itu boleh dikatakan berasal dari satu kepala Surya Paloh, tanpa mengurangi hormat pada pendekar Nasdem lainnya seperti Rio Capella dan Ferry M. Baldan.

Kembali ke sahabat Surya Paloh. Dengan nada sesak, politisi senior itu mengaku sedih dan tidak mampu memahami, bagaimana mungkin Surya

mau menyerahkan semua hasil jerih payah itu kepada orang lain yang belum tentu mampu menerjemahkan ideologi politiknya ke tengah rakyat. Orang itu adalah Jusuf Kalla. Konyol bahwa Paloh usung JK untuk dipasangkan dengan Jokowi, dengan cukong APINDO/Sofjan Wanandi/APINDO/CSIS/Kelompok Katolik Politik/Keturunan Tionghoa . Hal ini menimbulkan resistensi sosial politik ari kalangan Muslim di Jawa dan luar Jawa, sebab itu isu sangat sensitif.

Mungkinkah Surya telah memaafkan segala sejarah “pengkhianatan” JK? Mungkin saja. Namun, menyia-nyiakan kesempatan emas untuk mengaktualisasikan ideologi dan semangat kebangsaan setelah perjuangan yang begitu melelahkan? Itulah yang tidak masuk akal.

Surya Paloh adalah pengagum Soekarno tulen. Surya sudah lama menjalin hubungan dekat dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Mereka begitu dekat secara ideologi. Seharusnya sangat mudah bagi Surya untuk menawarkan dirinya menjadi calon wakil presiden bagi Jokowi. Diyakini, Mega tak mungkin menolak.

Mengapa Surya melepaskan semua hasil jerih payah itu kepada JK? Perjanjian kedua tokoh itu masih menjadi misteri. Namun, yang pasti sosok JK akan lebih banyak menuai resistensi.

Di pihak PDIP, nama JK dipastikan membuat kegemparan politik yang hampir sama dengan ketika Mega memutuskan Jokowi menjadi capres.

Riak-riak perlawanan dari para Soekarnois dan pengurus akar rumput PDIP pasti akan terjadi. JK adalah lawan politik PDIP ketika PDIP menjadi oposisi di periode pertama pemerintahan SBY (2004-2009). Kala itu, JK

menjabat Wakil Presiden RI.

Ada keraguan JK tidak akan dapat memahami dan mengimplementasikan prinsip Tri Sakti ala Bung Karno. JK dikenal sebagai pengusaha yang menyerahkan urusan perekonomian ke pasar bebas (neoliberal). Sebagai penjabat Wakil Presiden 2004-2009, JK termasuk bertentangan dengan PDIP dalam soal subsidi BBM.

F. MAHAR JK CAWAPRES JK DARI SOFJAN WANANDI

Sesepuh dan pendiri PDIP, Sabam Sirait menolak sosok Jusuf Kalla (JK) menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi calon presiden dari PDI-P, Nasdem dan PKB, Jokowi dalam pilpres 2014. Tidak hanya itu, Sabam Sirait bahkan menyatakan dengan tegas bahwa dia juga akan menolak PDIP koalisi dengan Partai Golkar

"*PDIP tidak boleh memulai kesalahan dengan mempercayai Golkar sebagai bagian dari koalisi, kalau PDIP berkoalisi dengan Golkar atau menjadikan JK menjadi cawapres, maka saya akan mundur dari PDIP, karena PDIP melupakan sejarah penindasan orde baru dan Bung Karno yang meninggal dalam tahanan orde baru,*" ujar Sabam dalam rilis yang diterima Minggu (18/5).

Menurut Sabam, selayaknya PDIP tidak menjadikan uang sebagai tolak ukur dalam memilih cawapres.

"*Saya mendengar JK menyiapkan Rp10 triliun untuk membiayai pilpres jika dia jadi cawapres, saya mengingatkan PDIP agar tidak tergiur dengan iming-iming uang, karena PDIP berkomitmen membangun politik*

tanpa money politic, dan saya mengingatkan kembali bahwa PDI Perjuangan didirikan untuk tidak diperjual belikan," kata Sabam.

Menurut Sabam, menentukan koalisi dan cawapres tidak karena uang yang ditawarkan, tetapi lebih mempertimbangkan kepentingan nasib 260 juta jiwa rakyat indonesia, 17 ribu pulau dan masa depan bangsa.

"*Bagi saya hanya ada dua pilihan untuk cawapres Mahfud atau Abraham Samad. Keduanya merupakan orang-orang bersih, jujur dan bisa dipercaya untuk mendampingi Jokowi*," tegas Sabam.

"*Rencana pengunduran ini sudah saya bicarakan juga dengan pendiri PDI-P yang lain dan teman teman di Parkindo. Saya akan mencari kesempatan untuk menyampaikan kepada ketua umum*," pungkasnya.

http://m.aktual.co/politik/145901usung-jk-cawapres-jokowi-sabam-sirait-ancam-mundur-dari-pdip

G. FOTO SOFJAN WANANDI DAN JUSUF KALLA DI AMERIKA SERIKAT

JK dan Sofjan Wanandi di Amerika Serikat

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dan calon wakil Presiden Jusuf Kalla sedang berada di Amerika Serikat.

Seperti diberitakan sebelumnya keduanya tengah melakukan pertemuan penting dengan pejabat tinggi negara yang dipimpin Presiden Barack Obama tersebut.

Pembicaraan tersebut menurut sumber Aktual.co sangat terkait dengan komposisi jabatan Menteri di kabinet Joko Widodo-JK jika keduanya dilantik setalah ada keputusan tetap oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemenang pemilu."*Pembicaraan itu yang penting bukan Pak JK tapi orang yang bersama Pak JK*," ujarnya.

Sosok penting yang disebut akan berperan banyak dalam negosiasi dengan Amerika Serikat tersebut enggan diungkapkan oleh politisi partai banteng yang enggan disebut namanya tersebut. Namun Aktual.co mendapatkan foto eksklusif saat JK berada di Amerika tersebut.

Tampak dalam foto tersebut pengusaha Sofjan Wanandi dalam rombongan. Tampak juga istri JK, Mufidah Jusuf Kalla. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memang dikenal dekat dengan JK sejak masih mahasiswa. Kesetiaan Sofjan kepada JK dibuktikan dengan memberikan dukungan setiap kali JK mencalonkan diri dalam pemilu.

http://www.aktual.co/politik/220718inilah-foto-jk-dan-sofjan-wanandi-di-amerika-serikat

H. AM. HENDROPRIYONO PENASEHAT TIM TRANSISI JOKOWI-JUSUF KALLA

Siapa bilang AM Hendropriyono tidak memiliki pengaruh dan kekuatan di internal Tentara Nasional Indonesia (TNI)? Hal itu dibantah oleh peneliti Center For Democracy and Sosial Justice Studies (CeDSoS), Umar Abduh.

Ia menegaskan, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang kini jadi pengarah pemenangan Jokowi-JJJK itu "menanam" menantunya, Brigjen TNI Andika Perkasa (Kadispen TNI AD) untuk melakukan operasi politik dan pesanan asing. Isu ini sebetulnya sudah lama beredar.

Informasi yang diperoleh Rakyat Merdeka Online, nama Hendropriyono sudah muncul sejak beredar kabar KSAD Jenderal TNI Budiman mencari jalan untuk bisa bertemu Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Budiman menggunakan jasa Hendropriyono dan kerabat mantan Kepala BIN tersebut yang saat ini menjabat di jajaran TNI AD. Hendropriyono memang dikenal dekat Mega. Permohonan Jenderal Budiman untuk bisa bertemu Megawati tersebut akhirnya dikabulkan. Pertemuan konon telah dilaksanakan hari Kamis, 15 Mei 2014 yang lalu.

Hari ini, manuver lain Hendropriyono dijelaskan panjang lebar oleh Umar Abduh kepada wartawan di restoran Dapur Selera, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (10/9).

Nama Hendropriyono juga identik dengan tragedi pembantaian Talangsari Lampung dan misteri pembunuhan aktivis HAM, Munir. Umar Abduh

yakin, sebagai mertua, Hendropriyono pasti punya pengaruh kepada Andika Perkasa yang sudah dekat dengannya sejak ia masih menjabat sebagai Kepala BIN dan Andika Perkasa menjabat sebagai Danrem Sibolga berpangkat mayor.

Pengaruh Hendropriyono terindikasi dengan pernyataan Brigjen Andika Perkasa yang bermanuver di Pilpres dan bertentangan dengan pernyataan Panglima Jenderal Moeldoko dalam isu keberpihakan Babinsa.

Hendro dan Andika sengaja memainkan isu Babinsa dan melawan pernyataan Panglima TNI hanya untuk menjatuhkan citra Capres lain, Letjen (Purn) Prabowo Subianto.

Sejak dulu, Umar Abduh menilai, Hendropriyono dan segala manuvernya dapat mengancam kedaulatan Indonesia. Begitupula dengan menantunya. Andika yang kerap memanfaatkan isu terorisme untuk kepentingan asing, dan kini melawan Panglima TNI.

Soal isu Babinsa itu, ilmuwan politik, Muhammad AS Hikam, menyesali tidak kompaknya pernyataan Panglima TNI yang menolak tudingan penggunaan Babinsa untuk mobilisasi dukungan bagi capres tertentu, dengan pernyataan Kadispen AD sendiri. TNI AD terkesan mengamini tudingan tersebut dan bahkan telah menjatuhkan sanksi disiplin kepada dua anggotanya.

"*Panglima TNI Jenderal Moeldoko benar ketika Beliau kemudian mengambil alih masalah isu Babinsa tersebut dan menyatakan bertanggungjawab*," kata Hikam.

"*Tindakan disiplin harusnya dilakukan kepada oknum petinggi TNI AD, sehingga tidak muncul disharmoni*," tegasnya.

Hendropriyono semakin tenar belakangan ini karena tanpa alasan jelas menyerang Prabowo Subianto dengan menyebutnya sebagai prajurit TNI "psikopat mendekati gila". Pernyataannya itu dikritik oleh banyak kalangan karena tidak etis. Apalagi mereka sesama mantan petinggi TNI.

"*Kita punya Sapta Marga, Sumpah Prajurit. Apalagi, sebagai prajurit komando punya Janji Prajurit. Janganlah karena 'aku kan sudah sipil', lalu berkata seperti itu*," kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo.

Bicara soal pelanggaran HAM, kalau selama ini selalu Prabowo yang jadi incaran publik, Hendropriyono pun punya cacat dalam kasus Talangsari dan dugaan keterlibatan dalam kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir.

Dalam perkara Talangsari, mantan Menkopolkam (almarhum) Sudomo yang pernah diperiksa Komnas HAM mengakui bahwa saat itu yang bertanggung jawab di lapangan adalah Komandan Korem yang dijabat Hendropriyono.

"*Yang mengetahui itu Koramil, Korem, Kodam, KSAD, dan Panglima. Itu urutan pertanggungjawabannya, bukan hanya di sini (pusat) tapi di sana (daerah). Yang pertama tahu Korem. Saya sifatnya berkoordinasi sebagai Menkopolkam*," ujar Sudomo dikutip dari laman berita Detik.Com, 27 Februari 2008.

Menurut Sudomo, saat peristiwa itu terjadi tidak langsung dibentuk tim investigasi untuk melakukan tindakan. Hal itulah yang menjadi kesulitan.

Surat Terbuka Anak Wiji Thukul Terkait Hendropriyono

Keputusan Jokowi menunjuk mantan kepala BIN, AM Hendropriyono sebagai penasihat Tim Transisi yang mendapat sorotan para pendukung capres nomor urut 2 tersebut. Salah satu kritikan berasal dari putri aktivis Widji Thukul, Fitri Nganthi Wani. Melalui akun Facebook resminya, ia mengingatkan Jokowi untuk tidak lupa terhadap janji semasa kampanye.

Fitri mengungkit kematian aktivis Munir sebagaimana nasibnya serupa dengan, Widji Tukul. Ketika itu, Munir meninggal dalam pesawat yang membawanya ke Amsterdam. Anggota BIN disebut ada di balik kejadian itu, dan Hendropriyono adalah kepala BIN saat Munir tewas diracun.

Berikut surat terbuka Fitri kepada Jokowi.

Masih ingat ini kan Pak? :’)
Bapak sendiri lho yg bilang #JokowiMenolakLupa.

Ketika semua orang bikin avatar "I Stand On The Rights Side", sy lebih suka bikin avatar dengan tulisan "I Am On The Human Right Side And I Stand With Joko Widodo"
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203265044325607&set=pb.1194406735.-2207520000.1407694363.&type=3&theater).

Bapak ngerti kan maksud sy? Melawan lupa tidak jauh2 dari melawan luka, pak. Dan itu harus tanpa perkecualian. Bisa dipahami kan pak?

Revolusi mental sebuah negara dimulai dari menghargai nyawa rakyatnya meskipun cuma 1 nyawa, pak. Jika bapak ingat bapak saya, jika bapak memakai puisi bapak saya untuk melawan puisi kubu Prahara, tolong ingat Alm.Munir juga pak. Alm.Munir juga punya jasa besar dalam perkembangan kasus bapak saya. Dan dia dibunuh! Dibunuh karena memperjuangkan hak asasi manusia, termasuk hak asasi bapak saya. Bapak tau juga kan siapa pembunuhnya? Bapak tau kan bagaimana negara menyepelekan kasusnya?

Hindari budaya perkewuh dan tak berdaya karena pernah dibantu orang pak. Jadilah objektif pak. Sensitiflah terhadap mereka yg berpotensi punya lidah penjilat dan membahayakan diri bapak. Sy tau bapak masih bisa diandalkan. Sy tau bapak masih bisa kami cintai. Karena bapak hanyalah satu2nya, berbeda dgn yg lain.. :')

Saya harap ini hanya ujian yang mengasah keimanan bapak. Dan semoga ujian ini cepat berlalu karena melihat bapak seperti ini kami turut tersakiti.

Di tanganmu ada harapan kami, jangan remukkan itu.

Salam Ingatan.
cc: Ir H Joko Widodo, Joko Widodo, Eko Sulistyo
Saya berdialog dengan Dionisius Utomo Rahardjo, ayah dari Petrus Bima Anugrah, dan Fitri Nganthi Wani, putri sulung Wiji Thukul. Kedua keluarga mereka adalah aktivis yang hilang tahun 1998.

Mereka menolak untuk lupa dan mengharapkan pelanggaran HAM dapat dituntaskan di Indonesia.

#Salam2Jari #JokowiMenolakLupa

Reaksi Suciwati Munir terkait Hendropriyono

"*Pagi @jokowi_do2 @Pak_JK kami sudah 8 tahun berdiri aksi diam Kamisan di depan istana untuk mencari keadilan kenapa pelakunya anda angkat jadi penasehat*?"

Itu kicauan perempuan aktivis penegakan hak asasi manusia, Suciwati, di twitter tadi pagi. Istri dari tokoh anti pelanggaran HAM, Munir Said Thalib, itu kembali dikecewakan oleh permainan politik.

Kekecewaan Suciwati terhadap Joko Widodo dan Jusuf Kalla "meluap" setelah mantan Kepala Badan Intelijen Negara, A.M Hendropriyono, diputuskan sebagai salah satu penasihat Tim Transisi yang salah satu tugasnya membuat proyeksi susunan kabinet.

"*Apakah Anda tidak cukup pede (percaya diri) untuk menjadi presiden dan wapres jika tidak bersama pelaku pelanggar HAM? Apakah agenda HAM selalau dikorbankan untuk kpentingan yang sesaat sementara ini adalah hal yang paling mendasar*?" tulis Suciwati beberapa hari lalu.

Wajar jika Suciwati tajam menyindir. Selain terlibat dalam kasus pelanggaran HAM Peristiwa Talangsari di Lampung di tahun 1989, Hendropriyono pun diduga kuat merupakan salah satu aktor utama dalam kasus pembunuhan suaminya pada tahun 2004.

Aktivis politik yang terlibat dalam gerakan pemilu bersih, Ray Rangkuti, juga menyatakan nada protes serupa dengan rekan-rekannya yang lain.

"*Bukankah Jokowi mendapat simpati justru karena dinilai tidak memiliki catatan buruk soal HAM baik di masa lalu maupun sekarang*?" ujar Ray.

Masih di ranah dunia maya, beredar petisi bikinan "Masyarakat Indonesia yang Peduli di Dalam dan di Luar Negeri". Petisi itu bertajuk "Tolak Keterlibatan A.M. Hendropriyono dalam Pemerintahan Jokowi-JK 2014-2019 dan Rombak Ulang Tim Transisi". Sampai saat ini, sudah lebih dari 1.500 tanda tangan terkumpul lewat media maya.

Di masa Pilpres 2014 lalu, Hendropriyono cukup menonjol dalam pemberitaan media massa. Dia salah satu tokoh utama Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK.

Bahkan, purnawirawan bintang empat itu mendapat tempat yang baik di hati para pendukung Jokowi-JK. Hendropriyono semakin "dicintai" setelah pasang badan menyerang Prabowo Subianto dengan menyebutnya sebagai prajurit TNI "psikopat mendekati gila".

Informasi yang diperoleh Rakyat Merdeka Online, nama Hendropriyono sudah muncul sejak beredar kabar KSAD Jenderal TNI Budiman mencari jalan untuk bisa bertemu Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, dan sukses terlaksana. Namun kabar ini sudah dibantah oleh Budiman sendiri.

Hendropriyono juga diduga punya pengaruh kepada menantunya yang masih dinas militer aktif, Brigjen TNI Andika Perkasa yang sudah dekat dengannya sejak ia masih menjabat sebagai Kepala BIN dan Andika Perkasa menjabat sebagai Danrem Sibolga berpangkat mayor.

Pengaruh Hendropriyono terindikasi dengan pernyataan Brigjen Andika Perkasa yang bermanuver di Pilpres dan bertentangan dengan pernyataan Panglima TNI Jenderal Moedoko dalam isu keberpihakan Babinsa.

I. JOKOWI DIKELILINGI FUNDAMENTALIS KATOLIK

Tentu banyak yang terperangah ketika Jacob Soetoyo bisa mempertemukan beberapa duta besar negara-negara 'hiu' dengan Jokowi dan Megawati. Siapa sebenarnya Jacob Soetoyo?

Jacob memang lebih dikenal sebagai pengusaha. Tapi, dalam konteks menjadi fasilitator pertemuan Jokowi-Mega dengan para duta besar tersebut, tentu kapasitasnya sebagai bagian dari CSIS [Centre for Strategic and International Studies]. Sudah banyak yang tahu bahwa CSIS merupakan lembaga pemikir Orde Baru yang memberikan masukan strategi ekonomi dan politik pada Soeharto. Tapi, yang belum banyak diketahui adalah hubungan CSIS dengan organisasi fundamentalis Katolik bernama Kasebul [kaderisasi sebulan] yang didirikan oleh Pater Beek, SJ. Tentang apa dan bagaimana Kasebul itu, silakan baca tulisan saya di sini: http://tikusmerah.com/?p=1056

Pada awalnya, Kasebul didirikan untuk memerangi komunisme. Setelah komunisme [PKI] dihancurkan oleh Soeharto, tujuan Kasebul beralih melawan dominasi Islam. Pater Beek, seorang rohoniawan Jesuit kelahiran Belanda, melihat bahwa setelah komunis tumpas ada lesser evil [setan kecil], yaitu: Islam. Untuk menghancurkan setan kecil tersebut, Pater Beek menganjurkan kaum fundamentalis Katolik dalam Kasebul bekersama sama dengan Angkatan Darat.

Selain itu, guna menghadapi ancaman Islam perlu dibentuk lembaga pemikir yang bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Maka kemudian dibentuklah CSIS. Pater Beek mempunyai pemikiran sebagaimana diungkapkan Ricard Tanter:

"*Visi [Pater] Beek pibadi atas peran Gereja, Gereja harus berperan dalam mengatur negara kemudian mengalokasikan orang-orang yang tepat untuk bekerja di dalam dan melalui negara*."

Atas visi tersebut maka tugas dibebankan pada CSIS. Lembaga ini menurut Daniel Dhakidae merupakan penggabungan antara politisi dan cendekiawan Katolik dengan Angkatan Darat. Lembaga inilah yang kemudian memasok dan menjaga agar Orde Baru menerapkan negara organik versi gereja pra konsili Vatikan II.[2]

Siapa sosok yang berperan dalam pendirian CSIS? Sosok tersebut adalah Ali Moertopo. Selama ini dikenal sebagai kepercayaan Soeharto, tapi kedekatannya dengan Pater Beek belum banyak terungkap Ali pertamakali bekerjasama dengan Pater Beek dalam operasi pembebasan Irian Barat. Berdasarkan catatan Ken Comboy, saat itu tugas Ali sebagai perwira intelijen.[3] Pada saat yang bersamaan, Pater Beek juga berada di Irian Barat. Ia menyamar sebagai guru. Tugas sebenarnya dari Pater Beek adalah menjaga agar proses pembebasan Irian Barat tetap menguntungkan kepentingan Amerika. Tugas ini berhasil. Sebagaimana kita ketahui, sampai saat ini Freeport masih menguasai tambang emas di Papua.

Setelah CSIS berhasil dibentuk oleh Ali Moertopo, tugas pelaksana harian diserahkan pada 3 kader Kasebul: Jusuf dan Sofian Wanandi serta Harry Tjan Silalahi. Menurut Mujiburrahman, Jusuf dan Sofian Wanandi

merupakan kader utama Kasebul yang dididik Pater Beek. Sewaktu mahasiswa dan pergolakan politik tahun 1965, keduanya menjadi bagian penting dari PMKRI [Pergerakan Mahasiswa Katolik Indonesia]. Sedangkan Harry Tjan Silalahi kader Kasebul yang ditempatkan di Partai Katolik sebagai sekretaris jenderal. Tiga orang inilah yang hingga sekarang menahkodai CSIS. Lewat lembaga inilah kebijakan anti Islam dijalankan.

Pater Beek memang piawai dalam usaha menghancurkan Islam. Ia tidak hanya memakai orang Katolik seperti Jusuf Wanandi dan Harry Tjan untuk melakukannya, tapi juga memakai orang Islam sendiri. Ali Moertopo, misalnya, ia tumbuh dari keluarga santri, tetapi lewat CSIS dan Operasi Khususnya justru mengobok-obok Islam. Sebut nama lain seperti Daoed Joesoef. Ia seorang muslim asal Sumatera Timur, tapi berhasil digunakan oleh Pater Beek untuk membuat kebijakan yang merugikan umat Islam. Sewaktu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ia melarang sekolah libur pada hari Ramadhan dan siswi yang beragama Islam dilarang menggunakan jilbab.

Bahkan tidak hanya itu. Kader Pater Beek dalam Kasebul juga dilatih menyusup dengan pindah agama menjadi Islam. Sebut saja Ajianto Dwi Nugroho. Sewaktu masih mahasiswa di Fisipol UGM ia berpacaran dengan mahasiswa IKIP Yogyakarta [sekarang UNY] yang berjilbab. Sekarang ia menikah dengan janda beranak satu yang beragama Islam. Dan, Ajianto saat ini mempunyai KTP yang mencantumkan agamanya adalah Islam. Ajianto merupakan kader Kasebul generasi baru yang masuk dalam lingkaran jasmev pada era Pilkada DKI untuk memenangkan Jokowi. Sekarang ia bergabung dalam lingkaran PartaiSocmed dengan target menjadikan Jokowi sebagai presiden. Itulah kehebatan kader-kader Kasebul dalam menjalankan misinya.

Nah, kenapa tiba-tiba Jacob Soetoyo muncul? Tentu saja ini berkaitan dengan persaingan para cukong di lingkaran Jokowi sendiri. Sudah banyak diketahui, James Riyadi telah mendukung Jokowi sejak awal. Selain dikenal sebagai pengusaha papan atas, yang belum banyak diketahui, ia adalah pemeluk fundamentalis Kristen. Ia dikenal sebagai pemeluk Kristen Evangelis. Di Amerika, aliran ini dikenal radikal dan fundamentalis. Salah satu pengikutnya adalah adalah keluarga Bush. Sikap anti Islamnya sudah mendarah daging. Ketika menjadi presiden, George W. Bush memerintahkan pasukannya untuk membantai ratusan ribu umat Islam di Afghanistan dan Irak. Inilah yang dianggap sebagai ancaman oleh fundementalis Katolik dalam lingkaran CSIS. Apalagi James Riyadi secara atraktif lewat familinya, Taher, mendatangkan Bill Gates ke Indonesia dengan tujuan agar seolah-olah Jokowi mendapatkan dukungan dari pengusaha papan atas Amerika Serikat.

Sudah menjadi rahasia umum, walaupun sama-sama memusuhi Islam, antara fundamentalis Katolik dan fundamentalis Kristen terjadi permusuhan yang sengit [pandangan mereka yang Islamphobia tentu saja tak mewakili pandangan mayoritas umat Nasrani di Indonesia yang sebagian besar menghargai toleransi]. Melihat manuver James Riyadi yang sudah dianggap kelewatan, maka turun tangalah Jacob mewakili lingkaran CSIS. Rupanya James melupakan bahwa ada dua jaringan di Indonesia yang mempunyai hubungan kuat dengan Amerika Serikat: CSIS dan PSI [Partai Sosialis Indonesia]. Jaringan CSIS pun unjuk taring. Tidak tangung-tangung mereka mengumpulkan duta besar dari negara berpengaruh antara lain: Amerika Serikat, China dan Vatikan. Begitu kuatnya pengaruh CSIS sampai-sampai duta-duta besar tersebut mau berkumpul di rumah Jacob yang tidak dikenal sebelumnya. Saking berpengaruhnya pula, Megawati, seorang mantan Presiden RI, bersedia

mengikuti skenario CSIS. Di sinilah perang di antara cukong-cukong pendukung Jokowi antara faksi James Riyadi [Kristen] dengan faksi Jacob/CSIS/kasebul [Katolik] mulai ditabuh. Mereka semua melihat bahwa Jokowi akan menang Pilpres sehingga masing-masing perlu menanamkan pengaruh sejak awal.

Manuver CSIS lewat Jakob ini tentu membuat resah kubu James Riyadi. Pasca pertemuan tersebut media dalam kendali James Riyadi mulai mengungkit-ungkit peranan CSIS sebagai lembaga yang pada era Soeharto ikut mengebiri PDI. Megawati diingatkan tentang fakta itu. Tujuan akhirnya tentu saja agar Mega dan Jokowi menjauh dari CSIS sehingga James Riyadi bisa dominan lagi. Tapi jangan sampai dilupakan bahwa kubu CSIS/Jusuf Wanandi mempunyai koran The Jakarta Post, sebuah koran berbahasa Inggris yang cukup berwibawa, yang bisa melakukan serangan balik. Kita tahu sendiri, sekali memberitakan bahwa Puan mengusir Jokowi dari rumah Megawati, peta politik di internal PDIP berubah dratis. Puan tiba-tiba hilang, Megawati seperti tak memikirkan lagi koalisi, dan Jokowi seperti anak kehilangan induk, ke sana-kemari mencari teman koalisi.

Tapi, jangan dilupakan faksi Partai Sosialis Indonesia [PSI]. Partai yang didirikan Sutan Sjahrir pada era Seokarno ini memang sudah tak ada, tapi kadernya sampai saat ini masih bergentanyangan. Tokoh-tokoh PSI seperti Goenawan Mohamad terang-terangan sudah mendukung Jokowi. Ia menggunakan jaringan-jaringan yang dimilikinya seperti Jaringan Islam Liberal [JIL], Tempo grup sampai orang-orang Kiri yang berhasil dikadernya seperti Coen Husein Pontoh dan Margiyono—dulu anggota PRD yang kemudian murtad dengan mendirikan Perhimpunan Demokratik Sosialis [PDS]; PDS ini pendiriannya tidak bisa dilepaskan dari sosok

Goenawan Mohamad; pendeklarasian organisasi ini dilakukan di Teater Utan Kayu [TUK]—yang sekarang melakukan manipulasi-manipulasi terhadap ajaran Marxisme agar bisa dijadikan dalih untuk mendukung Jokowi. Semua itu satu komando untuk mendukung Jokowi.

Selain Goenawan, ada faksi PSI yang dikomandoi oleh Jakob Oetama dengan kelompok Kompas-nya. Mereka mempunyai media nasional yang sudah sejak lama telah menggoreng Jokowi lewat pemberitaan-pemberitaannya. Sebagai sesama Katolik, Kompas grup tentu bisa bekerjasama dengan kubu CSIS. Mereka sama-sama pernah dididik oleh Pater Beek. Bahu membahu antara keduanya tentu saja akan menghasilkan kekuatan yang besar dengan jaringan media yang sudah mengakar kuat.

Dari lingkaran PSI lainnya ada Yamin. Ia salah satu yang membidani kelahiran Seknas Jokowi. Sewaktu mahasiswa pada tahun 80-an, ia aktif di kelompok kiri Rode yang berada di Yogyakarta. Ia dekat dekat dengan tokoh PSI Yogyakarta, Imam Yudhotomo. Yamin disokong aktivis kiri era 80-an, Hilmar Farid. Ia dulu pernah terlibat dalam masa-masa pembentukan PRD. Mantan istrinya, Gusti Agung Putri Astrid, merupakan kader Kasebul yang banyak terlibat dengan aksi-aksi sosial pada era 90-an; ia sekarang menjadi caleg PDIP dari dapil Bali. Peran Hilmar adalah sebagai perumus strategi yang diambil Seknas Jokowi menghadapi Pilpres.

Faksi PSI lainnya ada Fajroel Rachman. Ia dulu dikenal sebagai aktivis mahasiswa ITB. Ia dekat dengan tokoh PSI zaman Orde Lama, Soebadio Sastrosastomo. Kelompok Fajroel ini sebetulnya yang paling lemah karena tidak mempunyai koneksi apa-apa. Makanya ia hanya bergerak di media sosial saja dengan mengandalkan jumlah follower di akun twitternya.

Di antara faksi-faksi PSI tersebut, yang mempunyai hubungan kuat dengan Amerika Serikat adalah faksi Goenawan Mohamad. Sebagaimana ditulis oleh Wijaya Herlambang, Goenawan adalah agen CIA yang sudah dipekerjakan sejak akhir era Soekarno. Begitu kuatnya hubungan Goenawan dengan Amerika bisa dilihat ketika ia kalah dalam sengketa dengan pengusaha Tomy Winata, Dubes AS turun langsung untuk "mendamaikan" kasus tersebut agar tidak berlarut-larut. Goenawan pula yang dulu ikut memuluskan langkah Boediono menjadi wakil presiden. Sebetulnya ia ingin mendorong Sri Mulyani maju, tapi partai SRI tidak lolos. Goenawan dan Sri Mulyani memang dekat. Ketika Sri Mulyani diserang Ical dalam kasus Bank Century sampai akhirnya ia mundur sebagai Menkeu, Goenawan amat marah sampai-sampai mengembalikan Bakrie Award yang pernah diterimanya.

Silahkan mengobrak-abrik semua analisa politik, tetap saja penyokong utama Jokowi ada tiga itu: fundamentalis Katolik [CSIS/Kasebul], fundamentalis Kristen [James Riyadi dkk], dan faksi PSI [Goenawan Mohamad dkk]. Nah, mengapa mereka turun bersama mendukung Jokowi?

Bangkitnya Islam politik tentu saja dianggap sebagai ancaman. Sepanjang Pemilu Orde Baru, perolehan suara partai Islam dalam Pemilu 2014 adalah yang terbesar. Suara PKB, PAN, PKS, PPP dan PBB bila digabungkan mengungguli partai-partai yang lain. Tentu saja yang dianggap yang paling berbahaya adalah PKS. Sebelum Pemilu, PKS sudah dikesankan oleh berbagai lembaga survei [termasuk CSIS] tidak akan lolos ke Senayan. Senyatanya mereka masih memperoleh suara 7 persen—yang bisa jadi jumlah kursinya bisa menduduki peringkat ke empat di Senayan.

PKS dikenal dengan kader-kadernya dari kalangan kelas menengah. Kader-kader mereka selain militan juga tidak anti terhadap pendidikan Barat. Bayak kadernya yang kuliah di Amerika Serikat, Inggris dan Eropa. Walaupun berpikiran modern, mereka dikenal taat menjalankan ajaran Islam, baik yang wajib maupun sunnah. Mereka juga dikenal melek teknologi, berbeda dengan dengan Taliban, misalnya. Inilah yang menakutkan bagi tiga pendukung Jokowi di atas kalau sampai PKS menjadi partai yang berkuasa. Oleh sebab itu, oleh kalangan PSI, baik faksi Goenawan Mohamad maupun faksi Fajroel, PKS yang menjadi sasaran serangan. Silakan amati sendiri serangan-serangan mereka terhadap PKS di media sosial. Kadang kala serangan terhadap PKS juga dilancarkan lingkaran Kasebul di lingkaran PartaiSocmed. Gampang saja, kalau ada serangan kepada PKS, lihat saja latar belakangnya, pasti akan berkaitan dengan tiga komponen di atas: fundamentalis Katolik dan Kristen, serta PSI [dan orang-orang Kiri yang diperalat tiga penyekong Jokowi tersebut] Agar tak menyatu, partai yang berideologi Islam dibuat bimbang. Para pengamat sudah mulai bekerja dengan berbagai argumentasi bahwa poros partai-partai Islam sulit untuk diwujudkan. Terutama PKS yang akan dijadikan target kebimbangan ini. Mereka tak begitu khawatir dengan PKB, misalnya. Sosok Muhaimin Iskandar sudah dikenal sebagai orang pragmatis. Gus Dur saja ia khianati, apalagi umat Islam. PAN dan PPP juga hampir serupa. Sementara PBB suaranya tak signifikan. Tinggal PKS yang sulit dikendalikan. Apalagi sampai saat ini PKS tak mau bicarakan koalisi.

Kalau PKS nantinya akan mendukung Prabowo, maka akan diserang habis-habisan sebagai partai yang menyokong pelanggar HAM berat. Ini merupakan sasaran tembak yang empuk bagi kalangan PSI untuk menyerang PKS. Semisal PKS mendukung Ical, maka akan dihantam sebagai partai yang mendukung partai warisan Orde Baru: Golkar.

Sementara itu, bila PKS akan membentuk poros partai Islam, akan diadu domba dengan sesama partai Islam. Maka diarahkan PKS untuk mendukung Jokowi. Dukungan ini penting untuk memperlihatkan bahwa Jokowi yang didukung Amerika lewat tiga tangannya tadi mendapatkan legitimasi dari partai Islam yang ideologis, yaitu PKS. Maka opini pun diarahkan dengan berbagai argumentasi agar PKS merapat ke Jokowi. Bila jebakan ini berhasil menjerat PKS sehingga kemudian mendukung Jokowi dan tak berhasil membangun poros sendiri, maka hanya satu kata: wassalam. Satu benteng itu telah runtuh.

Sebagai penutup, dari semua uraian di atas, Jokowi sebetulnya tidak lebih hanyalah boneka bunraku. Boneka tersebut dimainkan dalam pertunjukkan sandiwara Jepang untuk menghibur kalangan bangsawan. Dan, bangsawan-bangsanwan yang terhibur dengan boneka bunraku bernama Jokowi bila kelak menjadi presiden adalah: fundamentalis Katolik [CSIS/Kasebul], fundamentalis Kristen [James Riyadi dkk] dan PSI [Goenawan Mohamad dkk]—yang ketiganya merupakan kaki tangan ndoro-ndoro di Amerika Serikat sana.

Pertanyaannya: apakah kita akan memilih boneka bunraku untuk memimpin 250 juta lebih penduduk Indonesia?

J. TIPUAN SURVEI ALA CSIS DAN LSI

Direktur An Nashr Institute, Munarman, mengungkapkan kepada publik bagaimana lembaga-lembaga survei seperti CSIS dan LSI melakukan ‘penipuan’ dalam surveinya. CSIS dan LSI menentukan terlebih dahulu siapa yang akan diunggulkan, baru kemudian membuat survei. Hal ini disampaikan Munarman dalam acara bertajuk “Mengkaji Pergerakan

Politik Non Muslim 2014″ di Masjid Baiturrahman, Sabtu (22/2).

“*Tahun 2004, menjelang pemilu, saya diundang rapat CSIS (Center for Strategic and International Studies), saat itu saya masih di dunia sekuler. CSIS ini adalah jaringan Katolik di Indonesia. Didalangi Cina, Pengusaha dan Amerika. CSIS adalah agen Amerika langsung, intelnya Amerika, perpanjangan Amerika langsung di Indonesia*,” ungkap tokoh FPI ini seperti dikutip Suara Islam.

Dalam rapat CSIS yang mengundang seluruh LSM-LSM dan beberapa ormas, Munarman mengungkapkan bahwa pada saat itu, rapat diarahkan oleh para dedengkotnya untuk menentukan siapa calon presiden berikutnya. Merujuklah pada satu nama, yaitu SBY.

Setelah itu Munarman bercerita bagaimana ia didatangi oleh Denny JA, pendiri LSI (Lembaga Survei Indonesia).

Kepada Munarman, Denny mengatakan, “*Saya sudah lakukan survei elektabilitas, saya survei dan sepertinya SBY unggul diatas Megawati. Tapi memang keunggulan itu kami buat sengaja untuk pembentukan opini supaya masyarakat ikut terpengaruh dengan survei tersebut. Dan memang saya bekerja untuk menaikkan SBY, membangun opini SBY itu baik*.”

“*Saya cuma minta satu, agar anda jangan mengkritik SBY. Kalo anda mau, diam tutup mulut, 10 juta untuk anda setiap bulan*,” bujuk Denny kepada Munarman.

Dari situlah, mantan ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini tidak percaya lagi dengan survei-survei politik.

“*Sampai hari ini saya ga percaya yang namanya survei. Makanya sekarang, survei Jokowi mau meledak meleduk, ga ada urusan, jangan percaya, itu dibikin*!” tegas Munarman.

K. JOKOWI-JK-MEGA PENGHIANAT INDONESIA

Arti Edward Wanandi, WNA, Memilih Jokowi-JK

Beberapa waktu terakhir ada berita hangat di media sosial tentang pengusaha Edward Wanandi, adik dari Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofjan Wanandi, yang memberikan dukungan politik kepada calon presiden Joko Widodo.

Kalau hanya memberikan dukungan mungkin tak masalah. Namun, Edward digosipkan sudah berpindah kewarganegaraan jadi WN Amerika Serikat, dan disebut-sebut memberikan hak suara pada Pilpres lalu.

Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman, tampak yakin terhadap kebenaran informasi tersebut. Bahkan menurut dia, keterlibatan Edward dalam Pilpres adalah bukti kuat adanya kecurangan di Pilpres 2014. Alasannya, Edward Wanandi merupakan warga negara Amerika Serikat namun diperbolehkan memilih dalam Pilpres 2014.

"*Dalam foto yang terpampang di BBM (Blackberry Messenger) pribadi Edward Wanandi, terlihat jelas Beliau berpartisipasi dalam Pilpres 2014. Namun, ini tidak masuk akal, karena Edward adalah warga negara Amerika Serikat,*" tuding Jajat, dalam pernyataan persnya, Rabu (20/8).

Dari penelusurannya, Edward Wanandi pernah menjadi donor untuk kampanye politik di Amerika Serikat, dan juga merupakan Direktur dari US Chamber of Commerce. Dia yakin, kedua hal itu adalah bukti konkret bahwa Edward bukan warga negara Indonesia. Jajat juga mengutarakan bahwa tidak mungkin Edward menggunakan dwi kewarganegaraan, karena itu dilarang dalam hukum Indonesia.

"*Di Amerika Serikat tidak diperbolehkan warga negara atau institusi asing berpartisipasi dalam bentuk uang di kegiatan politik. Namun kita bisa lihat bahwa Edward terbukti pernah menjadi donor bagi politisi Amerika seperti Barrack Obama, Mitt Romney, dan John McCain,*" ujarnya.

"*Edward juga merupakan direktur dari US Chamber of Commerce, yang merupakan salah satu forum bisnis tertua di Amerika. Chamber of Commerce juga merupakan Lobbyist terdaftar di Amerika. Tidak mungkin seorang warga negara asing bisa menjadi direktur di organisasi berpengaruh seperti itu,*" beber Jajat.

Jajat menjelaskan kasus Edward Wanandi hanya satu contoh kecurangan terstruktur yang sudah direncanakan. Apalagi, keluarga Wanandi memang diketahui mendukung pasangan Jokowi-JK secara habis-habisan.

Megawati dan Jusuf Kalla Akan Menjual Indonesia

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan calon wapres Jusuf Kalla (JK) sedang menerima titah dan wejangan dari tuannya di Washington DC. Jadi bukan kebetulan kalau keduanya pergi ke Amerika Serikat.

Demikian disampaikan aktivis senior Sri Bintang Pamungkas dalam

keterangannya kepada Aktual.co, Rabu (13/8).

"*Info intel masuk dari beberapa kawan, antara lain Dr. Fuad Bawazier yang connect ke USA. Sejarah penjualan aset negara oleh rezim Mega tahun 2003 mau mau diulang pada Periode 2014-2019*," ujar aktivis yang tenar di awal Orde Reformasi ini.

"*Jadi, seandainya Jokowi-JK yang patut diduga boneka-boneka neolib dimenangkan oleh MK, hal itu akan segera terjadi*," sambungnya.

"*Itulah orang yang dipilih rakyat karena lugu, polos. Rakyatnya mudah dirayu sebagai wong cilik. Yang tambah gendut juragan politik, yang rusak negara*," kata SBP, sapaannya kecewa.

Sebelumnya dikabarkan Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua Umum PDIP terbang ke AS pasca Pilpres 2014.

JK mengabarkan dirinya berada di AS Minggu 9 Agustus lalu untuk menemani Istri, anak dan cucu liburan di Minnesota, AS. Dalam sebuah foto, JK pun terlihat di rumah sakil Mayo Clinic, Illinois, Amerika Serikat. Dalam foto itu JK bersama dengan pengusaha Sofjan Wanandi.

Kunjungan JK ke Amerika ini berbarengan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri. Mega juga mengaku liburan bersama dengan keluarganya di negara pimpinan Barack Obama tersebut.

Sumber Aktual.co menyebutkan ada agenda politik tingkat tinggi yang dibahas di Amerika Serikat. Namun Hal itu dibantah oleh politisi PDI-P

Pramono Anung.

"*Nggak bener, nggak ada itu. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan Pak Jokowi*," tandasnya.

Sri Bintang: Seharusnya BIN Tangkap Mega dan JK Saat Pulang Dari AS

DR. Sri Bintang Pamungkas mengatakan bahwa Megawati dan Jusuf Kalla harus ditangkap dan diinterogasi pasca lobi-lobi politik ke Amerika yang diselimuti dalih berlibur dan berobat ke Amerika, sesaat sebelum pengumuman sidang terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

Sri Bintang, tokoh pergerakan dan pendiri Partai PUDI itu mencurigai kunjungan Mega dan Jusuf Kalla yang disertai oleh James Riyadi, dan Sofjan Wanandi ke Amerika Serikat yang dikabarkan bertemu dengan Bill Clinton dan Obama. "*Seharusnya BIN (Badan Intelijen Negara), menangkap dan menginterogasi mereka saat pulang dari Amerika Serikat, karena melanggar undang-undang keamanan negara*," tegas Sri Bintang.

Tim voa-islam mencatat poin penting soal tindakan Mega - JK ke Amerika Serikat "*Ada kasus serupa ketika Tim Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang membagi-bagikan kekayaan alam Indonesia ke meeting* ***IGGI (Inter Governmental Group on Indonesia)*** *di Swiss dan kepada korporasi dunia dan negara-negara asing yang membagi-bagikan tambang emas kepada Freeport, timah dan lainnya. Menurut pasal KUHP tim Sultan harus dihukum 12 tahun penjara karena merugikan negara, nah Megawati dan Jusuf Kalla yang pergi ke AS itu dihadiri Barrack Obama, Bill Clinton. BIN harus menangkap mereka*" ungkap Sri Bintang.

Tak hanya itu, Megawati dan JK termasuk kategori berbuat makar, merugikan negara dan pengkhianatan kepada negara karena pasti ada sesuatu yang rahasia karena itu pulang dari AS BIN seharusnya menangkap mereka, Sri Bintang mengutip pasal-pasal KUHP," Megawati dan JK melakukan Kejahatan terhadap negara, pasal 104 KUHP tentang makar terhadap pemerintah, pasal 111 KUHP adalah pengkhianatan terhadap negara, 121 KUHP soal merugikan negara." ungkapnya lagi.

"Seharusnya BIN (Badan Intelijen Negara), menangkap dan menginterogasi mereka saat pulang dari Amerika Serikat, karena melanggar undang-undang keamanan negara," tegas Sri Bintang.

Ketika Mega dan JK ke AS, SBY didekati dua orang Senator Amerika, diantara Senator John McCain dari Partai Republik, bertemu dengan Presiden SBY. "*Pasca pertemuan kenapa ketika Pramono Anung gan Ketua MPR Sidharto dan SBY tak pernah melakukan konferensi pers, ada apa? Ini Kejahatan terhadap negara dan harus diutarakan*" cetusnya.

Sebelumnya, mantan Presiden Amerika Bill Clinton, berkunjung ke Jakarta, Aceh dan Kalimantan menjelang pengumuman penetapan hasil pilpres 9 Juli 2014 silam, dan Clinton bertemu Presiden SBY.

Sinyal MK Dukung Jokowi Sudah Jelas

Bintang juga tidak percaya terhadap keputusan MK (Mahkamah Konstitusi), karena kasus yang menimpa mantan Ketua Akil Mochtar, yang kemudian dihukum seumur hidup oleh pengadilan Tipikor, menandakan MK tidak dapat dipercaya, ujarnya. Bahkan MK diplesetkan sebagai 'Makelar Kasus'.

Bintang juga tidak percaya terhadap keputusan MK (Mahkamah Konstitusi), karena kasus yang menimpa mantan Ketua Akil Mochtar, yang

kemudian dihukum seumur hidup oleh pengadilan Tipikor

Ini meneguhkan dukungan SBY kepada Jokowi-JK, bahwa tidak ada pelanggaran dan kecurangan pada pilpres. Hal itu, sejalan dengan keputusan MK, yang menolak seluruh gugatan Prabowo-Hatta.

Ini menjadi sinyal dari SBY, sejatinya SBY sebagai 'good boys' Amerika, tidak dapat menyetujui Prabowo.

Acara perdana Progres 98 ini dihadiri para pembicara Ketua Progres 98 Faizal Assegaf, Prof Marwah Daud Ibrahim, Letjen (Purn) Syarwan Hamid, DR. Sri Bintang Pamungkas nampak diantara ratusan undangan acara Progres 98 di Cikini ini.

L. REZIM BONEKA CSIS ADALAH NEO-ORBA

Banyak sekali aktivis atau mantan aktivis senior yang berbondong-bondong mendukung Jokowi tanpa pikir panjang karena kekuatiran bahwa bila Prabowo menjadi presiden maka dia akan mengembalikan era Orde Baru. Alasannya? Prabowo bagian dari rezim Orde Baru dan mantan menantu Presiden Soeharto; sementara lawannya, Jokowi tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Orba.

Mohon maaf, tapi pemikiran di atas bukan saja keliru namun juga membenarkan pendapat saya selama ini bahwa orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai aktivis sebenarnya tidak memiliki kecerdasan memadai sehingga keputusan mereka lebih sering dibuat berdasarkan pemahaman hitam-putih, tidak ada abu-abu dalam kamus mereka; berdasarkan insting; berdasarkan emosi; dan karena itu keputusan yang dibuat tidak rasional.

Orba sebagaimana disebut adalah sebuah rezim, sebuah sistem pemerintahan dan oleh karena itu jatuhnya Presiden Soeharto tidak berarti Orba ikut jatuh; sebab sebagaimana semua sistem di dunia ini sebuah sistem bisa berganti baju; ganti nama; ganti pemimpin supaya tidak hilang, sehingga tidak selalu menjadi jaminan bahwa pemimpin berwajah baru pasti tidak akan kembali ke rezim lama.

Demikian pula tidak semua orang yang pernah menjadi bagian sebuah sistem rezim akan selamanya menjadi bagian rezim tersebut; kita sebut saja Trotsky, dia ikut mendirikan rezim Uni Soviet bersama Lenin dan Stalin, tapi adakah Trotsky ketika kabur ke Amerika mendirikan rezim Soviet di Amerika? Demikian juga Deng Xiaoping ikut mendirikan Republik Rakyat China dengan Mao Tzedong namun dia justru membuat reformasi besar-besaran terhadap sistem yang dibuat Mao, sehingga RRC hari ini adalah RRCnya Deng Xiaoping dan bukan RRCnya Mao Tzedong. Berdasarkan dua contoh ini kita bisa melihat bahwa reformasi terhadap suatu rezim tidak melulu harus dipaksakan dari luar karena sering reformasi sukses bila didorong dari dalam, itulah alasan Deng Xiaoping berhasil mereformasi RRC dan demo besar di Tiananmen gagal total, karena mereformasi dari dalam lebih mudah dan harga yang dibayar tidak semahal reformasi dari luar sistem.

Sehubungan dengan Orba maka kita harus menyadari bahwa terdapat dua wajah Orba dan dua fase dalam Orba yang berbeda secara diametral. Wajah Orba tersebut adalah (1) Orba yang represif, tertutup dan selalu mudah menghamburkan peluru terhadap rakyat sipil atas nama stabilitas untuk pembangunan; dan (2) Orba yang memberikan hasil dari stabilitas tadi yaitu swasembada pangan; harga barang murah; pendidikan; dan kesehatan murah. Adapun dua fase Orba adalah: (1) Orba yang anti Islam dan represif

yaitu sejak Malari sampai 1989; dan (2) Orba yang mulai menerima keterbukaan; kedepankan HAM; demokrasi; dan memberikan kesempatan kepada kepemimpinan sipil.

Adapun wajah dan fase Orba yang represif dan militeris lahir karena dwifungsi ABRI yang terlalu kebablasan; dan kendali atas militer dipegang oleh orang-orang telah didoktrin untuk melihat Islam dan sipil sebagai musuh. Siapa orang-orang tersebut? Yaitu CSIS, Ali Moertopo dan muridnya yaitu klik Benny Moerdani yang terdiri dari AM Hendropriyono; Luhut Panjaitan dan lain-lain. Mereka inilah biang kekerasan berdarah di Indonesia sepanjang Orde Baru sampai Reformasi: Malari (Ali Moertopo); penyerbuan ke Timor Timur (Ali Moertopo-Benny Moerdani); Petrus (Benny Moerdani); Tanjung Priok (Benny Moerdani-Try Soetrisno); Santa Cruz (Sintong Panjaitan-Rudolf Warouw); Peristiwa 27 Juli 1996 (Benny Moerdani-Megawati-Agum Gumelar-Sutiyoso-Hendropriyono dkk); Kerusuhan Mei 1998 (Benny Moerdani; Wiranto dkk); Pembantaian di Timor Timur pasca referendum (Wiranto dkk); Kerusuhan Era Gus Dur (Hendropriyono; Theo Syafei dkk); DOM Aceh (Hendropriyono dkk); sampai Pembunuhan Munir (Hendropriyono; A'sat; Muchdi Pr, dkk).

Klik Benny Moerdani yang merupakan biang kerok kekerasan dan anti Islam di Indonesia itulah yang dilawan oleh Prabowo dari dalam dan akhirnya Benny berhasil dilucuti dan ditendang dari rezim sehingga Orba mulai memberikan kesempatan pada Islam; HAM; sipil dan demokrasi untuk memainkan peranan dalam pengelolaan negara. Itulah alasannya sejak akhir tahun 1989 Presiden Soeharto menjadikan Timor Timur sebagai daerah terbuka setelah sebelumnya ditutup dan dikuasai oleh klik Benny Moerdani. Tidak pelak lagi keputusan Presiden Soeharto ini menimbulkan kecaman dari kubu Benny sebagaimana bisa dibaca di buku

Sintong Panjaitan yang sekarang mulai dicetak ulang di Gramedia.

Ada alasan mengapa setelah SBY menjadi presiden kondisi geopolitik di Indonesia menjadi sangat stabil dan minim kerusuhan rasial-keagamaan antara lain karena klik Benny Moerdani berada di luar pemerintahan dan tidak terlalu banyak ruang untuk bergerak sementara itu Benny Moerdani sudah meninggal dunia sejak tahun 2004. Anda tidak percaya? Silakan tanya kepada aktivis-aktivis kiri (selain Budiman Soejatmiko, kalau dia mah sudah dipecat PRD sejak 2002) yang pernah mendukung Megawati kemudian pada masa kepresidenannya mereka semua ditangkap; diadili; dan dipenjara ketika demo dan membakar patung Megawati sebagai simbol ketidakapercayaan pada Megawati. Mirip Orde Baru era di bawah 1990an? Jangan heran karena orang-orang di belakang Mega adalah orang yang sama dengan yang mengendalikan sistem represif Orde Baru sebelum mereka disingkirkan oleh Prabowo.

Nah, orang-orang yang sama dengan yang mengendalikan sistem represif; anti Islam dan militeris pada era Orde Baru; era Presiden Megawati ada di belakang Jokowi, sebut saja Abdullah Mahmud Hendropriyono; Agum Gumelar; Sutiyoso; Wiranto; Da'i Bacthiar; Luhut Panjaitan dkk. Bisa dibilang mereka bukan saja ada di belakang Jokowi, tapi mereka juga adalah sosok yang menciptakan Jokowi. Yang menjadi masalah adalah kendati mereka ini mewarisi wajah dari sistem Orde Baru yang represif; namun mereka tidak paham apapun tentang sistem Orde Baru yang memberikan pembangunan, dan ini adalah alasan mengapa era Megawati hanya dikenal sebagai era represif demi kestabilan tapi tidak terasa hasil pembangunannya.

Oleh karena itu tidak heran pada masa kampanye sekarang saja sudah terlihat dengan jelas mengarah kepada kembalinya era represif Orde Baru yang terbukti dari: rencana mengintai masjid (khas Benny Moerdani); kembalinya militer dan tentara berpolitik (dwifungsi ABRI) terbukti dari sering terjadi pertemuan intens Panglima TNI Jenderal Moeldoko-Kapolri Jenderal Sutarman dengan Jokowi dan Megawati (Moeldoko bahkan pernah disebut sebagai cawapres Jokowi); serta Jenderal Budi Gunawan, mantan ajudan Megawati aktif membujuk Megawati agar menerima JK sebagai cawapres; dan sebelumnya ada Abraham Samad, Ketua KPK yang diiming-imingi posisi cawapres.

Dari sisi Jokowi-JK juga menggambarkan sisi Orde Baru, di mana Jokowi sang boneka dan petugas partai dalam menciptakan mitos mengenai dirinya malah memplagiat kisah hidup Pak Harto dan kepercayaannya kepada klenik dan kejawen menyebabkan Jokowi sengaja tinggal di Menteng supaya "menyerap aura Soeharto" yang tersisa di Cendana; sedangkan JK pada masa menjadi wapres SBY terkenal selalu memberikan proyek pemerintah kepada anak perusahaan miliknya adalah jelas menggambarkan sisi Orba yang penuh kolusi dan nepotisme.

Sebaliknya kubu Prabowo sekalipun berkoalisi dengan Golkar namun Prabowo sendiri adalah pahlawan reformasi pertama di era Orde Baru yang mengubah sistem militeris otoriter anti Islam menjadi sistem sipil demokratis yang pro kebebasan beragama untuk semua dan tidak memarjinalkan salah satunya. Selain itu pendukung Prabowo semuanya adalah reformis: Amien Rais (Bapak Reformasi); SBY (reformasi Dwifungsi ABRI); Djoko Santoso; Hatta Rajasa; Akbar Tanjung (Bapak Pembaharu Golkar) dan lain-lain.

Berdasarkan fakta di atas maka terlihat mana kubu reformis dan mana kubu neo-Orba. Ironisnya adalah para aktivis pendukung Jokowi yang melawan kebangkitan Orba baru bila Prabowo naik sebenarnya sedang menaikan tokoh neo-Orba dan melawan tokoh reformasi yang sebenarnya. Oleh karena itu bila Jokowi berhasil naik jadi presiden maka kita harus mengucapkan selamat datang kepada rezim Neo-Orba dan selamat tinggal pada rezim reformasi.

Saya pribadi pro-Orba dan berharap kembalinya rezim Orba, tapi Orba yang memberikan pembangunan, demokratis dan pro perlindungan terhadap HAM dan bukan Orba yang represif dan tangannya berdarah yang dikendalikan oleh klik Benny Moerdani. Jadi, mau pilih pasangan rezim Neo-Orba atau reformasi?

M. CSIS REBUTAN KUE KABINET JOKOWI-JK

Proses penjaringan menteri yang dilakukan Jokowi Center mendapat kecaman dari kalangan pendukung pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla.

Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR) yang dipromosikan Jokowi Center dianggap sebagai upaya segelintir intelektual yang harus kekuasaan untuk menguasai permainan setelah Jokowi dan JK dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden yang sah.

Kecaman itu antara lain disampaikan fungsionaris Partai Nasdem, Despen Ompusunggu dalam halaman Facebook miliknya.

KAUR yang dirilis Jokowi Center itu, menurut Despen, "*Patut diduga permainan kaum keblinger di sekeliling Jokowi, dengan agenda khusus*."

“*Termasuk mereduksi peran partai politik pengusung dan menggiring opini publik*,” tulisnya.

Sekelompok kaum intelektual haus kuasa yang ingin menguasai Jokowi, sebut dia, kini menggunakan pola either convincing or confusing, membuat yakin atau membuat bingung, Jokowi.

“*Bagaimana mungkin, nama-nama mereka siapkan, kemudian akan diklaim sebagai usulan rakyat*?” gugat Despen tanpa menyebut detil siapa yang dia maksud sebagai kelompok intelektual haus kekuasaan yang keblinger itu.

Sementara Jokowi Center hingga Sabtu, 26/7 mengatakan mengatakan telah memperoleh 70 ribu lebih entri data #PollingMenteri KAUR.

“*Tim relawan akan terus bekerja untuk terus merekap data-data yang masuk. Pengumuman hasil polling akan kami sampaikan pada pertengahan bulan Agustus dan September*,” demikian ditulis dalam laman Facebook Jokowi Center.

Kericuhan mengenai pembagian jatah kursi kabinet Jokowi mencuat ke publik seusai Penetapan rekapitulasi suara pemilu presiden (pilpres) oleh KPU Pusat pada 22 Juli 2015 yang dilakukan secara asal-asalan, terburu-buru, penuh kekeliruan dan sarat pelanggaran hukum.

Penetapan KPU itu mengabaikan semua amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pemilu pilpres harus diselenggarakan secara jujur, adil, bersih dan bebas. KPU menjadi salah satu aktor utama dalam berbagai pelanggaran hukum pada penyelenggaraan pemilu pilpres 2014.

Merespon berbagai pelanggaran fatal oleh KPU, pasangan Prabowo-Hatta mengajukan permohonan gugatan sengketa pilpres ke Mahkamah Konstitusi pada 26 Juli 2014 lalu. Putusan MK terhadap gugatan Prabowo-Hatta rencananya akan diputuskan pada 21 Agustus mendatang.

Fakta bahwa hasil akhir pilpres masih lama dan jauh dari pasti, karena ada proses sidang di MK, serta kemungkinan bergulirnya Pansus (panitia khusus) DPR terhadap penyelengaraaan serta hasil-hasilnya, namun kelompok pendukung capres Joko Widodo sudah meributkan pembagian kekuasaan, jatah kursi kabinet konsesi politik dan ekonomi, seolah-olah Joko Widodo sudah pasti menjadi presiden RI.

Kelompok pertama merasa paling berjasa mengantarkan Joko Widodo menjadi presiden adalah partai politik. PDIP, PKB, Nasdem, Hanura dan PKPI adalah parpol pengusung dan pendukung capres Joko Widodo. PDIP sebagai partai di mana Joko Widodo berasal dan menjadi kadernya, berharap mendapat jatah kursi terbesar. Sedikitnya, nama – nama seperti Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, Hasto Kristanto, Ribka Tjiptaning, Maruarar Sirait, Trimedya Panjaitan, TB Hasanuddin, Pramono Anung, Teras Narang dan Ganjar Pranowo disebut-sebut bakal mendapat posisi kursi menteri di Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sementara itu, PKB sebagai partai dengan perolehan suara lebih 9% dan pertama kali menyatakan dukungannya bergabung bersama PDIP – Jokowi, tentu meminta jatah kursi kabinet sedikitnya 5-6 kursi. Muhaimin Iskandar, Marwan Jaffar, Abdul Kadir Karding, Helmy Faisal, Kofifah Indar Parawansa, Yenny Wahid dan seterusnya menjadi kandidat terkuat menduduki posisi menteri. Nusron Wahid yang kader Partai Golkar namun mbalelo mendukung Jokowi-JK dipastikan akan minta jatah jadi menteri.

Nasdem, Hanura dan PKPI mungkin hanya mendapat alokasi total 6-7 kursi kabinet untuk ketiga parpol ini. Ferry Mursildan Baldan, Sutiyoso, Yudhi Krisnandi adalah nama-nama calon penghuni kabinet Jokowi yang gencar disebut belakangan ini. Jika dituruti seluruh keinginan parpol pendukung, mungkin 34-37 kursi menteri tidak akan cukup, karena derasnya permintaan partai terhadap kursi kabinet.

Padahal, kelompok pendukung utama itu bahkan dapat disebut sebagai kelompok 'pencipta' Joko Widodo hingga bisa melangkah sejauh ini pastilah menginginkan hasil kerja keras mereka selama sekitar 6 – 7 tahun (sejak rencana menjadikan Jokowi sebagai presiden boneka ditetapkan), berharap mendapat balasan sepadan, diantaranya dengan mendapat jatah kursi kabinet juga.

Mereka yang masuk kelompok kedua di antaranya: Hendropriyono, Luhut Panjaitan, Sabam Sirait, Agus Widjojo, Asyori Tadjuddin, Djan Faridz, para jenderal purn, baik yang tergabung dalam Tim Begawan, mau pun para jenderal purn kubu mantan wapres Try Sutrisno, dan seterusnya. Jokowi adalah ciptaan mereka dan untuk itu mereka pasti merasa paling berhak untuk menikmati buah hasil ciptaannya.

Kelompok ketiga adalah para kapitalis atau pemilik modal yang menjadi 'darah dan tulang punggung' kekuatan Joko Widodo selama ini. Mereka adalah para konglomerat non pribumi, yang dapat digolongkan dalam dua kategori, yakni konglomerat koruptor BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dan Non BLBI. Mereka sangat berjasa menyukseskan rencana besar konspirasi global untuk menjadikan Joko Widodo sebagai presiden boneka (proxy) dan Basuki Tjahja Purnama alias Basuki Indra alias Zhang Wan Xie alias Ahok (proxy kedua) menjadi gubernur DKI Jakarta.

Untuk memenangkan Jokowi- Ahok dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta saja, konglomerat koruptor BLBI yang kini bermukim di luar negeri, utamanya Singapura, telah menyumbang lebih dari Rp 500 miliar kepada tim sukses Jokowi – Ahok. Dapat dibayangkan berapa besar sumbangan uang kampanye dan pemenangan dari buronan negara itu kepada Jokowi-JK selama pilpres 2014 kemarin.

Konglomerat non BLBI yang jumlahnya jauh lebih besar, mereka hidup, tinggal dan mengembangkan bisnisnya di Indonesia, tentu memberi bantuan dalam bentuk uang tunai, jaringan dan dukungan kampanye / pemcitraan Jokowi di media massa yang sangat besar, berkali-kali lipat dibandingkan dengan konglomerat/bankir koruptor BLBI. Mereka mungkin tidak menginginkan jabatan atau kursi di kabinet, tetapi pasti mengharapkan konsesi dari pemerintahan Jokowi. Konsesi bisnis dan ekonomi yang berlipat ganda dari yang telah mereka nikmati selama ini.

Berbeda dengan kelompok konglomerat non pribumi tersebut di atas, kelompok berikutnya atau kelompok keempat adalah James Riyadi dan 'inner circle -nya'. Status pribadi James Riyadi, yang disebut pihak otoritas Amerika Serikat sebagai agen intelijen pemerintah RRC, James Riyadi mempunyai agenda politik strategis terhadap Indonesia yang akan diwujudkannya melalui bantuan dan dukungan penuh dari Joko Widodo.

Sejauh mana kepentingan politik James Riyadi dan pemerintah RRC tidak berbenturan dengan kepentingan nasional NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dapat dicermati melalui kebijakan-kebijakan Joko Widodo nanti, ketika ia benar-benar berkuasa sebagai presiden Indonesia.

Kelompok kelima, yakni kelompok ideologis, terdiri dari kaum nasionalis, marhaenis, sosialis dan komunis Indonesia yang selama ini sangat militan dan revolusioner menggarap basis massa untuk mendukung usaha – usaha pemenangan Joko Widodo. Dari kelompok idelogis ini, kaum komunis Indonesia yang mulai bangkit dan sukses mencapai kejayaannya adalah kelompok yang merasa paling berhak mendapat balas jasa atas semua jerih payah mereka dalam membantu kemenangan Jokowi.

Sedangkan kelompok sosialis yang membantu habis-habisan Jokowi terutama melalui jaringan media yang mereka miliki, merasa berhak mendapat tempat di kabinet dan di jajaran pemerintahaan Jokowi, di samping hak mereka memperoleh konsesi bisnis dan ekonomi dari kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi nanti.

Kelompok keenam yaitu kubu Jusuf Kalla. Sebagai cawapres pasangan Jokowi dan salah satu penyandang utama terbesar kampanye pemenangan Jokowi- JK, pasti JK telah memegang perjanjian atau kontrak politik, di mana kontrak itu telah mengatur dan menetapkan selengkap sedetail mungkin mengenai pembagian kekuasaan di antara mereka berdua (Jokowi-JK).

Jusuf Kalla sudah memiliki banyak pengalaman manis dan pahit sewaktu menjadi wakil presiden pada pemerintahan SBY. Mereka berdua mengatur dan menetapkan pembagian kekuasaan /wewenang berdasarkan pada kontrak politik yang telah mereka sepakati bersama. Dapat dipastikan, ketika JK diputuskan menjadi cawapres Jokowi, pihaknya telah menyusun sesempurna mungkin mengenai aturan-aturan main terkait pembagian kekuasaan di antara mereka berdua. Sulit dibayangkan bagaimana Jokowi dapat mengatur dan memutuskan pembagian ‘kue kekuasaaanya’ untuk

berbagai kelompok pendukung, sementara dirinya sudah terikat ketat melalui kontrak politiknya bersama Jusuf Kalla.

Kelompok ketujuh adalah kaum bisnis-oportunis pribumi yang memandang Jokowi hanya sebagai kendaraan untuk mendapatkan tujuan bisnis/ekonomi. Kelompok ini sejak awal percaya bahwa pertarungan bisnis dan ekonomi di Indoensia hanya bisa dimenangkan bilamana mereka memiliki akses politik yang luas dan kuat. Mungkin kelompok ini tidak mengharapkan kursi kabinet, tetapi memastikan bahwa bisnis dan kepentingan pribadi mereka harus diakomodir oleh pemerintahan Jokowi. Bagi mereka mendukung pendanaan kampanye Jokowi sama halnya dengan investasi yang harus menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya.

Kepala Jokowi pasti terasa seperti akan pecah meledak ketika kelompok-kelompok lain juga menuntut konsesi politik dan ekonomi. Mereka adalah kelompok elit atau ormas keagamaan yang telah mengantarkan Jokowi ke posisi puncak. Kelompok ini didominasi oleh Katolik dan Protestan.

Kelompok Katolik termasuk di dalamnya CSIS (Centre For Strategic and International Studies – kelompok pemikir pendukung rezim Orba yang dikendalikan dan memperjuangkan misi Katolik di Indonesia), akan meminta konsesi politik luar biasa besar dari Jokowi dan JK, dalam rangka mewujudkan cita-cita mereka mengembalikan masa kejayaan dan keemasan Katolik Indonesia seperti pada masa pemerintah Orde Baru, khususnya seperti periode 1966-1990 yang lalu.

Kelompok Katolik/CSIS secara politis lebih beruntung dan memiliki daya tawar kuat terhadap Jokowi, karena eksistensi mereka selama pilpres 2014, tidak semata-mata bergantung sepenuhnya pada Jokowi, tetapi mereka

juga mendominasi kubu Jusuf Kalla. Hubungan erat JK dan Keluarga Wanandi sebagai faktor utama.

Sedangkan kelompok Protestan, terutama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) sebagai motornya, pasti menuntut diakomodirnya konsesi politik dan ekonomi secara maksimal oleh Jokowi-JK. Permintaan ini selalu dilontarkan tegas oleh Jenderal (purn) Luhut Panjaitan yang gencar memobilisasi dukungan Batak Protestan untuk pasangan Jokowi - JK.

Entah bagaimana cara dan strategi Jokowi memecahkan masalah berat terkait tuntutan-tuntutan kelompok pendukungnya.

Penetapan Pilpres masih jauh dari akhir dan serba tak pasti, tetapi benih-benih pertikaian di antara pendukungnya yang menuntut balas jasa atas jerih payah dan pengorbanan mereka semua, semakin mencuat, kian membesar dan berpotensi menimbulkan konflik serius di antara mereka.

Bibit pertikaian antara Jokowi dengan berbagai kelompok pendukungnya dan antara masing-masing kelompok pendukung Jokowi, dalam rangka mendapat jatah/konsesi sebanyak-banyaknya dalam kekuasaan pemerintahan Jokowi, semakin membesar dan hanya tinggal menunggu waktu untuk meledak.

N. BEGINI CARA CSIS MENINGKATKAN ELEKTABILITAS BONEKANYA

CSIS, lembaga yang menjadi “think-thank” Orde Baru itu, terus berusaha memposisikan Jokowi menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Jokowi dikampanyekan melalui berbagai gerakan yang menggunakan media

sosial, dan media massa yang luas.

CSIS yang didirikan oleh Mayjen Ali Murtopo dan Mayjen Sudjono Humardani, dan didukung sejumlah cendikiawan Katolik keturunan Cina, seperti Hary Tjan Silalahi, Liem Bian Koen, Liem Bian Kie, Mari Pangestu, termasuk Father Beek, dan sepanjang Orde Baru menjadi “back bone” nya Soeharto.

CSIS digunakan oleh rezim Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto, dan melalui CSIS inilah diproduk kebijakan-kebijakan Orde Baru yang notabene anti Islam. Termasuk keinginan memasukkan ajaran “Kejawen” ke dalam kehidupan kenegaraan, melalui undang-undang. Tujuannya ingin menggembosi umat Islam.

Faktanya, Orde Baru merupakan kuasi (campuran) antara kekuatan kelompok jendral “abangan” yang menganut kejawen, nasionalis, sekuler, dan kelompok minoritas (kristen dan katolik). Tak aneh mereka sangat anti terhadap Islam.

Sekarang CSIS bermetamorpose menjadi kekuatan “think-thank” baru yang ingin mempromosikan “boneka” Jokowi, dan mereka hanya yakin dengan Jokowilah misi mereka akan terwujud, yaitu mengambil alih Republik Indonesia. Kekuatan dibelakang Jokowi, tak lain kelompok konglomerat hitam (cina) yang pernah “ngemplang” BLBI, Rp 650 triliun, dan diampuni oleh Mega, saaat berulang tahun di Bali, 2002

Sekarang CSIS (Centre for Stategis and International Studies) menyelenggarakan survei dan menempatkan Jokowi seakan menjadi pilihan utama rakyat Indnesia. Survei ini diselenggarakan oleh CSIS pada

November 2013.

Hasil survei CSIS, sengaja menyebutkan, "Sebanyak 34,7 secara nasional memilih Jokowi. Ini tanda-tanda berakhirnya Oligarki Elit Partai", ujar Kepala Departemen Politik dan Hubungan International CSIS Phillips J. Vermonte Philip di Jakarta, Ahad, 1 Desember 2013.

Menurut CSIS, lembaga ini melakukan survei dengan metode wawancara langsung tatap muka di 33 provinsi pada 13 November hingga 20 November, dengan 1.180 responden dengan margin error 2,85 persen.

Berdasarkan hasil survei itu, tokoh selain Jokowi tak diminati rakyat, dan mendapatkan dukungan kecil, seperti Prabowo Subianto sebanyak 10,7 persen, Aburizal Bakrie (9 persen), Wiranto (4,6 persen), Jusuf Kalla (3,7 persen), Megawati (3,3 persen), Mahfud MD (1,8 persen), dan Hatta Rajasa (0,6 persen). Sebanyak 22,8 persen responden menyatakan belum mempunyai pilihan presiden pada pemilu presiden 2014 mendatang.

Apakah memang Jokowi layak memimpin Indonesia di masa depan, dan memiliki kapasitas yang memadai? Tetapi, sekarang Jokowi sudah dianggap tokoh yang sangat mumpuni, dan terus dikampanyekan oleh media seperti Kompas, Tempo, dan sejumlah media sosial secara massif untuk menapaki jalan kekuasaan di masa depan.

Sementara itu, penduduk Jakarta mulai merasakan pahitnya kebijakan Jokowi yang menggusur pedagang kaki lima, dan sejumlah penggusuran di Sunter, dan yang menikmati hanyalah orang-orang cina kaya di Pluit. Sementara itu, setiap hari orang stress menghadapi kemacetan, akibat sterilisasi jalur busway.

O. KETUA KPU, KETUA BAWASLU DAN KETUA MK TERBUKTI ADALAH TIMSES JOKOWI-JK

Joko Widodo (Jokowi) memberikan penghargaan kepada 46 orang dari berbagai latar belakang. Perhargaan itu diberikan atas hasil persetujuan Sidang I Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Dewan GTK) periode Agustus 2015.

Tokoh yang mendapat Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera merujuk Pasal 28 ayat 2 UU No 20/2009, dianggap berjasa luar biasa di berbagai bidang, seperti sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya hingga ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Sedangkan tokoh yang mendapat tanda kehormatan Bintang Jasa merujuk pada Pasal 28 ayat 3 UU Nomor 29/2009 dianggap berperan besar di peristiwa tertentu dan bermanfaat bagi kebesaran negara. Pengabdian mereka di bidang ekonomi, sosial, politik serta jasanya diakui di tingkat nasional.

Beberapa tokoh yang menonjol dalam penghargaan kali ini adalah Surya Paloh sebagai tokoh pers nasional, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, mantan Ketua KY, dan Pimpinan KPK Busyro Muqoddas, serta mantan anggota DPR PDI-P Sabam Sirait.

Selain itu, ada juga tokoh pejabat publik yang masih menjabat seperti Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Penghargaan sendiri diberikan di Istana Negara di Jakarta, 13/8/2015 sekira pukul 11.30 WIB.

Berikut daftar lengkap penerima penghargaan:

Keppres RI 83/TK/2015 tanggal 7 Agustus 2015, penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra

Bintang Mahaputra Adipradana:

1. Hamdan Zoelva (mantan Ketua MK)
2. Jenderal TNI (Purn) Moeldoko
3. Jenderal Pol (purn) Sutanto (mantan Kapolri
4. Jendral (Pol) purn Bimantoro (mantan Kapolri)

Bintang Mahaputra Utama

1. Achmad Sodiki (mantan hakim MK)
2. Hardjono (mantan hakim MK)
3. Ahmad Fadli Sumadi (mantan hakim MK)
4. Muhammad Alim (hakim MK)
5. Laksamana TNI (purn) Marsetio (mantan KSAL)
6. Marsekal TNI (purn) Ida Bagus Putu Dunia (mantan KSAU)
7.Harbrinderjit Singh Dilon (mantan utusan khusus presiden untuk penanggulangan kemiskinan)
8. Busyro Muqoddas (mantan Ketua KY dan Pimpinan KPK)
9 Haryono Umar (mantan komisioner KPK)
10. Tahir Saimima (mantan komisioner KY)
11. Mustofa Abdullah (mantan anggota KY)
12. Zainal Arifin (mantan anggota KY)
13. Soekotjo Soeparto (mantan anggota KY)
14. Sabam Sirait (mantan anggota DPR PDI-P)

15. Syafii Maarif (mantan Ketum PP Muhammadiyah)
16. Franz Magnis Suseno (filsuf dan budayawan)
17. Surya Paloh (tokoh pers nasional)
18. Harun Nasution (pengembang budaya moderat)

Keppres RI 84/TK/2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa.

Bintang Jasa Utama

1. Alm Burhan Muhammad (duta besar RI untuk Pakistan)
2. Ahmad Heryawan (Gub Jabar)
3. Ganjar Pranowo (Gub Jateng)
4. Cornelis (Gub Kalbar)
5. Frans Lebu Raya (Gub NTT)
6. Christiany Eugenia Paruntu (bupati Minahasa Selatan)
7. Stephanus Malak (bupati Sorong)
8. Tri Rismaharini (walkot Surabaya)
9. Didin Hafidhuddin Maturidi (ketua Badan Amal Zakat Nasional)
10. Dato Sri Profesor Tahir (Mayapada Grup)
11. Mochtar Riyadi (Lippo Group)
12 Schoichiro Toyoda (member of the board Toyota Motor)
13. Toshihiro Nikai (chairman general council liberal democratic party)

Bintang Jasa Pratama

1. Heri Listyawati Burhan (istri duta besar RI untuk pakistan)
Keppres RI 85/TK 2015 tanggal 7 Agustus tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Penegak Demokrasi Utama.

1. Husni Kamil Manik (Ketua KPU)
2. Muhammad (Ketua Bawaslu)

Keppres RI 86/TK 2018 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma.

1. Mustofa Bisri (pengasuh Ponpes Raudlatuh Tholibin Lteteh, Rembang.
2. Gunawan Soesatyo Mohammad (sastrawan budayawan)
3. Alm. Petrus Josephus Zoetmulder (ahli sastra Jawa kuno penyusun kamus Jawa kuno-Inggris)
4. Alm. Wasi Kolodoro (Ki Tjokrowasito), komposer musik karawitan Jawa dan pendukung utama sendratari Ramayana
5. Alm. Hosesein Djajadiningrat, pelopor tradisi keilmuan
6. Alm. Nursjiwan Tirtaamidjaja, perancang busana dan batik
7. Alm. Hendra Gunawan, Pelukis dan pematung
8. Alm. Soejoedi Wiryoatmojo, arsitek.

P. SAAT MEGAWATI MENJUAL INDONESIA DAN BEKERJA SAMA DENGAN BENNY MOERDANI

Merangkul Benny, Membidik Target Besar

Megawati tiba-tiba melakukan menuver yang mengagetkan. Bahkan, bisa disebut mendebarkan. Mega yang dalam posisi terpojok akibat diserang lawan-lawan politiknya tiba-tiba bertemu mantan Pangab Jenderal (Pur) Leonardus Benny Moerdani. Sebelumnya, Mega juga bertemu dengan mantan Kabakin Letjen (Pur) Moetojib. Keduanya adalah tokoh militer yang, menurut politisi partai Islam, dianggap sebagai tokoh yang banyak meminggirkan umat Islam. Kartu truf apakah yang sedang dimainkan

Mega? Lalu, apakah tidak akan menjadi bumerang baginya?

SPEKULASI politik terus bermunculan begitu Mega bertemu sejumlah tokoh militer Orde Baru. Tidak ada satu pun yang bisa membaca secara pasti apa yang sedang dilakukan. Kalangan politisi, pakar politik, dan mantan petinggi militer, semuanya masih mereka-reka. Hal itu makin buram karena Mega lebih memilih irit bicara kepada publik.

Pengamat politik dari FISIP UI Prof Dr Budyatna memperkirakan, ada target besar yang ingin diraih Mega mengapa berhubungan dengan para kelompok militer. Megawati, kata Budyatna, sudah berancang-ancang untuk menggantikan Presiden Habibie. Keyakinan Mega ini diperoleh setelah menimbang-nimbang dukungan yang diperolehnya makin kuat. Kalangan yang cukup penting, yaitu ulama, yang selama ini masih mempermasalahkan boleh tidaknya Megawati menjadi presiden makin mengendur sikapnya.

Para ulama Jatim dan Jateng sudah membuka diri. Begitu juga, Menperta Toety Alawiah menyatakan tidak ada masalah Mega menjadi presiden. *’’Barangkali, hanya Hamzah Haz yang masih malu-malu karena alasan fatwa ulama PPP*,’’ kata Budyatna.

Karena itu, agar jalan menuju kursi nomor satu di republik ini makin mulus, Mega mendekati kekuatan lain yang juga tidak boleh dianggap remeh, yakni militer. Dan, kata Budyatna, dukungan militer ini bukan saja sebatas pada memuluskan jalan menuju presiden, tetapi juga ketika nanti Mega sudah menjadi presiden.

Artinya, saat Mega mejadi presiden, ia tidak boleh berbenturan dengan kepentingan militer. Meski pada sisi lain Mega juga tidak boleh mengecewakan rakyat hanya karena ingin kompromi dengan militer. *''Ada banyak pekerjaan rumah untuk Megawati sebagai presiden nanti. Misalnya soal penculikan, kasus Priok, dan penembakan Trisakti. Semua persoalan ini masih berhubungan dengan militer*,'' kata Budyatna.

Menurut dia, militer masih berkepentingan agar Soeharto tidak diseret ke pengadilan. Sikap itu bukan saja menjadi ''garis komando'' Menhankam/Panglima TNI Wiranto, tetapi juga para purnawirawan seperti Moetojib dan Benny Moerdani. Kepentingan militer itu jelas berlawanan dengan tuntutan rakyat yang minta Soeharto cepat diadili.

Tampaknya, Mega berusaha mengemasnya secara manis agar tidak saling bertubrukan. Satu sisi tetap didukung rakyat, pada sisi lain kekuasaannya disokong militer. *''Mega harus punya win-win solution. Militer tidak kehilangan muka, tetapi rakyat tetap senang dengan apa yang dikerjakan Mega,*'' kata Budyatna.

Solusi yang ditawarkan Mega setidaknya sama dengan yang dialami Soekarno. Soekarno, saat Soeharto berkuasa, tidak diseret ke pengadilan. Hukuman bagi proklamator itu hanya hukuman politis dengan cara tidak boleh menemui pendukungnya.

''Mungkin mereka menyepakati soal itu. Bagaimana Soeharto yang masih didukung militer tidak mendekam di penjara, tetapi tetap di hukum secara politis. Misalnya dengan mengisolasi Soeharto dari kehidupan bebas. Dan, hartanya juga diambil,'' tegasnya.

Rosihan Anwar, wartawan tiga zaman yang juga mantan tokoh Partai Sosialis Indonesia (PSI), punya pandangan hampir sama. Menurut dia, pertemuan itu untuk menyelami lebih jauh konsep dwifungsi TNI. Selain itu, pembicaraan tadi diperlukan. Sebab, Mega perlu menyiapkan militer sebagai mitra jika dia berkuasa.

’’Saya mengikuti sejarah perkembangan militer sejak mula sekali. Untuk kasus Indonesia, supremasi sipil secara penuh akan sulit sekali. Demikian pula, supremasi militer secara penuh juga sama sulitnya,’’ ujar Rosihan.

Menurut mantan Pemred Surat Kabar Pedoman yang pernah dibredel Bung Karno ini, para pemimpin sipil Indonesia masa depan, termasuk Megawati, tidak boleh terjebak dalam dikotomi peran sipil militer. Dalam pandangan Rosihan, perlu ada semacam ’’garis konsensus’’ menyangkut peran politik TNI. Sebab, menempatkan tentara di luar panggung politik tanpa didahului sebuah gentleman agreement dengan kaum politisi sipil, menurut Rosihan, hanya akan melestarikan konflik sipil militer.

’’Megawati juga perlu belajar dari sejarah Bung Karno. Setelah Dekret 5 Juli 1959, Bung Karno kan menoleransi peran tentara dalam politik. Sekarang toleransi seperti itu bisa diartikan menempatkan tentara sebagai mitra politik,’’ ujarnya.

Namun, Rosihan mengingatkan agar Mega tidak sembrono meniru Soeharto dalam menempatkan peran politik tentara. Yaitu, menempatkan tentara sebagai kepanjangan tangan Soeharto semata-mata. Untuk itulah, Rosihan menganjurkan, sebaiknya Megawati mengadakan pertemuan dengan berbagai purnawirawan TNI.

’’Jangan hanya dengan mantan perwira intel seperti Benny. Yang lain juga perlu. Terutama dengan purnawirawan perwira berlatar belakang teritorial. Nah, seharusnya para penasihat Mega menyadari hal ini,’’ tutur jurnalis sepuh yang akrab disapa Pak Haji ini.

Dia menambahkan, purnawirawan perwira teritorial umumnya lebih paham dengan kondisi organisasi sosial politik. Selain itu, lanjutnya, mereka relatif mengenal karakteristik dan perilaku politik kaum sipil. Sedangkan perwira intel, menurut Rosihan, lebih banyak memandang peran politik sipil dari kacamata kecurigaan.

Jika demikian, perlukah Mega bertemu Wiranto? Dengan bersemangat, Rosihan berkata, *’’Saya kira, perlu. Tetapi, beranikah kedua belah pihak membicarakan soal peran politik tentara. Wah, hebat jika diskusi seperti itu menghasilkan semacam gentleman agreement. Yaitu, Mega mengakui peran politik tentara dan tentara mengakui kepemimpinan politik sipil*.’’

Sementara itu, Ketua Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Eggi Sujana menyebut, ada dua hal yang perlu dicermati dari manuver Mega. Pertama, Mega ingin menunjukan kepada rakyat bahwa dirinya bisa menembus kalangan militer. Sebab, sosok Benny saat menjabat Kabakin maupun Pangab dan Menhankam dinilai sebagai public enemy bagi umat Islam. Itu akibat perlakuan Benny terhadap umat Islam sangat diskriminatif saat menjabat di ABRI. Hal sama berlaku saat Moetojib menjabat Kabakin.

Dalam pertemuan itu, katanya, Mega seakan ingin mengatakan, pengalaman pahit umat Islam masa lalu tidak akan terjadi lagi. ’’*Itu kalau dilihat sisi positifnya,*’’ tandas Eggy.

Tetapi, di sisi lain, pertemuan Mega-Moetojib dan Mega-Benny bisa dilihat sebagai bukti bahwa selama di antara mereka ada deklarasi atau komitmen tertentu. Saat parpol Mega menang, mereka pun ingin menagih sesuatu. Misalnya, tidak mengusut atau mengadili pejabat militer maupun sipil selama pemerintah Orba. Sebab, kalau Soeharto diadili, pejabat lain akan kena.

’’Itu kalau dilihat dari sisi negatifnya. Kita juga harus fair menilai pertemuan itu,’’ aku Eggi. Tetapi, Eggi berharap semoga sisi positifnya yang benar. Sebab, kalau sisi negatifnya lebih menonjol, berarti hubungan Mega plus PDI Perjuangan dengan kelompok umat Islam makin jauh. Pasalnya, Benny merupakan musuh umat Islam di mana sepak terjangnya saat berkuasa banyak merugikan umat Islam. *’’Image seperti itu tidak menutup kemungkinan tumbuh di kalangan umat Islam*,’’ aku Eggi.

Ketua Barisan Nasional (Barnas) Letjen (Pur) Kemal Idris menyebut, pertemuan itu bisa saja hanya bertukar pikiran hal-hal yang ringan saja. Mega ingin tahu pandangan dari senior purnawirawan, sebaliknya Benny dan Moetojib ingin mengetahui apa saja program Megawati sebagai kandidat presiden.

Atau, ada maksud lain untuk mencari dukungan politik? *’’Saya tidak tahu persis. Kalau Ibu Mega ingin tahu peta elite politik dari mereka, bisa saja demikian.*"

Gus Dur Beber Kelakuan Taufik Kiemas

Mondar-madirnya suami Mega, Taufik Kiemas ke Amerika Serikat menjelangjatuhnya Gus Dur dari kursi presiden diduga membawa misi

besar menjatuhkan presiden dengan lobi duit. Karena itu, Gus Dur tetap menolak bertemu dengan Mega, termasuk menolak rayuan Taufik agar menerima istrinya. Kini Gus Dur membeber kelakuan Taufik. Meski itu sah, tapi bangkrut secara moral.

Masih banyak fakta yang belum terungkap dari balik kejatuhan KH Abdurrahman Wahid dari kursi presiden. Meski diakui konspirasi parlemenbegitu kuat, tapi ada juga konspirasi internasional yang melibatkanorang dekat Mega dan militer. Mantan Menhan Mahfudz sudah dengan tegasmenyebut TNI berada dibelakang lengsernya Gus Dur. Dan, kini satu kartulagi dibuka. Kali ini tidak main-main, Gus Dur menyebut suami Megawati,Taufik Kiemas, telah memberikan dana politik sebesar 4 juta US dolar kepada mantan Ketua Senat Amerika Robert J Dole (Bob Dole) untuk melobi Presiden Goerge Walker Bush agar mendukung kenaikan Megawati.

Realitas politik adanya sebuah konspirasi dibalik kenaikan Megawati itu, memang harus dibongkar. Sejumlah motif binis negara barat terutama Amerika untuk menyelamatkan asetnya diduga kuat melatarbelakangi kenaikanMega yang mudah disetir orang lain itu. Sudah lama Barat dan IMF merasa tidak nyaman dengan Gus Dur yang hendak membangun poros kekuatan Asia dengan basis tiga negara besar, yaitu India, Cina dan Indonesia. Oleh karena itu, Singapura dan Amerika serta negara barat merasa terancam.

Bersamaan dengan berlangsungnya krisis politik nasional, diduga Taufik Kiemas memanfaatkan celah ini untuk menaikkan istrinya. Ia melakukan safari bersama Tjahyo Kumolo dan rombongan politisi PDIP ke Amerika, Singapura dan Malaysia sebulan sebelum kejatuhan Gus Dur. Di Amerika

itulah Kiemas diduga melakukan transaksi politik dengan sejumlah politisi Amerika, termasuk Dole.

Kasus ini terbuka ketika Gus Dur menyingkap satu persatu tabir dibalik kejatuhannya dalam sebuah acara pelantikan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) di Taman Ismail Marzuki, Selasa (28/8) siang kemarin.

Menurut Gus Dur, dana politik itu diberikan sendiri oleh Taufik Kiemaskepada politisi dari Partai Republik ini agar perjalanan Megawati menuju RI I tidak terhambat Amerika. Namun hingga kini belum diketahui darimana asal dana sebesar itu. Yang jelas, dalam politik tidak ada yang gratis dan Kiemas telah menginvestasikan jutaan dolar untuk mendukung kenaikan istrinya.

BAB XI
CSIS DAN AGAMA

A. METRO TV MILIK SURYA PALOH MELARANG SANDRINA MALAKIANO MENGENAKAN JILBAB

CURHAT SANDRINA MALAKIANO (EKS PENYIAR METRO TV)

Metro TV telah membuat berita yang menyudutkan Rohis (Kerohanian Islam) di sekolah-sekolah, bahwa Rohis adalah tempat pembibitan teroris. Berbagai pihak ramai membicarakan ulah Metro TV tersebut. Berita yang penuh dengan propaganda anti Islam telah dilakukan Metro TV. Salah satu penyiar Metro TV yang sangat terkenal Sandrina Malakiano juga pernah mengalami pelakukan SARA yang dilakukan Metro TV, hanya karena berjilbab, akhirnya dia tidak mendapat pekerjaannya. Berikut curhatnya:

Setiap kali sebuah musibah datang, maka sangat boleh jadi di belakangnya sesungguhnya menguntit berkah yang belum kelihatan. Saya sendiri yakin bahwa ”sebagaimana Islam mengajarkan” di balik kebaikan boleh jadi tersembunyi keburukan dan di balik keburukan boleh jadi tersembunyi kebaikan.

Saya sendiri membuktikan itu dalam kaitan dengan keputusan memakai hijab sejak pulang berhaji di awal 2006. Segera setelah keputusan itu saya buat, sesuai dugaan, ujian pertama datang dari tempat saya bekerja, MetroTV.

Sekalipun tanpa dilandasi aturan tertulis, saya tidak diperkenankan untuk siaran karena berjilbab. Pimpinan Metro TV sebetulnya sudah mengijinkan saya siaran dengan jilbab asalkan di luar studio, setelah berbulan-bulan saya memperjuangkan izinnya. Tapi, mereka yang mengelola langsung beragam tayangan di Metro TV menghambat saya di tingkat yang lebih operasional. Akhirnya, setelah enam bulan saya berjuang, bernegosiasi, dan mengajak diskusi panjang sejumlah orang dalam jajaran pimpinan level atas dan tengah di Metro TV, saya merasa pintu memang sudah ditutup.

Sementara itu, sebagai penyiar utama saya mendapatkan gaji yang tinggi. Untuk menghindari fitnah sebagai orang yang makan gaji buta, akhirnya saya memutuskan untuk cuti di luar tanggungan selama proses negosiasi berlangsung. Maka, selama enam bulan saya tak memperoleh penghasilan, tapi dengan status yang tetap terikat pada institusi Metro TV.

Setelah berlama-lama dalam posisi yang tak jelas dan tak melihat ada sinar di ujung lorong yang gelap, akhirnya saya mengundurkan diri. Pengunduran diri ini adalah sebuah keputusan besar yang mesti saya buat. Saya amat mencintai pekerjaan saya sebagai reporter dan presenter berita serta kemudian sebagai anchor di televisi. Saya sudah menggeluti pekerjaan yang amat saya cintai ini sejak di TVRI Denpasar, ANTV, sebagai freelance untuk sejumlah jaringan TV internasional, TVRI Pusat, dan kemudian Metro TV selama 15 tahun, ketika saya kehilangan pekerjaan itu. Maka, ini adalah sebuah musibah besar bagi saya.

Tetapi, dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberi saya yang terbaik dan bahwa dunia tak selebar daun Metro TV, saya bergeming dengan keputusan itu. Saya yakin di balik musibah itu, saya akan mendapat

berkah dari-Nya.

HIKMAH BERJILBAB

Benar saja. Sekitar satu tahun setelah saya mundur dari Metro TV, ibu saya terkena radang pankreas akut dan mesti dirawat intensif di rumah sakit. Saya tak bisa membayangkan, jika saja saya masih aktif di Metro TV, bagaimana mungkin saya bisa mendampingi Ibu selama 47 hari di rumah sakit hingga Allah memanggilnya pulang pada 28 Mei 2007 itu. Bagaimana mungkin saya bisa menemaninya selama 28 hari di ruang rawat inap biasa, menungguinya di luar ruang operasi besar serta dua hari di ruang ICU, dan kemudian 17 hari di ruang ICCU?

Hikmah lain yang saya sungguh syukuri adalah karena berjilbab saya mendapat kesempatan untuk mempelajari Islam secara lebih baik. Kesempatan ini datang antara lain melalui beragam acara bercorak keagamaan yang saya asuh di beberapa stasiun TV. Metro TV sendiri memberi saya kesempatan sebagai tenaga kontrak untuk menjadi host dalam acara pamer cakap (talkshow) selama bulan Ramadhan.

Karena itulah, saya beroleh kesempatan untuk menjadi teman dialog para profesor di acara Ensiklopedi Al Quran selama Ramadhan tahun lalu, misalnya. Saya pun mendapatkan banyak sekali pelajaran dan pemahaman baru tentang agama dan keberagamaan. Islam tampil makin atraktif, dalam bentuknya yang tak bisa saya bayangkan sebelumnya. Saya bertemu Islam yang hanif, membebaskan, toleran, memanusiakan manusia, mengagungkan ibu dan kaum perempuan, penuh penghargaan terhadap kemajemukan, dan melindungi minoritas.

Saya sama sekali tak merasa bahwa saya sudah berislam secara baik dan mendalam. Tidak sama sekali. Berjilbab pun, perlu saya tegaskan, bukanlah sebuah proklamasi tentang kesempurnaan beragama atau tentang kesucian. Berjibab adalah upaya yang amat personal untuk memilih kenyamanan hidup.

Berjilbab adalah sebuah perangkat untuk memperbaiki diri tanpa perlu mempublikasikan segenap kebaikan itu pada orang lain. Berjilbab pada akhirnya adalah sebuah pilihan personal. Saya menghormati pilihan personal orang lain untuk tidak berjilbab atau bahkan untuk berpakaian seminim yang ia mau atas nama kenyamanan personal mereka. Tapi, karena sebab itu, wajar saja jika saya menuntut penghormatan serupa dari siapapun atas pilihan saya menggunakan jilbab.

Hikmah lainnya adalah saya menjadi tahu bahwa fundamentalisme bisa tumbuh di mana saja. Ia bisa tumbuh kuat di kalangan yang disebut puritan. Ia juga ternyata bisa berkembang di kalangan yang mengaku dirinya liberal dalam berislam.

Tak lama setelah berjilbab, di tengah proses bernegosiasi dengan Metro TV, saya menemani suami untuk bertemu dengan Profesor William Liddle " seseorang yang senantiasa kami perlakukan penuh hormat sebagai sahabat, mentor, bahkan kadang-kadang orang tua " di sebuah lembaga nirlaba. Di sana kami juga bertemu dengan sejumlah teman, yang dikenali publik sebagai tokoh-tokoh liberal dalam berislam.

Saya terkejut mendengar komentar-komentar mereka tentang keputusan saya berjilbab. Dengan nada sedikit melecehkan, mereka memberikan sejumlah komentar buruk, sambil seolah-olah membenarkan keputusan

Metro TV untuk melarang saya siaran karena berjilbab. Salah satu komentar mereka yang masih lekat dalam ingatan saya adalah, Kamu tersesat. Semoga segera kembali ke jalan yang benar.

Saya sungguh terkejut karena sikap mereka bertentangan secara diametral dengan gagasan-gagasan yang konon mereka perjuangkan, yaitu pembebasan manusia dan penghargaan hak-hak dasar setiap orang di tengah kemajemukan.

Bagaimana mungkin mereka tak faham bahwa berjilbab adalah hak yang dimiliki oleh setiap perempuan yang memutuskan memakainya? Bagaimana mereka tak mengerti bahwa jika sebuah stasiun TV membolehkan perempuan berpakaian minim untuk tampil atas alasan hak asasi, mereka juga semestinya membolehkan seorang perempuan berjilbab untuk memperoleh hak setara? Bagaimana mungkin mereka memiliki pikiran bahwa dengan kepala yang ditutupi jilbab maka kecerdasan seorang perempuan langsung meredup dan otaknya mengkeret mengecil?

Bersama suami, saya kemudian menyimpulkan bahwa fundamentalisme "mungkin dalam bentuknya yang lebih berbahaya" ternyata bisa bersemayam di kepala orang-orang yang mengaku liberal.

https://m.facebook.com/kata2hikmah.new/posts/10151087822209355

B. YB. MANGUNWIJAYA MENUDING CSIS ANTI ISLAM

Catholic intellectuals working with the Jakarta-based Center for Strategic and International Studies (CSIS) have denied accusations that they are cooperating with army officers and Muslim nationalists to create a counter

force to growing Islamization of Indonesian society and politics.

The charges and counter charges come as Catholics active in politics are reassessing priorities and strategies after losing key leadership positions in the national assembly last year and cabinet posts earlier this year.

CSIS is a private think-tank on development policy and other national issues. Many of its members are Catholic.

Many Catholic intellectuals, especially those in CSIS, have "Islamic-phobia," which they share with some army officers, Father Yusuf Bilyarta Mangunwijaya charged in an interview published in the October issue of Media, the bulletin of Semarang archdiocese, Central Java.

Father Mangunwijaya, a noted novelist, architect and social activist, accused Catholic intellectuals in CSIS of "seeking Jesus through the help of Pontius Pilate" and of suffering from an extreme religious minority complex.

They let themselves be used by the late generals Ali Murtopo and Soedjono Hoemardani, the cofounders of CSIS, Father Mangunwijaya said.

In interviews with UCA News Nov. 28, members of CSIS denied the priest´s accusations and said some of his statements were misinterpreted.

Hadi Susastro, an economist and CSIS executive director, told UCA News that the institute has no policy to collaborate with any other group to combat Islamic influence in the country.

“When it was founded in 1973 by Catholic and Muslim intellectuals, with the initiative of the late generals Ali Murtopo and Soedjono Hoemardani,” Susastro said, “it was agreed that CSIS would be a think-tank for national interests.”

“CSIS set no objective to make Islam an opponent. And in fact, some of the founders are Muslims, including Abdul Gafur who is now an activist of ICMI (Indonesian Association of Muslim Intellectuals),” Susastro stated.

Father Mangunwijaya´s statements should be seen as a kind of warning about the decline in cadrization of Catholic intellectuals, Susastro said, adding that he hoped that it would not lead to anti-CSIS attitudes.

Gafur, a former cabinet minister and now a deputy chairman of ICMI, told UCA News that CSIS has no intention of competing with any religious group, especially Islamic ones.

“I am myself a Muslim. Is it rational that as a Muslim I join an anti- Islamic institute?” Gafur asked. “CSIS serves the interests of the whole nation through its studies and assessments.

“And I am happy to see my Catholic friends in CSIS have good relations with ICMI activists,” said Gafur, a medical doctor in the air force.

According to Gafur, CSIS and ICMI´s Center of Information, Development and Economic Studies contribute to government development policy planning. “And I am proud that the two institutes of which I am a member can cooperate well without prejudices,” he said.

Cosmas Batubara, who lost his post as labor minister in the cabinet reshuffle this April, said Father Mangunwijaya´s comments should be viewed as a fatherly warning that unless young Catholic intellectuals improve their intellectual quality they will be unable to contribute much to the nation.

“I think Father Mangunwijaya has no intention to corner CSIS and its Catholic activists,” Batubara said. But people who see CSIS as a think-tank for Catholics´ interests are not well-informed about the center, he continued, saying it is mandated to serve wider national issues.

Just because the government takes CSIS proposals seriously, especially in development and foreign policy issues, he said, “does not mean that CSIS is a political base to influence the government.” Batubara reiterated, “The center serves the country by contributing analysis and thoughts.”

Harry Tjan Silalahi, another CSIS executive director, declined to comment on Father Mangunwijaya´s accusations, but suggested the priest´s main concern is that Catholics work hand-in-hand with Muslims and people of all faiths.

Some observers say CSIS´s role as a major policy think-tank has been on the decline since 1982 when Gen. Murtopo began to fade from national politics.

C. KESAKSIAN BAHWA LUHUT BINSAR PANJAITAN MENGADU DOMBA MINORITAS DEMI MENANG PILPRES

YTH Bapak Jenderal (Purn) Luhut B Panjaitan, selaku Tokoh Batak

Awalnya berat bagi saya untuk menulis surat terbuka ini, beragam respons akan muncul tidak terkecuali bernada negative, apalagi Bang Luhut, (saya sapa Bang karena kebiasaan saya menyapa beliau) saat ini sedang begitu fokus dalam mendukung Calon Presiden Joko Widodo.

Surat ini saya tulis berawal dari sebuah pertemuan tokoh-tokoh Batak, (Tempat pertemuan sangaja tidak saya sebut). Dalam pertemuan tersebut Bang Luhut banyak menyampaikan mengenai konstelasi politik saat ini. Terutama peran Warga Kristen Batak dalam Pilpres.

Dengan bersemangatnya Bang Luhut menyampaikan kedekatannya dengan Joko Widodo, bahkan kedekatan itu dimulai sejak Jokowi masih di Solo. Saking dekatnya, Bang Luhut punya kerjasama bisnis dengan anak Jokowi.

"Saya dan Jokowi kawan lama, sejak dari Solo, kami berbisnis Furniture, bersama anaknya Rakabuming Dengan perusahaan RAKABU" Jelas Bang Luhut dengan suara yang begitu lantang.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut bang Luhut juga menyatakan bahwa Jokowi adalah masa yang tepat bagi orang Kristen Batak untuk berkuasa kembali. "Jika Jokowi menang akan ada dua sampai tiga menteri orang Kristen Batak," kata Bang Luhut memberi garansi betapa pentingnya kemanangan Jokowi di pilpres ini.

Sejauh itu saya merasa masih biasa-biasa saja, namun hal mengganjal pun muncul saat bang Luhut menyampaikan strategi pemenangan Jokowi yakni dengan menggerakan Isu minoritas.

"*Kita harus membangun ketakutan di kalangan etnis tionghoa, menyebarkan informasi jika Prabowo didukung oleh Islam garis keras, sehingga minoritas bisa bersatu, Kristen Batak, di Jawa, di timur Indonesia, Tionghoa*," jelas Bang Luhut saat itu.

Bahkan bang Luhut menegaskan rencana tersebut sudah mendapat persetujuan dari Ephorus HKBP. "*semua pendeta-pendeta kita akan bergerak ke arah itu, Aktivis Kristen di PDIP Juga sudah kita gerakkan, ada Maruar Sirait, Adian Napitupulu dan Masinton Pasaribu,*" Terang Bang Luhut

Selain itu, Bang Luhut juga menyebut ada nama Sekjen PGI, Gomar, Tokoh-tokoh Batak seperti TB Silalahi. Ruhut Sitompol sudah bersepakat untuk itu. Dan tak kala penting Bang Luhut dari klangan Kharismatik sudah ada James Riady dan dari Tokoh Katolik ada Mantan Direktur CSIS Harry Tjan Silalahi. Mantan Direktur CSIS

Selain menyebut nama-nama tokoh di atas, Bang Luhut juga menyebut bahwa Jokowi telah memanuhi janjinya saat Gubernur DKI, dimana terbukti menempatkan banyak Kadis dari orang Batak di DKI.

"*Hampir 10 Tahun kita tidak berkuasa, hanya dengan cara ini kita orang Batak atau Batak bisa berkuasa kembali, menjadi DIrjen, Menteri dan penguasa di BUMN, bahkan jika Jokowi Presiden orang batak yang akan menjadi salah seorang juru bicara*" Kata Bang Luhut lagi.

Bahkan Bang Luhut saat itu menyayangkan sikap Sudi Silalahi yang hanya mementingkan diri sendiri selama berkuasa bersama SBY. Sehingga tidak ada lagi orang Batak yang berkuasa.

Bang Luhut yang saya Hormati

Abang ketika itu menyatakan bahwa kita harus menggerakkan semangat minoritas, sentiment agama harus dinaikkan kepada orang Timur, orang Kristen Tapanuli (Batak), orang Kristen Jawa dan Tionghoa. Sehingga semuanya punya satu pilihan yakni Joko Widodo

Omongan abang tersebut mungkin bagi sebagian orang Batak sangat menarik, tapi bagi saya selaku orang Kristen Batak sangatlah tidak pantas. Karena abang berupaya mendorong isu yang sesungguhnya belum tentu baik dengan orang Kristen sendiri.

Abang meminta kami mengembangkan isu bahwa Prabowo akan memberlakukan Syariat Islam jika terpilih, sehingga memunculkan rasa takut pada minoritas, abang sendiri tentu tahu, bahwa Prabowo memiliki Ibu, Adik dan kakak yang seorang kristiani. Sementara Jokowi? Tentu sangat tidak mungkin Prabowo melakukan hal seperti itu.

Saya sangat sedih abang memanfaatkan isu agama seperti itu untuk kepentingan politik. Abang mungkin lupa, bagaimana abang menyingkirkan Rektor Univesersitas Nomensen Medan. Amudi Pasaribu yang alasannya hingga sekarang tidak jelas selain rasa tidak suka abang. Selain untuk kepentingan diri abang dan klien abang.

Amudi Pasaribu kini menjadi korban ambisi pribadi bang. Menjadi korban kepentingan pribadi abang di Universitas Nomensen.

Saya melihat abang sangat keterlaluan memangfaatkan isu agama, sementara abang sendiri juga bertarung untuk diri abang Pribadi, untuk kepentingan abang yang abang buat seolah-olah untuk kepentingan orang Kristen.

Bang Luhut yang saya Hormati

Isu minoritas yang abang kemas dengan cara kurang tepat ini sangatlah tidak pantas, abang mengemas ini demi kepentingan kekuasaan semata. Agama abang jadikan dalil sebagai jalan untuk memecah belah dan menaikkan Jokowi sebagai Presiden idaman abang.

Sebagai seorang Batak Kristen saya sungguh menyesalkan tindakan dan pilihan abang ini. Karena untuk Jokowi abang membenarkan seluruh cara yang sesungguhnya tidak pantas.

Semoga Surat terbuka ini abang baca. Dan orang-orang memahami seperti apa kepentingan kekuasaan abang saat ini

http://m.kompasiana.com/post/read/664770/3/surat-terbuka-untuk-luhut-b-panjaitan.html.

D. STRATEGI CSIS MENGADU DOMBA KRISTEN DENGAN ISLAM DEMI PILRES 2014

Bahwa Jokowi-JK telah melakukan kampanye hitam di gereja sudah lama

ada laporannya di dalam website intelijen.co.id melalui artikel berjudul "Masjid Diinteli, di Gereja, Alwi Shihab dan Luhut Panjaitan Beberkan Koalisi Berbahaya Prabowo." Sumber tulisan website tersebut berasal dari tweet yang dibuat pendukung Jokowi-JK bernama Nong Darol Mahmada, tokoh Jaringan Islam Liberal di akun miliknya (https://twitter.com/nongandah).

Nong Darol Mahmada menulis bahwa dia menghadiri acara mendengarkan visi misi capres 2014 yang dilangsungkan di dekat kantor sehingga dia menyempatkan diri mampir dan di dalam ada Luhut Panjaitan dan Alwi Shihab yang mengingatkan bahwa memilih Prabowo sangat berbahaya sebab dia berkoalisi dengan kelompok islam yang bermaksud "memurnikan agama," Di dalam twitnya yang lain Nong Darol Mahmada mengompori dengan menulis bahwa dia mau pilih Jokowi sebagai presiden karena tidak mau ada kelompok intoleransi bertindak sewenang-wenang.

http://www.intelijen.co.id/masjid-diinteli-di-gereja-alwi-shihab-dan-luhut-panjaitan-beberkan-koalisi-berbahaya-prabowo/

https://twitter.com/nongandah/status/473392753812840448

https://twitter.com/nongandah/status/472195995321651201

Berita di atas terjadi beberapa minggu lalu, dan hari ini saya menemukan pernyataan dari adik Basuki Tjahjana Purnama alias Ahok yang bernama Fify Lety Tjahaja Purnama bahwa kampanye hitam terhadap Prabowo Subianto sangat marak di dalam lingkungan gereja dengan isu utama bahwa Prabowo sangat anti kepada minoritas.

"*Banyak sekali black campaign ke Pak Prabowo, sangat keji sekali. Dia dituduh mau memusnahkan orang Kristen, orang Tionghoa mau dibunuh. Begitu yang beredar, saya mau berusaha menjernihkan. Ahok itu Tionghoa, Kristen tapi Pak Prabowo tetap mencalonkan dia. Masa sih kalau anti-Kristen mau mengusung Ahok. Dia dituduh anti-Kristen, padahal ibunya kan Kristen. Karena itu, saya coba menetralkan saat pelayanan di gereja-gereja*."

http://www.rmolsumsel.com/read/2014/06/27/8601/Fify:Pak-Prabowo-Difitnah-Keji-di-Gereja-gereja-

Pernyataan Fifi Lety Tjahaja Purnama tersebut tidak berbohong sebab kali ini Alwi Shihab tertangkap basah melakukan kegiatan kampanye hitam dengan memfitnah Prabowo di Gereja Katedral:

"*Kami cocok memilih capres nomor dua. Kami melihat di capres nomor dua, tak ada golongan yang memiliki ambisi menghabisi kelompok lain. Radikalisme dalam keagamaan bisa merusak persatuan bangsa. Akhir-akhir ini ada kelompok Islam yang bergembar-gembor hendak mengadakan seminar antipluralisme. Jika ada kesempatan, bukan tak mungkin mereka meningkatkan geer menjadikan Indonesia sebagai negara Islam.*

Kelompok Islam beringas tak nyaman jika penganut agama lain melakukan ibadah. Musababnya, mereka menganggap agama mereka yang paling benar. Selain tak suka kepada umat Kristiani, kelompok Islam yang tak ramah ini juga menentang filsafat, tarekat, dan Syiah. Nahdlatul Ulama tak sejalan dengan kelompok ini."

http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/06/23/269587274/Timses-Jokowi-Sebut-Ada-Kelompok-Islam-Beringas

Sekilas memang Alwi Shihab tidak eksplisit mengatakan bahwa pasangan capres No. 1 terdapat "golongan anti plurarisme yang hendak menghabisi kelompok lain," namun bila kita melihat konteks "diskusi" Alwi Shihab tersebut dengan kampanye hitam sebagaimana disaksikan oleh Nong Darol Mahmada yang menulis bahwa Luhut Panjaitan dan Alwi Shihab mengingatkan memilih Prabowo sangat berbahaya sebab dia berkoalisi dengan kelompok islam yang bermaksud "memurnikan agama," maka sudah cukup jelas arah dan tujuan perkataan Alwi Shihab kepada umat Kristen tersebut, yaitu: capres No. 1 anti pluralisme dan mau memurnikan agama sedangkan capres No. 2 tidak ada yang hendak menghabisi kelompok lain.

Perbuatan dan perkataan Alwi Shihab tentu memenuhi unsur kampanye hitam dan sudah bukan lagi kampanye negatif. Ironisnya perbuatan Alwi Shihab mengadu domba umat beragama demi kepentingan pemilu itu dilakukan di Gereja Katedral yang selama ini menjadi simbol toleransi antar umat beragama di Indonesia karena letaknya bertepatan di depan Masjid Istiqlal.

Masa sih kalangan liberal bisa intoleran? Bukankah hal tersebut bertentangan dengan semua paham liberal itu sendiri? Tapi ternyata memang bisa sesuai kesaksian Sandrina Malakiano yang menerima komentar buruk dari kalangan yang mengaku liberal karena keputusan bersangkutan untuk memakai jilbab:

"*Tak lama setelah berjilbab, di tengah proses bernegosiasi dengan Metro*

TV, saya menemani suami untuk bertemu dengan Profesor William Liddle ” seseorang yang senantiasa kami perlakukan penuh hormat sebagai sahabat, mentor, bahkan kadang-kadang orang tua ” di sebuah lembaga nirlaba. Di sana kami juga bertemu dengan sejumlah teman, yang dikenali publik sebagai tokoh-tokoh liberal dalam berislam.

Saya terkejut mendengar komentar-komentar mereka tentang keputusan saya berjilbab. Dengan nada sedikit melecehkan, mereka memberikan sejumlah komentar buruk, sambil seolah-olah membenarkan keputusan Metro TV untuk melarang saya siaran karena berjilbab. Salah satu komentar mereka yang masih lekat dalam ingatan saya adalah, Kamu tersesat. Semoga segera kembali ke jalan yang benar.

Saya sungguh terkejut karena sikap mereka bertentangan secara diametral dengan gagasan-gagasan yang konon mereka perjuangkan, yaitu pembebasan manusia dan penghargaan hak-hak dasar setiap orang di tengah kemajemukan.

Bagaimana mungkin mereka tak faham bahwa berjilbab adalah hak yang dimiliki oleh setiap perempuan yang memutuskan memakainya? Bagaimana mereka tak mengerti bahwa jika sebuah stasiun TV membolehkan perempuan berpakaian minim untuk tampil atas alasan hak asasi, mereka juga semestinya membolehkan seorang perempuan berjilbab untuk memperoleh hak setara? Bagaimana mungkin mereka memiliki pikiran bahwa dengan kepala yang ditutupi jilbab maka kecerdasan seorang perempuan langsung meredup dan otaknya mengkeret mengecil?

Bersama suami, saya kemudian menyimpulkan bahwa fundamentalisme

“mungkin dalam bentuknya yang lebih berbahaya” ternyata bisa bersemayam di kepala orang-orang yang mengaku liberal"

https://id-id.facebook.com/kata2hikmah.new/posts/10151087822209355

Karena saya memahami bahwa kaum liberalis juga terdapat penganut fundamentalis berbahaya yang tidak memahami arti toleransi inilah alasan saya tertawa terbahak-bahak melihat kampanye hitam dari kalangan liberalis di kubu Jokowi-JK yang menginsinuasikan sedemikian rupa bahwa keberadaan organisasi Islam yang mereka nilai sebagai "Islam fundamentalis" di kubu Prabowo-Hatta berbahaya bagi Bhineka Tunggal Ika. Apalagi orang-orang yang menyerang dengan ketakutan "Islam fundamentalis" saya kenal baik sebagai para tokoh liberalis fundamentalis intoleran itu sendiri. Ditambah lagi memangnya Jokowi-JK bisa seberapa toleran bila di belakang mereka didukung penuh oleh jenderal merah ex kelompok Leonardus Benny Moerdani yang pernah mau mendeislamisasi Republik Indonesia tapi digagalkan Prabowo Soebianto itu?

Apalagi para liberalis fundamentalis itu di bawah komando pelawak tidak lucu bernama Ernest Prakasa membuat kampanye hitam dengan tagline "We stands on the right side," padahal tagline ini mengandung contradictio in terminis yang sangat parah karena tidak ada orang yang benar-benar baik akan menyebut diri mereka sebagai "orang baik" dan menuding orang lain "orang jahat," Terbukti Ernest Prakasa dengan bangga mengunggah foto bergambar Anis Matta yang dianggap sebagai ulama di PKS, diinjak massa. Orang baik mana melakukan hal ini? Tidak ada, hanya orang munafik yang akan melakukannnya.

http://m.merdeka.com/peristiwa/poster-anis-matta-diinjak-massa-pks-

meradang-di-twitter.html

Selanjutnya terbukti bahwa anggota koalisi Jokowi yang menyebut diri mereka sebagai "orang baik" akhirnya menunjukan jati diri sebagai fundamentalis intoleran yang memiliki sikap anti terhadap pemeluk keyakinan yang dianggap tidak masuk ke dalam kelompok mereka. Contoh pertama adalah mereka menuding masjid sebagai tempat penyebaran kampanye hitam dan mau mengintai serta merekam khotbah di masjid seluruh Indonesia, antara lain berupa tabloid Obor Rakyat yang belakangan malah ketahuan diotaki oleh tangan kanan Jusuf Kalla, ex jurnalis Media Indonesia, dan ex jurnalis Tempo.

http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/05/30/n6e5lb-timses-jokowijk-benarkan-ada-perintah-awasi-khutbah-jumat

http://m.kompasiana.com/post/read/669231/1/terbukti-obor-rakyat-politik-dizolimi-jokowi-jk.html

Kita tentu tidak boleh lupa bahwa pendukung Jokowi yang lain yaitu mantan Kapolri Da'i Bachtiar adalah pendiri Densus 88 yang salah satu operasinya adalah menginteli dan merekam kegiatan di masjid-masjid seluruh Indonesia; persis seperti yang pernah dilakukan oleh Leonardus Benny Moerdani nyaris tiga puluh tahun silam.

Contoh lain yang bisa menunjukan sisi intoleransi dari para liberalis fundamentalis pendukung Jokowi-JK adalah ketika Wimar Witoelar hantam kromo dan tanpa pandang bulu menyamakan semua organisasi Islam dan tokoh Islam termasuk Muhammadiyah dan AA Gym dengan teroris pembunuh massal seperti Osama bin Laden dan Imam Samudera.

Wimar memang sudah meminta maaf, tapi permintaan maaf itu hanya ditujukan kepada Muhammadiyah dan tidak kepada AA Gym atau yang lain-lain. Mengapa Muhammadiyah? Karena mereka memiliki massa yang membawa banyak suara, itu saja, bila bukan karena pemilu maka mungkin ungkapan rasa penyesalan itu tidak akan ada.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/06/19/n7em476-wimar-witoelar-serang-islam

Selain itu salah satu tokoh Islam yang dimasukan ke dalam Gallery of Rogues-nya Wimar adalah Abu Bakar Ba'asyir dari Ponpres Ngruki, Solo yang pada faktanya adalah pendukung utama Jokowi sejak dia masih menjadi Walikota Solo. Bila demikian kenapa fakta ini disembunyikan dan tanpa bukti menuduh Ba'asyir sebagai pendukung Prabowo-Hatta? Maling teriak maling dong?

http://m.arrahmah.com/read/2013/01/31/26416-jokowi-ucapkan-terima-kasih-atas-nasihat-ustadz-baasyir.html

Kita juga tentu tidak akan bisa melupakan kubu komunis di tubuh Jokowi yang dipimpin oleh Budiman Soejatmiko yang menurut marwahnya intoleran dan bermaksud menyingkirkan semua agama tanpa pandang bulu sebab menurut ajaran komunis dari Karl Marx, nabi komunisme, bahwa agama adalah candu masyarakat dan termasuk golongan borjuis yang harus dihancurkan kalangan proletar supaya bisa menciptakan masyarakat tanpa kelas. Tidak percaya? Lihat kembali sejarah Lekra-nya PKI dan berbagai ketoprak dengan tema menista agama seperti "Tuhan sudah mati," (Matine Gusti Allah) atau penghancuran gereja, masjid, kuil buddha dan pembunuhan tokoh agama di Uni Soviet dan Republik Rakyat China.

Kaum komunis di PDIP paling intoleran dibanding kelompok lain.

Masih tidak percaya memilih Jokowi sangat berbahaya bagi kelangsungan Bhineka Tunggal Ika di negara ini? Berbahaya bagi toleransi antar umat beragama di negara ini? Berbahaya bagi kerukunan ratusan juga rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, golongan dan ideologi?

E. DEWAN PERS DIKUASAI CSIS DAN TEMPO

Korps Mubaligh Jakarta (KMJ) menilai Dewan Pers telah menerapkan standar ganda dalam kasus pemuatan kartun yang menghina Islam oleh The Jakarta Post (JP). KMJ menunjuk anggota Dewan Pers Stanley Adhi Prasetyo yang menilai pemuatan karikatur Jakarta Post bukanlah pidana.

Menurut Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Korps Mubaligh Jakarta (KMJ), Edy Mulyadi, Stanley juga gegabah dengan menyatakan umat Islam di Indonesia tidak memahami makna kartun yang dimuat harian yang sahamnya dimiliki Jusuf dan Sofjan Wanandi, Kompas, Tempo, dan Suara Pembaruan tersebut.

"*Stanley itu bukan Muslim. Bagaimana mungkin dia bisa menyatakan umat Islam Indonesia tidak memahami makna kartun itu? Kalau dia Muslim, pasti dia tahu persis, bahwa laa ilaaha illallah adalah kalimat tauhid yang harus dijunjung tinggi. Saya minta Stanley atau siapa pun tidak menambah keruh persoalan ini dengan pernyataan-pernyataan yang ngawur*," kata Edy, di Jakarta, Rabu (16/7/2004).

Pernyataan Edy itu menanggapi pemberitaan harian Tempo edisi (16/7) di halaman 8 yang berjudul "*Pemuatan Karikatur di Media Bukan Pidana*".

Di situ antara lain ada pernyataan Stanley, anggota Dewan Pers, bila pemuatan kartun dianggap pidana, akan melanggar prinsip-prinsip kebebasan pers. Dia mengatakan, JP hanya sebatas pelanggaran etik. JP, kata Stanley, telah melanggar pasal 5 UU No.40/1999 tentang Pers.

Sehubungan dengan itu, Edy menegaskan, Stanley harus tahu, bahwa kalimat tauhid yang bermakna 'tiada Tuhan selain Allah' bagi umat Islam sangat sakral. Setiap Muslim rela mengorbankan apa pun yang dimilikinya, termasuk nyawa, jika ada pihak lain yang melecehkan kalimat tauhid itu. Ini adalah prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi, lanjut dia, orang yang bukan beragama Islam jangan membuat pernyataan tentang tauhid yang sama sekali tidak dipahaminya. Karena hal itu hanya akan menambah keruhnya suasana.

Berat Sebelah

Edy juga menyoroti Dewan Pers telah menerapkan standar ganda dan berat sebelah dalam masalah pemberitaan. Untuk kasus penghinaan terhadap agama yang begitu keji, lembaga ini menegaskan kasusnya bukan pidana. Sebaliknya, mereka begitu ngotot menyeret-nyeret kasus Obor Rakyat ke ranah pidana.

Menurut Edy, pernyataan Stanley yang sangat arogan tentang Obor Rakyat antara lain bisa dibaca di situs Metrotvnews.com di bawah judul Dewan Pers: Penyelesaian Obor Rakyat tak Cukup dengan Maaf. Di situ antara lain ditulis kutipan Stanley, "*Kasus Obor Rakyatkan standarnya tak dipenuhi dan tidak jelas pertanggungjawabannya, jadi tidak cukup dengan permintaan maaf karena fitnahnya luar biasa. Muatan SARA di tabloid itu tinggi sekali. Tak akan selesai dengan minta maaf, jadi silakan*

diselesaikan dengan pidana.”

Edy lebih lanjut menyatakan keheranan dirinya dengan Stanley. “*Stanley, ada apa dengan kamu? Untuk seorang Jokowi kamu membela habis-habisan hingga mengeluarkan pernyataan begitu keras. Tapi ketika Islam dinistakan, kamu berpendapat itu hanya pelanggaran etik. Fitnah yang dilakukan Jakarta Post jauh lebih keji. Muatan SARA-nya juga jauh lebih tinggi lagi*,” ujar Edy.

Menurut dia, pernyataan Stanley itu menerapkan standar ganda. Yang lebih penting, kata dia, Stanley telah menunjukkan kebencian luar biasa terhadap Islam dengan berlindung di balik kebebasan pers. “Saya yakin, kebencian yang ada di dalam hatinya, jauh lebih besar lagi,”kata Edy.

Sampai berita ini diturunkan, INILAH belum mendapatkan tanggapan apapun dari pihak Dewan Pers. Pesan singkat yang kami kirimkan kepada Ketua Dewan Pers Bagir Manan, belum direspon.

KMJ secara resmi melaporkan harian The Jakarta Post ke Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri), Selasa (15/7). KMJ menilai kartun yang dimuat harian berbahasa Inggris pada Kamis, 3 Juli 2014 halaman 7 itu jelas-jelas telah menghina serta menistakan Islam dan umatnya.

F. GAYA KOMPAS MENDORONG PERMUSUHAN

KH Cholil Ridwan menilai Kompas memang menjadi alat Katholik atau missi zending. “*Jadi apa-apa yang merugikan umat Islam pasti dimuat, termasuk tulisan yang menyerang MUI*,” tegasnya.

Untuk kesekian kalinya Harian Kompas kembali memuat tulisan yang yang sangat tendensius tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tulisan tendensius tentang MUI ini dimuat di Kompas edisi Senin, 8 September 2008, halaman 44, di rubrik Bentara, melalui tulisan Sumanto Al Qurtuby dengan judul, “Mendesain Kembali Format Dialog Agama” .

Sumanto menulis, “*Menariknya, ma-sih menurut Rumadi, dalam peristiwa kekerasan berbasis agama ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mestinya berperan sebagai pengayom umat, dalam banyak hal justru sering menjadi aktor utama (prime mover) dan inspirator kekerasan*.”

MUI yang seharusnya menjadi pemersatu kelompok-kelompok keagamaan yang terbelah justru menjadi ”polisi agama” yang ikut menggebuk kelompok-kelompok keagamaan yang divonis sesat dan menyimpang. MUI yang semestinya berfungsi sebagai penyejuk dan ”oase spiritual” bagi umat manusia apapun agama dan keyakinan mereka seperti dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW justru ikut menjadi pembakar amarah massa dan penyulut kebencian. Pula, MUI yang seharusnya menjadi wadah dialog agama yang terbuka justru menjadi sarang kelompok konservatif yang anti-dialog dan pluralisme. Apa yang menimpa MUI ini tentu menjadi sebuah ironi mengingat sebagai institusi agama yang ”dihidupi” dari uang rakyat melalui APBN, tidak sepantasnya jika MUI terlibat dalam kekerasan agama yang mengorbankan rakyat itu sendiri.”

Pemuatan tulisan yang menyerang MUI ini tentu bukan karena unsur ketidaksengajaan. Berkali-kali harian yang diterbitkan oleh kelompok Katholik ini melakukan hal serupa. Sikap tersebut tampaknya memang sudah menjadi ideologi Kompas selama ini.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Ridwan menilai Kompas memang menjadi alat Katholik atau missi zending. "*Jadi apa-apa yang merugikan umat Islam pasti dimuat, termasuk tulisan yang menyerang MUI*," tegasnya kepada SI. Seharusnya jika harian itu menggunakan kaidah jurnalistik yang benar, ada klarifikasi terlebih dahulu dari pihak-pihak yang akan dirugikan dari tulisan tersebut.

Ia menjelaskan, kini banyak pihak menjadi kepanjangan tangan kepen-tingan Barat yang anti Islam. Mereka dibayar untuk melakukan itu. "Jadi kalau mereka tidak anti MUI, tidak menyerang MUI maka berarti mereka tidak melak-sanakan tugasnya. Mereka tidak akan dapat proyek baru lagi. Saya kira itu yang bisa kita pahami," tuturnya.

Menanggapi tulisan Sumanto yang menuding MUI sebagai sumber keke-rasan, KH Cholil tidak bisa menerimanya. Ia kemudian mengilustrasikan rusuh musik di Bandung yang menewaskan 10 orang atau rusuh di Maluku Utara serta rusuh di berberbagai daerah yang tidak pernah dibicarakan. "*Semata-mata mereka memang sudah antipati terhadap MUI. Dia orang Islam yang tidak pernah mau membela Islam. Tapi dia orang Islam yang menjadi kepanjangan kaki tangan Barat,"* tegasnya seraya menjelaskan bahwa tidak ada hubungan antara fatwa MUI dengan kekerasan.

Jejak Kekurangajaran Dalam kasus eksekusi mati Tibo dan kawan-kawan, misalnya. Kompas hampir seratus persen menjadi corong mereka yang menolak eksekusi mati tersebut, sebagaimana tercermin melalui berbagai opini yang dipublikasikannya.

Dalam pemberitaannya, Kompas hampir tidak pernah memberikan ruang bagi mereka yang pro eksekusi mati Tibo dkk. Padahal, sudah jelas Tibo

dkk membunuh ratusan santri Ponpes Wali-songo, Poso, dengan tangannya sendiri. Dalam hal Tibo dkk hanyalah wayang yang dimainkan aktor intelektual, itu lain persoalan. Yang jelas secara pidana Tibo dkk memang terbukti membantai ratusan orang.

Keberpihakan terhadap mereka yang kontra eksekusi mati Tibo, menunjukkan bahwa sebagai media nasional Kompas tidak punya hati nurani. Harian itu bukan saja meng-abaikan amanat hati nurani rakyat yang menjadi mottonya, tetapi juga telah melukai rasa keadilan umat Islam

Contoh lain, dalam kasus pro-kontra RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Kompas jelas-jelas meng-ambil posisi kontra RUU-APP. Berbagai pemberitaan yang berkenaan dengan itu memperlihatkan dengan jelas bahwa harian itu diskriminatif. Opini yang ditampilkan juga berpihak. Misalnya, Kompas edisi 29 Maret 2006 menam-pilkan opini Siswono Yudhohusodho berjudul Negara dan Keberagaman Budaya. Siswono yang pada intinya menolak RUU APP karena meng-anggapnya salah satu produk hukum yang sangat beraroma Syari’at Islam. Menurut Siswono,

”…*Sebagai konsekuensi negara kesatuan (unitarian) yang menempatkan seluruh wilayah negara sebagai kesatuan tunggal ruang hidup bangsa, sebuah RUU juga harus didrop bila ada satu saja daerah yang menyatakan menolaknya karena tidak cocok dengan adat istiadat dan budaya setempat. RUU APP sudah ditolak di Bali dan Papua*.”

Majalah Risalah Mujahidin menilai argumen Siswono jelas terlihat dungu. Ia tidak saja mengabaikan konsep demok-rasi, tetapi mendorong munculnya tirani minoritas atas mayoritas. Bukankah Bali dan Papua minoritas? Melalui opininya itu, Siswono sengaja menekankan supaya

umat Islam yang mayoritas bila hendak membuat aturan bagi umat Islam, harus terlebih dulu meminta persetujuan ma-syarakat Bali dan Papua. Bila mereka menolak, berarti aturan itu harus juga ditolak sebagai konsekuensi dari konsep unitarian (negara kesatuan). Sebaliknya, bila orang Papua mau berkoteka, atau bila umat Hindu Bali mau menjalankan ritual musyriknya serta memaksakan pene-rapan 'syariat' Hindu kepada non Hindu di Bali, itu harus didukung dalam rangka melestarikan keluhuran budaya bangsa. Logika seperti itu, dipublikasikan Kompas tentu bukan tanpa maksud. Tidak bisa disalahkan bila ada yang menafsirkan hal itu dilakukan Kompas dalam rangka memprovokasi umat Islam Patut juga dipertanyakan, apa kualifikasi yang dimiliki Siswono sehingga gagasan dan logikanya layak ditampilkan di harian tersebut dan dalam rangka mewakili kalangan siapa?

Ketika wacana Perda Syari'at menge-muka, Kompas lagi-lagi menempati posisi strategisnya, yaitu menolak! Koran ini selalu menggunakan orang Islam untuk menentang hal-hal berbau Islam. Dalam hal perda ini, lihat saja mereka menam-pilkan Eros Djarot. Pada Kompas edisi 12 Juni 2006, Eros Djarot melalui opininya berjudul "Saatnya Duduk Bersama" menyimpulkan, perda bernuansa syari'at adalah bagian dari nafsu politik mem-bangun negara di dalam negara, dan Perda Syari'at adalah gambaran Indo-nesia yang amburadul. Perda Syari'at juga dinilai Eros sebagai "hukum lain" di luar hukum positif.

Padahal orang tahu, Eros Djarot bukan pakar hukum, sehingga tidak mengerti bahwa menyerap hukum Islam ke dalam hukum positif adalah merupakan salah satu kaidah terbentuknya hukum positif. Tentu aneh dan janggal bila hukum positif di tengah masyarakat yang mayoritas Islam bersumber dari hukum-hukum yang diterbitkan oleh kolonialis dan imperialis. Apalagi, hukum Islam sudah diberlakukan bagi masya-rakat

Islam di kawasan Nusantara ini jauh sebelum kemerdekaan NKRI. Eros Djarot juga bukan pakar sejarah, sehingga ia tidak tahu bahwa orang Islam di Indo-nesia telah menerima dan menerapkan hukum Islam di dalam masyarakatnya secara menyeluruh, dan diperbolehkan pemerintah kolonial Belanda, jauh sebe-lum kemerdekaan. Fakta ini diungkapkan oleh pakar hukum bangsa Belanda, LWC Van Den Berg (1845-1927).

Sejak berkumandangnya wacana per-da syari'at dan RUU APP, Kompas telah menjadi corong propaganda gerakan anti syariat dan anti Arab. Padahal, Arab dalam konteks sebagai etnik, bahasa dan nilai budaya, sudah menjadi salah satu anasir yang membentuk bangsa dan budaya Indonesia, sebagaimana Cina dan Hindu.

Corong Sepilis, Harian Kompas kian terang menjadi corong kaum Sepilis (sekularis, pluralis, dan liberalis). Melalui media inilah kaum Sepilis mengaktualisasikan pemikirannya yang menyerang Islam dan kaum Mus-limin. Hanya saja, sebagai corong Sepilis, dalam prakteknya Kompas juga tidak konsisten, karena hanya mau menerima opini dari satu warna saja yaitu warna sepilis.

Paling sering Kompas mempub-likasikan opini dari Ulil, Sukidi, Nur-cholish, Dawam, Gus Dur dan sejenisnya. Tidak terlihat Kompas punya itikad baik mau menyodorkan warna yang berbeda dengan menampilkan penulis yang terbukti mampu mematahkan argumen nama-nama tadi.

Mungkin Kompas berpikir sedang memberikan kontribusi di dalam mencip-takan Indonesia yang damai dan santun dengan mempublikasikan tulisan (opini) yang disumbangkan kaum Sepilis. Patut diduga, diskresi itu justru membuat panas situasi. Jangan-jangan memang Kompas ini sedang

memantikkan api yang bisa membakar situasi ketegangan horizontal di Indonesia.

http://khabarislam.wordpress.com/2008/10/04/gaya-kompas-mengobarkan-permusuhan/

G. SEJAK AWAL TEMPO ANTI ISLAM

MUI: Majalah Tempo Anti Islam

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan, kreator dan penulis yang terkait dalam laporan utama Majalah Tempo edisi terbaru anti-Islam.

Setidaknya MUI menyebutkan ‘anti Islam” ini dalam dua dari sembilan butir klarifikasinya terhadap laporan utama Majalah Tempo, edisi 24 Februari – 2 Maret 2014. INILAHCOM menerima klarifikasi MUI itu pada Rabu (26/2).

Butir 1:

Cover dengan Judul “ASTAGA LABEL HALAL”. Petinggi Majelis Ulama Indonesia ditengarai memperdagangkan Label Halal. Tempo melacak hingga Austrlia dan Belgia. Dengan Gambar Makanan Kaleng Bergambar Babi yang dicap logo Halal MUI, sangat menyakitkan umat Islam yang membacanya. Ditambah lagi dengan karikatur Binatang Babi “ada cap Haram Bos”, dan kotoran sapi dimasukan ke dalam kaleng yang bertuliskan MUI, maka lengkaplah tuduhan kepada MUI yang dianggap memperdagangkan label Halal. Kreasi Tempo melecehkan umat Islam dengan menuduh MUI mempermainkan label Halal hanya dibuat oleh

pihak tertentu yang anti Islam.

Butir 8:

Dan lebih dari itu Tempo telah menulis dengan narasi dan karikatur yang sangat menyakitkan hati ulama dan umat Islam sepertinya penuh kebencian terhadap MUI yang seperti itu hanya ditulis oleh orang anti Islam.

Sejak Awal Tempo Anti Islam

Kendati sudah berulang-ulang dibuktikan, bahwa jatidiri sejati majalah Tempo, yang sinis bahkan anti Islam, sekaligus menjalan misi Barat, namun toh apa yang dibeberkan secara telanjang oleh buku berjudul "Kekerasan Budaya Pasca 1965″, karya Wijaya Herlambang, seorang dosen Universitas Pancasila dan Gunadarma (terbit November 2013), tetap membuat terperangah buat umat Islam yang membacanya.

Majalah Tempo sebelum dibreidel 1994, dengan sangat teratur selalu membangun opini dengan semangat yang sinis dan melawan Islam dengan caranya. Pemikir Islam menyadari sejak lama, tapi tak mampu manangkalnya karena tidak memiliki media massa yang sepadan, sementara sebaliknya Tempo tidak sendirian menghantam aspirasi Islam, malah dengan bahu-membahu bersama harian Kompas.

Umat bagai tak berdaya menghadapi ejekan, sinisme, penghinaan sampai serangan yang justru membatalkan slogan yang mereka banggakan sendiri sebagai suara hati nurani, jurnalisme berimbang dan obyektif yang semuanya adalah omong kosong. Ejekan kepada Islam, pernah dilontarkan secara 'konyol-konyolan' seperti dilakukan Arswendo Atmowiloto yang

menghina Nabi Muhammad Saw dengan memajang survei tokoh yang menempatkan popularitas Nabi Muhammad Saw di bawah popularitas Arswendo.

Setelah geger hebat dan menjebloskan pimpinan Tabloid Monitor—bagian Kompas Grup– itu ke dalam penjara, dua tahun kemudian Kompas secara sengaja malah membuat laporan yang tendensius sangat menghina Islam ketika membuat laporan menjamurnya kompleks pelacur di dekat lokasi kandang babi di Batam. Pelacur di dekat kandang babi yang diwawancarai itu diberi nama samaran: Aminah. Nama Aminah tampak sengaja dipilih, padahal nama ini dihormati umat Islam sebagai ibunda Rasulullah. Kenapa tidak dipilih nama samaran pelacur selazimnya seperti: Dora, Lince, atau Betty. Mengapa Aminah? Mereka ingin mengejek Islam. Padahal niscaya umat Islam melalui tulisan atau lisan tak mungkin mengejek Ibunda Yesus, yang buat umat Islam adalah Siti Maryam yang amat mulia.

Tempo dalam sajiannya sangat tendensius mengangkat berita tertentu menyudutkan Islam, misalnya kasus Komando Jihad, Teror Warman, Peristiwa Tanjung Priok, Lampung hingga Aceh. Yang mencolok saat heboh kasus Salman Rushdi dengan karyanya" The Satanic Verses" yang sangat menghina Nabi Muhammad Saw dan Islam, Tempo melalui tulisan-tulisan Goenawan Mohamad sangat membela Salman Rushdi dengan dalih Freedom of Expression. Pemimpin Tempo yang dipuja-puja anak buahnya dengan panggilan takzim: GM, malah menantang dirinya tidak takut jika diintimidasi umat Islam karena membela Salman Rushdi.

Sudah biasa jika Tempo menampilkan ilustrasi cover yang sangat menghina Islam. Tatkala membahas kekuatan politik Islam, Tempo menampilkan illustrasi Bulan Bintang yang dililit kawat berduri sehingga

membangun kesan kekejaman dan kekerasan. Inilah yang juga dilakukan pada Tempo di rezim reformasi saat ini yang belum lama ini memajang gambar cover babi disandingkan dengan logo MUI. Sampai pimpinan MUI mengirim sms ke Suara Islam: "*Dulu Tempo lebih menampilkan wajah intelektual demokrasi, kini Tempo adalah menjadi sosok Kebencian yang Mendalam thd Islam dan ummat Islam. Penampilan cover Tempo dengan babi dan logo MUI adalah kekurang ajaran yang harus mnjdi perhitungan Islam—Ttd wakil sekretaris MUI*".

Sesungguhnya sejak awal Tempo tak pernah menampilkan sebagai intelektual sejati dan demokrasi yang fair. Penampilan intelektualnya sebenarnya hanya menjadi pseudo-intelektual yang kosong melompong makna dan missi sejati intelektualisme. Walau demikian, banyak anak-anak muda Islam yang "terjeblos" menjadi wartawan Tempo dan terkecoh sihir intelektual gaya Tempo ini. Tatkala Tempo dibreidel, 1994, kader Tempo di koran Islam Republika, menganggap Tempo sebagai kawah candradimuka mengkader banyak wartawan besar Indonesia. Maka sang wartawan yang "katrok" itu menulis kolom berjudul Kuil Tempo dan menggambarkan Tempo bak kuil Shaolin yang mengkader para pendekar jagoan yang kini bertebaran di jagat jurnalistik.

Tatkala Kompas mengejek umat Islam pada 1992 dengan rubrik "pojok"nya yang menyebut Ijo Royo-Royo jika orang cadel menyatakan ijo loyo-loyo, masih muda sudah loyo. Sinisme itu didukung Tempo dengan GM menyajikan tulisannya di Catatan Pinggir, juga wawancara khusus Tempo dengan BJ Habibie dan menyerang sikap Habibie yang berpendapat komposisi parlemen dan kabinet—saat itu– yang belum proporsional karena umat Islam yang 88% belum atau under-representated di DPR dan kabinet. Habibie dihantamnya karena pro Islam. Soalnya dan

masalahnya, mengapa Tempo tidak berteriak-teriak ketika berpuluh tahun sebelumnya sejak 1970-an tokoh-tokoh Nasrani menguasai DPR dan kabinet Soeharto hampir 35%?

Kembali ke buku “Kekerasan Budaya Pasca 1995″, sungguh mencengangkan data ilmiah yang disajikan dalam buku itu, Tempo yang kemudian membangun Komunitas Utan Kayu (KUK) dan beranak-pianak lembaga anti Islam mainstream seperti Jaringan Islam Liberal (JIL), sebelumnya didirikan dulu Aliansi Jurnalistik (AJI), Teater Utan Kayu (TUK) dan lembaga kebudayaan Salihara dan lain-lain. Dalam buku itu dibeberkan pembiayaan lembaga filantropi Barat seperti Ford Foundation, Rockefeller Foundation, USAID, Asia Foundation, bahkan tokoh Yahudi George Soros, yang kesemua lembaga Barat itu sangat anti Islam. GM sebagai ‘otak’ berbagai lembaga itu terus terang menyatakan, ”*Kami memerlukan tempat lain untuk menyalurkan uang dan memperluas perjuangan.*“ Terungkap pembiayaan dari lembaga-lembaga Barat ini, di antaranya dari USAID mencapai 200.000 US dolar dengan bantuan lobby Arief Budiman yang memperkenalkan GM dengan tokoh USAID Mark Johnson. (baca halaman 224).

Karena GM dianggap sebagai agen imperialis Barat total, maka di kalangan orang-orang kiri yang semula bergabung bersama GM di KUK, mereka pun marah dan memisahkan diri dari GM. Tokoh yang melawan GM ini di antaranya Wowok Hesti Prabowo yang menerbitkan buletin Boemiputra yang selalu menghantam GM. Menurut Wowok,…..”Boemiputra memiliki missi menjadi media perlawanan terhadap imperialisme Barat, karena… terdapat indikasi-indikasi bahwa KUK–yang dipimpin GM—adalah agen imperialisme Barat (buku Kekerasan Budaya Pasca 1965 halaman 258). Buku ini di hal 260 juga

mengutip Boemiputra yang mengecam GM sebagai agen imperialis, kutipannya: " Teater Utan Kayu (TUK) dikenal sebagai Tempat Umbar Kelamin (TUK), agen imperialis dan pintu gerbang penjajahan di bidang budaya Indonesia kini telah mengapusi (menipu-red) seniman dan pemerintah daerah Jakarta dengan membuka cabang di Taman Ismail Marzuki (TIM) bernama Dewan Kesenian jakarta (DKJ). Dengan tipu muslihat dan cara-cara licik Goenawan Mohamad (GM) berhasil memperalat Akademi Jakarta (AJ). Alhasil DKJ pun diurusi orang-orang TUK."

Sebagai pelopor liberalisme yang tampak ngotot, KUK selama ini berhadapan dengan umat Islam, khususnya dengan membangun JIL, tapi di lingkungan seniman pun missi Liberal GM juga dihantam lingkungan seniman sendiri yakni dengan hadirnya KSI (Komunitas Sastra Indonesia) beroientasi sastra buruh, untuk menandingi TUK, dan KUK sekaligus menentang Liberalisme. Begitu juga Forum Lingkar Pena dengan pandangan Islamnya melihat Liberalisme sebagai instrumen ideologis untuk mendemoralilasi Islam. sebaliknya KSI dan Rumah Dunia melihat Liberalisme sebagai produk imperialisme Barat. Pada 20-22 Juli 2007 KSI membuat pernyataan: (1) Menolak dominasi dan arogansi dari satu komunitas kebudayaan satu terhadap yang lain; (2) Menolak eksploitasi sesksual sebagai standard estetika; (3) menolak bantuan asing yang bermaksud untuk memanipulasi identitas kebudayaan Indonesia. (Buku sama halaman 256).

Kutipan-kutipan dari buku Wijaya Herlambang di atas menegaskan sosok Tempo khususnya GM yang sejatinya tak pelak menjalankan missi Barat dengan agenda Liberalisme. Dengan missinya itu GM, niscaya selalu berlawanan dengan aspirasi Islam yang notabene merepresentasikan rakyat

terbesar negeri bernama Indonesia ini.

http://m.suara-islam.com/mobile/detail/10300

Kegigihan Tempo Menghina Islam

Untuk menyegarkan kembali ingatan, artikel Tempo tentang ‘Surat Terakhir Dari Putri” menyakitkan umat Islam Indonesia, khususnya masyarakat Aceh.

Dengan simplifikasi yang buru-buru dan tanpa penelitian yang mendalam, Tempo langsung mengambil kesimpulan:

“*Terlepas dari penyebab kematiannya, banyak pihak berharap agar Putri menjadi korban terakhir dari penerapan qanun yang dibuat dan diterapkan tanpa memperhatikan perlindungan atas hak-hak anak.*”

Tulisan yang dibuat Jajang Jamaludin dan Imran MA ini juga menyimpulkan: “Kematian Putri menjadi kian tak biasa karena berkaitan dengan penerapan hukum syariah di Bumi Serambi Mekah..

Misi Tempo yang anti syariat Islam ini makin jelas, dengan ditampilkannya artikel kedua tentang kasus di Aceh itu dengan artikelnya : “Diskriminasi Sana Sini”.

Dalam alinea pertama, Tempo menulis: “Kematian Putri Erlina tak hanya mengundang belasungkawa dari masyarakat biasa. Lebih dari itu, kematian remaja 16 tahun ini juga memantik kembali perlawanan kalangan aktivis perlindungan anak dan perempuan terhadap peraturan yang mereka anggap

diskriminatif. “*Putri menjadi korban kebijakan diskriminatif atas nama moralitas dan agama*,” kata Komisioner Komisi Nasional Perempuan Andy Yentriyani dalam siaran persnya, Jumat pekan lalu.

Artikel itu kemudian ditutup dengan: “Karena itulah Andy mendesak agar aturan aturan yang diskriminatif dan sangat merugikan tersebut segera direvisi. Sesuatu yang juga sejak dulu diteriakkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.”

Dan kebijakan Tempo yang sinis terhadap syariat Islam itu makin terlihat jelas dengan Catatan Pinggir yang dibuat ‘god father-nya’ Goenawan Mohamad. “Mengenang Putri, 16 tahun, yang bunuh diri setelah dituduh sebagai pelacur oleh polisi syariah di Langsa, Aceh,” kata Goenawan mengawali catatannya.

Kebijakan Tempo anti Perda Syariah dan Undang-Undang yang Islami ini sebenarnya sudah lama dan nampak terang benderang pada Tempo edisi 4 September 2011, dengan menampilkan judul liputan khusus: Perda Syariah Untuk Apa. Kebijakan redaksinya nampak dalam kolom opininya yang menyatakan:

“*Indonesia tampaknya bukan tempat yang tepat untuk menegakkan hukum yang berlatar belakang syariah. Lihat saja penerapan aturan-aturan baru bernuansa keagamaan itu. Ketentuan itu diterapkan secara diskriminatif: begitu tegas terhadap masyarakat kelas bawah, tapi tidak bergigi manakala harus berhadapan dengan pelanggar aturan dari kalangan elite atau masyarakat kelas atas. Inilah antara lain kritik terhadap penerapan syariah Islam yang telah berjalan lebih dari sepuluh tahun di Bumi Serambi Mekah, Aceh. Hampir semua hukuman hanya mengena pada*

masyarakat kelas bawah."

Tempo menutup kebijakan redaksinya itu dengan: "Lahirnya aturan-aturan syariah ini barangkali lebih efektif ketimbang dakwah puluhan tahun para kiai di kampung-kampung. Sebab aturan-aturan itu menggunakan tangan-tangan perkasa pemerintah (daerah) untuk memaksa para perempuan setempat mengenakan kerudung dan pakaian yang Islami, atau memaksa pasangan yang hendak menikah belajar membaca Al Quran lebih serius. Namun kemungkinan besar aturan-aturan itu tidak sanggup menjawab persoalan substansial yang sedang dihadapi bangsa ini, seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan dan korupsi."

Majalah Tempo yang dikenal dengan majalah investigasi ternama, ternyata dalam kasus bunuh diri Putri di Langsa Aceh ini melakukan simplifikasi yang buru-buru dan dipaksakan. Tempo tidak berusaha mengadakan penyelidikan yang mendalam tentang kasus ini dan mengambil kesimpulan bahwa kasus bunuh diri itu karena berkaitan dengan penerapan hukum syariah di Bumi Serambi Mekah.

Tempo Bukan Media Rujukan

Dosen STID Moh Natsir, Nuim Hidayat ketika dimintai tanggapannya soal pemberitaan Majalah Tempo edisi 17-23 September 2012 tentang kasus kematian Putri Erlina yang berujung terhadap upaya melemahkan penegakan syariat Islam di Aceh dan sejumlah daerah di Tanah Air, mengatakan majalah itu telah menyakiti umat Islam. Menurutnya Tempo telah gegabah dengan menurunkan berita yang berjudul "Diskriminasi Sana-Sini".

Sebelumnya Dinas Syariat Islam Kota Langsa juga menyatakan keberatannya atas pemberitaan majalah yang digawangi tokoh JIL yang bernama Goenawan Muhammad itu. Dalam temu persnya, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa Aceh, Ibrahim Latief mengatakan, kematian Putri Erlina tidak ada sangkut pautnya dengan penerapan syariat di Aceh.

Nuim Hidayat menilai, jurnalis Tempo yang menulis berita itu, tidak mengadakan penelitian mendalam kepada pihak-pihak yang terkait dengan kematian Putri Erlina, apakah itu keluarga, teman dan sahabat, guru-guru, dan dinas syariat Islam kota Langsa itu sendiri.

"*Dinas syariat Islam di kota Langsa tak pernah mengatakan bahwa korban adalah pelacur. Kalau ada media massa lokal di Aceh yang mengatakan bahwa kematian Putri Erlina terkait dengan penerapan syariat Islam di sana, itu bukanlah tanggung jawab lembaga tersebut atas efek negatif dari pemberitaannya*."

Kesimpulan majalah Tempo yang mengatakan kematian Putri Erlina terkait dengan penerapan syariah Islam, patut dianalisis lebih lanjut, karena belum pernah ada sebelumnya orang-orang yang terkena razia syariah bunuh diri, padahal dinas syariah kota Langsa sudah menahan banyak sekali pelaku pelanggar syariah di sana.

Kemudian faktor penyebab Putri Erlina bunuh diri juga patut diteliti, apakah alasannya membunuh dirinya sendiri?

Bagaimana kondisi kejiwaan sang korban, bagaimana hubungan korban dengan keluarganya, apakah korban terkena kasus lain yang menyebabkan dia bunuh diri, menyusul ditahannya korban akibat pelanggaran syariah

oleh dinas penegak syariah di sana?

Lalu penjelasan di surat wasiatnya yang mengatakan korban tidak menjual dirinya, apakah penyebabnya karena tudingan pelacur dari media massa atau dari dinas syariah itu sendiri?

Nuim yang merupakan adik Adian Husaini ini menggarisbawahi, sebagai media massa Tempo harus selalu menyajikan berita yang adil dan berimbang, to cover both side, mengingat efek pemberitaannya kepada masyarakat luas, khususnya bagi kalangan yang tidak mengerti tentang syariah Islam.

Menurut Nuim, diterapkannya syariah Islam justru membawa kemajuan bagi masyarakat Aceh. Syariah Islam yang sudah diterapkan di Aceh sejak zaman Samudera Pasai dahulu, terbukti ampuh mengatasi kriminalitas, kerusakan akhlak dan moral masyarakat, dan melawan penjajahan Belanda serta akibat buruk di baliknya (program pemurtadan di sana).

Nuim menyadari masih adanya kelemahan dalam upaya penegakan syariah di sana, tapi setidaknya Aceh lebih kondusif dan aman sekarang di bawah hukum Syariah ketimbang daerah-daerah lainnya yang tidak menggunakan hukum Syariah.

Nuim pun menantang Tempo untuk mengadakan survei secara nasional dengan obyektif. Membandingkan faktor kriminalitas dan amoralitas; korupsi, pemerkosaan, pencurian, perampokan, tawuran remaja, seks bebas, penggunaan narkoba dan miras, penyebaran pornografi dan pornoaksi, aktivitas pelecehan agama, dan sebagainya, antara daerah yang tidak menggunakan syariah Islam dengan Aceh, yang menggunakan

syariah Islam.

Jika sedikit-sedikit Tempo mengaitkan keburukan-keburukan yang menimpa Aceh dan masyarakatnya terkait penegakan syariah, Tempo harus berani menarik kesimpulan bahwa di daerah-daerah non penegakan syariah pun, tingginya kasus-kasus kriminalitas dan amoralitas di sana, adalah akibat diterapkannya hukum sekuler.

Nuim dan dinas syariah kota Langsa akan selalu berkomitmen untuk melawan penyebaran ide-ide Islamofobia yang diusung media massa nasional (dan internasional), apapun medianya.

Terakhir Nuim menyerukan dan mendorong agar penegakan syariah Islam ditingkatkan kualitasnya, mulai dari kualitas guru agama, para penegak syariah dan dinas yang terkait, hingga pengambil kebijakannya, sehingga penegakan syariah bisa dirasakan manfaatnya oleh segenap warga Aceh. Desastian/db

H. SOFJAN WANANDI MENGHINA PESANTREN

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menuding tenaga kerja di Indonesia tidak produktif, karena yang lulus Sekolah Dasar (SD) tidak banyak yang melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP), kemungkinan mereka masuk pesantren atau jadi "teroris". Pada acara Grand Launching Partnership Citibank N.A dan Mandiri Investasi, Kamis 18 April 2013 lalu, Sofjan Wanandi menyatakan:

"*Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih kurang. Pasalnya, masih sekira 60 persen hanya lulus SD dan SMP. Apabila yang lulus SD sekitar*

***16 ribu orang, dan dari 16 ribu tersebut 8 ribu siswa melanjutkan ke SMP. Nah sisanya ke mana? Sisanya mungkin ke pesantren dan ada juga yang jadi teroris*.**"

Pernyataan Sofjan Wanandi alias Liem Bian Koen itu telah melecehkan bangsa Indonesia dan penistaan terhadap seluruh pesantren di negeri ini. Oleh karena itu, ketua Apindo tersebut harus membuktikan kebenaran pernyataannya itu dengan menunjukkan fakta dan data yang konkret. Apabila dia berbohong dan tidak mampu menunjukkan data dan fakta, maka hak umat Islam untuk menyeretnya ke pengadilan.

Apakah orang-orang miskin yang tidak masuk ke pesantren akan menjadi lebih baik dan lebih bermartabat nasibnya? Empat orang preman yang membunuh kopasus, dan kemudian dibunuh di Lp Cebongan Yogyakarta itu, bukan lulusan pesantren.

Lalu mengapa tenaga kerja dan yang rendah pendidikannya dikaitkan dengan teroris? Bukankah massa yang menyerang Kapolsek di Medan, yang merusak kantor polisi, atau massa yang membunuh Ketua DPRD Medan, bukan lulusan pesantren.

Fakta menunjukkan, sejak zaman orba hingga orde reformasi, para penjahat yang merusak perekonomian Indonesia bukan para buruh, bukan pula orang-orang miskin yang tidak sekolahan itu.

Para penjahat kerah putih, hampir semuanya konglomerat China yang bersekongkol dengan penguasa maupun pejabat di negeri ini, dan terbukti telah menyengsarakan rakyat Indonesia.

Bukankah kasus BLBI pelakunya adalah konglomerat China. Termasuk PT Ghalia yang menyebabkan kekacauan Ujian Nasional 2013 yang merugikan siswa sekolah seluruh Indonesia, pemiliknya konglomerat China juga.

Oleh karena itu, Sofjan Wanandi yang bernama China Liem Bian Koen itu harus mencabut pernyataannya tersebut, dan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia yang gagal mengenyam pendidikan sekolah akibat kemiskinan; dan meminta maaf kepada pesantren seluruh Indonesia. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka umat Islam, bangsa Indonesia, harus menggugat pernistaan dan pelecehan SofjanWanandi tersebut. Irfan S Awwas, Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin.

I. KORAN CSIS MENGHINA ISLAM

Seperti diberitakan Tempo, Kamis (3/7) lalu, Dimas –sapaan akrab Meidyataa Suryodiningrat- menyatakan dukungan itu dilakukan setelah melalui pertimbangan yang matang. "*Dukungan kepada calon presiden baru pertama kali dilakukan dalam sejarah The Jakarta Post*," ujarnya.

Menurutnya, keputusan itu diambil para direktur dan editor senior setelah melihat Pilpres 2014 sangat penting. "*Kami menyatakan dukungan karena melihat pemilihan presiden kali ini begitu penting dalam menentukan masa depan Indonesia*," tambahnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dukungan kepada Jokowi diberikan karena ia memiliki kesamaan ideologi dengan The Jakarta Post. Dimas menyebutkan ada empat hal penting yang menjadi pertimbangan The Jakarta Post. Joko Widodo dianggap lebih memiliki nilai-nilai pluralisme, tidak memiliki

masalah hak asasi manusia (HAM), mendukung perbaikan masyarakat sipil, dan setia pada semangat reformasi. “Hal tersebut tidak kami lihat dimiliki oleh pesaingnya,” ujarnya.

Di hari yang sama, The Jakarta Post memuat karikatur di halaman 7 dengan gambar bendera berlafaz ‘laa ilaha illallah’ dengan logo tengkorak di bawahnya. Di dalam logo tengkorak khas bajak laut itu, tertera tulisan ‘Allah, Rasul, Muhammad’.

Selain bendera yang menghina simbol Islam, karikatur itu juga menampilkan menampilkan lima orang dalam posisi berlutut dengan mata tertutup kain di tanah dan tangannya terikat di belakang dalam posisi ditodong senjata.

Tim S dan Pendukung Jokowi Banyak Hina Islam. Sebelumnya, sejumlah pendukung Jokowi juga menyinggung umat Islam dengan pernyataan-pernyataan yang dinilai menghina Islam.

Ahad (15/6) lalu, Wimar Witoelar yang merupakan salah satu Tim S Jokowi-JK memposting sebuah foto di akun Facebooknya. Isinya, berupa foto yang memerlihatkan Prabowo Subianto dan elite koalisi Merah Putih yang dipadukan dengan tokoh terorisme.

Foto status Wimar

Foto rekaan tersebut memperlihatkan Prabowo bersama Hatta Rajasa bersama serta elit partai pendukungnya. Seperti Anis Matta, Aburizal Bakrie, Suryadharma Ali hingga Tiffatul Sembiring. Terdapat juga tokoh Islam ‘garis keras’ seperti Ketua FPI Habib Rizieq Shihab dan Abubakar

Ba’asyir.

Di bagian atasnya, tampak beberapa tokoh terorisme. Misalnya, terpidana mati kasus bom Bali Imam Samudera dan Amrozi. Ada juga pimpinan Alqaidah Osama bin Laden. Tokoh-tokoh tersebut mengapit mantan presiden Soeharto yang juga merupakan mantan mertua Prabowo.

Sementara di bagian bawah, terpampang logo partai dan beberapa ormas Islam. Seperti Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Selain itu, Wimar juga memberikan komentar di foto itu. “Gallery of Rogues.. Kebangkitan Bad Guys”

Ketua Tim Bidang Hukum Pemenangan Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada 4 Juni 2014 menyatakan PDIP menolak munculnya perda syariat Islam baru, kecuali di Aceh. Karena dianggap tak sejalan dengan ideologi yang dianut PDI Perjuangan. Selain itu, syariat Islam juga bertentangan dengan UUD 1945.

Perda syariat Islam dinilai bakal menciptakan dikotomi tatanan sosial di masyarakat. Ujung-ujungnya, perda syariat Islam dianggap bakal menganggu kemajemukan NKRI yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika.

Sedangkan Tim S Jokowi lainnya, Musdah Mulia, sempat mengatakan Jokowi-JK siap mencabut TAP MRPS No. XXV/1966 tentang larangan paham komunisme, demi membangun Indonesia tanpa diskriminasi. Ia juga mengusulkan penghapusan kolom agama di KTP dan menghalalkan kaum gay hidup di Indonesia.

Inikah pluralisme yang menjadi ideologi mendukung Jokowi seperti kata The Jakarta Post? Na'udzu billah.

J. JAKARTA POST, TEMPO DAN KOMPAS ANTI ISLAM

Media yang dikuasai kaum sekuler, pluralis, dan liberalis (Sepilis) memang tidak henti-hentinya berusaha memadamkan cahaya Allah. Mereka tidak segan-segan menurunkan berita, artikel, foto atau gambar yang menghina dan melecehkan Islam. Kasus terbaru dilakukan The Jakarta Post (JP) yang memuat kartun menistakan Islam dan ummatnya.

"*Apa yang dilakukan Jakarta Post sekali lagi mengkonfirmasi kebenaran firman Allah dalam QS al Baqoroh: 120 dan QS Ali Imron: 118-120, bahwa musuh-musuh Allah memang sangat membenci Islam dan ummatnya. Ada framing dan agenda setting dari media-media mainstream yang dikuasai kelompok anti-Islam untuk terus menyudutkan Islam dan ummatnya*," ujar Edy Edy Mulyadi, Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah KMJ, di kantor redaksi The Jakarta Post, Selasa (7/8/2014) menanggapi pemuatan kartun di JP yang menghina Islam.

Pada QS al Baqoroh: 120 Allah berfirman, "*Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.*"

Sedangkan pada QS Ali Imron: 118 firman Allah, "*Hai orang-orang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-*

orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya."

"*Saya tidak yakin redaksi bisa seceroboh itu menurunkan kartun yang sangat menghina Islam dan ummatnya. Mereka bisa saja mengaku teledor, ceroboh, dan khilaf. Silakan saja kalau mereka menyatakan sama sekali tidak bermaksud menghina Islam. Tapi, saya lebih percaya firman Allah yang pasti benar dan tidak ada keraguan sedikit pun*," tukas Edy.

Edy datang bersama rombongan dari Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) memrotes keras pemuatan kartun yang menghina Islam dan ummatnya. Mereka yang berjumlah sembilan orang diterima Pemimpin Redaksi JP Meidyatama Suryodiningrat, di kantor redaksi, Jakarta, Selasa (8/7). Dia didampingi sejumlah jurnalis, antara lain redaktur senior Endy M Bayuni dan dari desk opini Ati Nurbaiti.

Menurut Endy, saham The Jakarta Post dimiliki empat kelompok besar. Yaitu pasangan Sofjan dan Jusuf Wanandi, harian Kompas, Majalah Tempo, dan harian Suara Pembaruan.

Sofjan dan Jusuf Wanandi dikenal sebagai pentolan Center for Strategic and International Studies (CSIS). Lembaga kajian ini berdiri pada 1971 dan sangat dominan dalam memberi arah kebijakan pembangunan di masa Orde Baru. CSIS dinilai banyak merekomendasikan kebijakan yang merugikan dan menyudutkan kepentingan Islam dan ummat di Indonesia.

Sedangkan Kompas dikenal sebagai media milik sejumlah tokoh katholik, antara lain Jakob Oetama. Kendati tidak secara vulgar, kebijakan redaksi Kompas sering dikeluhkan para aktivis Islam. Tempo sendiri adalah majalah yang setali tiga uang dengan Kompas. Di bawah Goenawan Muhamad, pemberitaan Tempo seringkali sumir kalau sudah menyangkut Islam dan ummat Islam di Indonesia.

Sementara itu, Suara Pembaruan dimiliki keluarga Lippo yang dikenal sebagai nashrani. Saat ini James Riadi diketahui menjadi salah satu tokoh nonmuslim di balik pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014.

K. MEDIA GROUP ANTI ISLAM

Di bawah ini adalah kultwit dari seorang mantan Wartawan & Penulis Editorial Media Indonesia bernama Edy A. Effendi berisi kesaksian selama bekerja di stasiun Metro TV, terkait isu Rohis sebagai tempat rekrutmen teroris dan isu-isu yang menyudutkan Islam melalui akun twitter @eae18:

1. Ini terkait berita Metro TV yg menyudutkan sekolah umum jd sarang teroris. media hrs obyektif. itu hak publik.
2. sdh untuk kesekian kali @Metro_TV n Media Indonesia menyudutkan Islam. Sdh berkali2 juga disomasi n diprotes tp tak kapok.
3. bnyk berita yg diprotes n disomasi tp mrk bergeming. Sy akan paparkan bebrapa fakta bkn krn sy benci agama lain.
4. bg sy agama adlh hak individu.sy hny ingin melihat media massa jgn jd alat menikam agama lain. hrs dibebaskan..
5. ..media massa hrs dibebaskan dr kepentingan agama. media massa bertugas mereportase isu warga. bkn mendistorsi.
6. pada era 2000-an, di mana sy bekerja di Media Indonesia, ada empat

sekawan yg berperan dlm soal isu agama.

7. Andy F Noya, Saur Hutabarat, Elman Saragih n Laurens Tato, kebetulan mrk non muslim n pengendali media grup.
8. 4 petinggi inlah yg punya peran pnting mngakses berita.Surya Paloh tk tahu mnahu.SP jg tk tahu kl bbrpa x dsomasi.
9. sbg mantan penulis editorial, sy tahu persis, bgaimana berita dimainan.sy protes soal rekruitmen yg berbau SARA.
10. rekruitmen reporter sngat berbau SARA. Di rapat besar, sy protes ke Elman..
11. rekruitmen reporter yg diterima bnyk non muslim? Elman kaget.Dia blg sepanjang sy kerja di media baru kali ini dikritisi soal ini.
12. jk ada 6 reporter yg diterima, komposisinya, 2 Protestan, 2 Katolik, 2 Islam. Ini fakta bkn fiksi. saksi bnyk.
13. desk redaksi yg strategis pn ditempati non muslim.polkam, metropolitan n mingguan.di SDM n level asred eks sama.
14. akhirnya sy masuk tim seleksi reporter. ujung2nya di HRD dijegal jg.Taufiqulhadi pnh protes jg soal rekruitmen.
15. meski saur n andi tak aktif lg tp msh jd berdiri di balik layar.knp tak tegas saja, Media Grup anti Islam.
16. ada puluhan wartawan senior n yunior keluar. alsan utamanya terkait manipulasi jamsostek dr 1995-2005.
17. sy keluar, lbh bnyk soal SARA n sikap diskriminasi elit.sy sdh bicara di Kenduri Cinta Cak Nun, TIM akhir 2007.
18. Wahai pejuang anti SARA, knp kalian bungkam? Takut tak diekspos? Tak populer? Kalian sangat diskriminatif.
19. ketika menyudutkan demo PKS. Elman di editorial pagi Metro bln yg demo anti AS tak beradab dan bodoh.
20. pernah jg soal editorial yang menghina umat Islam Palestina. Umat Islam Ind tak perlu bela Palestin. penulisnya Laurens Tato.

21. jd kl ada demo PKS meski sngat massif tak boleh dipajang di hal 1.
22. pernah PKS demo besar-besaran memrotes Bill Clinton ke Indoesia. Pas rapat redaksi, Yohanes Widad, asredpel, meminta foto jgn dipasang hal 1.
23. mrk tak suka PKS.
24. Elman Saragih pernah sy tunjuk2 mukany di Lobby 2 Metro TV krn soal SARA. Badan gede nyali kecil. Husen H saksi.
25. jadi JANGAN HARAP ada berita yg FAIR dr METRO TV jk bicara soal ISLAM. Sy tak benci Kristen tp benci konspirasi.
26. Bagi sy, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Syiah, Ahmadiyah, itu hak privat. Tp berita yg obyektif itu, hak publik.
27. SEKALI lagi bg pejuang anti SARA, knp kallian bungkam? Kalian serang isu SARA hny krn kepentingan politik?
28. Sekali lg, sy tak benci Kristen. Sy melawan media dijadikan mainan berbau SARA. Bersikaplah fair n obyektif.
29. Sy skdar ingatkan ke kawan2 sy, @ulil @fadjroel @TodungLubis, apa arti SARA n toleransi? kalian bungkam!
30. Mana @RatnaSpaet yang sok pejuang anti SARA. Apa kejadian di media grup bkn SARA?
31. di sini bkn soal damai atau tak damai tp media itu hrs obyetif. bkn lakukan diskriminasi.
32. sy penulis terbaik editorial gelombang dua n kebetulan dpt beasiswa menulis di AS.
33. Scr kbtulan sy penulis terbaik editorial gelombang 2, setelah 3 hari masuk pelatihan. Jd ada alsan sy bicara #BeritaMetroTV.
34. sy dulu di Media Indonesia. Tp Metro TV n MI satu kantor dan selalu kerja sama pemberitaan.
35. Sdh lama, sy siap lahir batin melawan Elman cs. Kultwit sy soal Media Grup bkn dendam atau apapn. Tp ulah mereka sdh di luar batas.

REFERENSI

Abrar Yusra, Azwar Anas: Teladan dari Ranah Minang, penerbit Kompas Gramedia.

Abun Sanda, Sofjan Wanandi, Aktivis Sejati, Penerbit Kompas Gramedia.

Agus Sopian, dkk, Jurnalis Sastrawi: Antologi Liputan Mendalam dan Memikat, Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Benny Moerdani Yang Belum Terungkap, penerbit Tempo-Kepustakaan Populer Gramedia.

Bill Tarrant, Reporting Indonesia, The Jakarta Post Story 1983 – 2008, Equinox Publishing.

Cosmas Batubara, Sebuah Otobiografi Politik, Penerbit Kompas – Gramedia.

Dewi Anggraeni, Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan, penerbit Kompas Gramedia.

Dian Andika Winda, Efantino Febriana. Perang Sejarah Para Jenderal: Kesaksian Para Jenderal Atas Prahara Mei 1998 dan “Isu Kudeta”. Penerbit Pustaka Timur.

Dr. John Coleman, Rothschild Dynasty, penerbit Change Publication.

Dwipayana dan Ramadhan KH., Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan

Saya, penerbit PT Citra Lamtoro Gung Persada.

Forum Komunikasi Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Indonesia. Manuver Politik: Sofjan Wanandi & CSIS. Penerbit Forum Komunikasi Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Indonesia.

Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia, Equinox Publishing.

Hendro Subroto, Operasi Udara di Timor Timur, penerbit Kompas-Gramedia.

-------------------, Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, penerbit Kompas-Gramedia.

Hermawan Sulistiyo. Palu Arit di Ladang Tebu. Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia.

Heru Cahyono, Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 74, penerbit Sinar Harapan.

-------------------, Peranan Ulama dalam Golkar 1971-1980: Dari Pemilu sampai Malari, penerbit Sinar Harapan.

Ishadi SK, Media & Kekuasaan, Televisi Di Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto, penerbit Kompas Gramedia.

Iswandi Syahputra, Rezim Media: Pengulatan Demokrasi, Jurnalisme dan Infotaimen Dalam Industri Televisi, penerbit Kompas Gramedia.

Janet E. Steele, Wars Within: The Story of Tempo, an Independent Magazine in Soeharto's Indonesia, Equinox Publishing.

Julius Pour dan Tim Scott, Benny Moerdani, Profile of a Soldier Stateman, penerbit Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman.

Jusuf Wanandi, Shades of Grey, A Political Memoir of Modern Indonesia 1965 – 1998, Equinox Publishing.

------------------, Menyibak Tabir Orde Baru, Memoar Politik Indonesia 1965 – 1998, penerbit Kompas.

Kiki Syahnakri, Timor Timur The Untold Story, penerbit Gramedia.

Lee Kuan Yew, From Third World To First, The Singapore Story: 1965-2000, Marshall Cavendish Editions.

M. Fachrudien, Mereka Tentang Sjafrie Sjamsoedin, penerbit Kompas Gramedia.

Massa Misterius Malari: Rusuh Politik Pertama Dalam Sejarah Orde Baru, penerbit Tempo Publishing.

Metta Dharmasaputra, Saksi Kunci, penerbit Tempo.

Rahasia-Rahasia Ali Moertopo, penerbit Tempo dan Kompas-Gramedia.

Retnowati Abdulgani-Knapp, Soeharto, The Life and Legacies of Indonesia's Second President, Marshall Cavendish Publishing.

------------------------------------, Soeharto, Kehidupan dan Warisan Peninggalan Presiden Indonesia Kedua, penerbit Hasta Pustaka.

R.E. Elson, Suharto Sebuah Biografi Politik, penerbit Pustaka Minda Utama.

-------------, Suharto: a Political Biography, Cambridge University Press.

Richard Borsuk, Nancy Chng, Lim Sioe Liong's Salim Group, The Business Pillar of Suharto's Indonesia, ISEAS Publishing.

------------------------------------, Lim Sioe Lioang dan Salim Group, Pilar Bisnis Suharto. Penerbit Kompas Gramedia.
R.O. Tambunan, Otobiografi Politik RO Tambunan: Membela Demokrasi, terbitan TPDI.

Salim Said, Dari Gestapu Ke Reformasi, Serangkaian Kesaksian, penerbit Mizan.

Slamet Singgih, Intelijen: Catatan Harian Seorang Serdadu, Penerbit Kata Hasta Pustaka.

Sugianto Sastrosoemarto dan Budiono, Jejak Soekardjo Hardjosoewirjo di Taman Impian Jaya Ancol: Sebutir Telur Bebek dari Tambakboyo, penerbit Kompas Gramedia.

Susilo Bambang Yudhoyono, Selalu Ada Pilihan, penerbit Kompas-Gramedia.

Tun Dr. Mahathir Mohamad, A Doctor In The House, MPH Publishing.

The Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor (CAVR), Laporan Chega.

Ventje H.N. Sumual, Memoar, penerbit Bina Insani.

Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film, penerbit Marjin Kiri.

Wiranto, Bersaksi Di Tengah Badai: Dari Catatan Wiranto, Jenderal Purnawirawan, penerbit IDE INDONESIA.

Wiwoho dan Banjar Chaeruddin, Memori Jenderal Yoga, penerbit PT Bina Rena Pariwara.

Majalah, Koran dan Website:

Majalah Tempo

Majalah Gatra

Harian Rakyat Merdeka

www.nytimes.com

www.tempo.co

www.aktual.co (sekarang: www.aktual.com)

www.tikusmerah.com

www.kompas.com

www.gebraknews.com

www.kompasiana.com

www.zoominfo.com

www.library.oihou.edu/indopubs/

www.inilah.com

www.rmol.co

www.okezone.com

www.wikileaks.org

www.smh.com.au

www.facebook.com

www.minihub.org/siarlist/

www.etan.org